



Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kuantan Singingi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TAHUN 2025-2029

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2025-2029





BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c dan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permerdagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau

Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 54);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2030;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan 2030;
- (2) RPJMD disusun mempedomani RPJMN, RPJPD dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi, Misi, dan Sasaran
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V. PENUTUP

- (2) Ketentuan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya;
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil capaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjadi kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai rujukan penyusunan RKPD tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah Tahun 2030-2034.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
NOMOR : 5.46.A / 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjenjang, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dalam pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 263 ayat (3) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah meliputi ketentuan umum, substansi RPJMD, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, ketentuan penutup dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :

- a. merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dan gambaran keuangan daerah;
2. Merumuskan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data/informasi capaian kinerja pembangunan daerah;
3. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih;
4. Melakukan telaah terhadap sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 khususnya pada tahap Pertama (2025-2029) sebagai pedoman perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD;
5. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan indikator dan target kinerja disertai dengan pagu yang bersifat indikatif;
6. Merumuskan prioritas tahunan (2026-2030) yang akan dilaksanakan pada perencanaan tahunan;
7. Menyusun target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 57

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDALITBANG) bersama Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi ini merupakan penyempurnaan dari Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029, sekaligus mengintegrasikan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.

Secara substansi, dokumen ini berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan dan keuangan daerah, termasuk program masing-masing Perangkat Daerah. Kerangka pendanaan disusun secara indikatif untuk periode lima tahun, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024–2044.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam tahapan penyusunan hingga penetapan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029.

Teluk Kuantan, 11 September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kuantan Singingi


HENDRA ROZA, S. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197210102005011011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	5
I.3.1 Keterkaitan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau	6
I.3.2 Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Kuantan Singingi	6
I.3.3 Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	6
I.3.4 Keterkaitan dengan RIPJPD	7
I.3.5 Keterkaitan dengan Rencana Sektoral	7
I.4 MAKSUD DAN TUJUAN	7
I.4.1 Maksud	7
I.4.2 Tujuan	7
I.5 SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029	7
BAB II	9
II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	9
II.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	9
II.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	16
II.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	27
II.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	31
II.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	37
II.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	40
II.1.7 Demografi	48
II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	54
II.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	54
II.2.2 Kesehatan untuk Semua	72
II.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	77
II.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	82

II.2.5	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	87
II.3	ASPEK DAYA SAING DAERAH	91
II.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	91
II.3.2	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	94
II.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	98
II.3.4	Transformasi Digital	101
II.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	102
II.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Stabilitas Ekonomi Makro	104
II.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	108
II.4	ASPEK PELAYANAN UMUM	109
II.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	109
II.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	112
II.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	116
II.4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	117
II.4.5	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	263
II.4.6	Gambaran Keuangan Daerah	268
II.4.7	Permasalahan Dan Isu Strategis	281
BAB III		298
III.1	VISI DAN MISI	299
III.1.1	Visi	299
III.1.2	Misi	300
III.2	TUJUAN DAN SASARAN	303
III.3	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	309
III.4	ARAH KEBIJAKAN SPASIAL	334
III.4.1	Arah Kebijakan Spasial Kabupaten Kuantan Singingi	334
III.4.2	Arahan Pengembangan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi dalam RPJMN Tahun 2025-2029	340
III.4.3	Arah Kebijakan dan Strategi dengan Pendekatan Spasial Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi	342
III.5	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	344
III.5.1	Analisis Kuadran Wilayah	344
III.5.2	Penanggulangan Kemiskinan Pendekatan Wilayah	357
III.6	ARAH PEMEKARAN WILAYAH	365
III.7	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	366
III.7.1	Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	393

III.7.2 Dukungan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kuantan Singingi	399
III.7.3 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	401
III.7.4 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	405
BAB IV	427
IV.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH	428
IV.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	477
IV.2.1 Indikator Kinerja Utama	477
IV.2.2 Indikator Kinerja Daerah	481
BAB V	501
V.1 KESIMPULAN	502

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 2024	9
Tabel II.2 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kuantan Singingi	13
Tabel II.3 Luas Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kuantan Singingi	15
Tabel II.4 Luas Tanam, Luas Panen Komoditas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	22
Tabel II.5 Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	24
Tabel II.6 Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air Kabupaten Kuantan Singingi	28
Tabel II.7 Luasan Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kuantan Singingi	30
Tabel II.8 Konsumsi Listrik (KWh), Jumlah Penduduk, Indeks Konsumsi Listrik Per Kapita (KWh/ kapita/Tahun)	35
Tabel II.9 Tabel Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	36
Tabel II.10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024	40
Tabel II.11 Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024	41
Tabel II.12 Tingkat kerawanan bencana banjir Kabupaten Kuantan Singingi	42
Tabel II.13 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	42
Tabel II.14 Jumlah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	43
Tabel II.15 Tabel Rekapitulasi Bulanan Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Tertinggi serta Terendah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2020–2024	47
Tabel II.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan Tahun 2023-2024 (%)	49
Tabel II.17 Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	49
Tabel II.18 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	50
Tabel II.19 Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	52
Tabel II.20 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020–2024 (Milyar Rupiah)	56
Tabel II.21 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2020–2024 (Milyar Rupiah)	56
Tabel II.22 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020–2024 (Miliar)	58
Tabel II.23 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan, 2020–2024 (Miliar)	59
Tabel II.24 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)	63
Tabel II.25 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2020–2024 (Jiwa)	69
Tabel II.26 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau 2023	74
Tabel II.27 Indeks Numerasi/Literasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	79
Tabel II.28 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	80
Tabel II.29 Nilai Tingkat Gemar Membaca dan Data Pustaka Terpilah berdasarkan Jenis (pustaka kabupaten) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024.	81
Tabel II.30 Jenis Program Sosial Terintegrasi Tahun 2020–2024	83

Tabel II.31 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	84
Tabel II.32 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	84
Tabel II.33 Pemajuan Budaya Daerah	85
Tabel II.34 Objek Pemajuan Budaya Kabupaten Kuantan Singingi	85
Tabel II.35 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Kuantan Singingi 2020-2024	91
Tabel II.36 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	91
Tabel II.37 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	97
Tabel II.38 Perkembangan indeks ekonomi hijau Provinsi Riau	99
Tabel II.39 Capaian Bauran energi Provinsi Riau	99
Tabel II.40 indeks Transformasi Digital	101
Tabel II.41 Distribusi PDRB Pasar Berlaku Berdasarkan Pengeluaran (Persen) 2020–2024	102
Tabel II.42 Kemantapan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024	104
Tabel II.43 Kondisi Prasarana Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah Tahun 2024	104
Tabel II.44 Kebutuhan Drainase Lingkungan Tahun 2024	105
Tabel II.45 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	106
Tabel II.46 Akses terhadap hunian layak	107
Tabel II.47 Persentase Desa mandiri	107
Tabel II.48 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2024	108
Tabel II.49 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2019-2023 Kabupaten Kuantan Singingi	108
Tabel II.50 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	103
Tabel II.51 Indeks Pelayanan Publik	110
Tabel II.52 Indeks Survei Integritas Tahun 2024	111
Tabel II.53 Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	113
Tabel II.54 Jumlah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	113
Tabel II.55 Jumlah Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	113
Tabel II.56 Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2020–2024	114
Tabel II.57 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023	115
Tabel II.58 Jumlah Kriminalitas Kabupaten Kuantan Singingi 2021–2024	115
Tabel II.59 Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan K3 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2024	116
Tabel II.60 Indikator Indeks Daya Saing Daerah	117
Tabel II.61 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	119
Tabel II.62 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	119
Tabel II.63 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kuantan Singingi	121
Tabel II.64 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	121
Tabel II.65 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	122
Tabel II.66 Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	123
Tabel II.67 Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	123
Tabel II.68 Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	124
Tabel II.69 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024	124
Tabel II.70 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	124
Tabel II.71 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	125

Tabel II.72 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020–2024 di Kabupaten Kuantan Singingi	126
Tabel II.73 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	127
Tabel II.74 Rasio Guru/Murid per kelas di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	127
Tabel II.75 Target dan Capaian Indikator SPM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2025	128
Tabel II.76 Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	129
Tabel II.77 Data Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Kesetaraan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	129
Tabel II.78 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020–2024	130
Tabel II.79 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	131
Tabel II.80 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2020–2024 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	133
Tabel II.81 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi	134
Tabel II.82 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2020–2024 Kabupaten Kuantan Singingi	134
Tabel II.83 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi	135
Tabel II.84 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	136
Tabel II.85 Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	137
Tabel II.86 Jumlah Dokter Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	138
Tabel II.87 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	138
Tabel II.88 Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	139
Tabel II.89 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	139
Tabel II.90 Jumlah Tenaga Struktural dan Medis di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	140
Tabel II.91 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	141
Tabel II.92 Data Kunjungan Pasien RSUD Teluk Kuantan Tahun 2020–2024 Kabupaten Kuantan Singingi	143
Tabel II.93 Kondisi Bangunan RSUD Teluk Kuantan Tahun 2024	143
Tabel II.94 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	144
Tabel II.95 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	145
Tabel II.96 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024	145
Tabel II.97 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2024	146
Tabel II.98 Kemantapan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024	146
Tabel II.99 Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2021-2024	147
Tabel II.100 Kondisi Prasarana Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah Tahun 2024	147
Tabel II.101 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kawasan Permukiman Berdasarkan Rasio Tingkat Pelayanan Sanitasi Tahun 2023	148
Tabel II.102 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	148
Tabel II.103 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	149
Tabel II.104 Kebutuhan Drainase Lingkungan Tahun 2024	149
Tabel II.105 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	150

Tabel II.106 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	151
Tabel II.107 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	151
Tabel II.108 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Perpipaan Tahun 2020–2024	152
Tabel II.109 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2024	152
Tabel II.110 SPAM IKK dan Jumlah Pengguna SPAM IKK Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	153
Tabel II.111 Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Perpipaan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	154
Tabel II.112 Banyaknya Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023	154
Tabel II.113 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	155
Tabel II.114 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi	156
Tabel II.115 Rasio Bangunan memiliki PBG per Satuan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	156
Tabel II.116 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	158
Tabel II.117 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	158
Tabel II.118 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	158
Tabel II.119 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	159
Tabel II.120 Luas Pemukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	159
Tabel II.121 Persentase Permukiman yang tertata di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024	160
Tabel II.122 Cakupan Lingkungan Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU Berdasarkan Rasio Kebutuhan PSU (2024)	161
Tabel II.123 Anggota Linmas Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	161
Tabel II.124 Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan K3 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2024	162
Tabel II.125 Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	163
Tabel II.126 Target Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021–2024	165
Tabel II.127 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	167
Tabel II.128 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	168
Tabel II.129 Jenis dan Perkembangan SPM di luar Panti Sosial Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	169
Tabel II.130 Jenis Program Bantuan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	169
Tabel II.131 Perkembangan DTKS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	170
Tabel II.132 Jenis dan Jumlah PSKS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	170
Tabel II.133 Kemiskinan Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023	171
Tabel II.134 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	172
Tabel II.135 Penyandang Disabilitas Sesuai Jenis Per Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	173
Tabel II.136 Daftar BNBA KPM Graduasi Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	174
Tabel II.137 Rekapitulasi Layanan yg di berikan kepada PPKS diluar Panti (Yatim dan Lansia) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	175

Tabel II.138 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	176
Tabel II.139 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	177
Tabel II.140 Lapangan Usaha Pekerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	178
Tabel II.141 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	180
Tabel II.142 Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	180
Tabel II.143 Data Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018–2024	181
Tabel II.144 Produksi Komoditas Pangan Pokok Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	182
Tabel II.145 Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau Tahun 2024	182
Tabel II.146 Ketersediaan Pangan Pokok Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	184
Tabel II.147 Kondisi Sertifikasi Lahan di kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	186
Tabel II.148 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	187
Tabel II.149 Jumlah izin lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	187
Tabel II.150 Data Luas Lahan Kritis di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	188
Tabel II.151 Jumlah Sampah yang ditangani Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	189
Tabel II.152 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	189
Tabel II.153 Indeks Kualitas Air menurut Parameter Pengujian di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	190
Tabel II.154 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	190
Tabel II.155 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	191
Tabel II.156 Rata rata Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024	191
Tabel II.157 Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	192
Tabel II.158 Indeks Luas Tutupan Belukar (LTB)	192
Tabel II.159 Ruang Terbuka Hijau dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	192
Tabel II.160 Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2024	192
Tabel II.161 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	193
Tabel II.162 Jumlah Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	193
Tabel II.163 Data Masyarakat Rentan yang memiliki Identitas Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	193
Tabel II.164 Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Kuantan Singingi menurut umur 0-5 Tahun Tahun 2020–2024	194
Tabel II.165 Perkantoran Desa yang Layak dan Belum Layak Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	195
Tabel II.166 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	195
Tabel II.167 Data Klasifikasi Bumdes Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	201
Tabel II.168 Posyandu di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	210
Tabel II.169 Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	211
Tabel II.170 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	212
Tabel II.171 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	213
Tabel II.172 Data Keberangkatan Orang di Terminal Teluk Kuantan Tahun 2020–2024	213
Tabel II.173 Data Kedatangan Orang di Terminal Teluk Kuantan Tahun 2020–2024	213
Tabel II.174 Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala di UPTD Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	214

Tabel II.175 Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten Pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	215
Tabel II.176 Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten Pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	215
Tabel II.177 Persentase ketersediaan Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi	215
Tabel II.178 Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan di Kabupaten Kuantan Singingi	216
Tabel II.179 Jumlah Pelanggaran Terhadap <i>Over Dimension Over Loading</i> Tahun 2024	216
Tabel II.180 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	217
Tabel II.181 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	217
Tabel II.182 Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Menurut Bulan di Wilayah Kuantan Singingi Tahun 2024	218
Tabel II.183 Capaian Indikator layanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024	218
Tabel II.184 Data Koperasi, UKM, BPR/LKM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	219
Tabel II.185 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	220
Tabel II.186 Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	221
Tabel II.187 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	221
Tabel II.188 Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	222
Tabel II.189 Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	223
Tabel II.190 Data Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	224
Tabel II.191 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	224
Tabel II.192 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024	225
Tabel II.193 Festival yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	225
Tabel II.194 Daftar Nama-Nama Benda/Situs Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023	226
Tabel II.195 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	228
Tabel II.196 Rasio Pengunjung Perpustakaan per satuan penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	229
Tabel II.197 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	229
Tabel II.198 Nilai tingkat gemar membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat, serta data pustaka terpilah berdasarkan jenis (pustaka tingkat kabupaten) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	230
Tabel II.199 Jumlah Arsip dan Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	230
Tabel II.200 Tempat-tempat Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi	231
Tabel II.201 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	237
Tabel II.202 Luas Lahan Baku Sawah Berdasarkan Kementerian ATR di Kabupaten Kuantan Singingi	237
Tabel II.203 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kuantan Singingi (ha), 2021– 2024	238
Tabel II.204 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kuantan Singingi (ton), 2021–2024	238

Tabel II.205 Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2020-2024	239
Tabel II.206 Banyaknya Petani Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditas di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	239
Tabel II.207 Rata-rata jumlah produksi pangan	241
Tabel II.208 Populasi Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	244
Tabel II.209 Tabel Jumlah Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi (Ekor), 2023	246
Tabel II.210 Pemotongan Ternak Tercatat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 (Ekor)	247
Tabel II.211 Produksi Daging disetiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	248
Tabel II.212 Total Produksi Daging di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	248
Tabel II.213 Produksi Telur di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	249
Tabel II.214 Populasi dan Pemotongan Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	249
Tabel II.215 Penggunaan Tenaga Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024 (KWh)	250
Tabel II.216 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	250
Tabel II.217 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	251
Tabel II.218 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024	252
Tabel II.219 Konsumsi Ikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	253
Tabel II.220 Jumlah Produksi Perikanan (dalam ton) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	254
Tabel II.221 Produksi Ikan Budidaya di Keramba Pada Tahun 2024	254
Tabel II.222 Produksi Ikan Budidaya di Kolam Pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	255
Tabel II.223 Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum Setiap Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	256
Tabel II.224 Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	257
Tabel II.225 Persentase Realisasi PAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	257
Tabel II.226 Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	258
Tabel II.227 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	258
Tabel II.228 Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	259
Tabel II.229 Implementasi Rencana Kelitbangan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	260
Tabel II.230 Pemanfaatan Kelitbangan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	260
Tabel II.231 Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	260
Tabel II.232 Persentase Tindaklanjut Temuan Tahun 2024	261
Tabel II.233 Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	261
Tabel II.234 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	263
Tabel II.235 Realisasi APBD Tahun 2020–2024	269
Tabel II.236 Neraca Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	272
Tabel II.237 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030	274
Tabel II.238 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030	278
Tabel II.239 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	280

Tabel II.240 Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	285
Tabel II.241 Long List Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045 Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	291
Tabel II.242 Long List Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025- 2045 Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	291
Tabel II.243 Long List Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025- 2045 Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Pilihan	291
Tabel II.244 Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	292
Tabel II.245 Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029	297
Tabel III.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	304
Tabel III.2 Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030	311
Tabel III.3 Perumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	315
Tabel III.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi	319
Tabel III.5 Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	334
Tabel III.6 Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pengembangan Daerah Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi dalam RPJMN Tahun 2025-2029	341
Tabel III.7 Perumusan Program Prioritas Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	368
Tabel III.8 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029	395
Tabel III.9 Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kuantan Singingi	399
Tabel III.10 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	402
Tabel III.11 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	405
Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	429
Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	478
Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029	482

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	5
Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi	10
Gambar II.2 Peta Ketinggian Kabupaten Kuantan Singingi	12
Gambar II.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kuantan Singingi	12
Gambar II.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kuantan Singingi	14
Gambar II.5 Peta Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi	16
Gambar II.6 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air	29
Gambar II.7 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air	30
Gambar II.8 Peta Rawan Banjir Kabupaten Kuantan Singingi	44
Gambar II.9 Peta Rawan KARHUTLA Kabupaten Kuantan Singingi	44
Gambar II.10 Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Kuantan Singingi	47
Gambar III.1 Visi Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029	300
Gambar III.2 Pentahapan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030	310
Gambar III.3 Arahan Pengembangan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi dalam RPJMN Tahun 2025-2029	341
Gambar III.4 Peta Wilayah Pengembangan Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi (WP GASING)	343
Gambar III.5 Lokasi Prioritas (Persentase dan Jumlah Desil 1) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi	345
Gambar III.6 Lokasi Prioritas Ketenagakerjaan (Persentase dan Jumlah Angkatan Kerjadian Ijazah <SD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi	346
Gambar III.7 Lokasi Prioritas (Persentase dan Jumlah Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi	347
Gambar III.8 Lokasi Prioritas Peningkatan APK PAUD (Jumlah Anak <7 Tahun Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	348
Gambar III.9 Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SD (Jumlah Anak <7 Tahun Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	349
Gambar III.10 Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SMP (Jumlah Usia SMP Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	350
Gambar III.11 Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SMA (Jumlah Usia SMA Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	351
Gambar III.12 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian Layak (Jumlah Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	352
Gambar III.13 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Air Minum Layak (Jumlah Keluarga dengan Air Minum Tidak Layak dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	353
Gambar III.14 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Sanitasi Layak (Jumlah Keluarga dengan Sanitasi Tidak Layak dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	354
Gambar III.15 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	355
Gambar III.16 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Peningkatan Pembangunan Desa (Indeks Desa Membangun Kecamatan dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	356
Gambar III.17 Lokasi Prioritas Sosial untuk Penyandang Disabilitas (Jumlah Penyandang Disabilitas Sedang - Berat dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi	357

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1 Luas (Ha) dan Produksi (Ton) Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2024	19
Grafik II.2 Jumlah Produksi Perikanan (dalam ton) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	20
Grafik II.3 Populasi Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	21
Grafik II.4 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	24
Grafik II.5 Perkembangan IKP Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau 2020–2024	32
Grafik II.6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau 2024	33
Grafik II.7 Grafik Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (%)	33
Grafik II.8 Grafik Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (%)	34
Grafik II.9 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2021–2024	38
Grafik II.10 Grafik Perkembangan Timbulan Sampah Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024	39
Grafik II.11 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2024	41
Grafik II.12 Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023	42
Grafik II.13 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024	45
Grafik II.14 Perkembangan Indeks Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Riau 2020-2024	46
Grafik II.15 Piramida Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	51
Grafik II.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025-2029 (ribu jiwa)	53
Grafik II.17 Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 (%)	53
Grafik II.18 Piramida Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Usia Tahun 2029	54
Grafik II.19 PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020–2024 (Milyar Rupiah)	55
Grafik II.20 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024	60
Grafik II.21 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (%)	61
Grafik II.22 Grafik Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2024 (%)	61
Grafik II.23 Grafik Distribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2024 (%)	62
Grafik II.24 Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	63
Grafik II.25 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024	59
Grafik II.26 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2020–2024	64
Grafik II.27 Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	65
Grafik II.28 Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023	65
Grafik II.29 Perkembangan PDRB per-kapita Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)	66
Grafik II.30 PDRB per-Kapita Berdasarkan ADHB menurut Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (Juta Rupiah)	67

Grafik II.31 Perkembangan Angkatan Kerja Tidak Bekerja dan TPT Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	68
Grafik II.32 Perkembangan TPT Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024	68
Grafik II.33 Perkembangan TPT Menurut Kabupaten Kuantan Provinsi Riau Tahun 2020–2024	69
Grafik II.34 Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Angka Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 (%)	70
Grafik II.35 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024	70
Grafik II.36 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (poin)	71
Grafik II.37 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2023 dan 2024 (poin)	72
Grafik II.38 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (tahun)	73
Grafik II.39 Capaian Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Tahun)	73
Grafik II.40 Prevalensi Stunting Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	76
Grafik II.41 Grafik Perkembangan Kepesertaan JKN di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 (%)	76
Grafik II.42 Perkembangan Rata-rata lama Sekolah menurut Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2024	77
Grafik II.43 Rata-rata lama Sekolah menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2024	78
Grafik II.44 Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	78
Grafik II.45 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau Tahun 2024	79
Grafik II.46 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau Tahun 2024	80
Grafik II.47 Grafik Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kuantan Singingi	82
Grafik II.48 Perkembangan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 (%)	83
Grafik II.49 Indeks Perlindungan Anak pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2024	87
Grafik II.50 capaian kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi	88
Grafik II.51 Perkembangan IKG Kabupaten Kuantan Singingi 2020 – 2024	89
Grafik II.52 Perkembangan IKG Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau	89
Grafik II.53 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90
Grafik II.54 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	90
Grafik II.55 Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024	93
Grafik II.56 Grafik Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	93
Grafik II.57 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	94
Grafik II.58 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	95
Grafik II.59 Rasio Kewirausahaan Daerah	96
Grafik II.60 Rasio PDRB Menurut Lapangan Usaha Sektor Strategis	97
Grafik II.61 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	98
Grafik II.62 Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	100
Grafik II.63 Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	101
Grafik II.64 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	103
Grafik II.65 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024	112

Grafik II.66 Capaian APK PAUD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	118
Grafik II.67 Capaian APM PAUD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	118
Grafik II.68 Capaian APM SD/MI/Paket A Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	120
Grafik II.69 Capaian APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	120
Grafik II.70 Rasio Siswa Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	128
Grafik II.71 Angka Guru memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	128
Grafik II.72 Jumlah kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020–2024	130
Grafik II.73 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	141
Grafik II.74 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	142
Grafik II.75 Jumlah Tempat Tidur Pasien di RSUD Teluk Kuantan Tahun 2024	144
Grafik II.76 Jumlah Bangunan yang memiliki PBG Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	157
Grafik II.77 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	178
Grafik II.78 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	179
Grafik II.79 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	179
Grafik II.80 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	181
Grafik II.81 Wilayah Rawan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023	185
Grafik II.82 Data Kerusakan Lahan Akibat Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	188
Grafik II.83 LSM yang Aktif di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	210
Grafik II.84 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020–2024	223
Grafik II.85 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	235
Grafik II.86 Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	236
Grafik II.87 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)	236
Grafik II.88 Luas Panen Produktifitas dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024	242
Grafik II.89 Daftar Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi Sampai dengan Tahun 2024	252
Grafik II.90 Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	256
Grafik II.91 Persentase terhadap Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024	258

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan yang diberikan kepada daerah sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Hal ini dilakukan dalam bentuk usaha sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yaitu perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pengertian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan rencana harus memperhatikan prinsip pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dimaksudkan agar rencana pembangunan yang dihasilkan selaras dengan rencana struktur dan pola ruang yang termuat dalam RTRW. Dalam penyusunannya, rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 disusun setelah pelantikan Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025, dan merupakan penjabaran Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Dalam mempedomani RPJPD, penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan Arah Kebijakan Tahap Pertama RPJPD Tahun 2025–2045 dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Perumusan RPJMD selain menggunakan pendekatan berdasarkan proses, juga menerapkan pendekatan substansi. Hal ini untuk menjamin kualitas rencana yang dihasilkan telah berdasarkan permasalahan, isu strategis daerah dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai, serta selaras dengan rencana tata ruang. Pendekatan substansi yang dimaksud, meliputi:

- a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ruang dalam perencanaan.

Mengingat strategis dan pentingnya penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 sebagai tahap awal perwujudan visi RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu **“Kuantan Singingi yang sejahtera, Beradat, maju, dan berkelanjutan (KUANSING HEBAT)”**, dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang dilantik secara Serentak Oleh Presiden Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan bersinergi dengan berbagai pihak-pihak yang terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan memperhatikan penerapan pembangunan berkelanjutan dan hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa Rencana Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 memperhatikan dokumen KLHS RPJMD terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan, strategi dan program-program yang mendukung pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018–2038;

28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045.

I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan daerah secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan dalam lingkup daerah maupun lingkup nasional dan provinsi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Disamping itu, perencanaan pembangunan daerah memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, memperhatikan RPJPN, RPJPD Provinsi Riau, RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), RIPJPID, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi periode sebelumnya dan RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045 Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional-daerah, dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, sebagaimana gambar I.1 :



Gambar I.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

RPJMD merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehingga RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada visi, misi, arah kebijakan dan Sasaran Pokok yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045 dan memperhatikan RIPJPID, serta RTRW Kabupaten Kuantan Singingi, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kuantan Singingi. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi juga merupakan acuan dalam penyusunan RPKD dan Renstra Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Isu Pemanasan Global dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, target pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perencanaan pembangunan kabupaten sekitarnya. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi juga memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045.

Hubungan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

I.3.1 Keterkaitan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau

- a. RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029;
- b. Jangka waktu RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 sesuai dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029;

Memperhatikan ruang lingkup penyelarasan dalam hal perumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Indikator Pembangunan.

I.3.2 Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Kuantan Singingi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan. Penyusunan RPJMN ini memperhatikan sinkronisasi kebijakan dengan Dokumen Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN) dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan Kabupaten. Ruang lingkup penyelarasan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Keselarasan tersebut antara lain:

- Tujuan RTRW dengan Visi dan Misi RPJMD;
- Kebijakan dan Strategi RTRW dengan Arah Kebijakan RPJMD;
- Pusat-Pusat Kegiatan yang tercantum dalam RTRW terhadap perumusan pengembangan kewilayahan dalam RPJMD.

I.3.3 Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) dalam rangka mewujudkan RPJMD sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 harus mengacu pada dokumen KLHS terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan.

Salah satu dokumen perlu diperhatikan dan diselaraskan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

I.3.4 Keterkaitan dengan RIPJPID

Rencana Induk Pembangunan Jangka Panjang Infrastruktur Daerah (RIPJPID) mendukung RPJMD khusus pada aspek infrastruktur dengan horizon lebih panjang, dari RIPJPID dipilih prioritas 5 tahunan agar inline dengan RPJMD. RIPJPID menjadi acuan dalam menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur yang masuk ke program RPJMD.

I.3.5 Keterkaitan dengan Rencana Sektoral

Rencana sektoral menjadi dokumen operasional di tiap sektor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disusun berdasarkan kebijakan dan sasaran yang ada di RPJMD.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

I.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi pembangunan daerah antara lain : gambaran kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, serta permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi lima tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah;
2. Untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama 5 (lima) tahun terakhir;
3. Untuk menelaah Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045 tahap Pertama (Tahun 2025-2029);
4. Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah;
5. Untuk memberikan Rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas agar sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang relevan dengan kondisi empiris daerah;

I.5 SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi telah mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

II.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

II.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah otonom dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan luas wilayah sebesar 5.457,86 km² atau 545.786 hektare. Luas wilayah ini bersifat tetap sejak pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, dan beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Penetapan luas wilayah tersebut telah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024–2044.

Secara administratif, penetapan batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi juga mengacu pada Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, serta berita acara kesepakatan batas dengan kabupaten/kota tetangga, termasuk Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu (Riau), dan kabupaten di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Penegasan batas wilayah terus diperkuat melalui sinkronisasi peta dan berita acara kesepakatan di tingkat provinsi dan pusat.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 (lima belas) kecamatan, yang luas wilayahnya sangat bervariasi. Kecamatan Singingi Hilir merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 986,76 km² atau 18,08% dari total wilayah kabupaten. Sementara itu, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Kuantan Mudik juga memiliki luas wilayah signifikan, yakni masing-masing 966,31 km² (17,71%) dan 560,81 km² (10,28%). Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Kecamatan inuman dengan luas 83,75 km² (1,53%)

Sebaran desa/kelurahan juga mencerminkan pola pelayanan yang harus adaptif, di mana Kecamatan Kuantan Mudik memiliki jumlah desa terbanyak (23 desa), sementara Kecamatan Pucuk Rantau hanya memiliki 10 desa. Pembagian wilayah administrasi yang demikian berimplikasi pada penataan pelayanan publik, infrastruktur, dan pemerataan pembangunan antarwilayah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Gambaran umum luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan per kecamatan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi 2024

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Desa/Kelurahan		Total
			(km ²)	(%)	Desa	Kelurahan	
1	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	560,81	10,28	23	1	24
2	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	289,80	5,31	12	-	12
3	Gunung Toar	Kampung baru	145,22	2,66	14	-	14
4	Singingi	Muara Lembu	966,31	17,71	13	1	14
5	Singingi Hilir	Kota Baru	986,76	18,08	12	-	12
6	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	466,92	8,56	20	3	23
7	Benai	Benai	97,03	1,78	15	1	16
8	Kuantan Hilir	Baserah	129,50	2,37	14	2	16
9	Pangean	Pangean	231,18	4,24	17	-	17

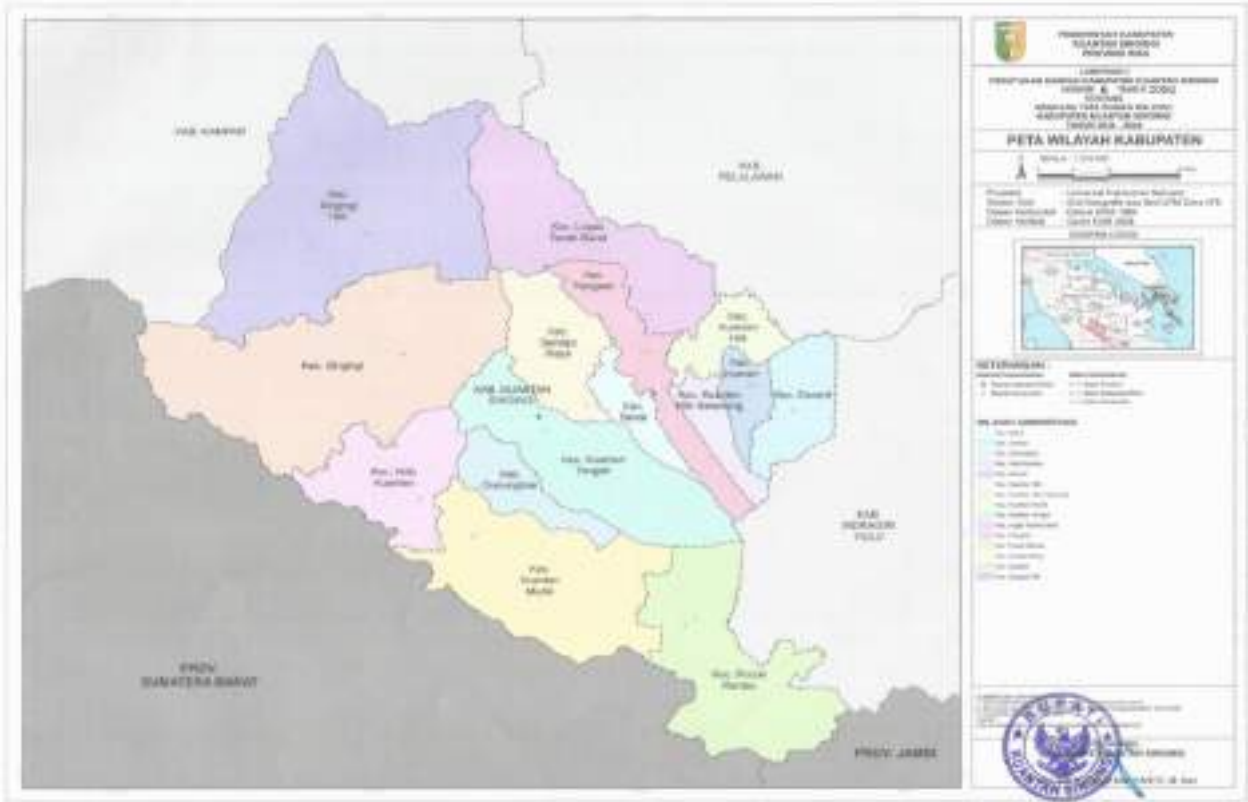
No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Desa/Kelurahan		Total
			(km ²)	(%)	Desa	Kelurahan	
10	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	481,11	8,82	15	-	15
11	Cerenti	Cerenti	175,91	3,22	11	2	13
12	Inuman	Inuman	83,75	1,53	14	-	14
13	Sentajo Raya	Kampung Baru	238,04	4,36	14	1	15
14	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	94,42	1,73	14	-	14
15	Pucuk Rantau	Pangkalan	511,04	9,36	10	-	10
Total			5.457,86	100,00	218	11	229

Sumber : - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kuantan Singingi
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kemudian secara detail, batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau)
- Selatan : Provinsi Jambi
- Barat : Provinsi Sumatera Barat
- Timur : Kabupaten Indragiri Hulu (Provinsi Riau)

Selanjutnya, untuk memperjelas posisi dan batas-batas wilayah administratif sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut disajikan Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044
Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi

II.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kuantan Singingi secara astronomis terletak pada 0°00'–1°00' Lintang Selatan dan 101°02'–101°55' Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berada di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 5.457,86 km², didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan serta dilalui oleh aliran Sungai Kuantan yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Indragiri. Wilayah ini memiliki ketinggian antara 25 hingga 150 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, posisi Kabupaten Kuantan Singingi sangat strategis

sebagai koridor utama yang menghubungkan Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi, sehingga berperan penting dalam arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk antarprovinsi di kawasan Sumatera bagian tengah.

Topografi Kabupaten Kuantan Singingi secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam empat satuan utama, yaitu dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi, dan pegunungan, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 25 hingga 600 meter di atas permukaan laut (dpl). Variasi topografi ini memberikan dasar penting dalam penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah.

a. Satuan Dataran Rendah

Satuan ini memiliki elevasi antara 0–50 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng dominan 0–2%. Wilayah dataran rendah tersebar terutama di bagian utara Kabupaten Kuantan Singingi. Karakteristik topografi yang relatif datar pada satuan ini sangat mendukung pengembangan permukiman, pertanian lahan basah, serta pembangunan infrastruktur dasar.

b. Satuan Perbukitan Bergelombang

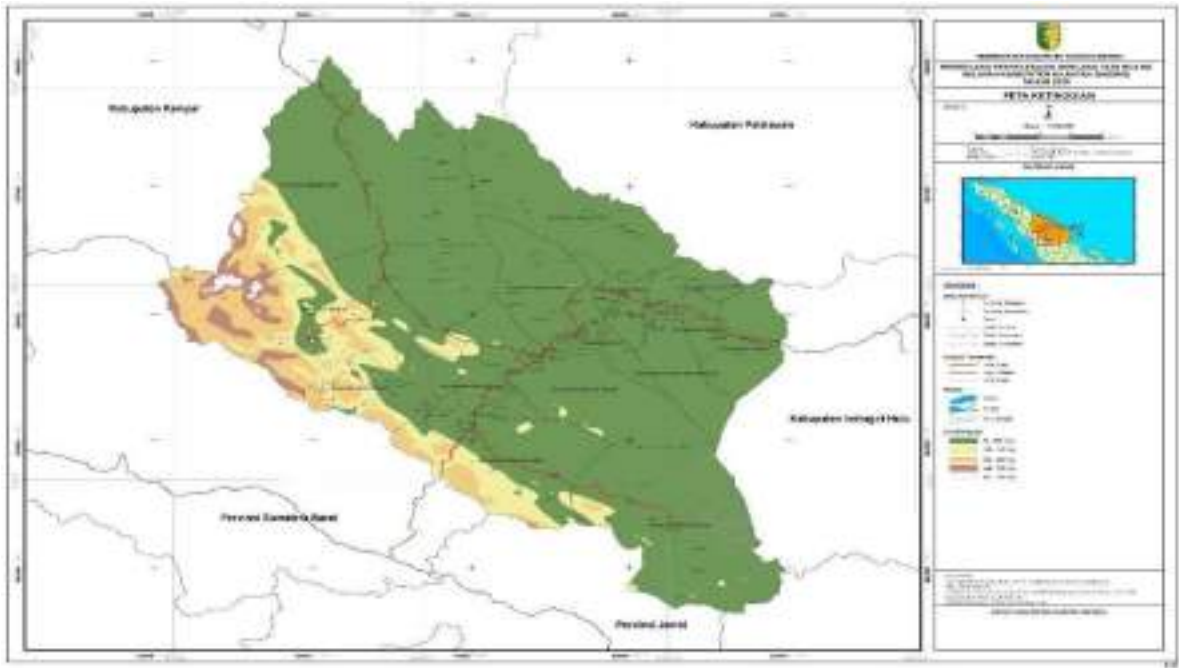
Satuan perbukitan bergelombang berada pada elevasi 50–150 meter di atas permukaan laut. Zona ini umumnya sejajar dengan Pegunungan Bukit Barisan dan terbentuk oleh proses struktur lipatan. Wilayah perbukitan bergelombang ini memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan dan lahan kering, namun tetap memerlukan pengelolaan tata air dan konservasi tanah agar terhindar dari risiko degradasi lahan.

c. Perbukitan Tinggi

Satuan ini memiliki elevasi 150–600 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng bervariasi antara 2–15% hingga 15–30%. Satuan perbukitan tinggi tersebar di beberapa bagian wilayah, khususnya di zona yang berdekatan dengan kawasan pegunungan. Wilayah ini memiliki fungsi penting sebagai kawasan tangkapan air dan zona konservasi, namun aksesibilitas yang terbatas serta kemiringan yang relatif curam memerlukan perencanaan pemanfaatan lahan yang selektif.

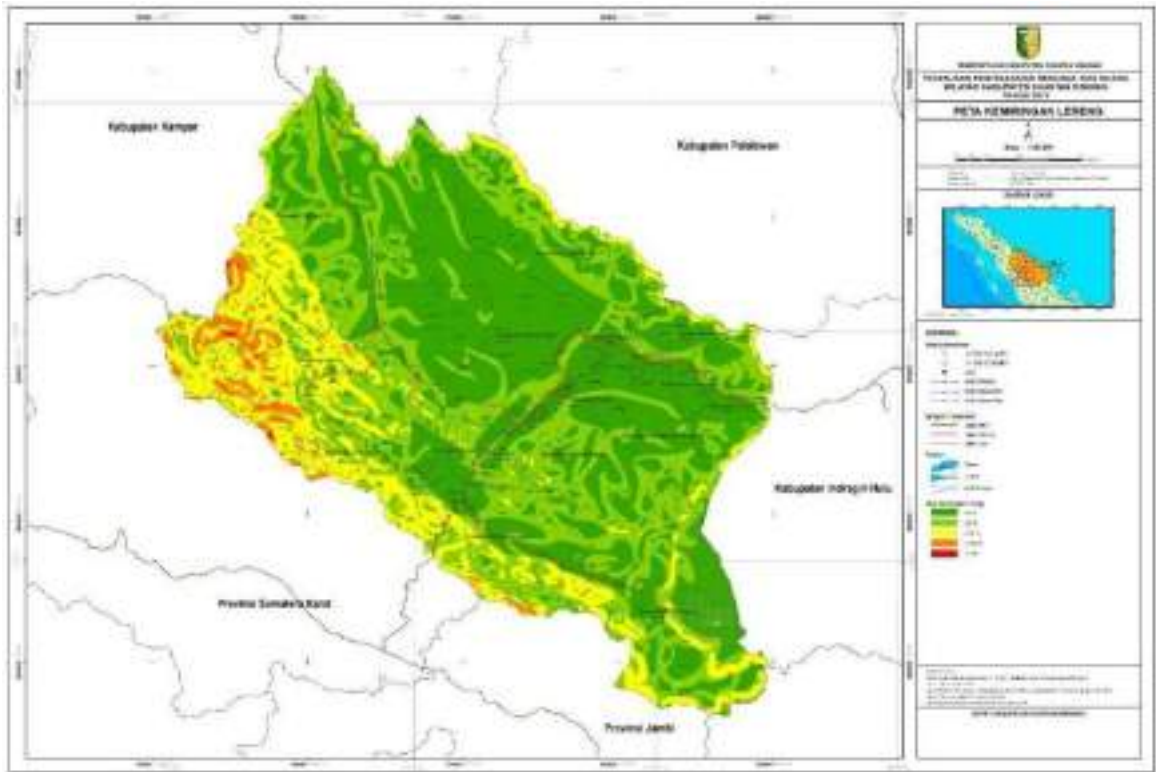
d. Pegunungan

Satuan pegunungan berada pada elevasi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng antara 15–40% hingga lebih dari 40%. Wilayah ini umumnya terletak di bagian barat kabupaten dan merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Satuan pegunungan ini didominasi oleh batuan sedimen pra-Tersier dan batuan vulkanik, serta berperan sebagai kawasan lindung, pelindung hidrologis, dan penyangga ekosistem. Gambaran lebih jelas mengenai distribusi satuan topografi tersebut dapat dilihat pada Gambar II.2 Peta Ketinggian Kabupaten Kuantan Singingi di bawah ini.



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044
 Gambar II.2 Peta Ketinggian Kabupaten Kuantan Singingi

Selain distribusi elevasi, karakteristik kemiringan lereng juga menjadi aspek penting dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan. Informasi tentang sebaran kemiringan lereng di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Gambar II.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kuantan Singingi berikut.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044
 Gambar II.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kuantan Singingi

Kedua peta tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan ruang dan penetapan zona pembangunan, guna mendukung pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Sesuai dengan pendapat Arsyad dalam Setyowati (2016), penggunaan

lahan (land use) dapat diartikan sebagai campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual.

Secara umum peruntukan kawasan dibagi dua bagian utama yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. kawasan lindung meliputi kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan konservasi. Sementara kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan industri dan Kawasan pemukiman.

II.1.1.3 Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001). Sesuai dengan pendapat Arsyad dalam Setyowati (2016), penggunaan lahan (land use) dapat diartikan sebagai campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kuantan Singingi secara umum mencerminkan karakter wilayah yang didominasi oleh kawasan budidaya, namun tetap memberikan ruang signifikan untuk kawasan lindung. Lebih dari 93% luas wilayah Kabupaten telah teralokasikan secara jelas untuk fungsi lindung dan budidaya, yang menandakan tingginya tingkat pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Dominasi kawasan perkebunan sebagai pengguna lahan terbesar, diikuti kawasan hutan produksi tetap, menegaskan bahwa sektor perkebunan dan kehutanan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi lokal. Sementara itu, proporsi kawasan permukiman masih relatif kecil dibandingkan dengan fungsi budidaya dan lindung lainnya, yang mengindikasikan adanya tekanan pemanfaatan lahan yang masih terkendali dan membuka ruang bagi pengembangan permukiman secara terencana ke depan.

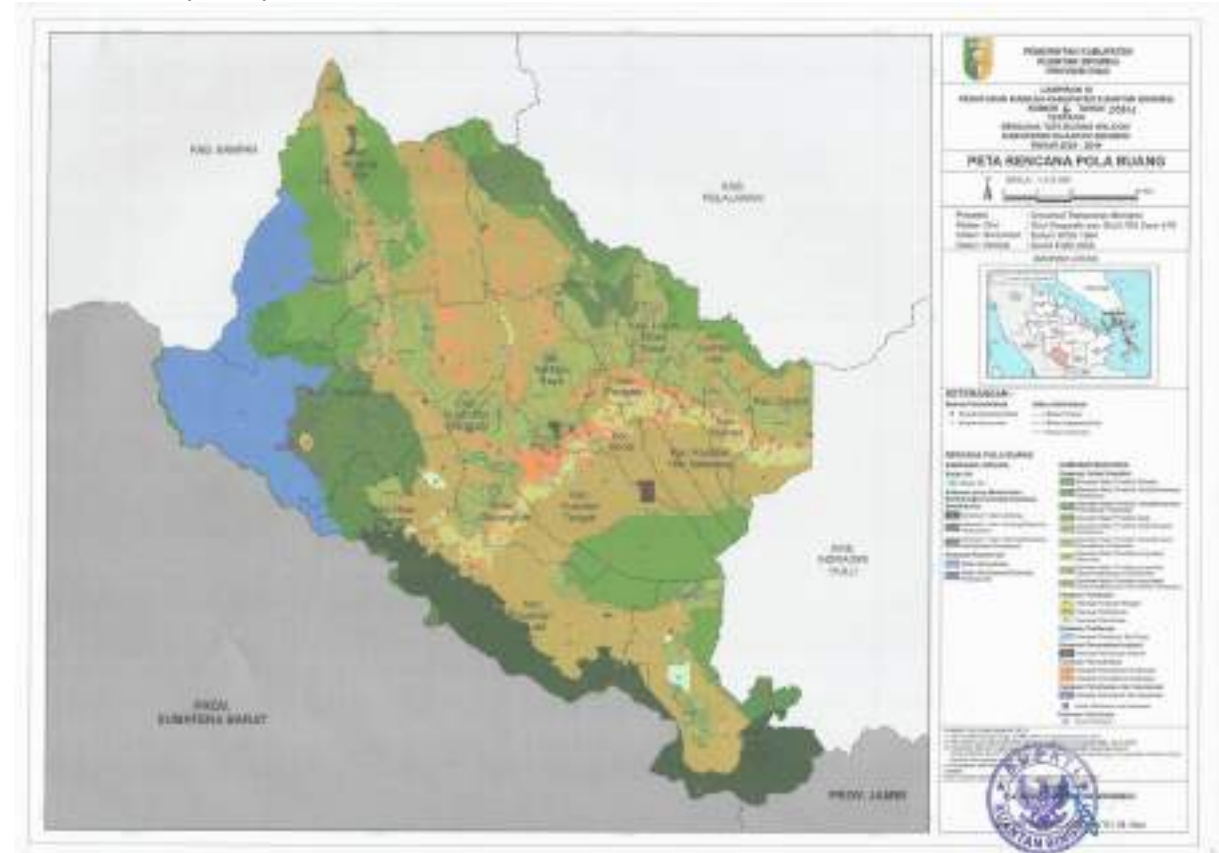
Tabel II.2 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A. Kawasan Lindung		103.469	18,95
	a. Kawasan Hutan Lindung	44.889	8,17
	b. Suaka Marga Satwa	54.129	8,22
	c. Kawasan Resapan Air	4.451	0,815
B. Kawasan Peruntukan Budidaya		442.317	81,04
1	Kawasan Hutan Produksi		
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	58.044	10,63
	b. Kawasan hutan Produksi Tetap	94.667	17,34
	c. Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	75.832	13,89
2	Kawasan Hutan Rakyat	-	-
3	Kawasan Pertanian		
	a. Kawasan Perkebunan	167.804	30,74
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	18.060	3,30
5	Kawasan Permukiman Perkotaan	8.412	1,54
6	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	7	0,001
7	Kawasan Pertambangan Batu Bara	7.513	1,37
8	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	1.744	0,31
9	Kawasan Peruntukan Industri	340	0,006
10	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	189	0,0034
11	Kawasan Peternakan	1.844	0,033
12	Kawasan Tanaman Pangan	7.862	0,14
Total Peruntukan Kawasan		545.786	100,00

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044

Di sisi lain, proporsi kawasan lindung yang hampir mencapai 19% dari total wilayah merupakan refleksi dari komitmen daerah dalam menjaga keseimbangan ekologis, khususnya melalui pelestarian kawasan hutan lindung, suaka margasatwa, dan kawasan resapan air. Hal ini penting untuk memastikan kelestarian fungsi lingkungan, sekaligus sebagai penyangga terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang semakin berkembang.

Keberagaman pemanfaatan ruang—dari kawasan pertanian, peternakan, pertambangan, hingga kawasan industri—menggambarkan adanya upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara terintegrasi, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Namun demikian, ke depan diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih ketat, terutama untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan lindung serta mencegah konversi lahan yang tidak terkendali, agar manfaat pembangunan dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat. Penggunaan lahan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana pada peta berikut:



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044

Gambar II.4 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan demikian, pola penggunaan lahan yang ada saat ini perlu terus diarahkan agar sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan, memperkuat sektor unggulan daerah, namun tetap mengutamakan aspek perlindungan lingkungan dan tata ruang yang berwawasan jangka panjang.

II.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Di Kabupaten Kuantan Singingi potensi bencana alam yang ada adalah banjir dan tanah longsor. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya air. Dalam konstelasi wilayah,

sumberdaya air dapat dikelola dengan konsep penatagunaan lahan yang berkelanjutan dengan pendekatan kewilayahan, sehingga tidak terjadi gangguan keseimbangan lingkungan baik di hulu maupun di hilir. Banjir yang terjadi bermula karena curah hujan yang tinggi dan tidak terserap langsung ke dalam tanah serta tidak terjadi penampungan air dalam situ/embung. Kemiringan tanah yang tidak memiliki tanaman tidak memiliki kekuatan menahan air. Pada kondisi seperti ini, terjadi potensi banjir dan tanah longsor yang akan dapat mengakibatkan kerentanan dan gangguan kehidupan pada kegiatan penduduk.

Potensi banjir diperkirakan terdapat pada daerah sepanjang Sungai Kuantan karena morfologinya relatif datar. Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi di mana terjadi defisit air, makamemungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah terutama daerah hulu Sungai Kuantan sekitar daerah Lubuk Jambi. Dataran mempunyai pola aliran dendritik, Sungai Kuantan mengalir di bagian tengah. Dataran bagian selatan sungai bermuara di Sungai Kuantan di bagian utara mengalir ke Sungai Singingi, Sungai Teso, dan bermuara di Sungai Indragiri. Daerah sekitar Sungai Kuantan umumnya sekali setahun mengalami banjir dan lamanya banjir berkisar dari 1 sampai 2 minggu. Rincian data per kecamatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel II.3 Luas Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Kuantan Mudik	Rawan Banjir dan Longsor	37.176,59	14,19
2	Hulu Kuantan	Rawan Banjir dan Longsor	19.051,91	7,27
3	Gunung Toar	Rawan Banjir dan Longsor	7.669,66	2,93
4	Pucuk Rantau	Rawan Banjir dan Longsor	19.502,63	7,45
5	Singingi	Rawan Banjir dan Longsor	66.101,38	25,24
6	Singingi Hilir	Rawan Banjir dan Longsor	42.513,10	16,23
7	Kuantan Tengah	Rawan Banjir dan Longsor	17.403,08	6,64
8	Sentajo Raya	Rawan Banjir dan Longsor	4.256,13	1,62
9	Benai	Rawan Banjir dan Longsor	6.186,82	2,36
10	Kuantan Hilir	Rawan Banjir dan Longsor	2.728,59	1,04
11	Pangean	Rawan Banjir dan Longsor	8.195,34	3,13
12	Logas Tanah Darat	Rawan Banjir dan Longsor	13.173,57	5,03
13	Kuantan Hilir Seberang	Rawan Banjir dan Longsor	4.680,49	1,79
14	Cerenti	Rawan Banjir dan Longsor	8.022,36	3,06
15	Inuman	Rawan Banjir dan Longsor	5.264,35	2,01
Jumlah			261.926,00	100

Sumber : *Kajian Resiko Bencana (KRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024*

Konsep pengelolaan sumber daya air, mengamankan pengelolaan potensi cadangan dan pemanfaatan air tanah secara regional/kewilayahan antara hulu dan hilir untuk mengatur kapasitas penyimpanan, pencadangan dan pemanfaatan air. Untuk 20 tahun ke depan, Kabupaten Kuantan Singingi sangat memerlukan upaya untuk mempertahankan tanaman penyerap air dan hutan, membangun situ/embung, membangun konstruksi perkuatan tebing dan membangun saluran kanal banjir. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan habit/kebiasaan masyarakat kita untuk tidak membuang sampah secara sembarangan.

Daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan. Luas kawasan rawan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 261.926 Ha yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan yang terbesar proporsi rawan banjir dan longsor ada di kecamatan singingi sebesar 25,24% dan terkecil di kecamatan Kuantan Hilir dengan proporsi 1,04%.



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044
Gambar II.5 Peta Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi juga rawan terhadap bencana tanah longsor, terutama pada daerah patahan yang merupakan zona lemah. Selain itu, kerawanan juga terdapat pada daerah dengan kelerengan yang curam. Daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor diantaranya Sebagian Kecamatan Logas Tanah Darat, sebagian Kecamatan Singingi Hilir, sebagian Kecamatan Sentajo Raya, sebagian Kecamatan Singingi dengan luas keseluruhan yaitu 33.646,43 Ha.

II.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sesuai kewenangan untuk dikembangkan dan didorong pembangunannya, wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Kuantan Singingi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan disebut sebagai kawasan strategis Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan analisa peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas:

II.1.2.1 Pengembangan Kawasan Strategis PLTA Lubuk Ambacang dan Mini Hidro Sungai Singingi

Penyediaan energi listrik di Kabupaten Kuantan Singingi masuk ke dalam sistem Interkoneksi B, Wilayah Selatan. Sistem ini merupakan perpanjangan dari Sistem Interkoneksi Sumatera Barat-Riau melalui jalur Sawah Lunto/Kiliran Jao-Taluk Kuantan, untuk melayani Wilayah Provinsi Riau bagian Selatan mencakup: Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Pelalawan. Sistem ini di wilayah Riau didukung oleh 2 pembangkit yaitu: PLTA Lubuk Ambacang Pembangunan PLTA yaitu pada Sungai Indragiri (pada anak sungai Batang Kuantan) di lokasi Lubuk Ambacang, Kec. Hulu Kuantan-Kabupaten Kuantan Singingi dengan potensi daya listrik sebesar 350 MW (hasil studi JICA, 1979); Sementara itu dari rencana pembangunan PLTA di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan didapat potensi tambahan tenaga listrik sebesar 372 MW

II.1.2.2 Pengembangan Kawasan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Betabuh dengan luas $\pm 44.477,84$ Ha, memegang peranan kunci sebagai pengendali hidrologis wilayah dan sekaligus sebagai daerah tangkapan air DAS Indragiri. Sebagaimana telah diketahui bahwa daerah perbatasan Riau dan Sumbar merupakan daerah rawan bencana terutama banjir dan tanah longsor. Perubahan ekosistem daerah tersebut akan langsung berdampak terhadap semakin besarnya peluang terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor. Padahal pada daerah ini terbentang jalan nasional lintas Sumatera Bagian Tengah yang merupakan salah satu urat nadi pergerakan barang dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya. Terhambatnya lalu lintas pada daerah ini akan berpengaruh besar terhadap pergerakan barang dan jasa serta pergerakan ekonomi wilayah sekitar. Dengan posisi dan peran seperti ini, telah menempatkan Hutan Lindung Bukit Betabuh memiliki fungsi strategis dalam memelihara dan menjaga kestabilan ekosistem daerah perbatasan Sumbar-Riau.

Saat ini, lahan untuk fungsi hutan lindung telah mengalami penurunan dengan sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat dan swasta. Dalam rangka mengembalikan areal dengan peruntukkan hutan lindung dan mencegah memburuknya kondisi lingkungan (agar siklus hidrologi dan keseimbangan lingkungan dapat tetap terjaga), maka diperlukan penguasaan lahan sesuai dengan TGHK dan dipetakan dalam rencana pemanfaatan dan usaha kawasan, pada kawasan peruntukkan hutan lindung dan pengembalian fungsi hutan lindung pada daerah konflik (pemanfaatan kegiatan hutan lindung bukan berdasarkan fungsinya) serta pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berada di kawasan hutan lindung.

Luas hutan yang sudah ditata batas memanjang dari Lubuk Ambacang sampai ke Perhentian Sungkai, dengan topografi daerah adalah curam dengan ketinggian tempat antara 100–392 mdpl. Areal ini terletak di antara perlintasan jalan Sumatera Barat–Riau, sehingga menimbulkan banyak tekanan berupa pencurian kayu secara ilegal, sawmill, dan pengkonversian hutan alami secara besar-besaran. Untuk menjaga fungsi hutan lindung maka direncanakan zona buffer (penyangga) untuk kawasan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

b. Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Selain kedua kawasan lindung berdasarkan TGHK tersebut terdapat kawasan yang disebut sebagai Rimbo Larangan yaitu kawasan yang secara fisik merupakan kawasan tangkapan air dan secara biologi kawasan ini merupakan tempat plasma nutfah yang memiliki keragaman dan nilai hayati yang tinggi. Rimbo Larangan ini merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat tradisional yang erat hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kawasan Rimbo Larangan berdasarkan dinas kehutanan dan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 8 Rimbo Larangan dengan luasan $\pm 1.314,50$ Ha yang masih bertahan dengan fungsinya sebagai hutan dan sebagai resapan air. Rimbo Larangan tersebut berada di Kecamatan Hulu Kuantan (Pemalang Pogal dan Lubuk Samak), Kecamatan Gunung Toar (Kopuung, Baluang dan Bukit Marontang), Kecamatan Kuantan Mudik (Samak, dan Bukit Panarahan), dan Kecamatan Kuantan Tengah (Kenegerian Jake).

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Penetapan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya di Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan dengan adanya Suaka Margasatwa Bukit Rimbang dan Bukit Baling yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kemenhut 878 Tahun 2014. Penetapan ini kemudian juga diperkuat dengan kebijakan pola ruang kawasan lindung nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Selain itu, berdasarkan Tata Guna Lahan Kesepakatan Provinsi Riau tahun 2007, luas hutan yang disepakati sebagai hutan suaka alam yaitu hutan suaka margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling adalah 54,726.4 ha yaitu di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sijunjung.

II.1.2.3 Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (Kawasan Agropolitan, Kawasan Agrowisata dan kawasan Agrotechpark)

Kebijakan pengembangan wilayah pertanian terpadu ditetapkan berada pada Desa Seberang Taluk dengan keluasan 100 Ha. Kawasan Pertanian Terpadu ini terdiri dari kawasan Agropolitan, Kawasan Agrowisata serta kawasan Agrotechpark.

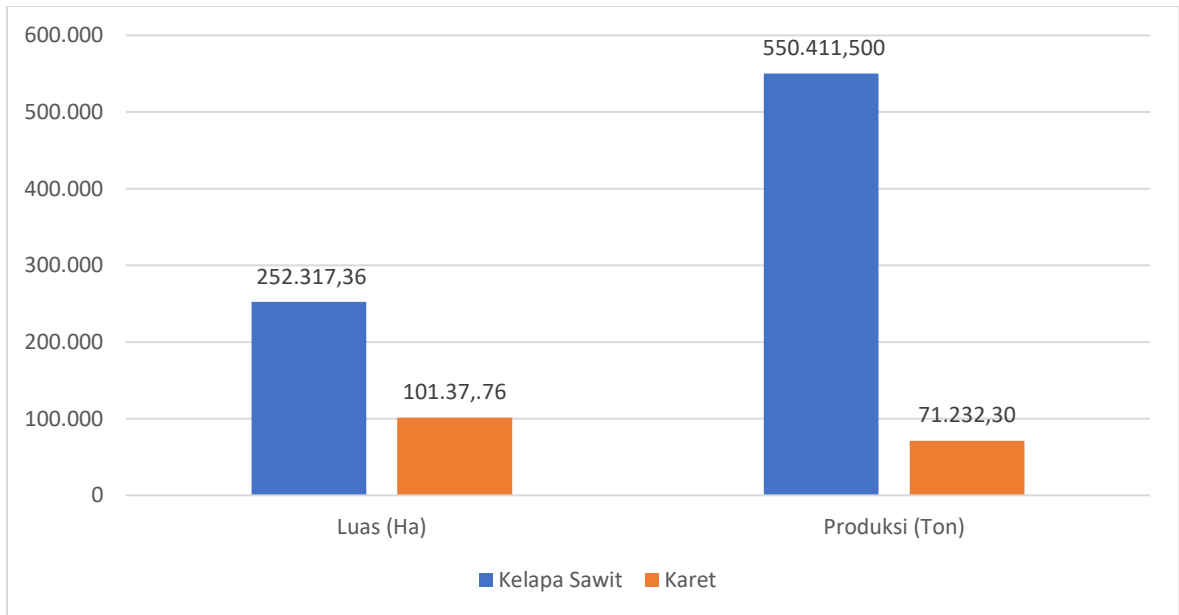
Pengembangan kawasan agrowisata harus dilakukan secara terintegrasi dengan sektor-sektor terkait seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan, perhotelan, biro perjalanan, industri, kesenian dan kebudayaan dan sebagainya dalam bingkai kewilayahan dan keterpaduan pengelolaan kawasan. Agrowisata dapat merupakan pengembangan dari sektor lain yang diharapkan mampu menunjang pengembangan ekonomi secara berkelanjutan, misalnya pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan agropolitan, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan perkebunan, pengembangan kawasan agrowisata pada tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan peternakan, pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan perikanan darat dan lain sebagainya.

Perencanaan pengembangan kawasan agrowisata harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yaitu Pengembangan kawasan agrowisata harus mempertimbangkan penataan dan pengelolaan wilayah dan tata ruang yang berkelanjutan baik dari sisi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya setempat, Pengembangan fasilitas dan layanan wisata yang mampu memberikan kenyamanan pengunjung sekaligus memberikan benefit bagi masyarakat setempat serta pengembangan kawasan agrowisata harus mampu melindungi sumber daya dan kekayaan alam, nilai-nilai budaya dan sejarah setempat. Pengembangan kawasan agrowisata ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar semata, tetapi harus dalam koridor melindungi dan melestarikan aset-aset yang menjadikomoditas utama pengembangan kawasan. Penggalan terhadap nilai-nilai, lokasi, kegiatan, atraksi wisata yang unik ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kawasan agrowisata secara berkelanjutan.

Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang Sesuai RTRW, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata. Sebagian sektor ini merupakan penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Kabupaten Kuantan Singingi menjanjikan banyak peluang pengembangan dimasa depan. Dengan dukungan letak geografis yang strategis, yaitu relatif tidak terlalu jauh dengan Ibu Kota Provinsi dan terletak pada daerah perbatasan 3 (tiga) provinsi yaitu Riau, Sumatera Barat dan Jambi serta ditunjang tersedianya infrastruktur yang memadai. Selain hal tersebut dengan dukungan kebijakan pemerintah yang positif, maka daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era globalisasi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut.

a. Sub Sektor Perkebunan

Perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan sektor pertanian, baik pada tingkat nasional maupun regional. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan, subsektor ini juga merupakan penggerak ekonomi daerah melalui aktivitas perdagangan komoditas unggulan. Di Kabupaten Kuantan Singingi, komoditas kelapa sawit dan karet menempati posisi penting sebagai tanaman perkebunan utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan prospek perdagangan yang menjanjikan. Data terbaru tahun 2024 yang dihimpun dari Dinas Perkebunan menunjukkan bahwa total luas areal tanaman kelapa sawit mencapai 252.317,36 hektar, disusul oleh karet seluas 101.376,76 hektar, dan kelapa dengan luas 501,64 hektar. Dari luas areal tersebut, produksi kelapa sawit mencapai angka 550.411,50 ton, karet 71.232,30 ton, dan kelapa 491,23 ton.



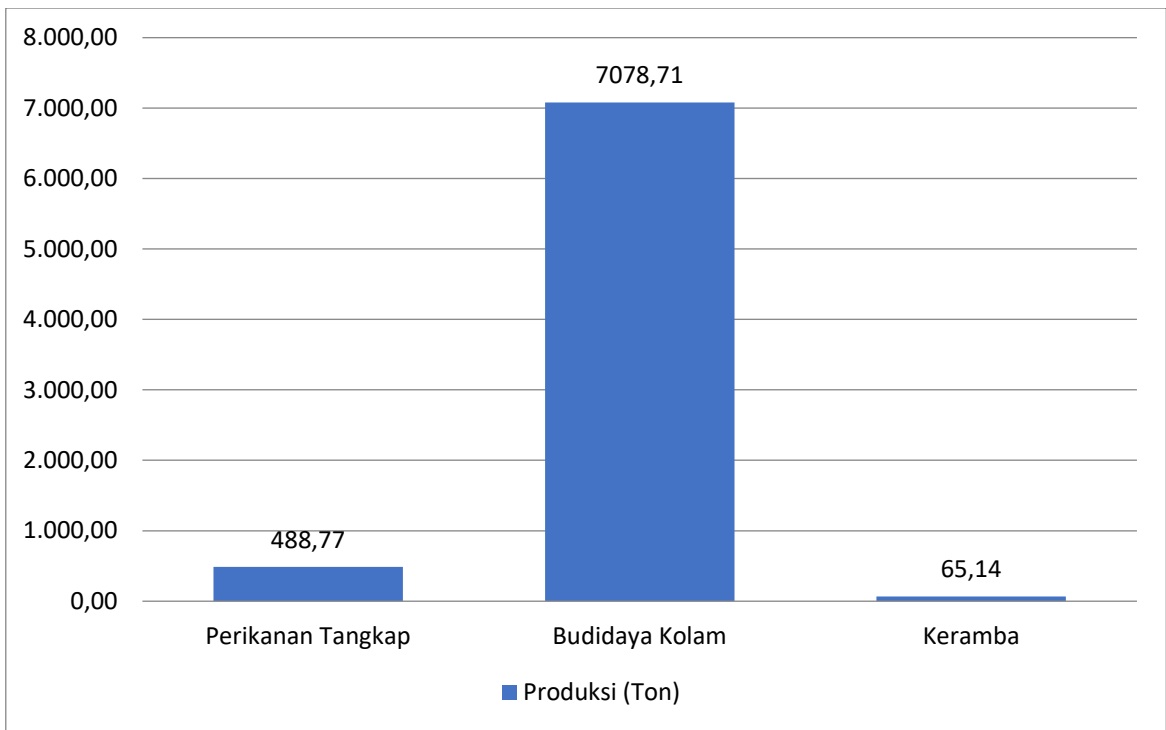
Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kuantan Singingi, 2025
 Grafik II.1 Luas (Ha) dan Produksi (Ton) Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2024

Kontribusi terbesar berasal dari kelapa sawit yang mendominasi baik dari sisi luasan maupun volume produksi, mempertegas posisinya sebagai tulang punggung perekonomian agribisnis di daerah ini. Potensi lahan yang luas dan produktivitas yang cukup tinggi menunjukkan bahwa sektor perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki daya tarik yang besar bagi investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya menjanjikan keuntungan ekonomi, investasi di sektor ini juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, pembangunan infrastruktur pedesaan, serta memperkuat basis ekspor komoditas perkebunan.

Dengan demikian, pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan dan modern menjadi kunci utama dalam mendongkrak nilai tambah dan daya saing regional. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu terus mendorong peningkatan produktivitas, akses pasar, serta adopsi teknologi dan praktik ramah lingkungan untuk memastikan bahwa sektor ini mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Sub Sektor Perikanan

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam, baik dari sisi sumber daya perairan, jumlah pelaku usaha, maupun potensi ekonominya. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan tahun 2024, total luas perairan umum yang tersedia mencapai 22.847,43 hektar, yang terdiri dari danau (180,95 ha), bendungan (236,10 ha), rawa (20.627,95 ha), dan sungai (1.802,43 ha). Luasan ini menunjukkan bahwa perairan umum di Kuantan Singingi merupakan modal alami yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap maupun budidaya. Pada tahun 2024, produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 7.078,73 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah sebesar 3.131,78 ton atau sekitar 44% dari total produksi budidaya kabupaten.



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.2 Jumlah Produksi Perikanan (dalam ton) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

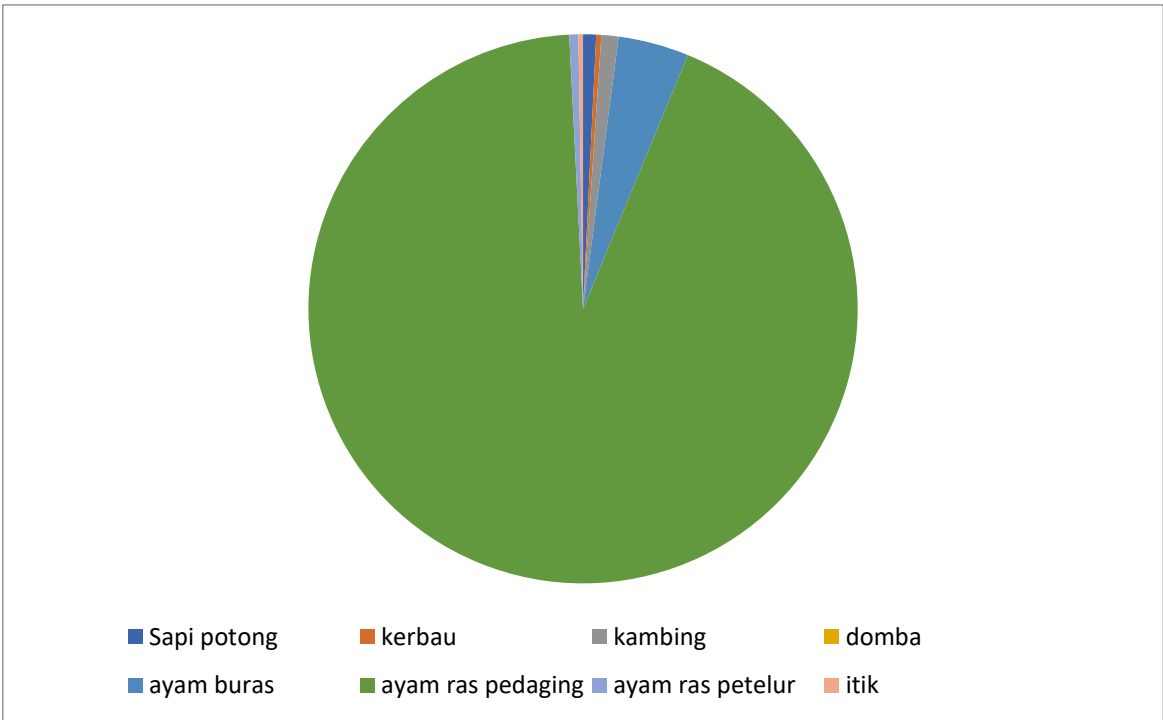
Sebaliknya, produksi terendah tercatat di Kecamatan Inuman, yaitu hanya 0,42 ton, menunjukkan ketimpangan pengembangan antar wilayah yang masih perlu perhatian. Budidaya ikan lebih didominasi oleh sistem kolam, dengan total luas lahan budidaya mencapai 336 ha dan melibatkan 2.230 rumah tangga perikanan (RTP). Jenis ikan utama yang dibudidayakan meliputi nila, patin, dan lele, serta didukung oleh produksi benih ikan sebanyak 118.320 ekor dari BBI dan hatchery mini, dan tambahan 65 juta ekor lebih dari 38 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain kolam, budidaya keramba juga mulai berkembang, meskipun masih terbatas. Tercatat hanya terdapat 114 unit keramba yang menghasilkan produksi sebesar 65,14 ton per tahun, dengan potensi yang masih sangat terbuka luas, terutama pada perairan sungai dan danau. Ini menandakan adanya peluang investasi besar dalam pengembangan keramba jaring apung (KJA) maupun sistem budidaya intensif lainnya, yang hingga kini belum dimanfaatkan optimal oleh sektor swasta. Dalam subsektor perikanan tangkap, jumlah armada penangkapan ikan mencapai 1.466 unit (1.312 perahu tanpa motor dan 154 perahu motor tempel), serta didukung oleh 4.534 nelayan tanpa perahu yang aktif berproduksi. Total produksi penangkapan di perairan umum mencapai 488,77 ton pada 2024, mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya.

Alat tangkap yang digunakan cukup bervariasi, didominasi oleh jala lempar (casting net), jaring, dan bubu, dengan total alat tangkap mencapai 6.000 unit tersebar di seluruh kecamatan. Dari sisi ekonomi lokal, sektor perikanan juga mulai berkembang dalam pengolahan hasil, seperti kerupuk ikan, nugget, bakso ikan, hingga ikan salai. Terdapat 77 Unit Pengolahan Ikan (UPI) aktif dengan total produksi mencapai 66.497 kg per tahun. Kecamatan Benai dan Gunung Toar menonjol sebagai sentra pengolahan ikan salai, dengan omzet bulanan usaha rumah tangga yang dilaporkan mencapai antara Rp 8 juta hingga Rp 39 juta. Dalam konteks perdagangan, volume ikan masuk (distribusi internal) tercatat mencapai 13.995 ton dengan nilai ekonomi mencapai Rp 909,67 juta. Sementara itu, volume ikan keluar dari wilayah Kuantan Singingi sebesar 3.817 ton dengan nilai transaksi sebesar Rp 91,6 juta, menandakan potensi peningkatan rantai nilai yang masih terbuka lebar apabila dilakukan hilirisasi dan diversifikasi produk lebih lanjut.

c. Sub Sektor Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Kuantan Singingi memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan hewani, peningkatan pendapatan petani-peternak, serta kontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat. Pada tahun 2024, populasi ternak besar dan

kecil yang tercatat meliputi 23.623 ekor sapi potong, 9.209 ekor kerbau, 31.009 ekor kambing, dan 80 ekor domba. Adapun populasi ternak unggas terdiri atas 128.314 ekor ayam buras, 2.865.750 ekor ayam ras pedaging, 16.400 ekor ayam ras petelur, dan 9.940 ekor itik. Angka ini menegaskan bahwa sektor peternakan, khususnya ayam ras pedaging, memiliki skala produksi yang cukup besar dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung ketersediaan protein hewani.



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi
Grafik II.3 Populasi Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Distribusi ternak tidak merata di seluruh kecamatan, di mana Kuantan Tengah menempati posisi dominan untuk ternak besar (terutama kambing dan sapi), sementara populasi ayam ras pedaging terkonsentrasi di Kuantan Tengah, Singingi Hilir, dan Pangean. Data menunjukkan bahwa produksi daging dari seluruh ternak tahun 2023 mencapai 3.204,95 ton, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 9.300 ton. Penurunan produksi tersebut terutama berasal dari sektor unggas, yang menunjukkan perlunya stabilisasi pasar dan perlindungan rantai pasok.

Salah satu program unggulan di sektor ini adalah Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA), yang memanfaatkan lahan perkebunan sawit sebagai padang penggembalaan dan pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Dengan luas perkebunan sawit yang mencapai 289.536,05 hektare, program SISKA sangat potensial dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi lahan dan produktivitas peternakan. Selain itu, penggunaan urin dan kotoran sapi sebagai pupuk ramah lingkungan telah menjadi praktik yang mendukung prinsip pertanian berkelanjutan. Dukungan kelembagaan juga tampak dari keberadaan Pasar Ternak di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, yang telah beroperasi selama empat tahun. Pasar ini menjadi pusat transaksi jual beli ternak setiap hari Rabu, dengan pembeli datang dari berbagai wilayah.

Aktivitas pasar ternak tidak hanya menggerakkan ekonomi peternakan, tetapi juga memberikan multiplier effect ekonomi lokal melalui munculnya aktivitas perdagangan dan jasa lainnya di sekitar lokasi pasar. Untuk mendukung peningkatan populasi dan produktivitas ternak, Dinas Perkebunan dan Peternakan telah melaksanakan berbagai program seperti Inseminasi Buatan (IB), intensifikasi kawin alam, serta program Gerakan Penyerentakan Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB). Di samping itu, pengendalian dan pencegahan penyakit menular ternak juga menjadi prioritas dalam rangka menjaga kesehatan ternak dan mencegah kerugian ekonomi akibat wabah.

Dengan sumber daya yang tersedia serta program yang telah berjalan, sektor peternakan di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Diperlukan dukungan berkelanjutan melalui peningkatan infrastruktur peternakan, pelatihan teknis bagi peternak, kemitraan usaha, serta perluasan akses pasar agar sektor ini dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

d. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sektor tanaman pangan di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian dari potensi sumber daya alam yang bersifat terbarukan (*renewable resource*) dan memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi dasar masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta peningkatan pendapatan petani skala kecil. Pemanfaatan lahan pertanian untuk tanaman pangan saat ini telah diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi, perluasan areal tanam, dan optimalisasi komoditas lokal unggulan.

Tabel II.4 Luas Tanam, Luas Panen Komoditas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Uraian	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Jagung	88	78,7	262,80	3,47
2	Ubi kayu	120,1	115,10	1.302,01	10,10
3	Ubi Jalar	1,8	1,5	11,5	7,67
4	Kacang tanah	33,7	32,5	29,45	1,37
5	Kedelai	5	5	6,05	1,21
6	Kacang Hijau	3,6	0,9	0,79	1,14

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, 2025

Jagung: Potensi Pengembangan Palawija

Komoditas jagung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu palawija strategis. Pada tahun berjalan, luas panen mencapai 78,7 hektare dengan produksi sebesar 262,80 ton. Produktivitas sebesar 3,47 ton/ha menunjukkan perlunya peningkatan melalui program intensifikasi dan penyediaan sarana produksi pertanian. Pemerintah daerah akan mendorong penguatan budidaya jagung sebagai bahan pangan alternatif dan pendukung industri pakan ternak melalui pelatihan, penyediaan pupuk, serta fasilitasi kelompok tani.

Ubi Kayu: Komoditas Bernilai Ekonomi

Ubi kayu menjadi salah satu komoditas pangan penting dengan luas panen 115,10 hektare dan produksi sebesar 1.302,01 ton. Produktivitas yang mencapai 10,10 ton/ha mencerminkan potensi pengembangan yang besar, baik untuk pangan lokal maupun bahan baku industri rumah tangga. Pemerintah daerah akan mendorong hilirisasi ubi kayu melalui pembinaan kelompok tani, dukungan pengolahan pascapanen, serta penguatan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Ubi Jalar: Potensi Diversifikasi Pangan

Ubi jalar memiliki luas panen 1,5 hektare dengan produksi sebesar 11,5 ton. Produktivitas yang relatif tinggi, yaitu 7,67 ton/ha, menunjukkan bahwa komoditas ini berpotensi dikembangkan meskipun skala budidayanya masih terbatas. Pemerintah daerah akan mendorong pengembangan ubi jalar sebagai bagian dari diversifikasi pangan melalui penyediaan varietas unggul, perluasan lahan tanam, serta promosi konsumsi pangan lokal berbasis umbi-umbian.

Kacang-kacangan: Diversifikasi Pangan Nabati

Produksi tanaman kacang-kacangan di daerah masih tergolong rendah. Kacang tanah menghasilkan 32,5 ton dengan produktivitas 1,37 ton/ha, kedelai 5 ton dengan produktivitas 1,21 ton/ha, dan kacang hijau 0,9 ton dengan produktivitas 1,14 ton/ha. Angka ini menunjukkan bahwa pengembangan kacang-kacangan masih perlu diperkuat untuk mendukung diversifikasi pangan dan penyediaan sumber protein nabati. Pemerintah daerah akan mendorong peningkatan produksi melalui penyediaan benih unggul, insentif budidaya, serta dukungan harga yang lebih stabil agar petani terdorong mengembangkan komoditas kacang-kacangan secara berkelanjutan.

e. Sektor Lahan dan Hutan

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki sumber daya lahan dan hutan yang secara historis telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kayu bakar, dan bahan bangunan. Pemanfaatan tersebut dilakukan secara alami, dengan pendekatan subsisten yang mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap potensi ekologis setempat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya dinamika pembangunan, pemanfaatan lahan dan kawasan hutan mengalami pergeseran menuju kegiatan yang lebih produktif, terencana, dan berskala ekonomi.

Sebagaimana karakteristik wilayah tropis lainnya, kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan penyimpan karbon, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan adat. Dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, kawasan hutan dan lahan mulai mengalami konversi fungsi menjadi kawasan permukiman, pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata.

Transformasi fungsi ruang tersebut telah membuka berbagai peluang ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan wilayah. Namun demikian, proses pemanfaatan lahan dan hutan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan munculnya tekanan terhadap lingkungan, seperti peningkatan laju deforestasi, degradasi lahan, erosi, banjir, serta menurunnya keanekaragaman hayati. Selain itu, masih dijumpai luasan lahan kritis yang memerlukan upaya rehabilitasi secara terarah.

Menghadapi dinamika tersebut, kebijakan pemanfaatan ruang ke depan perlu diarahkan pada penguatan sistem tata kelola lahan dan kawasan hutan berbasis keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi ekologis. Pendekatan pembangunan yang berkelanjutan menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, melalui integrasi perencanaan tata ruang, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan dan konservasi lingkungan. Melalui strategi yang holistik dan berorientasi jangka panjang, pengelolaan lahan dan hutan diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

II.1.2.4 Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Penggalian

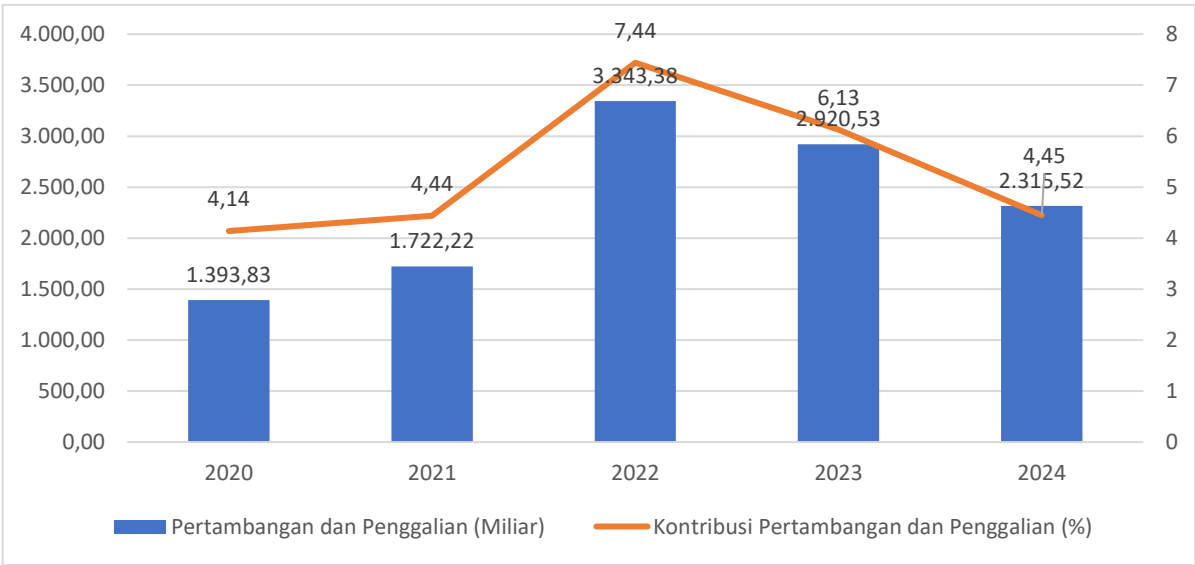
a. Sektor Sumber Daya Mineral

Kabupaten Kuantan Singingi juga mempunyai sumber daya mineral yang cukup besar dan beragam, seperti batu bara, emas, sirtu, kaolin, bentonite, bitumen padat, batu gamping dan mangan. Ada beberapa yang sudah dieksploitasi seperti batu bara, emas dan mangan. Pengembangan potensi pertambangan meliputi :

1. Terdapat sekitar 12.413,37 Ha lahan memiliki kandungan emas aluvial baik di daratan maupun diperbukitan. Emas aluvial adalah potensi emas dalam bentuk butiran yang ada di permukaan dan dekat permukaan dan sudah pernah menjadi tempat pencarian emas

dimasa lalu dengan alat-alat sederhana oleh masyarakat. Pertambangan emas dengan wilayah meliputi Kecamatan Singingi, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Gunung Toar;

2. Pertambangan batubara dengan wilayah meliputi Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi Hilir, dan Kecamatan Logas Tanah Darat Potensi pertambahan batu bara seluas 117.265,75 hektar dengan potensi produksi sebanyak 596.300.525 ton dengan hasil pertambangan batubara di masuk kategori sedang dengan kandungan kalori antara 4.510-7.100 kilo kalori. Berikut disajikan Gambar kontribusi sektor pertambangan dan penggalian Batubara di Kabupaten Kuantan Singing:



Sumber : Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.4 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian Batubara di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

3. Kaolin dengan wilayah meliputi Kecamatan Kuantan Mudik,dan Kecamatan Singingi Hilir;
4. Bentonit dengan wilayah Kecamatan Singingi Hilir;
5. Batu Gamping dengan wilayah Kecamatan Kuantan Mudik dengan luas areal sekitar 10 hektar.

b. Sektor Energi

Selain itu, Potensi yang dapat dikembangkan di Sungai Singingi adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Selain itu Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air/Irigasi dan Rawa, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera III pada Tahun 2015 telah melaksanakan Penyusunan Bendungan Lubuk Ambacang Kabupaten Kuantan Singingi. Pemanfaatan bendungan tersebut untuk pengembangan PLTA dapat menghasilkan output maksimum yang direncanakan adalah 3 x 45.200 Kw dengan total nilai investasi Rp.3.748.421.000.000,- (tiga triliun tujuh ratus empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah).

Tabel II.5 Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Sub Sektor	Komoditas	Luas (Ha)
1	Perkebunan	Karet	101.376,76
2	Perkebunan	Kelapa Sawit	252.317,36
3	Perkebunan	Kakao	286,97
4	Perikanan	Perairan Umum	22.847,43
5	Peternakan	Siska (Sapi Kelapa Sawit)	133.928,21

No	Sub Sektor	Komoditas	Luas (Ha)
6	Tanaman Pangan	Padi	4.748,80
7	Kehutanan	Hutan Produksi Tetap	94.667,00
8	Pertambangan	Emas/Tanah Emas Aluvial	12.413,37
9	Pertambangan	Batubara	117.265,75
10	Energi	Kelistrikan (PLTA)	-
11	Pariwisata	Alam, Event dan Sejarah	-

Sumber : Data Olahan Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi, 2024
 Kuantan Singingi Dalam Angka 2025

II.1.2.5 Pengembangan Kawasan Pariwisata

Dalam rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi, wilayah ini sangat berpotensi untuk mengembangkan kegiatan pariwisata dan juga sebagai ikon daerah, terutama pariwisata alam dan pariwisata budaya.

Pada sektor Pariwisata, Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi yang sangat besar. Potensi wisata tersebut berupa keragaman budaya ataupun keindahan alam, potensi wisata ini sangat prospektif untuk dikembangkan adalah jenis objek wisata alam dan wisata budaya dengan atraksi-atraksi budaya lainnya yang dapat dikembangkan diantaranya :

a. Pacu Jalur

Sejarah Pacu Jalur berawal abad ke-17, di mana jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu hingga Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar- benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang. Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayung-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (gulang-gulang) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri). Pacu Jalur merupakan potensi wisata yang digelar setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pengertian dari pacu jalur itu sendiri adalah Pacu adalah bertanding dan jalur adalah perahu yang panjang dengan ukuran 25–40 meter mempunyai muatan 40–60 orang, pacu jalur termasuk dalam agenda kelandar nasional dan pacu jalur merupakan budaya Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah ada sejak dulu bahkan telah berumur ratusan tahun, pacu Jalur dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Air Terjun Tujuh Tingkat

Terletak di Kecamatan Hulu Kuantan 37 Km dari Teluk Kuantan. Ketika berada di Lubuk Jambi ibukota Kecamatan Kuantan Mudik (22 Km dari Teluk Kuantan) bus anda akan bergerak menuju arah Kiliran Jao dan selepas Kota Lubuk Jambi bertemu dengan persimpangan satu simpang ke kiri arah Kiliran Jao, disitulah tadi letaknya Air Terjun Batang Koban. Jika dari simpang selepas Lubuk Jambi, bus kita akan bergerak ke kanan terus sampai sejauh 11 Km akan sampai ke Kota Lubuk Ambacang Ibukota Kecamatan Hulu Kuantan. Dengan menaiki sampan bermesin (pompong) sejauh 4 Km anda akan melaluinya dengan kenyamanan arus sungai kadangkala tenang dan sunyi kadangkala ribut dengan gelombang arung jeramnya dilengkapi dengan pemandangan alam dan bukit-bukit yang terjal dengan hutan lindungnya yang masih asli. Dalam perjalanan kita dapat menyaksikan binatang kera, berbagai jenis burung dan binatang lainnya seakan menyapa bagi pengunjungnya. Akhirnya sampailah ke lokasi Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban. Tujuh Tingkat maksudnya terdapat tujuh buah air terjun yang bertingkat, akhirnya sampai ke dasar sungai dan terus mengalir ke Sungai Kuantan yang mengalir sebagian besar daerah Kuantan Singingi.

c. Air Terjun Guruh Gemurai

Kuantan Singingi adalah rumah dari banyak air terjun. Tercatat ada 23 air terjun yang terdapat di kabupaten yang dilewati Sungai Kuantan dan Sungai Singingi ini. Salah satu yang paling indah dan mudah dicapai adalah air terjun Guruh Gemurai.

Terletak sekitar 25 Km dari Teluk Kuantan. Nama Guruh Gemurai diambil dari bahasa daerah setempat, dimana Guruh berarti Gemuruh (bunyi air terjun dimaksud); sedangkan Gemurai adalah percikan air yang berserakan. Jadi air terjun Guruh Gemurai berarti air terjun yang bunyi percikannya (curahannya) bergemuruh yang berada tepatnya di desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik, anda memulai perjalanan yang mendaki sesekali melalui jalan yang berbelok-belok dengan panorama alam yang terkenal bagian dari Bukit Barisan, sampailah anda ditengah-tengah pendakian yang berbukit-bukit dan lembah, disanalah terdapat air terjun Guruh Gemurai.

d. Ekowisata Bukit Rimbang Bukit Baling

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.149/V/1982, kawasan SMBRBB seluas 136.000 ha ditetapkan sebagai suaka margasatwa. Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling terletak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan kawasan ini merupakan potensi yang dapat dikelola menjadi kawasan ekowisata sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat sekitarnya. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan antara lain sebagai wahana riset dan penelitian pengembangan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan dengan luas 136.000 hektar itu memiliki tingkat keanekaragaman ekosistem yang sangat tinggi. Di kawasan itu terdapat berbagai flora, termasuk Rafflesia Merah Putih yang tergolong langka. Selain itu, kawasan itu juga menjadi habitat lima kucing hutan, antara lain macan dahan, kucing emas, macan tutul, "marble cat", dan harimau Sumatera. Kawasan ini juga dapat dikembangkan menjadi tempat wisata adventure seperti arung jeram, jelajah alam dan lainnya.

Wisata arung jeram saat ini tidak hanya diminati oleh wisatawan mancanegara. Arung jeram telah menjadi pilihan wisata yang populer bagi wisatawan domestik. Arung jeram merupakan salah satu kegiatan olah raga yang bernilai rekreasi (sport tourism) yang banyak menarik minat orang untuk mengikutinya. Selain diperlombakan sebagai suatu cabang olah raga, arung jeram juga dianggap sebagai wisata petualangan yang menantang sekaligus atraktif dan memberikan pengalaman yang cukup mendalam bagi yang pernah mengikutinya. Saat ini wisata arung jeram telah berkembang menjadi industri yang mampu mendorong peningkatan devisa dan pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja yang tidak sedikit ditingkat local termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi.

e. Danau Mesjid Koto Kari

Danau masjid koto kari terletak dalam kawasan wisata kenegerian Kari Kecamatan Kuantan Tengah Teluk Kuantan, berjarak kurang lebih 3 Km dari ibukota Kabupaten Kuantan Singingi (Teluk Kuantan). Danau ini memiliki ukuran dengan panjang 800-meter dan lebar 200-meter dikelilingi oleh perkebunan karet milik masyarakat sekitar, disamping untuk tempat wisata danau ini juga berfungsi sebagai sumber air irigasi dan tempat mandi penduduk setempat.

f. Danau Kebun Nopi

Danau Kebun Nopi adalah Danau yang beberapa waktu lalu menjadi tempat penyelenggaraan PON Riau Tahun 2012 cabang dayung, dengan demikian sebutan danau yang memiliki panjang 2.200 meter, lebar 180 meter, dengan kedalaman 2,5 meter itu. Nama Kebun Nopi diambil dari nama seorang pria, Nopi juragan kebun yang dulunya memiliki berhektar-hektar perkebunan di Desa Bukit Pedusunan, tepatnya di sekitar kawasan danau tersebut, selain sebagai tempat penyelenggaraan PON Riau kini Danau Kebun Nopi menjadi tempat objek wisata masyarakat. Danau Kebun Nopi merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik. Danau ini memiliki Panjang lebih Kurang 800-meter dan lebar lebih kurang 100 meter.

g. Desa Wisata

Desa wisata terletak 3 Km dari Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi (Teluk Kuantan) dengan menggunakan bus menuju ke timur yakni arah ke Rengat ibukota Kabupaten Indragiri Hulu sejauh 3 Km sampailah di desa Koto Sentajo yang ditetapkan sebagai Desa Wisata. Di desa ini dapat kita saksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bangunan asli dengan motif khusus.

Masyarakat di desa tersebut masih kental dengan adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang leluhurnya. Masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lama itu, namun ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di belakang desa wisata ini masih terdapat hutan yang asli, yang sampai sekarang masih dilarang untuk merusaknya, dan ini telah ditetapkan sebagai hutan lindung seluas 5.000 Ha.

h. Wisata Sejarah

Potensi Wisata Sejarah di Kabupaten Kuantan Singingi cukup banyak akan tetapi belum ada yang dikembangkan. Potensi yang layak untuk dikembangkan diantaranya Tambang Batu Bara Peninggalan Jepang (Kecamatan Singingi Hilir), Rumah Adat Koto Benai (Kecamatan Benai), Rumah Adat Koto Rajo (Kecamatan Kuantan Hilir Seberang), dan rumah adat Koto Sentajo (Kecamatan Sentajo Raya).

i. Air Panas Alam

Diseberang Sungai Pinang, Kecamatan Kuantan Mudik, 33 Km dari Teluk Kuantan. Dari Teluk Kuantan arah Kiliran Jao yakni 500 m sebelum sampai di Kota Lubuk Jambi, anda akan menjumpai simpang jalan ke arah kanan dan terus melanjutkan perjalanan 11 Km akan sampai ke satu tempat bersejarah yang konon sejak nenek moyang sudah dikunjungi beramai-ramai oleh masyarakat dalam dan luar Kuantan Singingi untuk berobat penyakit kulit, reumatik dan lain-lain. Itulah Air Panas Alam yang keluar dari perut bumi atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dari persimpangan jalan anda melalui beberapa desa yakni Pulau Binjai, Pabaun, Saik dan sampailah ke lokasi dimaksud.

j. Wisata Lain-lain

Potensi wisata lain yang mendapat perhatian untuk dikembangkan adalah Kesenian Tradisional Daerah seperti Seni Tari, Randai dan Rarak Godang.

II.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk menopang keberlangsungan hidup manusia, makhluk hidup lain, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Adapun daya tampung lingkungan adalah kapasitas lingkungan dalam menyerap zat, energi, maupun unsur lain yang masuk ke dalamnya tanpa menimbulkan gangguan pada fungsi ekologis.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan penggunaan konsep jasa ekosistem (ecosystem services) sebagai metode standar dalam pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Metode ini dipilih karena lebih praktis dan aplikatif, serta dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai tahapan perencanaan pembangunan wilayah a) jasa ekosistem penyediaan pangan, b) jasa ekosistem penyediaan air bersih, c) dan jasa ekosistem penyediaan serat . Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan agar pembangunan yang dilaksanakan

tetap berada dalam batas kemampuan lingkungan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

II.1.3.1 Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jasa ekosistem penyedia air merupakan kemampuan suatu ekosistem dalam menghasilkan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, pertanian, industri, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Air sebagai hasil dari proses ekosistem memiliki peran sentral dalam mendukung ketahanan wilayah, mencegah kekeringan, serta menjaga keberlanjutan produksi pangan dan energi.

Berdasarkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Riau, ketersediaan jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan sangat baik secara umum. Dari total luas wilayah yang dianalisis, tercatat sebesar 333.624 hektar atau 61,13% wilayah berada dalam kategori sangat tinggi dalam hal penyediaan air. Sementara itu, wilayah dengan kategori tinggi mencapai 174.588 hektar (31,99%), diikuti oleh kategori sedang seluas 33.872 hektar (6,21%), kategori rendah seluas 3.606 hektar (0,66%), dan kategori sangat rendah hanya 95 hektar (0,02%).

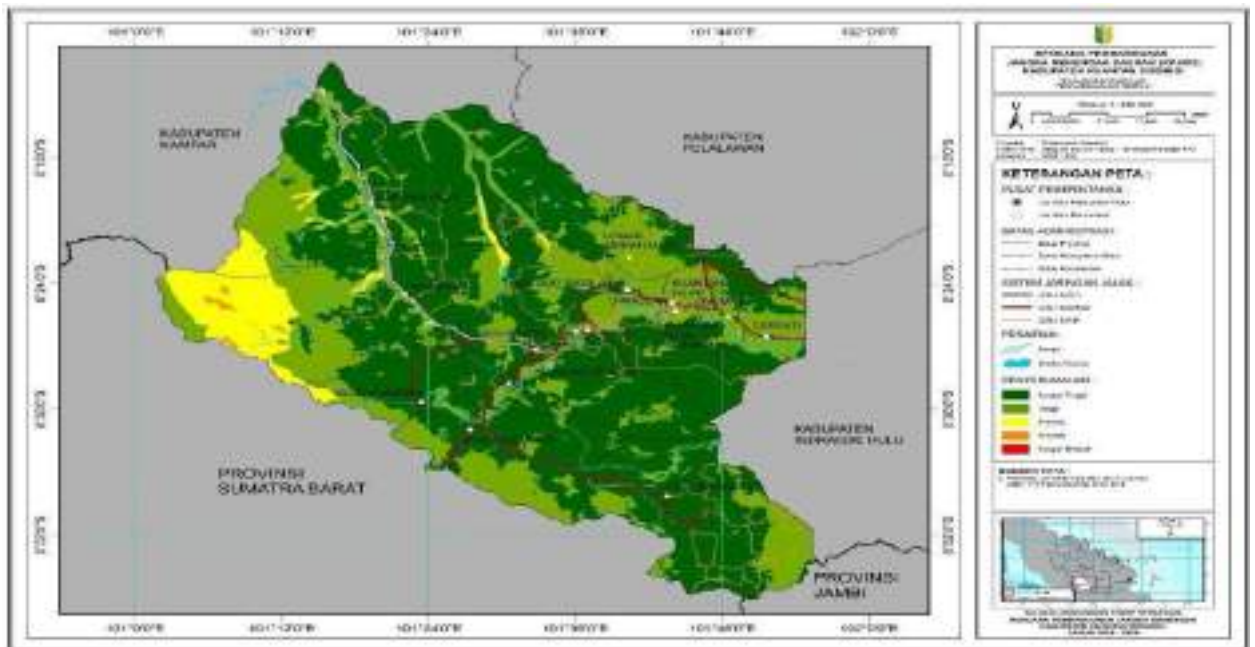
Tingginya proporsi wilayah dengan kategori sangat tinggi dan tinggi menandakan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya air yang melimpah, baik dari ekosistem sungai, rawa, danau, maupun kawasan tangkapan air di perbukitan dan hutan. Kondisi ini sangat mendukung kebutuhan domestik, pertanian, perikanan, serta pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis sumber daya alam.

Namun demikian, wilayah dengan kategori sedang hingga sangat rendah tetap menjadi perhatian khusus, terutama dalam konteks distribusi air, potensi kerawanan kekeringan musiman, dan kebutuhan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi. Oleh sebab itu, upaya perlindungan kawasan tangkapan air, rehabilitasi hutan, serta penguatan sistem irigasi dan distribusi air bersih perlu terus didorong guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat jasa ekosistem ini secara berkelanjutan. Gambaran lengkap luasan dan proporsi jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Kuantan Singingi disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.6 Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Air Kabupaten Kuantan Singingi

Kategori	Luasan (ha)	Persentase
Sangat Tinggi	333.624	61,13%
Tinggi	174.588	31,99%
Sedang	33.872	6,21%
Rendah	3.606	0,66%
Sangat Rendah	95	0,02%
Total	545.786	100%

Sumber : RPPLH Provinsi Riau



Sumber : RPPLH Provinsi Riau, 2022

Gambar II.6 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air

a. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia pangan merupakan kemampuan ekosistem dalam menghasilkan produk pangan yang berasal dari sumber daya hayati, seperti tanaman, hewan, maupun perikanan perairan darat. Keberadaan jasa ini sangat vital untuk menjamin ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Riau, distribusi jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Kuantan Singingi memperlihatkan variasi tingkat ketersediaan antarwilayah. Dari total luas wilayah yang dianalisis, tercatat bahwa 307.407 hektar atau 56,32% wilayah termasuk dalam kategori rendah dalam hal penyediaan pangan. Sementara wilayah dengan kategori tinggi seluas 153.475 hektar (28,12%), dan kategori sedang meliputi 84.904 hektar (15,56%).

Dominasi kategori rendah menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi penyediaan pangan yang masih perlu dioptimalkan, baik dari sisi ketersediaan lahan produktif, sistem irigasi, hingga penguatan kapasitas petani dan nelayan. Keterbatasan akses terhadap lahan subur serta persebaran lahan pertanian yang tidak merata berpengaruh terhadap tingkat produksi pangan daerah. Meski demikian, masih terdapat area yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai sentra produksi pangan, khususnya pada wilayah dengan kategori tinggi.

Untuk itu, upaya penguatan ketahanan pangan daerah ke depan memerlukan strategi yang terintegrasi, seperti optimalisasi pemanfaatan lahan, intensifikasi pertanian, penguatan infrastruktur pertanian, serta perlindungan ekosistem alami sebagai penyangga sistem pangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyediakan pangan secara berkelanjutan dan mendorong kemandirian pangan di tingkat lokal.

II.1.3.2 Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air

Jasa ekosistem pengatur tata aliran air merupakan peran penting yang dijalankan ekosistem dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi, mengendalikan banjir, serta memastikan ketersediaan air bagi berbagai kebutuhan manusia, pertanian, dan lingkungan. Pengelolaan tata aliran air yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologis dan menjaga produktivitas lahan.

Berdasarkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Riau, sebaran jasa ekosistem pengatur tata aliran air di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berada dalam kategori sangat rendah, yaitu seluas 297.143 hektar atau 54,44% dari total luas wilayah. Sementara wilayah dengan kategori rendah seluas 203.982 hektar (37,37%), tinggi 31.808 hektar (5,83%), sedang 12.759 hektar (2,34%), dan kategori sangat tinggi hanya 95 hektar (0,02%).

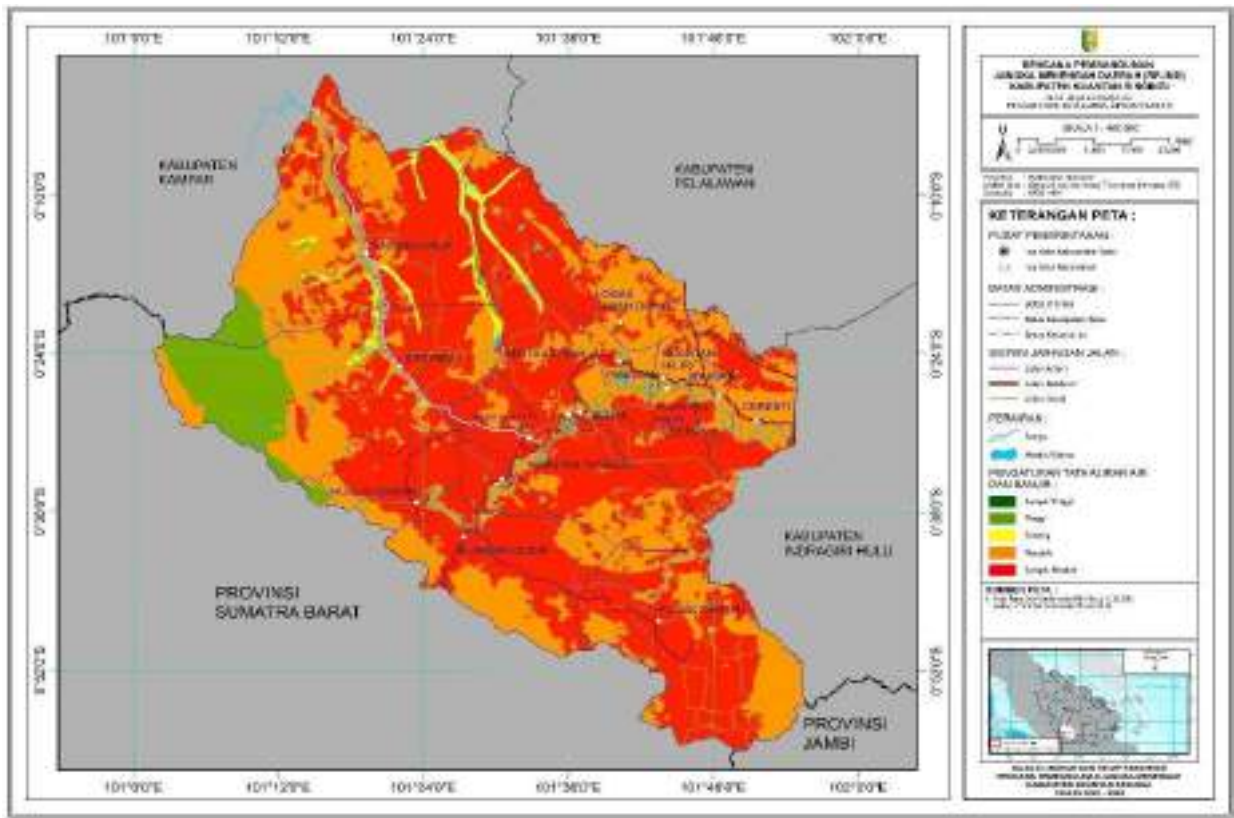
Tingginya proporsi wilayah dengan kategori sangat rendah dan rendah menunjukkan bahwa kapasitas ekosistem dalam mengatur tata aliran air di Kabupaten Kuantan Singingi masih perlu ditingkatkan, terutama melalui rehabilitasi kawasan tangkapan air, perlindungan daerah hulu sungai, dan penguatan fungsi kawasan lindung. Wilayah dengan kategori tinggi dan sedang yang masih terbatas juga menjadi perhatian, mengingat peran vitalnya dalam mengurangi risiko banjir dan kekeringan.

Optimalisasi fungsi ekosistem pengatur tata aliran air di masa mendatang perlu menjadi fokus kebijakan, baik melalui perbaikan tata kelola DAS (daerah aliran sungai), penegakan perlindungan kawasan resapan air, maupun pemulihan ekosistem rawa dan hutan. Dengan demikian, ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana dapat semakin ditingkatkan.

Tabel II.7 Luasan Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air Kabupaten Kuantan Singingi

Kategori	Luasan (ha)	Persentase
Sangat Tinggi	95	0,02%
Tinggi	31.808	5,83%
Sedang	12.759	2,34%
Rendah	203.982	37,37%
Sangat Rendah	297.143	54,44%
Total	545.786	100%

Sumber : RPPLH Provinsi Riau, 2025



Sumber : RPPLH Provinsi Riau, 2022

Gambar II.7 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air

II.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar fundamental dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Ketersediaan energi listrik yang merata dan handal sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kehidupan rumah tangga sehari-hari. Di sisi lain, akses air bersih yang memadai menjadi faktor penentu bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan aktivitas pertanian serta industri. Sementara itu, kemandirian pangan tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dari sumber lokal, tetapi juga menjadi indikator strategis dalam mengurangi ketergantungan eksternal dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi daerah.

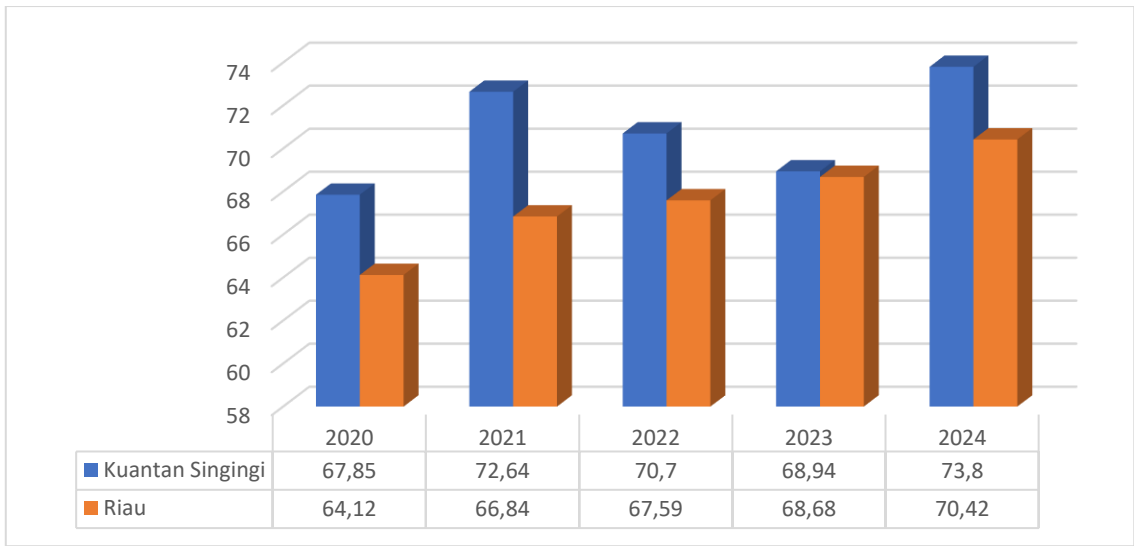
Oleh sebab itu, penilaian kondisi berketahanan energi, air, dan pangan dilakukan secara terpadu dengan menggunakan sejumlah indikator utama, seperti Konsumsi Listrik Per Kapita, Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, dan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak. Integrasi berbagai indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian pembangunan, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko maupun tantangan yang perlu segera direspons. Dengan pemetaan kondisi dan capaian ketahanan energi, air, dan pangan secara menyeluruh, RPJMD diharapkan mampu merumuskan strategi yang efektif, adaptif, dan berbasis bukti guna memperkuat kemandirian dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

II.1.4.1 Kemandirian Pangan

Tercapainya ketahanan bangsa sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan sektor pangan. Untuk mendukung upaya tersebut, Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi IX tahun 2008 merekomendasikan pentingnya optimalisasi pemanfaatan pangan lokal guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menurunkan prevalensi stunting. Upaya ini harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan gizi, cita rasa, tingkat pencernaan, penerimaan masyarakat, mutu pangan, serta daya beli masyarakat.

Capaian ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat positif jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kuantan Singingi yang secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi.

Berdasarkan data, IKP Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 sebesar 67,85 mengalami peningkatan signifikan menjadi 72,64 pada tahun 2021. Meskipun sempat menurun menjadi 70,70 pada tahun 2022 dan 68,94 pada tahun 2023, capaian IKP kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 73,80. Nilai ini menempatkan Kabupaten Kuantan Singingi dalam kelompok 5 (baik) pada rentang cut-off point IKP nasional, yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah ini sudah cukup baik dan berada di atas rerata provinsi. Perkembangan IKP Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber

: Badan Pangan Nasional 2025

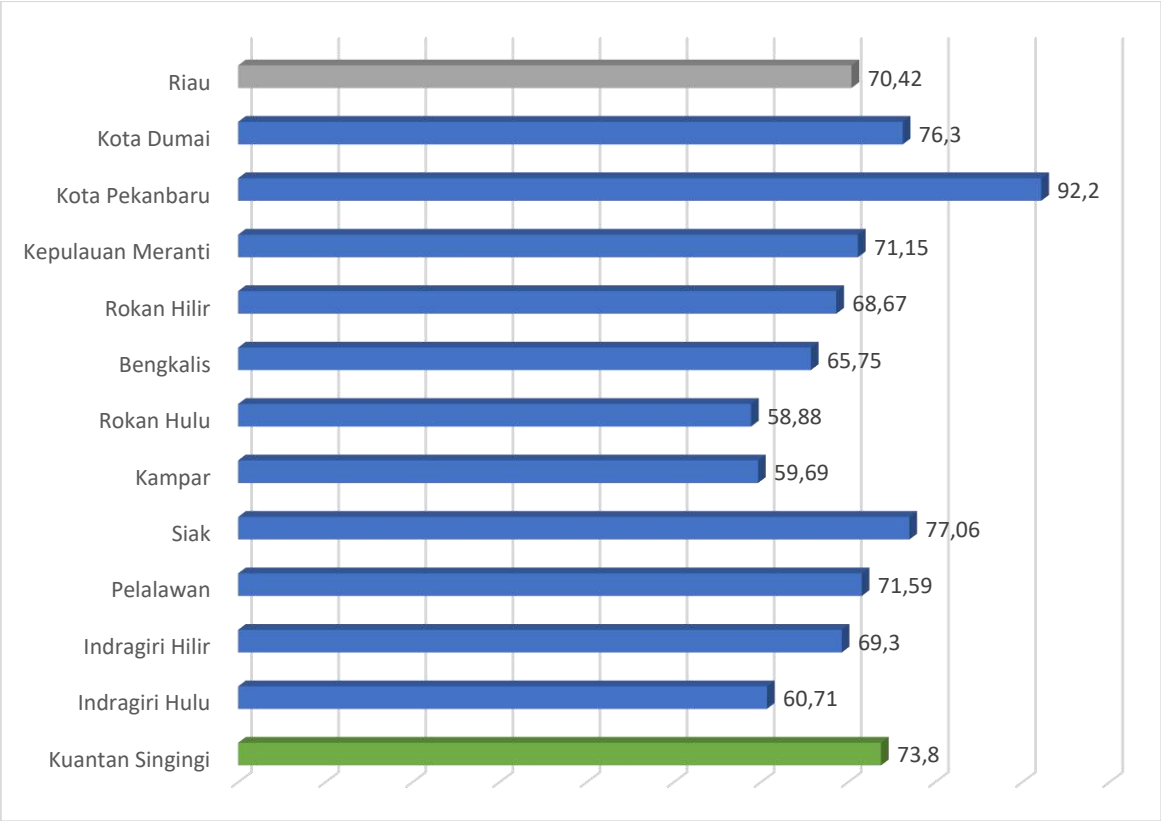
Grafik II.5 Perkembangan IKP Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau 2020–2024

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024, Kabupaten Kuantan Singingi menempati posisi strategis di antara 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, dengan nilai IKP sebesar 73,80. Pencapaian ini menempatkan Kuantan Singingi dalam kelompok 5 (baik) berdasarkan cut-off point nasional, serta menegaskan bahwa tingkat ketahanan pangan di daerah ini relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah lain di provinsi. Adapun rata-rata IKP Provinsi Riau pada tahun yang sama adalah sebesar 70,42.

Kuantan Singingi menjadi salah satu daerah dengan capaian IKP tertinggi di provinsi, hanya berada di bawah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sementara beberapa kabupaten/kota lain, seperti Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hulu, masih mencatatkan nilai IKP di bawah rata-rata provinsi. Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Kuantan Singingi dalam menopang ketahanan pangan tingkat provinsi, baik dari aspek ketersediaan, distribusi, maupun akses pangan masyarakat.

Peningkatan IKP yang dicapai oleh Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 juga memperlihatkan efektivitas program pembangunan ketahanan pangan daerah yang telah dijalankan. Hal ini tercermin pada penguatan sistem distribusi, perbaikan aksesibilitas, serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

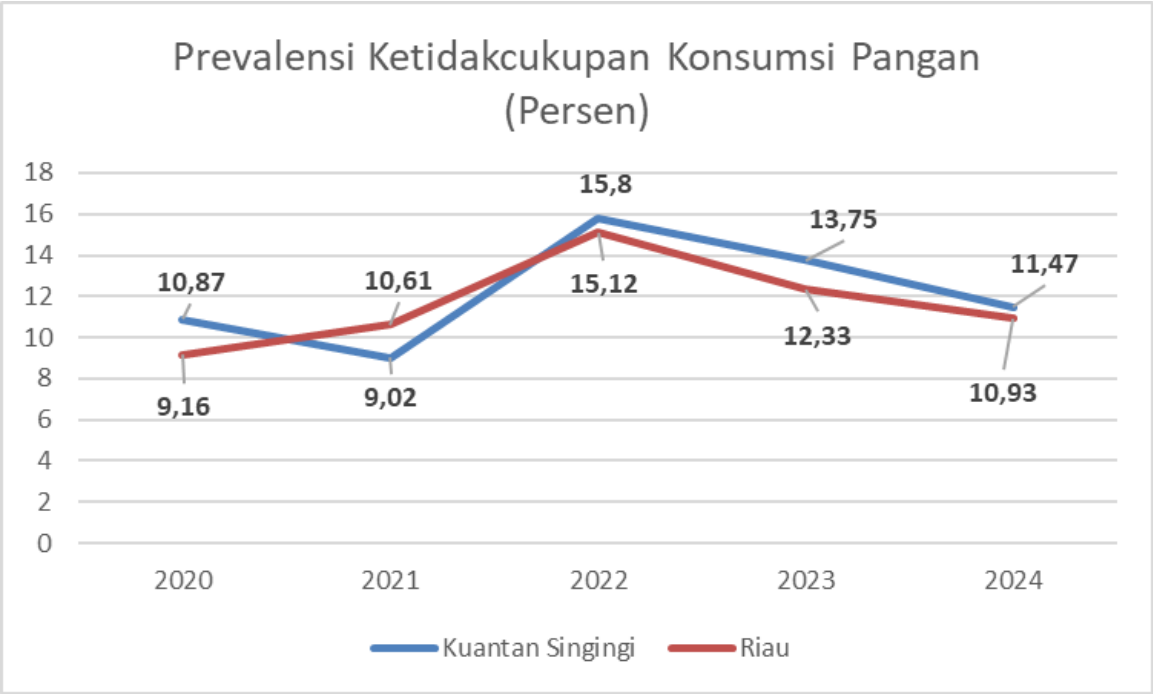
Namun demikian, capaian tersebut sekaligus menjadi dasar untuk mendorong upaya percepatan peningkatan ketahanan pangan, khususnya di wilayah-wilayah yang nilai IKP-nya masih di bawah rata-rata. Kuantan Singingi dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) bagi kabupaten/kota lain dalam hal penguatan kelembagaan pangan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi program berbasis potensi daerah. Dengan demikian, diharapkan terwujud ketahanan pangan Provinsi Riau yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.



Sumber : Badan Pangan Nasional 2025

Grafik II.6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau 2024

Kabupaten Kuantan Singingi telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki ketahanan konsumsi pangan masyarakatnya selama periode 2020–2024. Data BPS mencatat adanya tren penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 13,75% di tahun 2020, menurun secara bertahap hingga mencapai 9,02% pada tahun 2023. Meski pada tahun 2024 angka prevalensi tercatat sebesar 15,8%, hal ini juga mencerminkan meningkatnya cakupan pendataan dan kesadaran masyarakat terhadap isu kecukupan pangan. Angka ini masih berada dalam kisaran rata-rata provinsi, di mana prevalensi Riau pada tahun yang sama sebesar 15,12%.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Grafik II.7 Grafik Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (%)

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi relatif mampu menjaga prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tingkat yang sejalan dengan provinsi. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Riau, capaian Kuantan Singingi tahun 2024 berada pada posisi menengah, lebih baik daripada beberapa daerah dengan prevalensi lebih tinggi seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat ketahanan pangan di masa mendatang.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Grafik II.8 Grafik Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (%)

Perbaikan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah pemerintah daerah, antara lain pemantapan distribusi pangan, promosi konsumsi pangan lokal bergizi, serta optimalisasi potensi pertanian dan perikanan rakyat. Peningkatan angka prevalensi pada 2024 justru menjadi kesempatan untuk memperluas jangkauan intervensi secara lebih menyeluruh, terutama di wilayah yang masih menghadapi kerentanan konsumsi pangan. Sejalan dengan itu, peningkatan literasi masyarakat tentang gizi seimbang, pengembangan infrastruktur pendukung, dan sinergi dengan program penanggulangan kemiskinan akan terus diperkuat.

Dengan modal capaian serta komitmen yang ada, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi optimis dapat menjaga prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada level yang lebih rendah dan berkelanjutan. Langkah strategis seperti diversifikasi pangan lokal, penguatan ketahanan air, peningkatan daya beli pangan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pangan sehat akan terus didorong. Upaya ini diharapkan menjadikan Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah yang mampu memberikan contoh keberhasilan dalam pembangunan pangan dan gizi di Provinsi Riau

II.1.4.2 Berketahanan Energi

Peningkatan akses dan konsumsi energi, khususnya listrik, merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Energi berperan penting sebagai penggerak kegiatan ekonomi, sosial, serta menjadi faktor pendukung dalam menjaga ketahanan air bersih dan pangan. Ketersediaan pasokan listrik yang stabil dan memadai memungkinkan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, pelayanan publik, serta menunjang sektor produktif.

Selama periode 2020 hingga 2024, konsumsi listrik di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren yang konsisten meningkat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta perluasan jaringan distribusi listrik yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia layanan energi. Data menunjukkan bahwa konsumsi listrik per kapita mengalami peningkatan dari 493,16 kWh pada tahun 2020 menjadi 578,85 kWh pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari.

Kenaikan konsumsi listrik per kapita ini menjadi indikator positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menandakan semakin tingginya ketergantungan berbagai sektor pada energi listrik. Namun, pertumbuhan konsumsi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam upaya memastikan keberlanjutan pasokan energi di tengah meningkatnya permintaan. Faktor efisiensi penggunaan listrik, diversifikasi sumber energi, dan penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan. Selain itu, keterkaitan antara ketahanan energi dengan sektor air dan pangan tidak dapat diabaikan. Sistem pengelolaan air bersih, irigasi, pengolahan hasil pertanian, hingga penyimpanan bahan pangan sangat membutuhkan pasokan energi listrik yang andal. Dengan demikian, ketahanan energi yang baik akan secara langsung mendukung ketahanan air dan pangan daerah.

Tabel II.8 Konsumsi Listrik (KWh), Jumlah Penduduk, Indeks Konsumsi Listrik Per Kapita (KWh/ kapita/Tahun)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penjualan Listrik (KWh)	164.759.656	171.406.901	181.253.976	190.820.593	202.161.638
Jumlah Penduduk (Orang)	334.090	338.020	341.870	345.610	349.250
Konsumsi Listrik Perkapita (KWh/Orang)	493,16	507,09	530,18	552,13	578,85

Sumber : BPS dan Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025

Pemerintah daerah perlu terus mengupayakan peningkatan kapasitas infrastruktur energi, mendorong pemanfaatan energi terbarukan, serta mengedukasi masyarakat untuk menggunakan energi secara lebih efisien. Langkah mitigasi terhadap potensi krisis energi harus dilakukan melalui perencanaan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, terutama energi, air, dan pangan.

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan energi di masa mendatang, dengan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan konsumsi energi dan upaya konservasi. Strategi pembangunan energi yang terintegrasi dengan sektor lain menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

II.1.4.3 Ketahanan Air

Ketahanan air dipengaruhi oleh kondisi hidrologi yang mencakup aspek keairan, baik air permukaan maupun air tanah, di suatu wilayah. Faktor utama yang memengaruhi adalah curah hujan, litologi, jenis tanah, kemiringan lereng, serta tutupan lahan. Di Kabupaten Sijunjung, pola aliran sungai bersifat dendritik, sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi aliran permukaan didominasi oleh sistem radial di anak-anak sungai perbukitan dan dendritik pada jaringan sungai besar.

Di Kabupaten Sijunjung terdapat delapan sungai besar—Batang Palangki, Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Sumpur, Batang Kuantan, Batang Takung, Batang Sinamar, dan Batang Kulampi—dengan lebar 8–30 m. Sungai terluas, Batang Kuantan (± 30 m), membentang di Kecamatan Sijunjung dan Kamang Baru serta melintasi lima Nagari. Sungai-sungai utama (Ombilin, Sinamar, Palangki, Sukam) dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum, MCK, tambak ikan, penambangan batu kali, dan pasir. Namun, analisis sedimen menunjukkan Batang Palangki memiliki tingkat bahaya erosi sangat tinggi sehingga memerlukan penanggulangan segera; sedangkan Batang Sukam umumnya dalam kondisi baik dengan beberapa spot erosi hilir yang menjadi potensi kerawanan lahan pertanian di Muaro Tiga Sungai.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, potensi air permukaan utama bersumber dari Sungai Kuantan (Sungai Indragiri) dan Sungai Singingi. Rata-rata potensi limpasan adalah 9,98 l/dt/km² (25,86 mm/bl) pada musim kering dan 89,80 l/dt/m² (232,74 mm/bl) pada musim hujan. Kedua sungai berperan sebagai sarana transportasi, irigasi, sumber air bersih, usaha perikanan, dan pasokan energi hidro, serta menjadi lokasi tahunan Pacu Jalur. Jaringan DAS Sungai Kuantan mencakup sembilan kecamatan (Hulu Kuantan, Kuantan Mudik, Gunung Toar, Kuantan Tengah, Benai, Pangean, Kuantan Hilir, Inuman, Cerenti), menjadikan wilayah ini rawan banjir pada intensitas curah hujan tinggi.

a. Akses Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak

Akses Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan air minum bersih yang dapat dimanfaatkan untuk air minum maupun memasak. Kondisi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dilihat dari persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak.

Yang dimaksud dengan sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri atas air kemasan, air isi ulang, leding dan (sumur bor/sumur pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat ≥ 10 m. Adapun yang dimaksud dengan Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll. Yang digunakan adalah leding, sumur boratau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

Tabel II.9 Tabel Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Tahun	Sumber Air Minum Bersih	Sumber Air Minum Layak
2020	73,49	88,19
2021	74,56	85,78
2022	68,10	82,49
2023	71,06	83,02
2024	95,46	86,73

Sumber : RPMJD Provinsi Riau

Berdasarkan data pada Tabel Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (2023). Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih naik tajam dari 71,06% pada tahun 2023 menjadi 95,46% pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 24,40 poin persentase. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang substansial dalam penyediaan dan pemanfaatan sumber air minum bersih di wilayah tersebut.

Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak juga mengalami peningkatan, meskipun relatif lebih kecil, yaitu dari 83,02% pada tahun 2023 menjadi 86,73% pada tahun 2024, atau bertambah 3,71 poin persentase. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan pada aspek ketersediaan dan distribusi air minum yang

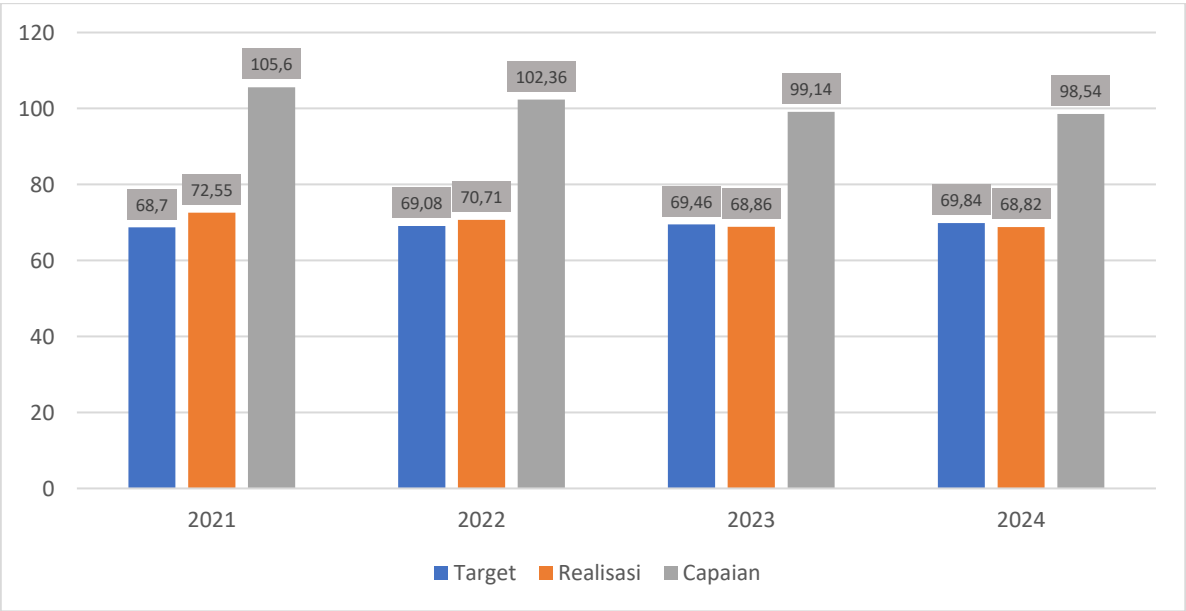
memenuhi standar kelayakan, meskipun laju peningkatannya tidak sebesar pada kategori air minum bersih.

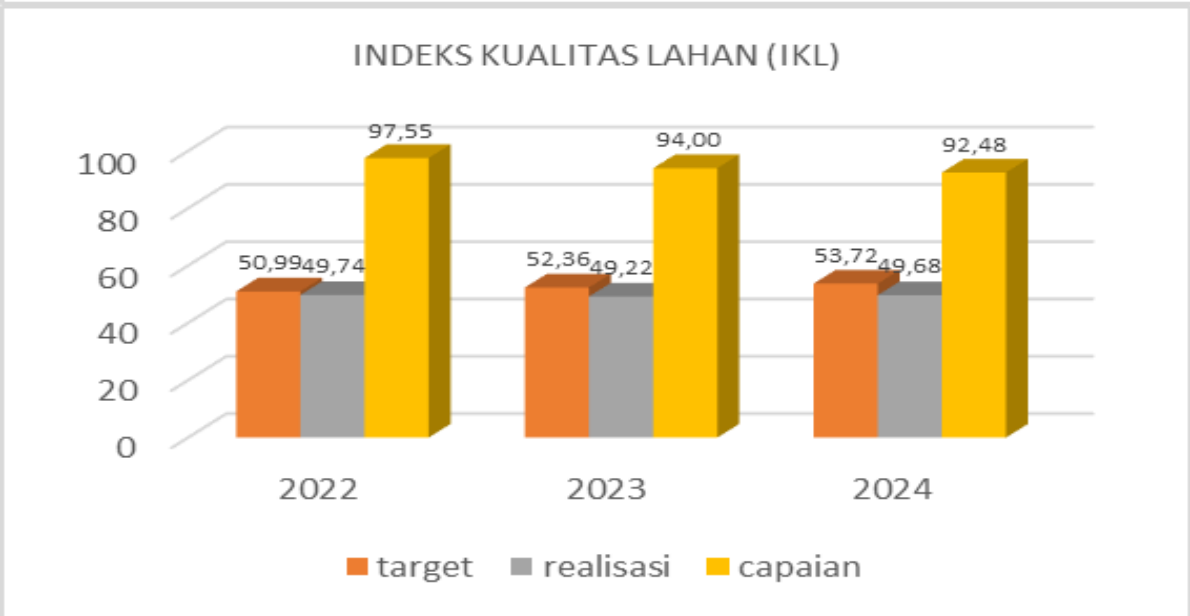
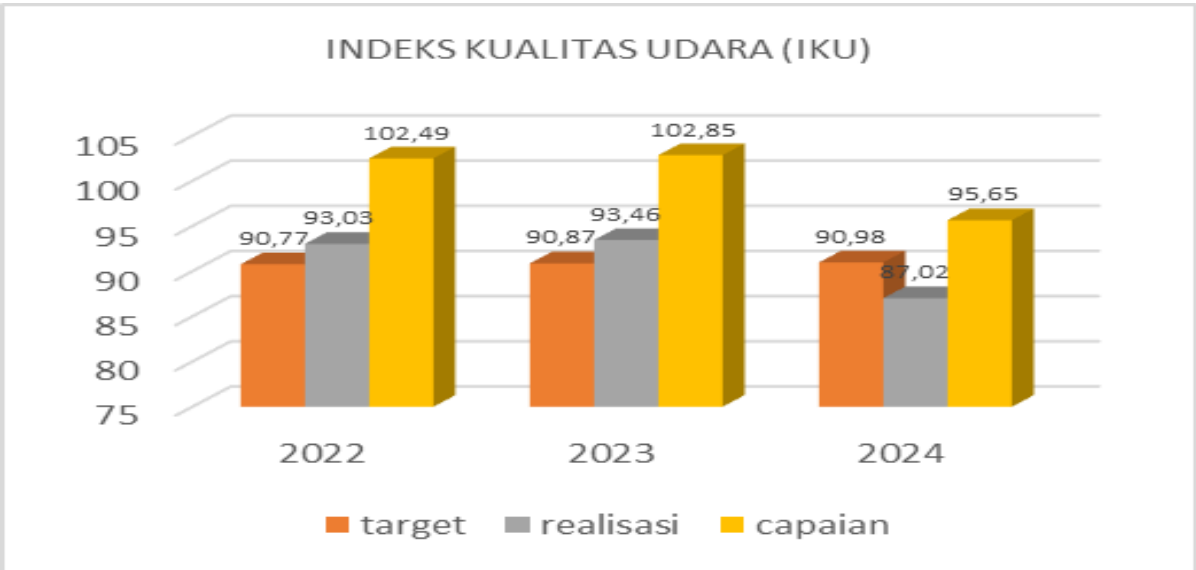
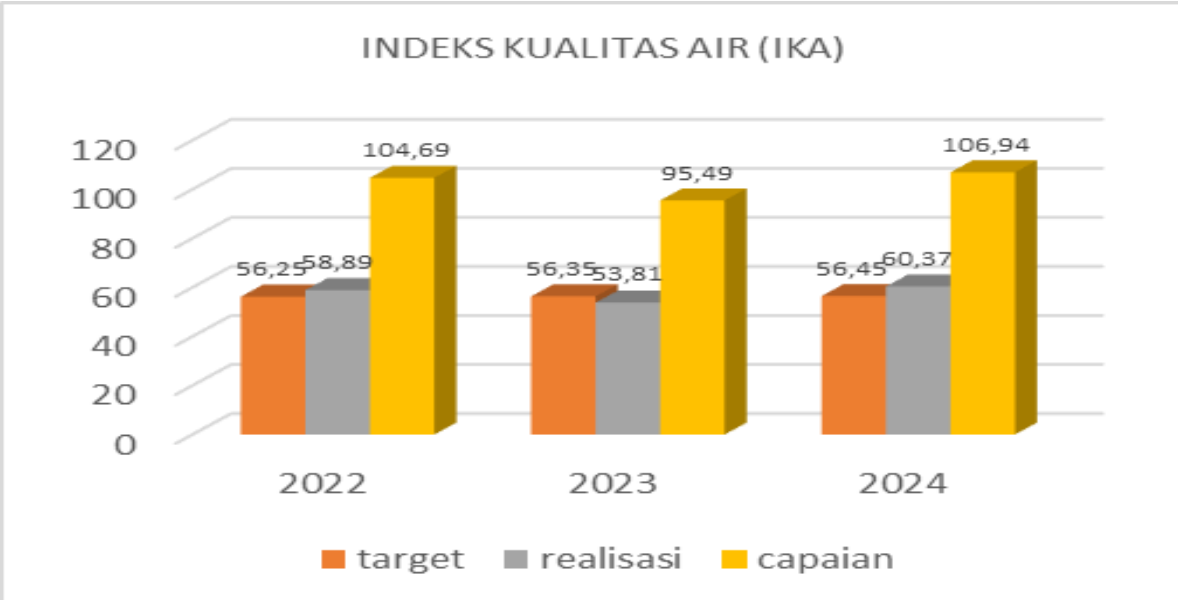
Secara keseluruhan, perbandingan antara tahun 2024 dan 2023 memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti, khususnya pada indikator sumber air minum bersih yang melonjak tajam. Hal ini dapat mencerminkan keberhasilan program atau intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan akses air minum di Kabupaten Kuantan Singingi, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi air yang sehat dan layak.

II.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

II.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkembangan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kuantan Singingi memperlihatkan pola yang mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah. Meskipun pernah mengalami pencapaian sangat tinggi pada tahun 2021, tren menurun yang terjadi setelahnya hingga tahun 2024 menandakan bahwa keberhasilan tersebut belum didukung oleh sistem dan intervensi yang berkelanjutan. Penurunan capaian dalam dua tahun terakhir, hingga realisasi berada di bawah target, menunjukkan bahwa program pengelolaan lingkungan cenderung kurang adaptif terhadap dinamika tekanan lingkungan, baik yang berasal dari aktivitas ekonomi, perubahan tata guna lahan, maupun lemahnya pengawasan terhadap sumber pencemar. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa program yang bersifat reaktif atau seremonial tidak cukup efektif untuk menjamin peningkatan kualitas lingkungan secara konsisten. Lebih jauh, disparitas antara target dan realisasi juga menandakan perlunya penyesuaian strategi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Jika kondisi ini tidak segera direspons dengan inovasi kebijakan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi pemantauan lingkungan, maka risiko penurunan kualitas lingkungan di masa mendatang menjadi semakin besar. Dengan demikian, capaian IKLH bukan hanya sekadar angka tahunan, melainkan cerminan dari efektivitas tata kelola dan komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.





Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi , 2025
Grafik II.9 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2024

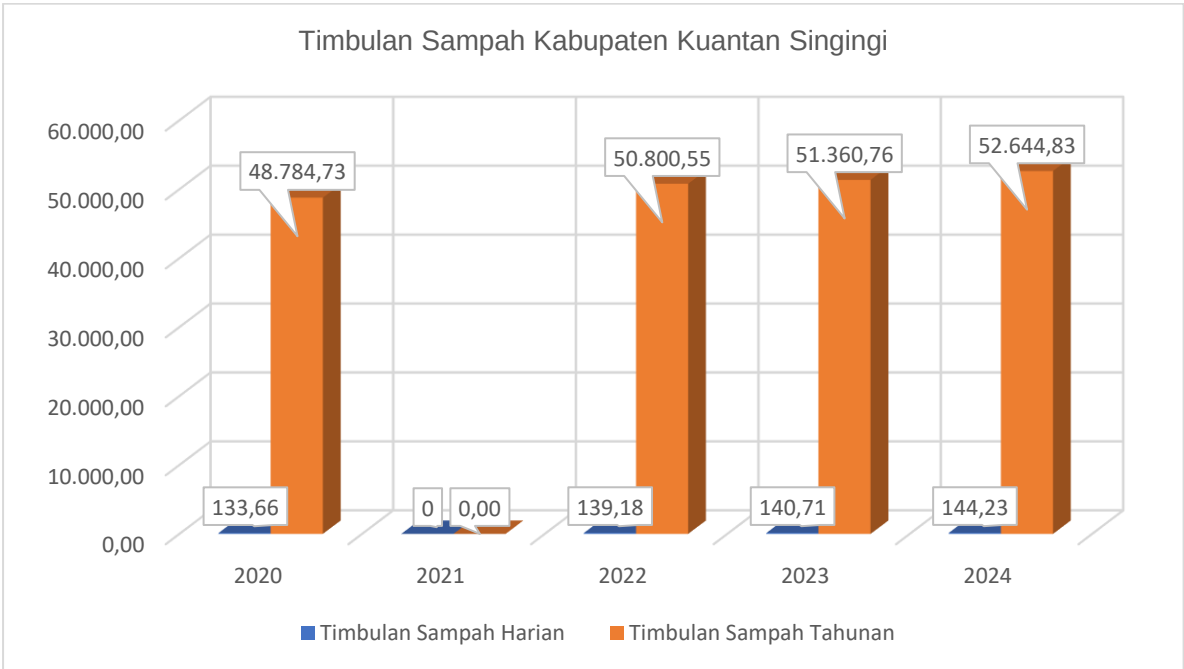
Selain aspek kualitas lingkungan, pengelolaan persampahan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian LHK 2024, timbulan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami

tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah harian tercatat sebesar 133,66 ton per hari atau setara 48.784,73 ton per tahun. Setelah terjadi kekosongan data pada tahun 2021, volume timbulan sampah kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 139,18 ton per hari (50.800,55 ton per tahun), kemudian bertambah menjadi 140,71 ton per hari (51.360,76 ton per tahun) di tahun 2023, dan mencapai 144,23 ton per hari (52.644,83 ton per tahun) pada tahun 2024.

Tren pertumbuhan timbulan sampah di Kuantan Singingi rata-rata naik sekitar 2,5% per tahun dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan sektor ekonomi, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang berdampak pada meningkatnya volume sampah domestik.

Kondisi ini menandakan bahwa persoalan pengelolaan persampahan di Kuantan Singingi semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih terencana dan terintegrasi. Apabila tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan yang optimal, peningkatan timbulan sampah dapat berimplikasi pada masalah lingkungan, kesehatan, dan estetika wilayah, terutama di kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan arahan nasional, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas manajemen persampahan melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan edukasi masyarakat untuk pengurangan dan pemilahan sampah, serta mendorong inovasi pengolahan sampah ramah lingkungan. Dengan demikian, upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan lebih efektif.



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian LHK 2025

Grafik II.10 Grafik Perkembangan Timbulan Sampah Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024

Pada aspek sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan menunjukkan tren positif, yakni meningkat dari 36% pada tahun 2019 menjadi 43,18% pada tahun 2023. Meskipun demikian, capaian ini masih di bawah target nasional sebesar 100% sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Di sisi lain, seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung target pembangunan berkelanjutan di sektor sanitasi.

Secara keseluruhan, capaian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi memperlihatkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang optimal dan setara dengan target nasional maupun provinsi, diperlukan penguatan intervensi kebijakan, peningkatan kapasitas

pengelolaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab.

II.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman/layak

Pengolahan limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan pelayanan dasar. Salah satu indikator kinerja dalam pembangunan pengolahan limbah domestik adalah akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Berikut tabel Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman/layak Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024.

Tabel II.10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	100	150	150	300	420
2	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	69.339	74.981	75.425	75.290	77.788
3	Jumlah Total Rumah Tangga	83.732	85.226	86.716	88.203	89.690
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0,12	0,18	0,17	0,34	0,47
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	82,81	87,98	86,98	85,36	86,73.

Sumber: BPS Provinsi Riau dan Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Akses rumah tangga terhadap sanitasi aman menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman baru mencapai 100 rumah tangga atau sekitar 0,15 persen dari total rumah tangga. Kondisi ini terus membaik hingga tahun 2024, di mana jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman meningkat menjadi 420 rumah tangga atau 0,48 persen. Perkembangan tersebut mencerminkan adanya perbaikan layanan sanitasi, meskipun persentasenya terhadap total rumah tangga masih relatif rendah sehingga memerlukan upaya percepatan pemenuhan akses sanitasi layak dan aman.

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak mengalami Fluktuasi naik turun. dimana tahun 2020 akses terhadap sanitasi layak sebesar 82,81 persen mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 87,98 persen, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 86, 98 persen, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 85, 36 persen. pada tahun 2024 mengalami lagi peningkatan menjadi 86,73 persen.

II.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

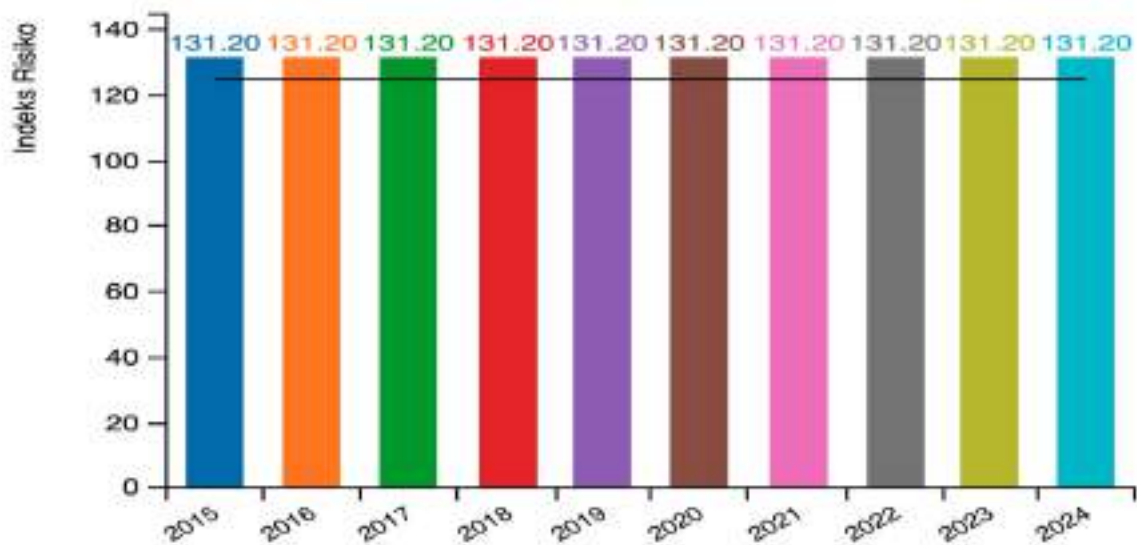
II.1.6.1 Resiliensi Terhadap Bencana

Resiliensi terhadap bencana di Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan pulih setelah mengalami peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi menjadi fokus utama kebijakan pemerintah daerah, sejalan dengan arahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

a. Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan Paparan Penduduk

Berdasarkan data grafik IRBI, nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kuantan Singingi secara konsisten berada pada angka 131,20 selama periode 2015 hingga 2024. Nilai ini menempatkan Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori risiko sedang. Stabilitas angka ini

menunjukkan bahwa meskipun upaya mitigasi dan kesiapsiagaan telah dijalankan, kapasitas penanggulangan bencana di tingkat daerah masih belum mampu memberikan penurunan risiko yang signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi mitigasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif di masa mendatang.



Sumber : InaRISK, 2025
Grafik II.11 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi menempati posisi kategori sedang, sejajar dengan Kota Pekanbaru, Indragiri Hulu, Siak, dan Kota Dumai. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti berada pada kategori risiko tinggi dengan nilai IRBI di atas 150. Fakta ini menunjukkan bahwa secara relatif, risiko bencana di Kuantan Singingi tidak sebesar daerah lain yang sering mengalami bencana dengan cakupan dan dampak lebih luas, namun tetap memerlukan perhatian dan intervensi berkelanjutan.

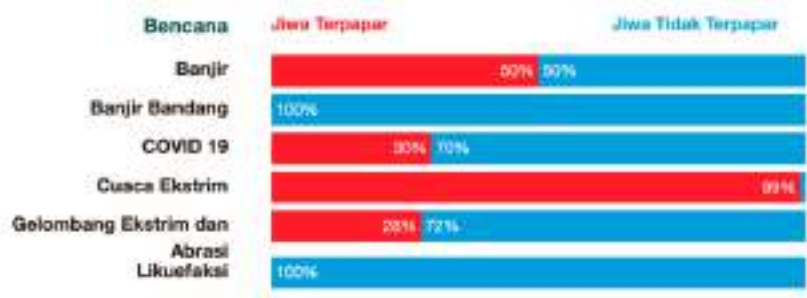
Tabel II.11 Tabel Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2015-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	INDRAGIRI HILIR	168.00	168.00	168.40	168.00	168.40	168.00	168.40	168.40	168.40	168.00	TINGGI
2	ROKAN HILIR	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	167.20	155.57	150.88	153.75	156.90	TINGGI
3	ROKAN HULU	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	TINGGI
4	PELALAWAN	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	151.41	152.91	TINGGI
5	KEPULAUAN MERANTI	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	147.60	146.91	147.12	TINGGI
6	KAMPAR	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	155.20	139.95	148.51	136.81	141.74	SEDANG
7	BENGKALIS	156.60	156.00	156.40	156.00	156.40	156.40	140.17	128.86	134.65	137.71	SEDANG
8	KUANTAN SINGINGI	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
9	KOTA PEKANBARU	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	130.17	130.98	125.07	125.67	SEDANG
10	INDRAGIRI HULU	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	132.40	127.24	122.06	124.65	SEDANG
11	SIAK	156.40	156.00	156.40	156.00	156.40	156.40	141.11	131.49	120.90	111.82	SEDANG
12	KOTA DUMAI	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	108.40	106.50	96.91	SEDANG

Sumber : Buku IRBI, 2024

Berdasarkan data rasio jiwa penduduk yang terpapar dan tidak terpapar menurut jenis bencana di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan bahwa banjir menjadi ancaman utama dengan sekitar 50% penduduk berpotensi terpapar risiko banjir, sementara sisanya berada di luar paparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk bencana banjir bandang, gelombang ekstrem, abrasi, dan likuefaksi, seluruh penduduk tercatat tidak terpapar, menandakan tingkat ancaman yang relatif rendah atau minim kejadian pada periode pelaporan. Sementara itu, paparan terhadap pandemi COVID-19 mencapai sekitar 30% penduduk, sedangkan 70% tidak terdampak langsung, yang menunjukkan bahwa dampak pandemi cukup luas namun sebagian

besar populasi relatif aman. Ancaman cuaca ekstrem tercatat sangat tinggi, dengan hampir seluruh penduduk (99%) berisiko terpapar, sehingga diperlukan upaya adaptasi perubahan iklim dan penguatan mitigasi secara berkelanjutan. Untuk gelombang ekstrem dan abrasi, sekitar 28% penduduk terpapar, sedangkan 72% lainnya tidak terpapar, sehingga tetap diperlukan perhatian pada kelompok yang berisiko.



Sumber : InaRISK, 2024

Grafik II.12 Rasio Jiwa Penduduk yang Terpapar dan Tidak Terpapar Menurut Jenis Bencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

b. Profil dan Sebaran Bencana

Tabel II.12 ini menggambarkan distribusi tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan luasan wilayah dan persentasenya. Sebagian besar wilayah, yaitu 504.388 hektare atau 92,41%, tergolong dalam kategori tidak rawan banjir. Wilayah dengan tingkat kerawanan rendah mencapai 15.803 hektare (2,90%), kerawanan sedang 1.921 hektare (0,35%), dan kerawanan tinggi 20.578 hektare (3,77%). Selain itu, terdapat tubuh air seluas 3.096 hektare (0,57%). Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah relatif aman dari risiko banjir, terdapat area dengan tingkat kerawanan tinggi yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Tabel II.12 Tingkat kerawanan bencana banjir Kabupaten Kuantan Singingi

Tingkat Kerawanan	Luas (Ha)	Persentase
Tidak Rawan	504.388	92,41%
Rendah	15.803	2,90%
Sedang	1.921	0,35%
Tinggi	20.578	3,77%
Tubuh Air	3.096	0,57%
Total	545.786	100%

Sumber : RPPLH Provinsi Riau, 2022

Banjir menjadi ancaman utama di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil pemetaan BPBD tahun 2023 menunjukkan mayoritas wilayah tidak rawan banjir (504.388 ha, 92,41%). Namun, masih terdapat wilayah kategori rendah (15.803 ha, 2,90%), sedang (1.921 ha, 0,35%), dan tinggi (20.578 ha, 3,77%) yang memerlukan perhatian khusus.

Tabel II.13 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Gempa Bumi
Kuantan Mudik	21	2	0
Hulu Kuantan	4	1	0
Gunung Toar	12	0	0
Pucuk Rantau	4	0	0
Singingi	6	0	0
Singingi Hilir	4	0	0

Kecamatan	Banjir	Tanah Longsor	Gempa Bumi
Kuantan Tengah	11	0	0
Sentajo Raya	3	0	0
Benai	14	0	0
Kuantan Hilir	5	0	0
Pangean	17	0	0
Logas Tanah Darat	7	0	0
Kuantan Hilir Seberang	11	0	0
Cerenti	8	0	0
Inuman	12	0	0
Total	139	3	0

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025

Tabel ini menampilkan jumlah kejadian bencana alam yang meliputi banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di seluruh kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2024. Tercatat sebanyak 139 kejadian banjir, yang paling banyak terjadi di Kecamatan Kuantan Mudik (21 kejadian), Benai (14), Pangean (17), dan Gunung Toar (12). Tanah longsor hanya terjadi sebanyak 3 kali, tersebar di Kecamatan Kuantan Mudik (2 kejadian) dan Hulu Kuantan (1 kejadian). Tidak terdapat kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2024. Informasi ini menegaskan bahwa banjir merupakan bencana paling dominan di wilayah ini, sehingga upaya mitigasi banjir perlu menjadi prioritas dalam perencanaan kebencanaan daerah.

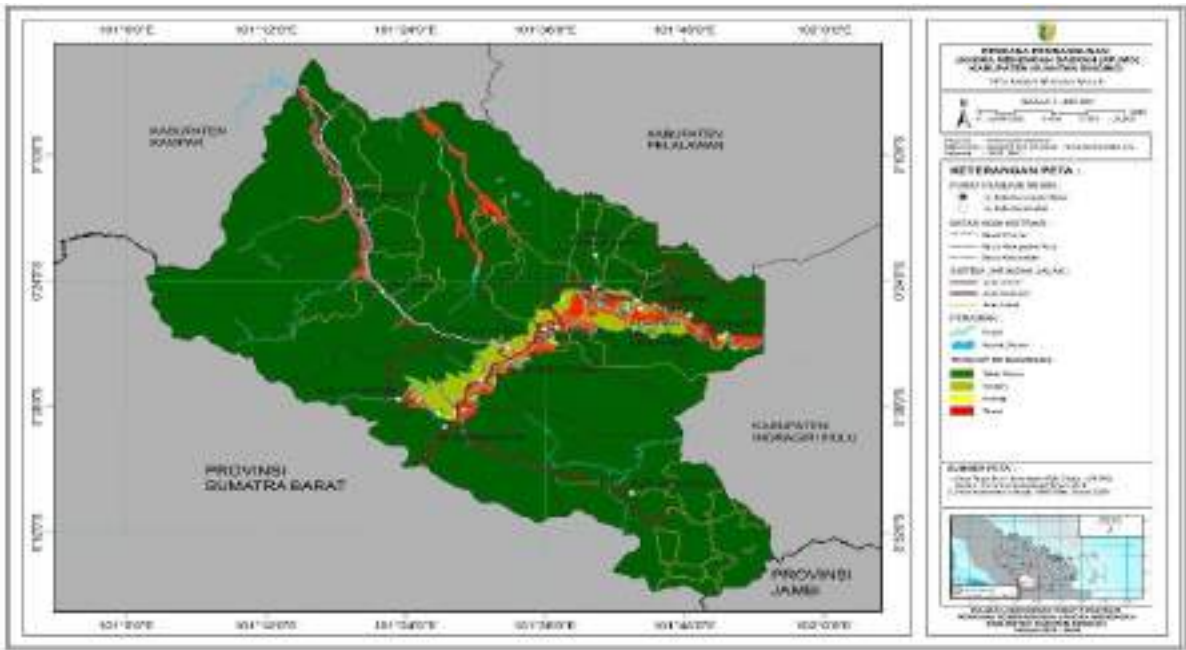
Tabel II.14 Jumlah Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Lahan terbakar	Jumlah Kejadian
1	Singingi Hilir	20 Ha	3
2	Singingi	4.5 Ha	4
3	Kuantan Tengah	14.002 Ha	7
4	Benai	1 Ha	2
5	Pangean	0 Ha	Nihil
6	Logas Tanah Darat	0.25 Ha	1
7	Kuantan Hilir	3 Ha	2
8	Kuantan Hilir Seberang	0 Ha	Nihil
9	Inuman	2 Ha	1
10	Cerenti	0 Ha	Nihil
11	Gunung Toar	1 Ha	1
12	Kuantan Mudik	27.25 Ha	15
13	Hulu Kuantan	0 Ha	Nihil
14	Pucuk Rantau	0 Ha	Nihil
15	Sentajo Raya	2 Ha	1
Total		75 Ha	37

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tahun 2024, luas area terbakar di Kabupaten Kuantan Singingi tercatat sebesar 75 hektar dengan total 37 kejadian. Kecamatan yang paling terdampak adalah Kuantan Mudik dengan 27,25 hektar, diikuti Singingi Hilir seluas 20 hektar, Kuantan Tengah 14 hektare, serta Singingi 4,5 hektare. Beberapa kecamatan lain seperti Benai, Kuantan Hilir, Inuman, Gunung Toar, dan Sentajo Raya juga mengalami kejadian kebakaran dengan luasan yang lebih kecil. Sementara itu, sebagian besar kecamatan lainnya tercatat nihil kebakaran. Kebakaran tidak hanya terjadi di lahan masyarakat, tetapi juga merambah dua kawasan konservasi penting, yaitu Suaka Margasatwa Rimbang Baling dan Hutan Lindung Bukit Batabuh, yang keduanya berada di lahan mineral. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kebakaran tidak hanya terkait dengan lahan gambut, tetapi juga pada kawasan dengan nilai ekologis tinggi. Kondisi tersebut menjadi

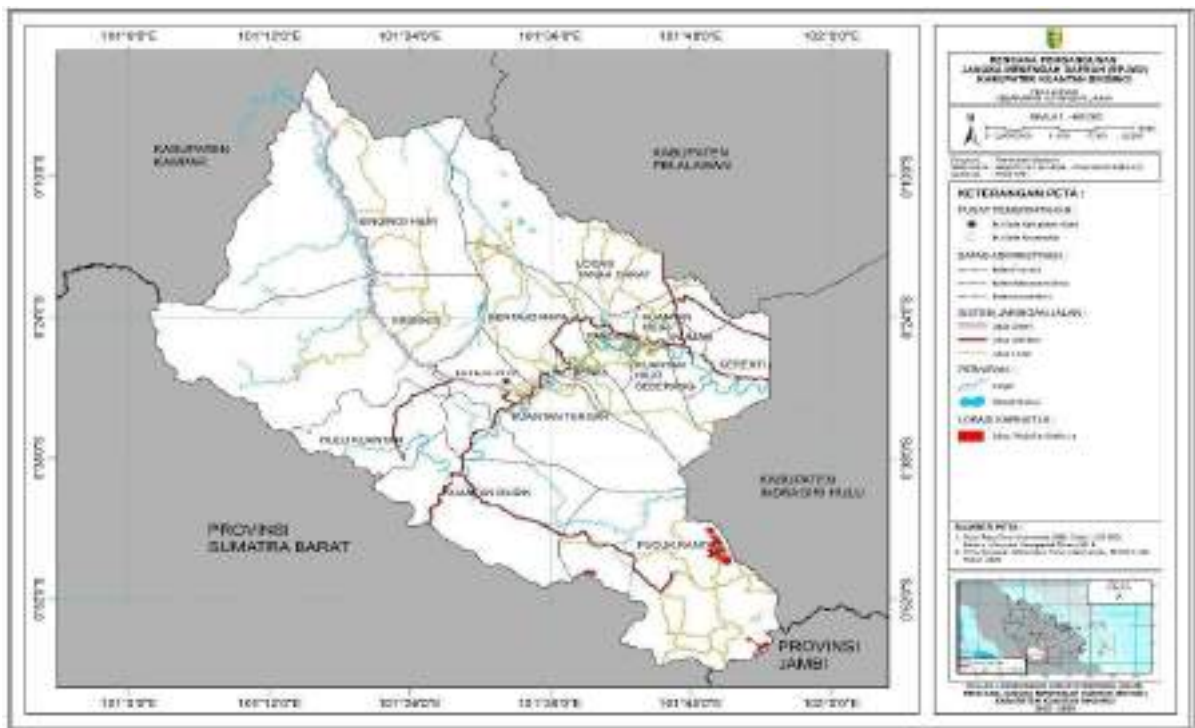
perhatian serius, mengingat dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, dan keberlanjutan fungsi kawasan lindung.



Sumber : BPBD Kabupaten Kuantan Singingi 2023
Gambar II.8 Peta Rawan Banjir Kabupaten Kuantan Singingi

Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi tantangan signifikan. Pada tahun 2023, luas area terdampak karhutla tercatat sebesar 1.521,41 hektare. Kondisi ini menuntut penguatan sistem pencegahan, pengawasan, dan penanganan karhutla secara berkelanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan maupun sosial ekonomi.

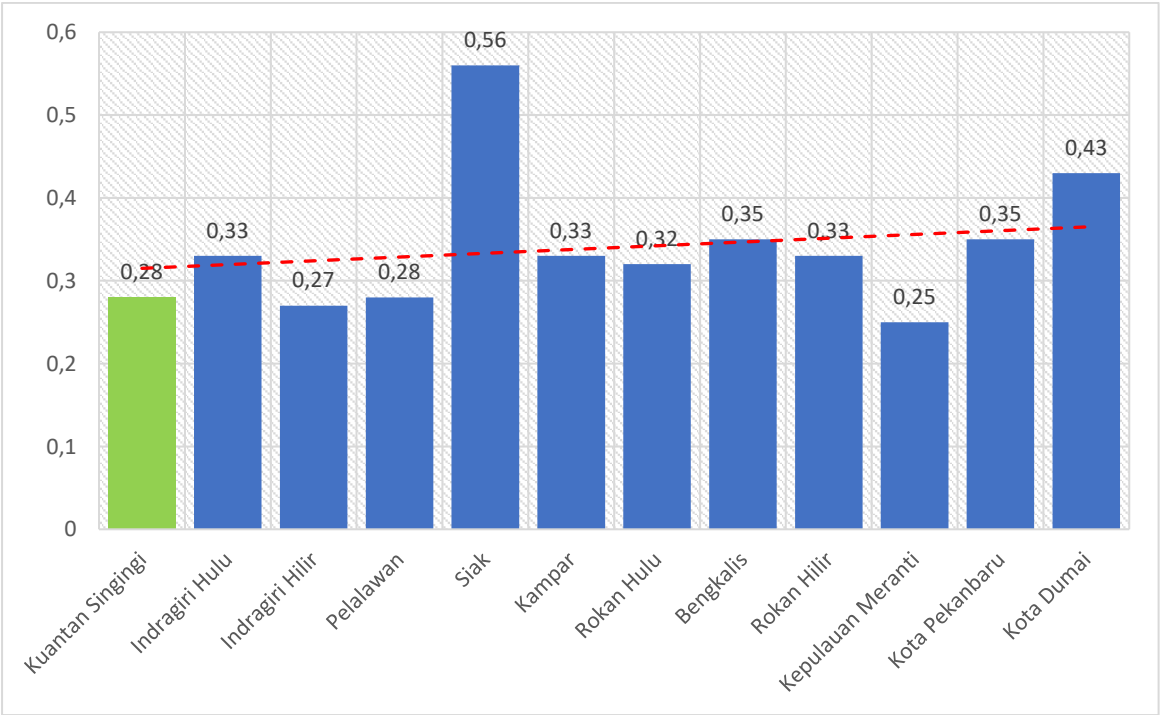
Secara keseluruhan, peningkatan resiliensi bencana di Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan sinergi kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan tata kelola lingkungan. Peta sebaran wilayah rawan banjir dan tabel tingkat kerawanan banjir tahun 2023 disajikan sebagai referensi utama dalam perumusan strategi mitigasi dan adaptasi. Sementara itu, peta rawan karhutla juga ditampilkan guna mendukung upaya terpadu dalam pengendalian risiko kebakaran hutan dan lahan.



Sumber : BPBD Kabupaten Kuantan Singingi 2023
Gambar II.9 Peta Rawan KARHUTLA Kabupaten Kuantan Singingi

c. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi, beradaptasi, dan memulihkan diri dari potensi ancaman, baik berupa bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Indeks ini menjadi indikator penting dalam mengukur kapasitas daerah untuk mempertahankan fungsi dan layanan publik ketika terjadi gangguan atau ancaman. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kesiapan dan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. Berikut disajikan grafik yang memuat nilai *Indeks Ketahanan Daerah* pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

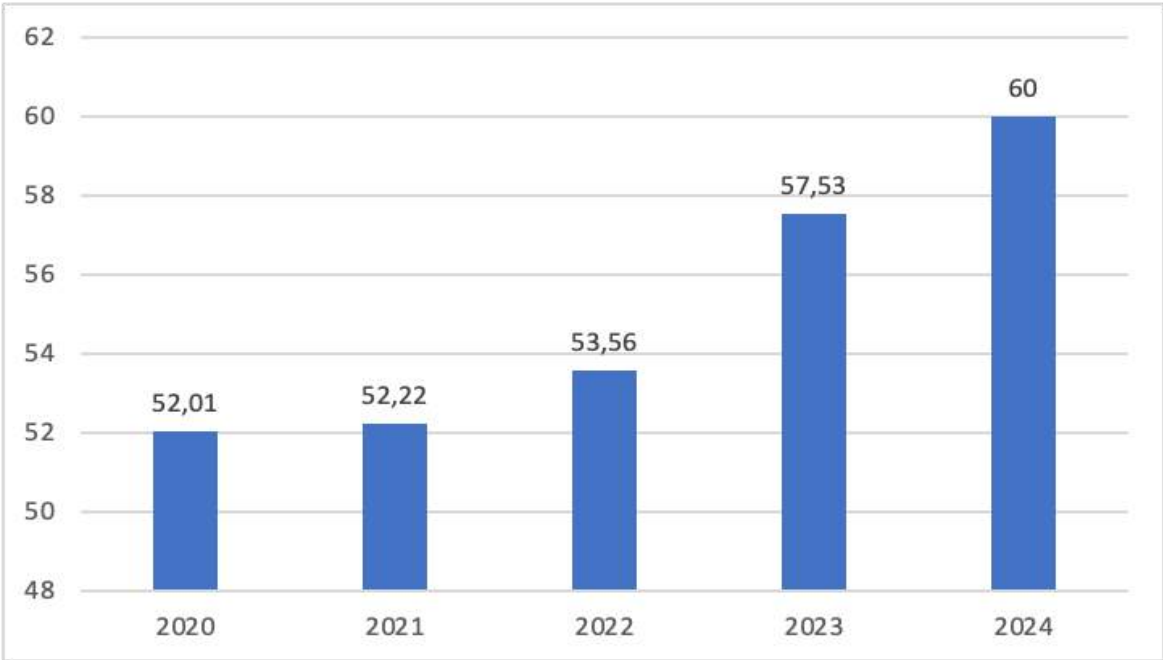


Sumber: BNPB, 2025

Grafik II.13 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

II.1.6.2 Resiliensi Terhadap Perubahan Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan iklim yang tergolong sedang, sebagaimana tercermin dari nilai Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) sebesar 0,525 dan Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) sebesar 0,513 (SIDIK KLHK, 2018). Sebagian besar desa di wilayah ini berada pada tingkat kerentanan sedang, dengan sejumlah kecil desa masuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, sedangkan tidak terdapat desa dengan kerentanan kategori sangat tinggi.



Sumber: Bappenas 2025
Grafik II. 14 Perkembangan Indeks Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Riau 2020-2024

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki pengukuran khusus di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, capaian Provinsi Riau dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan arah perkembangan secara regional. Berdasarkan data Bappenas, nilai indeks resiliensi Provinsi Riau meningkat secara konsisten dari 52,01 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024. Tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas adaptasi daerah dalam menghadapi potensi bencana dan dampak perubahan iklim, baik melalui penguatan sistem mitigasi, kesiapsiagaan, maupun pembangunan yang lebih berwawasan lingkungan.

Bagi Kabupaten Kuantan Singingi, perkembangan tersebut menjadi gambaran penting bahwa peningkatan resiliensi iklim merupakan agenda prioritas yang perlu diinternalisasi ke dalam perencanaan daerah. Dengan kondisi geografis dan ekologi yang beragam, termasuk keberadaan kawasan konservasi dan lahan pertanian masyarakat, tantangan perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerentanan pada sektor lingkungan, pertanian, maupun kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, pencapaian di tingkat provinsi dapat dijadikan tolok ukur sekaligus pendorong untuk memperkuat program mitigasi dan adaptasi berbasis lokal di Kuantan Singingi, guna memastikan pembangunan berkelanjutan yang tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.



Sumber : Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, KLHK 2018

Gambar II.10 Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Kuantan Singingi

Kondisi ini menandakan kemampuan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, meskipun tantangan adaptasi tetap perlu menjadi perhatian. Data iklim 2020–2024 menunjukkan fluktuasi curah hujan bulanan dan hari hujan yang signifikan. Curah hujan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada Desember 2023 (652,7 mm), sedangkan curah hujan terendah tercatat pada September 2024 (55,3 mm). Jumlah hari hujan tertinggi rata-rata terjadi pada bulan-bulan basah, khususnya Februari dan Januari, dengan angka mencapai 24 hari (2022–2023), sedangkan hari hujan terendah umumnya pada bulan-bulan musim kemarau (Juli–Agustus) dengan 6–8 hari.

Tabel II.15 Tabel Rekapitulasi Bulanan Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Tertinggi serta Terendah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2020–2024

Tahun	Bulan Curah Hujan Tertinggi	Nilai (mm)	Bulan Curah Hujan Terendah	Nilai (mm)
Rekap Bulanan Curah Hujan Tertinggi dan Terendah (mm) Tiap Tahun 2020–2024				
2020	November	386,0	Desember	88,6
2021	Maret	277,5	Mei	117,5
2022	Oktober	338,3	September	170,1
2023	Desember	652,7	Oktober	123,8
2024	Januari	248,5	September	55,3
Rekap Bulanan Jumlah Hari Hujan Tertinggi dan Terendah Tiap Tahun 2020–2024				
Tahun	Bulan Hari Hujan Tertinggi	Nilai (hari)	Bulan Hari Hujan Terendah	Nilai (hari)
2020	Mei, November	16	Juli, Desember	6
2021	Februari	15	Agustus	7
2022	Februari	24	Agustus, September	7
2023	Februari	24	Juli, Agustus	8
2024	Januari	21	Juli, Agustus	7

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025

Fluktuasi curah hujan dan hari hujan ini berimplikasi langsung pada ketersediaan air, produksi pangan, dan kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Namun, dengan kapasitas adaptasi yang cukup baik, Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan pulih dari dampak

peristiwa ekstrem tersebut, khususnya melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya air, serta peran aktif masyarakat.

Dukungan kebijakan mitigasi dan adaptasi terus diarahkan pada penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan, pelestarian kawasan hutan, serta pemanfaatan lahan pertanian dan perikanan secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan FOLU Net Sink 2030 Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi menitikberatkan mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan dan pertanian, mengingat tidak adanya lahan gambut dan mangrove di wilayah ini.

Secara umum, resiliensi Kabupaten Kuantan Singingi terhadap perubahan iklim berada pada tingkat sedang. Penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perlu terus dilanjutkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, menjaga daya dukung lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika perubahan iklim global dan nasional.

II.1.7 Demografi

Karakteristik demografi suatu wilayah pada dasarnya tercermin melalui jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia, serta pola persebaran penduduk di setiap wilayah. Perubahan demografi merupakan salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan daerah saat ini. Selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sumber daya manusia (SDM) menjadi modal fundamental dalam mendukung pembangunan. Dengan demikian, penduduk memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan penduduk yang berkualitas agar potensi sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berintegritas merupakan penentu utama masa depan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk memegang peran ganda sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Jumlah, struktur, kualitas, serta persebaran penduduk sangat memengaruhi pengembangan ruang wilayah, dinamika sosial, dan arah kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang pesat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas, dapat menghambat tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh sektor pembangunan saling berhubungan dan dipengaruhi oleh dinamika kependudukan, sehingga data dan informasi demografi menjadi sangat strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, aspek kependudukan merupakan pilar utama yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pada akhirnya menjadi pihak yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

II.1.7.1 Kondisi Demografi Tahun 2024

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi terus meningkat dari 330.077 jiwa pada tahun 2020 menjadi 365.989 jiwa pada tahun 2024.

Kecamatan dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pucuk Rantau (8,42%), Logas Tanah Darat (4,19%), dan Hulu Kuantan (3,35%). Sementara kecamatan dengan pertumbuhan terendah antara lain Kuantan Mudik (1,03%) dan Kuantan Hilir Seberang (1,74%). Kuantan Tengah (56.191 jiwa), Singingi Hilir (46.470 jiwa), dan Singingi (37.637 jiwa) menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di tahun 2024, sedangkan Kuantan Hilir Seberang (11.608 jiwa) dan Hulu Kuantan (10.274 jiwa) merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit.

a. Jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Tabel II.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan Tahun 2023-2024 (%)

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)					Laju Pertumbuhan 2024 (%)
	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kuantan Mudik	24.830	25.408	25.829	26.027	26.295	1,24
Hulu Kuantan	9.114	9.385	9.546	9.941	10.274	2,84
Gunung Toar	14.342	14.025	14.200	14.440	14.655	1,25
Pucuk Rantau	11.102	10.445	10.540	11.786	12.778	5,50
Singingi	32.699	34.735	35.427	36.545	37.637	2,67
Singingi Hilir	39.482	43.108	44.073	45.324	46.470	2,22
Kuantan Tengah	49.702	52.786	53.835	54.381	56.191	2,53
Sentajo Raya	29.634	31.058	31.639	32.496	33.227	1,82
Benai	16.814	16.581	16.801	17.754	18.068	0,95
Kuantan Hilir	15.590	14.221	14.304	14.757	15.064	1,65
Pangean	19.391	20.342	20.724	21.051	21.492	1,93
Logas Tanah Darat	21.418	23.840	24.416	26.593	27.708	4,19
Kuantan Hilir Seberang	13.813	11.369	11.411	11.409	11.608	1,52
Cerenti	15.885	15.726	15.940	16.747	17.140	2,32
Inuman	16.261	16.865	17.165	16.995	17.382	1,61
Kuantan Singingi	334.946	339.894	345.850	356.246	365.989	2,28

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tercatat sebanyak 365,99 ribu jiwa. Sebaran penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah (15,35% dari total penduduk), diikuti oleh Singingi Hilir (12,70%) dan Singingi (10,28%). Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Hulu Kuantan (2,81%) dan Kuantan Hilir Seberang (3,17%).

Kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Sentajo Raya (228,05 jiwa/km²), Kuantan Tengah (207,55 jiwa/km²), dan Pangean (147,89 jiwa/km²). Sementara, kecamatan seperti Pucuk Rantau dan Singingi memiliki kepadatan jauh lebih rendah, masing-masing 15,55 jiwa/km² dan 19,26 jiwa/km².

Sebagian besar kecamatan lainnya memiliki laju pertumbuhan positif di atas rata-rata kabupaten, menandakan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk yang relatif merata, meskipun dengan skala yang berbeda. Kondisi ini menegaskan pentingnya penyusunan strategi pembangunan berbasis persebaran penduduk, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan dasar, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kecamatan.

b. Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Tabel II.17 Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa, 2024)	% dari Total	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Kuantan Mudik	26,30	7,18	46,60	101,96
2	Hulu Kuantan	10,27	2,81	26,73	100,35
3	Gunung Toar	14,66	4,00	88,68	102,67
4	Pucuk Rantau	12,78	3,49	15,55	108,25
5	Singingi	37,64	10,28	19,26	106,13
6	Singingi Hilir	46,47	12,70	30,35	106,03

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa, 2024)	% dari Total	Kepadatan (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
7	Kuantan Tengah	56,19	15,35	207,55	100,79
8	Sentajo Raya	33,23	9,08	228,05	102,94
9	Benai	18,07	4,94	144,94	100,60
10	Kuantan Hilir	15,06	4,12	101,26	101,61
11	Pangean	21,49	5,87	147,89	101,94
12	Logas Tanah Darat	27,71	7,57	72,85	105,09
13	Kuantan Hilir Seberang	11,61	3,17	101,57	100,14
14	Cerenti	17,14	4,68	37,59	105,05
15	Inuman	17,38	4,75	38,63	105,70
	Kuantan Singingi	365,99	100,00	47,80	103,41

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Rasio jenis kelamin di seluruh kecamatan relatif seimbang, dengan rata-rata 103 laki-laki per 100 perempuan. Secara umum, distribusi penduduk Kabupaten Kuantan Singingi masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan inti dengan kepadatan tinggi, sedangkan wilayah lain cenderung jarang penduduk.

Struktur penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 didominasi kelompok usia muda, dengan proporsi terbesar pada kelompok usia 10–14 tahun (9,47%), diikuti 5–9 tahun (8,84%) dan 20–24 tahun (8,77%). Komposisi penduduk laki-laki (186.061 jiwa) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (179.928 jiwa), namun proporsi setiap kelompok umur relatif seimbang antara kedua jenis kelamin.

Penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai lebih dari dua pertiga total penduduk, menunjukkan potensi bonus demografi. Sementara itu, penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) hanya sekitar 6,09% dari total populasi. Secara umum, piramida penduduk Kuantan Singingi masih berbasis lebar di bawah, menandakan populasi yang relatif muda.

Tabel II.18 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Proporsi (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	0–4	13.986	13.074	27.060	7,4
2	5–9	16.832	15.505	32.337	8,84
3	10–14	18.040	16.627	34.667	9,47
4	15–19	14.533	13.944	28.477	7,78
5	20–24	16.388	15.718	32.106	8,77
6	25–29	14.884	14.124	29.008	7,93
7	30–34	14.167	13.823	27.990	7,65
8	35–39	14.122	14.315	28.437	7,77
9	40–44	14.464	14.081	28.545	7,8
10	45–49	12.594	11.915	24.509	6,7
11	50–54	10.666	10.407	21.073	5,76
12	55–59	8.313	7.849	16.162	4,42
13	60–64	6.452	6.893	13.345	3,65
14	65–69	4.897	5.054	9.951	2,72
15	70–74	3.115	3.051	6.166	1,69
16	75+	2.608	3.548	6.156	1,68
17	Total	186.061	179.928	365.989	100

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024, komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), dengan proporsi yang besar juga pada kelompok usia muda (0–14 tahun). Distribusi penduduk laki-laki dan perempuan pada masing-masing kelompok umur tampak relatif seimbang. Fenomena ini menggambarkan struktur demografi yang masih produktif, di mana mayoritas penduduk berada pada usia yang potensial untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025
Grafik II.15 Piramida Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Analisis dari piramida tersebut menunjukkan bahwa Kuantan Singingi tengah menikmati bonus demografi, yaitu kondisi ketika penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih banyak dibandingkan usia non-produktif (0–14 tahun dan 65+ tahun). Bonus demografi ini dapat menjadi modal utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial daerah, asalkan didukung oleh kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi kreatif maupun usaha kecil-menengah.

Penting bagi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan momentum bonus demografi ini melalui investasi pada pendidikan, pelatihan, serta fasilitas kesehatan guna menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, struktur penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 memberikan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

II.1.7.2 Proyeksi Demografi 2024-2025

Metodologi proyeksi penduduk Kabupaten Kuantan Singingi disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, BKKBN, dan Kementerian Kesehatan menggunakan metode komponen kohort. Proyeksi ini didasarkan pada data dasar hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang telah diperbaiki dengan teknik Arriaga untuk memastikan akurasi komposisi umur. Proyeksi dilakukan secara bertingkat mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, dengan memperhatikan kecenderungan angka kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi) yang dianalisis dari tren masa lalu serta masukan para pakar. Seluruh proses dilakukan secara iteratif agar hasil proyeksi konsisten antar level wilayah, dan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

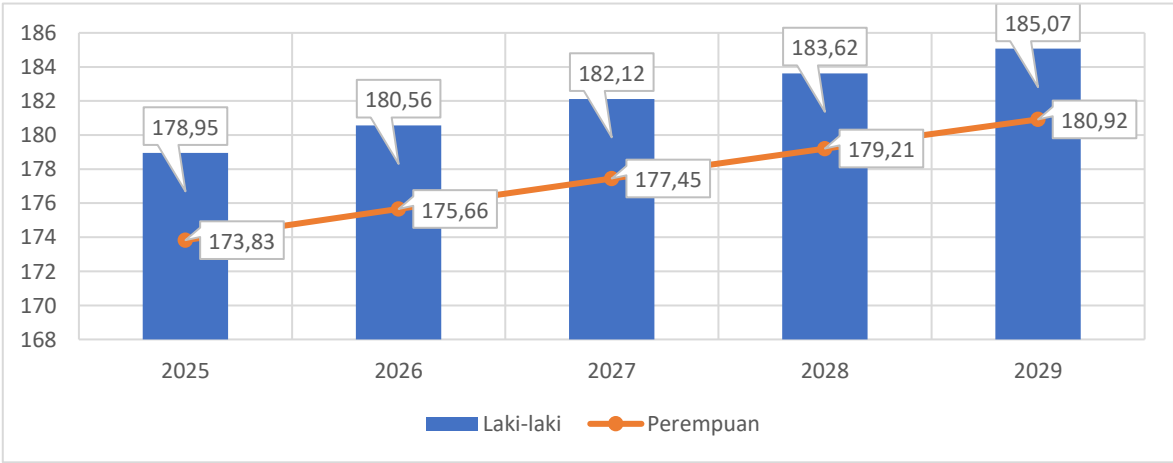
Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 352,78 ribu jiwa dan akan meningkat menjadi 365,99 ribu jiwa pada tahun 2029. Jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) juga diproyeksikan naik dari sekitar 240,10 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 248,76 ribu jiwa pada tahun 2029. Sementara itu, penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) diperkirakan meningkat dari 22,86 ribu jiwa atau 6,43% dari total penduduk pada tahun 2025 menjadi 26,17 ribu jiwa atau 7,55% pada tahun 2029. Secara proporsional, penduduk usia produktif cenderung stabil pada kisaran 68%, namun sedikit menurun pada akhir periode proyeksi, seiring dengan meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut. Di sisi lain, angka ketergantungan juga menunjukkan tren sedikit meningkat, dari 46,94% pada tahun 2025 menjadi 47,07% pada tahun 2029.

Tabel II.19 Proyeksi Jumlah Penduduk, Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Proporsi Penduduk Usia Lanjut serta Angka Ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

No	Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029
1	0–4	29,93	29,72	29,53	29,35	29,21
2	5–9	29,41	29,51	29,62	29,69	29,68
3	10–14	29,36	29,34	29,25	29,16	29,09
4	15–19	28,70	28,69	28,77	28,90	29,02
5	20–24	29,38	29,22	28,96	28,66	28,43
6	25–29	28,72	28,80	28,88	28,97	28,99
7	30–34	28,08	28,13	28,17	28,21	28,25
8	35–39	27,29	27,41	27,48	27,51	27,53
9	40–44	25,37	25,69	26,01	26,33	26,60
10	45–49	23,35	23,71	24,02	24,29	24,56
11	50–54	20,30	20,84	21,37	21,86	22,32
12	55–59	16,68	17,25	17,82	18,40	18,98
13	60–64	13,37	13,76	14,19	14,69	15,20
14	65–69	10,75	11,07	11,35	11,58	11,84
15	70–74	6,97	7,51	8,00	8,44	8,83
16	75+	5,14	5,60	6,17	6,80	7,50
Jumlah (ribu jiwa)		352,78	356,22	359,57	362,83	365,99
Proporsi Penduduk Usia Produktif (%)		68,05	68,10	68,09	68,05	67,99
Proporsi Penduduk Usia Lanjut (%;)		6,43	6,63	6,87	7,19	7,55
Angka Ketergantungan (%)		46,94	46,78	46,81	46,88	47,07

Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035

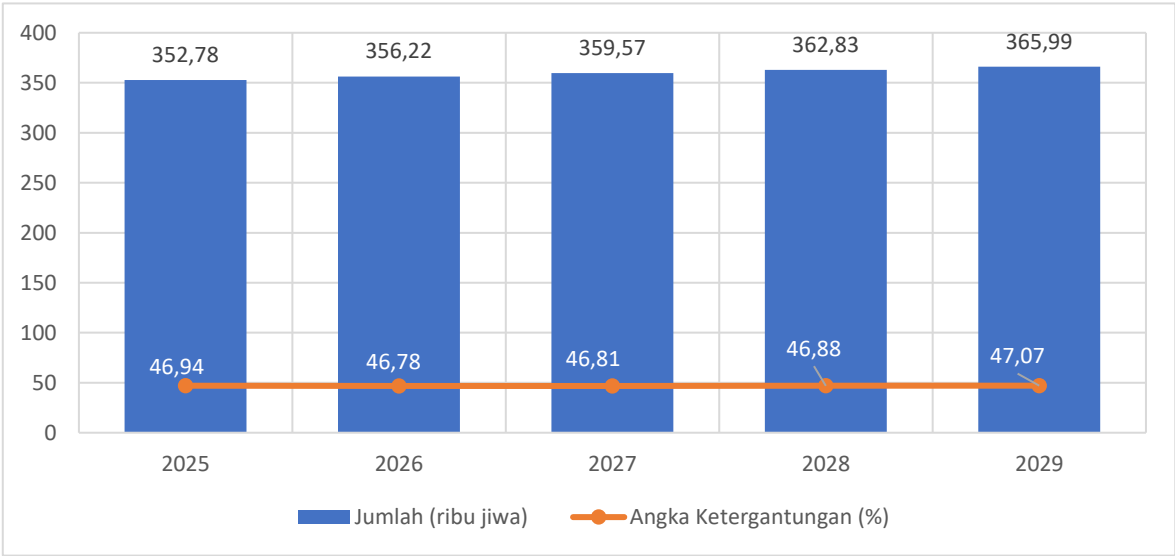
Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan mencapai 178,95 ribu jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 173,83 ribu jiwa. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun, sehingga pada tahun 2029, penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 185,07 ribu jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 180,92 ribu jiwa.



Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035

Grafik II.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025-2029 (ribu jiwa)

Angka ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi diperkirakan tetap berada di bawah 50% hingga tahun 2029, dengan kisaran antara 46,78% hingga 47,07%. Kondisi ini menandakan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung sekitar 47 penduduk usia non-produktif, baik anak-anak maupun lansia. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari 352,78 ribu jiwa pada 2025 menjadi 365,99 ribu jiwa pada 2029, Kuantan Singingi masih berada dalam periode bonus demografi yang potensial untuk dimanfaatkan. Optimalisasi peran penduduk usia produktif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan dukungan investasi berkelanjutan pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas penduduk.



Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035

Grafik II.17 Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 (%)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi akan menghadapi tantangan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang responsif untuk mengoptimalkan bonus demografi sekaligus mengantisipasi pertumbuhan penduduk lansia di masa mendatang.

Secara piramida, komposisi penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2029 menurut usia cenderung didominasi oleh penduduk usia 15–64 tahun atau kategori usia produktif, diikuti oleh kelompok penduduk non-produktif (usia 0–14 tahun). Hal ini terlihat pada piramida penduduk tahun 2029, di mana kelompok usia produktif memiliki proporsi paling besar dan tersebar merata antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk pada kelompok usia non-produktif, terutama usia 0–14 tahun, masih cukup signifikan, menunjukkan potensi keberlanjutan bonus demografi dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi ini menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia produktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber : Proyeksi Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2020-2035
 Grafik II.18 Piramida Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Usia Tahun 2029

II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir (ultimate goals) dari pembangunan negara/wilayah. Ukuran ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang disepakati, baik secara global maupun nasional. Merujuk kepada Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai acuan dan panduan dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Gambaran perkembangan kondisi aspek kesejahteraan masyarakat menjadi hal penting dalam perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah pembangunan lima tahun mendatang, disamping juga memperhatikan aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi; 1) kesejahteraan ekonomi, 2) kesehatan untuk semua, 3) pendidikan berkualitas yang merata, 4) perlindungan sosial yang adaptif, 5) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan 6) keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.

II.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Analisis terhadap kesejahteraan ekonomi lebih memfokuskan kepada perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita indeks gini rasio, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia selama lima tahun terakhir.

II.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

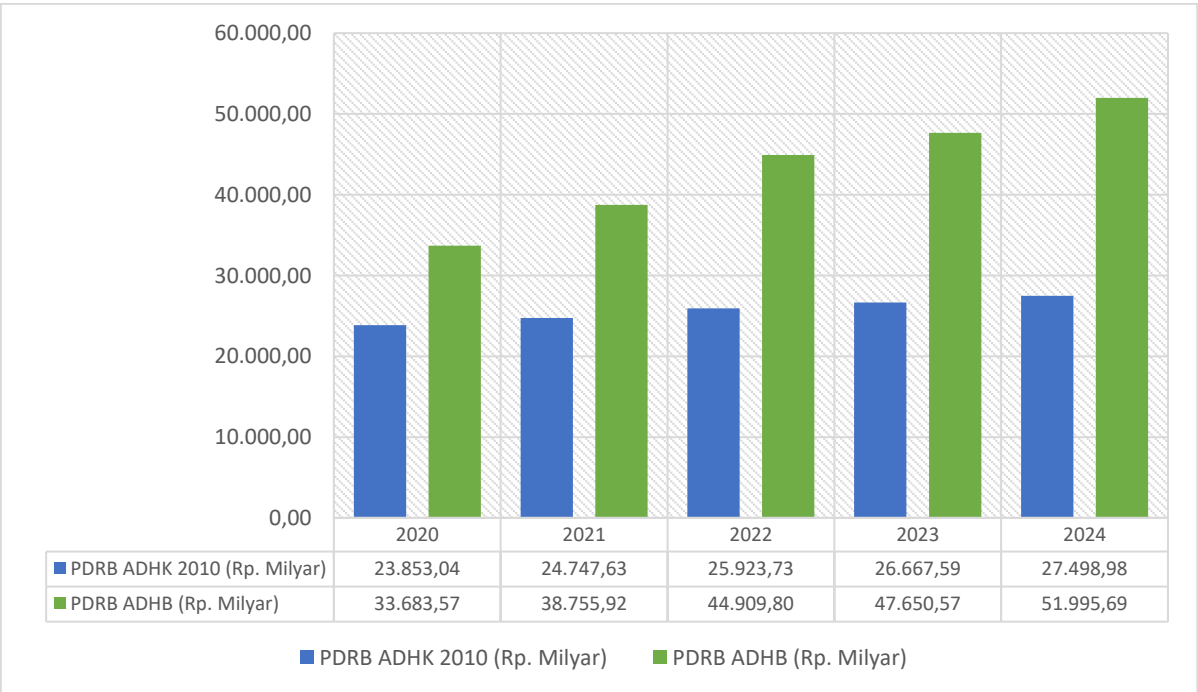
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Secara absolut, nilai produksi agregat seluruh aktivitas perekonomian daerah di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan selama 2020–2024. PDRB Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024 ADHK tahun 2010 cenderung meningkat dari Rp. 23.853,04 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 27.498,98 milyar pada tahun 2024. Peningkatan PDRB harga konstan mengindikasikan terjadinya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa pada perekonomian secara agregat. Sementara itu, PDRB harga berlaku yang juga dipengaruhi oleh harga-harga produk dan jasa mengalami peningkatan dari Rp. 33.683,57 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp. 51.995,69 milyar pada tahun 2024. Berikut adalah perkembangan PDRB Harga Berlaku dan PDRB Harga Konstan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024, yaitu:



Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.19 PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020–2024 (Milyar Rupiah)

Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi atas dasar harga berlaku ditopang oleh lima sektor utama selama lima tahun terakhir yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Kuantan Singingi dari Rp . 17.024,23 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 27.253,27 miliar pada tahun 2024. Pada sektor ini, sub sektor dengan sumbangan terbesar adalah sektor perkebunan dengan komoditi sawit yang banyak diusakan oleh masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya, sektor industri pengolahan memberikan sumbangan kedua tertinggi, dari Rp 9.329,54 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 13.517,78 miliar pada tahun 2024. Peningkatan sektor ini menunjukkan adanya peningkatan investasi dan inovasi dalam proses pengolahan, yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Sektor ini merupakan bagian dari backward linkage dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga sebagian besar industri di Kabupaten Kuantan Singingi adalah industri minyak kelapa sawit.

Adapun konstruksi menyumbang sebesar Rp 2.670,67 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 4.256,82 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar Rp 1.393,83 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2.315,52 miliar pada tahun 2024. Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sebesar Rp 1.256,88 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2.000,18 miliar pada tahun 2024.

Tabel II.20 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020–2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.024,23	19.822,55	21.856,29	24.360,70	27.253,27
B. Pertambangan dan Penggalian	1.393,83	1.722,22	3.343,38	2.920,53	2.315,52
C. Industri Pengolahan	9.329,54	10.791,83	12.428,27	12.238,31	13.517,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	18,62	19,64	24,22	27,4	29,75
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,48	6,79	6,82	7,11	7,54
F. Konstruksi	2.670,67	2.908,34	3.348,77	3.895,65	4.256,82
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.256,88	1.408,77	1.649,39	1.789,51	2.000,18
H. Transportasi dan Pergudangan	165,9	179,42	228,49	260,48	294,66
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73,23	80,01	92,52	110,79	126,52
J. Informasi dan Komunikasi	131,65	141,87	154,38	167,7	181,1
K. Jasa keuangan dan Asuransi	186,3	206,6	237,7	252,47	258,09
L. Real Estat	252,11	262,65	285,38	306,23	323,97
M,N. Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,32	0,36	0,39
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	762,73	767,83	781,01	796,37	868,89
P. Jasa Pendidikan	205,91	215,9	227,44	238,77	254,2
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,66	80,05	83,6	100,62	117,58
R,S,T,U. Jasa Lainnya	134,55	141,17	161,82	177,58	189,42
PDRB LAPANGAN USAHA	33.683,57	38.755,92	44.909,80	47.650,57	51.995,69

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Selanjutnya perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perkembangan yang sama dengan PDRB ADHB pada kurun waktu 2020–2024 yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.21 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2020–2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.761,72	12.256,95	12.622,01	12.978,72	13.212,66
B. Pertambangan dan Penggalian	987,41	890	1.080,39	1.142,11	1.203,52
C. Industri Pengolahan	7.412,10	7.713,56	8.044,11	8.065,28	8.241,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,81	10,41	12,47	13,45	14,62
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,7	4,93	4,94	5	5,23
F. Konstruksi	1.576,95	1.648,23	1.767,06	1.920,78	2.082,16
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	752,45	835,12	935,03	995,11	1.081,38
H. Transportasi dan Pergudangan	98,2	103,54	123,77	132,46	143,56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43,14	46,34	51,22	58,83	63,68
J. Informasi dan Komunikasi	101,82	109,26	116,66	125,42	135,08
K. Jasa keuangan dan Asuransi	124,29	130,54	137	142,54	144,86
L. Real Estat	163,43	168,48	176,92	184,79	191,94
M,N. Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,2	0,21	0,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	556,51	555,56	559,45	588,56	642,95
P. Jasa Pendidikan	129,51	134,82	140,07	145,37	152
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43,89	49,2	50,37	59	68,14
R,S,T,U. Jasa Lainnya	86,94	90,52	102,04	109,95	115,3
PDRB LAPANGAN USAHA	23.853,04	24.747,63	25.923,73	26.667,59	27.498,98

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB ADHK Kabupaten Kuantan Singingi, dari Rp 11.761,72 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 13.212,66 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya, sektor industri pengolahan memberikan sumbangan kedua tertinggi, dari Rp 7.412,10 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 8.241,65 miliar pada tahun 2024. Adapun sektor kontruksi sebesar Rp 1.576,95 miliar pada tahun 2020, menjadi Rp. 2.082,16 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 987,41 miliar pada tahun 2020, menjadi Rp 1.203,52 miliar pada tahun 2024. Serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sebanyak Rp 752,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1.081,38 miliar pada tahun 2024.

Untuk mendorong optimalisasi dan menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi ke depan, kebijakan yang dapat dilakukan meliputi penguatan sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, dengan mendukung modernisasi teknologi, peningkatan produktivitas, serta sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar. Selanjutnya melakukan diversifikasi komoditi pertanian pertanian pangan serta mendorong

pengembangan sektor perikanan budidaya dan komoditi peternakan. Selain itu, pengembangan sektor industri pengolahan sebagai penopang hilirisasi hasil perkebunan dan sektor lainnya perlu didorong melalui pemberian insentif investasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi untuk memperkuat rantai pasok industri. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru dengan penguatan promosi, peningkatan fasilitas wisata, dan pelatihan keterampilan masyarakat lokal. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu diperkuat dalam pengembangan ekonomi digital dan teknologi informasi, yang akan membuka akses pasar baru serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi daerah.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal, perubahan inventori, dan ekspor serta impor. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama.

Munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu berdampak pada ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia termasuk Kabupaten Kuantan Singingi. Akibatnya, ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi sempat mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Meski demikian, pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat.

Memasuki tahun 2022, perekonomian global kembali memburuk dipicu oleh ketegangan geopolitik dunia, yang berdampak pada meningkatnya resiko resesi dan inflasi yang tinggi. Meski demikian, Kabupaten Kuantan Singingi berhasil menjaga momentum pemulihan ekonomi. Indikasi pemulihan ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai PDRB baik secara nominal maupun riil, yang ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang impresif hingga tahun 2024.

Tabel II.22 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku, 2020–2024 (Miliar)

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.524,55	15.768,10	17.369,24	18.626,02	19.862,98
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	182,8	174,48	189,43	214,63	243,47
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.442,84	1.357,67	1.398,78	1.464,63	1.576,84
Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.557,28	16.400,36	18.156,08	18.576,72	19.160,23
Perubahan Inventori	153,47	33,33	79,27	79,6	47,33
Net Ekspor Barang dan Jasa	24.957,34	30.153,63	34.315,15	33.076,46	37.342,70
Produk Domestik Regional Bruto	33.683,57	38.755,92	44.909,80	47.650,57	51.995,69

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kondisi perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi yang ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Peningkatan nilai PDRB dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun volume. PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi setiap tahunnya. Adanya kecenderungan harga yang meningkat, mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai PDRB.

Selanjutnya PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan.

Tabel II.23 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan, 2020–2024 (Miliar)

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	169.242,66	174.653,23	182.881,17	190.751,01	199.863,37
Pengeluaran Konsumsi LNPR	2.780,54	2.614,74	2.735,34	2.978,75	3.366,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17.252,09	16.460,72	17.078,48	18.433,73	19.722,35
Pembentukan Modal Tetap Bruto	148.133,67	153.996,37	163.041,33	171.020,32	176.585,95
Perubahan Inventori	4.723,71	1.360,44	820,73	1.149,26	808,5
Net Ekspor Barang dan Jasa	147.863,09	157.386,41	162.975,92	167.495,41	170.887,19
Produk Domestik Regional Bruto	23.853,04	24.747,63	25.923,73	26.667,59	27.498,98

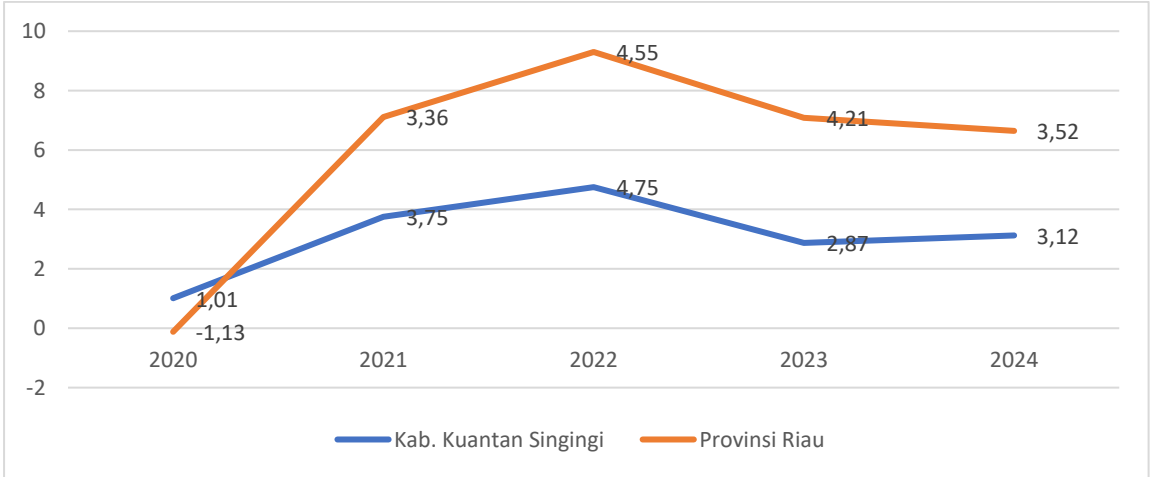
Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Selama tahun 2020–2024 nilai komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, akibat adanya pandemi, nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan namun tidak cukup signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan volume permintaan domestik dan permintaan eksternal tidak sebanyak peningkatan pada tahun sebelumnya. Seiring pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, tahun 2021 PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kenaikan menjadi 24.747,63 miliar rupiah, tahun 2022 meningkat menjadi 25.923,73 miliar rupiah, dan meningkat hingga tahun 2024 menjadi 27.498,98 miliar rupiah.

Untuk mendorong optimalisasi dan menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi ke depan, sejumlah kebijakan strategis dapat diambil yaitu mengembangkan sektor konsumsi rumah tangga melalui peningkatan daya beli masyarakat, sehingga dapat meningkatkan permintaan secara agregat yang menopang dapat menopak. Selanjutnya memperkuat peran pemerintah dalam mendorong investasi melalui penguatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di bidang industri yang terkait dengan hilirisasi produk pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit serta investasi pada sektor sektor pariwisata. Kebijakan lainnya yang dapat dilakukan adalah mendorong ekspor dengan memperluas akses pasar dan memberikan insentif bagi produk unggulan daerah, khususnya komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing di pasar internasional. Terakhir, menjaga stabilitas inflasi dan harga komoditas menjadi langkah penting untuk memastikan kestabilan ekonomi dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi kedepannya.

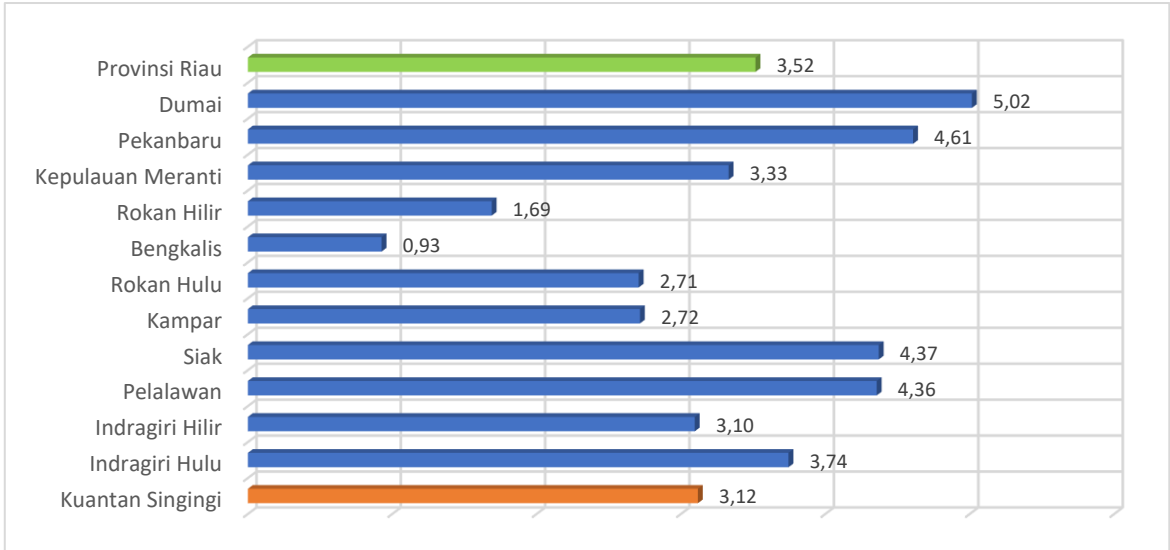
II.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi pasca pandemi menunjukkan ketahanan awal dengan pemulihan lebih cepat daripada tingkat provinsi pada 2020, namun mengalami stagnasi pada 2023-2024 di kisaran 3%. Tren ini mengindikasikan bahwa pemulihan pasca pandemi bersifat temporer dan belum ditopang peningkatan produktivitas jangka panjang di lapangan usaha inti. Struktur ekonomi daerah juga terbukti rentan terhadap guncangan eksternal, terlihat dari perlambatan konsisten yang menyebabkan kinerja Kuansing tertinggal dari rata-rata Provinsi Riau. Oleh karena itu, diperlukan intervensi spesifik dalam RPJMD 2025-2029 untuk mentransformasi sektor unggulan melalui penguatan rantai nilai lokal dan inovasi guna mengatasi stagnasi serta mengejar keteringgalan pertumbuhan regional.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025
Grafik II.20 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024

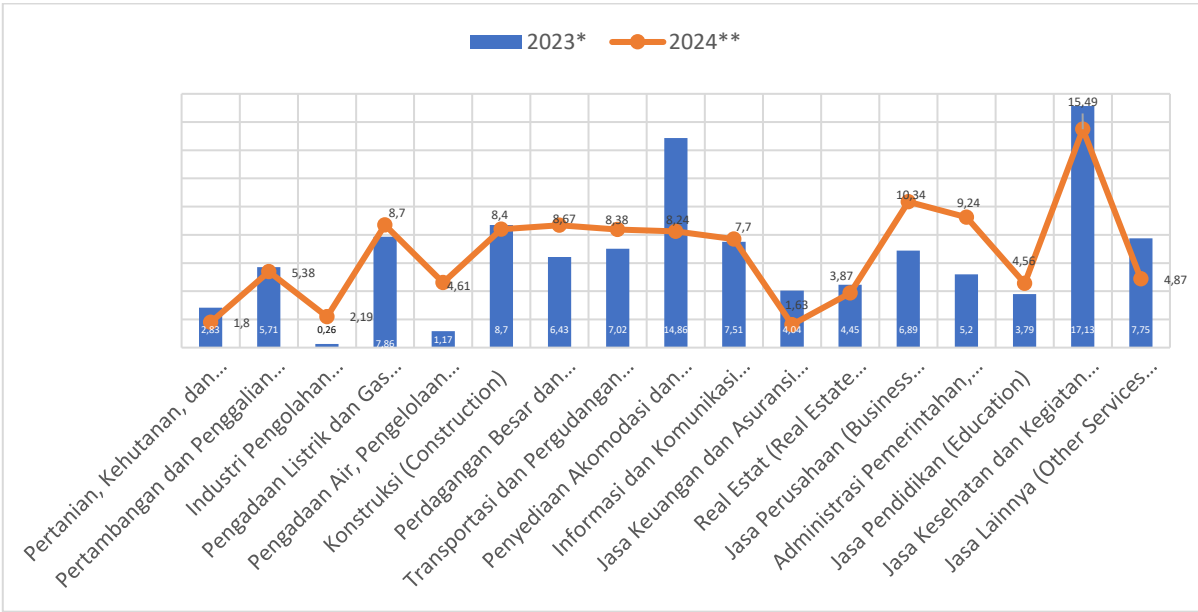
Posisi pertumbuhan ekonomi Kuantan Singingi di tengah hierarki regional Riau mengungkap kerentanan struktural yang khas: terjepit antara pusat pertumbuhan berdaya inovasi tinggi dan wilayah berbasis komoditas tradisional. Status intermediate performer ini bukan sekadar pencapaian statis, melainkan indikator ketergantungan berlebihan pada sektor primer yang rentan fluktuasi pasar dan minim penciptaan nilai tambah. Lebih mengkhawatirkan, jarak pertumbuhan yang signifikan dengan wilayah penggerak utama ekonomi provinsi mengisyaratkan lemahnya diversifikasi dan daya saing sektor unggulan. Dalam siklus RPJMD 2025-2029, transformasi mendasar menjadi keharusan melalui percepatan hilirisasi produk lokal berbasis teknologi dan penguatan ekosistem inovasi bukan sekadar perbaikan inkremental untuk memutus siklus ketergantungan pada komoditas mentah dan mencegah jebakan stagnasi jangka panjang.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

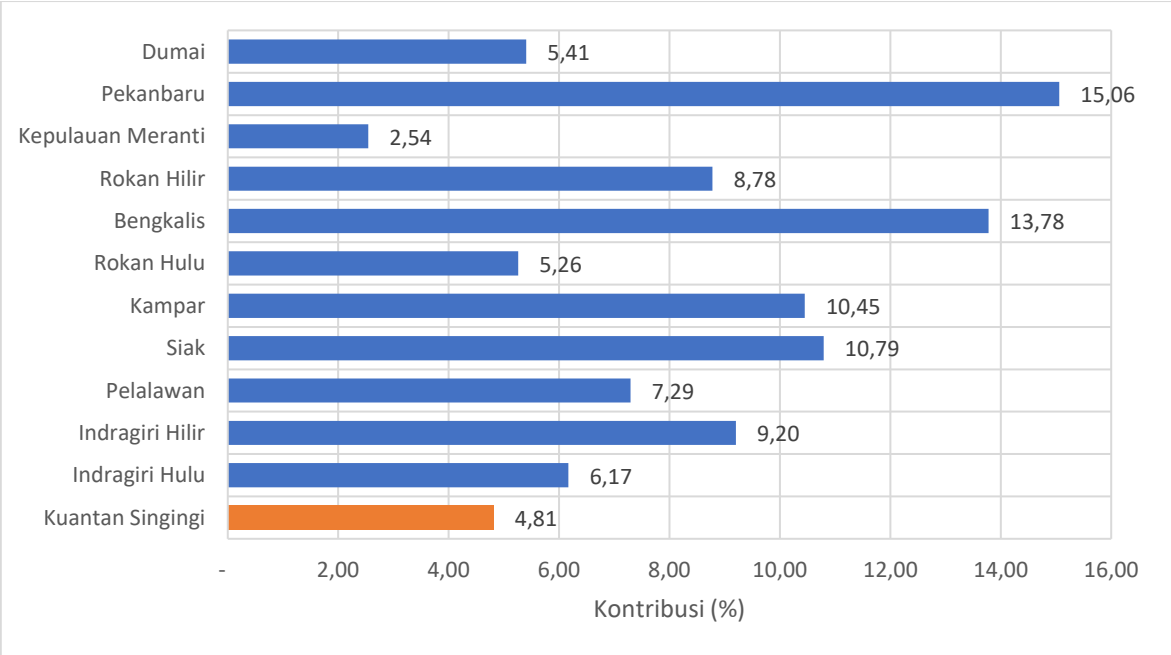
Grafik II.21 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (%)

Grafik pertumbuhan lapangan usaha PDRB tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa sektor-sektor jasa (tersier) semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kuantan Singingi. Sektor administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan, begitu juga dengan sektor industri pengolahan. Sektor perdagangan besar dan eceran, serta akomodasi dan makan-minum juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini menandakan adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor jasa, meskipun kontribusi sektor primer masih tetap signifikan. Namun demikian, rendahnya pertumbuhan di beberapa sektor strategis menandakan perlunya optimalisasi potensi lokal melalui peningkatan produktivitas dan inovasi.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025
Grafik II.22 Grafik Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2024 (%)

Kontribusi ekonomi Kuantan Singingi terhadap struktur PDRB Provinsi Riau menempati posisi strategis sebagai stabilizer regional dan penyuplai sumber daya primer, meskipun secara proporsional belum menyamai dominasi wilayah metropolitan dan kawasan industri besar. Posisi ini mencerminkan potensi pertumbuhan yang belum tergarap optimal, terutama dalam konversi kekayaan alam menjadi nilai tambah ekonomi tinggi. Untuk meningkatkan peran strategisnya dalam arsitektur ekonomi provinsi, kabupaten ini perlu melakukan transformasi fundamental melalui pengembangan klaster industri berbasis komoditas unggulan lokal dengan pendekatan circular economy, akselerasi investasi di sektor pengolahan hilir, dan revolusi keterampilan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri masa depan. Tanpa terobosan ini, Kuansing berisiko terjebak dalam peran supplier bahan mentah dengan nilai tambah minimal sementara pusat pertumbuhan lain mengkonsolidasikan dominasi ekonomi regional.

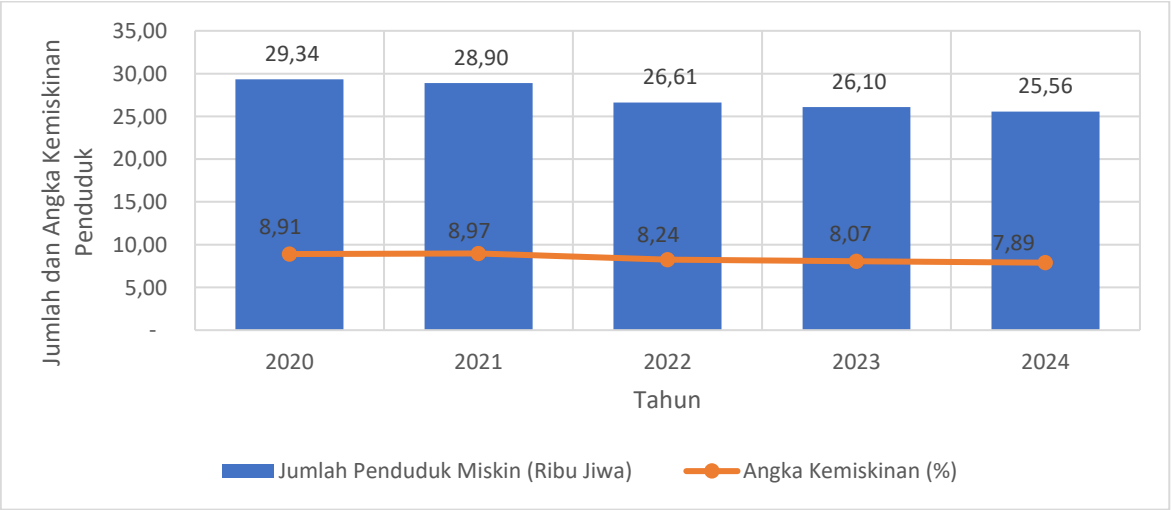


Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka, 2025
Grafik II.23 Grafik Distribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2024 (%)

Secara umum, perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir menunjukkan pemulihan yang relatif baik pasca pandemi COVID-19, meskipun pertumbuhan cenderung melambat pada 2023–2024 dan masih di bawah rata-rata provinsi. Posisi Kuantan Singingi yang berada di tingkat menengah secara regional menegaskan perlunya transformasi ekonomi melalui diversifikasi sektor, peningkatan produktivitas, serta inovasi di sektor unggulan. Dominasi sektor jasa yang mulai tumbuh signifikan menjadi peluang baru, namun optimalisasi sektor strategis primer dan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian provinsi tetap menjadi agenda penting agar kinerja ekonomi Kuantan Singingi semakin inklusif dan berdaya saing.

II.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

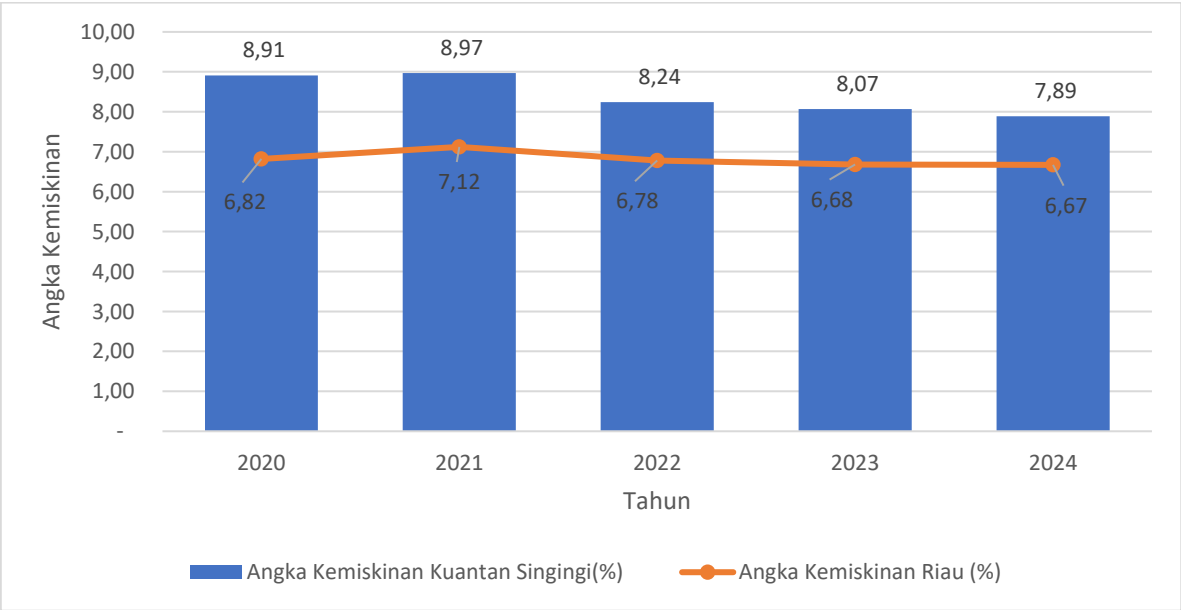
Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir mengindikasikan adanya perbaikan struktur kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dinamika ini mencerminkan efektivitas sejumlah intervensi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, meskipun laju penurunannya masih berlangsung secara bertahap. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, utamanya di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang menyebabkan indeks kepuasan semakin tinggi.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Grafik II.24 Perkembangan Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Secara komparatif, Kuantan Singingi masih menghadapi disparitas tingkat kemiskinan dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Fakta bahwa angka kemiskinan daerah ini konsisten berada di atas angka provinsi menandakan masih adanya persoalan struktural, baik dari sisi akses peluang ekonomi, kualitas sumber daya manusia, maupun efektivitas distribusi bantuan sosial. Kesenjangan ini juga menegaskan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, termasuk harmonisasi program pengentasan kemiskinan lintas sektor.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.25 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024

Dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, penurunan angka kemiskinan di Kuantan Singingi perlu ditopang oleh kebijakan berbasis data dan inovasi, seperti penguatan ekonomi produktif masyarakat miskin, perluasan perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika harga, serta akselerasi pembangunan infrastruktur dasar. Perhatian khusus juga harus diberikan pada kelompok rentan agar kemajuan penurunan kemiskinan tidak bersifat semu dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Kedepan, prioritas pembangunan tidak cukup hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, namun harus berorientasi pada penciptaan akses dan peluang ekonomi baru yang inklusif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan ekosistem sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap guncangan ekonomi. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara lebih substansial, berkelanjutan, dan merata di seluruh lapisan masyarakat Kuantan Singingi.

Tabel II.24 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

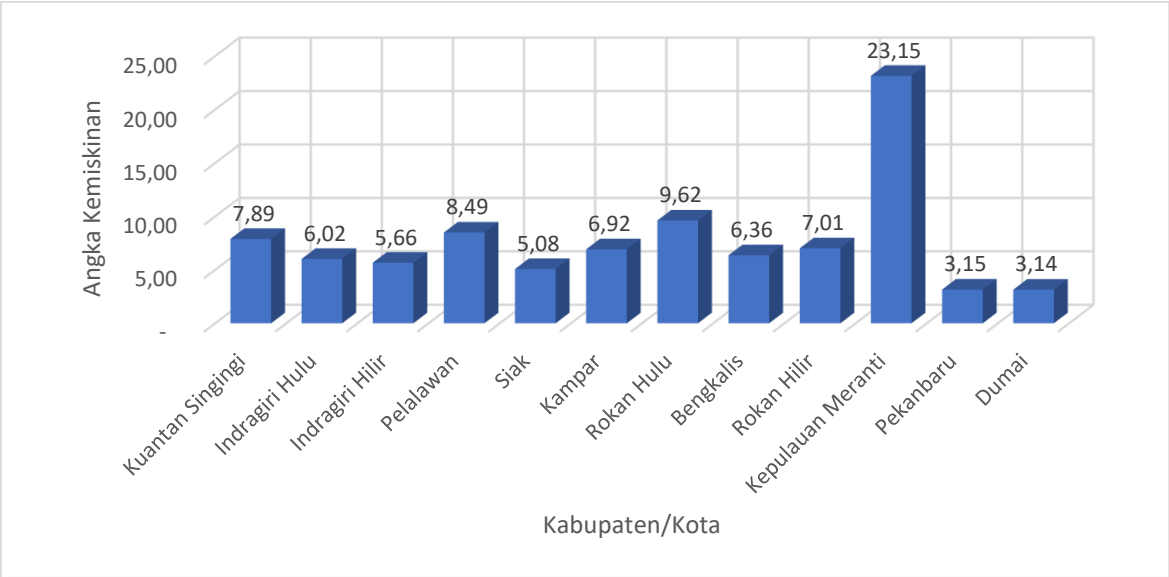
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	580.453	599.163	638.678	693.493	736.050
Indragiri Hulu	522.110	549.563	584.910	626.671	660.349
Indragiri Hilir	495.305	518.283	568.879	597.122	629.570
Pelalawan	585.728	618.738	655.641	689.786	729.977
Siak	473.128	489.467	518.768	558.867	595.659
Kampar	460.991	477.603	502.670	547.696	590.444
Rokan Hulu	532.643	551.351	585.225	647.599	699.018

Kabupaten/Kota	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
Bengkalis	581.416	604.925	648.933	713.826	755.572
Rokan Hilir	418.473	437.398	465.614	511.610	545.799
Kepulauan Meranti	520.955	542.599	568.639	623.576	661.863
Pekanbaru	589.281	613.183	655.389	712.000	749.522
Dumai	484.609	509.002	543.182	601.348	631.652
Riau	544.057	565.937	605.912	658.611	697.296

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Peningkatan garis kemiskinan yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, termasuk Kuantan Singingi, mengindikasikan tekanan biaya hidup yang semakin besar akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan laju inflasi. Hal ini memperberat upaya masyarakat miskin untuk keluar dari perangkap kemiskinan, sehingga menuntut perhatian ekstra dalam perumusan program-program pengentasan kemiskinan berbasis realitas ekonomi terkini.

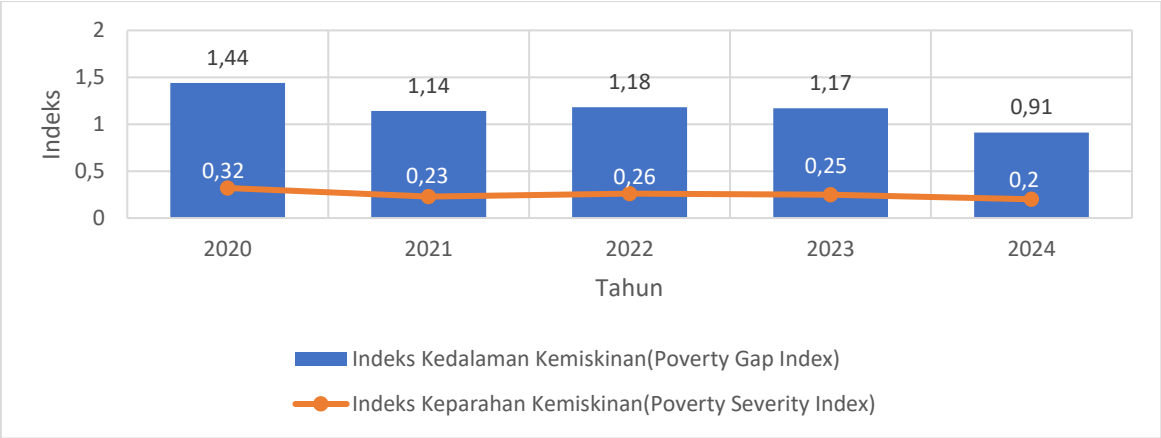
Jika dibandingkan dengan wilayah lain, tingkat kemiskinan Kuantan Singingi masih berada di atas rata-rata provinsi dan sejumlah kabupaten/kota lainnya, khususnya Pekanbaru, Dumai, dan Kampar yang memiliki capaian kemiskinan terendah. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat di Kuantan Singingi masih menghadapi tantangan struktural, baik dari sisi pemerataan akses ekonomi, kualitas infrastruktur, maupun efektivitas pelaksanaan program-program pemberdayaan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.26 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Namun demikian, adanya penurunan Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) selama lima tahun terakhir menjadi indikator positif bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin dan tingkat kekurangan dasar mulai dapat ditekan. Artinya, kebijakan yang telah dijalankan tidak hanya menurunkan jumlah penduduk miskin secara absolut, tetapi juga berhasil mengurangi kesenjangan di antara kelompok termiskin. Hal ini merupakan fondasi penting menuju pembangunan yang lebih inklusif dan adil.



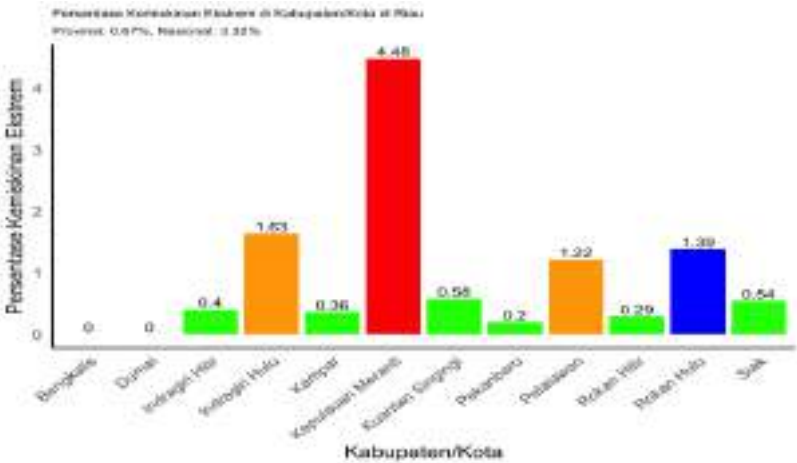
Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Grafik II.27 Perkembangan Indek Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Pencapaian pengurangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuantan Singingi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Posisi Kuantan Singingi yang berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional menandakan bahwa upaya perlindungan kelompok paling rentan sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini memperlihatkan efektivitas kebijakan daerah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, serta menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga penduduknya dari kondisi deprivasi yang sangat parah.

Meski demikian, capaian tersebut tetap harus menjadi pijakan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Tantangan yang tersisa adalah memastikan agar penurunan kemiskinan ekstrem berjalan secara konsisten, berkelanjutan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan baru yang mungkin muncul akibat dinamika ekonomi.

Dari perspektif perencanaan, penguatan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pada layanan dasar, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi agenda utama. Langkah-langkah strategis perlu terus diarahkan untuk menjaga tren positif tersebut, sembari memperluas jangkauan intervensi agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Dengan demikian, penghapusan kemiskinan ekstrem dapat benar-benar diwujudkan, sejalan dengan komitmen pembangunan inklusif dan berkeadilan.



Sumber: TNP2K, 2024

Grafik II.28 Grafik Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023

Ke depan, arah perencanaan pembangunan daerah harus menekankan strategi terintegrasi lintas sektor, penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, serta pelibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem. Upaya pengendalian inflasi daerah, inovasi ekonomi produktif, serta

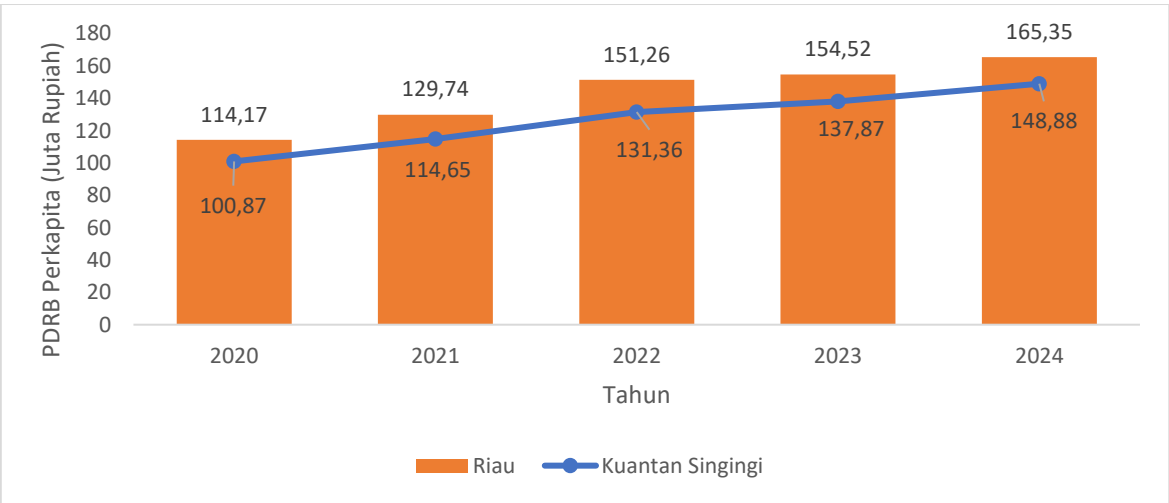
peningkatan kualitas data kemiskinan menjadi kunci akselerasi pencapaian target penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan secara berkelanjutan.

Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika lokal, Kabupaten Kuantan Singingi dapat mempersempit kesenjangan kesejahteraan, memperkuat fondasi pertumbuhan inklusif, dan memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

II.2.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam satu tahun di suatu wilayah, sekaligus menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemakmuran daerah. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020 hingga 2024 memperlihatkan arah pertumbuhan yang konsisten dan positif. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi lokal yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Meski demikian, pertumbuhan tersebut belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan wilayah-wilayah lain di Provinsi Riau.

Secara struktural, PDRB per kapita Kuantan Singingi masih berada di bawah rata-rata provinsi. Fakta ini menandakan bahwa kontribusi sektor ekonomi utama di daerah ini masih belum cukup kuat untuk mendorong lonjakan kesejahteraan yang signifikan. Dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten berpendapatan tinggi seperti Bengkalis, Siak, dan Pelalawan, Kuantan Singingi masih menghadapi tantangan dalam memperluas basis ekonominya, meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, serta mempercepat transformasi struktural.

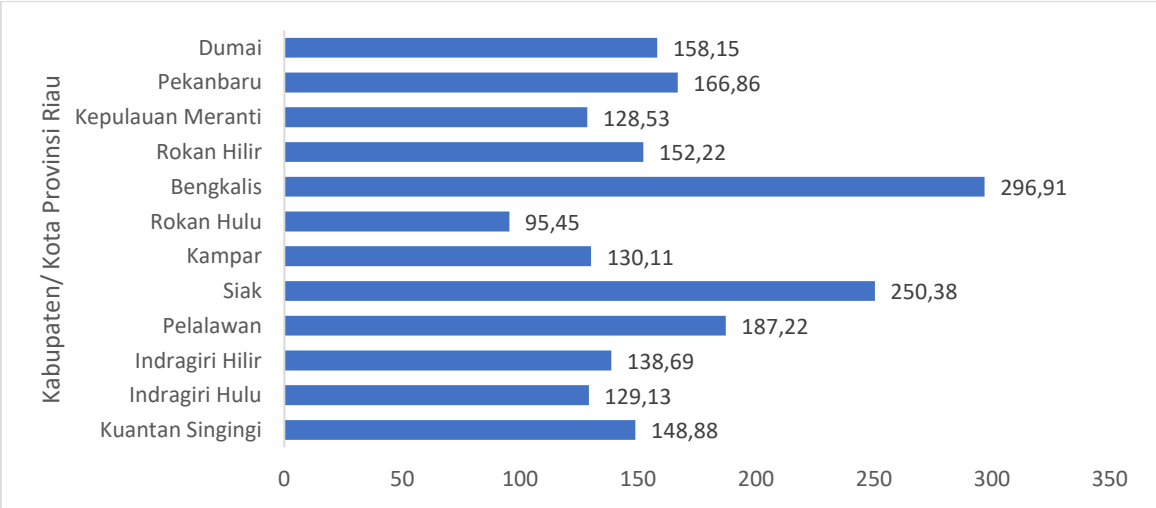


Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka, 2025

Grafik II.29 Perkembangan PDRB per-kapita Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan wilayah dalam capaian kesejahteraan, yang menuntut intervensi kebijakan yang lebih progresif. Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga menekankan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor potensial seperti pertanian bernilai tambah, industri pengolahan berbasis lokal, serta pariwisata berbasis sumber daya alam dan budaya.

Selain itu, penguatan konektivitas antarwilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat untuk menciptakan daya saing ekonomi jangka panjang. Keberhasilan meningkatkan PDRB per kapita bukan hanya ditentukan oleh peningkatan angka statistik semata, tetapi oleh seberapa inklusif pertumbuhan tersebut mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka, 2025
Grafik II.30 PDRB per-Kapita Berdasarkan ADHB menurut Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2024 (Juta Rupiah)

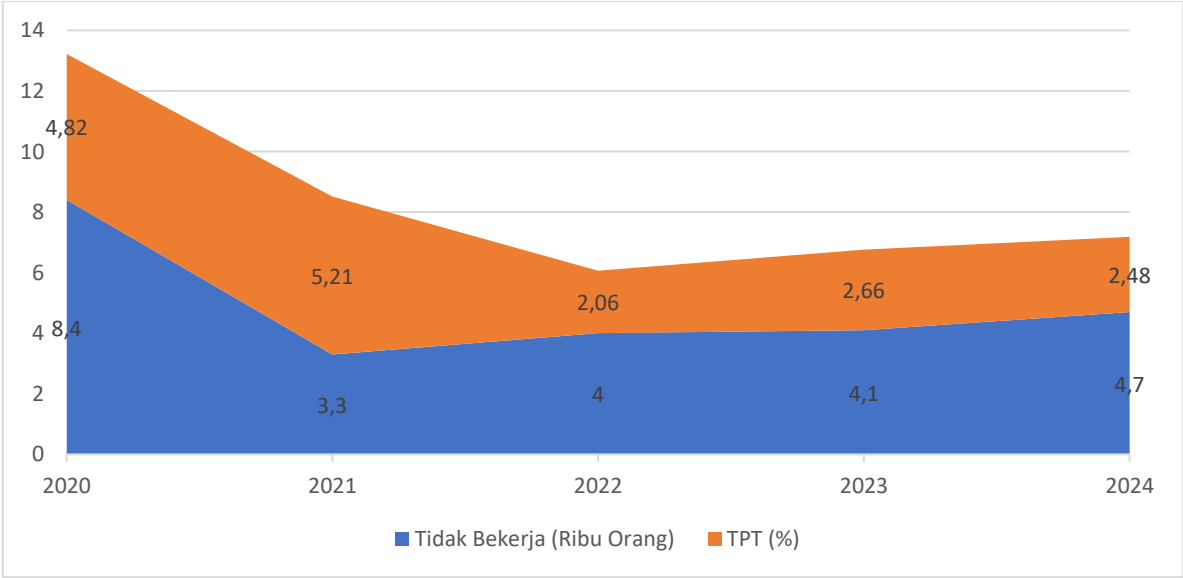
Dengan kata lain, arah pembangunan di Kuantan Singingi perlu difokuskan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar mengejar angka rata-rata provinsi, tetapi memastikan bahwa setiap penduduk mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan yang berlangsung.

II.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja di suatu daerah. TPT mencerminkan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan pada periode tertentu. Analisis perkembangan TPT menjadi penting sebagai dasar evaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan sebagai acuan dalam merumuskan strategi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.

Perbaikan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan pasar kerja lokal. Tingkat pengangguran terbuka yang semakin rendah menunjukkan semakin efektifnya penciptaan dan distribusi kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi. Kondisi ini memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus berkontribusi pada stabilitas sosial masyarakat.

Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk usia kerja menuntut kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Ke depan, pemerintah daerah perlu fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan investasi sektor produktif, serta dorongan terhadap wirausaha dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, momentum perbaikan ketenagakerjaan dapat terus dijaga dan mampu menghadapi tantangan struktural maupun dinamika ekonomi global.

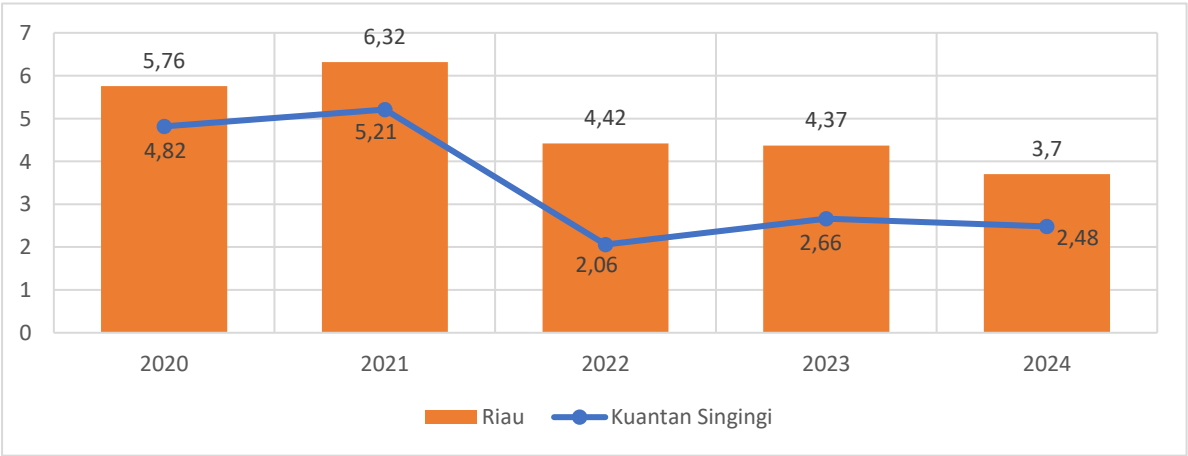


Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Grafik II.31 Perkembangan Angkatan Kerja Tidak Bekerja dan TPT Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Kinerja penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah ini secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi. Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan mengelola angkatan kerja sudah berada pada jalur yang tepat. Efektivitas intervensi pemerintah daerah turut memperkuat resiliensi pasar tenaga kerja lokal, meskipun tantangan eksternal tetap ada.

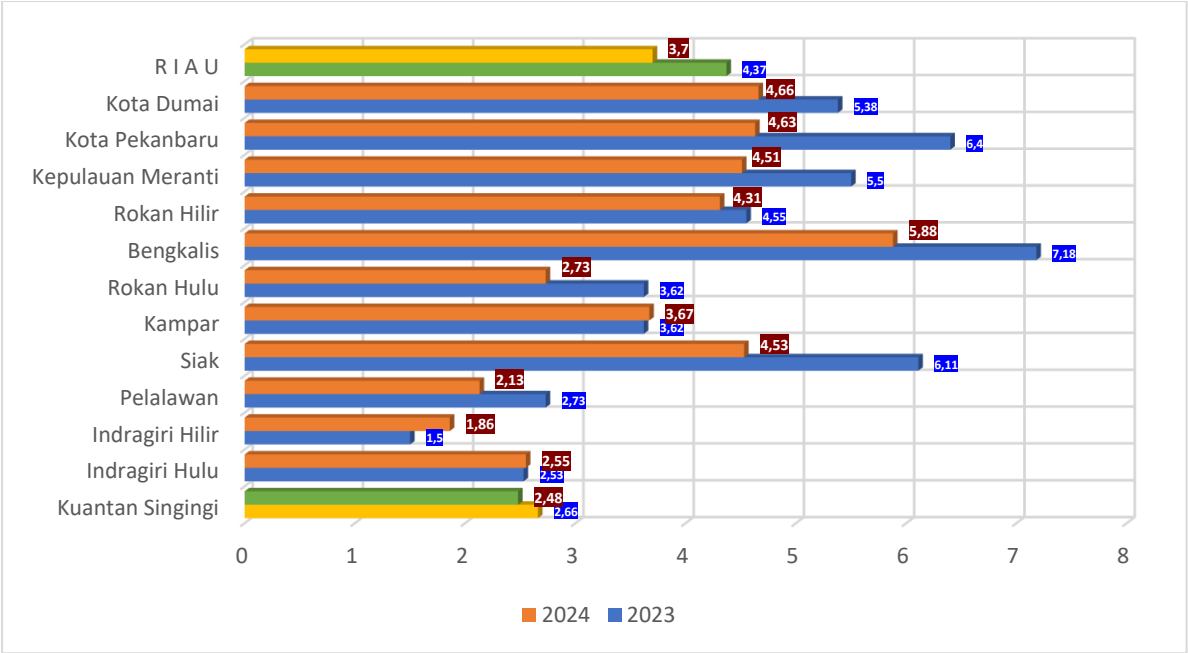
Namun demikian, perbaikan TPT ini belum sepenuhnya menghilangkan persoalan ketenagakerjaan di tingkat lokal. Ketimpangan kualitas tenaga kerja, keterbatasan kesempatan di sektor formal, serta belum meratanya pertumbuhan kesempatan kerja antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Upaya ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kompetensi, pemerataan akses lapangan kerja, dan sinergi lintas sektor agar pencapaian positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Grafik II.32 Perkembangan TPT Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024

Secara regional, posisi TPT Kuantan Singingi pada tahun 2024 tetap berada pada level yang kompetitif dibanding kabupaten/kota lain di Riau, dan berada di bawah rerata provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kuansing relatif lebih baik, didukung oleh pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Meski demikian, disparitas TPT antar wilayah menandakan perlunya kebijakan lintas sektor dan perbaikan kualitas pendidikan vokasional guna mendukung daya saing angkatan kerja di tingkat regional.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Grafik II.33 Perkembangan TPT Menurut Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2023–2024

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja di Kuantan Singingi menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja daerah semakin besar, sekaligus menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Kenaikan proporsi penduduk yang bekerja mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong penyerapan tenaga kerja serta perbaikan situasi pasar kerja secara umum.

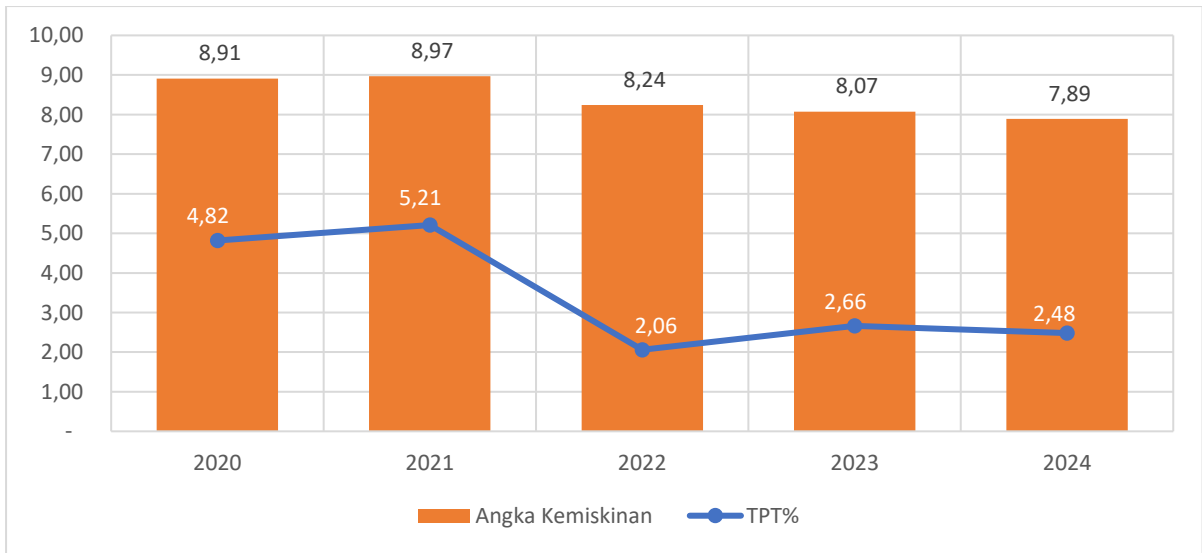
Namun, besarnya kelompok bukan angkatan kerja, terutama yang masih bersekolah dan beraktivitas di rumah tangga, menandakan perlunya perhatian pada aspek pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya penguatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penciptaan kesempatan kerja yang inklusif, agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak nyata dan merata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk usia kerja di Kuantan Singingi.

Tabel II.25 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2020–2024 (Jiwa)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	160.807	160.807	150.475	164.669	171.541
	a. Bekerja	152.431	152.431	146.477	160.561	166.768
	b. Pengangguran	8.376	3.291	3.998	4.108	4.773
2	Bukan Angkatan Kerja	74.713	74.713	89.616	92.841	90.097
	a. Sekolah	18.058	18.058	22.179	20.891	20.908
	b. Rumah Tangga	48.270	48.270	59.585	60.500	62.069
	c. Lainnya	8.385	8.385	7.852	11.450	7.120
3	Jumlah (Total)	235.520	235.520	240.091	257.510	261.105

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024, meskipun TPT menurun ke level 2,48%, angka kemiskinan masih berada di kisaran 7,89%. Fakta ini menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja baru belum sepenuhnya berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, integrasi antara strategi penciptaan lapangan kerja dan program pengentasan kemiskinan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan pekerja informal, menjadi kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi inklusif di Kuantan Singingi.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

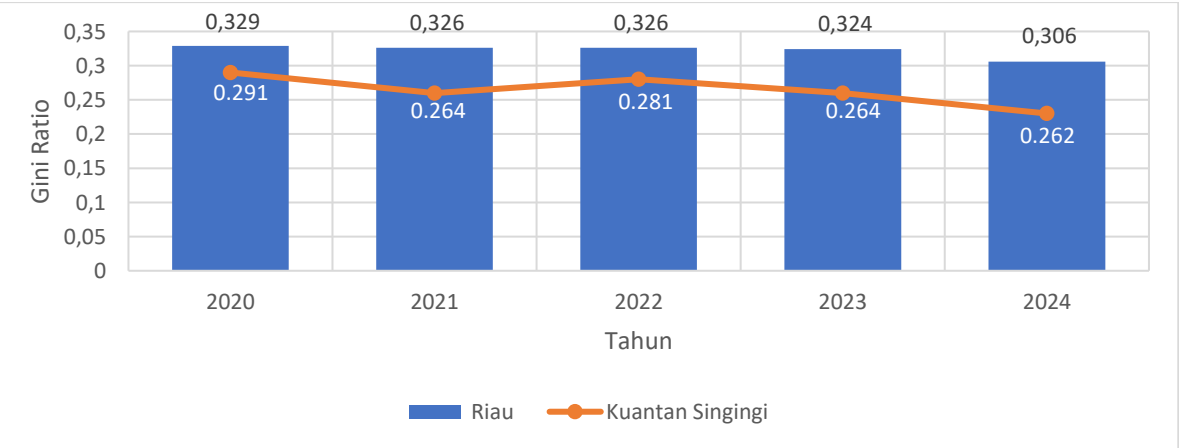
Grafik II.34 Grafik Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Angka Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 (%)

Perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan di Kuantan Singingi menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menurunkan pengangguran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Hal ini mengisyaratkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa penciptaan lapangan kerja benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat miskin, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau berpenghasilan rendah.

Situasi ini menegaskan pentingnya integrasi antara strategi peningkatan kesempatan kerja dengan program pemberdayaan ekonomi bagi rumah tangga miskin. Dengan menghubungkan secara langsung kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan, manfaat pembangunan ekonomi dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, sehingga upaya penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kuantan Singingi.

II.2.1.6 Indeks Gini

Gini Rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Di Kuantan Singingi, perkembangan Gini Rasio periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup baik, yaitu menurun dari 0,291 pada 2020 menjadi 0,262 pada 2024. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat Kuansing berada pada kategori rendah dan cenderung semakin merata.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.35 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024

Jika dibandingkan Provinsi Riau, Gini Rasio Kuansing secara konsisten lebih rendah, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kuansing lebih merata dibandingkan rata-rata provinsi. Penurunan Gini Rasio ini mengindikasikan keberhasilan upaya pemerataan ekonomi di daerah, terutama melalui sektor pertanian dan pemberdayaan ekonomi lokal.

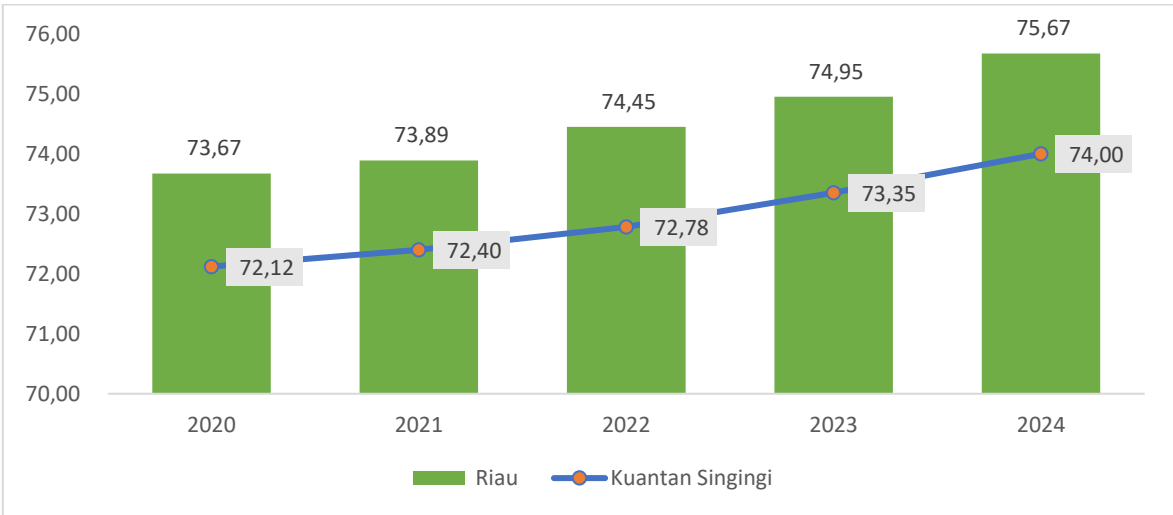
Namun, fluktuasi yang terjadi pada tahun 2022 menjadi perhatian agar ke depan pemerintah daerah terus mendorong program penguatan ekonomi rakyat dan perlindungan sosial, sehingga ketimpangan pendapatan tetap terjaga pada level rendah dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat Kuantan Singingi.

II.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Untuk mengukur perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah, indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang mencakup tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Semakin baik perkembangan dimensi-dimensi tersebut, maka semakin tinggi pula nilai IPM. Komponen utama dalam perhitungan IPM meliputi: 1) usia harapan hidup, 2) harapan lama sekolah, 3) rata-rata lama sekolah, dan 4) pengeluaran per kapita disesuaikan (paritas daya beli).

Tren peningkatan IPM di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat, yang tercermin pada perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Dinamika positif ini menandakan bahwa upaya pembangunan manusia di daerah telah berada pada jalur yang tepat, sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing penduduk.

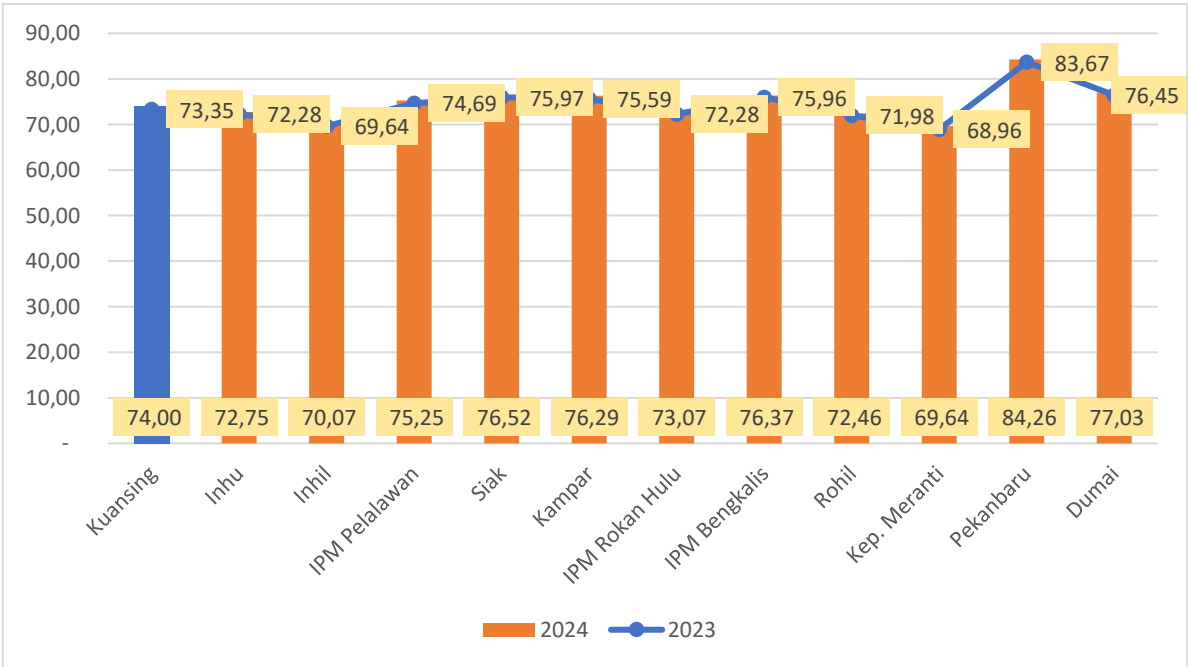
Namun, capaian IPM Kuantan Singingi yang masih di bawah rata-rata Provinsi Riau mengindikasikan perlunya strategi percepatan dalam penguatan kualitas sumber daya manusia. Penguatan akses layanan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi inklusif perlu terus didorong agar kesenjangan dengan provinsi semakin mengecil dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025
Grafik II.36 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (point)

Kinerja pembangunan manusia di Kuantan Singingi menunjukkan tren positif yang didorong oleh perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif telah berkontribusi pada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong distribusi pendapatan yang makin merata. Hasil ini

menjadi indikasi bahwa integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses layanan dasar telah memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat.



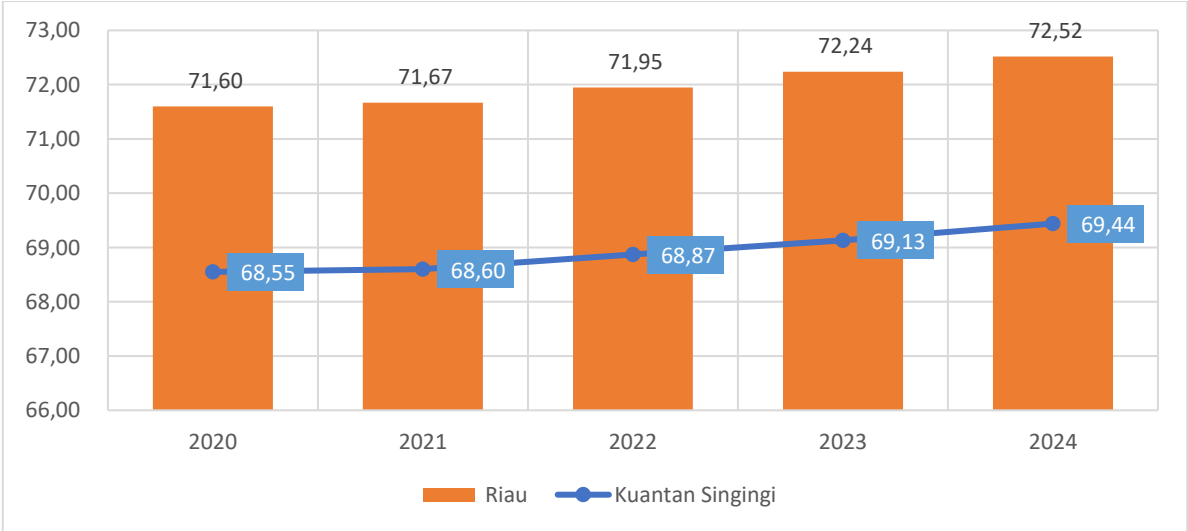
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.37 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2023 dan 2024 (poin)

Meskipun demikian, laju peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kuantan Singingi masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah ber-IPM tinggi di Provinsi Riau. Gap daya saing dan ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Untuk menjaga keberlanjutan kemajuan, diperlukan kebijakan terfokus yang mengakselerasi pengembangan sumber daya manusia, memperluas jangkauan layanan dasar, dan mendorong inovasi di sektor ekonomi produktif. Dengan sinergi kebijakan yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kuantan Singingi.

II.2.2 Kesehatan untuk Semua

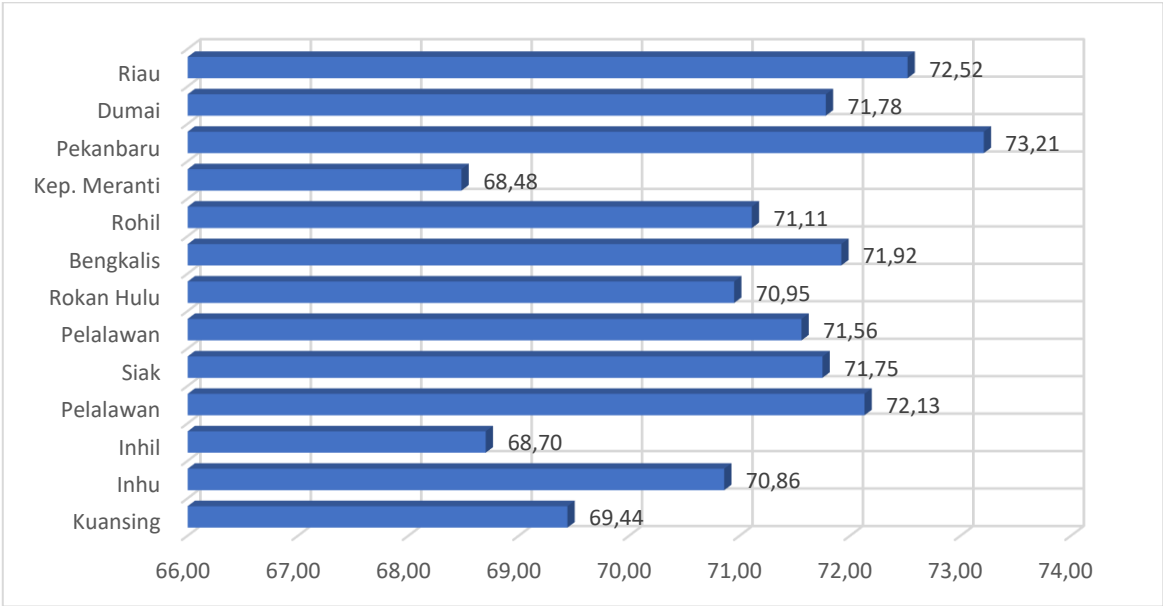
II.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Perkembangan usia harapan hidup di Kuantan Singingi menandakan adanya kemajuan di sektor kesehatan, meskipun laju perbaikannya masih belum optimal jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Riau. Tren ini merefleksikan bahwa perbaikan layanan kesehatan, edukasi pola hidup sehat, serta intervensi pemerintah daerah telah memberikan dampak positif, namun belum cukup untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat ke level yang setara dengan daerah maju di provinsi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.38 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020–2024 (tahun)

Rendahnya usia harapan hidup relatif terhadap rata-rata provinsi mengindikasikan adanya hambatan struktural dan pemerataan dalam sektor kesehatan, baik dari sisi akses, kualitas layanan, maupun pemenuhan gizi masyarakat. Kesenjangan ini mengisyaratkan perlunya penajaman strategi kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan layanan kesehatan primer, penguatan infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil, serta peningkatan literasi kesehatan dan perilaku hidup bersih di tingkat rumah tangga.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.39 Capaian Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Tahun)

Agar akselerasi perbaikan usia harapan hidup dapat tercapai, dibutuhkan upaya kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara aktif. Penguatan program promotif-preventif, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesehatan berkelanjutan, serta perluasan jangkauan jaminan kesehatan menjadi kunci dalam memperkecil kesenjangan derajat kesehatan. Hanya dengan kebijakan yang inklusif dan berbasis data, Kuantan Singingi dapat mengejar ketertinggalan dan memastikan peningkatan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan.

II.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Kesehatan keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan capaian pembangunan manusia yang masih memerlukan penguatan di sejumlah aspek fundamental. Secara umum,

tingkat akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, persalinan di fasilitas kesehatan, dan imunisasi bayi sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, menandakan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur kesehatan dasar. Namun, masih terdapat sejumlah indikator kunci yang menunjukkan tantangan signifikan, terutama pada aspek perilaku dan jaminan perlindungan kesehatan keluarga.

Rendahnya angka kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) serta belum optimalnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi perhatian utama. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan intervensi yang lebih intensif dalam edukasi dan advokasi kesehatan, agar keluarga tidak hanya berorientasi pada upaya kuratif, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan kesehatan jangka panjang. Masih rendahnya angka keluarga yang tidak merokok serta belum meratanya pemberian ASI eksklusif juga mengindikasikan pentingnya penguatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan lintas sektor.

Sementara itu, capaian positif dalam indikator akses air bersih, kepemilikan jamban keluarga, dan pemantauan tumbuh kembang balita, perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini dapat menjadi modal sosial dan kelembagaan untuk mendorong adopsi perilaku sehat yang lebih luas di masyarakat. Di sisi lain, adanya kesenjangan antara indikator fisik (infrastruktur dan layanan) dan indikator perilaku (praktik hidup sehat dan kepesertaan program) memperlihatkan perlunya strategi intervensi yang lebih terintegrasi.

Tabel II.26 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau 2023

N o	Indikator	Kuantan Singingi	Provinsi Riau (%)
1	Keluarga mengikuti program KB (%)	37,38	48,83
	Σ Keluarga bernilai "N"	8.149	287.374
	Σ Keluarga bernilai "Y"	13.660	301.063
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	94,56	94,77
	Σ Keluarga bernilai "N"	1.270	21.892
	Σ Keluarga bernilai "Y"	20.539	566.545
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap (%)	84,10	85,27
	Σ Keluarga bernilai "N"	3.259	75.276
	Σ Keluarga bernilai "Y"	17.299	517.844
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif (%)	54,12	58,97
	Σ Keluarga bernilai "N"	9.676	212.343
	Σ Keluarga bernilai "Y"	8.195	148.178
5	Pertumbuhan Balita dipantau (%)	70,23	79,77
	Σ Keluarga bernilai "N"	8.324	162.045
	Σ Keluarga bernilai "Y"	9.547	411.251
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar (%)	82,36	80,95
	Σ Keluarga bernilai "N"	75	2.365
	Σ Keluarga bernilai "Y"	352	10.071
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur (%)	20,96	28,09
	Σ Keluarga bernilai "N"	1.166	12.131
	Σ Keluarga bernilai "Y"	309	4.738
8	Penderita gangguan jiwa berat, dijaga dan tidak ditelantarkan (%)	46,62	41,45
	Σ Keluarga bernilai "N"	7	233

N o	Indikator	Kuantan Singingi	Provinsi Riau (%)
	Σ Keluarga bernilai "Y"	6	165
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok (%)	40,18	41,23
	Σ Keluarga bernilai "N"	10.144	253.430
	Σ Keluarga bernilai "Y"	6.878	178.487
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN (%)	31,45	53,36
	Σ Keluarga bernilai "N"	12.785	217.553
	Σ Keluarga bernilai "Y"	5.867	249.049
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih (%)	95,79	91,72
	Σ Keluarga bernilai "N"	894	52.743
	Σ Keluarga bernilai "Y"	17.758	593.859
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga (%)	86,49	90,44
	Σ Keluarga bernilai "N"	2.407	57.683
	Σ Keluarga bernilai "Y"	16.245	523.689
Indeks Keluarga Sehat		0,105	0,192

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Riau, 2025

Ke depan, tantangan utama pembangunan kesehatan keluarga di Kuantan Singingi adalah membangun budaya kesehatan yang partisipatif dan berkesinambungan. Upaya yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pembangunan sarana dan prasarana, melainkan juga mengedepankan perubahan pola pikir, penguatan edukasi berbasis keluarga, dan optimalisasi peran masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga peran tokoh masyarakat dan kader kesehatan, menjadi kunci untuk mengakselerasi tercapainya keluarga sehat secara merata.

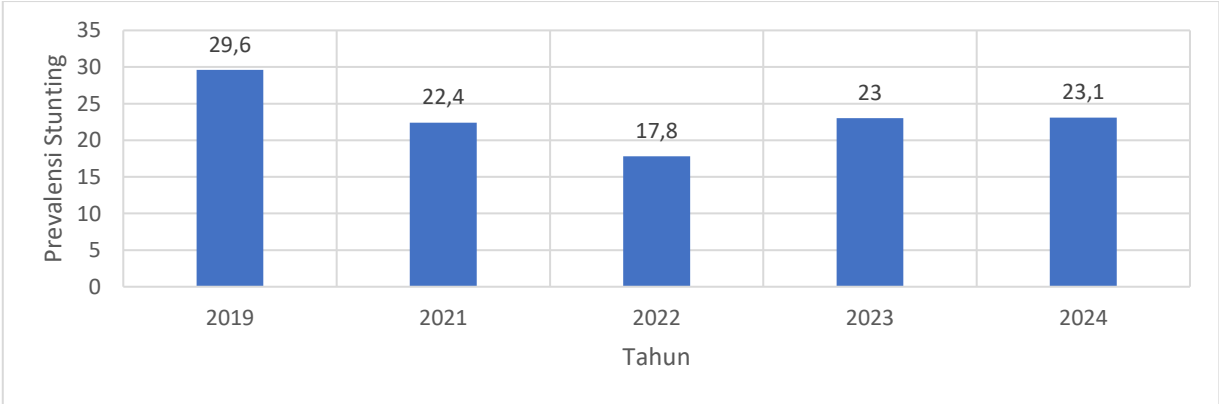
Dengan demikian, perbaikan indikator keluarga sehat di Kuantan Singingi harus diarahkan pada:

- 1) Peningkatan literasi kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan penyakit dan perilaku hidup bersih,
- 2) Penguatan advokasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas,
- 3) Perluasan cakupan JKN dan program KB, serta
- 4) Pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan dan monitoring hasil intervensi.

Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan kesehatan keluarga di Kuantan Singingi akan sangat menentukan kualitas kesehatan masyarakat di masa depan, serta menjadi fondasi utama untuk mendukung visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

II.2.2.3 Prevalensi Stunting

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Kuantan Singingi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan, angka stunting kembali meningkat pada dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting masih cukup kompleks. Fenomena ini menandakan bahwa efektivitas program dan intervensi yang telah dijalankan sebelumnya belum sepenuhnya memberikan dampak yang berkelanjutan, serta masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan di lapangan.



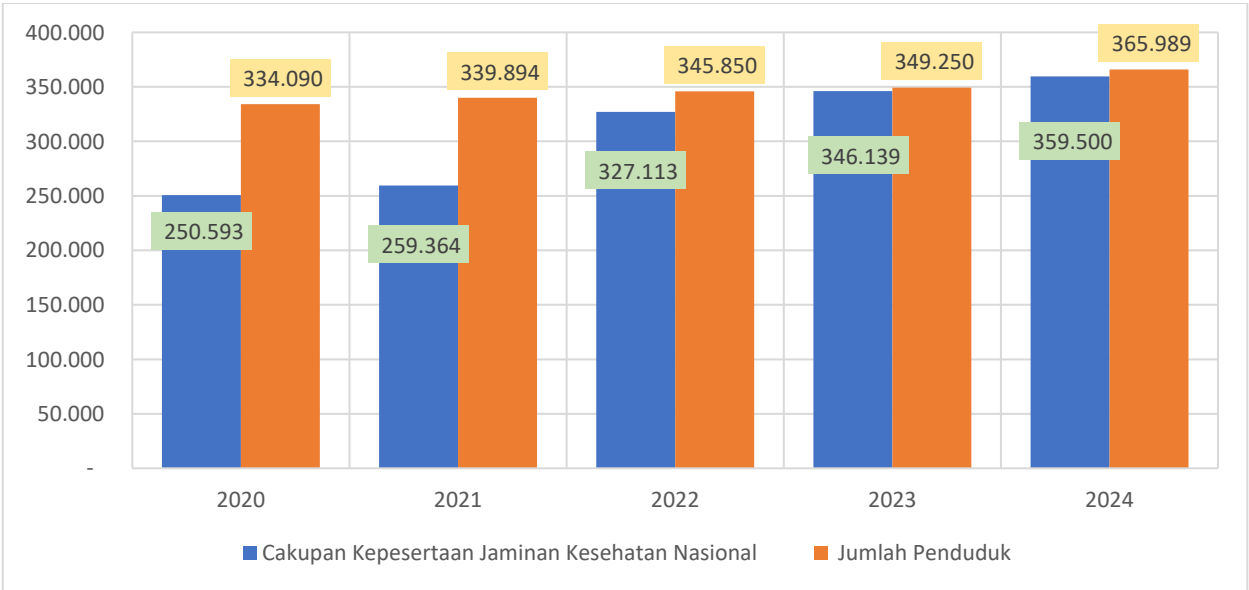
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2025
Grafik II.40 Prevalensi Stunting Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019–2024

Dinamika tersebut menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, khususnya antara sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam menanggulangi permasalahan stunting. Keberlanjutan intervensi, peningkatan cakupan edukasi gizi kepada keluarga, serta pemantauan pertumbuhan balita secara lebih intensif menjadi kunci dalam menjaga konsistensi penurunan stunting. Selain itu, diperlukan strategi pencegahan yang dimulai sejak masa prakonsepsi, perbaikan pola asuh dan perilaku hidup sehat, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar hingga tingkat desa.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, upaya percepatan penurunan stunting perlu menjadi agenda prioritas daerah, sejalan dengan target nasional dan provinsi. Dukungan kebijakan yang terintegrasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan penurunan prevalensi stunting dapat tercapai secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga kualitas sumber daya manusia Kuantan Singingi dapat terus meningkat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

II.2.2.4 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui skema asuransi sosial. Di Kabupaten Kuantan Singingi, cakupan kepesertaan JKN terus menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah penduduk peserta JKN tercatat sebanyak 250.593 jiwa dari total penduduk 334.090 jiwa (sekitar 75%). Jumlah peserta terus bertambah hingga mencapai 359.500 jiwa pada tahun 2024, dari total penduduk 365.989 jiwa, sehingga tingkat cakupan JKN mendekati 98,2%.



Sumber: Dinas Kesehatan dan Kuantan Singingi dalam Angka 2025
Grafik II.41 Grafik Perkembangan Kepesertaan JKN di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 (%)

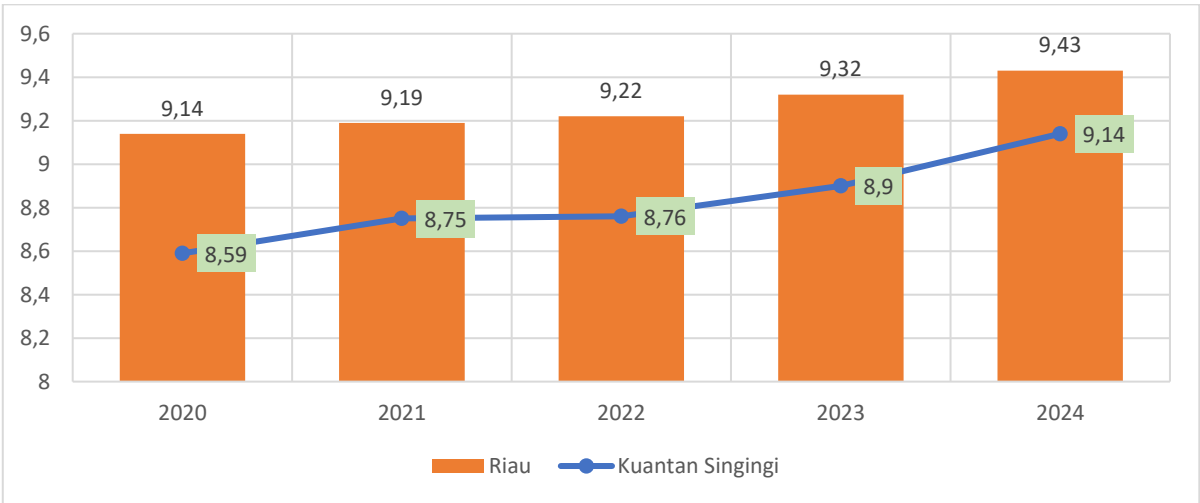
Peningkatan cakupan kepesertaan JKN ini mencerminkan semakin meratanya akses jaminan kesehatan di masyarakat, sekaligus menunjang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Dengan hampir seluruh penduduk telah menjadi peserta JKN pada tahun 2024, tantangan ke depan adalah memastikan mutu layanan kesehatan tetap terjaga serta peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif secara optimal bagi seluruh peserta.

II.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata dilihat dari perkembangan data harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dan indeks pembangunan literasi masyarakat.

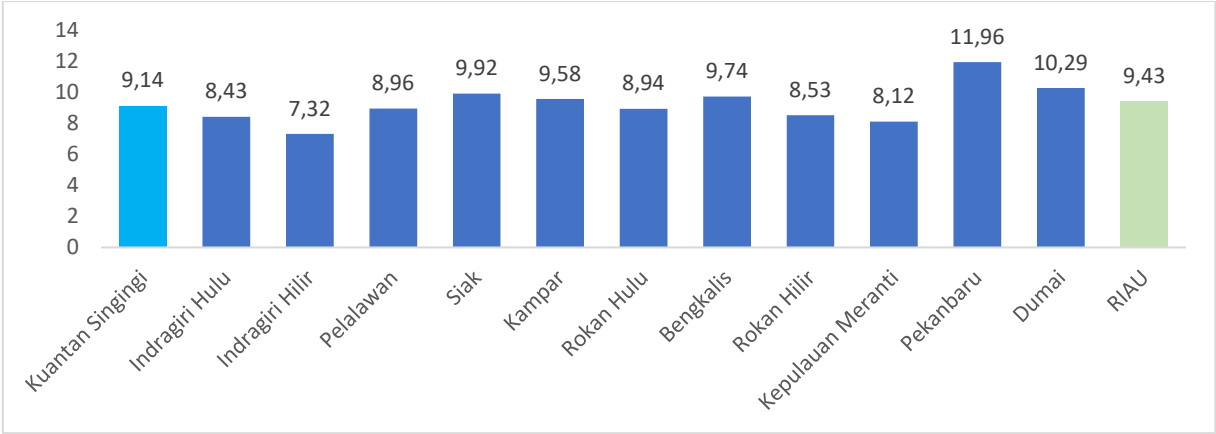
II.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, yang mencerminkan rata-rata tahun yang telah ditempuh dalam pendidikan formal. Di Kabupaten Kuantan Singingi, rata-rata lama sekolah terus menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 8,59 tahun pada 2020 menjadi 9,14 tahun pada 2024. Angka ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan formal hingga mendekati jenjang SMP bagi penduduk dewasa.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2025
Grafik II.42 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau yang pada 2024 mencapai 9,43 tahun, capaian Kuantan Singingi masih sedikit di bawah rata-rata provinsi. Secara komparatif antar kabupaten/kota di Riau, posisi Kuantan Singingi berada di kelompok menengah, lebih tinggi dibanding beberapa daerah seperti Indragiri Hilir (7,32 tahun) dan Kepulauan Meranti (8,12 tahun), namun masih jauh di bawah Pekanbaru (11,96 tahun) dan Dumai (10,29 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan formal di Kuantan Singingi terus membaik, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan, sehingga perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.



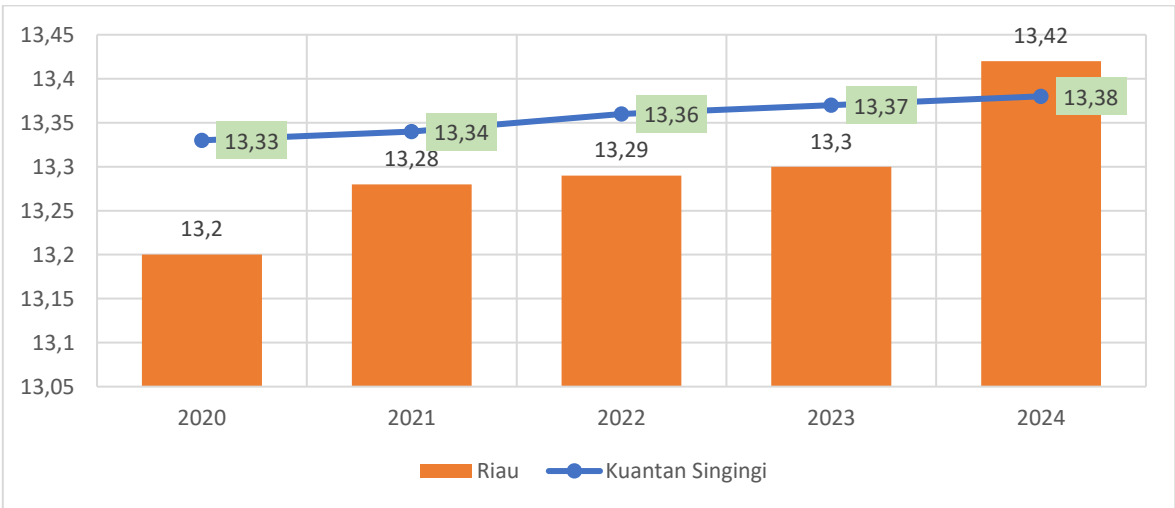
Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2025

Grafik II.43 Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Secara keseluruhan, peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang positif dalam akses pendidikan formal. Namun, capaian ini masih sedikit tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi dan beberapa kabupaten/kota lain di Riau. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk memperluas akses, meningkatkan mutu pendidikan, serta mengurangi disparitas antardaerah agar rata-rata lama sekolah di Kuantan Singingi dapat terus meningkat dan sejajar dengan daerah yang lebih maju di Provinsi Riau.

II.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merepresentasikan seberapa lama anak yang baru lahir diharapkan dapat menempuh pendidikan formal sepanjang hidupnya. Kenaikan sebesar 0,05 tahun selama lima tahun terakhir ini mengindikasikan peluang pendidikan formal hingga jenjang setara pendidikan menengah atas sudah cukup terbuka bagi anak-anak di daerah ini. Namun, kenaikan tersebut masih tergolong moderat dan belum menunjukkan lonjakan signifikan, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

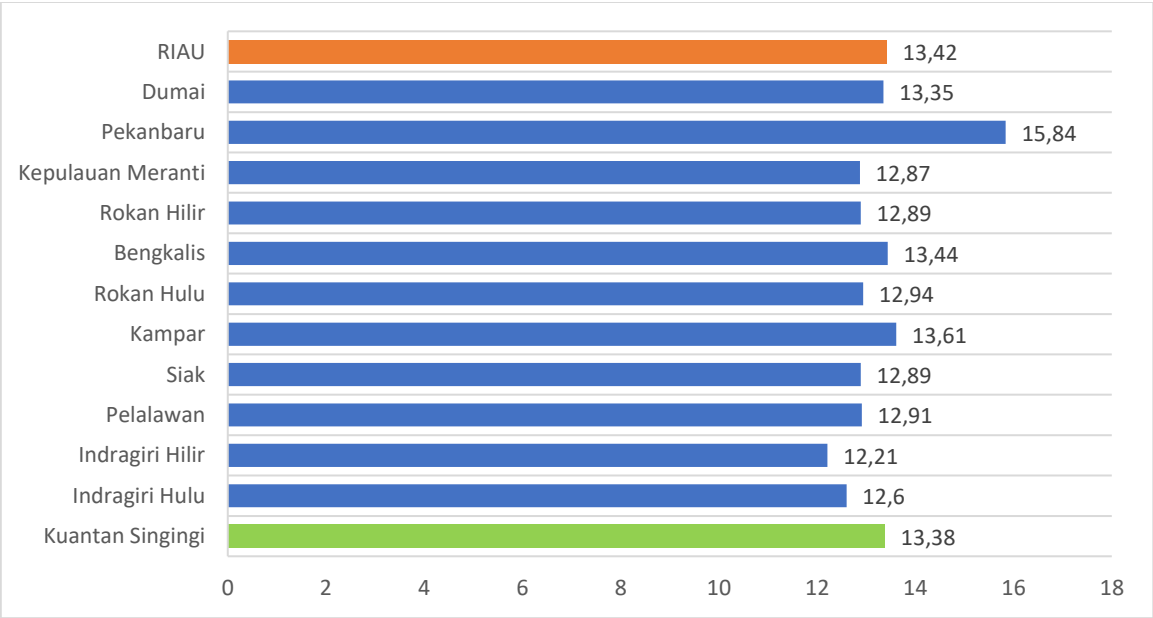


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.44 Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau, capaian harapan lama sekolah di Kuantan Singingi masih berada di bawah provinsi, di mana pada tahun 2024 rata-rata Riau mencapai 13,42 tahun. Kondisi ini menandakan masih adanya ketertinggalan dalam perluasan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan di Kuantan Singingi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah ke depan harus difokuskan pada peningkatan akses, kualitas pendidikan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah, agar harapan

pendidikan generasi muda semakin optimal dan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Grafik II.45 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

Secara keseluruhan, meskipun harapan lama sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, capaian tersebut masih relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan kabupaten/kota lain di Riau. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah agar peluang pendidikan formal bagi generasi muda di Kuantan Singingi dapat terus membaik di masa mendatang.

II.2.3.3 Angka Numerasi/Literasi

Angka numerasi di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perkembangan positif dalam tiga tahun terakhir, yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembelajaran matematika dasar dan kemampuan berpikir logis di tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan implementasi kurikulum yang lebih menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar, serta program penguatan literasi numerasi yang dilakukan secara masif pasca pandemi.

Tabel II.27 Indeks Numerasi/Literasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

N o	Tahun	Numerasi		Literasi	
		SD	SMP	SD	SMP
1	2020	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2021	n/a	n/a	n/a	n/a
3	2022	26,64	37,79	52,30	53,75
4	2023	41,76	37,19	57,69	63,18
5	2024	54,68	63,67	65,39	69,17

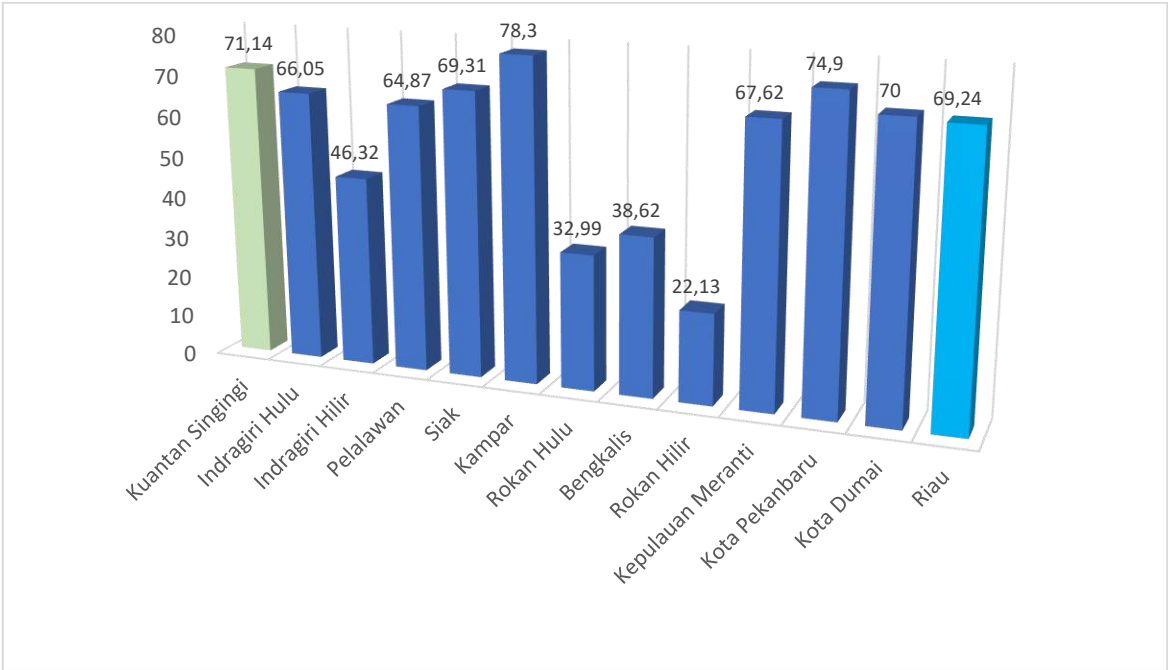
Sumber : Rapor Pendidikan; Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Meski pada awal pengukuran terlihat adanya tantangan, terutama untuk angka numerasi di tingkat SMP yang sempat mengalami stagnasi, tren kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya perbaikan strategi pengajaran, pendampingan guru, serta pemulihan kualitas pendidikan. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan numerasi siswa. Secara keseluruhan, perkembangan ini menjadi

indikator penting dalam mengukur kesiapan generasi muda Kuantan Singingi untuk menghadapi tantangan pendidikan abad 21 yang membutuhkan kemampuan analisis dan problem solving berbasis data. Hasil ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan pendidikan daerah mulai menunjukkan dampak nyata terhadap kualitas capaian belajar peserta didik, sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan daya saing sumber daya manusia di masa mendatang.

II.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan kinerja yang relatif baik di tingkat provinsi. Hal ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam memperkuat fondasi literasi masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan layanan perpustakaan, dan ketersediaan tenaga perpustakaan yang memadai. Pengelolaan perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional mempertegas kapasitas kelembagaan dalam menunjang budaya baca masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.46 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau Tahun 2024

Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat masih perlu ditingkatkan. Rendahnya intensitas kunjungan ke perpustakaan mengindikasikan tantangan dalam menumbuhkan minat baca dan literasi fungsional di masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan strategi yang lebih inovatif, seperti integrasi literasi digital, penguatan promosi perpustakaan, serta kolaborasi aktif dengan institusi pendidikan dan komunitas literasi.

Tabel II.28 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Literasi Masyarakat
1	2020	n/a
2	2021	n/a
3	2022	75,23
4	2023	64,78
5	2024	71,14

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Optimalisasi pengembangan literasi pada masa mendatang tidak hanya dititikberatkan pada kecukupan sarana dan tenaga, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan peran masyarakat, pemberdayaan komunitas literasi, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci agar literasi dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di era transformasi digital.

Tabel II.29 Nilai Tingkat Gemar Membaca dan Data Pustaka Terpilah berdasarkan Jenis (pustaka kabupaten) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024.

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Tingkat Gemar Membaca	n/a	n/a	52,83	41,76	77,83
2.	Data Pustaka terpilah berdasarkan jenis (pustaka tingkat kabupaten)	333	343	353	372	386

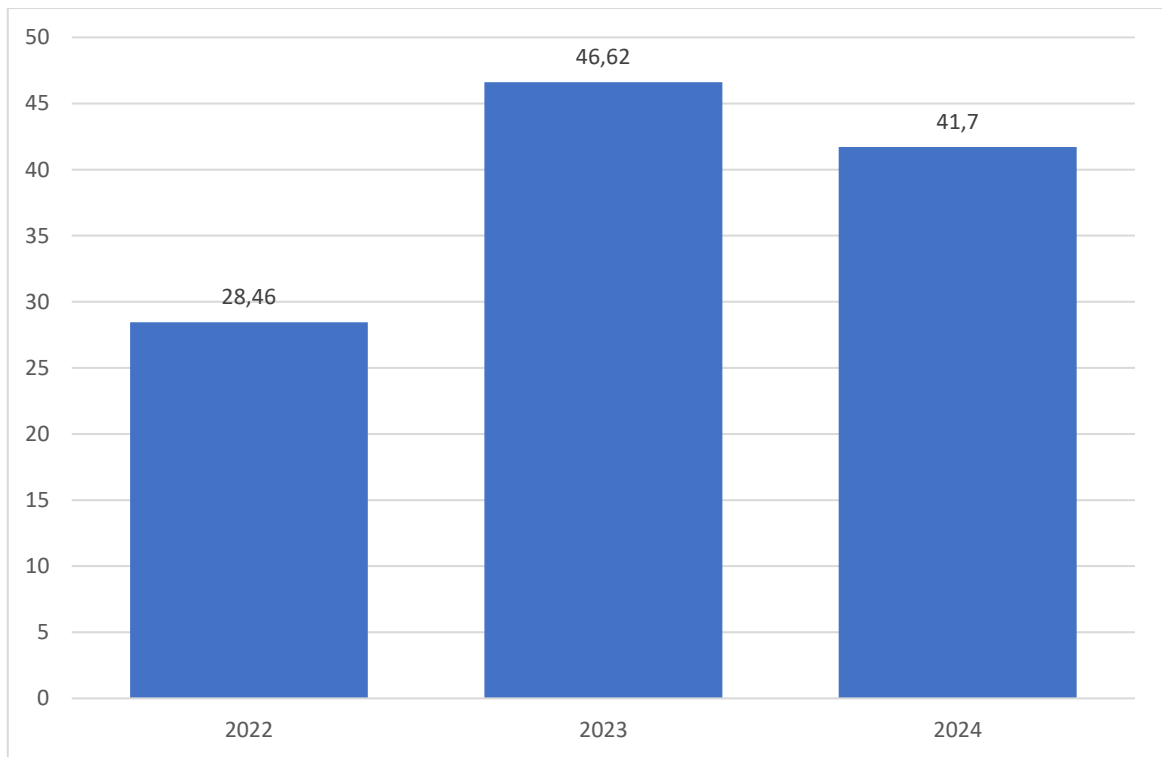
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Nilai tingkat gemar membaca di Kabupaten Kuantan Singingi mulai tercatat pada tahun 2022 dengan skor 52,83, turun menjadi 41,76 pada 2023, lalu meningkat menjadi 77,83 pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat sangat responsif terhadap intensitas program literasi yang dijalankan pemerintah, tetapi juga rentan bila intervensi tidak konsisten. Peningkatan tajam di 2024 menegaskan bahwa ketika penyediaan bahan bacaan dan kegiatan literasi diperkuat, partisipasi masyarakat meningkat signifikan.

Jumlah pustaka tingkat kabupaten juga bertumbuh dari 333 unit pada 2020 menjadi 386 unit pada 2024. Meskipun bertambahnya akses, pertumbuhan jumlah fasilitas belum sepenuhnya sejalan dengan kestabilan peningkatan minat baca. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan, relevansi koleksi, dan keberlanjutan program literasi lebih berpengaruh dibanding sekadar penambahan jumlah perpustakaan. Kondisi tersebut mencerminkan peluang besar bagi Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperkuat budaya literasi, sekaligus tantangan agar program literasi tidak bersifat insidental. Penguatan layanan perpustakaan, integrasi literasi ke sekolah dan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk menjaga tren positif ini agar berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

II.2.3.5 Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi berbasis digital, serta kesenjangan digital yang masih terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Indeks ini tidak hanya merefleksikan capaian pembangunan digital di daerah, tetapi juga memberikan panduan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan maupun peluang yang ada. Dengan memahami posisi Kabupaten Kuantan Singingi dalam lanskap digital, baik di tingkat provinsi maupun nasional, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong peningkatan daya saing daerah, memperluas akses layanan publik berbasis teknologi, serta mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang selaras dengan arah transformasi digital.



Sumber: Komdigi, 2025

Grafik II.47 Grafik Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kuantan Singingi 2022-2024

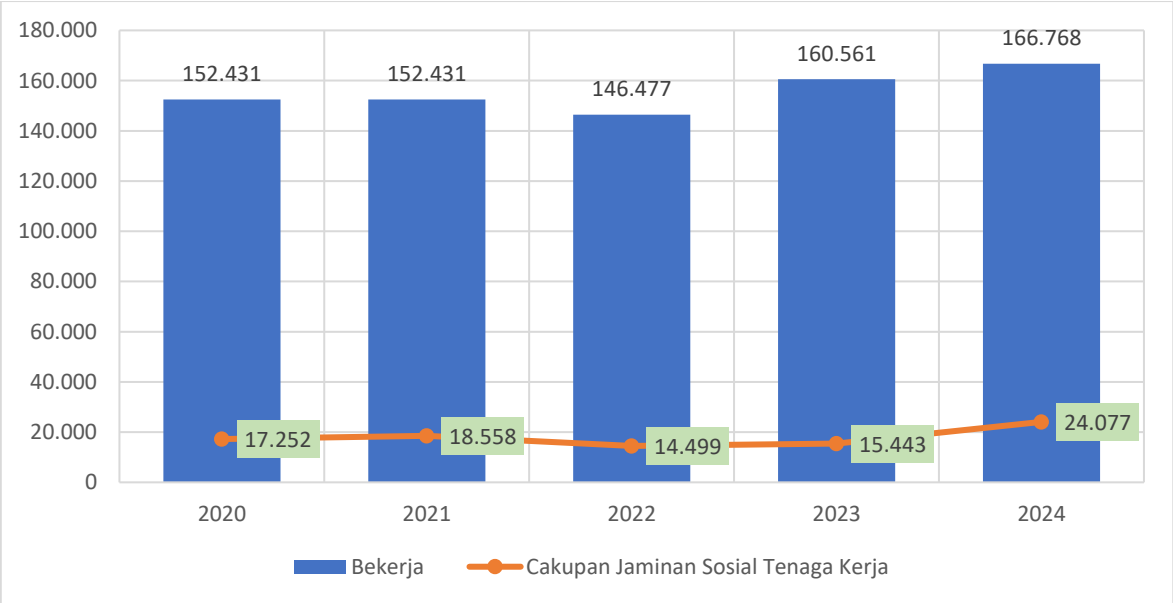
Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022–2024, perkembangan digital di daerah menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2022, indeks berada pada angka 28,46 yang menggambarkan tahap awal penguatan adopsi teknologi, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi berbasis digital. Pada tahun 2023, nilai indeks meningkat signifikan menjadi 46,62, mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur, pemanfaatan layanan digital, serta partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital. Pada tahun 2024, nilai indeks tercatat sebesar 41,70. Perubahan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga keberlanjutan dan konsistensi program, memperluas akses, serta meningkatkan literasi digital guna mendorong transformasi digital yang merata dan inklusif.

II.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial kepada masyarakat merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang dilihat dari jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

II.2.4.1 Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga pekerja. Meskipun cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan pada tahun terakhir, sebagian besar pekerja, terutama di sektor informal, belum terlindungi secara memadai oleh sistem jaminan sosial. Kondisi ini memperlihatkan masih rendahnya penetrasi program perlindungan ketenagakerjaan di tingkat akar rumput, yang berpotensi meningkatkan kerentanan sosial ekonomi masyarakat jika terjadi risiko kerja atau kehilangan penghasilan.



Sumber : Kabupaten Kuantang Singingi dalam Angka dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Grafik II.48 Perkembangan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024 (orang)

Rendahnya tingkat kepesertaan tersebut mengindikasikan adanya hambatan struktural, baik dari sisi sosialisasi program, kemudahan akses pendaftaran, maupun keterbatasan literasi keuangan di kalangan pekerja informal. Tantangan ini semakin penting untuk diatasi agar sistem perlindungan sosial di daerah dapat berjalan inklusif dan berkeadilan, sehingga pekerja dan keluarganya terhindar dari risiko jatuh miskin akibat guncangan ekonomi.

Ke depan, perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi prioritas kebijakan daerah dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas pekerja. Penguatan edukasi, penyederhanaan prosedur kepesertaan, serta insentif bagi pekerja informal menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi program. Dengan demikian, sistem perlindungan sosial yang efektif dapat terwujud dan mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di Kuantan Singingi.

II.2.4.2 Penanganan Sosial

Program bantuan sosial (bansos) terintegrasi di Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 didominasi oleh tiga program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai/Bansos Pangan (BSP), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Pelaksanaan berbagai program bantuan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi terbukti menjadi pondasi penting dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Penguatan jaring pengaman sosial melalui perluasan penerima bantuan utama seperti PKH dan BSP secara nyata telah membantu mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli rumah tangga di tengah perubahan kondisi ekonomi.

Tabel II.30 Jenis Program Sosial Terintegrasi Tahun 2020–2024

No	Jenis Program	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Keluarga Harapan KPM	KPM	10.971	11.062	11.912	11.137	12.307
2	Bansos Pangan (BSP)	KPM	15.387	15.305	19.096	18.423	18.910
3	Bansos Tunai (BST)	KPM	22.080	0	0	0	0
Jumlah		Orang	48.438	26.367	31.008	29.560	31.217

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Perubahan jumlah penerima manfaat mencerminkan respons adaptif pemerintah daerah terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitas penyaluran bantuan sosial

masih perlu ditingkatkan agar semakin tepat sasaran dan benar-benar mampu memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Ke depan, penguatan tata kelola program bantuan sosial yang lebih baik dan pemutakhiran data penerima menjadi kunci agar perlindungan sosial di Kuantan Singingi semakin optimal dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

a. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Secara terminologi penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah.

Tabel II.31 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

No	Tahun	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
1	2020	0,909 %
2	2021	0,909 %
3	2022	0,909 %
4	2023	0,909 %
5	2024	0,909 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Data menunjukkan Tabel di atas, selama periode 2020–2024, persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal stagnan pada angka 0,909% setiap tahunnya. Angka ini relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan total angkatan kerja, menunjukkan bahwa inklusi tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor formal masih menjadi tantangan besar. Peningkatan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas, dan pendampingan khusus perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan ke depan agar tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

II.2.4.3 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan fondasi nilai-nilai keagamaan serta budaya yang kuat dan adaptif. Dalam konteks pembangunan daerah, indikator yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek ini adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah indikator yang mengukur tingkat harmoni, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama di suatu wilayah. Indeks ini memperlihatkan seberapa baik masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, dan saling menjaga keharmonisan sosial. Tingginya nilai indeks mencerminkan kondusifnya kehidupan beragama yang inklusif, dialogis, dan anti-diskriminatif.

Tabel II.32 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tahun	Indeks Kerukunan Umat Beragama
1	2020	69,26
2	2021	66,67
3	2022	74,32
4	2023	71,60
5	2024	84,23

Sumber : Badan Litbang dan Dilat Kemenag RI Tahun 2025

Berdasarkan data, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 69,26, kemudian menurun ke 66,67 pada 2021, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika sosial selama pandemi. Namun, sejak 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 74,32, dan pada 2024 mencapai puncaknya di angka 84,23. Angka tahun 2024 ini sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, menandakan kondisi kerukunan umat beragama di Kuantan Singingi sangat baik dan menjadi modal sosial penting bagi pembangunan daerah. Ke depan, penguatan forum-forum lintas agama, pendidikan toleransi sejak dini, serta keterlibatan tokoh agama dalam pembangunan daerah perlu terus diperluas untuk menjaga sekaligus meningkatkan capaian kerukunan ini.

b. Pemajuan Budaya Daerah

Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah indikator yang mengukur kemajuan upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Indeks ini meliputi berbagai aspek seperti warisan budaya, ekspresi seni, pendidikan budaya, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Peningkatan indeks menandakan bahwa masyarakat semakin mengapresiasi, menjaga, dan memanfaatkan budaya sebagai kekuatan ekonomi maupun identitas daerah.

Peningkatan indeks kebudayaan juga mencerminkan semakin baiknya sinergi antara pelaku budaya, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan, mendorong partisipasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan dan pariwisata. Namun, keberlanjutan capaian ini membutuhkan komitmen bersama agar budaya tidak hanya menjadi warisan, melainkan juga motor penggerak kemajuan sosial dan ekonomi daerah.

Tabel II.33 Pemajuan Budaya Daerah

No	Tahun	Pemajuan BudayaDaerah
1	2022	64%
2	2023	67%
3	2024	71%

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI

Ke depan, penguatan ekosistem kebudayaan perlu difokuskan pada inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia budaya. Dengan demikian, kebudayaan dapat terus berperan sebagai penguat jati diri, sumber inspirasi pembangunan, serta fondasi ketahanan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel II.34 Objek Pemajuan Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

NO	OBJEK PEMAJUAN BUDAYA		JUMLAH
1	TRADISI LISAN		
	1	Sejarah Lisan	4
	2	Dongeng	2
	3	Rapalan	4
	4	Pantun	

NO	OBJEK PEMAJUAN BUDAYA		JUMLAH
	5	Cerita Rakyat	2
	6	Senandung/Ratapan	2
2	Manuskrip		
	1	Hikayat	
	2	Kitab	4
3	Adat Istiadat		
	1	Aturan Adat yang berkaitan dengan lingkungan	3
	2	Aturan Adat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan	4
4	Ritus		
	1	Perayaan	4
	2	Peringatan Kelahiran	4
	3	Upacara Perkawinan	5
	4	Upacara Kematian	4
	5	Ritual Kepercayaan	5
5	Pengetahuan Tradisional		
	1	Kerajinan	9
	2	Busana/Pakaian	11
	3	Metode Penyehatan	3
	4	Jamu/Ramuan Tradisional	2
	5	Makanan dan Minuman Tradisional	24
	6	Pengetahuan tentang alam semesta	4
6	Teknologi Tradisional		
	1	Alat Tangkap	13
	2	Arsitektur/Ornamen	9
	3	Perkakas Pertanian	20
	4	Alat Transportasi	6
	5	Sistem irigasi	3
	6	Peralatan Rumah Tangga/Lainnya	7
7	Kesenian		
	1	Seni Musik	17
	2	Seni Tari	36
	3	Seni Rupa	17
	4	Seni Sastra	4
	5	Seni Teater	2
	6	Seni Pertunjukan	3
8	Pengetahuan Tradisional		
	1	Bahasa Indonesia	1
	2	Bahasa Melayu/Daerah	3
	3	Dialek	6
9	Permainan Rakyat		
	1	Permainan Rakyat	14
10	Olahraga Tradisional		
	1	Olahraga Tradisional	6
11	Cagar Budaya		

NO	OBJEK PEMAJUAN BUDAYA	JUMLAH
1	Cagar Budaya	25

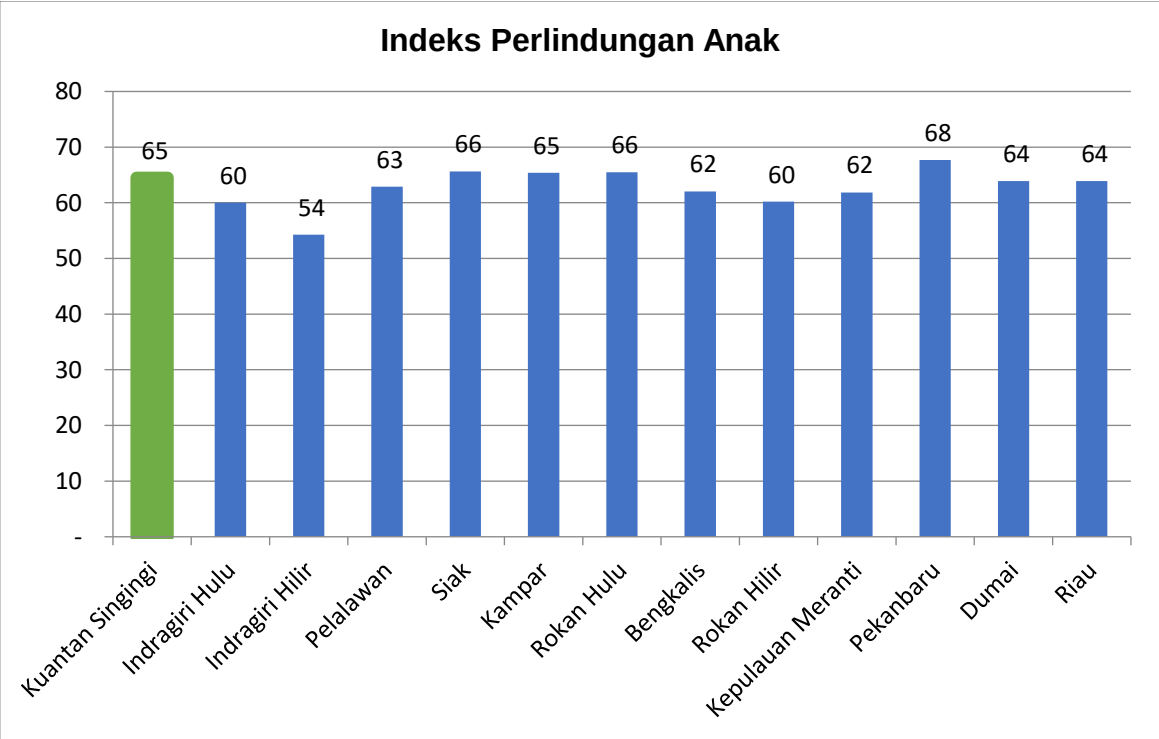
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kuantan Singingi, 2025.

Upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Kabupaten Kuantan Singingi bersama masyarakat dan akademisi. Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi: 1. Pengusulan dan penetapan warisan budaya baik warisan budaya tak benda maupun warisan budaya bendawi untuk menjadi jati diri dan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Pembentukan tim ahli cagar budaya yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini untuk membantu kepala daerah untuk mengkaji dan menetapkan warisan budaya bendawi menjadi cagar budaya.

II.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

II.2.5.1 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Kementerian PPPA, 2025

Grafik II.49 Indeks Perlindungan Anak pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2024

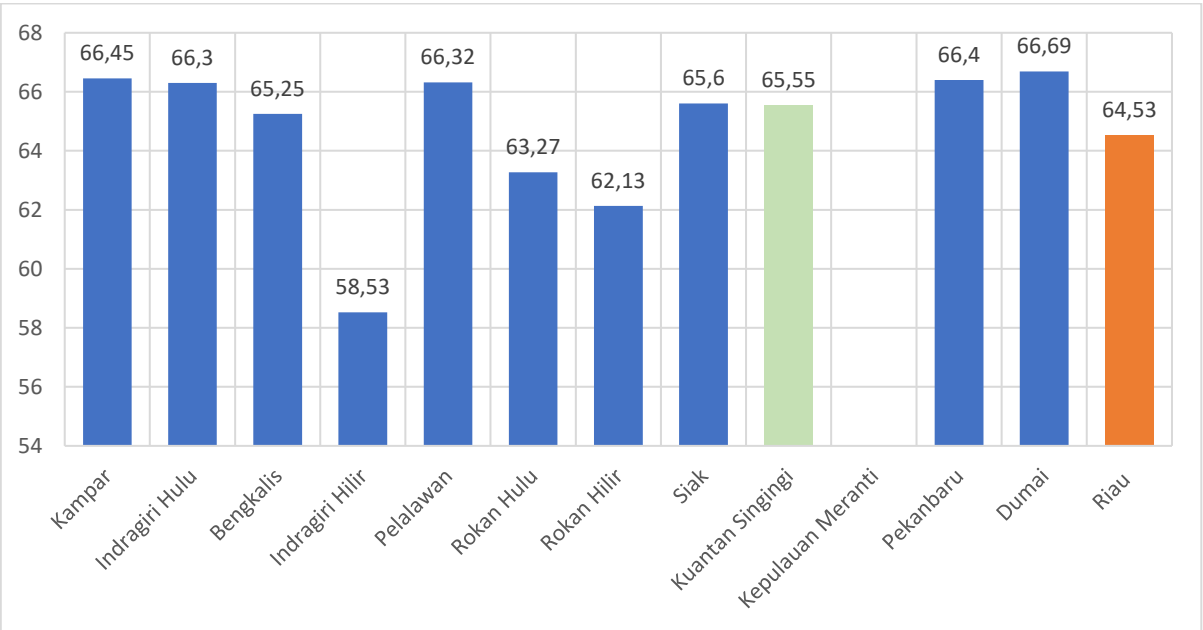
Berdasarkan data Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2025, Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh nilai sebesar 65. Capaian ini berada sedikit di atas rata-rata Provinsi Riau yang bernilai 64, menunjukkan bahwa tingkat perlindungan anak di Kuantan Singingi relatif baik dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Posisi ini juga menempatkan Kuantan Singingi di kelompok menengah-atas bersama daerah seperti Kampar

dan Rokan Hulu, serta di bawah Kota Pekanbaru yang memiliki capaian tertinggi sebesar 68. Hasil ini mencerminkan adanya upaya yang cukup optimal dari pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak di wilayahnya.

II.2.5.2 Indeks Pembangunan Kualitas keluarga

Pembangunan keluarga merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional, yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, tangguh, dan sejahtera di setiap tahapan kehidupan, dengan lingkungan yang sehat dan mendukung. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan perlu bersifat berkelanjutan serta disesuaikan dengan kebutuhan di setiap fase kehidupan keluarga.

Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)) telah mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga). Indeks ini digunakan untuk memantau capaian kualitas pembangunan keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

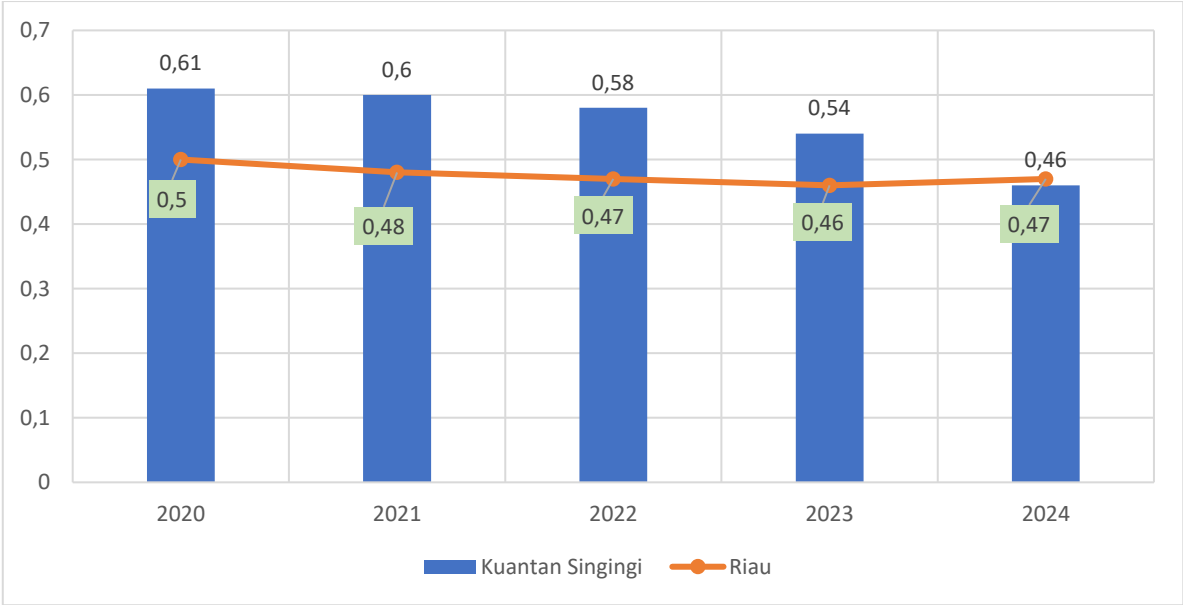


Sumber: <https://siperindu.online/dashboard/#1>
Grafik II.50 capaian kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau tahun 2024, capaian kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 65,55, sedikit di atas rata-rata Provinsi Riau (64,53) dan relatif sejajar dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Namun, masih terdapat disparitas antar wilayah, dimana Kabupaten Indragiri Hilir memiliki capaian terendah (58,53), sementara Kota Dumai menempati posisi tertinggi (66,69). Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program pembangunan keluarga, khususnya di wilayah dengan indeks di bawah rata-rata provinsi.

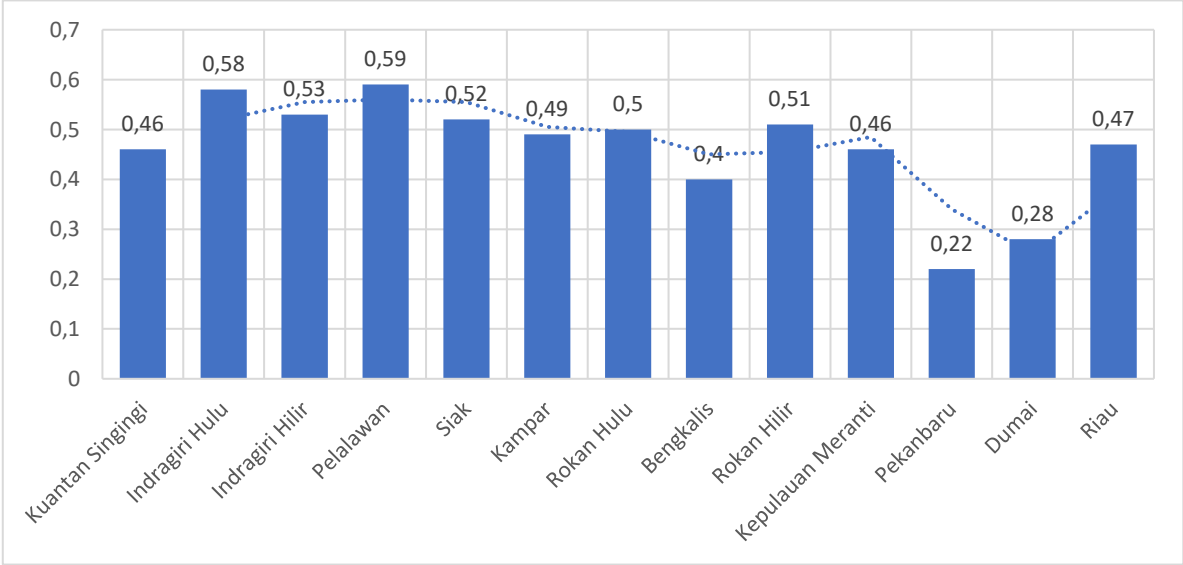
II.2.5.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG adalah matrik yang mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses pasar tenaga kerja. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin kecil. Perkembangan IKG Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan, dari 0,61 pada tahun 2020 menjadi 0,46 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan peningkatan capaian pembangunan gender yang semakin setara antara perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, capaian IKG Kabupaten Kuantan Singingi masih fluktuatif jika dibandingkan dengan Provinsi Riau, namun secara umum menunjukkan perbaikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.51 Perkembangan IKG Kabupaten Kuantan Singingi 2020 – 2024

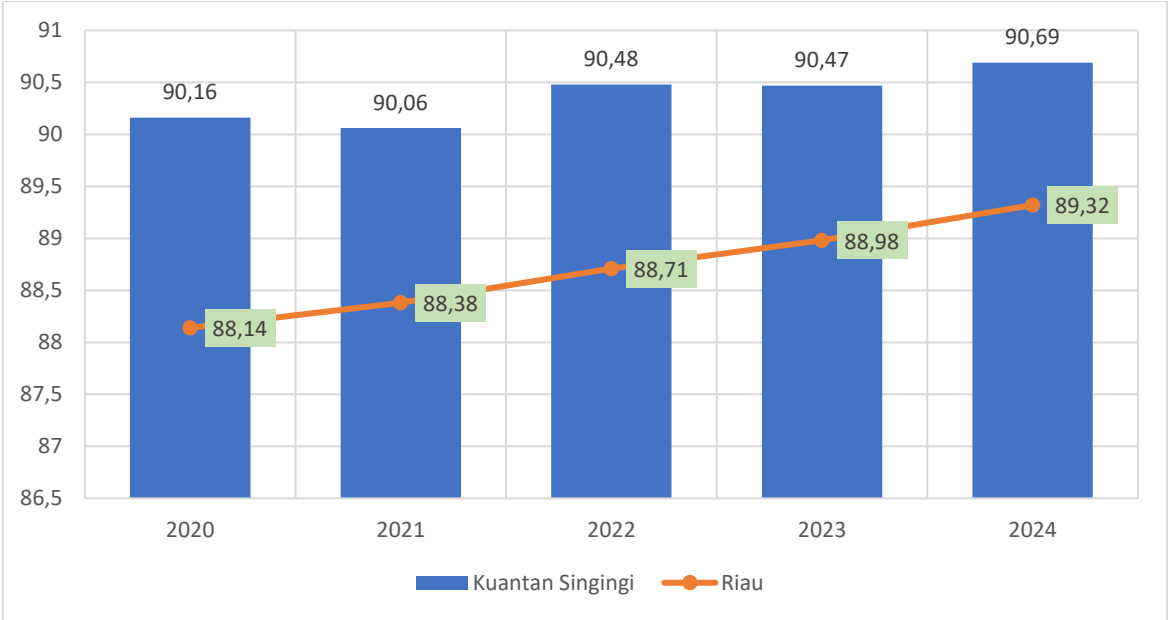
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau pada tahun 2024, IKG Kuantan Singingi (0,46) berada di bawah rata-rata provinsi (0,47), namun masih lebih baik dibandingkan Kota Dumai (0,28) dan Pekanbaru (0,22). Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam mengurangi ketimpangan gender, namun tren perbaikannya sudah mulai terlihat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.52 Perkembangan IKG Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau

II.2.5.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

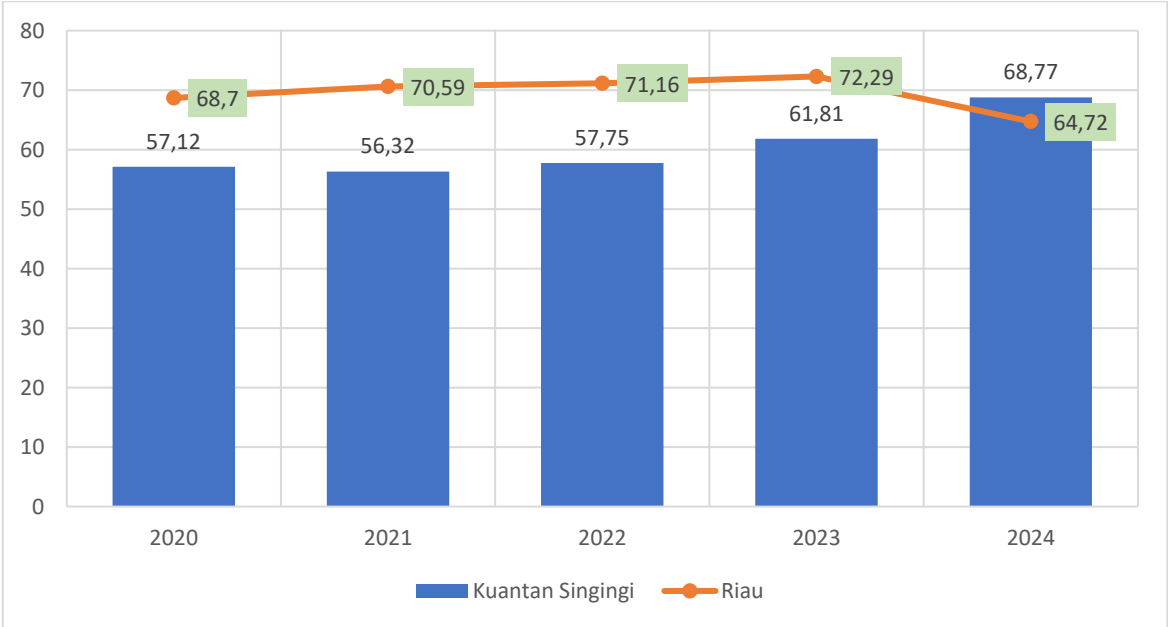
IPG merupakan rasio capaian pembangunan manusia perempuan terhadap laki-laki. Semakin mendekati 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender. Data tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Kuantan Singingi berada pada level tinggi, meningkat dari 90,16 pada tahun 2020 menjadi 90,69 pada tahun 2024, dan secara konsisten lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau (89,32 pada tahun 2024). Hal ini menandakan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi secara umum hampir sejajar dengan laki-laki dan relatif lebih baik dibandingkan provinsi. Perkembangan IPG Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.53 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

II.2.5.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan strategis. Nilai IDG yang lebih tinggi menunjukkan pemberdayaan perempuan yang lebih baik. Perkembangan IDG Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan peningkatan dari 57,12 pada tahun 2020 menjadi 64,72 pada tahun 2024. Namun demikian, capaian IDG Kuantan Singingi pada tahun 2024 masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Riau (68,77). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Kuantan Singingi masih perlu didorong, terutama dalam aspek kepemimpinan, partisipasi ekonomi, dan akses terhadap sumber daya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025
Grafik II.54 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

II.2.5.6 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren peningkatan dari 8,28 pada tahun 2020 menjadi 10,50 pada tahun 2024. Meski ada perbaikan, capaian ini masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional yang telah berada di atas 50. Kesenjangan yang sangat lebar ini menegaskan

bahwa pembangunan pemuda di daerah masih lemah dan belum bergerak signifikan. Berikut disajikan data perkembangan IPP Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 sampai dengan 2024:

Tabel II.35 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Kuantan Singingi 2020-2024

No	IPP/Domain	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	51,00	53,33	55,33	56,33	56,33
2	Provinsi	50,67	56,17	52,17	55,17	n/a
3	Kabupaten	8,28	8,54	9,32	10,03	10,50
3.1	Pendidikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.2	Kesehatan dan Kesejahteraan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.3	Lapangan dan Kesempatan Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.4	Partisipasi dan Kepemimpinan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.5	Gender dan Diskriminasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Rancangan RPJMD Provinsi Riau

II.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu faktor utama dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah meliputi; 1) daya saing sumber daya manusia, 2) lptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, 3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, 4) Transformasi Digital, 5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, 6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dan 7) Stabilitas Ekonomi Makro.

II.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

II.3.1.1 Angka Ketergantungan

Struktur penduduk Kuantan Singingi pada tahun 2024 memperlihatkan karakteristik wilayah yang sedang menikmati fase bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Hal ini menjadi peluang penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi produktivitas, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.

Namun, tingkat rasio ketergantungan yang masih cukup tinggi terutama pada penduduk laki-laki mengindikasikan bahwa upaya peningkatan perlindungan sosial, pendidikan, serta layanan kesehatan bagi kelompok usia non-produktif perlu terus diperkuat. Ketimpangan rasio antara laki-laki dan perempuan juga menandakan perlunya pendekatan berbasis gender dalam setiap kebijakan pembangunan kependudukan.

Tabel II.36 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Distribusi (%)
0–4	13.986	13.074	27.060	7,39
5–9	16.832	15.505	32.337	8,84
10–14	18.040	16.627	34.667	9,47
Jumlah Belum Produktif	48.858	45.206	94.064	25,71
15–19	14.533	13.944	28.477	7,78
20–24	16.388	15.718	32.106	8,77

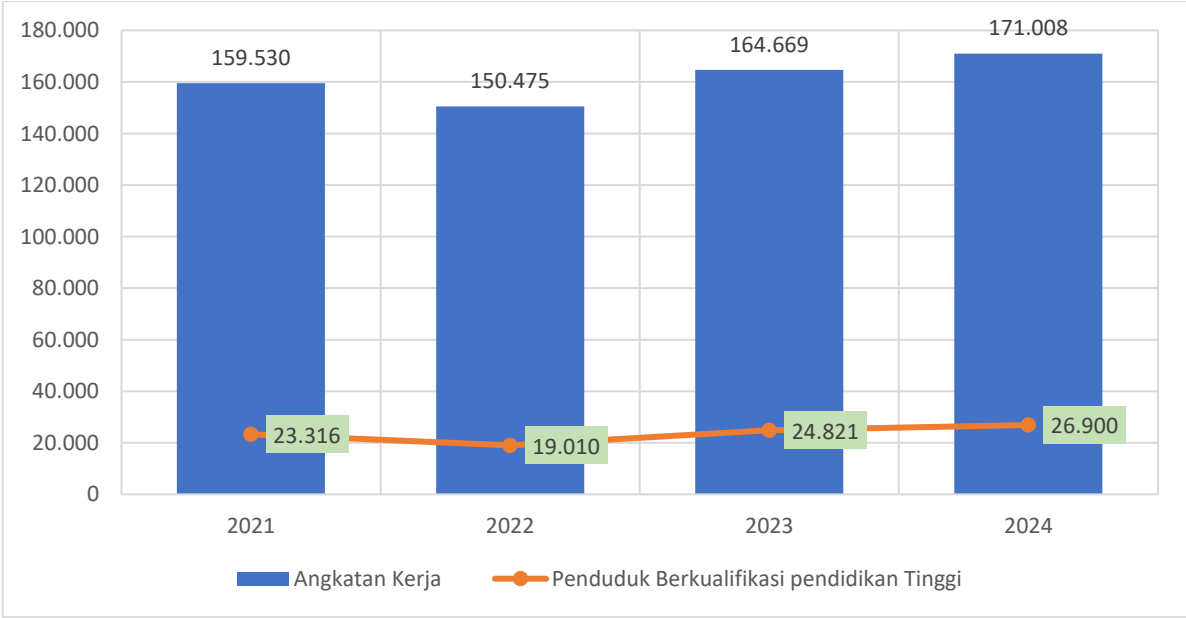
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Distribusi (%)
25–29	14.884	14.124	29.008	7,93
30–34	14.167	13.823	27.990	7,65
35–39	14.122	14.315	28.437	7,77
40–44	14.464	14.181	28.645	7,83
45–49	12.594	11.915	24.509	6,70
50–54	10.066	11.007	21.073	5,76
55–59	8.313	7.849	16.162	4,42
60–64	6.452	6.893	13.345	3,65
Jumlah Produktif	125.983	123.769	249.752	68,25
65–69	4.897	5.054	9.951	2,72
70–74	3.115	3.051	6.166	1,69
75+	2.608	3.548	6.156	1,68
Jumlah Tidak Produktif	10.620	11.653	22.273	6,09
TOTAL	186.061	179.928	365.989	100,00
Usia Produktif (15–64)	122.670	127.970	250.640	68,46
Usia Belum Produktif (0–14)	49.455	45.332	94.787	25,90
Usia Tidak Produktif (65+)	14.195	6.367	20.562	5,62
Jumlah Non Produktif (0–14 & 65+)	63.650	51.699	115.349	31,52
Jumlah Seluruh Penduduk	186.061	179.969	366.030	100,00
Rasio Ketergantungan	51,89	40,40	46,03	00

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025

Ke depan, optimalisasi potensi penduduk usia produktif, penguatan sistem jaminan sosial, serta penciptaan ekosistem ramah keluarga dan lansia sangat penting agar bonus demografi dapat benar-benar menjadi penggerak utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kuantan Singingi.

II.3.1.2 Kualifikasi Pendidikan Tinggi

Fokus pada penduduk yang memiliki pendidikan tinggi (kategori 3), terlihat bahwa selama periode 2021–2024 terjadi fluktuasi dalam jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Pada tahun 2021, terdapat 23.316 orang dalam angkatan kerja yang berpendidikan tinggi, dengan tingkat partisipasi kerja sebesar 96,12%. Namun, angka ini menurun pada tahun 2022 menjadi 19.010 orang (96,25%), lalu kembali meningkat pada 2023 menjadi 24.821 orang (97,51%), dan tahun 2024 mencapai 26.900 orang (95,35%).

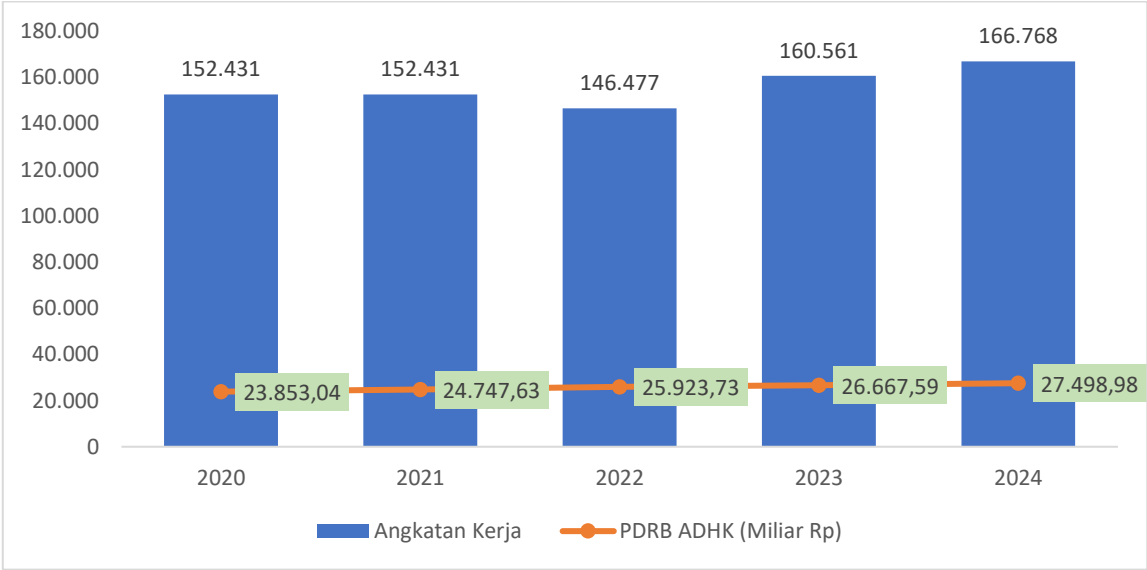


Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025
Grafik II.55 Perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024

Tren ini menunjukkan peningkatan partisipasi dan jumlah penduduk berpendidikan tinggi di pasar kerja, namun masih di bawah 100% yang berarti masih ada lulusan pendidikan tinggi yang belum terserap di pasar kerja. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penguatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja

II.3.1.3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja diukur melalui rasio PDRB ADHK terhadap jumlah angkatan kerja. Data menunjukkan, produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir relatif stabil namun belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, rasio produktivitas tenaga kerja sebesar 0,0001565 miliar rupiah per orang (atau setara dengan 156,5 ribu rupiah per orang). Rasio ini meningkat menjadi 0,0001624 pada 2021, 0,0001769 pada 2022, namun mengalami sedikit penurunan pada 2023 dan 2024, yaitu 0,0001661 dan 0,0001648.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025
Grafik II.56 Grafik Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

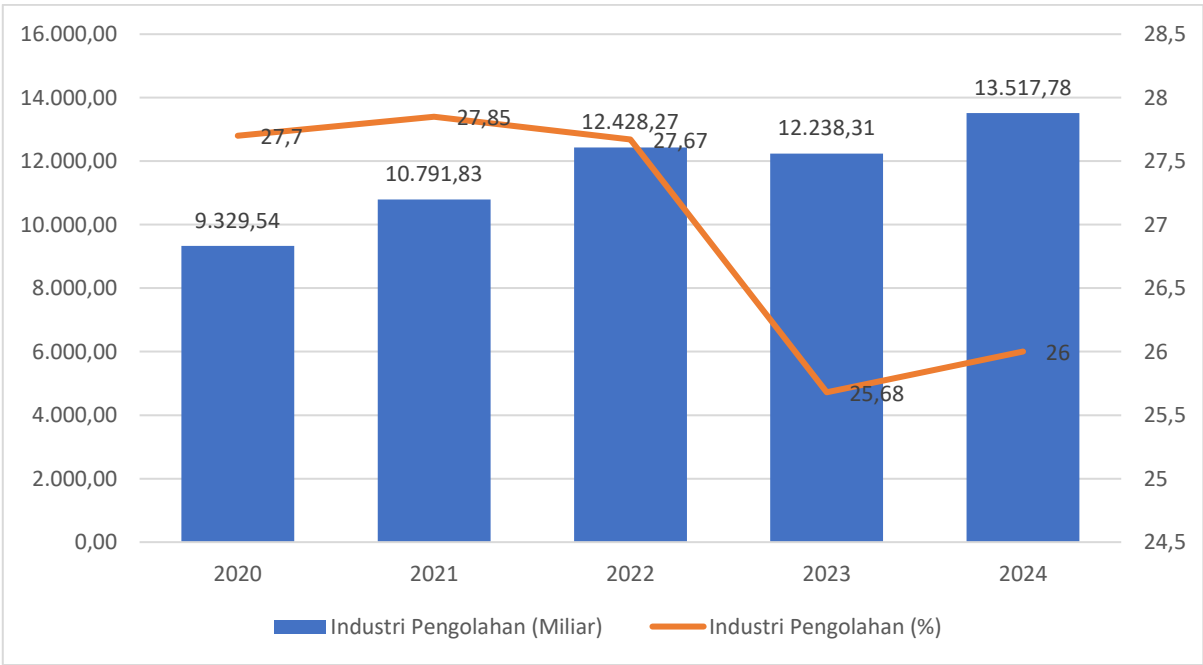
Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan output ekonomi, namun pertumbuhan jumlah angkatan kerja juga cukup tinggi sehingga nilai tambah per tenaga kerja tidak meningkat secara konsisten. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kualitas dan keahlian tenaga kerja agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat lebih optimal.

II.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Penerapan Ilmu Pengetahuan (Iptek), inovasi dan produktivitas ekonomi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut, terlihat dari perkembangan beberapa indikator, antara lain ; 1) Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan sektor strategis, 2) rasio kewirausahaan, 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, 4) Indeks Inovasi Daerah dan 8) Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

II.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024, nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan tren peningkatan dari Rp9.329,54 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp13.517,78 miliar pada tahun 2024. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB sempat mengalami peningkatan dari 27,70 persen pada tahun 2020 menjadi 27,85 persen pada tahun 2021, namun kemudian menurun secara bertahap menjadi 27,67 persen pada tahun 2022 dan turun cukup signifikan menjadi 25,68 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 26,00 persen. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara nominal sektor industri pengolahan terus mengalami pertumbuhan, kontribusinya terhadap perekonomian daerah relatif berfluktuasi, sehingga diperlukan strategi penguatan daya saing dan diversifikasi produk industri untuk menjaga serta meningkatkan perannya dalam struktur perekonomian daerah.



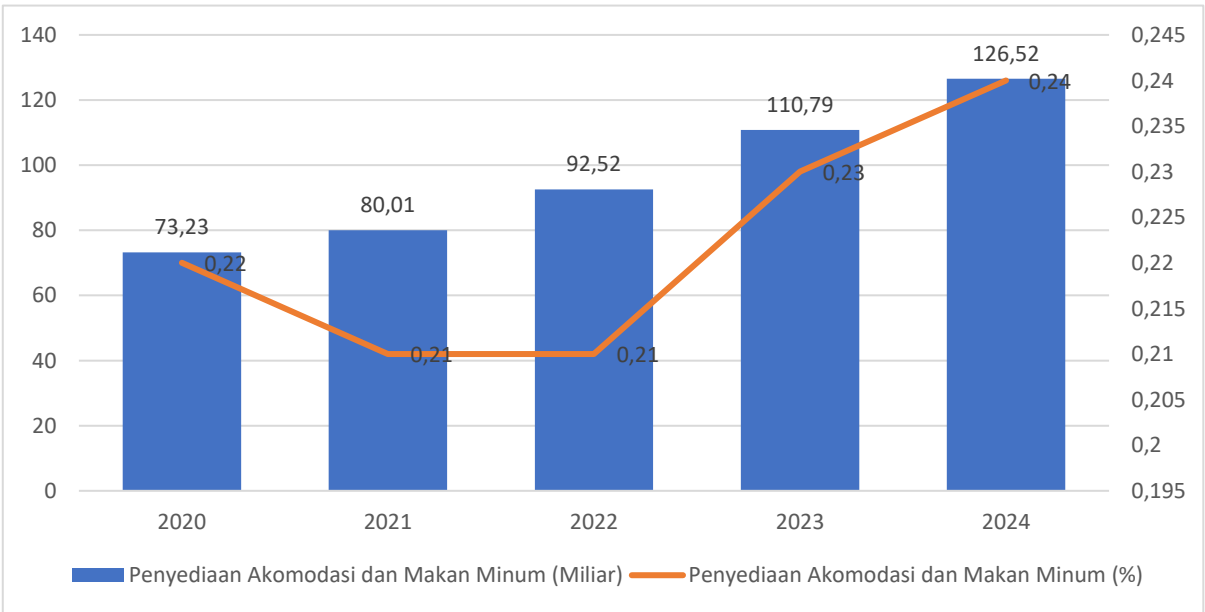
Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.57 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

II.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024, nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan tren pertumbuhan meningkat. Pada tahun 2020, nilai sektor ini tercatat sebesar Rp. 73,23 miliar dan meningkat menjadi Rp80,01 miliar pada tahun 2021, Rp.

92,52 miliar pada tahun 2022, Rp110,79 miliar pada tahun 2023, hingga mencapai Rp. 126,52 miliar pada tahun 2024.

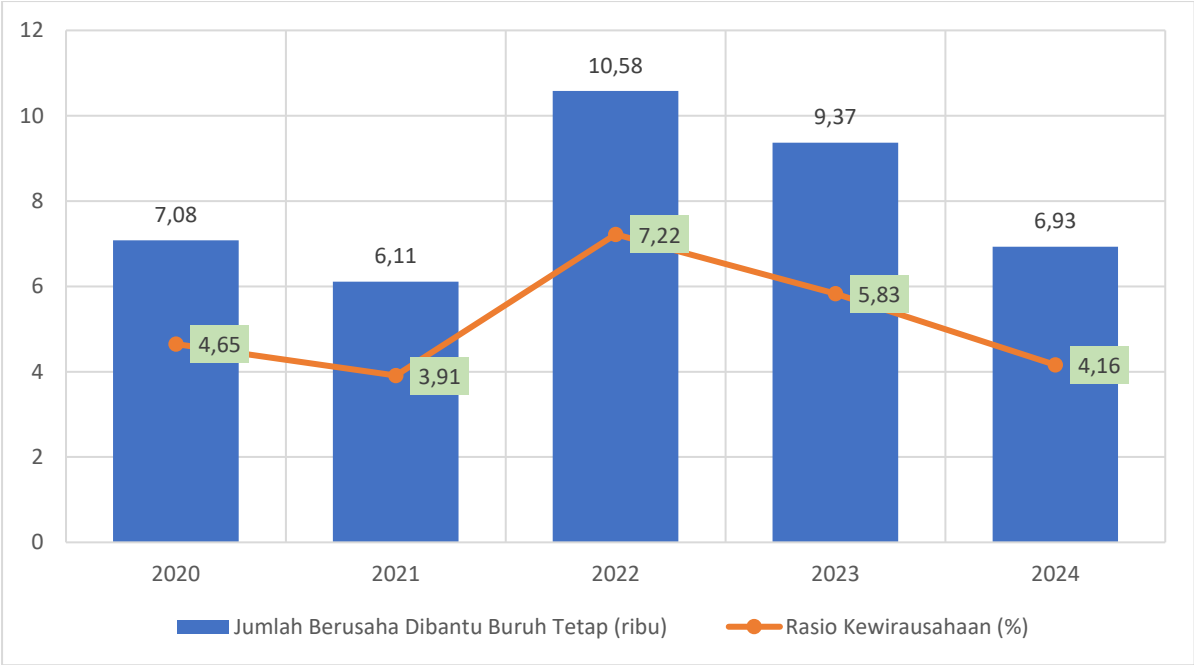
Kontribusi sektor ini terhadap total PDRB mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 0,22 persen pada tahun 2020 menjadi 0,21 persen pada periode 2021–2022, kemudian meningkat menjadi 0,23 persen pada tahun 2023 dan 0,24 persen pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum mengalami pertumbuhan, kondisi ini disebabkan oleh peningkatan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pacu jalur yang berdampak terhadap peningkatan sektor PDRB akomodasi makan dan minum.



Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.58 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

II.3.2.3 Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap tercatat sebanyak 7,08 ribu unit usaha, dengan rasio kewirausahaan sebesar 4,65%. Rasio ini sempat menurun pada 2021 (3,91%), namun melonjak drastis pada 2022 menjadi 7,22% seiring peningkatan jumlah unit usaha menjadi 10,58 ribu. Setelah itu, rasio kembali menurun pada 2023 (5,83%) dan 2024 (4,16%), sejalan dengan penurunan jumlah unit usaha yang berusaha dibantu buruh tetap. Fluktuasi ini menandakan dinamika daya saing ekonomi lokal dan tingkat resiliensi dunia usaha terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

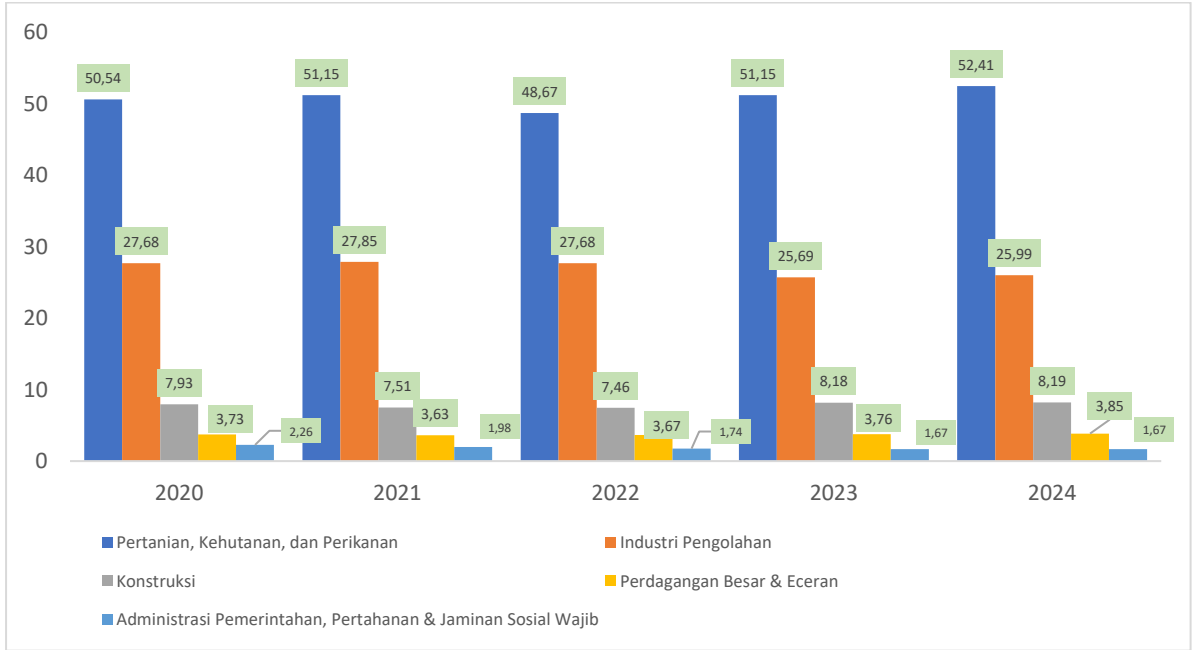


Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025
Grafik II.59 Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan yang belum mencapai 5% pada 2024 menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk memperkuat ekosistem wirausaha dan mendukung pertumbuhan UMKM berbasis inovasi.

II.3.2.4 Rasio PDRB Menurut Lapangan Usaha Sektor Strategis

Struktur perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir didominasi oleh lima sektor strategis, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; serta administrasi pemerintahan. Data grafik menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan konsisten menjadi yang tertinggi, rata-rata di atas 50% terhadap total PDRB, dengan kecenderungan meningkat dari 50,54% pada tahun 2020 menjadi 52,41% pada tahun 2024. Industri pengolahan juga tetap menjadi penopang utama, meskipun persentasenya relatif stagnan di kisaran 25–28%. Sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan masing-masing menyumbang antara 1,7% hingga 8,2%.



Sumber: PDRB Kabupaten Kuantan Singingi, 2020–2024

Grafik II.60 Rasio PDRB Menurut Lapangan Usaha Sektor Strategis

Peningkatan kontribusi sektor pertanian dan relatif stabilnya sektor industri pengolahan menunjukkan ketergantungan struktur ekonomi terhadap sektor primer dan sekunder, dengan perlunya dorongan akselerasi pada sektor tersier untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Fenomena ini menunjukkan peran strategis perempuan dalam mendukung perekonomian daerah, sekaligus menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja ramah gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif.

II.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagai indikator melihat keberhasilan inovasi daerah merupakan sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Tabel II.37 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tahun	Indeks Inovasi Daerah
1	2020	11,13
2	2021	32,01
3	2022	48,42
4	2023	47,67
5	2024	49,09

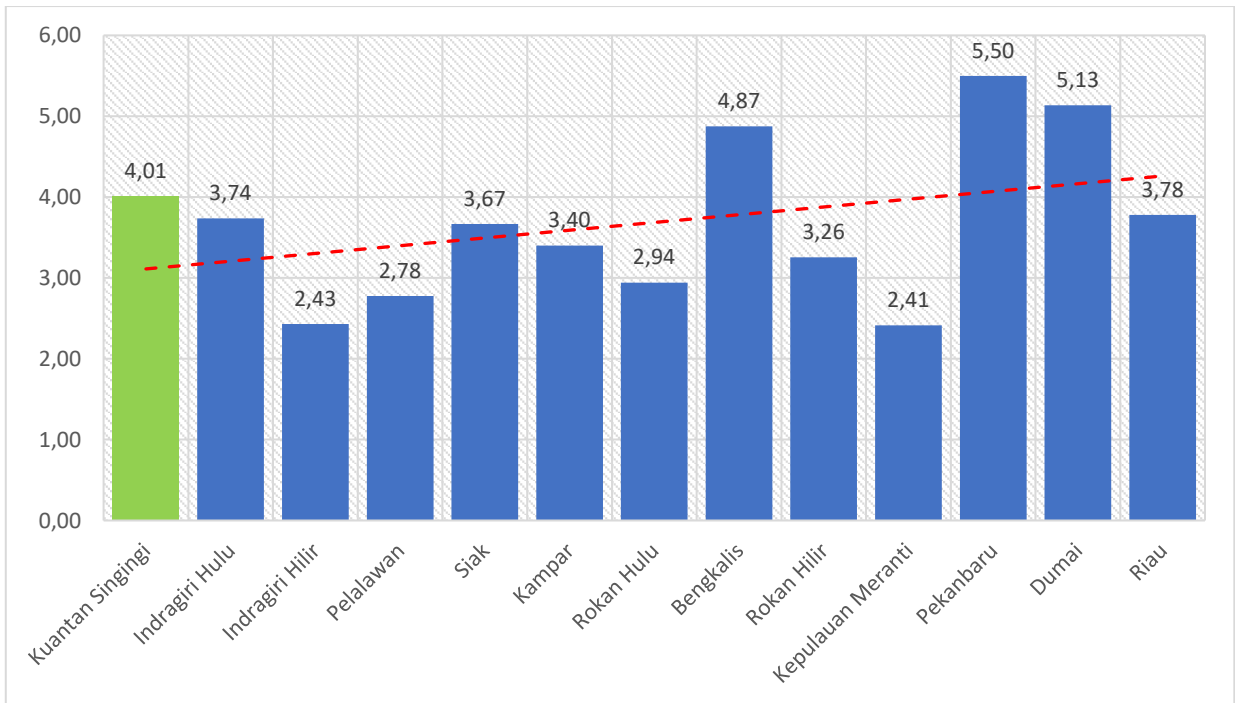
Sumber : BRIN RI, 2025

Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren peningkatan pesat, dari skor 11,13 pada tahun 2020 menjadi 49,09 pada tahun 2024. Lonjakan signifikan terjadi pada 2021 (32,01) dan 2022 (48,42), mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik, digitalisasi tata kelola, dan penguatan daya saing daerah. Namun, sedikit penurunan pada tahun 2023 (47,67) menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkannya.

II.3.2.6 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dirancang sebagai instrumen pengukuran kuantitatif dengan cakupan yang komprehensif untuk memperkuat pemantauan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Indeks ini memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk mengukur kinerja akses, pemanfaatan layanan, serta kedalaman sektor keuangan di suatu daerah.

IKAD berfungsi memberikan gambaran yang informatif dan berbasis data bagi pemangku kepentingan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kebijakan inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran. Secara khusus, IKAD bertujuan untuk memperkuat proses pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan daerah, meningkatkan efektivitas pemantauan kinerja TPAKD, serta melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) dengan memperluas cakupan dan menyediakan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam. Dengan demikian, IKAD menjadi instrumen penting dalam mendorong terciptanya akses keuangan yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.



Sumber: OJK, 2025

Grafik II.61 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Berdasarkan data Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tahun 2024, Kabupaten Kuantan Singingi mencatat skor sebesar 4,01, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau yang berada pada angka 3,78. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akses keuangan di Kuantan Singingi tergolong baik, baik dari sisi ketersediaan (supply side) maupun pemanfaatan (demand side) layanan keuangan.

Posisi Kuantan Singingi berada pada kelompok menengah-atas di antara kabupaten/kota di Provinsi Riau, unggul dibandingkan sebagian besar wilayah lain seperti Indragiri Hulu (3,74), Siak (3,67), dan Kampar (3,40). Hal ini mengindikasikan bahwa inklusi keuangan di Kuantan Singingi telah berjalan cukup efektif, yang tercermin dari meningkatnya ketersediaan produk dan layanan keuangan serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkannya. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah daerah dengan skor tertinggi seperti Kota Pekanbaru (5,50) dan Kota Dumai (5,13).

II.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya alam yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat integrasi produktivitas sektor pertanian, kehutanan, perikanan (ekonomi hijau), serta optimalisasi potensi sumber daya air dan perikanan (ekonomi biru), sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

II.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Dalam implementasinya, Ekonomi Hijau diharapkan dapat mendukung promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur berkelanjutan, serta lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Indeks Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga) pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Perkembangan indeks ekonomi hijau Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.38 Perkembangan indeks ekonomi hijau Provinsi Riau

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ekonomi Hijau	50,72	50,03	51,77	50,99	50,88

Sumber: Bappenas, 2024

Indeks Ekonomi Hijau Indonesia, termasuk Provinsi Riau tahun 2024 belum dipublikasi. Namun demikian jika melihat Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau tahun 2019-2023 berfluktuatif. Indeks ekonomi hijau tahun 2021 sebesar 51,77, angka ini meningkat sebesar 3,5 persen dari tahun 2020. Beberapa parameter yang sudah sangat baik (nilai 75-100) diantaranya tingkat pengangguran, angka harapan hidup, produktivitas perikanan budidaya, produktivitas tenaga kerja sektor industri, intensitas energy final dan kualitas udara pada parameter NO2. Sedangkan parameter yang berada dalam kategori kurang (nilai 0-25) antara lain kualitas air permukaan pada parameter BOD, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Hal yang perlu menjadi catatan untuk indikator ini adalah beberapa parameter dalam tujuh tahun terakhir berada pada kategori kurang, seperti: bauran energi, kualitas air permukaan, persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa. Indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023 merupakan angka proyeksi, sehingga diperoleh angka proyeksi tahun 2022 sebesar 50,99 poin dan tahun 2023 sebesar 50,88 poin.

II.3.3.2 Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)

Capaian Bauran energi Provinsi Riau pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan data pemanfaatan energi yang bersumberkan minyak bumi dan batubara. Adapun untuk capaian Bauran Energi pada 2024 terjadi peningkatan signifikan sebesar 1,89 persen menjadi 28,02 persen. Dari capaian Bauran Energi tahun 2024 sebesar 28,02 persen masih perlu upaya untuk penambahan EBT di tahun 2025 sebesar 3,2 persen sesuai target di Dokumen RUED sebesar 31,22 persen. Provinsi Riau memiliki potensi Energi Baru terbarukan yang cukup besar yang terdiri dari laut, biomassa, biogas, surya, angin, panas bumi dan sampah.

Tabel II.39 Capaian Bauran Energi Provinsi Riau

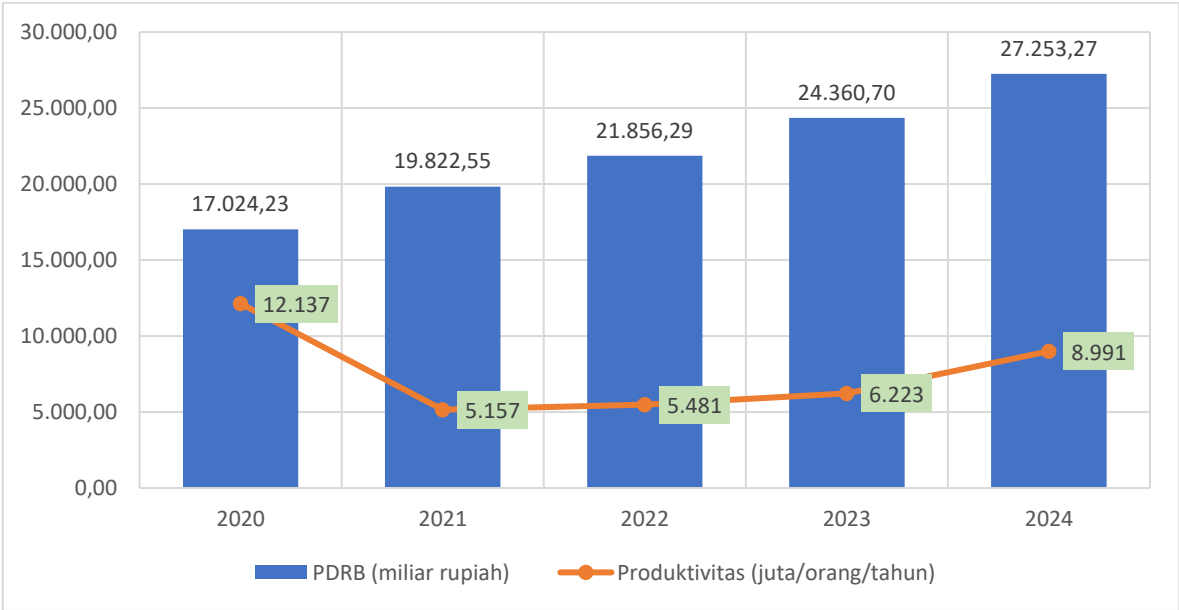
No	Jenis Pemanfaatan	Kapasitas (MW)	Potensi (MW)	Persentase Pemanfaatan Dari Potensi
1	PLTS	45,69	1.700,00	2,69%
2	PLTBm	643,13	2.142,37	30,02%
3	PLTBg	43,93	4.354,55	1,01%
4	PLTMH	0,28	894,00	12,78%
5	PLTA	114,00	894,00	12,78%
6	PLTP	0,00	15,00	0,00%
7	PLTSa	0,00	10,00	0,00%
Total		847,03	9.115,92	9,29%

Sumber : ESDM Provinsi Riau

Dari potensi EBT Provinsi Riau sebesar 9.115,92 MW yang baru termanfaatkan sebesar 9,29 persen atau sebesar 847,03 MW. Potensi EBT terbesar bersumberkan dari kelapa sawit berupa biogas sebesar 4.354,55 MW dan biomassa sebesar 2.142,37 MW dan diikuti energi surya sebesar 1.700 MW.

II.3.3.3 Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

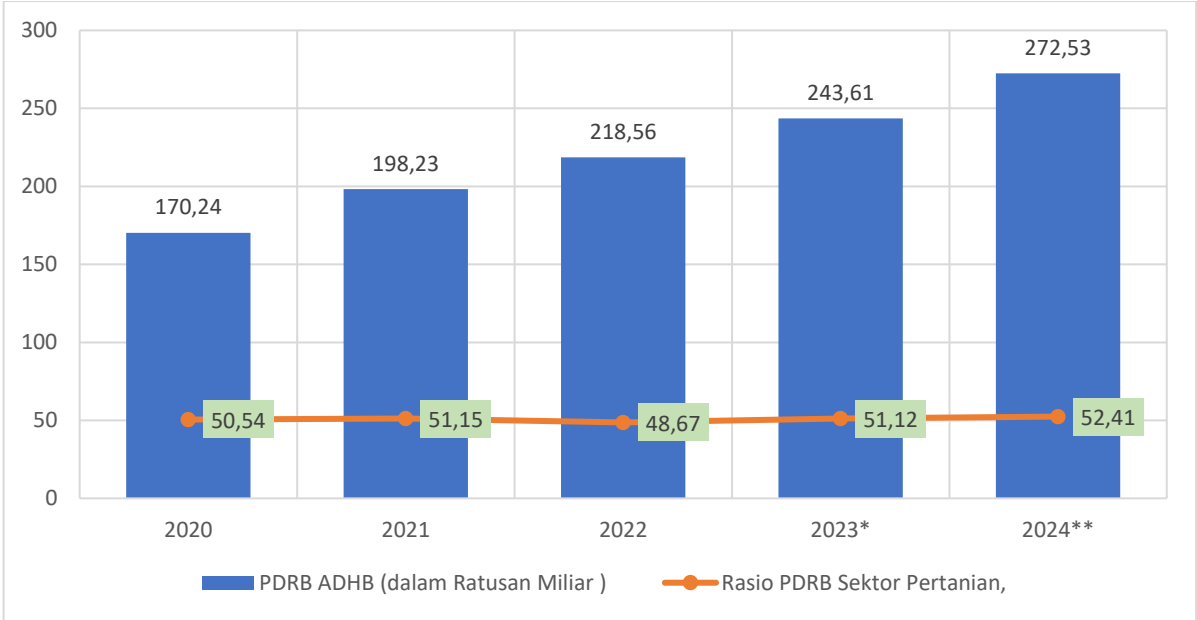
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuasi dengan kecenderungan membaik pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, produktivitas tercatat sebesar Rp12.137 juta/orang/tahun, mengalami penurunan menjadi Rp5.157 juta/orang/tahun di tahun 2021 seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada tahun 2022 dan 2023, produktivitas menunjukkan pemulihan bertahap masing-masing sebesar Rp5.481 juta/orang/tahun dan Rp6.223 juta/orang/tahun. Selanjutnya, pada tahun 2024, produktivitas meningkat signifikan hingga mencapai Rp. 8.991 juta/orang/tahun. Kondisi ini mencerminkan mulai terjadinya perbaikan efisiensi dan penambahan nilai tambah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kuantan Singingi, yang berimplikasi positif terhadap kinerja ekonomi hijau di daerah. Perkembangan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025
Grafik II.62 Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

II.3.3.4 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 tetap menjadi yang terbesar, walaupun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio kontribusi sektor ini mencapai 50,54 persen, kemudian naik menjadi 51,15 persen di tahun 2021. Tahun 2022, rasio sedikit menurun menjadi 48,67 persen, namun kembali meningkat masing-masing menjadi 51,12 persen pada tahun 2023 dan 52,41 persen pada tahun 2024. Stabilitas kontribusi yang tinggi ini menegaskan peran strategis sektor primer sebagai penopang utama perekonomian daerah dan sebagai motor penggerak utama penerapan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam terbarukan. Perkembangan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025

Grafik II.63 Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Secara keseluruhan, dinamika produktivitas tenaga kerja dan rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya transformasi ekonomi hijau mulai berjalan secara efektif. Peningkatan efisiensi, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian menjadi prasyarat penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat inklusif, tetapi juga berkelanjutan serta ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis sumber daya alam yang dikelola secara lestari dan inovatif.

II.3.4 Transformasi Digital

II.3.4.1 Indeks Transformasi Digital

Transformasi digital di tengah disrupsi teknologi menjadi salah satu tantangan utama pembangunan dalam lima tahun ke depan. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan digitalisasi melalui pengembangan program-program masyarakat digital. Masyarakat digital tumbuh sebagai hasil dari kemajuan teknologi digital, dimana hampir seluruh aspek kehidupan sangat bergantung pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mulai dari proses penciptaan, distribusi, hingga penggunaan pada aktivitas utama sehari-hari.

Dari sisi komponen penyusun, Kuantan Singingi memiliki skor infrastruktur & ekosistem digital sebesar 54,32 yang tergolong sedang—cukup kompetitif dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain, tetapi belum optimal dalam pemerataan akses. Keterampilan digital masyarakat Kuantan Singingi meraih skor 57,73, menandakan adanya modal SDM yang cukup, meskipun belum mencapai keunggulan seperti Kampar (67,97) dan Indragiri Hilir (69,02). Pemberdayaan menjadi titik lemah utama dengan skor hanya 22,07, salah satu yang terendah di Riau. Hal ini mencerminkan bahwa pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong kegiatan ekonomi kreatif, partisipasi UMKM, maupun inovasi digital masyarakat masih sangat terbatas. Pada aspek pekerjaan, Kuantan Singingi mencatat nilai 33,33, yang juga menunjukkan masih minimnya peluang kerja di sektor digital.

Tabel II.40 indeks Transformasi Digital

N o	Kabupaten/Kota	Infrastruktur & Ekosistem	Keterampilan Digital	Pemberdayaan	Pekerjaan	Nilai IMDI 2024	Kategori
1	Bengkalis	54,46	63,84	31,94	35,84	46,94	Cukup

N o	Kabupaten/Kota	Infrastruktur & Ekosistem	Keterampilan Digital	Pemberdayaan	Pekerjaan	Nilai IMDI 2024	Kategori
2	Indragiri Hilir	52,55	69,02	29,64	36,56	47,29	Tinggi
3	Indragiri Hulu	53,40	58,86	24,70	33,40	42,62	Cukup
4	Kampar	54,60	67,97	25,14	34,24	45,71	Cukup
5	Kepulauan Meranti	53,79	67,15	26,68	33,37	45,63	Cukup
6	Kota Dumai	57,94	56,39	27,53	34,74	44,17	Cukup
7	Kota Pekanbaru	68,43	59,36	28,15	34,66	47,77	Tinggi
8	Kuantan Singingi	54,32	57,73	22,07	33,33	41,70	Cukup
9	Pelalawan	49,86	58,80	21,50	33,90	40,44	Cukup
10	Rokan Hilir	52,83	66,79	31,32	35,37	47,71	Tinggi
11	Rokan Hulu	54,10	59,18	27,50	34,12	43,61	Cukup
12	Siak	53,62	53,00	20,68	31,49	39,48	Cukup

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meski pembangunan infrastruktur digital dan penguatan keterampilan SDM sudah mulai terwujud, namun transformasi digital di Kuantan Singingi belum benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan penciptaan nilai tambah. Pemberdayaan dan akses pekerjaan berbasis digital menjadi PR besar yang memerlukan intervensi strategis, baik dari sisi kebijakan, program pelatihan, maupun kolaborasi lintas sektor.

II.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

II.3.5.1 Pembentukan Modal tetap Bruto

Struktur PDRB Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan pendekatan pengeluaran menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memegang peranan sangat penting dalam perekonomian daerah selama lima tahun terakhir. Proporsi PMTB yang mencapai lebih dari 46% pada tahun 2020 menandakan besarnya investasi yang terjadi, baik oleh pemerintah maupun swasta, terutama pada sektor infrastruktur, peralatan, serta pengadaan aset tetap lainnya.

Namun, selama periode 2020–2024, terlihat adanya tren penurunan kontribusi PMTB secara gradual. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian investasi, baik sebagai dampak dari perubahan iklim ekonomi global, dinamika investasi daerah, maupun penyesuaian pola belanja pasca-pandemi. Meski demikian, peran PMTB tetap dominan, menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dan investasi fisik masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kuantan Singingi.

Tabel II.41 Distribusi PDRB Pasar Berlaku Berdasarkan Pengeluaran (Persen) 2020–2024

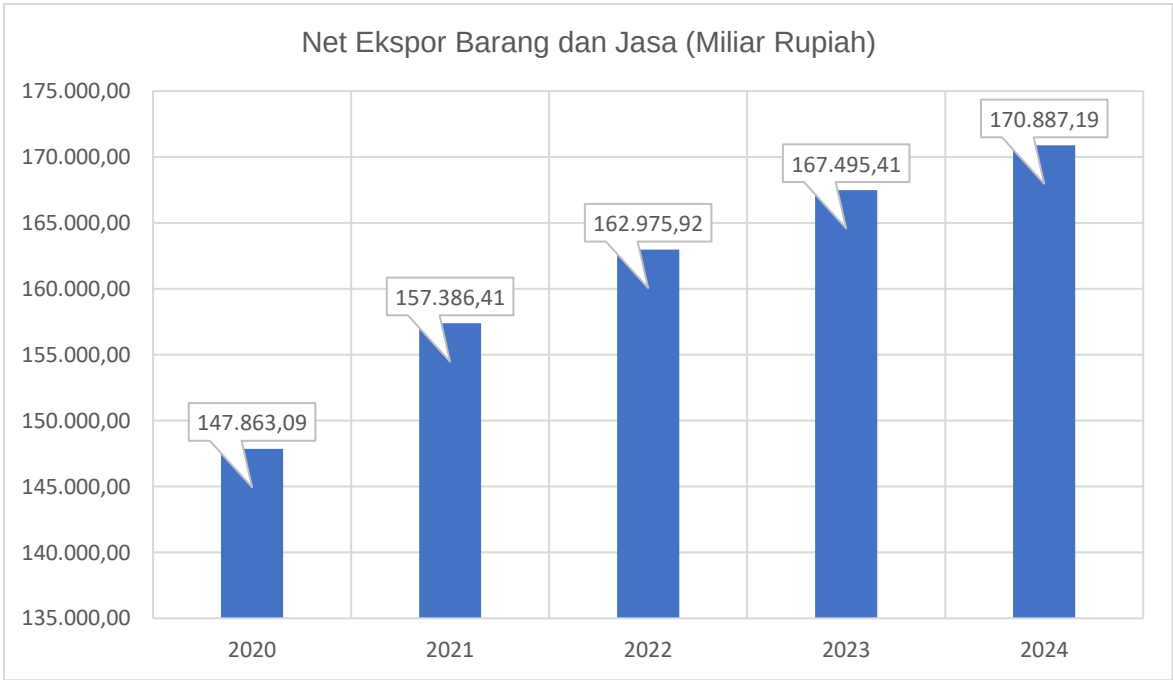
Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	43,12	40,69	38,68	39,09	38,20
Konsumsi LNPRT	0,54	0,45	0,42	0,45	0,47
Konsumsi Pemerintah	4,28	3,50	3,11	3,07	3,03
Pembentukan Modal Tetap Bruto	46,19	42,32	40,43	38,99	36,85
Perubahan Inventori	0,46	0,09	0,18	0,17	0,09
Net Ekspor Barang dan Jasa	5,41	12,96	17,18	18,23	21,36
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Di sisi lain, penurunan kontribusi PMTB secara bertahap diimbangi dengan peningkatan kontribusi net ekspor barang dan jasa. Hal ini menjadi indikator positif bahwa struktur ekonomi daerah mulai mengalami diversifikasi, dengan semakin kuatnya peran sektor perdagangan dan ekspor dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Meski kontribusi konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu pilar utama, penyesuaian belanja konsumsi dan investasi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Secara keseluruhan, perubahan pola distribusi pengeluaran ini menunjukkan bahwa perekonomian Kuantan Singingi tengah bergerak menuju struktur yang lebih seimbang antara investasi, konsumsi, dan ekspor, yang menjadi pondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

II.3.5.2 Ekspor Barang dan jasa

Selama periode 2020 hingga 2024, net ekspor barang dan jasa Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai net ekspor tercatat sebesar Rp. 147,86 triliun dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp170,89 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan penguatan sektor perdagangan luar negeri, baik ekspor barang maupun jasa, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2025

Grafik II.64 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Kenaikan nilai net ekspor ini menandakan adanya peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional maupun nasional, serta efektivitas strategi pemerintah daerah dalam mendorong ekspor dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, pertumbuhan net ekspor yang konsisten juga menjadi indikator bahwa perekonomian daerah mulai semakin terintegrasi dengan perekonomian global, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan net ekspor barang dan jasa yang positif ini perlu terus didorong melalui berbagai upaya peningkatan kualitas produk, inovasi, diversifikasi komoditas ekspor, serta perluasan jaringan pemasaran, agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi dapat terjaga secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

II.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Stabilitas Ekonomi Makro

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kabupaten Kuantan Singingi.

II.3.6.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

a. Jalan dalam Kondisi Mantap

Tren kemantapan jalan yang terus menurun menunjukkan backlog pemeliharaan yang membesar. Ruas yang semula mantap tidak dipreservasi tepat waktu, sehingga turun menjadi tidak mantap dan akhirnya masuk kategori rusak. Ini adalah pola klasik ketika alokasi pemeliharaan tidak memadai atau tidak tepat waktu, sementara beban sumbu kendaraan melebihi desain.

Tabel II.42 Kemantapan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024

No	Kondisi Jalan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Mantap	1.491,62	1.266,53	1.148,07	895,139
2	Tidak Mantap	498,23	723,32	841.78	693,767
Total Panjang Jalan		1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.588,906

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi, 2025

Untuk membalik tren ini, pemerintah daerah membutuhkan strategi preservasi berjenjang (*routine-periodic-rehabilitation*) yang disiplin, penerapan Sistem Manajemen Perkerasan Jalan (PMS), serta penguatan pengawasan tonase. Skema pembiayaan kreatif (KPBU, *earmarked road maintenance fund*, atau DAU/DBH tematik preservasi) dapat dipertimbangkan agar program tidak terjebak pada siklus “rehabilitasi mahal setelah rusak berat”.

b. Kondisi Prasarana Jalan Lingkungan

Analisis rasio panjang jalan lingkungan terhadap luas wilayah di masing-masing kecamatan memperlihatkan adanya ketimpangan antar-wilayah dalam pelayanan infrastruktur jalan lingkungan. Beberapa kecamatan seperti Benai, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Kuantan Hilir, dan Pangean menunjukkan capaian rasio yang relatif lebih baik, yang berarti penduduk di kecamatan tersebut lebih mudah mengakses pusat aktivitas maupun layanan dasar. Sementara kecamatan dengan rasio jalan yang rendah, seperti Singingi, Singingi Hilir, dan Pucuk Rantau, berpotensi menghadapi hambatan mobilitas, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel II.43 Kondisi Prasarana Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Kawasan	Rasio Panjang Jalan		Rasio Capaian (%)
				Meter	%	
1	Kuantan Mudik	560,81	24	36.000	0,64	0,051
2	Hulu Kuantan	289,80	12	18.000	0,47	0,008
3	Gunung Toar	145,22	14	21.000	1,27	0,000
4	Pucuk Rantau	511,04	10	15.000	0,18	0,000
5	Singingi	966,31	14	21.000	0,11	0,036
6	Singingi Hilir	986,76	12	18.000	0,12	0,000
7	Kuantan Tengah	466,92	23	34.500	1,27	0,070
8	Sentajo Raya	238,04	15	22.500	1,54	0,051
9	Benai	231,18	16	24.000	1,93	0,021
10	Kuantan Hilir	129,50	16	24.000	1,61	0,057
11	Pangean	231,18	17	25.500	1,72	0,012
12	Logas Tanah Darat	481,11	15	22.500	0,59	0,064
13	Kuantan Hilir Seberang	94,42	14	21.000	1,84	0,024
14	Cerenti	175,91	13	19.500	0,43	0,033
15	Inuman	83,75	14	21.000	0,47	0,195
Jumlah		5.457,86	229	343.500	14,18	0,044

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Peta capaian rasio ini harus menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan jalan lingkungan pada periode berikutnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa intervensi pembangunan benar-benar diarahkan pada kawasan yang memiliki backlog prasarana jalan lingkungan, serta meminimalkan disparitas pelayanan antar kecamatan. Upaya ini akan mempercepat pemerataan aksesibilitas dan pada akhirnya mendukung inklusi sosial, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan di kawasan permukiman Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik yang paling baik di Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir, banyak usulan pembangunan drainase tahun 2024 terutama di Kota Teluk Kuantan sebagai ibukota Kabupaten.

Tabel II.44 Kebutuhan Drainase Lingkungan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas wilayah (KM ²)	Rasio Kebutuhan Drainase		Rasio Capaian (%)
			Meter	%	
1	Kuantan Mudik	560,81	24.000	0,425	0
2	Hulu Kuantan	289,80	12.000	0,312	0
3	Gunung Toar	145,22	14.000	0,847	0
4	Pucuk Rantau	511,04	10.000	0,122	0
5	Singingi	966,31	14.000	0,072	0,01
6	Singingi Hilir	986,76	12.000	0,078	0,00
7	Kuantan Tengah	466,92	23.000	0,850	0,01
8	Sentajo Raya	238,04	15.000	1,030	0,01
9	Benai	231,18	16.000	1,283	0,00
10	Kuantan Hilir	129,50	16.000	1,075	0,01

No	Kecamatan	Luas wilayah (KM ²)	Rasio Kebutuhan Drainase		Rasio Capaian (%)
11	Pangean	231,18	17.000	1,146	0,01
12	Logas Tanah Darat	481,11	15.000	0,394	0,02
13	Kuantan Hilir Seberang	94,42	14.000	1,225	0,00
14	Cerenti	175,91	13.000	0,285	0,00
15	Inuman	83,75	14.000	0,311	0,02
	Jumlah	5.457,86	229.000	9,456	0,08

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

d. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan dibidang Pertanian, Industri, Rumah Tangga, Rekreasi, Aktivitas Lingkungan dan Irigasi. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air.

Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi serta partisipasi di wilayah pedesaan sangat diperlukan guna penyediaan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik.

Faktor umur bangunan juga berpengaruh terhadap kondisi penyediaan sarana dan prasarana pendukung jaringan irigasi yang baik. Kalau kita lihat jaringan irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar di beberapa Kecamatan kondisinya belum baik mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan.

Tabel II.45 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Infrastruktur	Kondisi (%)			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bangunan Utama	8,89%	33,33%	33,33%	24,44%
2	Jaringan Primer	40,78%	12,07%	9,93%	37,22%
3	Jaringan Sekunder	46,18%	11,01%	14,57%	28,24%
4	Jaringan Tersier	59,26%	14,62%	12,62%	13,50%
	Rata-rata	38,78%	17,76%	17,61%	25,85%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kuantan Singingi, 2025

Kondisi infrastruktur irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara rata-rata, hanya sekitar 38,78% infrastruktur berada dalam kondisi baik, sementara sisanya tersebar pada kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Persentase kerusakan, terutama pada jaringan primer dan bangunan utama yang masih cukup tinggi, mengindikasikan perlunya prioritas rehabilitasi dan pemeliharaan. Hal ini penting agar fungsi irigasi dapat optimal mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

II.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas kehidupan masyarakat sekaligus mencerminkan daya saing suatu daerah. Data Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni meningkat secara absolut

dalam lima tahun terakhir, dari 67.094 unit pada tahun 2020 menjadi 68.211 unit pada tahun 2024. Kenaikan ini relatif stabil, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 0,4 persen per tahun.

Namun, pada saat yang sama jumlah rumah tangga juga mengalami pertumbuhan lebih cepat, yakni dari 83.732 rumah tangga pada tahun 2020 menjadi 89.690 rumah tangga pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 1,8 persen per tahun. Pertumbuhan rumah tangga yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan rumah layak huni berdampak langsung terhadap menurunnya rasio ketersediaan hunian layak.

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak berfluktuasi dan cenderung menurun, dari 80,12 persen pada 2020 menjadi hanya 76,05 persen pada 2024. Data dalam tabel juga memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan capaian antar tahun, misalnya pada 2021 persentase sempat meningkat menjadi 74,71 persen tetapi kemudian turun drastis pada 2022 menjadi 68,53 persen sebelum kembali naik pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pembangunan maupun validitas data pencatatan.

Tabel II.46 Akses terhadap hunian layak

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Layak Huni	67.094	67.223	67.449	67.782	68.211
2	Jumlah Rumah Tangga	83.732	85.226	86.716	88.203	89.690
3	Persentase	72,35	74,71	68,53	68,96	72,84

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Diagnosis masalah utama yang dapat ditarik adalah adanya kesenjangan pertumbuhan antara jumlah rumah tangga baru yang bertambah lebih cepat daripada pembangunan atau perbaikan rumah layak huni, adanya fluktuasi capaian yang menandakan masalah dalam konsistensi program pembangunan perumahan atau kualitas verifikasi data, serta munculnya risiko backlog perumahan karena penurunan proporsi akses hunian layak memperlihatkan adanya defisit rumah layak huni yang semakin membesar setiap tahunnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu mengantisipasi pertumbuhan rumah tangga baru melalui program pembangunan rumah baru yang lebih agresif disertai rehabilitasi rumah tidak layak huni. Selain itu, diperlukan perencanaan berbasis data yang konsisten dan terintegrasi untuk mengurangi fluktuasi capaian sehingga target peningkatan akses hunian layak dapat tercapai secara merata di seluruh kecamatan.

II.3.6.3 Persentase Desa mandiri

Desa mandiri adalah indikator penting dalam mengukur kemandirian dan daya saing wilayah pedesaan, mencerminkan kemajuan pembangunan desa dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Persentase desa mandiri di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan lonjakan sangat signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase desa mandiri masih sangat rendah yaitu 0,459%, namun terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 55,505% pada tahun 2024.

Tabel II.47 Persentase Desa mandiri

No	Tahun	Persentase Desa Mandiri
1	2020	0,459
2	2021	1,376
3	2022	8,716
4	2023	33,028
5	2024	55,505

Sumber : Dinas Sosial, Pemdes, 2025

Peningkatan pesat ini menandakan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian desa melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dan akses layanan dasar. Kondisi ini menjadi modal penting dalam memperkuat perekonomian lokal, mengurangi ketimpangan wilayah, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kuantan Singingi.

II.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Dua indikator utama yang sering digunakan untuk menilai tingkat stabilitas ekonomi di tingkat daerah adalah rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. Rasio pajak daerah terhadap PDRB menjadi cerminan kemandirian fiskal dan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah, sedangkan inflasi menggambarkan kestabilan harga barang dan jasa yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total perekonomian di suatu wilayah. Berdasarkan perkembangan beberapa tahun terakhir, rasio ini secara konsisten berada pada tingkat yang rendah (di bawah 0,3%), menandakan bahwa peran pendapatan pajak daerah dalam struktur ekonomi Kabupaten/Kota masih sangat terbatas.

II.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Secara umum, rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah belum optimal termanfaatkan dan masih perlu upaya peningkatan, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun perbaikan tata kelola dan pelayanan pajak. Optimalisasi pendapatan pajak daerah sangat penting untuk mendukung kemandirian fiskal daerah dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di masa mendatang.

Tabel II.48 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tahun	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
1	2020	0,082
2	2021	0,078
3	2022	0,075
4	2023	0,280
5	2024	0,071

Sumber : Badan Pusat Statistik dan LRA Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tahun 2024 rasio Rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami penurunan kembali setelah pada tahun 2023, tercatat lonjakan rasio yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini diduga erat kaitannya dengan kenaikan tajam pendapatan pajak daerah, yang bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti perubahan kebijakan, ekstensifikasi basis pajak, atau adanya koreksi dan perbaikan data administrasi keuangan daerah.

II.3.7.2 Tingkat Inflasi

Tabel II.49 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2020-2024 Kabupaten Kuantan Singingi

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	2,24	1,55	7,04	2,50	1,24
Provinsi Riau	2,42	1,54	6,81	2,50	1,25
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57

Di sisi lain, perkembangan inflasi di Kabupaten Kuantan Singingi selama 2020–2024 juga memperlihatkan tren yang relatif terkendali, meskipun sempat mengalami lonjakan pada tahun 2022. Inflasi di Kuantan Singingi tercatat sebesar 2,24% pada 2020, turun menjadi 1,55% pada 2021, namun melonjak drastis ke 7,04% pada 2022—sejalan dengan tekanan inflasi nasional pasca pandemi dan gangguan rantai pasok global. Tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali turun ke 2,50% dan 1,24%, lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan menjaga kestabilan daya beli masyarakat, meskipun tantangan tetap ada terutama jika terjadi gejolak eksternal maupun kenaikan permintaan domestik secara tiba-tiba.

Secara keseluruhan, fluktuasi rasio pajak daerah terhadap PDRB dan tingkat inflasi yang relatif terkendali dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi makro di Kuantan Singingi. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat fondasi ekonomi riil, memperluas basis pajak, dan mengantisipasi risiko inflasi di masa mendatang agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan dapat menopang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

II.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum menggambarkan tugas dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggerakkan sumber daya pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah. Aspek pelayanan umum dalam konteks Pemerintahan Daerah telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan membagi kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Terdapat 4 (empat) dimensi yang menjadi tolak ukur kinerja aspek pelayanan umum, yaitu; 1) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, 2) hukum berkeadilan, keamanan daerah dan demokrasi substansial yang berkualitas, 3) kualitas kerja sama dan daya saing daerah meningkat, dan 4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

II.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

II.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan berdasarkan empat variabel utama, yaitu: (1) memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi regulasi, (2) mendorong regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, (3) mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, dan (4) meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) di pusat dan daerah.

Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Jika pada tahun 2023 indeks ini baru mencapai 54,81, maka pada tahun 2024 telah melonjak menjadi 96,80. Lompatan ini menandakan adanya komitmen dan kemajuan nyata dalam pelaksanaan reformasi hukum, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun pelayanan hukum kepada masyarakat. Kinerja positif ini memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

II.4.1.2 Indeks SPBE

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Indeks SPBE di Kabupaten Kuantan Singingi naik dari 2,92 pada tahun 2020 menjadi 3,23 pada 2024. Ini mengindikasikan progres dalam digitalisasi proses pemerintahan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sejalan dengan itu, persentase penyebaran informasi dan komunikasi

kepada masyarakat melonjak dari 76,22% (2021) menjadi 97,83% (2024), mencerminkan keterbukaan informasi publik yang semakin baik. Selain itu, proporsi rumah tangga yang menggunakan akses internet juga meningkat, dari 65,59% pada 2023 menjadi 68,25% pada 2024, memperlihatkan semakin luasnya jangkauan transformasi digital di masyarakat. Tingginya persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (selalu di angka 100% pada 2020, 2022–2024) menjadi bukti responsivitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat.

Tabel II.50 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,92	2,96	2,96	2,96	3,23
2	Persentase Penyebaran Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat	n/a	76,22	88,07	96,67	97,83
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	n/a	83,46	83,98
4	Proporsi rumah tangga yang menggunakan akses internet	n/a	n/a	n/a	65,59	68,25
5	Persentase indikator SPBE yang terpenuhi	n/a	82,4	114,89	117,64	95,56
6	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	80	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian Kab. Kuantan Singingi, 2025

II.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi. Pengukuran indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 (enam) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, yaitu: 1) keadilan, 2) partisipasi, 3) akuntabilitas, 4) transparansi, 5) berdaya guna, dan 6) aksesibilitas. Keenam prinsip tersebut dinilai melalui 6 (enam) aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik, yaitu: 1) kebijakan pelayanan, 2) sarana prasarana, 3) konsultasi dan pengaduan, 4) profesionalisme SDM, 5) sistem informasi pelayanan publik, dan 6) inovasi pelayanan.

Tabel II.51 Indeks Pelayanan Publik

No	Tahun	Indeks Pelayanan Publik
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	-
4	2023	3,97
5	2024	4,53

Sumber : KemenPANRB RI, 2025

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 naik secara signifikan dibandingkan tahun 2023, dari 3,97 pada tahun 2023 naik menjadi 4,53 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi semakin meningkat kualitasnya, terutama pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang langsung melayani masyarakat. Pencapaian kinerja tersebut perlu terus didorong melalui upaya peningkatan aspek penilaian kinerja UKPP terhadap pelayanan publik, sehingga skor IPP dapat semakin optimal di masa mendatang.

II.4.1.4 Indeks Survei Integritas

Tabel II.52 Indeks Survei Integritas Tahun 2024

No	Kabupaten	Indeks Internal	Indeks Eksternal	Indeks Eksper	Indeks Integritas
1	Kuantan Singingi	71,54	83,16	57,68	63,12
2	Indragiri Hulu	71,67	83,18	72,9	69,51
3	Indragiri Hilir	74,89	88,51	74,61	75,41
4	Pelalawan	69,67	88,25	74,01	72,13
5	Siak	72,53	87,37	72,36	71,5
6	Kampar	72,54	83,01	72,52	72,09
7	Rokan Hulu	73,8	88,16	76,16	73,81
8	Bengkalis	73,55	90,04	64,25	71,19
9	Rokan Hilir	67,79	87,11	72,05	71,52
10	Kepulauan Meranti	72,49	87,85	68,49	69,36
11	Pekanbaru	69,79	83,74	61,52	68,09
12	Dumai	74,69	87,96	71,21	75,18
Riau		70,41	88,93	55,72	62,83
Nasional		72,34	86,44	69,68	71,53

Sumber: Provinsi Riau dalam angka 2025

Berdasarkan data Indeks Survey Integritas tahun 2024, Kabupaten Kuantan Singingi mencatat nilai Indeks Integritas sebesar 63,12, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Riau yang berada pada angka 62,83. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat integritas di Kabupaten Kuantan Singingi berada di atas rata-rata provinsi. Namun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah capaian rata-rata nasional yang mencapai 71,53. Pada *Indeks Eksternal*, capaian kabupaten kuantan singingi sebesar 83,16 mengindikasikan adanya persepsi positif dari pemangku kepentingan eksternal terhadap kinerja dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi ini menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat komitmen, sistem, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, sehingga dapat mencapai bahkan melampaui capaian nasional di masa mendatang.

II.4.1.5 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

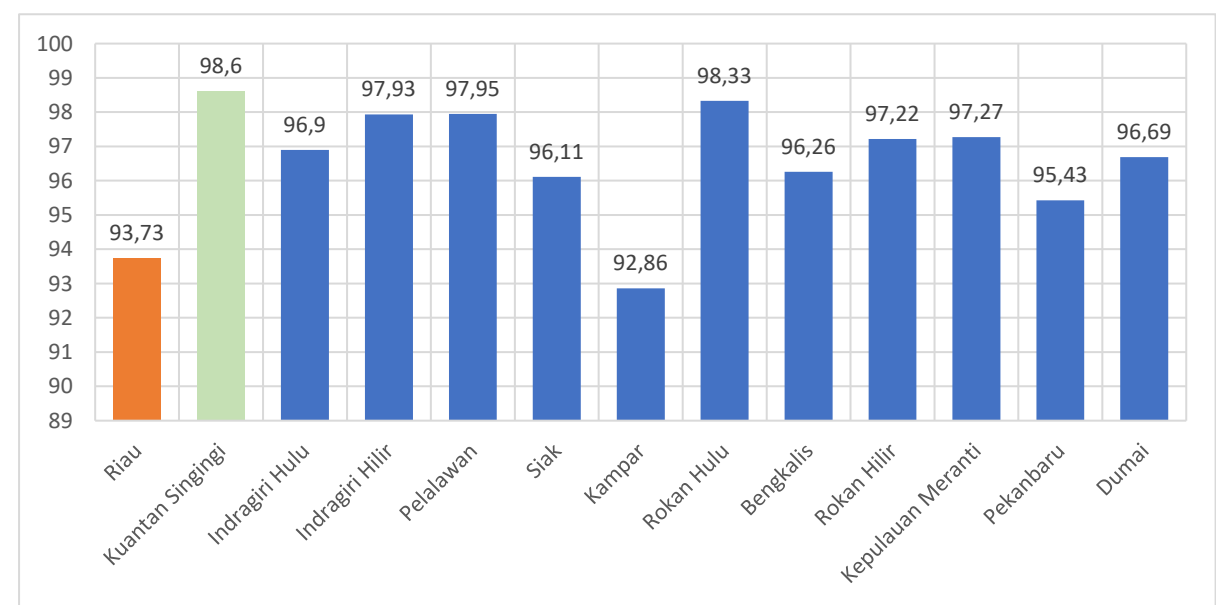
Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah (Pemda) merupakan upaya penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pengembangan ini tetap diperlukan, baik bagi daerah dengan status kinerja yang masih rendah maupun daerah dengan kinerja yang sudah baik, agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat.

Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah harus dilihat sebagai satu kesatuan proses yang berkaitan erat dengan kewajiban Kepala Daerah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai alat untuk proses Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri terhadap Kabupaten Kuantan Singingi menjadi dasar penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian hasil evaluasi dari penilaian Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2022, diperoleh skor 2,34 dengan status kinerja rendah. Selain itu, pada indikator ke-5, Skor LPPD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022 adalah sebesar 78%, sedangkan untuk tahun 2023 masih dalam tahap penyusunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi masih perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi yang ada.

II.4.1.6 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei ini digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Sumber: Badan Pusat Statistik
Grafik II.65 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024

Berdasarkan data IPAK tahun 2024, Kabupaten Kuantan Singingi mencatat skor tertinggi di Provinsi Riau dengan nilai 98,60. Posisi ini menempatkan Kuantan Singingi di atas seluruh kabupaten/kota lainnya maupun di atas rata-rata provinsi. Sebagai perbandingan, IPAK Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 93,73, sementara kabupaten/kota lainnya memiliki nilai di bawah Kuantan Singingi, seperti Rokan Hulu (98,33), Pelalawan (97,95), Indragiri Hilir (97,93), dan Indragiri Hulu (96,90). Nilai terendah dicatat oleh Kabupaten Kampar dengan skor 92,86.

Capaian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tingkat korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sangat baik dan berada pada kategori “sangat bersih dari korupsi”. Keberhasilan ini merupakan modal penting untuk mendukung terciptanya Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta memperkuat upaya reformasi birokrasi di daerah. Posisi Kuantan Singingi yang unggul dalam IPAK tidak hanya menunjukkan hasil nyata dari implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih, tetapi juga menjadi teladan bagi daerah lain di Provinsi Riau dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

II.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

II.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Sepanjang periode 2020–2024, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 hanya terdapat 2 Perda yang disahkan. Jumlah ini meningkat bertahap, dengan 5 Perda pada 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebanyak 8 Perda. Tren kenaikan jumlah Perda ini mencerminkan adanya dinamika pembangunan daerah yang membutuhkan regulasi baru atau penyesuaian aturan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. Peningkatan jumlah Perda juga mengindikasikan semakin tingginya perhatian pemerintah

daerah terhadap upaya penegakan hukum dan perlindungan kepentingan publik melalui perangkat hukum yang formal.

Tabel II.53 Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tahun Perda	Jumlah	Ket
1	2020	2	
2	2021	3	
3	2022	5	
4	2023	2	
5	2024	8	

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2025

Jumlah Peraturan Bupati (Perbup) yang diterbitkan juga menunjukkan dinamika yang menarik. Tahun 2020 diterbitkan 72 Perbup, lalu meningkat menjadi 78 pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan menjadi 70 pada 2022 dan mencapai titik terendah 41 pada 2023 sebelum kembali naik menjadi 56 Perbup pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya penyesuaian dan efisiensi dalam penyusunan regulasi pelaksana di tingkat daerah. Penurunan tajam pada 2023 mungkin menandakan evaluasi atau restrukturisasi regulasi agar lebih efektif dan adaptif, kemudian disusul oleh penerbitan Perbup baru yang relevan pada 2024.

Tabel II.54 Jumlah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tahun Perbup	Jumlah
1	2020	72
2	2021	78
3	2022	70
4	2023	41
5	2024	56

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2025

Penerbitan Keputusan Kepala Daerah (SK) juga memperlihatkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 diterbitkan 291 SK, turun menjadi 237 pada 2021, lalu melonjak cukup signifikan menjadi 320 pada 2022 dan 341 pada 2023. Jumlah SK yang cukup tinggi menandakan responsifnya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebutuhan administrasi pemerintahan, baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, maupun kebijakan-kebijakan strategis yang memerlukan penetapan khusus.

Tabel II.55 Jumlah Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tahun SK	Jumlah	Ket
1	2020	291	
2	2021	237	
3	2022	320	
4	2023	341	
5	2024	400	

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2025

Pencapaian aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan peningkatan yang sangat baik selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian aksi HAM berada pada angka 77,06%, dan terus naik secara konsisten hingga mencapai 89,03% pada tahun 2024. Kenaikan ini merefleksikan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi, melindungi, dan memajukan hak-hak dasar masyarakat. Peningkatan capaian aksi HAM juga menunjukkan adanya penguatan sistem perlindungan dan pemenuhan hak warga, baik melalui kebijakan, layanan publik, maupun regulasi yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu HAM.

Tabel II.56 Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2020–2024

No	Tahun	Persentase Capaian Aksi Ham
1	2020	77,06
2	2021	77,08
3	2022	79,09
4	2023	86,02
5	2024	89,03

Sumber : *Bagian Hukum Setda, 2025*

Seluruh data di atas saling terkait dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, responsif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peningkatan jumlah Perda, Perbup, dan SK menandakan adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan daerah. Kebijakan-kebijakan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program, pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Di sisi lain, peningkatan persentase capaian aksi HAM merupakan hasil dari implementasi regulasi dan kebijakan yang semakin baik, sekaligus cerminan efektivitas penguatan sistem hukum dan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan demokrasi substantif.

Dengan demikian, harmonisasi antara penyusunan regulasi, pelaksanaan keputusan strategis, dan pemajuan aksi HAM menjadi landasan penting dalam membangun daerah yang aman, demokratis, dan berkeadilan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat mekanisme penegakan hukum, serta memperluas akses dan perlindungan hak asasi masyarakat untuk mendukung terwujudnya keamanan nasional dan demokrasi yang substansial.

II.4.2.2 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan tidak menyimpang dari politik Indonesia ideologi bangsa. Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri merumuskan pengukuran IDI.

IDI diukur khusus untuk Indonesia sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit analisisnya negara. IDI 2009 2020 telah menjadi rujukan pembangunan politik nasional dan daerah. IDI memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil. Sejak tahun 2021 perhitungan IDI menggunakan metoda baru tetap menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Aspek yang dinilai dengan metoda baru yaitu : Aspek 1. Kebebasan dengan 7 indikator; Aspek 2. Kesetaraan dengan 7 indikator; Aspek 3. Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan 8 indikator.

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023 berkisar dengan kategori sedang memiliki nilai berkisar antara 60-80. Capaian IDI Provinsi Riau tahun 2023 mengalami kenaikan 1,91 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan karena naiknya penilaian pada aspek kesetaraan. Pada aspek kesetaraan,

indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan merupakan indikator dengan skor tertinggi di Provinsi Riau. Secara rinci perkembangan IDI Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.57 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau	75,21	76,86	75,66	73,64	75,55
Kebebasan	85,15	86,08	-	-	-
Hak-hak Politik	61,68	65,40	-	-	-
Lembaga Demokrasi	84,19	83,48	-	-	-
Kebebasan	-	-	88,40	84,46	79,39
Kesetaraan	-	-	75,88	70,53	80,13
Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	-	62,83	66,69	66,30
Peringkat Nasional	22	11	19	29	26

Sumber : RPJMD Provinsi Riau, 2025

II.4.2.3 Indeks Rasa Aman

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Beberapa dimensi pengukuran indeks rasa aman dapat dilihat melalui: (a) dimensi perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan; (b) dimensi pemenuhan kesejahteraan sosial; (c) dimensi keamanan dan kekerasan. Untuk proporsi penduduk Provinsi Riau Tahun 2014 – 2020 yang merasa aman di area tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Pada periode tahun 2020 secara umum, persepsi rasa aman di banyak daerah termasuk Provinsi Riau mengalami penurunan rasa aman. Tingkat proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian ini selaras dengan indeks kriminalitas. Turunnya persentase warga yang merasa aman saat berjalan sendiri termasuk di Provinsi Riau dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi dari media massa yang memunculkan asosiasi dengan kejadian kejadian sebelumnya;
- b. Meningkatnya kejahatan di tempat umum yang sifatnya menyerang
- c. Pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi di masa kini

Tabel II.58 Jumlah Kriminalitas Kabupaten Kuantan Singingi 2021–2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan	268	308	308	486
Rasio Penduduk Terkena Kejahatan Per 100.000 Penduduk	4	5	5	137

Sumber : Provinsi Riau dalam angka, 2025

II.4.2.4 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

- a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam rangka menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dengan menjaga ketertiban dan ketentraman umum, berikut tingkat penyelesaian pelaksanaan K3 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021–2024.

Tabel II.59 Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan K3 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2024

Jenis Pelanggaran	2021		2022		2023		2024	
	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian
I. Pelanggaran K3**								
1) Perjudian	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Kenakalan Remaja	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Curanmor	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Narkotika	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Kecelakaan	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Balapan Liar	411	411	12	12			32	32
8) Perilaku Berpasang-pasangan	73	73	205	205			122	122
9) Pedagang Kaki Lima (PKL)	44	44	103	103	156	156	117	117
10) Penertiban Reklame	0	0	0	0			3	3
II. Kasus Pertikaian Antar Warga*								
1) Antar Etnis	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Antar Wilayah Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Antar Agama	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Antar Simpatisan Parpol	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Korban Pertikaian Antar Warga*								
1) Korban Meninggal	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Korban Luka-Luka	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pekat								
1. Judi	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Narkoba	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Miras	45	45	0	0	221	221	10	10
4. Seks bebas	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tindakan kriminal lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Unjuk Rasa								
1). Jumlah Kasus Unjuk Rasa*	0	0	1	1	0	0	0	0
2). Sengketa Pengusaha dan Pekerja*	0	0	0	0	2	2	0	0
VII. Jumlah Tindak Yutisi/Non Yustisi*								
1). Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	5	5	4	4	5	5	26	26
2). Jumlah Penyelesaian Perda	5	5	4	4	5	5	26	26

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Selama tahun 2024 terjadi sebanyak 336 jumlah pelanggaran atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran yang terjadi didominasi oleh penyakit masyarakat (PEKAT) yaitu sebanyak 204 pelanggaran. Dari 336 pelanggaran yang mengganggu K3 mampu diselesaikan 100% melalui peringatan dan pembinaan.

II.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan daerah, bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, mengembangkan hubungan konstruktif antarwilayah dan antarnegara, serta memperkuat posisi dan pengaruh Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Pada

level daerah, ketangguhan ini tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam membangun daya saing, beradaptasi terhadap tantangan global, serta menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

II.4.3.1 Daya saing Daerah

Tabel II.60 Indikator Indeks Daya Saing Daerah

No	Tahun	Indeks Daya Saing Daerah
1	2020	0,20
2	2021	0,48
3	2022	2,86
4	2023	2,83
5	2024	3,26

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Indikator Indeks Daya Saing Daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kemampuan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi persaingan, baik di tingkat nasional maupun kawasan. Berdasarkan data yang tersedia, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks ini baru berada di angka 0,2035. Namun di tahun 2021 indeks berada di angka 0,48, dan terjadi lonjakan signifikan menjadi 2,86 pada tahun 2022, terus meningkat menjadi 2,83 pada tahun 2023, dan mencapai 3,26 pada tahun 2024.

Peningkatan indeks ini mencerminkan upaya konsisten Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam memperkuat fondasi daya saing melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Kenaikan indeks juga menandakan bahwa daerah semakin mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin kompleks, serta siap menjalin kerjasama dan membangun posisi tawar yang lebih baik di tingkat kawasan.

Meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, capaian ini menjadi pondasi penting bagi Kuantan Singingi dalam memperluas jejaring diplomasi daerah, meningkatkan daya tarik investasi, serta memperjuangkan kepentingan lokal yang selaras dengan agenda nasional dan global. Ke depan, konsistensi dalam memperkuat inovasi, kolaborasi, dan integrasi kebijakan akan menjadi kunci untuk terus meningkatkan daya saing dan memastikan daerah mampu menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di era kompetisi kawasan yang semakin terbuka.

II.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

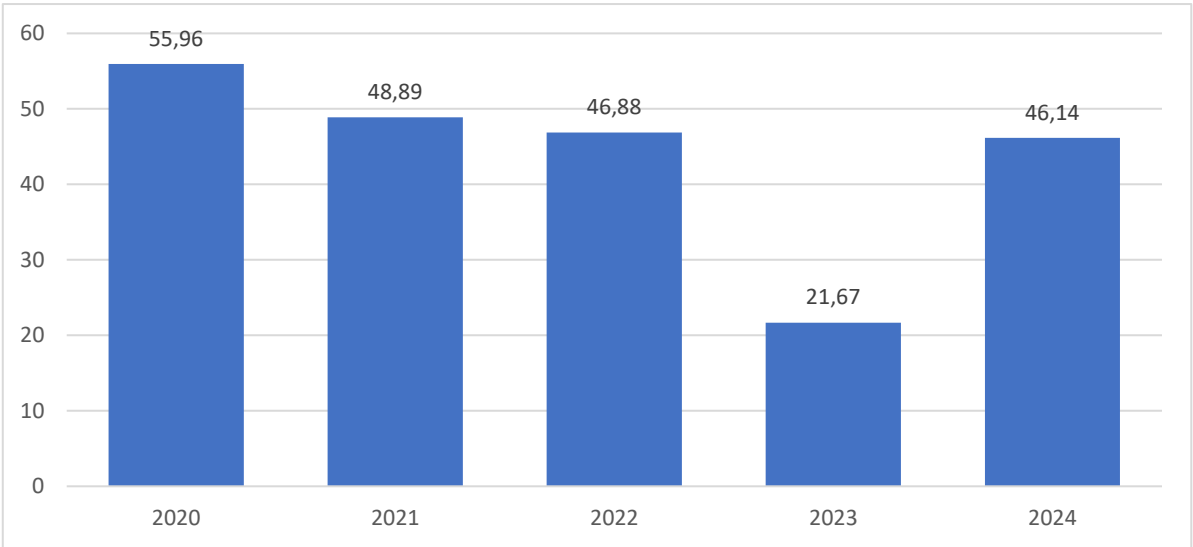
II.4.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

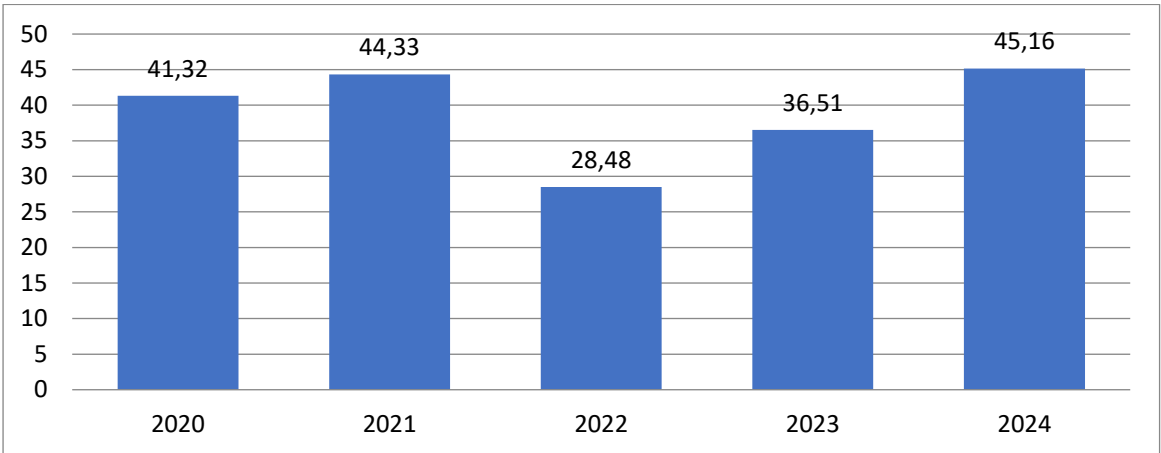
a) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sejak dini. Berdasarkan tren capaian APK dan APM PAUD selama periode 2020–2024, terlihat bahwa tingkat partisipasi anak usia dini mengalami dinamika yang cukup signifikan. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan akses, terdapat tantangan pada aspek keberlanjutan partisipasi dan pemerataan layanan PAUD. Penurunan yang cukup tajam pada capaian APK dan APM pada beberapa tahun tertentu mengindikasikan adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan sarana prasarana, perubahan pola sosial ekonomi masyarakat, serta dampak pandemi yang mengurangi tingkat kehadiran dan partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD. Namun, tren peningkatan kembali pada tahun 2024 dengan nilai APK sebesar 46,14%. Hal ini mencerminkan adanya

perbaikan intervensi, baik dari sisi kebijakan pemerintah daerah, peningkatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD, maupun dukungan fasilitas pendidikan.



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.66 Capaian APK PAUD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.67 Capaian APM PAUD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Berdasarkan data capaian Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, APM PAUD tercatat sebesar 41,32 % dan meningkat menjadi 44,33% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 capaian tersebut menurun hingga 28,48 %, sebelum kembali meningkat menjadi 36,51 % pada tahun 2023, dan mencapai 45,16 % pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk mendorong perluasan jangkauan layanan, peningkatan kompetensi pendidik, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai. Dukungan kolaboratif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga terus diperkuat agar setiap anak usia dini dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs

Capaian APK pada jenjang SD/MI di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif terjaga, meskipun terdapat fluktuasi. Secara umum, tingkat partisipasi sekolah dasar tetap tinggi, bahkan melampaui 100%, yang mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan dasar. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sebagian anak usia di luar kelompok 7–12 tahun tetap mengikuti pendidikan SD/MI, serta adanya indikasi arus siswa dari luar daerah yang bersekolah di wilayah Kuantan Singingi. Stabilitas APK ini menegaskan bahwa akses pendidikan dasar di daerah telah terdistribusi

dengan baik, meskipun peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan tetap menjadi tantangan.

Tabel II.61 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

N o	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	40.733	40.761	41.154	41.042	40.716
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	39.629	40.464	40.434	40.705	46.592
3	APK SD/MI	102,79	100,73	105,54	100,82	96,99

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada jenjang SMP/MTs, tren APK menunjukkan pola yang sempat menurun di periode awal namun kembali menguat pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan partisipasi pada tingkat menengah pertama mengindikasikan adanya keberhasilan intervensi kebijakan seperti program beasiswa, perluasan sarana pendidikan, dan penguatan transisi dari SD/MI ke SMP/MTs. Meskipun demikian, tantangan berupa kesenjangan akses di daerah terpencil, ketersediaan tenaga pendidik, serta motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan masih perlu diatasi untuk menjaga momentum perbaikan ini.

Tabel II.62 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

N o	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	17.368	17.775	17.788	13.730	19.214
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	19.502	19.898	20.217	20.603	21.079
3	APK SMP/MTs	89,06	89,69	92,87	95,1	95,85

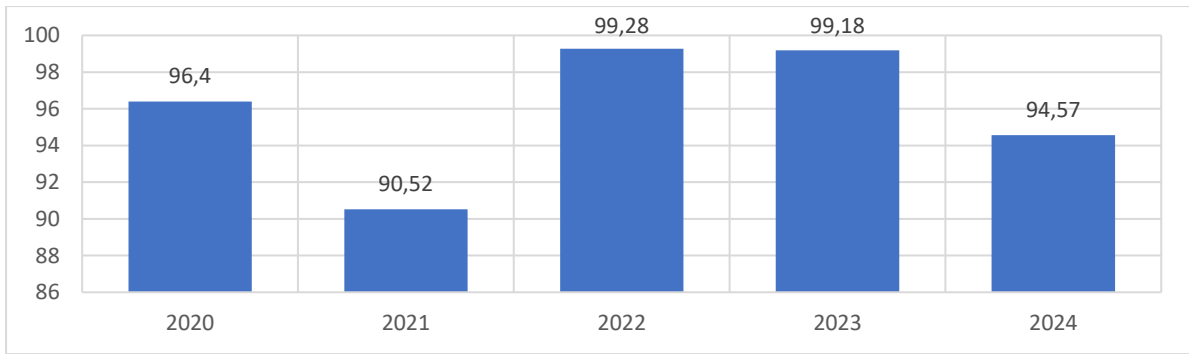
Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Secara keseluruhan, data APK SD/MI dan SMP/MTs menegaskan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi memiliki akses pendidikan dasar dan menengah yang cukup baik, namun memerlukan strategi berkelanjutan untuk meningkatkan pemerataan kualitas dan mengurangi hambatan partisipasi, sehingga semua anak dapat memperoleh kesempatan belajar secara optimal.

c) Angka Partisipasi Murni

1. APM SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan dinamika yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan pada periode tertentu, tingkat APM yang berada mendekati atau di atas 99% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah terakomodasi dalam pendidikan dasar. Hal ini mencerminkan ketersediaan akses pendidikan dasar yang cukup merata, serta adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah dasar bagi anak usia wajib belajar.

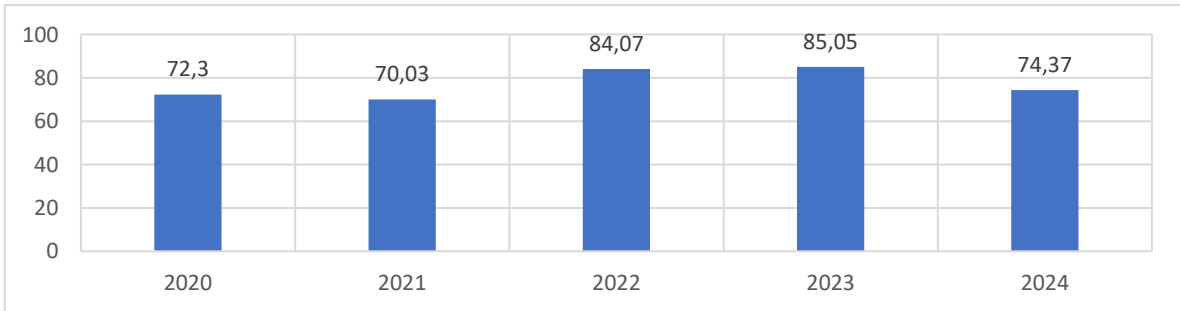


Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
 Grafik II.68 Capaian APM SD/MI/Paket A Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Fluktuasi APM lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk usia sekolah dibandingkan dengan kapasitas sekolah atau ketersediaan peserta didik. Kondisi ini menegaskan bahwa secara umum, Kabupaten Kuantan Singingi sudah berhasil mencapai tingkat partisipasi murni yang sangat baik, meskipun tantangan terkait pemerataan kualitas dan daya tampung sekolah di wilayah tertentu masih perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut.

2. APM SMP/MTs/Paket B

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 APM tercatat sebesar 72,3 persen, sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 70,03 persen, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 84,07 persen dan 85,05 persen, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 74,37 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama, capaian tersebut masih belum stabil sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang berkesinambungan, baik melalui pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, maupun dukungan program strategis daerah di bidang pendidikan.



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
 Grafik II.69 Capaian APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Rendahnya APM di tingkat menengah pertama dapat dikaitkan dengan faktor transisi dari pendidikan dasar ke menengah, termasuk tantangan ekonomi keluarga, jarak ke sekolah, serta ketersediaan sarana pendidikan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan APM di tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu memprioritaskan kebijakan yang langsung menyentuh aspek pemerataan akses, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyediaan alternatif pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan paket B sebagai jalur pendidikan setara SMP/MTs.

d) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap

jenjang sekolah. Dengan demikian naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak- anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel II.63 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kuantan Singingi

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	2020	2021	2022	2023	2024
APS SD/MI (%)	97,06	90,52	99,87	99,67	99,67
APS SMP/MTs (%)	82,48	70,03	98,51	98,58	98,57

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang relatif tinggi, khususnya pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pada jenjang SD/MI, APS selalu berada di atas 90% bahkan mendekati 100% sejak tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah terakomodasi dalam pendidikan formal. Fluktuasi kecil yang terjadi pada tahun 2021 (90,52%) segera diikuti perbaikan signifikan pada tahun berikutnya sehingga tidak menimbulkan masalah berarti dalam pemerataan akses pendidikan dasar. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs, APS sempat turun pada tahun 2021 (70,03%), namun kemudian meningkat tajam hingga mencapai 98,58% pada tahun 2023 dan tetap tinggi pada tahun 2024 (98,57%). Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan peningkatan transisi lulusan SD/MI ke pendidikan menengah pertama, sekaligus menunjukkan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan lanjutan.

Stabilitas APS ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi relatif merata, baik di tingkat dasar maupun menengah, berkat keberlanjutan program wajib belajar, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Namun, untuk mencapai partisipasi 100%, masih diperlukan perhatian terhadap kelompok anak yang berpotensi putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Upaya pemetaan siswa dan intervensi berbasis kebutuhan lokal menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian APS secara berkelanjutan.

Tabel II.64 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid usia 7-12 thn	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	Jumlah murid usia 13-15 thn	Jumlah penduduk usia 13-15 thn	APS
1	Hulu Kuantan	1125	1271	88,51	388	561	69,16
2	Kuantan Mudik	3081	3243	95,00	1194	1423	83,91
3	Gunung Toar	1381	1757	78,60	763	767	99,48
4	Kuantan Tengah	6516	7115	91,58	3418	3334	102,52
5	Benai	1773	2099	84,47	766	936	81,84
6	Pangean	2132	2555	83,44	944	1102	85,66
7	Logas Tanah Darat	3165	3760	84,18	1086	1749	62,09
8	Kuantan Hilir	1722	1732	99,42	792	788	100,51
9	Inuman	1745	2142	81,47	718	936	76,71
10	Cerenti	1897	2318	81,84	949	981	96,74
11	Singingi	4161	4877	85,32	1744	2233	78,10
12	Singingi Hilir	6028	6614	91,14	2284	3036	75,23
13	Kuantan Hilir Seberang	1215	1210	100,41	407	532	76,50
14	Sentajo Raya	3152	3932	80,16	2184	1880	116,17
15	Pucuk Rantau	1623	1967	82,51	453	821	55,18
Jumlah		40.716	46.592	87,39	18.090	21.079	85,82

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

APS tahun 2024 untuk setiap Kecamatan dalam Kabupaten Kuantan Singingi terlihat dalam Tabel di atas. Kecamatan Kuantan Hilir tercatat memiliki APS SD/MI terbesar, sedangkan untuk APS SMP/MTs Kecamatan Sentajo Raya tertinggi. Kecamatan yang memiliki APS SD/MI yang terendah adalah Kecamatan Gunung Toar, dan APS SMP/MTs terendah adalah Kecamatan Pucuk Rantau. Dari tabel di atas APS SD/MI dan APS SMP/MTs di bawah rata-rata APS Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk meningkatkan nilai APS Kabupaten Kuantan Singingi serta Kecamatan-Kecamatan perlu ditingkatkan program wajib belajar 9 tahun.

e) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat rendah, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun sempat terjadi lonjakan pada tahun 2021, kondisi ini berhasil dikendalikan dengan cepat sehingga angka putus sekolah kembali menurun secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Pencapaian ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pendidikan, termasuk melalui program bantuan pendidikan, penguatan pendampingan bagi keluarga kurang mampu, serta dukungan fasilitas belajar di wilayah pedesaan.

Tabel II.65 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kerja	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	SD/MI	0,0032	0,334	0,052	0,001	0,001
2.	SMP/MTs	0,0112	1,305	0,026	0,003	0,003

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada jenjang SD/MI, tingkat putus sekolah yang nyaris nol mencerminkan keberhasilan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar. Sementara itu, di tingkat SMP/MTs, penurunan tajam angka putus sekolah setelah 2021 menunjukkan adanya intervensi kebijakan yang tepat sasaran, seperti beasiswa bagi siswa berisiko putus sekolah serta peningkatan akses ke sekolah menengah pertama.

Secara keseluruhan, kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi telah berhasil menekan angka putus sekolah hingga mencapai level yang sangat rendah, sekaligus menjadi indikator positif atas kinerja sektor pendidikan daerah. Namun, pemantauan berkelanjutan dan penyediaan dukungan sosial-ekonomi tetap diperlukan untuk memastikan tidak munculnya kembali potensi siswa putus sekolah, terutama di kalangan masyarakat rentan.

f) Angka Kelulusan

Angka kelulusan, menggambarkan persentase kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti Ujian Nasional setiap tahunnya. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II.66 Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No.	Indikator Kerja	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	SD/MI	100	100	100	100	100
2.	SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Angka kelulusan tingkat SD/MI dan SMP/MTs 2020-2024 angka kelulusam mencapai 100% pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, hal ini memberikan indikasi bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar sudah membaik pada tahun 2020–2024. Kegiatan *try out* ujian akhir sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs menjadi prioritas tahun 2025 dalam upaya mempertahankan angka kelulusan.

g) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa mayoritas lulusan SD/MI telah melanjutkan ke SMP/MTs, dan sebagian besar lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

Tabel II.67 Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

No	Indikator Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	SD/MI	93,39	95,9		104,6	101,51
2.	SMP/MTs	92,68	98,43		95,1	91,15

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi, 2025

Meskipun sempat mengalami kenaikan pada 2021, angka ini menunjukkan fluktuasi, khususnya pada transisi SMP/MTs ke SLTA. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan program beasiswa, perluasan akses pendidikan, serta dukungan sarana dan prasarana untuk memastikan keberlanjutan pendidikan di seluruh jenjang.

h) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan, khususnya bangunan sekolah merupakan sarana utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah, jika bangunan sekolah dalam kondisi layak, aman dan nyaman membuat siswa akan belajar dengan baik, sehingga kualitas penyelenggaraan

pendidikan akan semakin baik dari tahun ke tahun. Berikut tabel bangunan sekolah dalam kondisi baik di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024.

Tabel II.68 Bangunan Sekolah Kondisi Baik di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Indikator Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
1.	SD/MI	242	246	205	210	215
2.	SMP/MTs	70	72	68	65	69

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada periode tahun 2020-2021 bangunan sekolah kondisi baik di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2022 kondisi ini mengalami penurunan, pada tahun 2023 hingga 2024 kembali mengalami peningkatan dimana bangunan dalam kondisi baik tingkat SD/MI tahun 2024 sebanyak 215 Unit dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 69 Unit.

i) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Kuantan Singingi relatif stabil dengan tren sedikit meningkat selama 2020–2024. Pada tahun 2024, terdapat 285 unit sekolah dengan rasio 0,007, yang berarti tersedia sekitar 70 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk usia 7–12 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas sekolah dasar sudah cukup untuk menampung peserta didik, meskipun perlu upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan pertumbuhan jumlah anak usia sekolah dengan ketersediaan sarana pendidikan, mengingat proyeksi peningkatan penduduk usia sekolah dasar yang terus terjadi setiap tahunnya.

Tabel II.69 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	276	279	279	283	285
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	32.794	39.629	40.464	40.434	40.446
1.3	Rasio	0,0084	0,007	0,0069	0,007	0,007

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

j) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Ketersediaan sekolah SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi dalam periode 2020–2024 relatif stabil dengan sedikit fluktuasi pada rasio ketersediaan. Setelah mengalami penurunan pada 2022, rasio kembali meningkat pada 2023, meskipun dengan kenaikan yang sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah gedung SMP/MTs belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia 13–15 tahun yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penambahan unit sekolah di wilayah dengan rasio terendah, seperti Kecamatan Pucuk Rantau, serta optimalisasi fasilitas di kecamatan dengan tingkat ketersediaan yang masih rendah agar akses pendidikan menengah pertama dapat terdistribusi secara merata.

Tabel II.70 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP/MTs					
1.1	Jumlah gedung sekolah	106	107	108	108	111

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	19.743	19.502	19.188	20.217	20.603
1.3	Rasio	0,0054	0,0055	0,0054	0,0053	0,0054

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Ketersediaan sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antar kecamatan. Beberapa kecamatan masih memiliki rasio sekolah yang rendah, yang mengindikasikan perlunya penambahan ruang belajar agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kondisi ini paling terlihat di wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang tinggi, dimana kapasitas sekolah belum sebanding dengan kebutuhan. Sebaliknya, beberapa kecamatan dengan rasio yang lebih baik menunjukkan distribusi sarana pendidikan yang lebih memadai, namun tetap memerlukan penguatan kualitas sarana dan prasarana. Secara keseluruhan, pembangunan sekolah baru atau ruang kelas tambahan menjadi langkah prioritas untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel II.71 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
-1	-2	-3	-4	(5=4/3)	-6	-7	(8=7/6)
1	Kuantan Mudik	22	3243	147,41	6	1423	237,17
2	Hulu Kuantan	9	1271	141,22	3	561	187,00
3	Gunung Toar	13	3243	249,46	4	767	191,75
4	Pucuk Rantau	7	1967	281,00	4	821	205,25
5	Singingi	21	4877	232,24	9	2233	248,11
6	Singingi Hilir	25	6614	264,56	8	3036	379,50
7	Kuantan Tengah	34	7115	209,26	9	3334	370,44
8	Sentajo Raya	22	3932	178,73	7	1880	268,57
9	Benai	18	2099	116,61	5	936	187,20
10	Kuantan Hilir	14	1732	123,71	4	788	197,00
11	Pangean	19	2555	134,47	6	1102	183,67
12	Logas Tanah Darat	17	3760	221,18	5	1749	349,80
13	Kuantan Hilir Seberang	10	1210	121,00	2	532	266,00
14	Cerenti	12	2318	193,17	3	981	327,00
15	Inuman	16	2142	133,88	5	936	187,20
JUMLAH		259	48.078	2747,90	80	21079	3785,66

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Rasio gedung sekolah dengan penduduk usia SD/MI tahun 2024 paling kecil adalah Kecamatan Pucuk Rantau, sedangkan yang paling besar Kecamatan Benai, sedangkan rasio gedung sekolah dengan penduduk usia SMP/MTs yang paling kecil adalah kecamatan Singingi Hilir dan yang paling besar kecamatan Benai, jadi kebijakan pembangunan Gedung Sekolah baik di tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs agar diperhatikan data di atas.

k) Rasio Guru dan Murid

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah guru pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 3.522 orang, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 3.671 orang. Sementara itu, pada jenjang SLTP/MTs jumlah guru menurun menjadi 1.995 orang dibandingkan 2.076 orang pada tahun sebelumnya.

Jumlah murid pada jenjang SD/MI di tahun 2024 mencapai 40.176 orang, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 41.042 orang. Sebaliknya, pada jenjang SLTP/MTs jumlah murid mengalami kenaikan menjadi 19.214 orang dibandingkan 17.906 orang pada tahun sebelumnya.

Dari sisi rasio, murid per sekolah SD/MI meningkat menjadi 7,1 dari 6,92 pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya penambahan jumlah murid rata-rata per sekolah. Namun, rasio murid per sekolah SLTP/MTs justru menurun menjadi 5,8 dari 6,2 pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, rasio murid per guru di jenjang SD/MI relatif stabil di angka 0,09, sama dengan tahun 2023. Pada jenjang SLTP/MTs, rasio murid per guru juga tidak banyak berubah, yaitu 0,10 pada 2024 dibandingkan 0,11 pada tahun 2023.

Dari sisi ketersediaan sekolah, jumlah SD/MI meningkat tipis menjadi 285 sekolah dari 284 sekolah pada tahun 2023. Sementara itu, data SLTP/MTs untuk 2024 tampak tidak konsisten karena tercatat 3.522 sekolah, kemungkinan merupakan kesalahan input, mengingat tahun 2023 jumlahnya hanya 111 sekolah.

Tabel II.72 Jumlah Sekolah,Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020–2024 di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
I	Jumlah Guru					
1	SD/MI	3.140	3.217	3.508	3.671	3.522
2	SLTP/MTs	2.011	2.097	1.988	2.076	1.995
II	Jumlah Murid					
1	SD/MI	40.733	40.761	41.154	41.042	40.176
2	SLTP/MTs	18.109	17.775	17.788	17.906	19.214
III	Rasio Murid Sekolah					
1	SD/MI	6,85	6,84	6,88	6,92	7,1
2	SLTP/MTs	5,91	6,08	6,07	6,2	5,8
IV	Rasio Murid Guru					
1	SD/MI	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09
2	SLTP/MTs	0,11	0,12	0,11	0,11	0,1
V	Jumlah Sekolah					
1	SD/MI	279	279	283	284	285
2	SLTP/MTs	107	108	108	111	3.522

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Secara umum, rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Kuantan Singingi telah berada dalam kondisi yang sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2008. Capaian ini mencerminkan bahwa ketersediaan guru baik di SD/MI maupun SMP/MTs relatif memadai. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan terus melakukan penguatan kebijakan pemerataan distribusi guru dan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar. Upaya ini dilakukan untuk menjaga rasio ideal guru dan murid di seluruh wilayah, termasuk daerah khusus, sehingga setiap peserta didik memperoleh hak pendidikan yang layak dan berkualitas.

Tabel berikut memperlihatkan perbandingan rasio guru dan murid jenjang pendidikan dasar Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024, keseluruhan Kecamatan telah memiliki rasio guru dan

murid yang ideal (menurut PP nomor 78 tahun 2008), walaupun masih ada beberapa Kecamatan yang rasio guru dan murid mendekati batas ideal.

Tabel II.73 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Benai	220	1773	8,06	109	767	7,04
2	Cerenti	175	1897	10,84	87	1619	18,61
3	Gunung Toar	154	1381	8,97	117	770	6,58
4	Inuman	195	1745	8,95	97	795	8,20
5	Hulu Kuantan	118	1125	9,53	59	718	12,17
6	Kuantan Hilir	155	1722	11,11	84	792	9,43
7	Kuantan Hilir Seberang	106	1215	11,46	47	407	8,66
8	Kuantan Mudik	328	3080	9,39	162	1199	7,40
9	Kuantan Tengah	538	6516	12,11	325	3426	10,54
10	Logas Tanah Darat	222	3146	14,26	126	1095	8,69
11	Pangean	260	2132	8,20	138	946	6,86
12	Pucuk Rantau	109	1623	14,89	57	456	8,00
13	Sentajo Raya	258	3152	12,22	215	2186	10,17
14	Singingi	263	4161	15,82	183	1746	9,54
15	Singingi Hilir	421	6028	14,32	189	2292	12,13
Jumlah		3.522	40.716	11,56	1.995	19.214	9,63

Sumber : - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

I. Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata Sekolah Dasar Dan Pendidikan Menengah

Tabel II.74 Rasio Guru/Murid per kelas di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

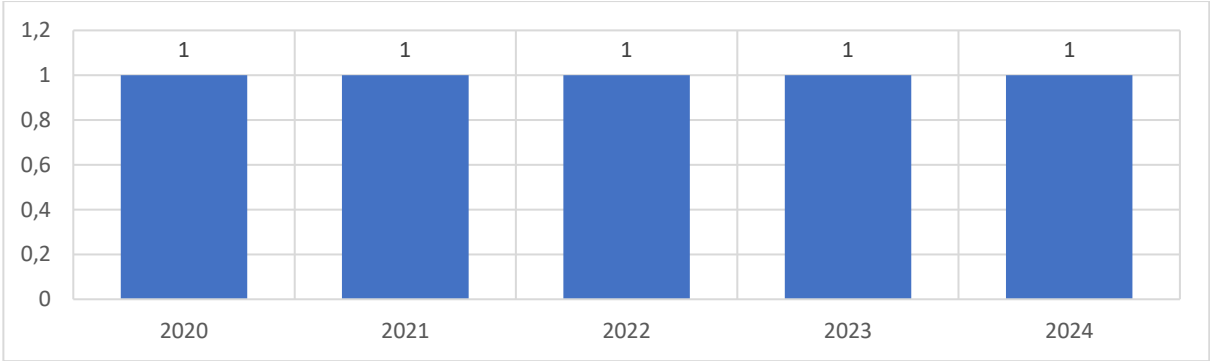
No	Indikator Kerja	2020 Unit	2021 Unit	2022 Unit	2023 Unit	2024 Unit
1.	SD/MI	01:21	01:18	01:20	01:19	01:20
2.	SMP/MTs	01:27	01:19	01:27	01:29	01:37

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Rasio guru dan murid menurut SPM pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 adalah setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

Dari data di atas pada tahun 2023 mengalami penurunan artinya perbandingan guru dan murid semakin membaik, namun pada tahun 2024 kembali meningkat.

2. Proporsi Murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar

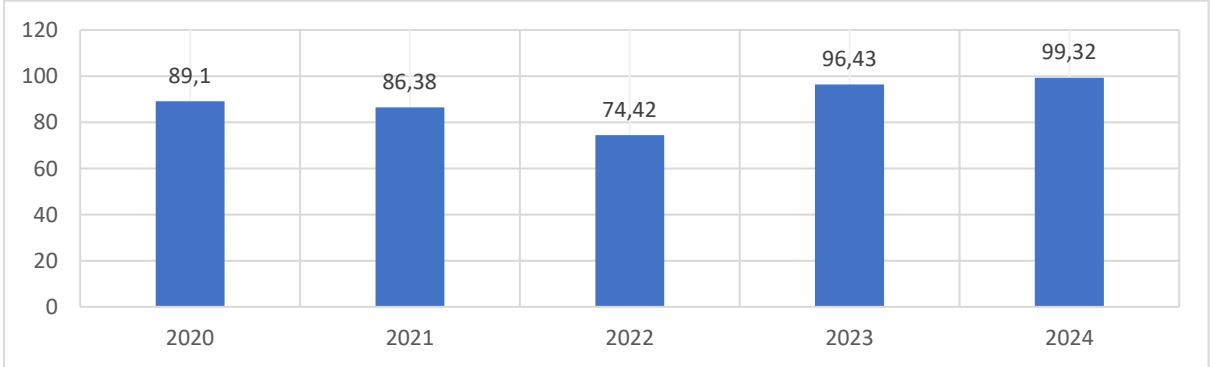


Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.70 Rasio Siswa Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

Dari gambar di atas dapat dilihat grafik rasio siswa kelas 1 yang berhasil menanamkan SD di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2017-2021, pada periode tahun 2020 menuju tahun 2024 konsisten 1.

3. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualitas penyelenggaraan salah satunya ditentukan oleh kualitas dan kualifikasi Guru sebagai ujung tombak pendidikan, berikut Angka Guru memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020- 2024.



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.71 Angka Guru memenuhi Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Kualifikasi guru S1/D-IV di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebesar 99,32%, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan kualifikasi guru berdasarkan kualitas semakin membaik.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan surat Mendkbudristek Dikti No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Rapor Pendidikan, Kabupaten Kuantan Singingi dapat memenuhi atau tercapai target sebanyak 8 (delapan) indikator, sedangkan 7 (tujuh) indikator belum terpenuhi, yaitu Kemampuan Numerasi (SMP), Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (PAUD), APS 7-15 Tahun (SD/SMP), APS Kesetaraan, Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (PAUD), Iklim Inklusivitas (SD) dan Iklim Inklusivitas (SMP), sebagaimana disajikan pada table 2.53 berikut:

Tabel II.75 Target dan Capaian Indikator SPM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023-2025

No	Indikator SPM	Target 2023	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2025
1	Kemampuan Literasi (SD)	52,34	54,06	67,54	71,02

No	Indikator SPM	Target 2023	Capaian 2023	Capaian 2024	Target 2025
2	Kemampuan Literasi (SMP)	65,25	65,91	81,28	83,79
3	Kemampuan Numerasi (SD)	38,96	42,56	55,85	51,76
4	Kemampuan Numerasi (SMP)	64,63	58,94	68,57	76,55
5	Angka Partisipasi Sekolah (5–6)	100	73,34	100	100
6	Angka Partisipasi Sekolah (7–15)	100	99,3	100	100
7	Angka Partisipasi Sekolah (7–18) Kesetaraan	100	5,11	100	100
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	52,05	44,95	52,05	52,08
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	54	68,23	69,43	70,23
10	Iklim Inklusivitas (SD)	57,78	53,69	59,93	62,08
11	Iklim Inklusivitas (SMP)	57,99	55,58	61,09	64,11
12	Iklim Keamanan (SD)	70,26	70,64	73,8	76,46
13	Iklim Keamanan (SMP)	69,06	70,06	72,4	75,13
14	Iklim Kebinekaan (SD)	68,83	70,55	71,32	75,98
15	Iklim Kebinekaan (SMP)	68,3	71,85	74,05	76,25

Sumber : Lampiran Surat Mendikbudristek No.5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024

5. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan kesetaraan di tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 7 lembaga pendidikan nonformal yang terdiri dari 1 SPNF milik pemerintah dan 6 PKBM yang dikelola yayasan. Keberadaan lembaga ini menjadi sarana penting dalam memperluas akses pendidikan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi guna meningkatkan mutu layanan pendidikan nonformal.

Tabel II.76 Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

NO	NAMA PKBM/SKB	NPSN	TAHUN BERDIRI	STATUS KEPEMILIKAN
1	Spnf Skb Kuantan Singingi	P9952712	2016	Pemerintah
2	Pkbm Cipta Mandiri	P2963217	2016	Yayasan
3	Pkbm Karya Mandiri	P9945699	2016	Yayasan
4	Pkbm Melati Jaya	P9945698	2016	Yayasan
5	Pkbm Alhikmah	P2963218	2017	Yayasan
6	Pkbm Fluent	P9984748	2018	Yayasan
7	Pkbm El Fayen	P9998925	2022	Yayasan

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi 2025.

Tabel II.77 Data Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Kesetaraan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Wilayah	PKBM			SKB			Jumlah Warga Belajar
		Tutor/ Pamong	Adm	Ketua	Tutor/ Pamong	Adm	Kepala Sekolah	
1	Kuantan Tengah	2	-	1	7	2	1	248
2	Singingi Hilir	9	-	1	-	-	-	38
3	Kuantan Mudik	-	-	-	-	-	-	23

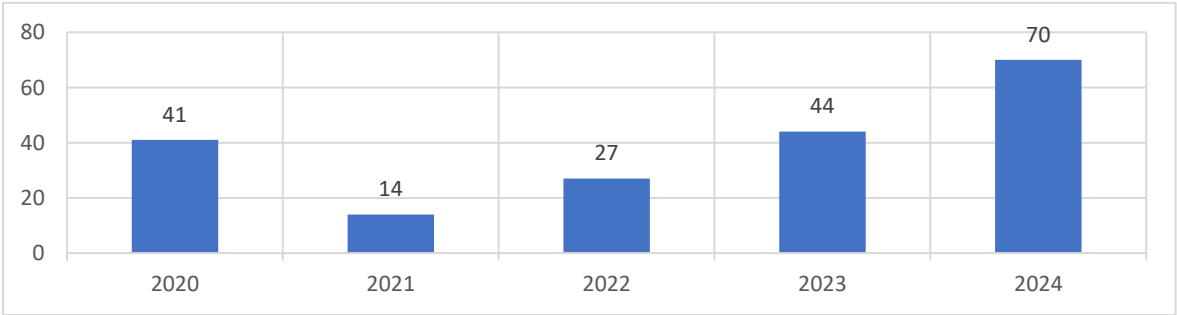
No	Wilayah	PKBM			SKB			Jumlah Warga Belajar
		Tutor/ Pamong	Adm	Ketua	Tutor/ Pamong	Adm	Kepala Sekolah	
4	Sentajo Raya	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangean	-	-	-	-	-	-	-
6	Singingi	5	2	1	-	-	-	-
7	Benai	-	-	-	-	-	-	-
8	Gunung Toar	4	2	1	-	-	-	-
9	Logas tanah Darat	-	-	-	-	-	-	-
10	Kuantan Hilir	-	-	-	-	-	-	329
11	Inuman	3	-	1	-	-	-	-
12	Cerenti	-	-	-	-	-	-	75
13	Hulu Kuantan	-	-	-	-	-	-	-
14	Kuantan hilir Seberang	-	-	-	-	-	-	-
15	Pucuk Rantau	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi 2025

2. Kesehatan

a) Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Kuantan Singingi dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Peningkatan signifikan pada tahun 2024 menunjukkan masih adanya tantangan dalam kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk akses terhadap fasilitas persalinan, tenaga medis terlatih, dan layanan kesehatan preventif.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.72 Jumlah kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020–2024

Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pelayanan kesehatan, terutama pada pelayanan persalinan, perawatan neonatal, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin. Penurunan jumlah kematian bayi dapat dicapai melalui intervensi strategis seperti peningkatan fasilitas kesehatan dasar, program edukasi ibu hamil, dan penguatan jejaring layanan kesehatan di tingkat desa dan kecamatan.

b) Jumlah Kematian Ibu

Penurunan Jumlah Kematian Ibu dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan adanya peningkatan efektivitas berbagai intervensi dan kebijakan yang telah dijalankan di bidang kesehatan ibu.

Tabel II.78 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2020–2024

NO	Tahun	Jumlah Kematian Ibu
1	2020	14
2	2021	11

3	2022	10
4	2023	8
5	2024	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Upaya seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, serta dukungan keluarga dan tenaga kesehatan yang kompeten telah memberikan dampak positif dalam menurunkan risiko kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Capaian ini sekaligus menjadi indikasi bahwa upaya bersama lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi telah berjalan secara progresif. Meski demikian, konsistensi dalam menjaga dan memperluas akses pelayanan kesehatan, serta optimalisasi penanganan komplikasi dan edukasi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas untuk memastikan target pembangunan kesehatan, khususnya dalam menekan AKI, dapat tercapai secara berkelanjutan di masa mendatang

c) Jumlah Kematian Balita

Jumlah kematian neonatal dan bayi di Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan peningkatan tajam pada 2023–2024, yang menandakan adanya tantangan pada pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sebagian besar kasus kematian tercatat di puskesmas-puskesmas dengan cakupan pelayanan tinggi seperti Teluk Kuantan, Cerenti, Lubuk Jambi, Kopah, dan Inuman, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan antar wilayah. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh faktor gizi ibu hamil, sanitasi lingkungan, keterlambatan rujukan, serta penyakit infeksi yang masih menjadi penyebab utama kematian bayi. Di sisi lain, minimnya Jumlah kematian balita di atas usia 1 tahun dapat menjadi indikasi keberhasilan intervensi kesehatan balita, namun juga perlu diantisipasi potensi under-reporting melalui penguatan sistem pelaporan kematian bayi dan audit maternal-perinatal. Upaya penurunan jumlah kematian neonatal dan bayi memerlukan intervensi yang komprehensif, seperti peningkatan layanan persalinan yang berkualitas, penguatan perawatan neonatal esensial, program gizi terpadu untuk mencegah stunting, peningkatan cakupan imunisasi, serta sistem rujukan darurat yang lebih efektif di seluruh kecamatan.

Tabel II.79 Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Puskesmas	2020			2021		
	Neonetal	Bayi	Balita	Neonetal	Bayi	Balita
Cerenti	2	0	2	1	1	1
Inuman	0	0	0	0	0	0
Baserah	0	0	0	2	2	2
Koto Rajo	7	0	7	0	0	0
Perhentian Luas	2	0	2	1	1	1
Sukaraja	1	0	1	0	0	0
Bumi Mulya	0	0	0	0	0	0
Pangean	3	0	3	0	0	0
Benai	1	0	1	1	1	1
Sentajo	1	0	1	0	0	0
Sentajo Raya	4	0	4	2	2	2
Teluk Kuantan	4	0	4	6	6	6
Kari	3	0	3	2	2	2
Kopah	5	0	5	2	2	2
Lubuk Jambi	5	0	5	4	4	4
Lubuk Ramo	0	0	0	0	0	0

Puskesmas	2020			2021		
	Neonetal	Bayi	Balita	Neonetal	Bayi	Balita
Lubuk Ambacang	3	1	4	1	1	1
Gunung Toar	2	0	2	0	0	0
Muara Lembu	1	0	1	1	1	1
Sungai Sirih	0	0	0	0	0	0
Sungai Keranji	0	0	0	1	1	1
Sungai Buluh	2	0	2	1	1	1
Koto Baru	1	0	1	0	0	0
Beringin Jaya	5	0	5	5	5	5
Pangkalan	0	0	0	2	2	2
JUMLAH	52	1	53	1	1	1

Puskesmas	2022			2023			2024		
	Neonetal	Bayi	Balita	Neonetal	Bayi	Balita	Neonetal	Bayi	Balita
Cerenti	2	2	0	5	5	0	1	7	0
Inuman	1	2	0	0	1	0	0	9	0
Baserah	1	1	0	3	3	0	0	7	0
Koto Rajo	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Perhentian Luas	2	2	0	1	1	0	0	2	0
Sukaraja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bumi Mulya	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Pangean	0	0	0	2	2	0	0	3	0
Benai	0	0	0	1	1	0	1	4	0
Sentajo	0	0	0	1	1	0	0	3	0
Sentajo Raya	0	1	0	1	2	0	0	2	0
Teluk Kuantan	1	2	0	4	4	0	0	3	0
Kari	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Kopah	1	1	0	0	0	0	0	3	0
Lubuk Jambi	0	3	0	3	5	0	0	4	0
Lubuk Ramo	1	1	0	0	0	0	0	4	0
Lubuk Ambacang	3	3	0	0	0	0	0	1	0
Gunung Toar	0	0	0	1	2	0	0	2	0
Muara Lembu	3	3	0	3	3	0	0	4	0
Sungai Sirih	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Sungai Keranji	1	1	0	0	2	1	0	0	0
Sungai Buluh	0	1	0	5	6	0	0	1	0
Koto Baru	1	1	0	3	5	3	0	1	0

Puskesmas	2022			2023			2024		
	Neonetal	Bayi	Balita	Neonetal	Bayi	Balita	Neonetal	Bayi	Balita
Beringin Jaya	0	0	0	1	1	0	0	1	0
Pangkalan	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JUMLAH	20	27	0	34	44	4	2	70	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

d) Rasio posyandu per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Jumlah Kematian Bayi (AKB), Jumlah kematian ibu (Ibu Hamil, melahirkan dan nifas);
2. Membudayakan NKKBS;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk Masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersumber daya Masyarakat. Penimbangan secara rutin di Posyandu dapat untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan bayi dan balita. Peningkatan gizi bayi dan balita di posyandu yang dilakukan oleh kader dapat berupa Penyuluhan tentang ASI, Status Gizi, MPASI, Imunisasi, pemberian Vit.A, serta stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita. Selain itu diharapkan ada strategi operasional yang dapat dilakukan di setiap Posyandu dengan melakukan analisa rasio jumlah posyandu terhadap jumlah bayi dan balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tumbuh kembang sejak dalam kandungan umur 2 tahun (Golden Period). Jumlah posyandu di Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 relatif stabil, meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 367 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah balita yang mencapai 27.581 jiwa, rasio posyandu terhadap balita berada pada angka 13,31, yang menunjukkan bahwa satu posyandu harus melayani rata-rata 13 balita dari setiap 1.000 balita.

Tabel II.80 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2020–2024 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu	384	384	384	384	367
2.	Jumlah Balita	28.893	23.551	25.801	30.574	27.581

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Rasio	13,29	16,31	14,88	12,56	13,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Tabel II.81 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Cerenti	16	1673	9,56
2	Inuman	26	823	31,59
3	Kuantan Hilir	18	721	24,97
4	Kuantan Hilir Seberang	15	661	22,69
5	Logas Tanah Darat	23	2057	11,18
6	Pangean	30	1049	28,60
7	Benai	15	2337	6,42
8	Sentajo Raya	29	2244	12,92
9	Kuantan Tengah	32	3924	8,15
10	Gunung Toar	36	757	47,56
11	Kuantan Mudik	25	2429	10,29
12	Hulu Kuantan	14	876	15,98
13	Singingi	24	3320	7,23
14	Singingi Hilir	35	4128	8,48
15	Pucuk Rantau	29	582	49,83
Jumlah		367	27581	13,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Beberapa kecamatan seperti Pucuk Rantau dan Gunung Toar memiliki rasio posyandu yang cukup baik karena jumlah posyandu relatif mencukupi untuk melayani balita, sedangkan Benai, Kuantan Tengah, dan Singingi menunjukkan rasio rendah yang menandakan keterbatasan akses layanan posyandu. Kondisi ini memerlukan optimalisasi distribusi posyandu, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan program penyuluhan gizi, imunisasi, pemberian vitamin A, dan stimulasi tumbuh kembang anak pada periode emas (golden period) agar kualitas kesehatan anak dapat terjaga secara merata di seluruh kecamatan.

e) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Rasio ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dan jumlah unit layanan yang tersedia, terutama pada tingkat Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu. Meskipun jumlah Puskesmas relatif stabil dari tahun 2020–2024, dengan rasio sekitar 0,07 per 1.000 penduduk, angka ini masih menunjukkan kebutuhan penambahan fasilitas di beberapa kecamatan yang padat penduduk, seperti Kuantan Tengah dan Pangean. Sebaliknya, Poliklinik mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan peningkatan jumlah pada 2022, namun menurun kembali pada 2024. Pustu memiliki rasio tertinggi dibandingkan fasilitas lain, tetapi distribusinya tidak merata di seluruh kecamatan, di mana ada kecamatan dengan rasio rendah yang berpotensi menghambat akses layanan kesehatan dasar.

Tabel II.82 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2020–2024 Kabupaten Kuantan Singingi

N o	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas	25	25	25	25	25

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah Poliklinik	33	19	50	46	43
3.	Jumlah Pustu	92	56	56	61	60
4.	Jumlah Penduduk	334.943	339.894	345.850	356.246	356.942
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,098	0,056	0,145	0,13	0,120
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,274	0,165	0,162	0,172	0,168

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Tabel II.83 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2024
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas Jumlah	Rasio	Poliklinik Jumlah	Rasio	Pustu Jumlah	Rasio
-1	-2	-3	-4	(5=4/3)	-6	(7=6/3)	-8	(9=8/3)
1	Hulu Kuantan	9941	1	0,101	1	1,006	3	3,018
2	Kuantan Mudik	26216	2	0,076	3	1,144	4	1,526
3	Gunung Toar	14440	1	0,069	3	2,078	5	3,463
4	Kuantan Tengah	54380	3	0,055	14	2,574	3	0,552
5	Benai	17746	1	0,056	4	2,254	2	1,127
6	Pangean	21597	1	0,046	-	-	1	0,463
7	Logas Tanah Darat	26593	3	0,113	3	1,128	3	1,128
8	Kuantan Hilir	14757	1	0,068	2	1,355	2	1,355
9	Inuman	16995	1	0,059	-	-	4	2,354
10	Cerenti	16747	1	0,060	2	1,194	4	2,388
11	Singingi	36545	3	0,082	3	0,821	10	2,736
12	Singingi Hilir	45324	3	0,066	6	1,324	7	1,544
13	Kuantan Hilir Seberang	11409	1	0,088	-	-	2	1,753
14	Sentajo Raya	32496	2	0,062	2	0,615	6	1,846
15	Pucuk Rantau	11756	1	0,085	-	-	3	2,552

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kecamatan Logas Tanah Darat menonjol dengan rasio Puskesmas tertinggi karena memiliki tiga unit Puskesmas untuk 26.593 penduduk, sedangkan Pangean hanya memiliki satu Puskesmas untuk 21.051 penduduk, sehingga pelayanan kesehatan di wilayah ini berpotensi kurang optimal. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan perlunya kebijakan strategis dari Dinas Kesehatan untuk memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan agar rasio pelayanan lebih merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan, terutama di wilayah dengan rasio rendah, sangat penting untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

f) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat terbatas dan belum seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024 jumlah rumah sakit di kabupaten ini tetap stagnan, yaitu hanya dua rumah sakit, dengan satu diantaranya merupakan rumah sakit umum tipe C milik pemerintah daerah. Tidak

ada rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa, paru, atau rumah sakit militer/Polri, dan tidak ada penambahan rumah sakit swasta. Akibatnya, rasio rumah sakit per jumlah penduduk terus menurun dari 0,0059 pada tahun 2020 menjadi 0,0014 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit, sehingga dapat menimbulkan potensi keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan sekunder.

Tabel II.84 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Penduduk	334.943	339.894	347.949	356.246	356.942
7.	Rasio	0,0059	0,0058	0,0057	0,0056	0,0014

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Secara spasial, distribusi rumah sakit di Kabupaten Kuantan Singingi juga tidak merata. Dari 15 kecamatan, hanya Kecamatan Kuantan Tengah yang memiliki rumah sakit, sementara kecamatan lainnya bergantung pada rujukan ke wilayah tersebut atau ke rumah sakit di luar kabupaten. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di kecamatan dengan jarak tempuh yang jauh. Rendahnya ketersediaan rumah sakit ini mengindikasikan perlunya kebijakan strategis berupa pembangunan rumah sakit baru atau peningkatan kapasitas rumah sakit eksisting untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah. Tanpa intervensi ini, ketimpangan layanan kesehatan berpotensi memperburuk indikator kesehatan masyarakat, seperti jumlah kematian bayi, balita, maupun ibu.

Tabel II.85 Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kuantan Mudik	26216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Hulu Kuantan	9941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gunung Toar	14440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pucuk Rantau	11756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Singingi	36545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Singingi Hilir	45324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kuantan Tengah	54380	1	1,84	0	0	0	0	0	0	1	1,84	1	1,84
8	Sentajo Raya	32496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Benai	17746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kuantan Hilir	14757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pangean	21597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Logas Tanah Darat	26593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kuantan Hilir Seberang	11409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Cerenti	16747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Inuman	16995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

g) Rasio dokter per satuan penduduk

Perkembangan jumlah dokter di Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, tetapi secara umum mencerminkan upaya peningkatan ketersediaan tenaga medis. Pada tahun 2020 terdapat 110 dokter, kemudian mengalami penurunan drastis pada 2021 menjadi 52 dokter. Namun, sejak 2022 jumlahnya kembali meningkat hingga mencapai 162 dokter pada 2024. Kondisi ini berdampak langsung pada rasio dokter terhadap jumlah penduduk yang meningkat signifikan pada 2024, yakni 0,454 dokter per 1.000 penduduk. Meskipun rasio ini menunjukkan perbaikan, angka tersebut masih di bawah standar ideal pelayanan kesehatan, di mana satu dokter seharusnya melayani sekitar 2.500 penduduk.

Tabel II.86 Jumlah Dokter Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter	110	52	68	58	162
2	Jumlah Penduduk	334.943	339. 894	345.850	356.246	365.989
3	Rasio	0,328	0,153	0,197	0,163	0,454

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Distribusi tenaga medis di tingkat kecamatan masih belum merata. Kecamatan Kuantan Tengah menempati posisi tertinggi dengan 73 dokter dan rasio 1,342 dokter per 1.000 penduduk, menunjukkan konsentrasi tenaga medis di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan. Sebaliknya, kecamatan seperti Inuman, Pucuk Rantau, dan Benai memiliki rasio dokter di bawah 0,25, yang mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan medis di wilayah tersebut. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya kebijakan strategis dalam redistribusi tenaga medis, termasuk insentif penempatan di daerah dengan rasio rendah.

Tabel II.87 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
-1	-2	-3	-4	(5=4/3)
1	Kuantan Mudik	26216	7	0,267
2	Hulu Kuantan	9941	5	0,503
3	Gunung Toar	14440	4	0,277
4	Pucuk Rantau	11756	3	0,255
5	Singingi	36545	13	0,356
6	Singingi Hilir	45324	12	0,265
7	Kuantan Tengah	54380	73	1,342
8	Sentajo Raya	32496	11	0,339
9	Benai	17746	4	0,225
10	Kuantan Hilir	14757	6	0,407
11	Pangean	21597	5	0,232
12	Logas Tanah Darat	26593	8	0,301
13	Kuantan Hilir Seberang	11409	4	0,351
14	Cerenti	16747	4	0,239
15	Inuman	16995	3	0,177
Jumlah		356.942	162	0,454

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Jika tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi, meskipun jumlah total dokter meningkat, pelayanan kesehatan tidak akan merata di semua kecamatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan perlu mengoptimalkan program rekrutmen, distribusi, dan

pengembangan kompetensi tenaga medis agar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih setara dan berkualitas.

h) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Kondisi tenaga medis di Kabupaten Kuantan Singingi menggambarkan adanya ketimpangan distribusi dan tantangan ketersediaan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Meskipun secara total jumlah tenaga medis mengalami fluktuasi, tantangan utama justru terletak pada konsentrasi tenaga medis yang masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara kecamatan dengan wilayah terpencil mengalami keterbatasan layanan. Ketimpangan ini menandakan perlunya kebijakan pemerataan tenaga kesehatan yang lebih agresif, termasuk penempatan tenaga medis secara proporsional sesuai beban penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan dasar.

Tabel II.88 Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Medis	592	956	594	641	162
2	Jumlah Penduduk	334.943	339.894	345.850	356.246	356.942
3	Rasio	0,002	0,002	0,002	0,002	0,454

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kapasitas sistem kesehatan daerah belum sepenuhnya siap untuk menjawab tantangan pelayanan kesehatan universal. Keterbatasan tenaga medis di beberapa wilayah dapat berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan, terutama layanan preventif dan kuratif di tingkat primer. Dalam konteks RPJMD, situasi ini menuntut langkah strategis berupa rekrutmen tenaga kesehatan baru, pelatihan berkelanjutan, serta insentif khusus bagi tenaga medis yang ditempatkan di daerah dengan akses terbatas.

Tabel II.89 Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Dalam Ribuan)	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
-1	-2	-3	-4	(5=4/3)
1	Kuantan Mudik	26.216	7	0,267
2	Hulu Kuantan	9.941	5	0,503
3	Gunung Toar	14.440	4	0,277
4	Pucuk Rantau	11.756	3	0,255
5	Singingi	36.545	13	0,356
6	Singingi Hilir	45.324	12	0,265
7	Kuantan Tengah	54.380	73	1,342
8	Sentajo Raya	32.496	11	0,339
9	Benai	17.746	4	0,225
10	Kuantan Hilir	14.757	6	0,407
11	Pangean	21.597	5	0,232
12	Logas Tanah Darat	26.593	8	0,301
13	Kuantan Hilir Seberang	11.409	4	0,351
14	Cerenti	16.747	4	0,239
15	Inuman	16.995	3	0,177

Jumlah	356.942	162	0,454

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Tabel II.90 Jumlah Tenaga Struktural dan Medis di RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Jenis	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
-1	-2	-3	-4	-5
1	Tenaga Struktural	7	7	14
2	Tenaga Pelaksana	12	15	27
3	Tenaga Medis :	19	17	36
a	Dokter Spesialis	11	5	16
b	Dokter Umum	6	9	15
c	Dokter Gigi	2	3	5
4	Tenaga kesehatan lainnya	36	167	203
a	Apoteker	1	9	10
b	Tenaga teknis kefarmasian	2	6	8
c	Tenaga Perawat	19	92	111
d	Tenaga Kebidanan		24	24
e	Tenaga Gizi	0	6	6
f	Fisioterapi	1	8	9
g	penata anastesi	2	0	2
h	Radiografer	5	2	7
i	Elektromedis	3	1	4
j	Ahli teknologi laboratorium medik	1	8	9
k	Sanitarian	1	1	2
j	Tekniker Gigi	1	1	2
j	terapis gigi dan mulut	0	2	2
	Rekam Medis	0	7	7
5	Pengemudi Ambulance	2	0	2
6	Perencana	0	1	1
	Total	76	207	283

Sumber : RSUD Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Dari kondisi tersebut, secara umum jumlah tenaga medis di RSUD telah memadai sesuai kebutuhan. Tenaga yang dirasakan masih kurang dan sangat dibutuhkan adalah tenaga IT dan Akuntan.

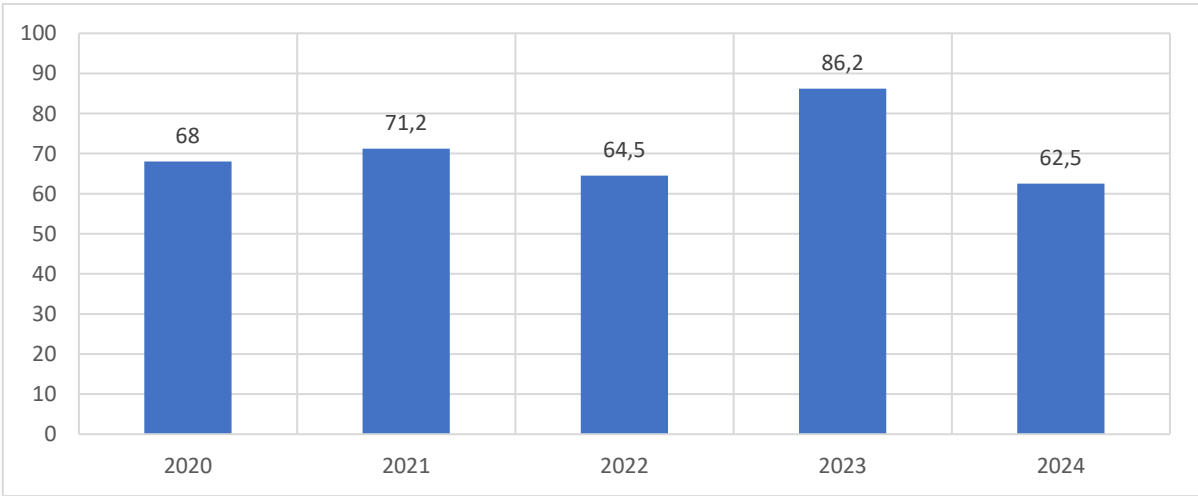
i) Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Ditangani

Pada tahun 2024 terdapat balita gizi buruk, namun semuanya (100%) dapat tertangani dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.

j) Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Capaian imunisasi campak di Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang tidak konsisten, mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program imunisasi. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya imunisasi belum

sepenuhnya stabil, kemungkinan karena faktor aksesibilitas layanan kesehatan, distribusi vaksin, dan kesadaran masyarakat yang belum merata. Peningkatan capaian pada satu periode diikuti penurunan pada periode berikutnya mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum mampu menciptakan keberlanjutan program.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.73 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Kesimpulannya, meskipun terdapat momen keberhasilan yang menunjukkan potensi perbaikan, konsistensi cakupan imunisasi masih perlu diperkuat melalui strategi jangka panjang yang berfokus pada penguatan layanan dasar, pemerataan distribusi vaksin, serta edukasi masyarakat secara berkesinambungan.

10. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkatnya pada tahun 2019 sebanyak 60,63%, dan tahun 2020 sebanyak 68% tahun 2021 sebanyak 60,1%, tahun 2022 sebanyak 46%, sedangkan tahun 2023 sebanyak 49,2% dan pada tahun 2025 dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diharapkan kegiatan penjangkaran ini menjadi prioritas.

k) Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pemerintah, organisasi profesi, bahkan masyarakat memiliki semangat cita-cita yang sama untuk pembangunan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu. Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa tingkat pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun diharapkan dinas kesehatan agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut dengan program-program seperti peningkatan akses, peningkatan mutu, regionalisasi rujukan, penguatan peran dinas kesehatan dan dukungan lintas sektor.

Tabel II.91 Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	53,50%	43,30%	15,90%	100%	NA
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	53,10%	0	80,80%	69%	72%

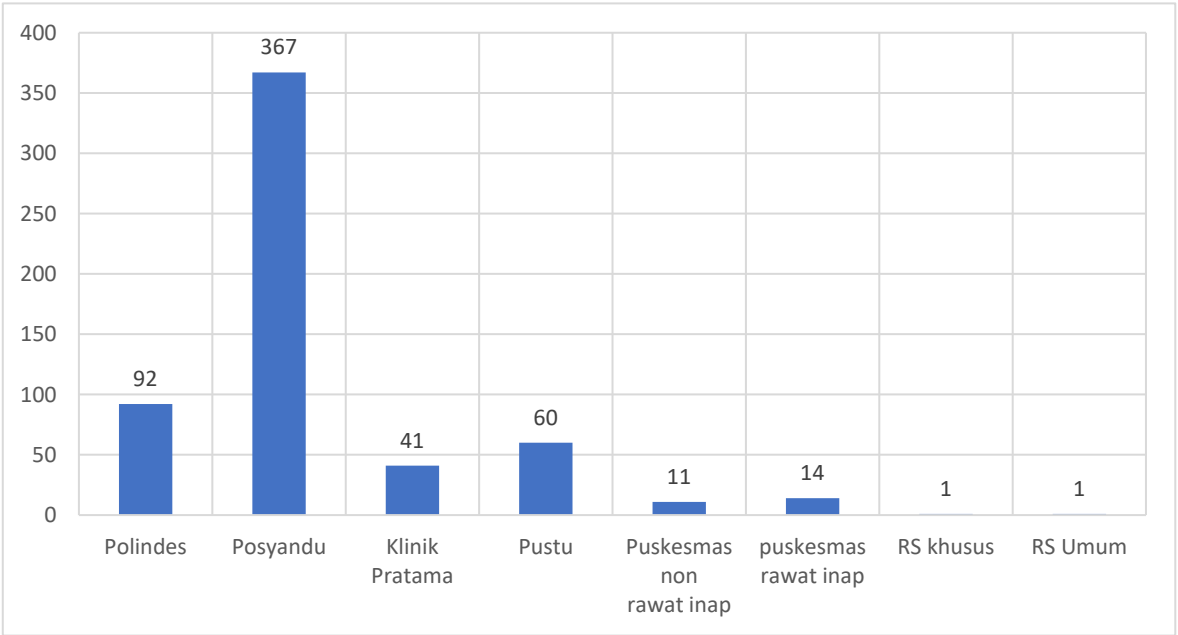
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

I) Pelayanan Rumah Sakit

Berdasarkan bentuk pelayanan Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi Rumah sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK). RSU adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan untuk semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai subspesialistik. RSK adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu misalnya RS paru-paru, RS jantung, RS Mata dll. RSUD Teluk Kuantan merupakan RS Umum Daerah yang memiliki Tipe C. RSUD Teluk Kuantan menerima rujukan dari Puskesmas/fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) se-Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Tetangga. RSUD Teluk Kuantan juga mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis. Adapun pelayanan spesialis yang ada yaitu :

- 1. Pelayanan Spesialis anak;
- 2. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam;
- 3. Pelayanan Spesialis Bedah;
- 4. Pelayanan Spesialis Obgyn;
- 5. Pelayanan spesialis Mata;
- 6. Pelayanan Spesialis THT;
- 7. Pelayanan spesialis Neurologi;
- 8. Pelayanan Spesialis Radiologi;
- 9. Pelayanan spesialis Anestesia;
- 10. Pelayanan spesialis Patologi klinik;
- 11. Pelayanan spesialis gigi;
- 12. Pelayanan spesialis paru-paru;
- 13. Pelayanan spesialis kulit dan kelamin.

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini sudah banyak dilakukan pemerintah antara lain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan seperti: rumah sakit, puskesmas, tenaga medis dan lain-lain. Pada Tahun 2024 rumah sakit berjumlah 2 unit, polides 92 unit, klinik pratama 41 unit, puskesmas pembantu 60 unit, puskesmas non rawat inap 11 unit, dan puskesmas rawat inap 14 unit.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.74 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Pelayanan spesialis ini terlaksana mulai dari IGD, rawat Jalan/poliklinik dan rawat inap. Serta didukung oleh sarana penunjang seperti ruang operasi, laboratorium, radiologi dan administrasi. Jumlah pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Pada Tahun 2020–2024 data kunjungan Rawat jalan selalu meningkat, namun pelayanan rawat inap dan IGD cenderung naik.

Adapun dari segi sumber daya pelayanan RSUD didukung dari berbagai macam tenaga, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.92 Data Kunjungan Pasien RSUD Teluk Kuantan Tahun 2020–2024 Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kunjungan	Jumlah Kunjungan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rawat Jalan	19.230	20.903	26.499	39.383	65.439
2	Rawat Inap	2.947	2.494	4.584	5.855	8.709
3	IGD	6.853	4.170	5.902	8.715	12.046

Sumber : RSUD Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Teluk Kuantan tahun 2020 dengan jumlah kunjungan 19.230, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 20.903 jumlah kunjungan, terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2024 menjadi 65.439 kunjungan. Namun dengan adanya BPJS dan bertambahnya dokter spesialis, maka kunjungan dan pelayanan pasien ke RSUD berjalan dengan baik.

Jumlah kunjungan pasien rawat inap di RSUD Teluk Kuantan pada tahun 2024 terdapat peningkatan yang cukup signifikan setelah selesainya renovasi ruang rawat inap RSUD. Sedangkan kunjungan pasien IGD juga mengalami peningkatan menjadi 12.046 pasien.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan saat ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel II.93 Kondisi Bangunan RSUD Teluk Kuantan Tahun 2024

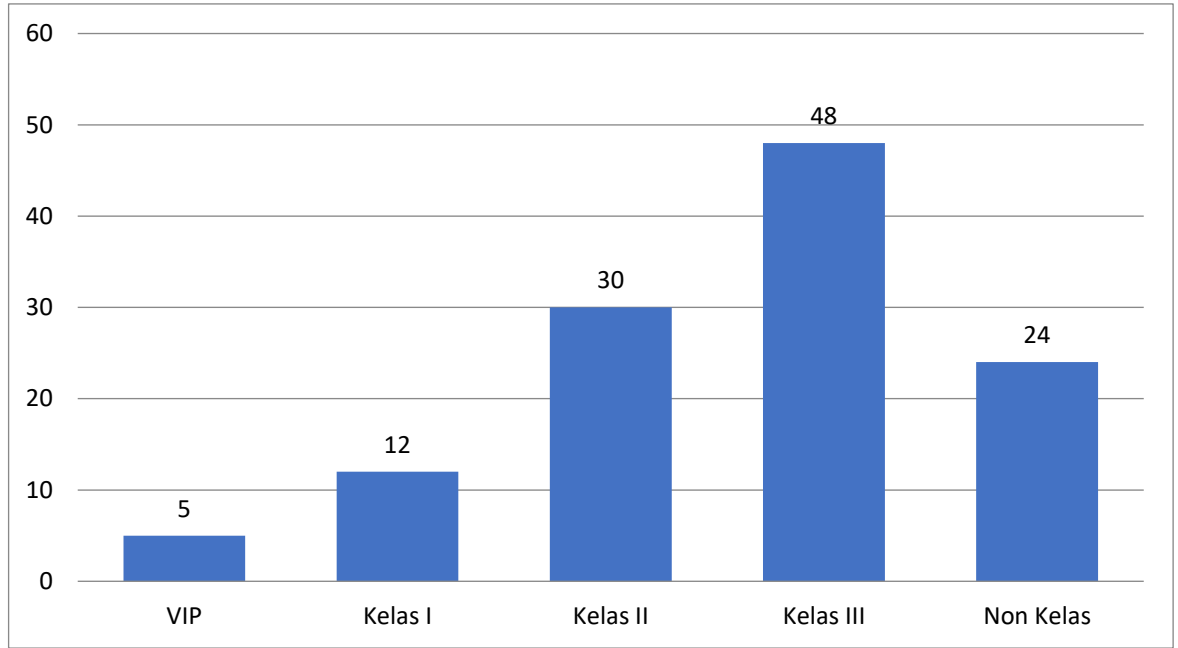
No	Jenis Bangunan	Kondisi Bangunan		
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Poli dan Sekretariat		Kurang baik	
2	Laboratorium		Kurang Baik	
3	IGD	Baik		
4	ICU	Baik		
5	Kebidanan dan Perawatan		Kurang Baik	
6	VIP		Kurang Baik	
7	Fisioterapi			Tidak baik
8	Unit Transpusi Darah	Baik		
9	CSSD dan Gudang		Kurang Baik	
10	Kamar Operasi		Kurang Baik	
11	Gizi dan Londri	Baik		
12	Rawat Inap		Kurang Baik	
13	Mushola dan Isolasi		Kurang baik	
14	Kamar Mayat			Tidak baik

Sumber : RSUD Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Dari seluruh fasilitas yang dimiliki ada beberapa fasilitas dalam kondisi kurang baik, yaitu poli dan sekretariat, ruang kebidanan dan keperawatan, VIV, Rawat Inap, Mushola dan Isolasi, CSSD dan Gudang, Kamar Operasi dan Laboratorium. Sedangkan fasilitas

Fisioterapi, Mushola dan Kamar Mayat dalam kondisi tidak baik. Adapun untuk dapat meningkatkan tipe rumah sakit menjadi rumah sakit tipe B, perlu ada peningkatan jumlah tempat tidur, jumlah dan jenis pelayanan spesialis serta fasilitas penunjang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi pasien rawat inap dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana terutama ketersediaan tempat tidur pasien di RSUD Teluk Kuantan, berikut grafik jumlah tempat tidur pasien di RSUD Teluk Kuantan tahun sampai dengan 2024 :



Sumber : RSUD Teluk Kuantan, 2025
Grafik II.75 Jumlah Tempat Tidur Pasien di RSUD Teluk Kuantan Tahun 2024

1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Pekerjaan Umum

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan merupakan prasarana dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketersediaan jalan yang memadai menjadi salah satu faktor utama untuk menarik investasi dan mengembangkan potensi daerah. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan jaringan jalan terus menjadi prioritas dalam mendukung mobilitas barang dan jasa.

Komposisi jenis permukaan jalan menunjukkan dinamika yang kuat: panjang jalan beraspal sempat melonjak, kemudian turun, lalu kembali meningkat. Pola ini biasanya mencerminkan kombinasi antara reklasifikasi data jaringan, alih status kewenangan, serta program peningkatan (*paving/hotmix*) yang tidak berlanjut secara konsisten dari tahun ke tahun. Jalan berpermukaan rigid masih sangat kecil porsinya sehingga beban lalu lintas berat masih banyak ditopang oleh perkerasan lentur (aspal) yang lebih cepat menurun kondisinya bila tidak dipelihara rutin.

Fluktuasi jalan berkerikil dan masih adanya segmen tanah menandakan kesenjangan pelayanan dasar aksesibilitas antar-kawasan, terutama ke pusat produksi pertanian/perkebunan dan desa-desa terpencil. Ini mengisyaratkan kebutuhan strategi bertahap: (1) membuka keterhubungan minimal (*all-weather road*) di ruas tanah/kerikil, (2) meng-upgrade ruas berkerikil produktif menjadi beraspal/rigid, dan (3) menjaga umur layanan ruas beraspal melalui preservasi rutin agar tidak cepat kembali rusak.

Tabel II.94 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jenis Permukaan	Jalan Kabupaten				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal (KM)	569,118	579,785	1.127,97	855,46	865,62
2	Kerikil (KM)	1.085,15	1.075,48	713,647	677,903	817,7
3	Rigid (M)	61.237	61.327	66.695	66.395	99,02
4	Tanah (KM)				74,94	74,94

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Proporsi jalan kondisi baik sempat membaik lalu kembali tergerus, sementara jalan rusak berat meningkat. Ini menunjukkan bahwa program peningkatan (*improvement*) tidak diimbangi dengan program preservasi (*maintenance*) yang memadai, sehingga ruas yang sudah baik cepat turun kualitasnya. Selain itu, beban kendaraan berlebih (*overloading*) dari komoditas perkebunan/pertambangan mempercepat degradasi struktural perkerasan.

Penurunan porsi “kondisi sedang” bersamaan dengan naiknya “rusak berat” mengindikasikan keterlambatan penanganan—jalan yang seharusnya ditangani dengan pemeliharaan berkala pada fase “sedang” dibiarkan lewat masa optimum hingga masuk “rusak berat”, yang pada akhirnya meningkatkan biaya rehabilitasi. Diperlukan manajemen aset jalan (*road asset management*) berbasis prioritas risiko, pengawasan muatan melalui jembatan timbang/penegakan aturan tonase, serta pendanaan multiyears untuk mencegah backlog kerusakan bertambah.

Tabel II.95 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kondisi Baik	547,451	562,077	1 135,711	603,84	621,83
2.	Kondisi Sedang	943,636	930,01	372,215	273,84	273,31
3.	Kondisi Rusak Berat	282,082	282,082	183,528	672,88	657,92
4.	Kondisi Rusak	216,684	215,684	298,399	38,34	35,48
5.	Jalan secara keseluruhan (kabupaten)	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.588,91	1.588,91

Sumber : -Kuantan Singingi dalam Angka, 2025
-Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang

Turunnya proporsi ruas dengan kecepatan pelayanan di atas 40 km/jam menandakan penurunan *level of service* (LOS) jaringan jalan kabupaten. Ini tidak hanya berimplikasi pada kenyamanan, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan memperpanjang waktu tempuh layanan publik (kesehatan, pendidikan, dan distribusi barang).

Kondisi tersebut menegaskan urgensi preservasi preventif (*crack sealing*, *overlay tipis*, *patching cepat*) sebelum kerusakan meluas, serta rehabilitasi struktural pada koridor utama yang menopang arus barang/jasa. Tanpa reposisi anggaran dari pola “*build neglect rebuild*” ke “*maintain–preserve–extend life*”, persentase jalan berkecepatan layak akan cenderung terus menyusut.

Tabel II.96 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)/(KM)	1.067,59	1.135,71	1.113,15	621,832

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
2	Panjang Jalan Kabupaten (KM)	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.588,906
3	Persentase (%)	53,65	57,07	55,94	39,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kuantan Singingi, 2025

Rasio yang menurun mengindikasikan bahwa pertumbuhan jaringan jalan tidak mengimbangi pertumbuhan penduduk, atau terjadi reklasifikasi/pengurangan panjang jalan kewenangan kabupaten. Secara fungsional, semakin rendah rasio ini, semakin besar risiko bottleneck aksesibilitas, terutama untuk wilayah berkembang yang membutuhkan konektivitas baru.

Implikasinya, selain menambah panjang jaringan di wilayah dengan kebutuhan akses tinggi, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan kapasitas koridor eksisting (pelebaran, perbaikan geometrik, manajemen lalu lintas), serta mendorong moda angkutan umum/logistik yang lebih efisien untuk menekan beban jalan. Rasio yang rendah harus dibaca sebagai alarm untuk menyusun peta jalan investasi infrastruktur jalan berbasis proyeksi pertumbuhan penduduk dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tabel II.97 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Panjang jalan kabupaten (km)	1.989,85	1.989.853	1.989,85	1.588,906
2	Jumlah penduduk	334.894	345.850	356.246	365.989
3	Rasio (km/jiwa)	0,0059	0,0057	0,0056	0,0043

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kuantan Singingi, 2025

Tren kemantapan jalan yang terus menurun menunjukkan backlog pemeliharaan yang membesar. Ruas yang semula mantap tidak dipreservasi tepat waktu, sehingga turun menjadi tidak mantap dan akhirnya masuk kategori rusak. Ini adalah pola klasik ketika alokasi pemeliharaan tidak memadai atau tidak tepat waktu, sementara beban sumbu kendaraan melebihi desain.

Tabel II.98 Kemantapan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024

No	Kondisi Jalan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Mantap	1.491,62	1.266,53	877,68	895,139
2	Tidak Mantap	498,23	723,32	711,226	693,767
Total Panjang Jalan		1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.588,906

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi, 2025

Untuk membalik tren ini, pemerintah daerah membutuhkan strategi preservasi berjenjang (*routine–periodic–rehabilitation*) yang disiplin, penerapan Sistem Manajemen Perkerasan Jalan (PMS), serta penguatan pengawasan tonase. Skema pembiayaan kreatif (KPBU, *earmarked road maintenance fund*, atau DAU/DBH tematik preservasi) dapat dipertimbangkan agar program tidak terjebak pada siklus “rehabilitasi mahal setelah rusak berat”.

2. Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Penurunan hingga nol pada persentase kawasan permukiman yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat selama periode 2021–2024 menandakan keberhasilan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman. Transformasi ini menjadi indikator positif atas komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isolasi wilayah, sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sosial,

ekonomi, dan kesehatan. Capaian ini juga memperkuat daya tarik kawasan permukiman untuk investasi dan pengembangan ekonomi lokal.

Tabel II.99 Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	7,49%	7,39%	0	0

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Namun, meski data menunjukkan keberhasilan, perlu diantisipasi potensi munculnya kawasan-kawasan baru yang belum terlayani akses jalan memadai, akibat pertumbuhan permukiman dan konversi lahan. Oleh karena itu, tata kelola pembangunan jalan lingkungan perlu berkelanjutan, baik dari sisi pemeliharaan maupun perluasan jaringan, agar kawasan permukiman yang baru terbentuk tidak kembali menjadi kawasan yang terisolasi.

Analisis rasio panjang jalan lingkungan terhadap luas wilayah di masing-masing kecamatan memperlihatkan adanya ketimpangan antar-wilayah dalam pelayanan infrastruktur jalan lingkungan. Beberapa kecamatan seperti Benai, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Kuantan Hilir, dan Pangean menunjukkan capaian rasio yang relatif lebih baik, yang berarti penduduk di kecamatan tersebut lebih mudah mengakses pusat aktivitas maupun layanan dasar. Sementara kecamatan dengan rasio jalan yang rendah, seperti Singingi, Singingi Hilir, dan Pucuk Rantau, berpotensi menghadapi hambatan mobilitas, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan kualitas hidup masyarakat

Tabel II.100 Kondisi Prasarana Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Kawasan	Rasio Panjang Jalan		Rasio Capaian (%)
				Meter	%	
1	Kuantan Mudik	560,81	24	36.000	0,64	0,051
2	Hulu Kuantan	289,80	12	18.000	0,47	0,008
3	Gunung Toar	145,22	14	21.000	1,27	0,000
4	Pucuk Rantau	511,04	10	15.000	0,18	0,000
5	Singingi	966,31	14	21.000	0,11	0,036
6	Singingi Hilir	986,76	12	18.000	0,12	0,000
7	Kuantan Tengah	466,92	23	34.500	1,27	0,070
8	Sentajo Raya	238,04	15	22.500	1,54	0,051
9	Benai	231,18	16	24.000	1,93	0,021
10	Kuantan Hilir	129,50	16	24.000	1,61	0,057
11	Pangean	231,18	17	25.500	1,72	0,012
12	Logas Tanah Darat	481,11	15	22.500	0,59	0,064
13	Kuantan Hilir Seberang	94,42	14	21.000	1,84	0,024
14	Cerenti	175,91	13	19.500	0,43	0,033
15	Inuman	83,75	14	21.000	0,47	0,195
Jumlah		5.457,86	229	343.500	14,18	0,044

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Peta capaian rasio ini harus menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan jalan lingkungan pada periode berikutnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa intervensi pembangunan benar-benar diarahkan pada kawasan yang memiliki backlog prasarana jalan lingkungan, serta meminimalkan disparitas pelayanan antar kecamatan. Upaya ini akan mempercepat pemerataan aksesibilitas dan pada akhirnya mendukung inklusi sosial, pemerataan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan di kawasan permukiman Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Tabel II.101 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kawasan Permukiman Berdasarkan Rasio Tingkat Pelayanan Sanitasi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tinggal	Rasio Tingkat Pelayanan		Rasio Capaian (%)
			Unit	%	
1	Kuantan Mudik	4.783	6.232	7,52	5,07
2	Hulu Kuantan	1.756	2.287	2,76	1,86
3	Gunung Toar	2.763	3.599	4,34	2,93
4	Pucuk Rantau	2.139	2.786	3,36	2,26
5	Singingi	6.300	8.281	10	6,65
6	Singingi Hilir	7.606	9.910	11,96	8,06
7	Kuantan Tengah	9.575	12.476	15,06	10,19
8	Sentajo Raya	5.709	7.437	8,98	6,06
9	Benai	3.239	4.220	5,09	3,43
10	Kuantan Hilir	3.003	3.917	4,73	3,19
11	Pangean	3.735	4.867	5,87	3,96
12	Logas Tanah Darat	4.126	5.376	6,49	4,38
13	Kuantan Hilir Seberang	2.661	3.462	4,18	2,82
14	Cerenti	3.060	3.987	4,81	3,24
15	Inuman	3.133	4.011	4,84	3,35
Jumlah		63.588	82.848	100	67,45

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Tingkat kepemilikan akses sanitasi layak di Kabupaten Kuantan Singingi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren yang relatif stabil, meski diwarnai fluktuasi kecil. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa capaian sanitasi masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pemeliharaan, maupun dari perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang ada.

Rendahnya rasio rumah tangga bersanitasi layak di beberapa kecamatan menandakan perlunya penajaman intervensi pada wilayah-wilayah tertentu, khususnya pada kecamatan dengan akses terendah. Variasi antarwilayah juga mempertegas pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan lokal, mengingat faktor geografis, ekonomi, dan sosial turut berpengaruh terhadap capaian sanitasi.

Tabel II.102 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

1	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	82,81	87,98	86,98	85,36	86,73

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kuantan Singingi, 2025

Secara umum, capaian sanitasi layak yang sudah berada di atas angka 80 persen menandakan adanya kemajuan signifikan, namun pemerintah daerah masih perlu memperkuat upaya peningkatan cakupan dan kualitas layanan, serta memperluas edukasi perilaku hidup bersih kepada masyarakat. Keberhasilan peningkatan akses sanitasi layak tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga menjadi pondasi utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Kuantan Singingi hingga tahun 2024 masih berada pada tingkat yang sangat rendah dan memerlukan perhatian serius dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Keberadaan fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang telah dibangun belum diikuti oleh pemanfaatan optimal di tingkat rumah tangga. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan sanitasi aman masih jauh dari harapan, menandakan adanya hambatan pada aspek sosialisasi, sistem pelayanan, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik.

Tabel II.103 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

N o	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	100	150	150	300	420
2	Jumlah Total Rumah Tangga	83.732	85.226	86.716	88.203	89.690
3	Persentase	0,12	0,18	0,17	0,34	0,47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kuantan Singingi, 2025

Rendahnya capaian ini menuntut adanya penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lumpur tinja yang aman, serta perbaikan sistem layanan pengangkutan lumpur tinja secara terjadwal ke IPLT. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, serta pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi agar seluruh proses pengelolaan air limbah domestik berjalan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan secara nasional. Strategi intervensi perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas pelayanan, insentif partisipasi rumah tangga, dan integrasi program sanitasi dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan serta pencegahan pencemaran.

Dengan demikian, akselerasi peningkatan akses sanitasi aman tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menuntut perubahan perilaku, perluasan cakupan layanan, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan manfaat sanitasi yang aman dan berkelanjutan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

5. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Tabel II.104 Kebutuhan Drainase Lingkungan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas wilayah (KM²)	Rasio Kebutuhan Drainase		Rasio Capaian (%)
			Meter	%	
1	Kuantan Mudik	560,81	24.000	0,425	0
2	Hulu Kuantan	289,80	12.000	0,312	0

No	Kecamatan	Luas wilayah (KM ²)	Rasio Kebutuhan Drainase		Rasio Capaian (%)
3	Gunung Toar	145,22	14.000	0,847	0
4	Pucuk Rantau	511,04	10.000	0,122	0
5	Singingi	966,31	14.000	0,072	0,01
6	Singingi Hilir	986,76	12.000	0,078	0,00
7	Kuantan Tengah	466,92	23.000	0,850	0,01
8	Sentajo Raya	238,04	15.000	1,030	0,01
9	Benai	231,18	16.000	1,283	0,00
10	Kuantan Hilir	129,50	16.000	1,075	0,01
11	Pangean	231,18	17.000	1,146	0,01
12	Logas Tanah Darat	481,11	15.000	0,394	0,02
13	Kuantan Hilir Seberang	94,42	14.000	1,225	0,00
14	Cerenti	175,91	13.000	0,285	0,00
15	Inuman	83,75	14.000	0,311	0,02
	Jumlah	5.457,86	229.000	9,456	0,08

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Persentase drainase dalam kondisi baik yang paling baik di Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir, banyak usulan pembangunan drainase tahun 2024 terutama di Kota Teluk Kuantan sebagai ibukota Kabupaten.

6. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan dibidang Pertanian, Industri, Rumah Tangga, Rekreasi, Aktivitas Lingkungan dan Irigasi. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air.

Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi serta partisipasi di wilayah pedesaan sangat diperlukan guna penyediaan sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik.

Faktor umur bangunan juga berpengaruh terhadap kondisi penyediaan sarana dan prasarana pendukung jaringan irigasi yang baik. Kalau kita lihat jaringan irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar di beberapa Kecamatan kondisinya belum baik mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan.

Tabel II.105 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Infrastruktur	Kondisi (%)			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bangunan Utama	8,89%	33,33%	33,33%	24,44%
2	Jaringan Primer	40,78%	12,07%	9,93%	37,22%
3	Jaringan Sekunder	46,18%	11,01%	14,57%	28,24%
4	Jaringan Tersier	59,26%	14,62%	12,62%	13,50%
	Rata-rata	38,78%	17,76%	17,61%	25,85%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kuantan Singingi, 2025

Kondisi infrastruktur irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa secara rata-rata, hanya sekitar 38,78% infrastruktur berada dalam kondisi baik, sementara sisanya tersebar pada kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Persentase kerusakan, terutama pada jaringan primer dan bangunan utama yang masih cukup tinggi, mengindikasikan perlunya prioritas rehabilitasi dan pemeliharaan. Hal ini penting agar fungsi irigasi dapat optimal mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

7. Rasio Jaringan Irigasi

Dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian, maka kebutuhan pengairan untuk budidaya pertanian memiliki peranan yang sangat vital, sistem pengaturan pengairan yang baik, oleh karena itu sistem jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier seharusnya dapat berfungsi dengan baik, sehingga usaha intensifikasi bidang pertanian dapat dilaksanakan secara maksimal. Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi sejak dari tahun 2019-2023 sebagaimana pada tabel berikut, sedangkan luas lahan budidaya yang dialiri tahun 2023 seluas 3.912 Ha.

Tabel II.106 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jaringan primer	7.302,50	7.302,50	7.302,50	8.128,50	8.436,50
2.	Jaringan Sekunder	64.603,63	64.603,63	64.603,63	64.776,63	65.193,63
3.	Jaringan Tersier	38.396,10	39.896,10	40.896,10	40.896,10	41.096,10
4.	Luas lahan budidaya	3.821,10	3.821,10	3.821,10	3.821,10	3.821,10
5.	Rasio	2,89	2,93	2,95	2,98	3,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya jaringan tersier. Begitu juga dengan rasio jaringan irigasi terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 49,58.

8. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Air Minum Layak

Tabel II.107 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	88,19	85,78	82,49	83,02	86,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Riau, 2025

Akses air minum layak di Kabupaten/Kota menunjukkan dinamika yang mencerminkan adanya tantangan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Fluktuasi capaian selama beberapa tahun terakhir menandakan bahwa pencapaian akses air minum layak sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan infrastruktur dan keberlanjutan layanan. Gangguan pada distribusi dan kerusakan fasilitas air bersih menjadi salah satu faktor utama terjadinya ketidakstabilan akses di tingkat rumah tangga.

Hal ini menunjukkan perlunya strategi jangka panjang yang menitikberatkan pada aspek pemeliharaan, pengawasan, dan inovasi dalam penyediaan air minum, termasuk diversifikasi sumber air dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengawasi infrastruktur air bersih harus terus didorong agar setiap upaya pemerintah dapat berdaya guna maksimal. Dengan demikian, stabilitas dan peningkatan akses air minum layak hanya dapat dicapai jika upaya perbaikan fasilitas

diiringi dengan sistem monitoring yang efektif serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air bersih secara mandiri.

9. Rumah Tangga, Jumlah Rumah Tangga, Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sumber air minum bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi selama 2020–2024 masih sangat rendah dan berfluktuasi. Dari total rumah tangga yang terus bertambah, hanya 4,39 persen yang memiliki akses pada 2020, sempat naik hingga 5,66 persen pada 2023, lalu turun menjadi 3,17 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan air bersih tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan, bahkan cenderung melemah pada tahun terakhir.

Tabel II.108 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Perpipaan Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	3.666	4.793	4.806	4.994	2.843
2	Jumlah Total Rumah Tangga	83.732	85.226	86.716	88.203	89.690
3	Persentase	4,39	5,62	5,54	5,66	3,17

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sumber non-perpipaan yang kualitasnya tidak selalu memenuhi standar kesehatan. Padahal, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, air bersih adalah air yang layak dipakai sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak, sedangkan air minum adalah air yang dapat langsung diminum karena sudah memenuhi syarat kesehatan. Rendahnya cakupan perpipaan memperlihatkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur air minum, penguatan layanan PDAM, serta pemerataan akses hingga ke wilayah perdesaan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan. Hal ini berpotensi menghambat peningkatan kesehatan, sanitasi, dan kualitas hidup masyarakat Kuantan Singingi. Di Kabupaten Kuantan Singingi pemanfaatan air bersih yang dipergunakan bersumber pada :

- 1. Air Hujan
- 2. Air Sungai
- 3. Mata Air
- 4. Air Sumur Dangkal
- 5. Air Sumur Dalam

Pemanfaatan air bersih yang berasal dari penyediaan ledeng (perpipaan) yang bersumber dari air sungai hanya tersedia di wilayah 8 kecamatan dengan jumlah pelanggan 4.994 terbesar di Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 2.083 pelanggan, dengan jumlah rumah tangga yang menggunakannya sangat terbatas, sedangkan pemanfaatan sumber air bersih yang berasal dari sungai, sumur dangkal dan sumur dalam menjadi dominan, namun belum terdata dengan baik.

Tabel II.109 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Kecamatan / District	Pelanggan / Number of Customers	Air Disalurkan / Distributed Water (m ³)	Nilai / Value (Rp)
Kuantan Mudik	67	69.120	...
Hulu Kuantan	–	–	...
Gunung Toar	–	–	...

Pucuk Rantau	–	–	...
Singingi	–	–	...
Singingi Hilir	–	–	...
Kuantan Tengah	1.426	165.317	...
Sentajo Raya	–	–	...
Benai	147	69.120	...
Kuantan Hilir	144	69.120	...
Pangean	232	69.120	...
Logas Tanah Darat	–	–	...
Kuantan Hilir Seberang	–	–	...
Cerenti	455	69.120	...
Inuman	372	176.800	...
Kuantan Singingi	2.843	687.717	...

Sumber : UPTD Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan data distribusi air bersih, pelayanan sistem perpipaan di Kabupaten Kuantan Singingi baru menjangkau 2.843 pelanggan dengan total volume penyaluran 687.717 m³. Pelayanan terbesar berada di Kecamatan Kuantan Tengah dengan 1.426 pelanggan dan distribusi 165.317 m³, diikuti oleh Kecamatan Inuman sebanyak 372 pelanggan (176.800 m³), Cerenti 455 pelanggan, Pangean 232 pelanggan, Kuantan Hilir 144 pelanggan, Benai 147 pelanggan, serta Kuantan Mudik 67 pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses air bersih melalui perpipaan masih terpusat pada wilayah tertentu, terutama di kawasan perkotaan dan sekitarnya.

Sementara itu, sejumlah kecamatan lain seperti Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Sentajo Raya, Logas Tanah Darat, dan Kuantan Hilir Seberang belum terlayani sistem perpipaan. Kesenjangan ini menandakan masih rendahnya pemerataan akses air bersih antarkecamatan, sehingga sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumber air non-perpipaan dengan kualitas yang belum tentu memenuhi standar kesehatan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, sebaiknya data jumlah rumah tangga dengan akses SPAM perpipaan juga disajikan dalam tabel. Hal ini akan memungkinkan perhitungan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, yang merupakan indikator utama pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang bahwa pemerataan layanan air bersih merupakan kebutuhan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas distribusi, penguatan infrastruktur SPAM, serta pemerataan pembangunan layanan air perpipaan di seluruh kecamatan. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh akses air bersih yang memadai, sehat, dan berkelanjutan.

Tabel II.110 SPAM IKK dan Jumlah Pengguna SPAM IKK Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

N o	Nama Spam Ikk	Jumlah Pengguna (SR)
1	SPAM IKK TELUK KUANTAN	1633
2	SPAM IKK BENAI	147
3	SPAM IKK KUANTAN HILIR	144
4	SPAM IKK PANGEAN	227
5	SPAM IKK KUANTAN MUDIK	67
6	SPAM IKK INUMAN	354
7	SPAM IKK CERENTI	455

N o	Nama Spam Ikk	Jumlah Pengguna (SR)
8	SPAM IKK LOGAS TANAH DARAT	Tidak berfungsi
9	SPAM IKK SINGINGI HILIR	Tidak berfungsi
Jumlah		3027

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Secara keseluruhan, jumlah total pengguna SPAM IKK di Kuantan Singingi sebanyak 3.027 SR masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di kabupaten ini, sehingga akses air minum perpipaan masih jauh dari harapan. Kesenjangan distribusi ini mengindikasikan perlunya peningkatan investasi, pemeliharaan, serta perluasan layanan, terutama di kecamatan yang belum terjangkau atau instalasinya tidak berfungsi. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat, baik terkait kualitas infrastruktur, ketersediaan sumber air baku, maupun aspek tata kelola agar cakupan pelayanan air bersih dapat ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

10. Persentase rumah tangga yang memperoleh akses SPAM Perpipaan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat jauh dari harapan. Selama lima tahun terakhir, capaian akses air minum bersih tidak menunjukkan tren perbaikan yang berarti, bahkan cenderung menurun pada akhir periode. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala serius baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun kesinambungan layanan air bersih. Situasi tersebut menjadi tantangan besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih kuat dan program percepatan agar akses air minum layak dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Tabel II.111 Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Perpipaan Kab. Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tahun	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum
1	2020	4,41
2	2021	5,62
3	2022	5,54
4	2023	5,63
5	2024	3,37

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

11.Rasio tempat ibadah persatuan penduduk

Sebagai sarana kebutuhan spiritual masyarakat rumah ibadah berfungsi sebagai sarana ibadah dan pembelajaran bagi penganut agama masing-masing, dari data yang ada jumlah rumah ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi masih memadai sampai tahun 2023 berjumlah 395 Masjid dan 1.067 Surau/Langgar dan 1 wihara. Untuk masjid dan surau jumlahnya terus mengalami peningkatan.

Tabel II.112 Banyaknya Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Dalam Ribuan)	Mesjid	Surau / Langgar	Gereja	Pura	Wihara	Rasio
1	Kuantan Mudik	26.295	35	112	-	-	-	0,004
2	Hulu Kuantan	10.274	14	36	-	-	-	0,008
3	Gunung Toar	14.655	16	59	-	-	-	0,003

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Dalam Ribuan)	Mesjid	Surau / Langgar	Gereja	Pura	Wihara	Rasio
4	Pucuk Rantau	12.778	15	15	-	-	-	0,003
5	Singingi	37.637	28	101	-	-	-	0,003
6	Singingi Hilir	46.470	44	95	-	-	-	0,004
7	Kuantan Tengah	56.191	62	158	-	-	1	0,004
8	Sentajo Raya	33.227	27	63	1	-	-	0,003
9	Benai	18.068	25	82	-	-	-	0,007
10	Kuantan Hilir	15.064	19	32	-	-	-	0,004
11	Pangean	21.492	26	104	-	-	-	0,006
12	Logas Tanah Darat	27.708	25	72	1	-	-	0,003
13	Kuantan Hilir Seberang	11.608	13	43	-	-	-	0,005
14	Cerenti	17.140	20	41	-	-	-	0,003
15	Inuman	17.382	20	53	-	-	-	0,005
Jumlah Total		365.989	389	1.066	2	-	1	0,004

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

b) Penataan Ruang

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah HPL/HGB

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan berupa ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun private telah memiliki total luas lebih dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan keseimbangan iklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus meningkatkan nilai estetika kota. Di kabupaten Kuantan Singingi penetapan ruang terbuka hijau belum tertata secara administrasi baik dalam sistem tata ruang.

Tabel II.113 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	223,782	987,1	978,10	978,10	978,10
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	102.292,07	-	-	-	-
3.	Luas Wilayah	102.515,85 ha	765.603 ha	765.603 ha	545.786 ha	545.786 ha
4.	Rasio Ruang terbuka hijau (1:2)	45,8	0,13	0,13	0,18	0,18

Tabel II.114 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi

N o	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Tuang Terbuka Hijau
1	Kuantan Tengah	46.825,53 ha	-	463,78 ha	10,99
2	Hulu Kuantan	24.068,96 ha	-		
3	Kuantan Mudik	50.724,57 ha	-		
4	Gunung Toar	10.474,38 ha	-		
5	Singingi Hilir	105.328,94 ha	-		
6	Singingi	97.867,20 ha	-		
7	Cerenti	18.677,50 ha	-		
8	Inuman	6.634,68 ha	-		
9	Kuantan Hilir	11.346,66 ha	-		
10	Pangean	10.409,57 ha	-		
11	Logas Tanah Darat	51.091,02 ha	-		
12	Benai	9.855,46 ha	-		
13	Sentajo Raya	25.992,76 ha	-	514,32 ha	1,98
14	Pucuk Rantau	60.765,15 ha	-		
15	Kuantan Hilir Seberang	15.723,92 ha	-		
Jumlah		545.786,30 ha	-	978,10 ha	0,18

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

2. Rasio Bangunan yang memiliki Persetujuan Bagungan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung gedung adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Kabupaten Kuantan Singingi terus menata perizinan untuk pendirian bangunan ini melalui perda yang ada, namun demikian perkembangan jumlah bangunan yang memiliki PBG di Kabupaten Kuantan singingi pada tahun 2023 secara keseluruhan dari tabel yang ada menunjukkan bahwa terdapat 1.045 bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki PBG.

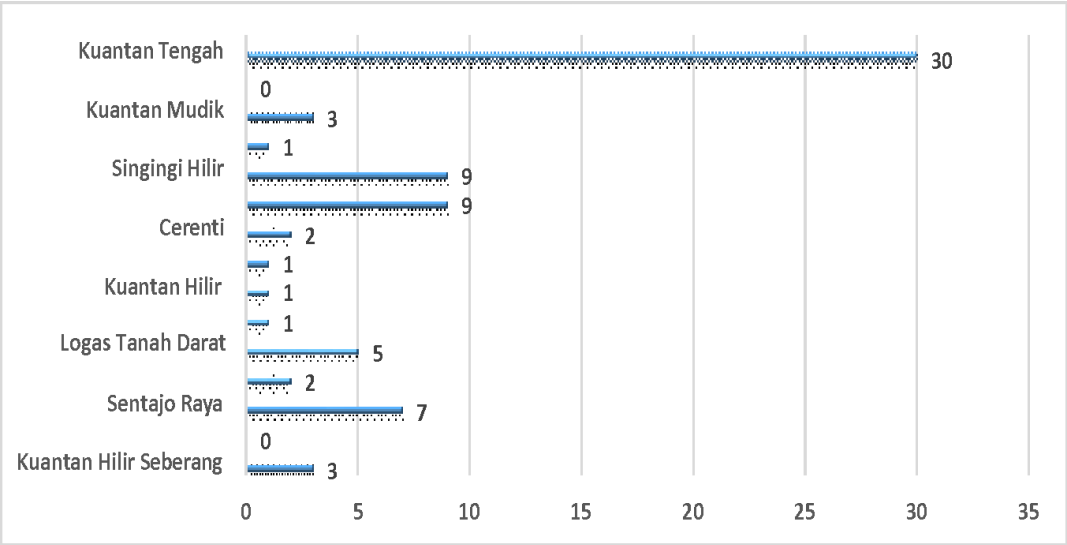
Tabel II.115 Rasio Bangunan memiliki PBG per Satuan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Bangunan yang Memiliki PBG	807	868	978	1.045	1.989
2.	Jumlah Bangunan	90.948	92.907	94.952	96.452	98.441

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Rasio bangunan yang memiliki PBG (1:2)	0,0089	0,0093	0,0103	0,0108	0,0202

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kuantan Singingi, 2025

Pada tabel di atas tampak bahwa setiap tahun jumlah bangunan yang memiliki PBG cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 jumlah bangunan yang memiliki PBG sebanyak 807 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 1.989 jumlah bangunan yang memiliki PBG. Sedangkan jumlah bangunan yang memiliki PBG menurut kecamatan pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini.



Sumber : DPMPSTP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.76 Jumlah Bangunan yang memiliki PBG Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Kecamatan yang terbanyak bangunannya yang memiliki PBG adalah kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 30, hal ini berbeda jauh dengan 14 kecamatan lainnya. Kedepan agar Pemerintah Daerah terus mendorong masyarakat yang memiliki bangunan untuk melakukan pengurusan PBG sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW berkaitan dengan penerbitan PBG, penerbitan PBG harus berdasarkan zona kawasan sesuai RTRW, dimana zona tersebut adalah :

1. Kawasan perdagangan dan jasa, diperuntukkan bagi bangunan perdagangan dan jasa seperti ruko dan pasar;
2. Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, sedang atau tinggi diperuntukkan bagi bangunan perumahan maupun rumah-rumah tinggal pribadi;
3. Kawasan pemerintahan, diperuntukkan bagi bangunan pemerintahan dan perkantoran;
4. Kawasan daerah hijau, diperuntukkan bagi daerah hijau dan tidak diizinkan untuk diterbitkan PBG untuk bangunan;
5. Kawasan areal penggunaan lainnya, kawasan cadangan dan bisa diperuntukkan bagi seluruh bangunan.

Sebelum penertiban PBG harus dilakukan pengecekan izin lokasi terhadap RTRW sehingga izin yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan RTRW yang telah disahkan.

c) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio ini merupakan perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah, berikut rasio rumah layak huni di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024.

Tabel II.116 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Permukiman Layak Huni	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Layak Huni	67.094	67.223	67.449	67.782	68.211
2	Jumlah Penduduk	334.943	339.894	345.850	356.246	365.989
3	Rasio	20,03	19,78	19,5	19,02	18,63

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi, 2025

Penurunan persentase rumah layak huni di Kabupaten Kuantan Singingi dalam lima tahun terakhir meski secara jumlah mengalami peningkatan, mencerminkan adanya fenomena paradoks dalam penyediaan perumahan yang layak. Realitas ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan jumlah rumah tangga di daerah ini bergerak lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan rumah layak huni, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan hunian tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk atau keluarga baru. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan akses terhadap hunian yang sehat dan aman, khususnya bagi kelompok rentan atau berpendapatan rendah.

Tabel II.117 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	83.732	85.226	86.716	88.203	89.690
2	Persentase Rumah tangga yang Memiliki akses terhadap Hunian Layak	72,35	74,71	68,53	68,94	72,84

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh BPS RI, 2025

Lebih jauh, jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang lebih progresif, Kuantan Singingi berisiko mengalami backlog perumahan yang semakin besar, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman. Dengan demikian, strategi pembangunan perumahan tidak cukup hanya menambah kuantitas rumah layak huni, tetapi juga harus diarahkan pada percepatan peningkatan proporsi rumah tangga yang benar-benar menikmati akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini menuntut optimalisasi sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, serta penguatan basis data dan inovasi skema pembiayaan agar masalah ini tidak sekadar menjadi statistik tahunan, melainkan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

2. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio Permukiman Layak Huni merupakan perbandingan antara luas permukiman layak dengan luas wilayah permukiman, berikut tabel rasio permukiman layak huni di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024.

Tabel II.118 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Permukiman Layak Huni	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Layak Huni	22.911,64	22.911,64	22.911,64	22.911,64	23.040,64
2	Jumlah Wilayah Pemukiman	32.628,37	32.628,37	32.628,37	32.628,37	32.628,37
3	Rasio	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada data di atas, dapat dilihat bahwa rasio permukiman layak huni belum mengalami penambahan atau masih tetap dari tahun 2020 sampai tahun 2024. secara umum rasio permukiman layak huni di Kabupaten Kuantan Singingi tahun hingga 2024 sebesar 0,70.

3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni merupakan persentase Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, cakupan ini di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024.

Tabel II.119 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Permukiman Layak Huni	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Layak Huni di Suatu Wilayah Kerja Kurun Waktu Tertentu	67.094,00	67.223,00	67.449,00	67.782,00	68.311,00
2	Jumlah Rumah di Suatu Wilayah Kerja Kurun Waktu Tertentu	74.777,00	74.941,00	74.817,00	74.981,00	74.892,00
3	Rasio	0,8973	0,8971	0,9015	0,9040	0,9121

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tahun 2024, Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Kuantan Singingi pada angka 0,9121.

4. Kawasan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah. Pada tahun 2024 terdapat 201,46 Ha kawasan permukiman kumuh sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel II.120 Luas Pemukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kawasan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Pasar lubuk Jambi	Kuantan Mudik	4,58
2	Pasar Cerenti	Cerenti	5,28
3	Koto Peraku	Crenti	11,05
4	Banjar Padang	Kuantan Mudik	7,5
5	Sawah	Kuantan Tengah	10,43
6	BringinTaluk	Kuantan Tengah	32,46

No	Kawasan	Kecamatan	Luas (Ha)
7	Simpang Tiga	Kuantan Tengah	10,17
8	Benai	Benai	16,61
9	Kawasan Muaralembu	Singingi	63,81
10	Pasar Baru	Kuantan Hilir	6,7
11	Pasar Usang	Kuantan Hilir	7,4
12	Koto Taluk	Kuantan Tengah	25,47
	12 Kawasan	6 Kecamatan	201,46

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor: 78/II/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil tersebut diperkuat melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Provinsi Riau, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau Nomor: 600/DPKPP-KS/IV/2024/491; 517/BA-PKP/IV/2024; 51/BA.KUMUH/BPPW-RIAU/2024 yang menetapkan luasan verifikasi Permukiman Kumuh Kabupaten Kuantan Singingi seluas 201,46 Ha dengan lokasi 12 kawasan.

Luasan hasil verifikasi tersebut menjadi dasar penerbitan SK Kumuh Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dengan Nomor: Kpts.296/VIII/2024, Tanggal 07 Agustus 2024, yang akan dijadikan acuan dalam intervensi kawasan kumuh pada periode RPJMD Tahun 2025–2029.

5. Persentase Permukiman yang Tertata

Stagnannya persentase permukiman yang tertata di Kabupaten Kuantan Singingi selama beberapa tahun terakhir menandakan bahwa penataan kawasan permukiman belum menjadi prioritas utama atau terkendala berbagai hambatan implementasi di lapangan. Tidak adanya peningkatan menandakan program penataan berjalan lambat, atau upaya yang dilakukan belum mampu mengimbangi perkembangan kawasan permukiman baru maupun kebutuhan penataan yang sudah ada. Hal ini berpotensi menyebabkan kawasan permukiman yang belum tertata semakin meluas dan berdampak pada kualitas lingkungan, infrastruktur dasar, dan kenyamanan hidup masyarakat.

Tabel II.121 Persentase Permukiman yang tertata di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024

No	Jumlah Rumah Suatu Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman yang tertata pada waktu tertentu	6.881,96	6.881,96	6.881,96	6.881,96	6.881,96
2	Luas Permukiman yang seluruhnya pada waktu tertentu	32.628,37	32.628,37	32.628,37	32.628,37	32.628,37
3	Rasio	0,2109	0,2109	0,2109	0,2109	0,2109

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kuantan Singingi, 2025

Kondisi ini juga mencerminkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mendorong investasi penataan permukiman, serta meninjau kembali efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Jika tidak ada perubahan pendekatan, maka tantangan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan penyediaan perumahan layak akan semakin sulit ditangani. Oleh karena itu, langkah strategis dan inovatif perlu diambil agar proporsi

permukiman tertata dapat ditingkatkan secara nyata demi terciptanya lingkungan hunian yang sehat, teratur, dan mendukung kualitas hidup masyarakat ke depan.

6.Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman, yang ditunjang dengan keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Kuantan Singingi. Data terbaru menunjukkan bahwa realisasi pembangunan atau penyediaan PSU belum mampu menjawab seluruh kebutuhan lingkungan permukiman di hampir semua kecamatan. Hal ini terlihat dari rendahnya rasio capaian PSU jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, sehingga masih banyak lingkungan permukiman yang belum terlayani secara optimal oleh fasilitas pendukung tersebut.

Tabel II.122 Cakupan Lingkungan Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU Berdasarkan Rasio Kebutuhan PSU (2024)

N o	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Lingkungan	Rasio Kebutuhan PSU		Rasio Capaian (%)
1	Kuantan Mudik	560,81	24	240	10,00	0,021
2	Hulu Kuantan	289,80	12	120	10,00	0,008
3	Gunung Toar	145,22	14	140	10,00	0,000
4	Pucuk Rantau	511,04	10	100	10,00	0,000
5	Singingi	966,31	14	140	10,00	0,036
6	Singingi Hilir	986,76	12	120	10,00	0,000
7	Kuantan Tengah	466,92	23	230	10,00	0,039
8	Sentajo Raya	238,04	15	150	10,00	0,027
9	Benai	231,18	16	160	10,00	0,006
10	Kuantan Hilir	129,50	16	160	10,00	0,031
11	Pangean	231,18	17	170	10,00	0,018
12	Logas Tanah Darat	481,11	15	150	10,00	0,047
13	Kuantan Hilir Seberang	94,42	14	140	10,00	0,007
14	Cerenti	175,91	13	130	10,00	0,015
15	Inuman	83,75	14	140	10,00	0,057
	Jumlah	5.457,86	229	2.290	150,00	0,312

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Ketimpangan antar kecamatan dalam pemenuhan PSU juga mempertegas pentingnya upaya pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan kawasan permukiman baru. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kebijakan afirmatif dan intervensi yang lebih terarah untuk percepatan penyediaan PSU agar kualitas lingkungan permukiman dapat meningkat secara signifikan. Tanpa adanya perbaikan tata kelola dan prioritas pembangunan PSU yang jelas, ketertinggalan infrastruktur dasar di kawasan permukiman akan sulit diatasi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan upaya mewujudkan lingkungan yang sehat serta aman.

d) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel II.123 Anggota Linmas Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah (orang)
1	Kuantan Tengah	180

No	Kecamatan	Jumlah (orang)
2	Gunung Toar	54
3	Kuantan Mudik	100
4	Hulu Kuantan	46
5	Pucuk Rantau	46
6	Singingi	106
7	Singingi Hilir	132
8	Sentajo Raya	108
9	Benai	62
10	Pangean	72
11	Logas Tanah Darat	82
12	Kuantan Hilir	56
13	Kuantan Hilir Seberang	46
14	Inuman	70
15	Cerenti	56
Jumlah		1.216

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Dalam upaya memberikan suasana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibutuhkan satuan perlindungan masyarakat, tahun 2024 jumlah terbanyak di Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 180 Orang dan paling sedikit di Kecamatan Hulu Kuantan, Pucuk rantau, serta Kuantan Hilir Seberang sebanyak 46 Orang.

1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam rangka menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dengan menjaga ketertiban dan ketentraman umum, berikut tingkat penyelesaian pelaksanaan K3 Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2023.

Tabel II.124 Tingkat Penyelesaian Pelaksanaan K3 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024

Jenis Pelanggaran	2021		2022		2023		2024	
	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian	Jumlah pelanggaran	Jumlah Penyelesaian
I. Pelanggaran K3**								
1) Perjudian	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Kenakalan Remaja	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Curanmor	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Narkotika	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Kecelakaan	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Balapan Liar	411	411	12	12			32	32
8) Perilaku Berpasang-pasangan	73	73	205	205			122	122
9) Pedagang Kaki Lima (PKL)	44	44	103	103	156	156	117	117
10) Penertiban Reklame	0	0	0	0			3	3
II. Kasus Pertikaian Antar Warga*								
1) Antar Etnis	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Antar Wilayah Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Antar Agama	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Antar Simpatisan Parpol	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Antar Pelajar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Korban Pertikaian Antar Warga*								
1) Korban Meninggal	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Korban Luka-Luka	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pekat								

Jenis Pelanggaran	2021		2022		2023		2024	
1. Judi	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Narkoba	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Miras	45	45	0	0	221	221	10	10
4. Seks bebas	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tindakan kriminal lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Unjuk Rasa								
1). Jumlah Kasus Unjuk Rasa*	0	0	1	1	0	0	0	0
2). Sengketa Pengusaha dan Pekerja*	0	0	0	0	2	2	0	0
VII. Jumlah Tindak Yutisi/Non Yustisi*								
1). Jumlah Kasus Pelanggaran Perda	5	5	4	4	5	5	26	26
2). Jumlah Penyelesaian Perda	5	5	4	4	5	5	26	26

Sumber : Satpol-PP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Selama tahun 2024 terjadi sebanyak 336 jumlah pelanggaran atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran yang terjadi didominasi oleh penyakit masyarakat (PEKAT) yaitu sebanyak 204 pelanggaran. Dari 336 pelanggaran yang mengganggu K3 mampu diselesaikan 100% melalui peringatan dan pembinaan.

2. Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas lapangan (operasional)

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel II.125 Sarana Prasarana Penunjang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Klasifikasi Aset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Tanah			
2	Alat Angkutan			
	1 Unit Mobil Jabatan	1	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Mobil Patwal	2	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Mobil Patroli	1	Unit	Ada di KIB
	4 Unit Mobil Pemadam	6	Unit	Ada di KIB
	2 Unit Mobil Pemadam	2	Unit	Ada di KIB
	2 Unit Mobil Mini Bus	2	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Mobil Box	1	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Mobil Dalhura	1	Unit	Ada di KIB
	2 Unit GL max	2	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Yamaha	1	Unit	Ada di KIB
	2 Unit Kawasaki	2	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Mobil Operasional	1	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Mobil Operasional	1	Unit	Ada di KIB
	1 Unit Perahu Karet	1	Unit	Ada di KIB
3	Bangunan/Gedung			
	Garasi Mobil	1	Unit	1 Unit Bangunan Kantor Tidak Tercatat Pada KIB Satpol pp dan Damkar
	Pos Jaga Rayon 1	1	Unit	Ada di KIB
	Pos Jaga Rayon 2	1	Unit	Ada di KIB
	Pos Jaga Rayon 3	1	Unit	Ada di KIB

No	Klasifikasi Aset	Jumlah	Satuan	Keterangan
	Gudang Peralatan dan Canopy	1	Unit	Ada di KIB
4	Proyektor	1	Unit	Ada di KIB
5	Alat Alat Studio			
	Handycam	1	Unit	Ada di KIB
	Kamera Digital	1	Unit	Ada di KIB
	Menara dan Receiver Lengkap	1	Unit	Rusak Berat
	Reg Damkar	1	Unit	Rusak Berat
	Handytalkie	103	Unit	Ada di KIB
6	Peralatan Pemadam Kebakaran			
	Dividing Breaching	3	Unit	Ada di KIB
	Fire House	16	Unit	Ada di KIB
	Personal Fire axe	3	Unit	Ada di KIB
	Gancu Pemadam Kebakaran	5	Unit	Ada di KIB
	Perlengkapan Rescue	1	Unit	Ada di KIB
	Sabit Semak	1	Unit	Ada di KIB
	Pelampung Life Jacket	9	Unit	Ada di KIB
	Nozel Tabir Aluminium	3	Unit	Ada di KIB
	Pompa Portable	1	Unit	Ada di KIB
	Gergaji Chain Saw	4	Unit	Ada di KIB
	Pakaian Panas/Lengkap	1	Unit	Ada di KIB
	Pipa Pemancar Kebakaran	1	Unit	Ada di KIB
	Strainer (Saringan)	1	Unit	Ada di KIB
	Alat Pemadam/Portable	1	Unit	Ada di KIB
	Lemari Slang	2	Unit	Ada di KIB
	Pistol Grif Nozzel	11	Unit	Ada di KIB
	Connection 2,5"	1	Unit	Ada di KIB
	Breathing Apparatus	2	Unit	Ada di KIB
	Compressor Breathing Apparatus	1	Unit	Ada di KIB
	Topeng (Masker) Oxygen	30	Unit	Ada di KIB
	Sepatu Boot	10	Unit	Ada di KIB
	Grab Stick	10	Unit	Ada di KIB
	Baju Anti Panas	12	Unit	Ada di KIB
	Pakaian Evakuasi Sarang Tawon	5	Unit	Ada di KIB
7	Alat Alat Kantor			
	Meja Lobby	1	Unit	Ada di KIB
	Meja Rapat	8	Unit	Ada di KIB
	Meja Kerja Kayu	32	Unit	Ada di KIB
	Meja Pejabat E II	1	Unit	Ada di KIB
	Meja Pejabat E III	1	Unit	Ada di KIB
	Meja Pejabat E IV	1	Unit	Ada di KIB
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit	Ada di KIB
	Kursi Pejabat E II	1	Unit	Ada di KIB
	Kursi Pejabat E III	1	Unit	Ada di KIB
	Kursi Pejabat E IV	1	Unit	Ada di KIB

No	Klasifikasi Aset	Jumlah	Satuan	Keterangan
	Kursi Rapat	23	Unit	Ada di KIB
	Kursi Besi/ Metal	32	Unit	Ada di KIB
	AC	17	Unit	Ada di KIB
	P.C Unit	10	Unit	Ada di KIB
	Tempat Tidur Kayu	8	Unit	Ada di KIB
	Lemari Kayu	1	Unit	Ada di KIB
	Printer	10	Unit	Ada di KIB
	Sofa Set	1	Unit	Ada di KIB
	Tirai/ Gorden	1	Unit	Ada di KIB
	Pintu	1	Unit	Ada di KIB
	Partisi Ruangan	1	Unit	Ada di KIB
	Wallpaper	1	Unit	Ada di KIB
	Lemari Buku Arsip Dinamis	2	Unit	Ada di KIB
	Note Book	1	Unit	Ada di KIB
	Laptop	5	Unit	Ada di KIB

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

3. Jumlah Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah. Pertimbangan Peraturan Daerah penyakit masyarakat masih menjadi perhatian khusus pada tahun 2023.

4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu bidang SPM yang masuk dalam kategori Prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan hasil evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum nasional, dilakukan beberapa perubahan kebijakan terkait SPM antara lain : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 144 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota. Target pencapai SPM oleh daerah mengacu pada target nasional yaitu 100% yang disesuaikan dengan penganggaran terhadap jenis pelayanan dasar, seperti pada tabel berikut :

Tabel II.126 Target Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target Capaian SPM oleh Daerah (%)				Realisasi Capaian SPM
			2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4				5
I	Pelayanan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	85	86	87	88	94,66

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Target Capaian SPM oleh Daerah (%)				Realisasi Capaian SPM
			2021	2022	2023	2024	
II	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	100	100	100	100
III	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
IV	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	100	100
V	Kebakaran	Korban Kebakaran	100	100	NIHIL		NIHIL

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

e) Sosial

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Pelaksanaan penyelenggaran untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kemudian menggunakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Permasalahan kesejahteraan sosial memerlukan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang biasa dikenal dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membangun kesejahteraan sosial, melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukannya penggalian potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), berbagai macam upaya yang dilakukan serta kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari 26 Kategori yang ada, di Kabupaten Kuantan Singingi hanya 18 Kategori yang termasuk dalam data PPKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kestabilan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, panyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam, perempuan rawan sosial, keluarga fakir miskin, dan keluarga bermasalah sosial psikologis. Pada tahun 2022 PPKS yang memperoleh bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sebanyak 171.707 orang dari jumlah PPKS sebanyak 174.569 orang atau sebesar 101,66 %, dalam hal ini termasuk korban bencana alam yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetapi bukan termasuk fakir miskin. Bantuan sosial yang didapatkan oleh PPKS penyandang disabilitas berupa 10 buah kursi roda dan 8 buah tongkat kaki empat, selain itu penerima manfaat yang termasuk dalam data DTKS mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena Kabupaten Kuantan Singingi sudah mendapatkan UHC sejak 1 Desember Tahun 2022.

2. Persentase PPKS yang Tertangani

Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah, sehingga mereka mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Dari 9 indikator PPKS, 8 indikator sudah tertangani 100% pada tahun 2024, namun 1 indikator hanya ditangani 52,13% yaitu keluarga fakir miskin.

Tabel II.127 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Jenis PPKS	Satuan	Jumlah	Jumlah yang Tertangani	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlantar	Orang	2	2	0
2	Anak Terlantar	Orang	10	10	100
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Orang	39	39	100
4	Anak Dengan Kedisabilitasan	Orang	47	47	100
5	Anak Yang Memerlukan Perlindungan khusus	Orang	39	39	100
6	Lanjut Usia Terlantar	Orang	391	391	100
7	Penyandang Disabilitas	Orang	218	218	100
8	Korban Bencana Alam	KK	5.370	5.370	100
9	Keluarga Fakir Miskin	KK	57.703	30.081	52,13

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kuantan Singingi, 2025

1. Perkembangan PPKS Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel II.128 Perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jenis PPKS	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Orang	0	0	0	1	5
2	Anak Terlantar (AT)**	Orang	324	324	2	1	35
3	Anak yang bermasalah dengan Hukum (ABH)**	Orang	33	25	24	39	23
4	Anak Jalanan (AJ)	Orang	0	0	0	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)**	Orang	3	3	7	47	11
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan/ diperlakukan salah	Orang	0	0	0	38	22
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus**	Orang	12	12	2	59	22
8	Lanjut usia terlantar (LUT)*	Orang	1.511	1.511	34	391	45
9	Penyandang Disabilitas*	Orang	435	391	40	218	45
10	Tuna Susila	Orang	8	8	0	0	0
11	Gelandangan	Orang	1	1	0	2	3
12	Pengemis	Orang	5	5	2	0	0
13	Pemulung	Orang	10	10	2	0	0
14	Kelompok Minoritas	Orang	2	2	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLK)	Orang	58	0	0	0	0
16	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	Orang	0	0	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	6	6	0	0	0
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	0	0	38	22
20	Pekerja migran bermasalah sosial	Orang	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam (KBA)	Orang	1.274	354	2.836	17.991	15.715
22	Korban bencana sosial (KBS)	Orang	0	0	17	0	15
23	Perempuan rawan ekonomi	Orang	0	0	0	0	0
24	Fakir miskin*	Orang	81.800	171.607	171.607	173.721	172.114
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	Orang	0	0	0	0	0
26	Komunitas Adat terpencil (KAT)	Orang	0	0	0	0	0

No	Jenis PPKS	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah		34.002	85.482	174.259	174.569	188.077

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

4. Jenis dan Perkembangan SPM di Luar Panti Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Kab/Kota. Selanjutnya hanya berwenang melaksanakan Standar Pelayanan pada 5 kelompok PPKS sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel II.129 Jenis dan Perkembangan SPM di luar Panti Sosial Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jenis SPM	Satuan	Tahun					Capaian Target Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	N/A	391	40	218	45	100%
2	Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Orang	324	324	10	10	35	100%
3	Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Orang	2.852	1.511	34	391	45	100%
4	Gelandangan dan Pengemis	Orang	5	5	2	2	3	100%
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang	8.586	354	2.853	17.991	15.642	100%

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

5. Jenis Program Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa program bantuan sosial dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dan harus didampingi penyalurannya, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran penerimaannya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kuantan Singingi seperti dijelaskan pada tabel berikut

Tabel II.130 Jenis Program Bantuan Sosial Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jenis Program	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	KPM	10.971	11.062	11.912	11.137	12.307
2	Bansos Pangan (BSP)	KPM	15.387	15.305	19.096	18.423	18.910
3	Bansos Tunai (BST)	KPM	22.080	0	0	0	0
	Jumlah	Orang	48.438	26.367	31.008	29.560	31.217

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

6. Perkembangan DTKS Kabupaten Kuantan Singingi

Semua PPKS yang menjadi sasaran penanganan Pemerintah Kabupaten termasuk Penerima Program Bantuan Sosial sebagaimana digambarkan pada dua tabel di atas semestinya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.131 Perkembangan DTKS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jenis Data	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	orang	81.800	171.607	173.721	173.721	172.114
Jumlah		orang	81.800	171.607	58.575	173.721	172.114

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Kuantan Singingi, 2025

7. Jenis dan Jumlah PSKS Kabupaten Kuantan Singingi

Selanjutnya, guna memberikan layanan yang maksimal kepada seluruh PPKS yang menjadi kewenangan kabupaten dan penerima bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten dibantu oleh petugas perorangan, kelompok atau lembaga yang bergerak di bidang sosial yang lazim disebut Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Jumlah PSKS yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan hingga tahun 2021 namun mengalami penurunan hingga tahun 2023 Pertumbuhan PSKS tersebut hanya ditunjang oleh pertambahan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan karang. Jumlah PSKS secara aktif berperan dalam penanganan PPKS di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020–2024, lihat tabel berikut.

Tabel II.132 Jenis dan Jumlah PSKS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jenis PSKS	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	1	1	0	0	0
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	60	60	60	65	65
3	Tagana	Orang	31	19	19	18	18
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Unit	3	3	3	5	5
5	Karang Taruna (KT)	Unit	90	97	97	95	95
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Unit	1	1	1	0	0
7	Keluarga Pioner	Orang	0	0	0	0	0
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Unit	6	6	0	0	0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	0	0	0	0	0
10	Penyuluh Sosial	Orang	2	2	2	3	3
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	15	15	15	15	15
12	Dunia Usaha	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah		Unit-Orang	203	204	197	183	183

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

8. Kemiskinan Ekstrem

Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Analisis

distribusi kemiskinan ekstrem menurut kecamatan memperlihatkan bahwa permasalahan ini tidak tersebar merata, melainkan terfokus pada kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi dan ketersediaan layanan dasar yang belum memadai. Kondisi ini merefleksikan kompleksitas persoalan kemiskinan ekstrem yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya.

Tabel II.133 Kemiskinan Ekstrim Per Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu (Ribu)
1	Kuantan Mudik	1.818	8.041
2	Kuantan Tengah	4.237	18.650
3	Singingi	4.501	18.940
4	Kuantan Hilir	1.766	7.013
5	Cerenti	2.303	10.148
6	Benai	1.959	8.208
7	Gunung Toar	1.609	6.805
8	Singingi Hilir	4.712	20.429
9	Pangean	2.665	10.939
10	Logas Tanah Darat	3.082	12.475
11	Inuman	2.053	8.696
12	Hulu Kuantan	692	2.937
13	Kuantan Hilir Seberang	1.514	5.737
14	Sentajo Raya	3.683	15.863
15	Pucuk Rantau	901	3.975
Kuantan Singingi		37.831	158.856

Sumber : BPS Provinsi Riau, 2024

Fakta bahwa kecamatan seperti Singingi Hilir, Singingi, dan Kuantan Tengah menempati posisi tertinggi dalam jumlah penduduk dan keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem menandakan perlunya strategi intervensi yang lebih terfokus dan inovatif. Sementara kecamatan dengan angka kemiskinan ekstrim rendah cenderung memiliki jumlah penduduk lebih sedikit, namun tetap memerlukan perhatian agar tidak mengalami kenaikan di masa mendatang. Penanganan kemiskinan ekstrem harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, memperkuat basis data yang akurat, serta memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat benar-benar menysasar kelompok rentan secara efektif dan berkelanjutan.

Tahun 2025 Data DTKS, P3KE, dan Regsosek di tunggalkan serta di update dengan data Dukcapil dan beberapa sumber data lainnya. Data pemutakhiran disebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Pemutakhiran data penting untuk memastikan bahwa program penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

9. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah yang dilalui oleh Sungai Kuantan dan Singingi. Kondisi ini juga berdampak negatif yaitu kerawanan terhadap bencana banjir. Daerah-daerah yang berada di tepi aliran sungai ini berpotensi terkena banjir terutama saat musim penghujan dimana debit air di sungai meningkat di Kecamatan Cerenti, Inuman, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir seberang, Pangean, Benai, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Gunung Toar, Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan. Kawasan tersebut berpotensi terkena bencana banjir musiman karena morfologinya yang relatif rendah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggarkan untuk siaga tanggap darurat melalui Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membantu masyarakat yang terkena banjir. Berikut tabel yang menunjukkan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2020–2024.

Tabel II.134 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jumlah Yang Menerima Jaminan Sosial	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah keluarga Terkena Banjir	KK	1.274	59	2.836	5.370	15.713
2	Persentase Bantuan Bencana Banjir	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

10. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Orang yang mengalami Penyandang Fisik dan Mental sekaligus atau cacat ganda adalah orang yang mengalami gangguan pada fungsi tubuh ,penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari hari secara layak/wajar. Orang-orang ini perlu mendapatkan Jaminan Sosial dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Seseorang yang dikatakan Lanjut Usia (Lansia) Tidak Potensial, jika ia telah berusia 65 Tahun keatas yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Tabel berikut menunjukkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Berdasarkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh data penduduk penyandang disabilitas per Kecamatan dan per jenis disabilitas sebagai berikut:

:

Tabel II.135 Penyandang Disabilitas Sesuai Jenis Per Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

KODE	WILAYAH	FISIK			NETRA			RUNGU			MENTAL			FISIK DAN MENTAL			LAINNYA		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1409	KUANTAN SINGINGI	16	13	29	14	14	28	24	18	42	64	25	89	4	-	4	12	9	21
140901	KUANTAN MUDIK	1	2	3	1	1	2	3	1	4	8	3	11	1	-	1	1	1	2
140902	KUANTAN TENGAH	4	2	6	2	3	5	4	4	8	13	4	17	-	-	-	2	1	3
140903	SINGINGI	-	2	2	1	1	2	3	1	4	11	2	13	-	-	-	2	-	2
140904	KUANTAN HILIR	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
140905	CERENTI	2	1	3	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
140906	BENAI	1	-	1	-	2	2	2	1	3	3	-	3	-	-	-	1	2	3
140907	GUNUNGTOAR	1	-	1	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
140908	SINGINGI HILIR	-	1	1	-	-	-	-	2	2	12	7	19	1	-	1	3	4	7
140909	PANGEAN	2	3	5	6	2	8	2	-	2	2	2	4	1	-	1	-	-	-
140910	LOGAS TANAH DARAT	-	-	-	2	2	4	3	2	5	2	1	3	-	-	-	-	1	1
140911	INUMAN	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
140912	HULU KUANTAN	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
140913	KUANTAN HILIR SEBERANG	2	-	2	1	-	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-
140914	SENTAJO RAYA	3	-	3	-	-	-	1	4	5	6	4	10	-	-	-	1	-	1
140915	PUCUK RANTAU	-	1	1	1	-	1	4	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial adalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. PKH sebagai salah satu program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial KPM, dengan adanya bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM. Selanjutnya KPM dapat meningkat taraf hidup melalui akses layanan kesehatan, pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Salah satu indikator keberhasilan program PKH adalah tergraduasi sejahtera.

Graduasi merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH, ada dua model graduasi yang dikenal dalam PKH yaitu :

- Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Misalnya tidak memiliki pengurus kepesertaan, tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan, Kesehatan, Pendidikan atau Kesejahteraan Sosial.
- Graduasi Sejahtera Mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya. Misalnya KPM menolak bantuan karena merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain, KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN), memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses, dan/atau memperoleh harta kekayaan tertentu

Berikut dapat kita lihat daftar By name by address Program Keluarga Harapan yang sudah menjadi graduasi di Kabupaten Kuantan Singingi. PKH yang sudah menjadi Graduan sebanyak 199 orang karena memiliki usaha ekonomi sendiri.

Tabel II.136 Daftar BNBA KPM Graduasi Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Nama Pengurus	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jenis Usaha	Omzet/Bulan
1	Yanti	Pangean	Pulau Deras	Jual Beli Ternak	10.000.000
2	Rosnani	Pangean	Pulau Deras	Kolam Ikan	3.000.000
3	Pusmawati	Benai	Koto Benai	Toko Klontong	2.000.000
4	Jayanti Sister	Benai	Koto Benai	Kolam	2.500.000
5	Sasmita	Benai	Simandolak	Kulit Sapi	3.000.000
6	Syerli Syarifa	Gunung Toar	Seberang Gunung	Warung Sembako	5.000.000
7	Sutri Hajar	Gunung Toar	Toar	Menjahit	2.000.000
8	Ramaidar	Gunung Toar	Teberau Panjang	Bengkel	3.000.000
9	Susi Susanti	Gunung Toar	Gunung	Perabot	5.000.000
10	Yupi Andani	Hulu Kuantan	Mudik Ulo	Jual Beli Buah Sawit	4.500.000
11	Marlis	Hulu Kuantan	Desa Lubuk Ambacang	Penjualan Perabotan Dan Pakaian	5.000.000

No	Nama Pengurus	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jenis Usaha	Omzet/Bulan
12	Suswenti	Kuantan Mudik	Sungai Manau	Kebun Sawit	5.000.000
13	Sarlina	Kuantan Mudik	Air Buluh	Jual Beli Buah Sawit	6.500.000
14	Elfi Fitriani	Pangean	Rawang Binjai	Kolam Ikan	6.000.000
15	Rosnida	Pangean	Tanah Bekali	Warung Sembako	5.000.000
16	Sisi Silawati	Pangean	Tanah Bekali	Warung Sembako	3.000.000
17	Evi Rianis	Pangean	Pembatang	Warung Sembako Dan Kebun Sawit	5.000.000
18	Sasmiati	Sentajo Raya	Pulau Kopung	Jual Madu Murni	4.000.000
19	Endrayani	Sentajo Raya	Muaro Sentajo	Suami Operator Alat Berat	4.000.000
20	Teti Gustia Wati	Sentajo Raya	Jalur Patah	Mebel	6.000.000
21	Muriyanti	Sentajo Raya	Jalur Patah	Warung Sarapan Pagi	2.500.000
22	Ari Jayanti Rukmawati	Singingi	Sungai Kuning	Kebun Sawit, Berjualan Pakaian	5.000.000
23	Sri Mulyani	Singingi	Sungai Kuning	Kebun Sawit	5.000.000
24	Yuningsih	Singingi	Pasir Emas	Ternak Ayam Ras	7.500.000
25	Lina Wati	Singingi Hilir	Simpang Raya	Warung Sarapan Pagi	2.500.000
26	Sineng Rahayu	Singingi Hilir	Koto Baru	Kebun Sawit	3.000.000

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, maka Pemerintah juga berkewajiban memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar panti atau di dalam panti. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:

- Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
- Anak jalanan;
- Anak balita;
- Anak Terlantar;
- Penyandang Disabilitas Terlantar;
- Penyandang Disabilitas non Terlantar;
- TS;
- KPO;
- KTK;
- Lanjut Usia Terlantar;
- Lanjut Usia non Terlantar; dan
- Korban Penyalahgunaan NAPZA

Untuk pelayanan yang diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di luar Panti di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 ada sebanyak 45 orang sebagaimana yang terinci dalam tabel berikut :

Tabel II.137 Rekapitulasi Layanan yg diberikan kepada PPKS di luar Panti (Yatim dan Lansia) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Nama	Nama_Kec	Kel_Name
1	Damirin	Sentajo Raya	Beringin Jaya
2	Jorusna	Gunung Toar	Pisang Berebus
3	Suardi	Kuantan Mudik	Pebaun Hulu
4	R. Rosmiati	Kuantan Hilir Seberang	Lumbok
5	Juhara	Kuantan Hilir Seberang	Kasang Limau Sundai
6	Saina	Kuantan Hilir Seberang	Tanjung
7	Marjusmi	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo
8	Khadijah	Kuantan Hilir Seberang	Tanjung
9	Usnur Wati	Hulu Kuantan	Tanjung
10	Edi Prayitno	Sentajo Raya	Jalur Patah
11	Muhammad Ali	Kuantan Tengah	Simpang Tiga
12	Nuraisyah	Kuantan Tengah	Simpang Tiga
13	Sahrul	Kuantan Tengah	Simpang Tiga
14	Aminah	Pangean	Sako
15	Ilyas	Cerenti	Kampung Baru Timur
16	Nurma	Cerenti	Kampung Baru Timur
17	Sidik	Singingi	Muara Lembu
18	Hamisa	Benai	Banjar Benai
19	Sarpina	Kuantan Mudik	Desa Bukit Kauman
20	Rosma Aminah	Kuantan Tengah	Sawah
21	Sansika	Kuantan Tengah	Sawah
22	Agusman	Kuantan Tengah	Sawah
23	Zainiar	Singingi Hilir	Koto Baru
24	Nuria	Singingi Hilir	Koto Baru
25	Siti Nurjuda	Pangean	Desa Pulau Deras
26	Muliati	Singingi	Muara Lembu
27	Syamsiar	Sentajo Raya	Koto Sentajo
28	Riyam	Pangean	Sukaping
29	Samsidar	Pangean	Pauh Angit
30	Darusna	Pangean	Tanah Bekali
31	Anita Resya	Kuantan Tengah	Sungai Jering
32	Wilijar	Kuantan Tengah	Simpang Tiga
33	Siti Fatimah	Kuantan Tengah	Beringin Taluk
34	Jo Asia	Kuantan Tengah	Pulau Aro
35	Sarina	Kuantan Tengah	Simpang Tiga
36	Silisman	Kuantan Tengah	Pulau Banjar Kari
37	Astia	Kuantan Tengah	Sawah
38	Masrati	Kuantan Tengah	Simpang Tiga
39	Jusmawati	Kuantan Tengah	Pulau Banjar
40	Nurismi	Kuantan Tengah	Sawah
41	Emiwati	Kuantan Tengah	Simpang Tiga
42	Asnidar	Kuantan Tengah	Beringin Taluk
43	Jasri Amin	Kuantan Tengah	Pulau Aro
44	Jul Asna	Kuantan Tengah	Pulau Aro
45	Mirawati	Kuantan Tengah	Simpang Tiga

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Tabel II.138 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Jumlah Yang Menerima Jaminan Sosial	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Asistensi Sosial Penderita Disabilitas	Orang	5	56	322	142	238
2	Asistensi Lanjut Usia Tidak Potensial	Orang	-	4	1.078	357	254

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Jumlah penerima Asistensi Sosial Penderita Disabilitas di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 berjumlah 238 orang. Sementara itu, penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Tidak Potensial tertinggi mencapai 1.078 orang terjadi pada tahun 2022, dan pada tahun 2024 berjumlah 254 orang. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan berupaya memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan

II.4.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, terdapat indikator-indikator dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan ini. Berikut ini tabel indikator ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024.

Tabel II.139 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Sengketa Perusahaan per Tahun	11	7	6	5	23
2	Keselamatan dan Perlindungan					
	- Peraturan Perusahaan (PP)	65	65	35	18	20
	- Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6	6	3	2	1
	- LKS Bipartit	15	15	-	1	1
	- P2K3	-	17	44	-	7
3	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program JAMSOSTEK	14.580	15.195	7.487	5.351	24.077
4	Rasio Lulusan S1/S2/S3	13.852	15.024	15.599	5.372	6,2%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Angka sengketa perusahaan pada tahun 2020–2024 mengalami fluktuatif, namun tahun 2022 sebanyak 6 kasus, turun dibandingkan 2021 sebanyak 7 kasus dan tahun 2024 meningkat kembali di angka 23 kasus. Hal ini menandakan hubungan perusahaan dengan masyarakat tempatan masih kurang baik, perlu peran pemerintah daerah mendorong hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Keselamatan dan perlindungan pekerja/buruh pada perusahaan yang dilegalisasi oleh pemerintah daerah pada tahun 2021 sebanyak 65, sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 20. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK tahun 2020 sebanyak 14.580, pada tahun 2021 sebesar 15.195 dan pada tahun 2023 sebesar 5.351 mengalami peningkatan menjadi 24.077 pada tahun 2024. Rasio lulusan S1, S2 dan S3 pekerja pada perusahaan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5.372.

Lapangan usaha pekerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah :

Tabel II.140 Lapangan Usaha Pekerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Lapangan Usaha Pekerjaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	Pertanian	3.333
2	Pertambangan dan Penggalian	-
3	Industri Pengolahan	1.058
4	Listrik dan Air Minum	7
5	Bangunan	11
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	374
7	Angkutan	97
8	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	-
9	Jasa-jasa	471
Jumlah		5.351
	Tahun 2022	15.435
	Tahun 2021	4.719
	Tahun 2020	3.003

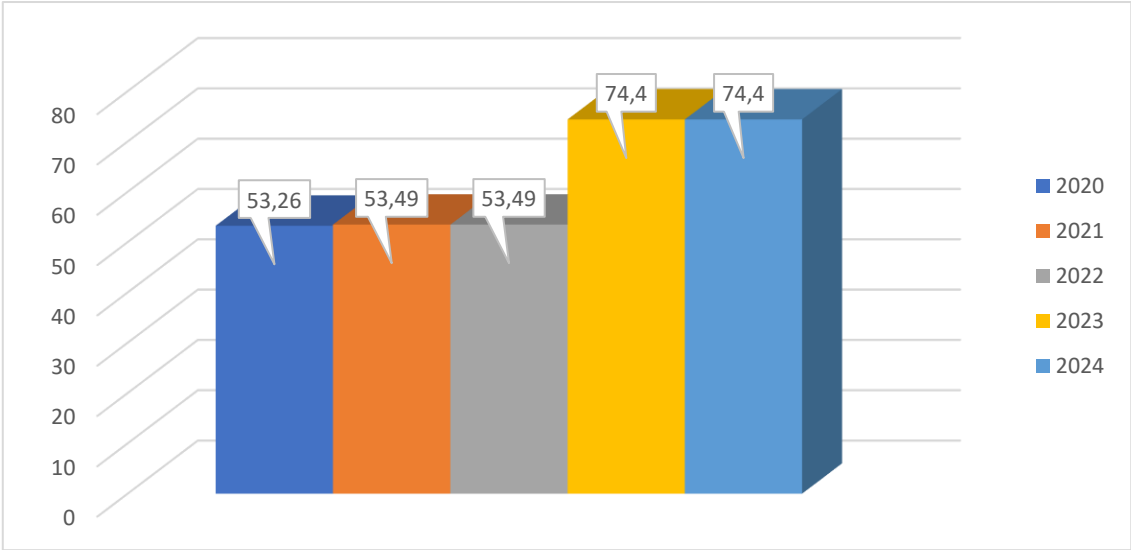
Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka Tahun, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada tahun 2024 bahwa lapangan usaha pekerjaan paling banyak menampung tenaga kerja adalah industri pertanian sebanyak 3.333 tenaga kerja. Sebagaimana yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah merupakan jumlah perempuan yang terlibat di pemerintahan dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, sebagaimana dalam Gambar berikut :



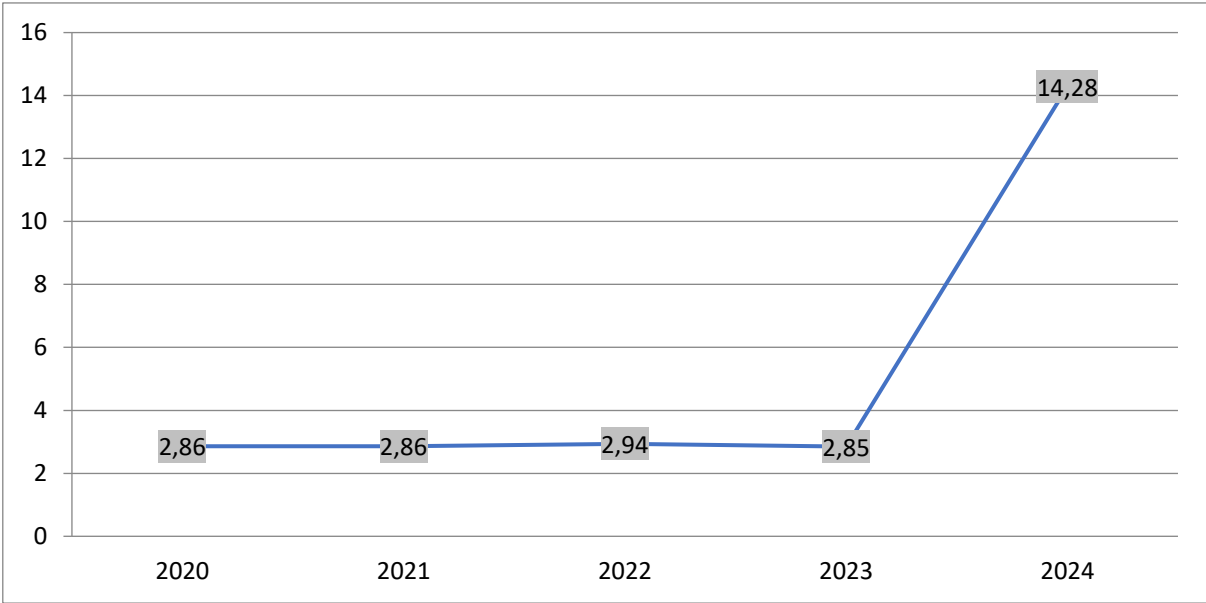
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.77 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi

Angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat dari 53,49 tahun 2022 menjadi 74,4 pada tahun 2023 dan 2024, artinya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi semakin membaik.

b) Proporsi Kursi Yang diduduki Perempuan di DPR

Angka keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020–2024 masih rendah yaitu hanya 1 (satu) orang sebanyak 2,94% dari 35 (tiga puluh lima) anggota Dewan yang semestinya keterwakilan perempuan tersebut yaitu sebanyak 30 % di legislatif. Pada periode 2024–2029 sebanyak 5 (lima) orang atau sebanyak 14,28% dari 35 anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

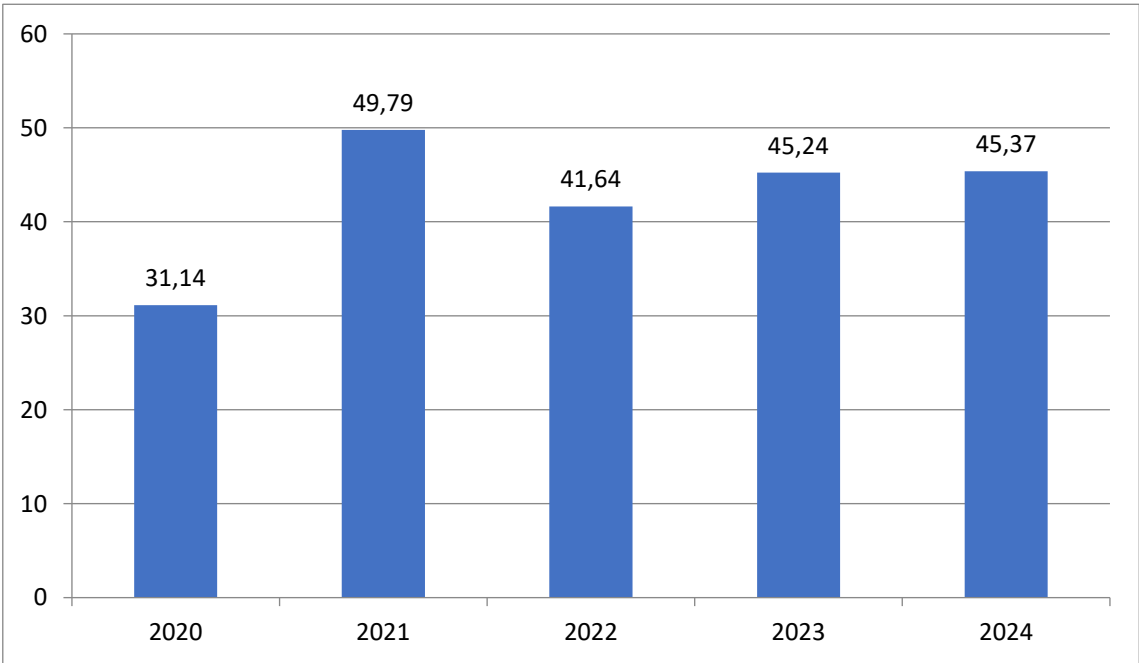


Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.78 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

c). Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan seberapa besar perempuan yang tertampung dalam dunia kerja, sebagaimana tabel berikut partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024.



Sumber : BPS Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.79 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2020 sebesar 31,14%, sedangkan partisipasi angkatan kerja tahun 2021 sebesar 49,79%, pada tahun 2022 sebesar 41,64% dan

tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 45,24% dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 43,37%.

d) Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian khusus pemerintah, berikut data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel II.141 Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	23	16	23	18	60
2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti	23	16	23	18	60
3	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

3. Pangan

a) Ketersediaan Pangan Utama

Data ketersediaan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

- Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PHH) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 berada pada angka 89,38 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 89,4 dan pada tahun 2022 pada angka 90,7 dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 pada angka 84,1 untuk mencapai pola konsumsi pangan penduduk yang ideal perlu dilakukan suatu gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, agar pola konsumsi yang diharapkan sesuai dengan pola harapan dapat terwujud. Tahun 2024 hasil analisis konsumsi pangan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

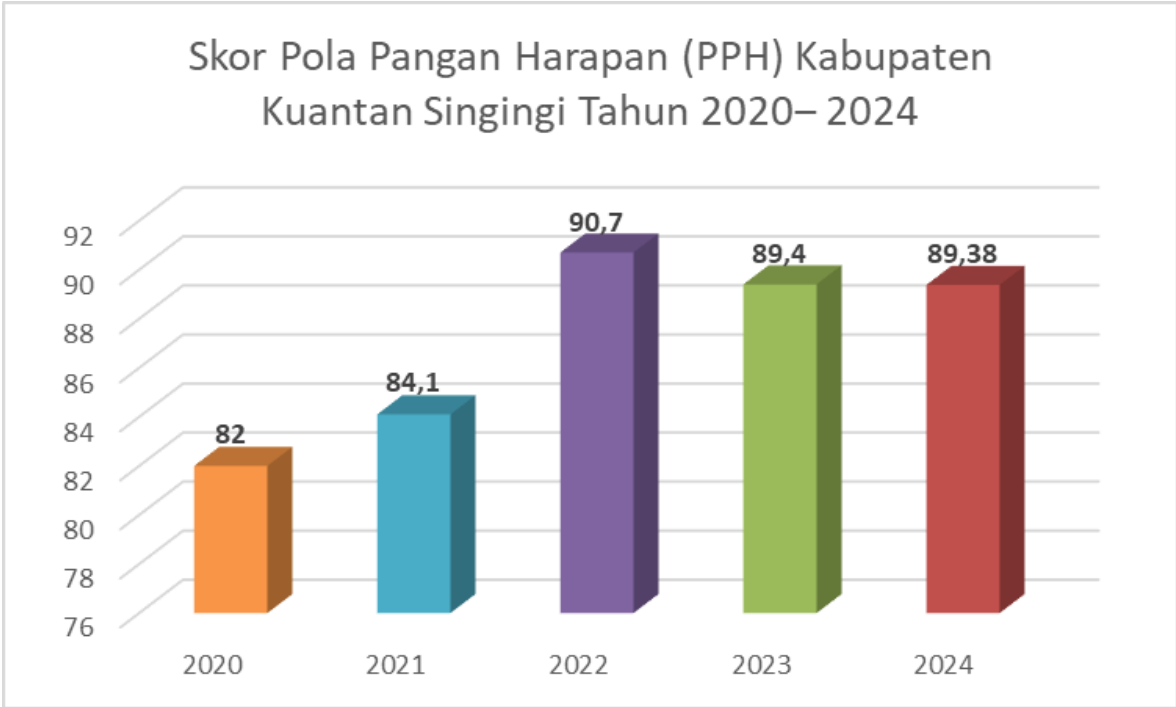
Tabel II.142 Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	AKG%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	254	975	47,7	46,4	0,5	23,8	23,2	25,0	23,2
2	Umbi-umbian	48	47	2,3	2,2	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1
3	Pangan Hewani	154,6	307	15	14,6	2	30	29,2	24	24
4	Minyak dan Lemak	40,3	361	17,7	17,2	0,5	8,8	8,6	5	5
5	Buah/Biji Berminyak	11,3	61	3	2,9	0,5	1,5	1,5	1	1

6	Kacang-kacangan	18,4	50	2,4	2,4	2	4,9	4,7	10	4,7
7	Gula	22,7	86	4,2	4,1	0,5	2,1	2	2,5	2
8	Sayur dan Buah	245,6	119	5,8	5,7	5,0	29,1	28,3	30	28,3
9	Lain-lain	47,7	41	2	1,9	-	-	-	-	-
Total			2.047	100	97,4		101,3	98,6	100	89,38

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Kualitas konsumsi pangan penduduk juga masih perlu ditingkatkan karena skor PPH tahun 2024 baru mencapai 89,38 Peningkatan kualitas konsumsi pangan tersebut dapat dicapai dengan terus meningkatkan konsumsi pangan, umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani, sayuran dan buah.



Grafik II.80 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020– 2024

- Penguatan Cadangan Pangan
 - a. Produksi Komoditas Pangan Pokok

Kabupaten Kuantan Singingi tergolong wilayah yang minus akan pangan pokok terutama komoditas beras, pada tahun 2024 luas sawah potensial adalah seluas 5.690 Ha dengan 4.820,54 Ha lahan sawah aktif dan luas tanam 5.549,3 Ha, dengan produktivitas rata-rata 4,46 ton/Ha dengan total produksi 21.639,03 ton setara dengan 12.418,74 ton beras, sedangkan kebutuhan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah 31.884,96 ton, Telah Terpenuhi Kebutuhan Beras Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 38,95% dari hasil produksi beras dalam daerah Tahun 2024. Kekurangan beras sebesar 19.466,22 Ton.

Kekurangan kebutuhan beras disebabkan oleh kurangnya luas lahan dan kebiasaan pemanfaatan lahan untuk bertanam padi sawah hanya sekali dalam setahun. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan tersebut (beras) dan kebutuhan pangan pokok lainnya dipasok dari daerah pemasok provinsi tetangga yaitu : Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan lain-lain.

Tabel II.143 Data Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018–2024

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
2018	5.974,00	5.330,10	4,48	23.989,76
2019	5.467,20	5.405,29	3,57	19.321,74
2020	6.100,10	8.091,00	3,30	26.707,40
2021	5.907,50	5.481,44	3,41	18.694,82
2022	4.748,50	4.312,26	4,33	18.679,60
2023	5.519,58	5.990,00	4,04	24.119,60
2024	5.549,30	4.852,00	4,46	21.639,03

Sumber : BPS Kuantan Singingi, 2025.

Adapun produksi komoditas pangan pokok Kab Kuantan Singingi sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel II.144 Produksi Komoditas Pangan Pokok Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Komoditas	Produksi (ton) Tahun 2022	Produksi (ton) Tahun 2023	Produksi (ton) Tahun 2024	Ket
1	Padi	18.679,60	24.119,60	21.639,03	Produksi Padi rata-rata 4,46 ton/ha dan untuk pemenuhan kebutuhan dalam daerah, beras dipasok dari daerah pemasok (Sumbar, Sumut, jambi dan Sumsel)
2	Jagung	391,76	400,74	262,80	
3	Kedelai	69,21	6,05	6,05	
4	Bawang Merah	45,00	22,01	24,16	
5	Cabe Merah Keriting	89,50	36,40	45,40	
6	Cabe Rawit	64,2	46,15	26,40	
7	Daging Ayam Ras	6.920.490 Kg	2.371.271 Kg	2.504.992	
8	Telur Ayam Ras	68.974 Kg	66.687 Kg	240.367	
9	Daging Sapi Murni	367.006 Kg	355.011 Kg	412.818	
10	Sapi (Ekor)	24.717 ekor	24.680 ekor	23.623 ekor	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2025

b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Permentan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Ketahanan Pangan, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan cadangan pangan pokok minimal 100 ton, bertujuan untuk penguatan cadangan pangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, paceklik berkelanjutan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana alam dan kerawanan pangan spesifik lokasi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sampai tahun 2018 belum mampu mengalokasikan dana untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Tabel II.145 Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kecamatan	Bantuan yang diserahkan	Jumlah (kg)
1	Hulu Kuantan	Beras	-
2	Kuantan Mudik	Beras	-

No	Kecamatan	Bantuan yang diserahkan	Jumlah (kg)
3	Gunung Toar	Beras	-
4	Kuantan Tengah	Beras	-
5	Sentajo Raya	Beras	-
6	Benai	Beras	-
7	Pangean	Beras	-
8	Kuantan Hilir Seberang	Beras	-
9	Kuantan Hilir	Beras	-
10	Inuman	Beras	-
11	Cerenti	Beras	-
JUMLAH			

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kondisi CPPD kuansing per 1 januari 2024 sebanyak 0 ton, sedangkan untuk penganggaran tahun 2024 sebanyak 0 ton dan penganggaran tahun 2025 sebanyak 0 ton. Sedangkan kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 44,47 ton.

- Penanganan Daerah Rawan Pangan

Dalam rangka mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi Kabupaten Kuantan Singingi yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), maka perlu dilakukan pendataan yang berhubungan dengan kerawanan pangan diantaranya data stok gabah dan beras di beberapa penggilingan padi di beberapa Kecamatan. Salah satu penyebab permasalahan kerawanan pangan dan gizi karena lokasi geografis di wilayah tertentu yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan. Data yang paling utama dalam menyusun SKPG antara lain :

1. Ketersediaan pangan yaitu : luas tanam dan luas puso padi;
2. Akses pangan : harga beras;

Pemanfaatan pangan : angka balita ditimbang terkoreksi, angka balita naik berat badan, balita tidak naik berat badan.

Tabel II.146 Ketersediaan Pangan Pokok Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Ketersediaan Padi (ton)					Ketersediaan Jagung (ton)					Ketersediaan Ubi Kayu (ton)					Ketersediaan Ubi Jalar (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kuantan Mudik	5.906,12	3.356,75	2.972,00	3423,63	4345,88	52,05	0	31,23	20,82	0	141,4	10,1	10,1	70,7	10,1	-	-	-	-	0
2	Hulu Kuantan	1.743,74	803,71	834,003	872,064	975,24	24,29	15,54	3,81	3,47	3,47	161,6	64,64	6,06	35,35	10,1	-	-	-	-	0
3	Gunung Toar	6.066,25	2.917,32	2919,132	3290,14	3433,808	27,76	22,55	6,94	0	0	54,54	50,5	43,43	74,74	171,7	-	-	-	-	3,83
4	Pucuk Rantau	-	-	0	0	0	-	0	3,47	15,61	20,82	101	40,4	27,27	10,1	10,1	-	-	-	-	0
5	Singingi	508,2	427,68	64,8	738,72	882,9	52,05	173,5	21,29	13,88	10,41	20,1	40,4	5,05	30,3	30,3	-	-	-	-	0
6	Singingi Hilir	-	6,44	0	0	0	131,86	846,68	31,23	52,02	34,7	60,6	70,7	7,7	60,1	60,1	7,67	7,67	6,74	-	0
7	Kuantan Tengah	4.673,23	3.727,03	3275,844	4439,67	4455,801	72,87	47,6	64,19	64,19	38,17	565,1	416,12	176,75	303	303	-	-	-	-	0
8	Sentajo Raya	2.200,71	963,29	964	1166,223	1258,908	83,28	40,8	17,35	34,7	0	363,1	464,6	29,29	141,4	141,4	7,67	-	-	-	0
9	Benai	3.561,80	3.966,33	4637,97	4995,936	4521,776	58,99	17	0	8,67	13,88	50,05	40,4	50,5	80,1	80,1	-	-	-	-	0
10	Kuantan Hilir	1.541,64	943,56	93,03	1060,74	1051,317	10,41	6,8	3,47	6,94	0	40,4	30,3	30,3	30,1	30,1	-	-	-	15,34	0
11	Pangean	3.885,45	3.452,90	3242,2	4003,92	5302,44	20,82	28,9	17,35	24,29	19,77	131,3	60,6	50,5	60,1	60,1	-	1,52	3,37	-	0
12	Logas Tanah Darat	-	-	0	0	0	111,04	51	55,52	24,29	0	232,2	272,7	19,19	141,4	141,4	-	-	-	7,67	7,67
13	Kuantan Hilir Seberang	2.312,40	2.470,78	1880,34	2559,36	2336,276	48,58	51	32,27	48,58	29,49	70,7	60,6	90,9	62,62	62,62	-	-	2,69	-	0
14	Cerenti	1.011,63	1.403,26	952,38	1324,752	970,27	27,76	18,02	38,17	24,29	32,96	242,4	57,57	40,4	19,19	19,19	-	-	-	-	0
15	Inuman	1.410,20	998,63	753	670,95	841,464	34,7	47,6	62,46	58,99	69,54	20,1	191,9	17,17	171,7	171,7	-	-	-	15,34	0
TOTAL		34.821,37	25.473,71	22.588,39	28.059,74	29.914,85	756,46	1.366,99	352,27	400,74	262,8	2.254,59	1.871,53	1.303,90	1290,9	1302,01	23,01	9,19	12,81	38,35	11,5

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

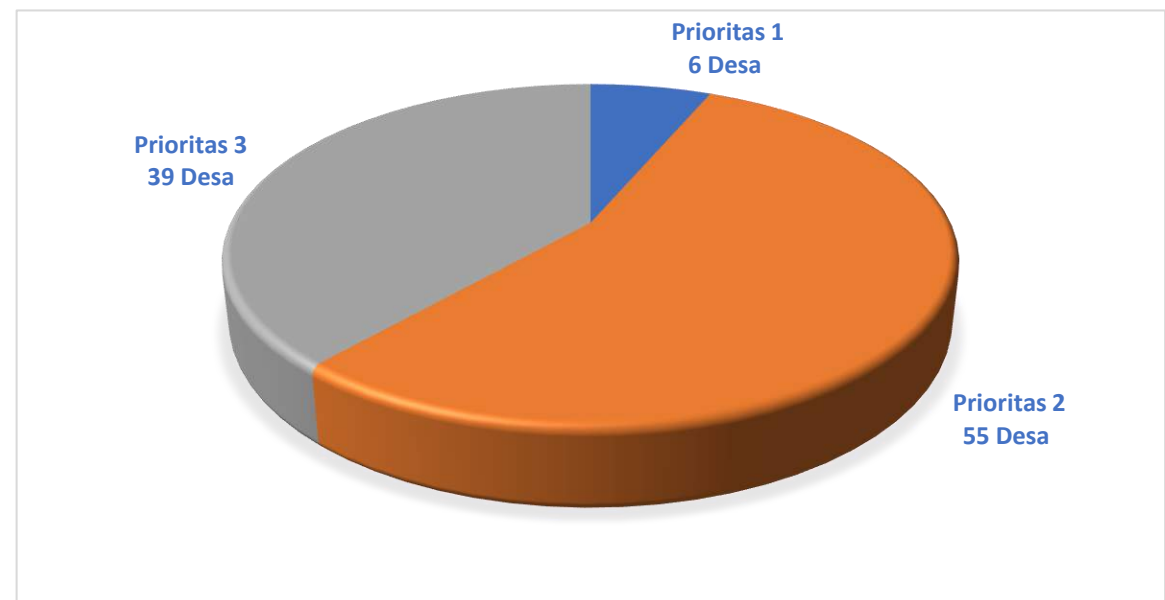
Ketersediaan pangan pokok khususnya padi tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi terbesar terdapat di Kecamatan Benai sebesar 4.521,776 ton, sedangkan tidak memiliki pangan pokok terdapat di Pucuk Rantau, Singingi Hilir dan Logas Tanah Darat. Dengan demikian ketersediaan padi mengalami penurunan dari tahun 2023 dengan besaran 4.995,936 ton. Pada tahun 2024 dengan melihat besarnya kebutuhan pangan khususnya padi di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan terjadi peningkatan produksi padi, sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi.

b) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Penggunaan sumber daya keuangan dalam pencapaian sasaran dilaksanakan melalui program peningkatan ketahanan pangan dan program mutu dan keamanan pangan melalui kedua program tersebut seharusnya bisa dilakukan upaya dalam rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan, sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai distribusi pangan baik, ditingkat petani, pengepul dan pedagang. Banyaknya cemaran terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan sakit pada konsumen. Tahun 2021 belum ada realisasi program mutu dan keamanan pangan yang bisa dilaksanakan karena keterbatasan keuangan daerah, diharapkan tahun 2024 mendatang program mutu dan keamanan pangan dapat terealisasi.

c) Wilayah Rawan Pangan

Ketahanan pangan selalu menjadi isu strategis, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif. Salah satu fokus utama yang harus dilaksanakan Badan Pangan Nasional adalah pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024 dan Rencana Strategis BKP 2020–2024, daerah rentan rawan pangan ditargetkan turun dari 18% menjadi 10% pada tahun 2024. Badan Ketahanan Pangan menyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan.



Grafik II.81 Wilayah Rawan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan menyusun Peta FSVA sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan hasil analisis FSVA 2022, kondisi

ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi tergolong dalam kondisi Tahan dengan Indeks Ketahanan Pangan 70,70. Namun dari 229 desa di Kabupaten Kuantan Singingi ada 77 desa (Lampiran 1) yang menjadi wilayah rawan pangan. Wilayah Rawan Pangan tersebut terbagi atas 3 kategori yaitu:

- a. Prioritas 1 (sangat rawan) 5 desa dengan persentase prevalensi 2.1%
- b. Prioritas 2 (Rawan) 42 desa dengan persentase prevalensi 18.3%
- c. Prioritas 3 (agak rentan) 30 desa dengan persentase prevalensi 13.1%

Kondisi wilayah rawan pangan ini disebabkan karena;

- a. wilayah tersebut menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan, masalah ketersediaan pangan, rendahnya akses terhadap air bersih, keterbatasan daya beli karena tingginya tingkat kemiskinan dan masalah stunting pada balita,
- b. wilayah tersebut memiliki keterbatasan akses terhadap pangan terutama dalam hal peningkatan daya beli masyarakat, serta wilayah yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang terbatas terhadap pangan dan gizi, pola asuh, ataupun karena buruknya sanitasi dan akses terhadap air bersih. Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 77 desa dalam kondisi rawan pangan, kategori prioritas 1 yakni 5 desa dengan kondisi sangat rentan rawan pangan, prioritas 2 yakni 43 desa rentan rawan pangan dan agak rentan rawan pangan, 5 desa sangat rentan, 30 desa.

4. Pertanahan

a) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel II.147 Kondisi Sertifikasi Lahan di kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kondisi Lahan	Jumlah Luas (Ha)/Rasio
1.	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat	147.447
2.	Jumlah Luas Wilayah	545.786
3.	Persentase luas lahan bersertifikat	27,02

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan tahun 2024 seperti pada tabel di atas adalah sebesar 27,02%, angka ini masih sangat jauh dari harapan, ke depan agar urusan pertanahan ini diperhatikan dalam upaya memberikan sosialisasi pada masyarakat atas kepemilikan sertifikat lahan.

b) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Salah satu permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan pertanahan adalah terkait dengan batas wilayah. Pada hakikatnya penetapan batas wilayah administrasi suatu daerah adalah sebagai upaya untuk menunjukkan batas dan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Namun demikian penetapan batas administrasi pemerintahan suatu daerah seringkali menimbulkan berbagai konflik kepentingan masyarakat, bahkan menyentuh aspek-aspek yang berkenaan dengan harga diri, kehormatan dan marwah suatu kesatuan masyarakat di daerah tertentu. Oleh karenanya penyelesaian berbagai permasalahan perbatasan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dan seimbang dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Secara administrasi, Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan

Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Kewenangan penyelesaian perbatasan antar daerah Kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi, maka sejak pemekaran wilayah Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan Kabupaten yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merumuskan kesepakatan garis batas yang akan dilakukan pelacakan dan penetapan di lapangan. Gambaran umum progres penyelesaian tapal batas Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel II.148 Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah/Rasio
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan	-
2	Jumlah Kasus yang terdaftar	-
3	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

c) Penyelesaian izin lokasi

Di Kabupaten Kuantan Singingi lahan Pertanahan banyak dipergunakan sebagai usaha perkebunan, selain itu banyak pula lahan pertanahan dipergunakan untuk kegiatan usaha lainnya, untuk pemanfaatan lahan selain dilengkapi dengan bukti sah kepemilikan berupa sertifikat juga harus ada izin lokasi. Dari jumlah pemohon izin lokasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi persentase penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020–2024 sebesar 100% pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan tahun 2020 sebesar 66,67%, tahun 2023 yaitu 97%. Disamping itu selama tahun 2020–2024, Pemerintah Daerah juga telah menertibkan aset-aset daerah dengan melengkapi administrasi kepemilikan lahan berupa sertifikat secara bertahap kemudian pemerintah daerah juga telah memfasilitasi konflik lahan masyarakat dengan berkoordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tabel II.149 Jumlah izin lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Permohonan Izin Lokasi	6	5	5	68	33
2.	Izin Lokasi	4	5	5	66	33
3.	Penyelesaian izin Lokasi	66,67%	100%	100%	97%	100%

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

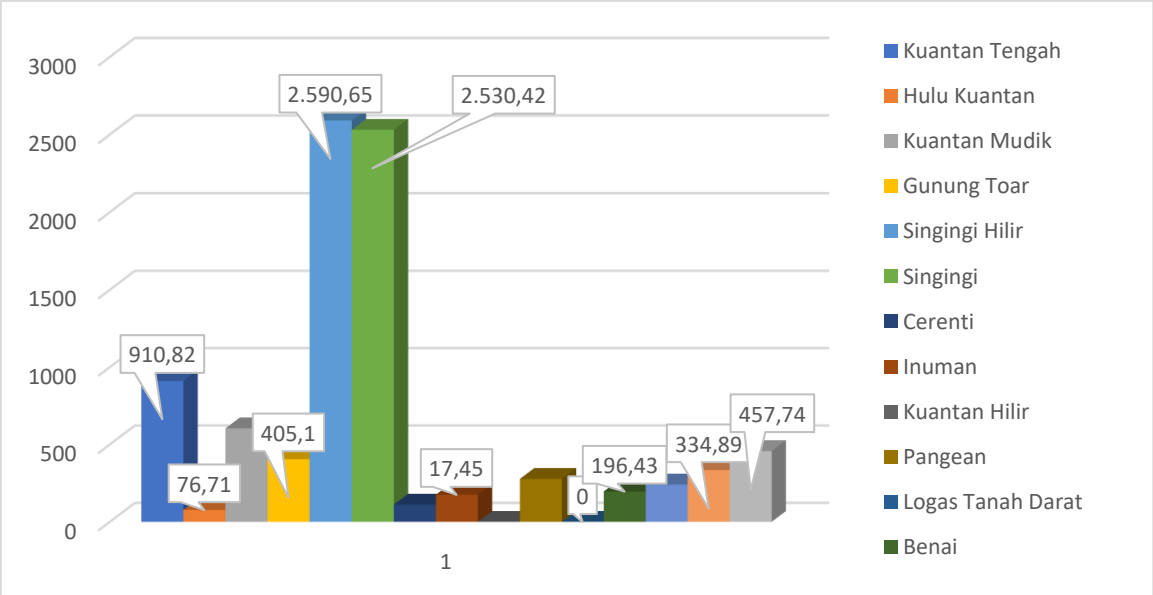
5. Lingkungan Hidup

a) Penegakan Hukum Lingkungan

Pemulihan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu fokus pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka meningkatkan kondisi kualitas lingkungan hidup kedepannya. Hal ini berdasarkan pertimbangan kondisi lingkungan saat ini di beberapa tempat terjadi penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan antara lain terlihat pada kondisi kualitas air sungai, kondisi lahan yang kritis. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, dalam beberapa kasus di Kabupaten Kuantan Singingi terhadap aduan masyarakat bahwa pencemaran air sungai disebabkan karena limbah industri baik besar maupun kecil walaupun untuk pembuktiannya harus dilalui kajian uji laboratorium. Selain itu banyak pula kasus-kasus penurunan kualitas lingkungan disebabkan karena Penambangan Emas Tanpa Izin terhadap hal tersebut menjadi dominan dari beberapa kasus permasalahan lingkungan di Kabupaten Kuantan Singingi karena kerusakan yang terjadi tampak langsung berupa perubahan warna air menjadi keruh dan lahan menjadi kritis, walaupun pemerintah daerah

dan aparat telah melaksanakan penegakan hukum lingkungan terhadap beberapa kasus Penambangan Emas Tanpa Izin, namun pada prakteknya aktivitas PETI masih tetap ada.

Secara umum pada tahun 2024 jumlah lahan mengalami kerusakan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang disebabkan oleh PETI yang terdata di 15 Kecamatan mencapai 7.520,21 Ha. Apabila jumlah lahan kritis tersebut dapat dipulihkan atau direhabilitasi, maka lahan tersebut dapat dimanfaatkan atau difungsikan sebagai pertanian, perkebunan dan perikanan untuk dijadikan kolam budidaya ikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.82 Data Kerusakan Lahan Akibat Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan kerusakan lahan akibat PETI pada setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022, terbanyak di secara berturut-turut di Kecamatan Singingi Hilir, Singingi, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik dan Gunung Toar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya data kerusakan lahan akibat aktivitas PETI meningkat, namun Tim terpadu menumpas PETI terus melakukan upaya dan tindakan dalam pemberantasan PETI. Hal terpenting yang mesti dilakukan saat ini bagaimana lahan kritis sebagai akibat aktivitas PETI ini dapat dikelola, sehingga dapat produktif kembali yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat.

Tabel II.150 Data Luas Lahan Kritis di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah Total (Ha)	Persentase (%)
1	Singingi	3.049,86	7.065,88	10.115,74	11,50
2	Singingi Hilir	10.559,97	1.278,62	11.838,59	13,46
3	Kuantan Tengah	737,51	1.663,09	2.400,60	2,73
4	Sentajo Raya	457,75	0	457,75	0,52
5	Benai	12,52	0	12,52	0,01
6	Pangean	2.423,76	27,05	2.450,81	2,79
7	Logas Tanah darat	14.514,64	4.211,92	18.726,56	21,29
8	Kuantan Hilir	4.813,72	0	4.813,72	5,47
9	Kuantan Hilir Seberang	0	467,58	467,58	0,53
10	Inuman	2.293,84	0	2.293,84	2,61
11	Cerenti	4.625,38	0	4.625,38	5,26

No	Kecamatan	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah Total (Ha)	Persentase (%)
12	Gunung Toar	963,43	1.756,89	2.720,32	3,09
13	Kuantan Mudik	10.083,83	4.726,05	14.809,88	16,84
14	Hulu Kuantan	1.976,57	3.876,13	5.852,70	6,65
15	Pucuk Rantau	4.870,43	1.498,86	6.369,29	7,24
Luas Total		61.383,21	26.572,07	87.955,28	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

b) Timbunan Sampah yang ditangani

Jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2024 sebagaimana di tabel berikut :

Tabel II.151 Jumlah Sampah yang ditangani Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang ditangani	38.230,00	37.146,00	38.045,28	12.748,00	28.247,53
2	Volume produksi sampah	48.784,74	49.503,05	50.800,55	38.520,57	53.434,39
3	Persentase	78,36	75,04	74,89	33,09	52,86

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Timbunan sampah yang ditangani terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022, perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi laporan excel dengan perkalian timbulan per jiwa 0,75 – 0,90 (Sumber : KLHK). Namun volume pada tahun 2023 volume sampah 38.520,57 berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah yang tertangani tahun 2023 sebesar 12.748,00 atau 33,09% ini dilakukan dengan perhitungan dengan tim Supervisi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion) P3E Sumatera dengan kategori kota kecil dengan pengalian 0, 35 Per jiwa.

c) Rasio Tempat Pembuangan Sampah

Rasio tempat pembuangan sampah adalah perbandingan tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk, rasio ini terlihat di tabel berikut :

Tabel II.152 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TPS	28	28	28	28	28
2	Daya Tampung TPS (sampah)	120	120	120	120	120
3	Daya Tampung TPS (penduduk)	34.299	34.299	34.299	34.299	34.299
4	Jumlah Penduduk	334.943	339.894	345.850	356.246	365.989
5	Rasio	10,24	10,09	9,92	9,63	9,37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tabel di atas dapat dijelaskan, rasio tempat pembuangan sampah mengalami penurunan, akibat daya tampung TPS (penduduk) tetap namun jumlah penduduk terus bertambah.

d) Peningkatan Indeks Kualitas Air

Peningkatan indeks kualitas air di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 memperlihatkan bahwa sebagian besar lokasi pengambilan sampel air sungai masih berada dalam kategori mutu “memenuhi” dan “tercemar ringan”. Dari berbagai titik pemantauan, mutu air yang memenuhi baku mutu lebih dominan pada musim hujan dibandingkan musim kemarau, sementara status tercemar ringan lebih sering terjadi di titik-titik yang rentan terpapar aktivitas manusia dan limbah domestik atau industri. Hal ini menunjukkan upaya pengelolaan kualitas air sungai telah memberikan hasil, meski secara keseluruhan masih menghadapi tekanan pencemaran di sejumlah kawasan.

Tabel II.153 Indeks Kualitas Air Menurut Parameter Pengujian di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

N o	Nama Sungai	Lokasi Sampel	Parameter Pengujian											Indeks Pencemar	Status Mutu Air
			pH	TS S	BO D	CO D	D O	NO3 -N	Total Phosfat	Fecal Coliform	(C _i /L _{ij}) Max	(C _i /C _{ij}) Rerata			
1	Sungai Petapahan	Hulu (Kemarau)	5, 01	29 2	4,6	22, 4	4, 1	0,6	0,0945	6,1	4,832	1,309	3,54	Ringan	
2	Sungai Petapahan	Tengah (Kemarau)	6, 71	36	2,4	22, 5	5, 5	0,8	0,0218	1,8	0,9	0,455	0,713	Memenuhi	
3	Sungai Petapahan	Hilir (Kemarau)	6, 68	32	2,3	13, 4	5, 4	1	0,0634	1,8	0,767	0,423	0,619	Memenuhi	
4	Sungai Bawang	Hulu (Kemarau)	7, 11	36	2,2	12, 2	4, 9	1,2	0,0313	15	0,743	0,425	0,605	Memenuhi	
5	Sungai Bawang	Tengah (Kemarau)	5, 71	12	1,1	10, 8	4, 4	0,4	0,0301	21	0,886	0,305	0,663	Memenuhi	
6	Sungai Bawang	Hilir (Kemarau)	6, 11	40	0,6	12, 4	5, 4	0,9	0,0644	3,6	0,8	0,359	0,62	Memenuhi	
7	Sungai Sinambek	Hulu (Kemarau)	7, 29	42 4	23	48, 6	4, 3	3,9	0,7	43	5,642	2,654	4,409	Ringan	
8	Sungai Sinambek	Tengah (Kemarau)	7, 44	48 9	26	70, 3	5, 1	2,9	0,8	25	5,952	2,842	4,664	Ringan	
9	Sungai Sinambek	Hilir (Kemarau)	7, 15	41 6	12	58, 6	5, 2	2,6	0,4	17	5,601	2,271	4,274	Ringan	
1 0	Sungai Dolak	Hulu (Kemarau)	6, 21	16	1,6	15, 2	4, 7	0,5	0,1	14	0,8	0,404	0,634	Memenuhi	
1 1	Sungai Dolak	Tengah (Kemarau)	6, 35	20	1,6	14	5, 4	0,4	0,0353	1,8	0,6	0,33	0,484	Memenuhi	
1 2	Sungai Dolak	Hilir (Kemarau)	6, 68	34	2,2	44, 4	5, 1	0,6	0,0458	23	2,247	0,665	1,657	Ringan	
1 3	Sungai Petapahan	Hulu (Hujan)	6, 28	40	1,1	12, 1	5, 6	0,03 92	0,8	1,8	0,813	0,411	0,644	Memenuhi	
1 4	Sungai Petapahan	Tengah (Hujan)	6, 48	44	1,3	11, 6	6	0,04 11	1,6	7,8	0,88	0,407	0,686	Memenuhi	
1 5	Sungai Petapahan	Hilir (Hujan)	6, 59	48	1,1	20, 5	5, 4	0,04 54	0,6	1600	2,021	0,708	1,514	Ringan	
1 6	Sungai Bawang	Hulu (Hujan)	7, 17	36	1,5	17	5, 4	0,05 99	0,9	23	0,72	0,391	0,579	Memenuhi	
1 7	Sungai Bawang	Tengah (Hujan)	6, 68	12	0,9	11, 4	6, 3	0,04 17	0,5	17	0,547	0,27	0,431	Memenuhi	
1 8	Sungai Bawang	Hilir (Hujan)	6, 59	38	1,3	6,4 4	5, 1	0,04 35	0,7	4,5	0,76	0,379	0,601	Memenuhi	
1 9	Sungai Sinambek	Hulu (Hujan)	7, 14	60	3,5	22, 7	5, 5	0,09 24	2,4	13	1,396	0,646	1,088	Ringan	
2 0	Sungai Sinambek	Tengah (Hujan)	7, 28	64	3,4	33	5, 1	0,4	3	120	2,505	1,021	1,913	Ringan	
2 1	Sungai Sinambek	Hilir (Hujan)	6, 91	68	7,4	42, 4	4	0,06 33	2,4	70	2,961	1,099	2,233	Ringan	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Secara agregat, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 berada pada level “sedang” dengan skor 60,37. Hal ini menandakan bahwa kualitas air secara umum masih perlu dioptimalkan, khususnya untuk menekan sumber pencemar agar status mutu air bisa meningkat ke kategori “baik” di masa mendatang. Analisis distribusi kualitas air menunjukkan perlunya intervensi lebih intensif, seperti penataan limbah domestik, penguatan pengawasan aktivitas industri, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sungai sebagai sumber air baku dan ekosistem strategis daerah. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas pemerintah daerah akan menjadi kunci untuk memastikan tren perbaikan kualitas air dapat terus dijaga dan ditingkatkan.

Tabel II.154 Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Indeks Kualitas Air (IKA)				
Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai

Memenuhi	14	70	52%	36,30
Ringan	13	50	48%	24,07
Sedang	-	30	5%	-
Berat	-	10	0%	-
			IKA	60.37
				Sedang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

e) Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik di seluruh lokasi pemantauan, baik pada kawasan transportasi, industri, pemukiman, maupun perkantoran. Rata-rata konsentrasi parameter pencemar utama, yakni NO₂ dan SO₂, masih jauh di bawah baku mutu udara ambien yang ditetapkan. Hasil pengukuran dua tahap di berbagai zona menunjukkan tingkat polusi udara yang sangat rendah, dengan konsentrasi rata-rata parameter hanya sekitar sepertiga dari ambang batas baku mutu. Kondisi ini menandakan bahwa aktivitas transportasi, industri, maupun domestik di wilayah ini masih terkendali dan belum memberikan dampak negatif yang berarti terhadap kualitas udara.

Tabel II.155 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Lokasi Peruntukan	Satuan	Kadar NO2		Kadar NO2		Rata-Rata Parameter	
			Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II	NO2	SO2
1	Transportasi	µg/m3	9,04	11,04	9,55	9,56	10,04	9,56
2	Industri	µg/m3	10,7	12,02	14	14,41	11,36	14,21
3	Pemukiman	µg/m3	5,65	5,9	4,72	4,89	5,78	4,81
4	Perkantoran	µg/m3	9,12	7,62	7,9	6,37	8,37	7,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Skor Indeks Kualitas Udara (IKU) yang mencapai 87,02 masuk kategori “sangat baik”, merefleksikan tingginya kualitas udara dan minimnya risiko kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara. Pencapaian ini memperlihatkan efektivitas upaya pengendalian pencemaran udara oleh pemerintah daerah, serta rendahnya emisi sumber pencemar baik dari kendaraan bermotor maupun aktivitas industri dan domestik. Meski demikian, tantangan ke depan adalah mempertahankan kualitas ini di tengah potensi peningkatan aktivitas ekonomi, urbanisasi, dan pertumbuhan jumlah kendaraan. Untuk itu, upaya preventif melalui perencanaan tata ruang, pengawasan emisi industri, serta edukasi publik tetap harus dilanjutkan untuk menjamin kualitas udara tetap terjaga di masa mendatang.

Tabel II.156 Rata rata Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024

Rata-Rata Konsentrasi Parameter untuk 4 Lokasi Peruntukan		Baku Mutu Udara (µg/m3)		Rata-Rata Konsentrasi Parameter dibagi Baku Mutu		Ieu	Indeks Kualiatas Udara (IKU)
SO2	NO2	SO2	NO2	SO2	NO2		
8,89	8,93	20	40	0,3	0,44	0,33	87,02
Sangat Baik							

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

f) Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2017. Adapun Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.157 Indeks Kualitas Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah (LW)	545.786,24
2	Luas Tutupan Hutan (LTH)	154.255,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luasan yang sangat besar, namun distribusi tutupan hutannya menunjukkan adanya tekanan terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem. Tutupan hutan masih menjadi penyangga utama bagi kualitas lingkungan, tetapi potensi alih fungsi dan fragmentasi hutan terus membayangi stabilitas ekologis daerah. Di luar kawasan hutan, keberadaan vegetasi sekunder seperti belukar dan ruang terbuka hijau sangat penting sebagai pelengkap penopang sistem ekologi, meskipun kontribusinya masih terbatas secara luasan.

Tabel II.158 Indeks Luas Tutupan Belukar (LTB)

No	Uraian	Luas (Ha)	Koefisien	Luas Tutupan Belukar (LTB)	Total Tutupan Belukar (LTB)
1	Belukar dalam Kawasan	8.182,66	0,6	4.909,59	5178,26
2	Belukar Pada Fungsi Lindung	447,77		268,66	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Belukar dan ruang terbuka hijau memberikan fungsi perlindungan tambahan, menjadi habitat sementara bagi keanekaragaman hayati, serta mencegah degradasi lahan. Namun, keterbatasan luasan kedua penutup lahan ini mengindikasikan perlunya program penguatan konservasi vegetasi di luar kawasan hutan utama. Upaya rehabilitasi lahan, termasuk melalui program penghijauan, perlu digiatkan agar kapasitas lahan sebagai penopang kehidupan tetap terjaga di tengah perkembangan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan aktivitas ekonomi.

Tabel II.159 Ruang Terbuka Hijau dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

No	Uraian	Luas (Ha)	Koefisien	Total
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	719,6	0,6	431,76
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	3.238,50	0,6	194,10

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kualitas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal, sebagaimana tercermin dari proporsi tutupan lahan hijau terhadap total luas wilayah yang relatif kecil. Kondisi ini menimbulkan risiko penurunan daya dukung lingkungan, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologis, penurunan kualitas udara, dan berkurangnya cadangan air tanah. Diperlukan kebijakan tegas dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan tutupan hijau sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel II.160 Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2024

Total Luas Tutupan Lahan (LTH+LTB+RTH+THL)	Tutupan Lahan (Luas Tutupan Lahan/Luas Wilayah)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)

161.845,91	0,3	49,68

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada aspek kualitas lingkungan hidup, capaian indeks beberapa tahun terakhir belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Tren penurunan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam manajemen lingkungan, baik dari sisi implementasi kebijakan, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya langkah terintegrasi dan inovatif untuk memperbaiki kualitas lingkungan secara berkelanjutan, agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel II.161 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

IKLH	2021	2022	2023	2024
Target	68,7	69,08	69,46	69,84
Realisasi	72,55	70,71	68,86	68,82
Capaian	105,6	102,36	99,14	98,54

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Data/informasi kependudukan merupakan elemen penting sebagai rujukan dalam merencanakan suatu kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data kependudukan akan valid apabila administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berjalan dengan baik. Data kependudukan bersifat dinamis, sehingga selalu mengalami perubahan setiap saat. Dalam kurun waktu dari tahun 2020–2024 jumlah penduduk yang memiliki KTP mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 222.136 orang dan tahun 2021 sebanyak 223.508 orang serta tahun 2022 sebanyak 237.797 orang terus meningkat hingga 248.803 orang pada tahun 2023 dan 257.973 orang pada tahun 2024 dengan rasio 99,43%. Perkembangan jumlah rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2020–2024 sebagaimana tergambar dari tabel berikut ini :

Tabel II.162 Jumlah Rasio Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Ber-KTP	222.136	223.508	237.797	248.803	256.504
2	Jumlah Penduduk >17 atau menikah	232.736	236.069	248.334	250.216	257.973
3	Rasio	95,45	94,68	95,76	99,06	99,43

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kuantan Singingi, 2025

Pada tabel di atas tampak bahwa dari tahun ke tahun rasio penduduk yang sudah memiliki KTP selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 rasionya sudah pada angka 99,43% meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,06%, ini berarti bahwa kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan semakin membaik.

Tabel II.163 Data Masyarakat Rentan yang memiliki Identitas Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Masyarakat Rentan (Kk)
1	Benai	1.806
2	Cerenti	2.299
3	Gunung Toar	1,717
4	Hulu Kuantan	773
5	Inuman	2.244
6	Kuantan Hilir	1.705
7	Kuantan Hilir Seberang	1.692
8	Kuantan Mudik	1.990
9	Kuantan Tengah	3.870
10	Logas Tanah Darat	3.125
11	Pangean	2.747
12	Pucuk Rantau	905
13	Sentajo Raya	3.971
14	Singingi	4.062
15	Singingi Hilir	3.994
Jumlah		36.900

Sumber : Data Olahan P3KE Hasil Pemadanan dengan Disdukcapil

Data diatas dilihat dari sisi pekerjaan selain pegawai negeri yang rentan mengalami guncangan ekonomi dan membuat rumah tangga rentan miskin jatuh ke bawah garis kemiskinan dan jika saat ini miskin, mereka akan terus terperangkap dalam kemiskinan tersebut.

b) Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio ini menunjukkan perbandingan jumlah bayi yang lahir dibandingkan dengan jumlah kepemilikan dalam satu tahun. Rasio tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel II.164 Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Kuantan Singingi menurut umur 0-5 Tahun Tahun 2020–2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepemilikan Akta		Rasio
			Belum	Sudah	
1	2020	334.943	4.001	19.179	0,83
2	2021	339.333	2.635	21.523	0,89
3	2022	345.850	1.312	24.927	0,95
4	2023	356.246	1.175	31.866	0,96
5	2024	365.989	782	32.608	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kuantan Singingi, 2025

Dari rasio tersebut dapat dilihat, kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akte kelahiran sudah mulai meningkat. Tahun 2020 rasio 0,80 artinya sudah 80% dari jumlah bayi yang lahir sudah memiliki akte kelahiran, sedangkan pada tahun 2020 rasio kepemilikan akta kelahiran adalah sebesar 0,83 artinya sudah 83% anak umur 0-5 tahun sudah memiliki akta kelahiran dan terus meningkat hingga tahun 2023 rasionya menjadi 0,96 dan tahun 2024 sebesar 0,98.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Kantor Desa adalah pusat pelayanan di desa, menjadi sentral segala kegiatan yang ada di desa baik itu di bidang pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan ataupun pembinaan semua berpusat di kantor desa. Keberadaan dan kondisi dari sebuah kantor desa bisa mencerminkan dari identitas desa itu sendiri, bahkan tidak jarang masyarakat melihat kantor saja untuk menentukan nilai sebuah desa secara keseluruhan.

Kantor yang layak adalah kantor yang dapat memberi rasa nyaman baik untuk aparatur maupun masyarakat, baik sekedar meminta pelayanan surat menyurat atau keperluan lainnya. Adapun sarana dan prasarana perkantoran Desa yang baik terdiri dari :

- Layout atau tata ruang bangunan perkantoran;
- Perlengkapan kantor yang cukup dan memadai.

Tabel II.165 Perkantoran Desa yang Layak dan Belum Layak Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Kantor Desa Yang Layak	Kantor Desa Yang Belum Layak	Kantor Desa Yang Belum Ada
1	Cerenti	11	10	1	-
2	Inuman	14	4	5	5
3	Kuantan Hilir	14	2	9	3
4	Kuantan Hilir Seberang	14	3	10	1
5	Pangean	17	11	3	3
6	Logas Tanah Darat	15	8	3	4
7	Benai	15	10	4	1
8	Sentajo Raya	14	8	6	-
9	Kuantan Tengah	20	16	1	3
10	Gunung Toar	14	6	8	0
11	Kuantan Mudik	23	9	9	5
12	Hulu Kuantan	12	7	4	1
13	Pucuk Rantau	10	8	2	0
14	Singingi	13	7	6	0
15	Singingi Hilir	12	12	0	0
Jumlah		218	121	71	26

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi 2025

Pada tahun 2024 jumlah desa di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kantor yang layak sebanyak 121 desa atau 55,50%, persentase ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 yaitu 47,70%. Kantor Kepala Desa merupakan sarana utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dan sebagai pusat kegiatan pemuda, untuk itu pada tahun 2025 agar dapat dianggarkan kegiatan pembangunan beberapa kantor desa, terutama di Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Inuman yang masih banyak desanya yang belum memiliki Kantor.

b) Indeks Desa Membangun (IDM)

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 218 desa, dimana pada tahun 2024 IDM di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 72 Desa Mandiri, 105 Desa Maju dan 41 Desa Berkembang.

Tabel II.166 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Iks 2024	Ike 2024	Ikl 2024	Nilai Idm 2024	Status Idm 2024
1	Kuantan Mudik	Air Buluh	0,8057	0,7833	0,8667	0,8186	Mandiri
2	Kuantan Mudik	Pantai	0,9429	0,8667	0,8	0,8698	Mandiri
3	Kuantan Mudik	Lubuk Ramo	0,88	0,8667	0,8667	0,8711	Mandiri
4	Kuantan Mudik	Seberang Cengar	0,7943	0,7833	0,8667	0,8148	Maju
5	Kuantan Mudik	Koto Cengar	0,7943	0,8	0,8	0,7981	Maju
6	Kuantan Mudik	Sangau	0,9143	0,8	0,7333	0,8159	Mandiri
7	Kuantan Mudik	Banjar Padang	0,8514	0,8333	0,8667	0,8505	Mandiri
8	Kuantan Mudik	Kasang	0,8686	0,8167	0,8667	0,8506	Mandiri
9	Kuantan Mudik	Koto Lubuk Jambi	0,8114	0,8	0,8667	0,826	Mandiri
10	Kuantan Mudik	Pulaubinjai	0,8	0,7333	0,8	0,7778	Maju
11	Kuantan Mudik	Seberang Pantai	0,8229	0,8167	0,8667	0,8354	Mandiri
12	Kuantan Mudik	Rantau Sialang	0,8171	0,8333	0,8	0,8168	Mandiri
13	Kuantan Mudik	Luai	0,8629	0,8333	0,8	0,8321	Mandiri
14	Kuantan Mudik	Banjar Guntung	0,8	0,85	0,8	0,8167	Mandiri
15	Kuantan Mudik	Bukitpedusunan	0,8971	0,8667	0,9333	0,899	Mandiri
16	Kuantan Mudik	Saik	0,7543	0,8333	0,9333	0,8403	Mandiri
17	Kuantan Mudik	Pebaun Hulu	0,8629	0,7333	0,8667	0,821	Mandiri
18	Kuantan Mudik	Pebaun Hilir	0,7714	0,8333	0,8667	0,8238	Mandiri
19	Kuantan Mudik	Kinali	0,7143	0,7667	0,8667	0,7825	Maju
20	Kuantan Mudik	Bukit Kauman	0,8571	0,8	0,8667	0,8413	Mandiri
21	Kuantan Mudik	Aur Duri	0,7657	0,8833	0,8667	0,8386	Mandiri
22	Kuantan Mudik	Sungaimanau	0,8571	0,8	0,8667	0,8413	Mandiri
23	Kuantan Mudik	Muaro Tombang	0,8343	0,7333	0,8667	0,8114	Maju
24	Kuantan Tengah	Bandar Alai	0,8343	0,7833	0,8667	0,8281	Mandiri
25	Kuantan Tengah	Pulaukedundung	0,8114	0,8167	0,9333	0,8538	Mandiri
26	Kuantan Tengah	Pulauaro	0,8343	0,8167	0,9333	0,8614	Mandiri
27	Kuantan Tengah	Seberang Taluk	0,92	0,8167	0,8	0,8456	Mandiri
28	Kuantan Tengah	Pulau Baru	0,8343	0,7833	0,8667	0,8281	Mandiri
29	Kuantan Tengah	Koto Tuo	0,8629	0,8667	0,8	0,8432	Mandiri
30	Kuantan Tengah	Kopah	0,8514	0,8333	0,9333	0,8727	Mandiri
31	Kuantan Tengah	Munsalo	0,8057	0,8667	0,8667	0,8463	Mandiri
32	Kuantan Tengah	Sawah	0,8229	0,8	0,8667	0,8298	Mandiri
33	Kuantan Tengah	Koto Taluk	0,9771	0,9667	0,9333	0,959	Mandiri
34	Kuantan Tengah	Koto Kari	0,8971	0,7667	0,8667	0,8435	Mandiri
35	Kuantan Tengah	Pintu Gobang	0,92	0,8333	0,9333	0,8956	Mandiri
36	Kuantan Tengah	Jake	0,8914	0,9333	0,8667	0,8971	Mandiri
37	Kuantan Tengah	Pulau Godang Kari	0,8343	0,85	0,8667	0,8503	Mandiri
38	Kuantan Tengah	Jaya	0,8171	0,8333	0,8667	0,839	Mandiri
39	Kuantan Tengah	Beringin Taluk	0,8571	0,7833	0,8667	0,8357	Mandiri
40	Kuantan Tengah	Sitorajo	0,8857	0,7333	1	0,873	Mandiri
41	Kuantan Tengah	Seberang Taluk Hilir	0,8629	0,9	0,7333	0,8321	Mandiri
42	Kuantan Tengah	Titian Modang Kopah	0,8229	0,9333	0,8667	0,8743	Mandiri
43	Kuantan Tengah	Pulaubanjar Kari	0,8114	0,7667	0,9333	0,8371	Mandiri
44	Singingi	Pangkalan Indarung	0,7943	0,55	0,7333	0,6925	Berkembang
45	Singingi	Pulaupadang	0,8914	0,6667	0,8	0,786	Maju
46	Singingi	Logas	0,9257	0,8833	0,8	0,8697	Mandiri
47	Singingi	Kebun Lado	0,8686	0,8333	0,8	0,834	Mandiri
48	Singingi	Sungaikuning	0,8629	0,7667	0,9333	0,8543	Mandiri

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Iks 2024	Ike 2024	Ikl 2024	Nilai Idm 2024	Status Idm 2024
49	Singingi	Sungaisirih	0,8914	0,8667	0,8667	0,8749	Mandiri
50	Singingi	Sungaibawang	0,8686	0,9	0,8	0,8562	Mandiri
51	Singingi	Air Emas	0,8114	0,8	0,9333	0,8483	Mandiri
52	Singingi	Pasir Emas	0,84	0,8	0,8667	0,8356	Mandiri
53	Singingi	Petai Baru	0,8686	0,7833	0,9333	0,8617	Mandiri
54	Singingi	Sungaikeranji	0,8514	0,8167	0,9333	0,8671	Mandiri
55	Singingi	Sumber Datar	0,8457	0,85	0,9333	0,8763	Mandiri
56	Singingi	Logas Hilir	0,9143	0,7833	0,8	0,8325	Mandiri
57	Kuantan Hilir	Simpang Tanah Lapang	0,7657	0,7667	1	0,8441	Mandiri
58	Kuantan Hilir	Rawang Bonto	0,8286	0,65	0,7333	0,7373	Maju
59	Kuantan Hilir	Koto Tuo	0,7943	0,7	1	0,8314	Mandiri
60	Kuantan Hilir	Banuaran	0,8057	0,7167	0,9333	0,8186	Mandiri
61	Kuantan Hilir	Kampung Madura	0,8571	0,75	0,8667	0,8246	Mandiri
62	Kuantan Hilir	Pulau Kijang	0,8286	0,7	0,8667	0,7984	Maju
63	Kuantan Hilir	Pulaumadinah	0,6743	0,5667	0,8	0,6803	Berkembang
64	Kuantan Hilir	Kampung Tengah	0,68	0,6333	0,8	0,7044	Berkembang
65	Kuantan Hilir	Kampung Medan	0,7943	0,8	0,8667	0,8203	Mandiri
66	Kuantan Hilir	Kepala Pulau	0,7829	0,75	0,8667	0,7998	Maju
67	Kuantan Hilir	Teratak Baru	0,76	0,6	0,9333	0,7644	Maju
68	Kuantan Hilir	Dusun Tuo	0,7543	0,6667	0,9333	0,7848	Maju
69	Kuantan Hilir	Gunungmelintang	0,7314	0,7167	0,9333	0,7938	Maju
70	Kuantan Hilir	Simpang Pulauberalo	0,8057	0,6167	0,9333	0,7852	Maju
71	Cerenti	Kompe Berangin	0,9371	0,85	0,9333	0,9068	Mandiri
72	Cerenti	Sikakak	0,7486	0,7167	0,8	0,7551	Maju
73	Cerenti	Kampung Baru	0,9829	0,9667	0,8667	0,9387	Mandiri
74	Cerenti	Pulaujambu	0,7371	0,6	0,8667	0,7346	Maju
75	Cerenti	Koto Cerenti	0,7029	0,85	0,9333	0,8287	Mandiri
76	Cerenti	Pulaubayur	0,7657	0,8667	0,8667	0,833	Mandiri
77	Cerenti	Pulau Panjang Cerenti	0,9029	0,8667	0,8	0,8565	Mandiri
78	Cerenti	Pesikaian	0,84	0,7667	0,8	0,8022	Maju
79	Cerenti	Telukpauh	0,7771	0,7333	0,8667	0,7924	Maju
80	Cerenti	Tanjungmedan	0,7257	0,7167	0,8667	0,7697	Maju
81	Cerenti	Kampung Baru Timur	0,8571	0,9	0,9333	0,8968	Mandiri
82	Benai	Banjar Benai	0,7943	0,7167	0,9333	0,8148	Maju
83	Benai	Talontom	0,8514	0,7833	0,8667	0,8338	Mandiri
84	Benai	Gunungkesiangan	0,6971	0,8333	0,8667	0,799	Maju
85	Benai	Pulaukalimanting	0,7657	0,7333	0,8	0,7663	Maju
86	Benai	Banjar Lopak	0,7943	0,7667	0,8667	0,8092	Maju
87	Benai	Tanjungsimandolak	0,7371	0,75	0,8667	0,7846	Maju
88	Benai	Siberakun	0,7714	0,8	0,8667	0,8127	Maju
89	Benai	Pulautongah	0,7771	0,6667	0,8667	0,7702	Maju
90	Benai	Ujung Tanjung	0,7714	0,8	0,8	0,7905	Maju
91	Benai	Pulauingu	0,84	0,75	0,8667	0,8189	Mandiri
92	Benai	Simandolak	0,84	0,8667	0,8667	0,8578	Mandiri
93	Benai	Tebing Tinggi	0,84	1	0,8	0,88	Mandiri
94	Benai	Pulaulancang	0,8114	0,7333	0,7333	0,7594	Maju
95	Benai	Benai Kecil	0,8457	0,8	0,8667	0,8375	Mandiri
96	Benai	Koto Benai	0,7771	0,8333	0,8667	0,8257	Mandiri

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Iks 2024	Ike 2024	Ikl 2024	Nilai Idm 2024	Status Idm 2024
97	Gunungtoar	Pulaumungkur	0,8457	0,7	0,9333	0,8263	Mandiri
98	Gunungtoar	Telukberingin	0,7371	0,9333	0,9333	0,8679	Mandiri
99	Gunungtoar	Pulaurumput	0,8057	0,8	0,8	0,8019	Maju
100	Gunungtoar	Seberang Gunung	0,7714	0,6833	0,9333	0,796	Maju
101	Gunungtoar	Teberau Panjang	0,8286	0,8	0,9333	0,854	Mandiri
102	Gunungtoar	Koto Gunung	0,6914	0,8833	0,9333	0,836	Mandiri
103	Gunungtoar	Gunung	0,8743	0,9167	0,9333	0,9081	Mandiri
104	Gunungtoar	Toar	0,7714	0,8667	0,9333	0,8571	Mandiri
105	Gunungtoar	Petapahan	0,8743	0,8333	0,8	0,8359	Mandiri
106	Gunungtoar	Kampung Baru	0,8457	0,8667	0,9333	0,8819	Mandiri
107	Gunungtoar	Pisang Berebus	0,76	0,8333	0,9333	0,8422	Mandiri
108	Gunungtoar	Lubuk Terentang	0,84	0,8667	0,9333	0,88	Mandiri
109	Gunungtoar	Siberobah	0,92	0,8167	0,9333	0,89	Mandiri
110	Gunungtoar	Seberang Sungai	0,8914	0,6833	0,8667	0,8138	Maju
111	Singingi Hilir	Koto Baru	0,9143	0,8833	0,8667	0,8881	Mandiri
112	Singingi Hilir	Petai	0,8571	0,8833	0,8667	0,869	Mandiri
113	Singingi Hilir	Sungaipaku	0,8743	0,8667	0,8667	0,8692	Mandiri
114	Singingi Hilir	Tanjungpauh	0,8571	0,8833	0,9333	0,8913	Mandiri
115	Singingi Hilir	Simpang Raya	0,8971	0,8	1	0,899	Mandiri
116	Singingi Hilir	Sungaibuluh	0,92	0,9	0,9333	0,9178	Mandiri
117	Singingi Hilir	Suka Damai	0,8743	0,9167	0,9333	0,9081	Mandiri
118	Singingi Hilir	Sumber Jaya	0,92	0,9167	1	0,9456	Mandiri
119	Singingi Hilir	Muara Bahan	0,9257	0,8833	1	0,9363	Mandiri
120	Singingi Hilir	Bukitraya	0,92	0,8833	1	0,9344	Mandiri
121	Singingi Hilir	Beringin Jaya	0,9086	0,8167	0,9333	0,8862	Mandiri
122	Singingi Hilir	Suka Maju	0,9829	0,9333	1	0,9721	Mandiri
123	Pangean	Pasar Baru Pangean	0,8571	0,8667	0,7333	0,819	Mandiri
124	Pangean	Koto Pangean	0,7943	0,5167	0,8	0,7037	Berkembang
125	Pangean	Pulaukumpai	0,72	0,7	0,6667	0,6956	Berkembang
126	Pangean	Pulautongah	0,6857	0,6	0,8	0,6952	Berkembang
127	Pangean	Pulauderas	0,7943	0,6333	0,8	0,7425	Maju
128	Pangean	Telukpauh	0,6971	0,6	0,8	0,699	Berkembang
129	Pangean	Tanah Bekali	0,7886	0,6667	0,8	0,7517	Maju
130	Pangean	Padang Tanggung	0,76	0,65	0,8667	0,7589	Maju
131	Pangean	Padang Kunik	0,7314	0,7	0,8	0,7438	Maju
132	Pangean	Pembatang	0,7429	0,6	0,8	0,7143	Maju
133	Pangean	Pauh Angit	0,7371	0,7333	0,8667	0,779	Maju
134	Pangean	Sukaping	0,7657	0,6167	0,7333	0,7052	Berkembang
135	Pangean	Pulaurengas	0,7371	0,6833	0,8	0,7402	Maju
136	Pangean	Rawang Binjai	0,7143	0,6	0,8	0,7048	Berkembang
137	Pangean	Sako	0,8857	0,9167	0,9333	0,9119	Mandiri
138	Pangean	Sungailangsar	0,9143	0,85	0,8667	0,877	Mandiri
139	Pangean	Pauh Angit Hulu	0,7086	0,6	0,8	0,7029	Berkembang
140	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	0,8629	0,8167	0,9333	0,871	Mandiri
141	Logas Tanah Darat	Logas	0,7257	0,7833	0,8	0,7697	Maju

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Iks 2024	Ike 2024	Iki 2024	Nilai Idm 2024	Status Idm 2024
142	Logas Tanah Darat	Lubuk Kebun	0,7429	0,6667	0,9333	0,781	Maju
143	Logas Tanah Darat	Sungai Rambai	0,7714	0,7	0,9333	0,8016	Maju
144	Logas Tanah Darat	Situgal	0,7429	0,7333	0,9333	0,8032	Maju
145	Logas Tanah Darat	Rambahan	0,7257	0,7667	0,8667	0,7863	Maju
146	Logas Tanah Darat	Teratak Rendah	0,7943	0,6	0,7333	0,7092	Maju
147	Logas Tanah Darat	Sikijang	0,6971	0,65	0,9333	0,7602	Maju
148	Logas Tanah Darat	Sukaraja	0,8343	0,8167	0,8667	0,8392	Mandiri
149	Logas Tanah Darat	Sako Margasari	0,7486	0,7667	0,8667	0,794	Maju
150	Logas Tanah Darat	Kuantan Sako	0,9029	0,8667	0,8667	0,8787	Mandiri
151	Logas Tanah Darat	Hulu Teso	0,7429	0,8333	0,7333	0,7698	Maju
152	Logas Tanah Darat	Giri Sako	0,8114	0,6667	0,8667	0,7816	Maju
153	Logas Tanah Darat	Bumi Mulya	0,88	0,8667	1	0,9156	Mandiri
154	Logas Tanah Darat	Sidodadi	0,8343	0,7333	0,7333	0,767	Maju
155	Inuman	Pasar Inuman	0,8057	0,8333	0,9333	0,8575	Mandiri
156	Inuman	Koto Inuman	0,7029	0,8167	0,9333	0,8176	Mandiri
157	Inuman	Pulaupanjang Hulu	0,7657	0,65	0,8667	0,7608	Maju
158	Inuman	Pulaupanjang Hilir	0,72	0,6667	0,9333	0,7733	Maju
159	Inuman	Sigaruntang	0,7486	0,65	0,8	0,7329	Maju
160	Inuman	Pulaubusuk	0,7143	0,6667	0,8667	0,7492	Maju
161	Inuman	Bedeng Sikuran	0,6857	0,7667	0,7333	0,7286	Maju
162	Inuman	Banjar Nan Tigo	0,6743	0,6333	0,8667	0,7248	Maju
163	Inuman	Pulausipan	0,6629	0,55	0,9333	0,7154	Maju
164	Inuman	Pulaubusuk Jaya	0,7943	0,7833	0,6	0,7259	Maju
165	Inuman	Seberang Pulau Busuk	0,7314	0,6	0,9333	0,7549	Maju
166	Inuman	Lebuh Lurus	0,8686	0,8833	0,8667	0,8729	Mandiri
167	Inuman	Kampung Baru Koto	0,7543	0,7333	0,9333	0,807	Maju
168	Inuman	Ketaping Jaya	0,7029	0,6667	0,9333	0,7676	Maju
169	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	0,8971	0,9	0,8	0,8657	Mandiri
170	Hulu Kuantan	Sungaikelawar	0,8057	0,7167	0,9333	0,8186	Mandiri
171	Hulu Kuantan	Tanjung	0,8686	0,8167	0,8667	0,8506	Mandiri
172	Hulu Kuantan	Sungaipinang	0,8	0,8167	0,8667	0,8278	Mandiri
173	Hulu Kuantan	Sungaialah	0,7829	0,7167	1	0,8332	Mandiri
174	Hulu Kuantan	Koto Kombu	0,8343	0,8167	0,8	0,817	Mandiri
175	Hulu Kuantan	Sumpu	0,8229	0,7667	0,8	0,7965	Maju
176	Hulu Kuantan	Mudik Ulo	0,8571	0,8333	0,8	0,8302	Mandiri
177	Hulu Kuantan	Inuman	0,7314	0,8167	0,8667	0,8049	Maju
178	Hulu Kuantan	Tanjungmedang	0,8	0,85	0,8	0,8167	Mandiri

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Iks 2024	Ike 2024	Ikl 2024	Nilai Idm 2024	Status Idm 2024
179	Hulu Kuantan	Serosa	0,8514	0,9	0,8	0,8505	Mandiri
180	Hulu Kuantan	Sampurago	0,8171	0,8	0,9333	0,8502	Mandiri
181	Kuantan Hilir Seberang	Pulaubaru	0,6914	0,6667	0,8667	0,7416	Maju
182	Kuantan Hilir Seberang	Pulauberalo	0,7829	0,5667	0,7333	0,6943	Berkembang
183	Kuantan Hilir Seberang	Pulaukukur	0,6571	0,55	0,8667	0,6913	Berkembang
184	Kuantan Hilir Seberang	Pelukahan	0,7543	0,6	0,8667	0,7403	Maju
185	Kuantan Hilir Seberang	Pengalihan	0,6457	0,5667	0,8667	0,693	Berkembang
186	Kuantan Hilir Seberang	Lumbok	0,6514	0,6167	0,8667	0,7116	Maju
187	Kuantan Hilir Seberang	Teratak Jering	0,7543	0,6167	0,7333	0,7014	Berkembang
188	Kuantan Hilir Seberang	Tanjungpisang	0,6857	0,5167	0,8667	0,6897	Berkembang
189	Kuantan Hilir Seberang	Danau	0,7543	0,5	0,8667	0,707	Berkembang
190	Kuantan Hilir Seberang	Kasang Limau Sundai	0,6	0,55	0,8	0,65	Berkembang
191	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	0,8114	0,8	0,8667	0,826	Mandiri
192	Kuantan Hilir Seberang	Tanjung	0,6743	0,4833	0,8667	0,6748	Berkembang
193	Kuantan Hilir Seberang	Sungaisorik	0,7029	0,6333	0,8	0,7121	Maju
194	Kuantan Hilir Seberang	Rawang Oguang	0,6971	0,5333	0,7333	0,6546	Berkembang
195	Sentajo Raya	Pulaukomang Sentajo	0,8743	0,8333	0,9333	0,8803	Mandiri
196	Sentajo Raya	Muaro Sentajo	0,9086	0,9333	0,9333	0,9251	Mandiri
197	Sentajo Raya	Koto Sentajo	0,9086	0,8667	0,9333	0,9029	Mandiri
198	Sentajo Raya	Kampungbaru Sentajo	0,8057	0,8667	0,8	0,8241	Mandiri
199	Sentajo Raya	Pulaukopung Sentajo	0,8457	0,6833	0,8667	0,7986	Maju
200	Sentajo Raya	Teratak Air Hitam	0,7886	0,7	0,9333	0,8073	Maju
201	Sentajo Raya	Seberang Teratak Air Hitam	0,7143	0,6	0,9333	0,7492	Maju
202	Sentajo Raya	Parit Teratak Air Hitam	0,72	0,7167	1	0,8122	Maju
203	Sentajo Raya	Jalur Patah	0,8	0,7833	0,9333	0,8389	Mandiri
204	Sentajo Raya	Geringing Baru	0,9314	0,85	0,8	0,8605	Mandiri
205	Sentajo Raya	Marsawa	0,9143	0,8333	0,9333	0,8937	Mandiri
206	Sentajo Raya	Langsat Hulu	0,8343	0,85	0,9333	0,8725	Mandiri
207	Sentajo Raya	Muara Langsat	0,9143	0,9667	1	0,9603	Mandiri
208	Sentajo Raya	Geringging Jaya	0,9029	0,75	1	0,8843	Mandiri
209	Pucuk Rantau	Perhentian Sungkai	0,8114	0,7	0,8667	0,7927	Maju
210	Pucuk Rantau	Ibul	0,7486	0,7167	0,8667	0,7773	Maju
211	Pucuk Rantau	Muarapetai	0,8571	0,7667	0,8	0,8079	Maju
212	Pucuk Rantau	Pangkalan	0,8743	0,9167	0,7333	0,8414	Mandiri
213	Pucuk Rantau	Sungaibesar	0,76	0,7667	0,8667	0,7978	Maju

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Iks 2024	Ike 2024	Ikl 2024	Nilai Idm 2024	Status Idm 2024
214	Pucuk Rantau	Setiang	0,7029	0,7667	0,8667	0,7787	Maju
215	Pucuk Rantau	Muaro Tiu Makmur	0,8229	0,7667	0,8	0,7965	Maju
216	Pucuk Rantau	Muaratobek	0,7714	0,8167	0,8	0,796	Maju
217	Pucuk Rantau	Sungai Besar Hilir	0,76	0,7	0,8667	0,7756	Maju
218	Pucuk Rantau	Kampung Baru Ibul	0,7429	0,75	0,7333	0,7421	Maju

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Dari total 41 Desa Berkembang terdapat 20 Desa IKS (Indeks Komponen Sosial) masih rendah, 38 Desa IKE (Indeks Komponen Ekonomi) masih rendah, dan 10 Desa IKL (Indeks Komponen Lingkungan) masih rendah, untuk intervensi peningkatan status desa berkembang akan diperjelas dalam Juknis Penggunaan Dana Desa.

Kabupaten Kuantan Singingi sudah tidak memiliki Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, sehingga tidak ada Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, maka semua desa sudah melantik struktur Lembaga Adat Desa tersebut. LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat yang bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. mengakui hak Masyarakat Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memberikan penguatan terhadap Lembaga Adat;
- d. memfasilitasi masyarakat adat dan Lembaga Adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan Masyarakat Adat beserta segala haknya; dan
- f. membela hak-hak Masyarakat Adat untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah Masyarakat Adat

Merujuk hasil rekomendasi dari IDM untuk membuat rencana kerja, dimana dari hasil skor Indeks yang masih rendah perlu dilakukan intervensi dalam bentuk fasilitasi, pembinaan maupun kegiatan sesuai kewenangan, baik itu kewenangan desa, kabupaten, provinsi maupun pusat. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran akan menentukan perkembangan desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Desa yang memiliki pagu dana desa yang sama belum tentu menghasilkan status desa yang sama karena kebutuhan masing-masing desa berbeda.

c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Dalam rangka mendukung sasaran prioritas dan daya saing ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan serta angka pengangguran dilakukan dengan meningkatkan kelembagaaan ekonomi masyarakat serta arah kebijakannya dalam mengelola Bumdes. Di Kabupaten Kuantan Singingi telah terbentuk 218 Bumdes, yang artinya seluruh desa sudah memiliki Bumdes.

Tabel II.167 Data Klasifikasi Bumdes Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
1	1409012004	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	AIR BULUH	PERINTIS
2	1409012005	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	PANTAI	PEMULA
3	1409012007	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	LUBUK RAMO	BERKEMBANG
4	1409012008	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	SEBERANG CENGAR	
5	1409012009	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	KOTO CENGAR	PERINTIS
6	1409012010	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	SANGAU	PERINTIS
7	1409012011	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	BANJAR PADANG	PERINTIS
8	1409012013	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	KASANG	
9	1409012014	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	KOTO LUBUK JAMBI	
10	1409012015	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	LUBUK BINJAI	
11	1409012016	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	SEBERANG PANTAI	PERINTIS
12	1409012017	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	RANTAU SIALANG	PEMULA
13	1409012018	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	LUAI	PERINTIS
14	1409012019	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	BANJAR GUNTUNG	PERINTIS
15	1409012020	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	BUKIT PEDUSUNAN	MAJU
16	1409012021	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	SAIK	PERINTIS
17	1409012022	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	PEBAUN HULU	PERINTIS
18	1409012023	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	PEBAUN HILIR	BERKEMBANG
19	1409012024	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	KINALI	
20	1409012025	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	BUKIT KAUMAN	MAJU
21	1409012026	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	AUR DURI	PEMULA
22	1409012027	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	SUNGAI MANAU	PERINTIS
23	1409012030	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	MUARO TOMBANG	
24	1409022001	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	BANDAR ALAI	PERINTIS
25	1409022002	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	PULAU KEDUNDUNG	PERINTIS
26	1409022003	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	PULAU ARO	PERINTIS
27	1409022004	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	SEBERANG TALUK	
28	1409022005	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	PULAU BARU	PERINTIS

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
29	1409022006	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	KOTO TUO	PERINTIS
30	1409022007	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	KOPAH	BERKEMBANG
31	1409022008	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	MUNSALO	PERINTIS
32	1409022014	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	SAWAH	PERINTIS
33	1409022015	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	KOTO TALUK	PERINTIS
34	1409022017	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	KOTO KARI	PERINTIS
35	1409022019	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	PINTU GOBANG	PERINTIS
36	1409022020	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	JAKE	
37	1409022021	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	PULAU GODANG KARI	PERINTIS
38	1409022022	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	JAYA	PEMULA
39	1409022023	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	BERINGIN TALUK	PERINTIS
40	1409022024	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	SITORAJU	PERINTIS
41	1409022026	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	SEBERANG TALUK HILIR	PEMULA
42	1409022027	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	TITIAN MODANG KOPAH	PERINTIS
43	1409022028	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	PULAU BANJAR KARI	PERINTIS
44	1409032001	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	PANGKALAN INDARUNG	PERINTIS
45	1409032002	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	PULAU PADANG	PERINTIS
46	1409032004	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	LOGAS	PEMULA
47	1409032005	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	KEBUN LADO	PERINTIS
48	1409032006	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	SUNGAI KUNING	PERINTIS
49	1409032007	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	SUNGAI SIRIH	MAJU
50	1409032008	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	SUNGAI BAWANG	BERKEMBANG
51	1409032009	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	AIR EMAS	PERINTIS
52	1409032010	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	PASIR EMAS	MAJU
53	1409032011	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	PETAI BARU	PERINTIS
54	1409032012	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	SUNGAI KERANJI	BERKEMBANG
55	1409032013	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	SUMBER DATAR	BERKEMBANG
56	1409032014	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	LOGAS HILIR	PERINTIS

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
57	1409042003	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	SIMPANG TANAH LAPANG	PERINTIS
58	1409042004	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	RAWANG BONTO	PERINTIS
59	1409042005	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	KOTO TUO	PERINTIS
60	1409042006	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	BANUARAN	PERINTIS
61	1409042007	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	KAMPUNG MADURA	PERINTIS
62	1409042009	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	PULAU KIJANG	
63	1409042015	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	PULAU MADINAH	PERINTIS
64	1409042016	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	KAMPUNG TENGAH	PERINTIS
65	1409042017	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	KAMPUNG MEDAN	
66	1409042018	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	KEPALA PULAU	PERINTIS
67	1409042019	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	TERATAK BARU	PERINTIS
68	1409042020	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	DUSUN TUO	PERINTIS
69	1409042028	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	GUNUNG MELINTANG	
70	1409042030	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	SIMPANG PULAU BERA	PERINTIS
71	1409052003	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	KOMPE BERANGIN	PERINTIS
72	1409052004	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	SIKAKAK	PERINTIS
73	1409052005	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	KAMPUNG BARU	
74	1409052006	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	PULAU JAMBU	
75	1409052007	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	KOTO CERENTI	PERINTIS
76	1409052008	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	PULAU BAYUR	PERINTIS
77	1409052009	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	PULAU PANJANG CERENTI	PERINTIS
78	1409052010	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	PESIKAIAN	PERINTIS
79	1409052011	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	TELUK PAUH	PERINTIS
80	1409052012	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	TANJUNG MEDAN	PERINTIS
81	1409052013	KUANTAN SINGINGI	CERENTI	KAMPUNG BARU TIMUR	PERINTIS
82	1409062003	KUANTAN SINGINGI	BENAI	BANJAR BENAI	PERINTIS
83	1409062004	KUANTAN SINGINGI	BENAI	TALONTOM	BERKEMBANG
84	1409062005	KUANTAN SINGINGI	BENAI	GUNUNG KESIANGAN	PERINTIS

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
85	1409062006	KUANTAN SINGINGI	BENAI	PULAU KALIMANTING	PERINTIS
86	1409062007	KUANTAN SINGINGI	BENAI	BANJAR LOPAK	PERINTIS
87	1409062008	KUANTAN SINGINGI	BENAI	TANJUNG SIMANDOLA	BERKEMBANG
88	1409062009	KUANTAN SINGINGI	BENAI	SIBERAKUN	PERINTIS
89	1409062010	KUANTAN SINGINGI	BENAI	PULAU TONGAH	BERKEMBANG
90	1409062011	KUANTAN SINGINGI	BENAI	UJUNG TANJUNG	BERKEMBANG
91	1409062012	KUANTAN SINGINGI	BENAI	PULAU INGU	PERINTIS
92	1409062013	KUANTAN SINGINGI	BENAI	SIMANDOLAK	PERINTIS
93	1409062014	KUANTAN SINGINGI	BENAI	TEBING TINGGI	BERKEMBANG
94	1409062015	KUANTAN SINGINGI	BENAI	PULAU LANCANG	PERINTIS
95	1409062016	KUANTAN SINGINGI	BENAI	BENAI KECIL	PERINTIS
96	1409062021	KUANTAN SINGINGI	BENAI	KOTO BENAI	PEMULA
97	1409072001	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	PULAU MUNGKUR	PERINTIS
98	1409072002	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	TELUK BERINGIN	
99	1409072003	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	PULAU RUMPUT	
100	1409072004	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	SEBERANG GUNUNG	
101	1409072005	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	TEBERAU PANJANG	
102	1409072006	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	KOTO GUNUNG	
103	1409072007	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	GUNUNG	
104	1409072008	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	TOAR	
105	1409072009	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	PETAPAHAN	PERINTIS
106	1409072010	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	KAMPUNG BARU	
107	1409072011	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	PISANG BEREBUS	BERKEMBANG
108	1409072012	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	LUBUK TERENTANG	
109	1409072013	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	SIBEROBAH	
110	1409072014	KUANTAN SINGINGI	GUNUNGTOAR	SEBERANG SUNGAI	
111	1409082001	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	KOTO BARU	
112	1409082002	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	PETAI	PEMULA

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
113	1409082003	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	SUNGAI PAKU	
114	1409082004	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	TANJUNG PAUH	PERINTIS
115	1409082005	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	SIMPANG RAYA	
116	1409082006	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	SUNGAI BULUH	MAJU
117	1409082007	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	SUKA DAMAI	MAJU
118	1409082008	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	SUMBER JAYA	PEMULA
119	1409082009	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	MUARA BAHAN	PEMULA
120	1409082010	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	BUKIT RAYA	MAJU
121	1409082011	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	BERINGIN JAYA	PEMULA
122	1409082012	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	SUKA MAJU	BERKEMBANG
123	1409092001	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PASAR BARU PANGEAN	
124	1409092002	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	KOTO PANGEAN	
125	1409092003	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PULAU KUMPAI	PERINTIS
126	1409092004	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PULAU TONGAH	PERINTIS
127	1409092005	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PULAU DERAS	PERINTIS
128	1409092006	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	TELUK PAUH	PERINTIS
129	1409092007	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	TANAH BEKALI	
130	1409092008	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PADANG TANGGUNG	BERKEMBANG
131	1409092009	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PADANG KUNIK	BERKEMBANG
132	1409092010	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PEMBATANG	
133	1409092011	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PAUH ANGIT	
134	1409092012	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	SUKAPING	PERINTIS
135	1409092013	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PULAU RENGAS	PERINTIS
136	1409092014	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	RAWANG BINJAI	
137	1409092015	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	SAKO	
138	1409092016	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	SUNGAI LANGSAT	PERINTIS
139	1409092017	KUANTAN SINGINGI	PANGEAN	PAUH ANGIT HULU	
140	1409102001	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	PERHENTIAN LUAS	

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
141	1409102002	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	LOGAS	
142	1409102003	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	LUBUK KEBUN	
143	1409102004	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	SUNGAI RAMBAI	
144	1409102005	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	SITUGAL	
145	1409102006	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	RAMBAHAN	
146	1409102007	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	TERATAK RENDAH	
147	1409102008	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	SIKIJANG	
148	1409102009	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	SUKARAJA	
149	1409102010	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	SAKO MARGASARI	PEMULA
150	1409102011	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	KUANTAN SAKO	PERINTIS
151	1409102012	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	HULU TESO	
152	1409102013	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	GIRI SAKO	MAJU
153	1409102014	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	BUMI MULYA	PEMULA
154	1409102015	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	SIDODADI	
155	1409112001	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	PASAR INUMAN	PERINTIS
156	1409112002	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	KOTO INUMAN	PERINTIS
157	1409112003	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	PULAU PANJANG HULU	PERINTIS
158	1409112004	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	PULAU PANJANG HILIR	PERINTIS
159	1409112005	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	SIGARUNTANG	PERINTIS
160	1409112006	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	PULAU BUSUK	PERINTIS
161	1409112007	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	BEDENG SIKURAN	PERINTIS
162	1409112008	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	BANJAR NAN TIGO	PERINTIS
163	1409112009	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	PULAU SIPAN	PERINTIS
164	1409112010	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	PULAU BUSUK JAYA	PERINTIS
165	1409112011	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	SEBERANG PULAU BUSUK	PERINTIS
166	1409112012	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	LEBUH LURUS	PERINTIS
167	1409112013	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	KAMPUNG BARU KOTO	PERINTIS
168	1409112014	KUANTAN SINGINGI	INUMAN	KETAPING JAYA	PERINTIS

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
169	1409122001	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	LUBUK AMBACANG	
170	1409122002	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	SUNGAI KELELAWAR	PERINTIS
171	1409122003	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	TANJUNG	PERINTIS
172	1409122004	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	SUNGAI PINANG	PERINTIS
173	1409122005	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	SUNGAI ALAH	
174	1409122006	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	KOTO KOMBUR	PERINTIS
175	1409122007	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	SUMPU	PERINTIS
176	1409122008	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	MUDIK ULO	PERINTIS
177	1409122009	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	INUMAN	PEMULA
178	1409122010	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	TANJUNG MEDANG	PERINTIS
179	1409122011	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	SEROSA	PERINTIS
180	1409122012	KUANTAN SINGINGI	HULU KUANTAN	SAMPURAGO	
181	1409132001	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	PULAU BARU	
182	1409132002	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	PULAU BERALO	
183	1409132003	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	PULAU KULUR	
184	1409132004	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	PELUKAHAN	
185	1409132005	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	PENGALIHAN	
186	1409132006	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	LUMBOK	PERINTIS
187	1409132007	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	TERATAK JERING	PERINTIS
188	1409132008	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	TANJUNG PISANG	
189	1409132009	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	DANAU	
190	1409132010	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	KASANG LIMA SUNDI	
191	1409132011	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	KOTO RAJO	
192	1409132012	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	TANJUNG	
193	1409132013	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	SUNGAI SORIK	
194	1409132014	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR SEBERANG	RAWANG OGUNG	
195	1409142001	KUANTAN SINGINGI	SENTAJA RAYA	PULAU KOMANG SENTAJA	PERINTIS
196	1409142002	KUANTAN SINGINGI	SENTAJA RAYA	MUARO SENTAJA	PEMULA

NO	KODE DESA	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT BUMDESA 2024
197	1409142003	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	KOTO SENTAJO	PERINTIS
198	1409142004	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	KAMPUNG BARU SENTAJO	BERKEMBANG
199	1409142005	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	PULAU KOPUNG SENTAJO	
200	1409142006	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	TERATAK AIR HITAM	PERINTIS
201	1409142007	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	SEBERANG TERATAK AIR HITAM	PERINTIS
202	1409142008	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	PARIT TERATAK AIR HITAM	PERINTIS
203	1409142009	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	JALUR PATAH	PERINTIS
204	1409142010	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	GERINGING BARU	MAJU
205	1409142011	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	MARSAWA	MAJU
206	1409142012	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	LANGSAT HULU	MAJU
207	1409142013	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	MUARA LANGSAT	PEMULA
208	1409142014	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	GERINGGING JAYA	MAJU
209	1409152001	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	PERHENTIAN SUNGKAI	
210	1409152002	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	IBUL	
211	1409152003	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	MUARA PETAI	PERINTIS
212	1409152004	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	PANGKALAN	
213	1409152005	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	SUNGAI BESAR	
214	1409152006	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	SETIANG	BERKEMBANG
215	1409152007	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	MUARO TIU MAKMUR	
216	1409152008	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	MUARA TOBEK	PERINTIS
217	1409152009	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	SUNGAI BESAR HILIR	
218	1409152010	KUANTAN SINGINGI	PUCUK RANTAU	KAMPUNG BARU IBUL	

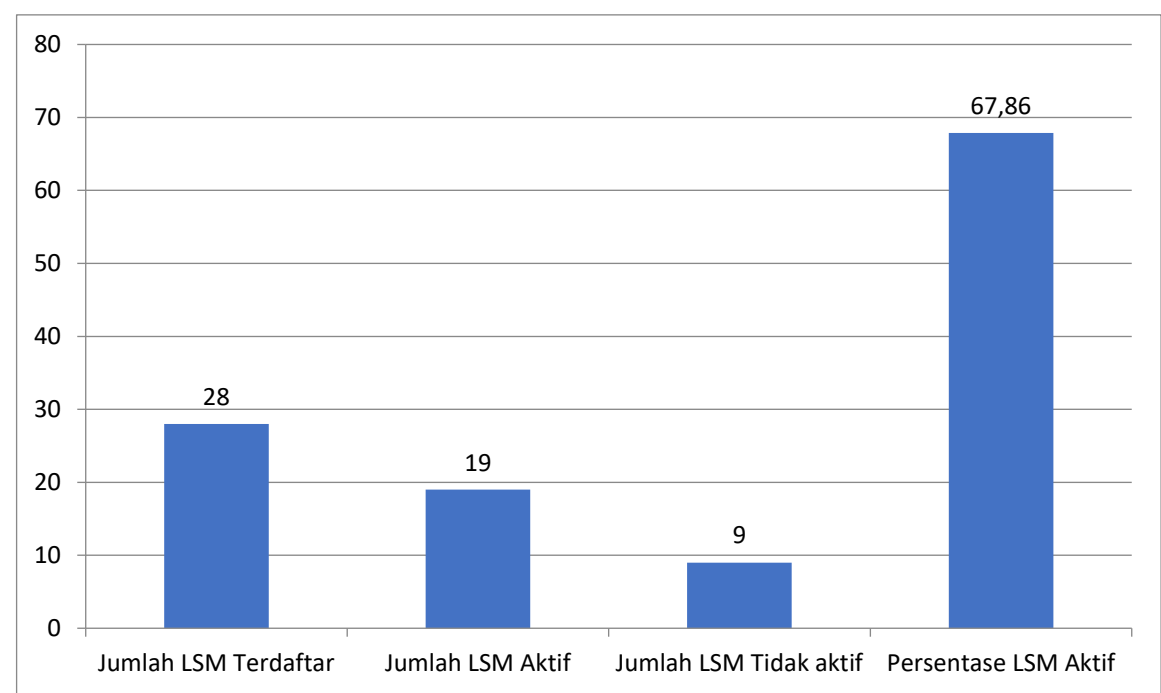
Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahun 2024, kondisi BUMDesa di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDesa masih berada pada kategori *Perintis* dan *Pemula*. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas BUMDesa masih dalam tahap awal pengembangan kelembagaan dan usaha, dengan keterbatasan pada aspek permodalan, kapasitas manajerial, serta inovasi dalam pengelolaan unit usaha. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang bahwa perkembangan BUMDesa perlu terus diperkuat melalui kebijakan dan program yang terarah. Dukungan pemerintah daerah difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi pendampingan dan pelatihan, serta perluasan akses permodalan dan jejaring usaha.

d) Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Saat ini LSM yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi telah berkembang sesuai dengan bidang yang dikelolanya.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.83 LSM yang Aktif di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Pada tabel di atas sampai dengan tahun 2023 jumlah LSM yang terdaftar sebanyak 28 LSM, sedangkan LSM yang aktif sebanyak 19 LSM atau sebesar 67,86 %.

e) Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang memberikan layanan dasar sejak tahap pemantauan pertumbuhan balita hingga pendampingan lansia. Setiap Posyandu wajib menyelenggarakan enam standar pelayanan minimal (SPM) pemantauan pertumbuhan, imunisasi dasar, penanggulangan diare, pemberian vitamin A, penyuluhan gizi, dan pendataan lansia dengan mekanisme “dari, oleh, dan untuk” masyarakat serta dukungan petugas kesehatan. Program ini dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan lokasi strategis lain yang mudah dijangkau, sehingga dapat meningkatkan cakupan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan desa.

Tabel II.168 Posyandu di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Per Posyandu	Jumlah Kader Posyandu
1	Cerenti	16	5	80

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Per Posyandu	Jumlah Kader Posyandu
2	Inuman	26	5	130
3	Kuantan Hilir	18	5	90
4	Kuantan Hilir Seberang	15	5	75
5	Pangean	30	5	150
6	Logas Tanah Darat	23	5	115
7	Benai	15	5	75
8	Sentajo Raya	29	5	145
9	Kuantan Tengah	32	5	160
10	Gunung Toar	36	5	180
11	Kuantan Mudik	41	5	205
12	Hulu Kuantan	14	5	70
13	Pucuk Rantau	29	5	145
14	Singingi	24	5	120
15	Singingi Hilir	35	5	175
Jumlah		383	75	1.915

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

Pada tahun 2024, total Posyandu di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 383 unit, dengan agregasi 1.915 kader yang tersebar merata di 15 kecamatan. Rata-rata setiap Posyandu didukung oleh lima kader terlatih, yang bertugas memastikan kelancaran pelaksanaan enam SPM. Pelayanan Posyandu diharapkan terus diperluas dan diperkaya, antara lain melalui penambahan lokus layanan di wilayah rawan untuk mencapai rasio minimal satu Posyandu per 500 balita, sesuai Inmendagri 2/2025. Peningkatan kapasitas dan pembinaan kader menjadi prioritas, guna menjaga keberlanjutan dan mutu layanan kesehatan dasar di seluruh kecamatan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya pengendalian penduduk dalam keluarga berencana Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan partisipasi aktif seluruh Perangkat Daerah sebagai komitmen bersama membantu pengendalian penduduk, data pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel II.169 Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	65,00%	68%	68%	75%	100 %
2	Rasio Akseptor KB	74,31%	59,80%	62,60%	70%	68%
3	Rata-rata Usia Kawin Pertama	21 Th	22 Th	21Th	21Th	21Th

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Rasio akseptor KB mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dari 2020 sebesar 74,31 turun menjadi 59,80% pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 62,60%, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 68% dari tahun 2023 sebesar 70%. Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB meningkat secara signifikan dari 65% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024, ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kerja dan tugas dalam

upaya melakukan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kuantan Singingi.

- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) baru didirikan sampai tahun 2024 adalah sebanyak 5 (lima) PPKS yaitu Hulu kuantan, gunung Toar, Singingi hilir, Pangean dan Kuantan Hilir Seberang.

9. Perhubungan

- a) Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jalur transportasi yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi adalah transportasi darat dan air. Sebagai daerah yang dilalui oleh 2 (dua) sungai yang besar, yaitu Sungai Kuantan/Indragiri dan Sungai Singingi, transportasi air sudah sejak lama berkembang dan menopang mobilitas kehidupan masyarakat. Sungai dahulu merupakan jalur utama untuk distribusi kebutuhan makanan, hasil pertanian dan mobilisasi orang dari suatu tempat ke tempat lain. Seiring dengan semakin berkembangnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat menyebabkan sungai bukan lagi sebagai sarana transportasi yang dominan dan utama.

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Kebutuhan sarana transportasi secara umum masih dapat dipenuhi secara mandiri. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi. Selain itu, kebutuhan sarana angkutan umum bagi masyarakat relatif masih dapat terlayani dengan keberadaan jasa ojek sepeda motor. Kondisi ini menyebabkan pengembangan jasa di bidang penyediaan angkutan umum masih belum menarik bagi dunia usaha. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan pembenahan sarana dan prasarana angkutan umum. Mencermati data peningkatan jumlah penumpang angkutan umum yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka ketersediaan dan pembenahan sarana dan prasarana seperti armada angkutan umum dan terminal perlu ditingkatkan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi jumlah penumpang angkutan pada tahun 2020 tercatat 41.100 Orang menurun menjadi 38.950 orang pada Tahun 2024. Perkembangan jumlah penumpang dari Tahun 2020–2024 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel II.170 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penumpang Bis	41.100	36.990	38.000	38.940	38.950
2.	Jumlah penumpang Kereta api	-	-	-	-	-
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	-	-	-	-	-
4.	Jumlah penumpang pesawat udara	-	-	-	-	-
5.	Total Jumlah Penumpang	41.100	36.990	38.000	38.940	38.950

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada data yang terdapat di tabel dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan pada tahun 2024 hanya sedikit mengalami peningkatan, artinya masyarakat semakin kurang menggunakan jasa angkutan

umum sebagai akibat banyaknya masyarakat yang memilih bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi dan bukan menggunakan angkutan umum.

b) Jumlah Terminal Bis

Keberadaan terminal bus di Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun terakhir masih sangat terbatas, hanya terdapat satu terminal tipe C yang berlokasi di Kota Teluk Kuantan dan belum mengalami penambahan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses transportasi publik berbasis darat sangat terpusat, sehingga kapasitas pelayanan terminal sangat penting untuk mobilitas masyarakat lintas kecamatan maupun ke luar daerah. Ketiadaan pelabuhan laut dan udara semakin menegaskan peran sentral terminal bus sebagai satu-satunya simpul transportasi publik antardaerah. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah, mengingat potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.

Tabel II.171 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pelabuhan laut	0	0	0	0	0
2.	Jumlah pelabuhan udara	0	0	0	0	0
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
Jumlah		1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Dari sisi operasional, data menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Teluk Kuantan setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya jumlah armada bus yang melayani rute dari terminal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur terminal belum bertambah, permintaan layanan transportasi publik justru semakin tinggi.

Tabel II.172 Data Keberangkatan Orang di Terminal Teluk Kuantan Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Armada (Unit)	Orang/Penumpang (Unit/Hari)	Jumlah (1 Tahun)
2020	2	40	14.000
2021	2	60	21.000
2022	3	70	24.200
2023	3	72	25.900
2024	3	75	26.250

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Namun, jumlah kedatangan penumpang sempat mengalami fluktuasi, yang dapat mencerminkan dinamika pergerakan penduduk akibat faktor eksternal seperti pandemi atau perubahan aktivitas ekonomi. Situasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan inovasi pada sistem transportasi darat, agar ke depannya pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, aman, dan nyaman, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan

Tabel II.173 Data Kedatangan Orang di Terminal Teluk Kuantan Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Armada (Unit)	Orang/Penumpang (Unit/Hari)	Jumlah (1 Tahun)
2020	3	75	26.000
2021	2	30	10.500

Tahun	Jumlah Armada (Unit)	Orang/Penumpang (Unit/Hari)	Jumlah (1 Tahun)
2022	2	40	14.000
2023	3	50	17.000
2024	3	55	19.250

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

c) Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Uji Berkala

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelen, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Adapun jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala di UPTD Perhubungan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Tabel II.174 Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala di UPTD Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Uji Berkala
2020	NA
2021	NA
2022	1702
2023	1761
2024	1433

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kuantan Singingi mencatat lonjakan signifikan dalam total kendaraan yang diuji di stasiun uji. Kenaikan ini mencerminkan dua fenomena sekaligus: semakin besarnya kepatuhan warga terhadap kewajiban uji laik jalan kemungkinan besar karena pengawasan yang lebih ketat serta pertumbuhan registrasi kendaraan baru dan peralihan kepemilikan yang menuntut proses uji “pertama kali” dan mutasi.

Meski demikian, frekuensi layanan uji berkala justru mengalami penurunan. Stasiun uji semakin banyak menangani kendaraan mutasi dan uji pertama, sehingga jadwal untuk kendaraan lama sedikit tersendat. Agar akses uji berkala tetap terjaga, penambahan shift operasional dan pembagian antrean berdasarkan jenis uji akan sangat membantu mempertahankan kelancaran layanan.

Dari sisi mutu, hampir semua kendaraan yang memasuki stasiun uji berhasil lolos standar laik jalan, dan hanya sedikit yang harus kembali untuk perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa bengkel-bengkel mitra dan mekanik independen semakin memahami dan menerapkan persyaratan emisi serta keselamatan secara konsisten, sehingga kualitas armada di jalan terus membaik.

Dalam hal jenis armada, kendaraan angkut barang dan bus mendominasi alur pengujian, menggambarkan betapa besarnya peran sektor logistik dan transportasi penumpang di daerah ini. Dengan kondisi tersebut, perawatan dan peningkatan infrastruktur jalan di koridor rute berat serta jalur trayek bus harus menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang maupun penumpang.

d) Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten

Jumlah pemasangan perlengkapan jalan di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat jauh dari kebutuhan yang seharusnya. Data menunjukkan, realisasi pemasangan seperti rambu-

rambu, zona selamat sekolah, marka jalan, hingga tahun 2024 sangat minim jika dibandingkan dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Fakta ini mengindikasikan bahwa keselamatan pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, masih belum menjadi perhatian utama. Akibatnya, potensi risiko kecelakaan dan ketidakteraturan lalu lintas tetap tinggi, khususnya pada titik-titik rawan seperti area sekolah atau jalur padat kendaraan.

Tabel II.175 Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten Pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Perlengkapan Jalan Kabupaten	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu - rambu	-	-	54	170	170
2	Zona Selamat Sekolah	-	-	-	-	-
3	RPPJ	-	-	-	-	-
4	Marka Jalan	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	54	170	170

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Target kebutuhan perlengkapan jalan setiap tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetap berada di angka lebih dari 8.500 unit, sedangkan persentase realisasi pemasangan perlengkapan jalan baru menyentuh angka di bawah 2 persen pada tahun 2023 dan 2024. Kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi ini menuntut adanya kebijakan yang lebih progresif dan sinergi lintas sektor dalam penganggaran serta eksekusi program infrastruktur jalan. Tanpa akselerasi dalam pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan, upaya menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi lokal akan berjalan lambat dan tidak efektif.

Tabel II.176 Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten Pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Perlengkapan Jalan Kabupaten	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rambu - rambu	352	352	352	370	370
2	Zona Selamat Sekolah	200	200	200	200	200
3	RPPJ	100	100	100	100	100
4	Marka Jalan	8000	8000	8000	8000	8000
5	Guadrill	3	3	3	3	3
Jumlah		8656	8655	8655	8673	8673

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Kuantan Singingi cenderung mengalami penurunan setiap tahun, walaupun total panjang jalan relatif tidak berubah. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan panjang jalan, sehingga tingkat kepadatan kendaraan di ruas jalan terus meningkat. Kondisi ini tidak hanya memperbesar risiko kemacetan, tetapi juga memperbesar potensi kerusakan jalan akibat beban kendaraan yang semakin berat, terutama di jalur utama.

Tabel II.177 Persentase ketersediaan Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan	8.655	8.655	8.655	8.573	8.573
2	Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan	-	-	54	170	170
Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan (%)		-	-	0,62	1,98	1,98

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Penurunan rasio ini menjadi indikator penting yang menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya memprioritaskan pembangunan jalan baru, tetapi juga memastikan kelayakan dan kapasitas jalan yang ada dapat menampung laju pertumbuhan kendaraan. Tanpa adanya penyesuaian dan peningkatan kualitas serta kuantitas infrastruktur jalan, efisiensi transportasi dan keselamatan pengguna jalan akan tetap menjadi masalah jangka panjang di wilayah ini. Optimalisasi pembangunan fasilitas kelengkapan jalan harus diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas dan perencanaan transportasi berbasis data untuk mendukung mobilitas yang berkelanjutan

Tabel II.178 Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.989,85	1.588,906
2.	Jumlah Kendaraan	6.944	7.167	7.721	7.951	7.999
3.	Rasio	0,287	0,278	0,258	0,25	0,199

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

e) Jumlah Pelanggaran Terhadap *Over Dimension Over Loading* (ODOL)

Tingginya angka pelanggaran terkait *Over Dimension Over Loading* (ODOL) pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi muatan kendaraan masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah pelanggaran terbesar terjadi pada Pasal 288 Ayat (3) dan Pasal 307, yang umumnya berkaitan dengan kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan. Hal ini tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kecenderungan ini memperlihatkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten untuk menekan praktik ODOL, terutama pada jalur-jalur distribusi utama yang sering dilalui kendaraan berat.

Tabel II.179 Jumlah Pelanggaran Terhadap *Over Dimension Over Loading* Tahun 2024

No	Pasal yang dilanggar	Jumlah Pelanggaran (Orang)
1	Pasal 288 Ayat (3)	55
2	Pasal 307	25
3	Pasal 286	8
4	Pasal 288 Ayat (3) dan Pasal 307	4
Total		92

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Sementara itu, pelanggaran lalu lintas didominasi oleh kendaraan angkutan barang, khususnya dump truck dan truk. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor transportasi barang menjadi penyumbang utama pelanggaran lalu lintas di wilayah ini, baik dari aspek kelayakan kendaraan maupun kepatuhan pengemudi terhadap aturan berlalu lintas. Jika

dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan transportasi, kerusakan infrastruktur yang lebih cepat, dan meningkatnya biaya perawatan jalan. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus diarahkan pada penegakan hukum, peningkatan kapasitas edukasi bagi pengemudi, dan penyediaan fasilitas timbang kendaraan yang memadai, sehingga mobilitas logistik tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan publik.

Tabel II.180 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Pelanggaran (Orang)
1	Dump Truck	47
2	Truck	49
3	Pick Up	4
4	Truck Tangki Tronton	16
5	Truck Khusus	1
6	Truck mixer	2
7	Truk box	2
8	Bus	2
Total		123

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

f) Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat menunjukkan seberapa angkutan yang mampu melayani penumpang angkutan umum di Kabupaten Kuantan Singingi, berikut tabel persentase layanan angkutan darat tahun 2020–2024.

Tabel II.181 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang	41.100	37.100	38.000	38.940	38.950
2.	Angkutan	18.100	16.290	17.000	19.524	20.040
Persentase		44,03	44,90	44,73	50,13	51,45

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2024 mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah angkutannya. Tahun 2024 jumlah penumpang angkutan umum sebesar 38.950 dengan angkutan 20.040, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 38.940 dan jumlah angkutan sebesar 19.524.

Persentase layanan angkutan darat merupakan perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat. Pada tahun 2020–2024 secara persentase menunjukkan angka yang fluktuatif, namun secara keseluruhan jumlah angkutan dan jumlah penumpang tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, artinya sedikit penambahan masyarakat kita yang menggunakan transportasi massal.

g) Pemasangan Rambu-Rambu

Mengamati pertumbuhan lalu lintas yang semakin pesat diwilayah KabupatenKuantan Singingi, menjadikan jalan kabupaten merupakan sarana transportasi yang penting. Dari pertumbuhan lalu lintas ini, perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang menjadi pendukung lajunya pertumbuhan lalu lintas yang semakin pesat, salah satunya adalah terkait penempatan dan desain rambu lalu lintas. Ketersediaan rambu lalu lintas yang memadai sangat penting untuk keselamatan para pengguna jalan. Beberapa penyebab

yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain adalah kurangnya kepatuhan pengguna jalan para pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas yang ada. Selain itu sering kali pengguna jalan banyak tidak mengetahui adanya rambu lalu lintas tersebut karena penempatan dan desain rambu lalu lintas tidak sesuai dengan standar perhubungan seperti penempatannya jauh dari penglihatan para pengguna jalan serta terhalang oleh pohon dan bangunan. Dari total kebutuhan rambu lalu lintas berdasarkan pemetaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 1.500 unit, sampai dengan Tahun 2023 baru terpasang sebanyak 370 unit atau 24,66% dari kebutuhan rambu.

h) Kecelakaan Lalu Lintas

Dari tabel di bawah terlihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi terbanyak pada tahun 2024, dengan jumlah kecelakaan 83 kali dan total jumlah korban mencapai 159 orang.

Tabel II.182 Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Menurut Bulan di Wilayah Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Bulan	Kecelakaan	Korban		Jumlah Korban
			Meninggal	Luka Berat	
1	Januari	9	3	21	24
2	Februari	5	2	5	7
3	Maret	9	2	16	18
4	April	11	2	18	20
5	Mei	5	3	4	7
6	Juni	6	1	11	12
7	Juli	10	5	11	16
8	Agustus	7	4	21	25
9	September	9	1	11	12
10	Oktober	5	1	7	8
11	November	2	1	2	3
12	Desember	5	2	5	7
Total Jumlah		83	27	132	159

Sumber : BPS Kuantan Singingi, 2025

10. Komunikasi dan Informasi

- Cakupan Layanan Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Berikut Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024.

Tabel II.183 Capaian Indikator layanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,92	2,96	2,96	2,96	3,23

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Penyebaran Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat	n/a	76,22	88,07	96,67	97,83
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	n/a	83,46	83,98
4	Proporsi rumah tangga yang menggunakan akses internet	n/a	n/a	n/a	65,59	68,25
5	Persentase indikator SPBE yang terpenuhi	n/a	82,4	114,89	117,64	95,56
6	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	80	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2025

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah UKM

Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha ekonomi kerakyatan yang bertujuan mensejahterakan Anggotanya,bentuk koperasi dapat dibedakan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi non KUD. Perkembangan koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024 dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 240 yang aktif sebanyak 178 atau 74,16% pada tahun 2024 jumlah koperasi sebanyak 236 dan yang aktif sebanyak 174 atau 73,73%. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

Rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi.

1. Rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi
2. Kurangnya permodalan yang dihadapi pengurus koperasi dan UKM.

Untuk mencapai koperasi yang berkualitas perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan koperasi;
2. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi dan UKM;
3. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
4. Memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi dan UKM sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
5. Mendorong, mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan tentang koperasi dan UKM;
6. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi dan UKM serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.

Tabel II.184 Data Koperasi, UKM, BPR/LKM di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Indikator	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi	208	220	221	236	240
2.	Jumlah Koperasi Aktif	157	167	168	174	178
3.	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	75%	75,90%	76,01%	73,73%	74,16%
4.	Jumlah Seluruh UKM	21.754	39.725	39.725	39.725	39.725

No	Indikator	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
6.	Jumlah UKM non BPR/LKM/KSP/USP	21.754	39.725	39.725	39.725	39.725

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tabel di atas, terhadap jumlah koperasi aktif capaian tahun 2021 pada angka 75,90% serta tahun 2022 sebesar 76,1%, tahun 2023 sebesar 73,73%, serta tahun 2024 sebesar 74,16%. Persentase koperasi aktif ini semakin membaik dari tahun ke tahun walaupun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 73,73%. Hal ini memberi implikasi bahwa ekonomi kerakyatan di setiap kecamatan dapat digerakkan melalui koperasi tentunya koperasi yang aktif.

Jumlah UKM non BPR/LKM/KSP/USP pada tahun 2021 ke tahun 2022 tidak berubah yaitu sebesar 39.725 begitu juga dengan tahun 2023, masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri mendorong pelaku UKM, sehingga jumlah UKM kita dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

12. Penanaman Modal

a) Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

Di era otonomi daerah ini tanggung jawab daerah untuk mengelola pembangunan semakin besar. Pemerintah harus mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara mandiri. Diantara hal yang sangat penting untuk dilaksanakan adalah mendorong berkembangnya kegiatan investasi didaerah secara kondusif. Kegiatan investasi dibutuhkan dalam rangka menumbuhkan ekonomi sekaligus mengembangkan segenap potensi yang ada. Pola pelaksanaan dan arah investasi yang tepat pada akhirnya akan menentukan kinerja pembangunan sesuai dengan hasil dan harapan yang dicita - citakan. Idealnya kegiatan penanaman modal diarahkan untuk mendorong mekanisme ekonomi kerakyatan yang memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Di Kabupaten Kuantan Singingi jumlah investor PMDN dan PMA yang menanamkan modal mengalami peningkatan hingga 2021. Yang mana Pada tahun 2019 berjumlah 28 investor, mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 28 investor, dan tahun 2020 sebanyak 30 investor serta tahun 2021 menjadi 43 investor, namun pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan jumlah investor Perkembangan Jumlah investor tersebut sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel II.185 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Tahun (1)	Uraian (2)	PMDN (3)	PMA (4)	Total (5=3+4)
2020	Jumlah Investor	22	8	30
2021	Jumlah Investor	32	11	43
2022	Jumlah Investor	27	11	38
2023	Jumlah Investor	27	11	38
2024	Jumlah Investor	37	6	43

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

b) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Walaupun jumlah investor tahun 2022 dan 2023 menurun dari tahun 2021 namun pada tahun 2023 nilai investasi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan nilai realisasi

investasi sebesar Rp.934.777.240.000 dengan jumlah proyek 216 Perkembangan investasi PMDN/PMA sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.186 Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2020	69	Rp. 12.105.751.140.169	69	Rp.227.838.600.000
2021	128	Rp. 12.733.935.880.169	128	Rp.628.184.740.000
2022	92	Rp.13.406.047.220.169	92	Rp.672.111.340.000
2023	216	Rp.14.340.824.460.169	216	Rp.934.777.240.000
2024	402	Rp.18.272.821.621.022	402	Rp.3.931.997.160.853

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

c) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pada tahun 2023, rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi tercatat sebesar 0,44, dengan 106 orang yang ditempatkan dari 241 pencari kerja terdaftar. Kondisi ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, di mana rasio daya serap mencapai 0,88 dengan 157 orang berhasil ditempatkan dari 179 pencari kerja terdaftar. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata dalam penyerapan tenaga kerja di daerah, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel II.187 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Tingkat Pendidikan	Terdaftar	Ditempatkan	Rasio
1	Tidak Tamat SD	4	4	1
2	SD/Sederajat	–	–	–
3	SLTP	4	4	1
4	SMA/MA/SMK	133	128	0,96
5	Diploma (D1)	–	–	–
	Diploma (D2)	–	–	–
	Diploma (D3)	–	–	–
	Diploma (D4)	–	–	–
6	Sarjana (S1)	33	21	0,64
	Sarjana (S2)	–	–	–
7	Profesi	–	–	–
	Jumlah (2024)	179	157	0,88
	Tahun 2023	241	106	0,44
	Tahun 2022	404	68	0,17
	Tahun 2021	653	93	0,143
	tahun 2020	328	23	0,07

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Tabel II.188 Daya Serap Tenaga Kerja pada PMA/PMDN di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.003	4.719	7.297	5.024	5.351
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	30	23	38	229	168

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN meningkat dari 3.003 orang pada tahun 2020 menjadi 7.297 orang pada tahun 2022, menjadi 5.351 orang pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah perusahaan PMA/PMDN yang beroperasi juga mengalami perubahan, yaitu dari 30 perusahaan pada tahun 2020 meningkat menjadi 38 perusahaan pada tahun 2022, melonjak menjadi 229 perusahaan pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 168 perusahaan pada tahun 2024. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan menarik lebih banyak investasi yang investor , sehingga mampu meningkatkan daya serap tenaga kerja secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

d) Indeks Kepuasan Masyarakat

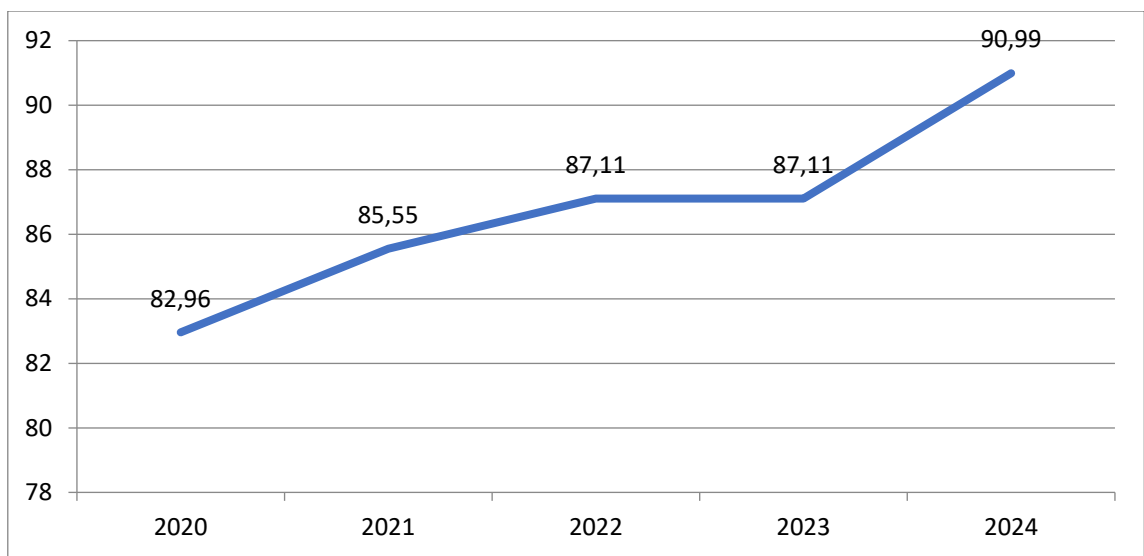
Dalam mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90,99.

Untuk peningkatan sarana dan prasarana DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi terus berbenah untuk melengkapi sarana prasana yang mendukung pelayanan sesuai anggaran yang tersedia. Kompetensi pelaksana (SDM) yang belum memadai perlu ditingkatkan dengan mengikut sertakan pelaksana pelayanan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksana layanan seperti pelatihan-pelatihan, bimtek, dll. Sistem OSS yang masih baru penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS; jaringan sistem OSS; dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana pada tabel berikut :



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.84 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020–2024

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja perizinan, tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Pada tabel di atas bahwa capaian IKM Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024 berada pada tingkat yang memuaskan, pada tahun 2024 berada pada angka 90,99.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Peran pemuda dalam pembangunan sangat dibutuhkan mengingat pemuda sebagai agen perubahan di suatu daerah, sehingga pemberdayaan masyarakat dan desa dapat maksimal jika peran serta secara aktif dalam pembangunan daerah. Peran pemuda dapat dilakukan dengan organisasi kepemudaan yang aktif dari semua sektor pembangunan. Disamping peran serta pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi olahraga daerah juga hal yang penting dicapai setiap tahunnya diberbagai even olahraga. Berikut tabel indikator kepemudaan dan olahraga :

Tabel II.189 Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Indikator Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	36%	64%	47,06%	47,02%	48,05%
2	Cakupan Pembinaan Olahraga (Cabor)	5	27	30	30	36
3	Jumlah Atlet Berprestasi (Orang)	14	16	588	36	107
4	Jumlah Prestasi Olahraga (Cabor)	3	5	18	7	12

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kinerja kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Persentase organisasi pemuda yang aktif relatif stabil dengan capaian 48,05 persen pada tahun 2024. Cakupan pembinaan cabang olahraga juga mengalami peningkatan dari 5 cabor pada tahun 2020 menjadi 36 cabor pada tahun 2024. Pada bidang olahraga, jumlah cabang olahraga dan atlet berprestasi juga masih terbatas dibandingkan dengan potensi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus memperkuat pembinaan kepemudaan serta

meningkatkan pengembangan olahraga untuk mendorong prestasi yang lebih optimal pada berbagai tingkatan.

Tabel II.190 Data Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda	0	0	9	9	9
2	Pemuda yang Berpartisipasi dalam Organisasi Kepemudaan	0	0	6.325	6.356	7.225
3	Wirausaha Muda Pemula	0	0	547	583	617
4	Pemuda Kader	0	0	1.125	1.125	1.274
5	Pemuda Pelopor	0	0	10	4	33
6	Pembinaan Keolahragaan	0	0	0	0	0
-	Jumlah Atlet	0	0	1.057	1.057	1.241
-	Jumlah Organisasi Olahraga	0	0	4	4	4
-	Jumlah Cabang Olahraga	0	0	29	29	36

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

14. Statistik

Statistik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, data dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan, dimana data yang lengkap dan akurat dapat menganalisis permasalahan pembangunan yang dapat dijawab dalam pelaksanaan pembangunan tahun berikutnya, sehingga apa yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah benar-benar mampu menjawab permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Urusan statistik di Kabupaten Kuantan Singingi kewenangannya ada pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, sistem data yang baik adalah tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, dimana sistem ini belum digunakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Kabupaten Kuansing Dalam Angka (KDA) merupakan publikasi Kuantan Singingi Badan Pusat Statitistik bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian setiap tahun. Buku ini berisi kumpulan data dari berbagai Dinas/Instansi di Kabupaten Kuantan Singingi maupun hasil pengumpulan sensus dan survey. Data yang dicakup dalam buku ini meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, masalah sosial, pertanian, industri, perdagangan, penyediaan air minum, keuangan dan pendapatan regional. Saat ini data tersebut tersedia di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang diterbitkan setiap tahunnya.

Data-data capaian indikator makro Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari : pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia dihitung oleh BPS Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan data inflasi daerah tidak dihitung oleh BPS Kabupaten.

Tabel II.191 Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keterisian data sektoral dan spasial per kewenangan urusan pemerintahan	n/a	19	19	70	75
2	Persentase data sektoral yang dimanfaatkan	n/a	117,65	58,82	80	82

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 2025

15. Persandian

Upaya penguatan keamanan informasi di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2022–2024. Peningkatan capaian indikator persentase keamanan informasi daerah menjadi sinyal positif atas adanya kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan data dan mitigasi risiko siber. Peningkatan secara bertahap ini menandakan bahwa tata kelola keamanan informasi mulai menjadi bagian penting dalam operasional pemerintahan, sehingga kerentanan terhadap ancaman digital bisa lebih diminimalkan.

Tabel II.192 Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi 2020–2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keamanan informasi daerah	n/a	n/a	50	55	60
2	Persentase Perangkat Daerah yang sudah menggunakan sistem manajemen keamanan informasi	n/a	n/a	43,18	45,45	56,81

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Perdandian, 2025

Penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada perangkat daerah juga mengalami kemajuan yang sejalan dengan pertumbuhan persentase keamanan informasi. Namun, capaian ini masih menunjukkan adanya gap karena belum seluruh perangkat daerah mengimplementasikan sistem tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk terus memperluas adopsi standar keamanan informasi secara menyeluruh. Dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat regulasi internal, serta memperluas pelatihan keamanan siber, diharapkan semua unit kerja dapat mencapai tingkat perlindungan data yang optimal, sehingga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah tetap terjaga.

16. Kebudayaan

a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kabupaten Kuantan Singingi terkenal dengan tradisi dan budaya Pacu Jalur. Kebudayaan ini sudah sangat lama dan berkembang ditengah-tengah masyarakat terutama pada masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai Kuantan. Pacu Jalur bukan lagi berskala lokal, tetapi telah menjadi objek wisata nasional hal ini dapat dilihta dari masuknya even festival Pacu jalur ke dalam agenda tahunan priwisata nasional. Namun demikian masih banyak kegiatan budaya di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum terpublikasikan secara luas, padahal kegiatan budaya tersebut apabila terkelola dengan baik akan sangat berpotensi sebagai kebudayaan daerah yang bisa menambah potensi pendapatan asli daerah, adapun kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.193 Festival yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Nama Festival	Peserta	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Festival Pacu Jalur	Umum	-	-	5	11	12
2	Festival Perahu Baganduang	Umum	-	-	1	1	1
3	Festival Pacu Jalur Mini	Umum	-	-	-	3	5
4	Festival Bujang Dara	Umum	-	-	-	1	1
5	Festival Tari Daerah	Umum	-	-	-	-	1
6	Festival Kesenian Daerah	Umum	-	-	1	2	5
7	Festival Lagu Daerah	Umum	-	-	-	-	1
8	Festival Lagu Melayu	Umum	-	-	-	-	1
9	Festival Lagu Dangdut	Umum	-	-	-	-	-
10	Festival Pawai Budaya	Umum	-	-	-	-	5
11	Festival Batu Akik	Umum	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tabel di atas tampak bahwa terdapat festival budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024, festival pacu jalur merupakan festival budaya unggulan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Festival budaya ini jika dikelola dan dikemas dengan baik akan mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Kuantan Singingi yang secara keseluruhan akan memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha dan secara umum terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

b) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Selain festival budaya, di Kabupaten Kuantan Singingi banyak terdapat cagar budaya yang tersebar di beberapa Kecamatan. Keberadaan cagar budaya merupakan salah satu aset dan potensi yang mampu dikelola untuk menunjang pengembangan kepariwisataan. Daftar cagar budaya di Kab. Kuantan Singingi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel II.194 Daftar Nama-Nama Benda/Situs Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

No	Kecamatan	Tempat-Tempat Bersejarah
1	Kuantan Mudik	a. Bukit Bakar
		b. Pematang Kancah
		c. Kunangan
		d. Padang Candi
		e. Bukik Salasih
		f. Aur Bersurat dan Pincuran
		g. Lopak Gajah Mati
		h. Makam Syeh Hanafi
		i. Kobun Manggis dan Tugu Bambu Runcing
		j. Tugu Proklamasi
2	Hulu Kuantan	a. Koto Tuo Sungai Pinang
		b. Makam Ninik Dara Putih
		c. Koto Sampurago
		d. Monumen Pemerintah Darurat 1949
		e. Makam Ma’rifat Mardjani
3	Gunung Toar	Dapur Umum
4	Pucuk Rantau	Tapak Nabi Daud
5	Singingi	a. Makam Syekh Ahmad Bunda
		b. Makam Raja Pagaruyung VIII

No	Kecamatan	Tempat-Tempat Bersejarah
		c. Makam Tuan Gadih Nan Alui Reno Sari Bunda
		d. Makam Tuan Pakih Tobing
		e. Makam Datuk Jalo Sutan I dan Makam Mad Ali
		f. Makam Datuk Sinaro Nan Putieh I
		g. Batu Vila T.821 Belanda
		h. Tugu Proklamasi
		i. Makam Datuk Sampono Rajo di Poco
		j. Makam Tuan Indomo Basa Ampek Balai
		k. Makam Ninik Putih Darah Telunjuk
		l. Makam Ar-rahman
		m. Cagar Alam Hutan Lindung Bukit Sangkar Puyuah
		n. Makam Muhammad Syarif
		o. Jalan Kereta Api
		p. Situs Kerajaan Dang Tuanku
6	Singingi Hilir	a. Situs Kerajaan Imbang Jayo
		b. Makam Keramat Datuk Batuah
7	Kuantan Tengah	a. Makam Syekh Ahmad Bunda
		b. Makam Raja Pagaruyung VIII
		c. Makam Tuan Gadih Nan Alui Reno Sari Bunda
		d. Makam Tuan Pakih Tobing
		e. Makam Datuk Jalo Sutan I dan Makam Mad Ali
		f. Makam Datuk Sinaro Nan Putieh I
		g. Batu Vila T.821 Belanda
		h. Tugu Proklamasi
		i. Makam Datuk Sampono Rajo di Poco
		j. Makam Tuan Indomo Basa Ampek Balai
		k. Makam Ninik Putih Darah Telunjuk
		l. Makam Ar-rahman
8	Sentajo Raya	a. Makam Keramat Tongku Karak
		b. Masjid Usang Koto Sentajo
		c. Makam Datuak Simambang
		d. Makam Keramat Datuk Loban
		e. Kompleks Rumah Godang
		f. Makam Keramat Tongku Kuniang
		g. Makam Keramat Jubah Merah
		h. Titian Motor dan Motor Peninggalan Belanda
		i. Hutan Lindung Sentajo
		j. Rumah Penghulu Malin Hikam
		k. Rumah Tua Pendekar Bungsu Uyt
		l. Balai Bunga Setangkai
9	Benai	a. Danau Seroja
		b. Rawang Udang
		c. Tugu Gadjah Putih
		d. Makam Abdullah Syarib
		e. Makam Guru Silat Nan Garang
		f. Makam Keramat Mejan Limo
		g. Rumah Godang Persukuan Kenegerian Benai
		h. Balai Adat Kengerian Benai
10	Kuantan Hilir	Masjid Jami' Desa Koto Tuo Baserah
11	Pangean	a. Makam Jahar Taher

No	Kecamatan	Tempat-Tempat Bersejarah
		b. Bukit Sangkar Puyuh
		c. Kuburan Hantu Pak Buru
		d. Mesjid Jami' Koto Pangean
		e. Makam Datuk Baromban Bosi
		f. Kompleks Makam Bagindo Rajo
		g. Makam Guru Silat Datuak Untuik
		h. Kompleks Makam
		i. Kompleks Makam Pendekar Malin
		j. Kompleks Makam Pendekar Rantau
		k. Mesjid Tua
12	Logas Tanah Darat	
13	Kuantan Hilir Seberang	a. Istana Koto Rajo
		b. Rumah Moh Nur Ra'uf
		c. Makam Raja
14	Cerenti	a. Bukit Candi
		b. Makam Keturunan Raja-raja
		c. Istana Raja
		d. Pincuran Tujuh
		e. Batu Penobatan Raja
		f. Bukit Sangkar Puyuh
		g. Makam Pahlawan Khatib Sutan
		h. Rumah Harun Gemuk
		i. Rumah H. Abd. Ra'uf
15	Inuman	a. Makam Imam Saleh
		b. Pulau Sangkiang
		c. Monumen Tank Baja

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2025

Untuk pemeliharaan dan perawatan situs cagar budaya tersebut bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat yang Wilayah kerjanya untuk 3 (tiga) provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) di Kabupaten Kuantan Singingi belum terbentuk karena jumlah sumber daya manusianya yang terbatas.

17. Perpustakaan

a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun

Jumlah kunjungan perpustakaan menunjukkan seberapa banyak kunjungan masyarakat pada pustaka daerah dalam kurun waktu tertentu sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II.195 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pengunjung	
		Onsite	Online
1	Januari	210	2
2	Februari	228	7
3	Maret	62	0
4	April	75	0
5	Mei	233	1

No	Bulan	Jumlah Pengunjung	
		Onsite	Online
6	Juni	248	2
7	Juli	134	1
8	Agustus	87	2
9	September	66	5
10	Oktober	307	3
11	November	165	2
12	Desember	238	0
Jumlah		2.053	25

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Perpustakaan daerah dalam tabel di atas menunjukkan jumlah kunjungan perpustakaan daerah dalam satu tahun 2024 untuk setiap bulannya. Jumlah kunjungan onsite tertinggi pada bulan Oktober sebanyak 307 Orang, sedangkan jumlah kunjungan online tertinggi pada bulan Februari, sedangkan secara keseluruhan jumlah kunjungan tahun 2024 sebanyak 2.053 pengunjung onsite dan 25 pengunjung online. Kedepan agar menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai pengembangan budaya literasi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio pengunjung perpustakaan menggambarkan jumlah kunjungan ke perpustakaan selama satu tahun per jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani, rasio tersebut pada tahun 2024 dalam tabel berikut :

Tabel II.196 Rasio Pengunjung Perpustakaan per satuan penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Kunjungan ke Perpustakaan	1.880
2	Populasi yang harus dilayani	350.975
3	Rasio	0,005

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Rasio pengunjung perpustakaan per satuan penduduk menggambarkan jumlah kunjungan perpustakaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibandingkan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani selama satu tahun. Pada tahun 2024 rasionya sebesar 0,005 dengan jumlah kunjungan sebesar 1.880 dan populasi yang harus dilayani sebanyak 350.975 orang. Namun kedepannya rasio ini dapat bertambah jika terdapat gedung, sarana dan pra sarana perpustakaan yang representatif, sehingga pengunjung merasa nyaman.

c) Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi buku berupa jumlah judul buku dan koleksi buku perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel II.197 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Koleksi Judul Buku	8.745
2	Koleksi Buku	29.050

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Jumlah judul buku/kelas yang tersedia pada perpustakaan daerah 8.745 judul/kelas buku, dengan jumlah koleksi buku sebanyak 29.050 untuk kategori perpustakaan daerah lingkup Kabupaten jumlah koleksi dan koleksi buku masih relatif sedikit dan perlu penambahan.

Nilai tingkat gemar membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat, serta data pustaka terpilah berdasarkan jenis (pustaka tingkat kabupaten).

Tabel II.198 Nilai tingkat gemar membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat, serta data pustaka terpilah berdasarkan jenis (pustaka tingkat kabupaten) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat gemar membaca	n/a	n/a	52,83	41,76	77,83
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	n/a	n/a	75,23	64,78	71,14
3	Data pustaka terpilah berdasarkan jenis (pustaka tingkat kabupaten)	333	343	353	372	386

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Nilai tingkat gemar membaca dan Indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2020–2021 tidak dilakukan penghitungan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2022 nilai tingkat gemar membaca sebesar 52,83 dan Indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 75,23, pada tahun 2024 nilai tingkat gemar membaca sebesar 77,83 dan indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 71,14.

Sedangkan untuk Data pustaka terpilah berdasarkan jenis (pustaka tingkat kabupaten) mengalami peningkatan dari tahun 2019-2024 dari 320 pada tahun 2019 menjadi 386 pada tahun 2024. Untuk nilai hasil pengawasan kearsipan pada Kementerian, Lembaga tingkat pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 421 Tahun 2022 Serta Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 465 Tahun 2022 ditetapkan Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori “D” (Sangat Kurang)

18. Kearsipan

a) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pada dasarnya seluruh Perangkat Daerah telah mengelola arsip sebesar 100% atau sebanyak 41 Perangkat Daerah, namun belum sesuai dengan standar kearsipan yang baku karena Dinas Perpustakaan dan Arsip sedang mempersiapkan produk Hukum kearsipan.

b) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam upaya peningkatan sumber daya aparatur dalam mengelola arsip dibutuhkan sosialisasi atau Bimbingan Teknis kearsipan, pada tahun 2022 sudah dilakukan atau Bimbingan Teknis kearsipan ini. Dalam Rencana Kerja tahun 2024 agar setiap Perangkat Daerah mengusulkan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kearsipan dalam upaya pengelolaan arsip secara baku dan sama untuk setiap Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

c) Jumlah Arsip dan Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip

Tabel II.199 Jumlah Arsip dan Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah arsip	274	276	268	343	369	1.530
2	Jumlah pengguna pelayanan arsip	0	0	0	5	5	10

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Total arsip di Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2020–2024 sebanyak 1.530, meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2022. Arsip sebagai informasi dan peristiwa yang terekam mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi yang objektif menyangkut berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Arsip dengan segala bentuk medianya merupakan memori kolektif yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, mempertegas identitas dan jatidiri bangsa Indonesia. Melalui arsip, dapat dipelajari sejarah mengenai kegagalan yang pernah dialami dan prestasi yang pernah diraih bangsa, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memajukan bangsa ke depan.

II.4.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pariwisata

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah yang sebagian berbukit dan merupakan salah satu Kabupaten yang dilalui aliran sungai Kuantan yang berhulu sebagian di sumatera Barat dan bermuara di Kabupaten Indragiri Hulu, karena memiliki kondisi alam yang sebagian dataran tinggi dan dialiri sungai maka kabupaten Kuantan Singingi dianugerahi tempat-tempat yang memiliki Panorama Alam yang indah untuk dapat dijadikan sebagai objek wisata Unggulan seperti : Air Terjun Guruh Gemurai, Danau Kebun Nopi, Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koba

Salah satu potensi objek wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Ekowisata Bukit Rimbang Baling yang terdapat di Kecamatan Singingi. Saat ini status Bukit Rimbang Baling adalah Suaka Margasatwa. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan diantaranya adalah wisata arum jeram, plasma nuffah, keanekaragaman hayati, wisata petualang (adventure).

Tabel II.200 Tempat-tempat Wisata di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Alamat	Tempat Wisata	Jenis Daya Tarik
1	Kuantan Mudik	Kel. Lubuk Jambi	Festival Perahu Baganduang	Wisata Budaya
		Desa Cengar	Air Terjun Patisoni	Wisata Alam
		Desa Kasang	Air Terjun Guruh Gemurai	Wisata Alam
		Desa Bukit Pedusunan	Panorama Kebun Nopi	Wisata Alam
		Desa Kasang	Air Terjun Mamughai Air Hitam	Wisata Alam
		Desa Kasang	Air Terjun Jambu Layu/Tepian Batu	Wisata Alam
		Desa Kasang	Air Terjun Sonsang	Wisata Alam
		Desa Pantai/Lb Ramo	Air Terjun Sungai Dangku	Wisata Alam

No	Kecamatan	Alamat	Tempat Wisata	Jenis Daya Tarik
		Desa Sangau	Kendi Naga	Wisata Budaya
		Desa Kasang/Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh	Air Terjun Dewa Satu	Wisata Alam
		Desa Cengar	Air Terjun Batu Gajah	Wisata Alam
		Dusun Batuan, Desa Sangau	Situs Pandang Candi	Wisata Budaya
		Desa Aur Duri	Padang Alai	Wisata Alam
2	Hulu Kuantan	Desa Lubuk Ambacang	Air Terjun 7 Tingkat Batang Koban	Wisata Alam
		Desa Lubuk Ambacang	Air Terjun Batang Ogan	Wisata Alam
		Desa Sungai Pinang	Pemandian Ayie Angek	Wisata Alam
		Desa Lubuk Ambacang	Lembah Dinama	Wisata Alam
		Desa Lubuk Ambacang	Arena Arung Jeram	Wisata Alam
		Desa Sungai Kelelawar	Air Terjun Anak Sungai Kandi	Wisata Alam
		Desa Sungai Kelelawar	Air Terjun Duo Kandi	Wisata Alam
		Desa Sungai Kelelawar	Batu Karst	Wisata Alam
		Desa Lubuk Ambacang	Bukit Tabandang	Wisata Alam
3	Gunung Toar	Desa Teberau Panjang	Pematang Kanca (Agrowisata Durian)	Wisata Alam
		Desa Siberobah	Rumah Adat Karesek	Wisata Budaya
		Desa Koto Gunung	Rumah Adat Koto Gunung	Wisata Budaya
		Desa Toar	Rumah Adat Desa Toar	Wisata Budaya
		Desa Lb Terantang	Rumah Adat Lb Terantang	Wisata Budaya
		Desa Pisang Berebus	Danau Pisang Berebus	Wisata Alam
		Desa Seb. Gunung	Batu Ojuang Seb Gunung	Wisata Alam
		Desa Kampung Baru	Kerajinan Batik Kuansing	Wisata Budaya
		Desa Siberobah	Rumah Adat Siberobah Kerajinan Batik Nagori	Wisata Budaya
4	Pucuk Rantau	Desa Ibul	Sungai Jernih	Wisata Alam
5	Singingi	Kel Muara Lembu	Balimau Kasai	Wisata Budaya
		Desa Pangkalan Indarung	Mamucuak Lubuk Larangan	Wisata Budaya
		Kel Muara Lembu	Makam Syeh Ahmad Bunda	Wisata Budaya
		Kel Muara Lembu	Panorama Bukik Cokiak	Wisata Alam
		Kel Muara Lembu	Air Terjun Hulu Lembu	Wisata Alam
		Kel Muara Lembu	Airca Lembu	Wisata Budaya
		Kel Muara Lembu	Al-qur'an Tulis Tangan	Wisata Budaya

No	Kecamatan	Alamat	Tempat Wisata	Jenis Daya Tarik
		Kel Muara Lembu	Cap/Stempel Perunggu	Wisata Budaya
		Desa Pangkalan Indarung	Air Terjun Sikonda	Wisata Alam
		Desa Pulau Padang	Air Terjun Gemuruh	Wisata Alam
		Kel Muara Lembu	Air Terjun Sungai Jauh	Wisata Alam
		Kel Muara Lembu	Air Terjun Tasam	Wisata Alam
		Kel Muara Lembu	Panorama Sungai Logas	Wisata Alam
		Desa Air Mas	Kerajinan Batik Annisa Gallery	Wisata Budaya
		Desa Sungai Kuning	Kerajinan Bambu	Wisata Budaya
6	Singingi Hilir	Desa Petai	Tempat Pemandian Tabijo Sungai Tapi	Wisata Alam
		Desa Sungai Paku	Air Terjun Pangeon	Wisata Alam
		Desa Beringin Jaya	Pemandian Air Panas	Wisata Alam
		Desa Tanjung Pauh	Pemakaman Suku Domo Datu Nakan	Wisata Budaya
		Desa Petai	Air Terjun Tangko	Wisata Alam
		Desa Petai	Air Terjun Tasam Kiri	Wisata Alam
		Desa Petai	Air Terjun Pendakian Lubis	Wisata Alam
		Desa Petai	Air Terjun Sungai Tangko 3 Tingkat	Wisata Alam
		Desa Petai	Danau Biru	Wisata Alam
		Desa Petai	Lubuk Koalin	Wisata Alam
		Desa Tanjung Pauh	Pemandian Sungai Kubang	Wisata Alam
		Desa Petai	Lubuk Batu Bobok	Wisata Alam
		Desa Petai	Lubuk Larangan	Wisata Alam
7	Kuantan Tengah	Jl Proklamasi, Koto Taluk	Pelangi Water Park	Wisata Buatan
		Kebun Nenas, Jake	Kuansing Farm	Wisata Buatan
		Desa Koto Taluk	Pacu Jalur Tepian Narosa	Wisata Buatan
		Jl. Jend Sudirman, Taluk Kuantan	Rumah Adat Kenegerian Taluk Kuantan	Wisata Budaya
		Desa Pulau Aro	Rumah Adat Kenegerian Taluk Kuantan	Wisata Budaya
		Desa Seb Taluk	Dusun Tuo Seb Taluk	Wisata Budaya
		Desa Koto Kari	Panorama Danau Masjid	Wisata Alam
		Desa Koto Taluk	Panorama Hutan Pulau Bungin	Wisata Alam
		Desa Seb Taluk	Batu Ojuang	Wisata Alam
		Desa Koto Kari	Stadion Sport Centre	Wisata Buatan
		Kel Sungai Jering	Kerajinan Tenun	Wisata Budaya
8	Sentajo Raya	Desa Koto Sentajo	Desa Adat Koto Sentajo	Wisata Budaya
		Desa Muaro Sentajo	Danau Cekdam	Wisata Buatan
		Desa Koto Sentajo	Panorama Hutan Lindung	Wisata Budaya
		Desa Seb Teratak Air Hitam	Embung dan Hutan Adat Kerajinan bambu	Wisata Alam

No	Kecamatan	Alamat	Tempat Wisata	Jenis Daya Tarik
			Kerajinan Bambu	Wisata Budaya
9	Benai	Desa Talontam	Danau Rawang Udang	Wisata Alam
		Desa Tanjung	Danau Seroja	Wisata Alam
		Simandolak		
		Desa Tebing Tinggi	Tugu Gadjah Putih	Wisata Buatan
		Simandolak		
10	Kuantan Hilir	Desa Koto Tuo Baserah	Bantaran Ukir Jepara	Wisata Buatan
		Desa Koto Tuo Baserah	Rumah Adat Koto Tuo Baserah	Wisata Budaya
		Kel Ps Baru Baserah	Pesona Rawang Bonto	Wisata Alam
		Kel Ps Baru Baserah	Kerajinan Batik Baserah	Wisata Budaya
11	Pangean	Desa Pembatang	Balai Silat Pandekar Malin	Wisata Budaya
		Desa Koto Tinggi Pangean	Makam Datuak Baromban Bosi	Wisata Budaya
		Desa Pasar Baru	Danau Pauh Pangean	Wisata Alam
		Desa Pasar Baru	Tugu Elang Pulai	Wisata Budaya
		Desa Koto Tinggi Pangean	Koto Tinggi/Masjid Jami'	Wisata Budaya
		Desa Pasar Baru	Kerajinan Peci Elang Pulai	Wisata Budaya
		Desa Padang Tanggung	Pantai Jai-Jai Raok	Wisata Alam
12	Logas Tanah Darat	Desa Rambahan	Penyulingan Madu Rambahan	Wisata Buatan
		Desa Situgal	Rumah Adat Situgal	Wisata Budaya
13	Kuantan Hilir Seberang	Desa Koto Rajo	Istana Koto Rajo	Wisata Budaya
		Desa Sungai Soriak	Danau Sungai Soriak	Wisata Alam
14	Cerenti	Desa Kompe Barangin	Tank Baja	Wisata Buatan
		Desa Koto Cerenti	Rumah Adat Koto	Wisata Budaya
		Desa Kompe Barangin	Danau Sikuran	Wisata Alam
		Cerenti-Teluk Kuantan	Jejak Agresi Militer II Belanda	Wisata Budaya
		Desa Sikakak	Kerajinan Tenun	Wisata Budaya
15	Inuman	Desa Koto Inuman	Penyulingan Madu Lebah	Wisata Alam
		Desa Koto Inuman	Rumah Adat Koto	Wisata Budaya
		Desa Koto Inuman	Makam Imam Saleh	Wisata Budaya
		Desa Koto Inuman	Danau Panjang	Wisata Alam
		Desa Koto Inuman	Pulau Sengkiang (Balai Tanah Limpato)	Wisata Budaya

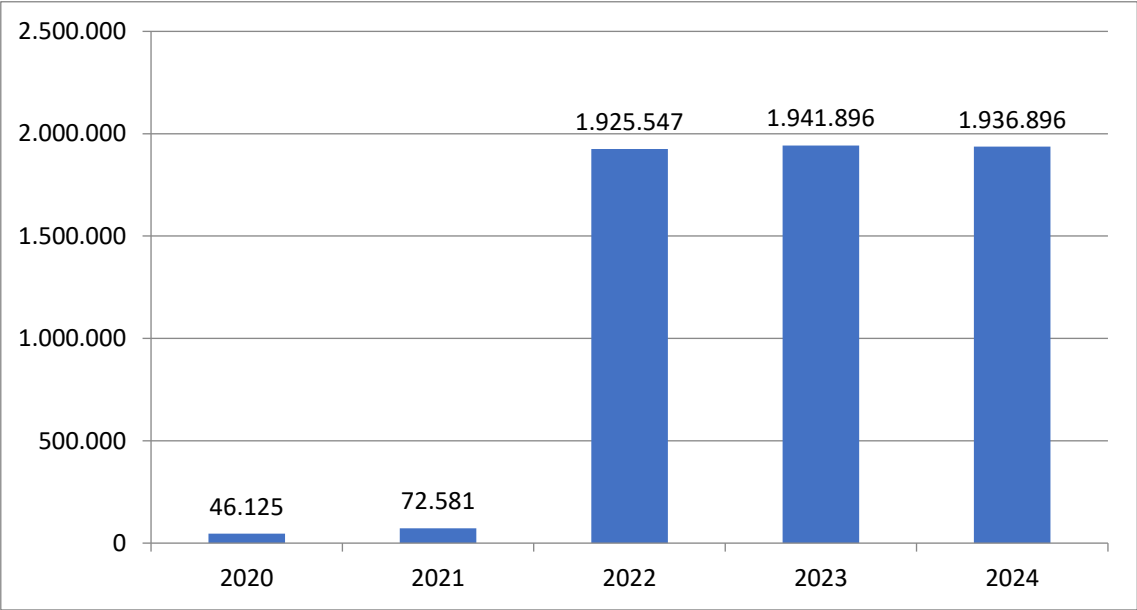
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Dari data tabel di atas, dari 15 kecamatan yang ada di Kuantan Singingi ada sekitar 105 tempat wisata, baik tempat wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan,

dengan cukup banyak varian lokasi dan jenis wisata, Kuantan Singingi memiliki potensi wisata yang cukup baik untuk menarik wisatawan lokal maupun luar.

1. Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisata merupakan indikator kinerja utama pada bidang pariwisata, semakin banyak kunjungan wisata maka akan memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, berikut jumlah kunjungan wisata tahun 2020–2024 di Kabupaten Kuantan Singingi.



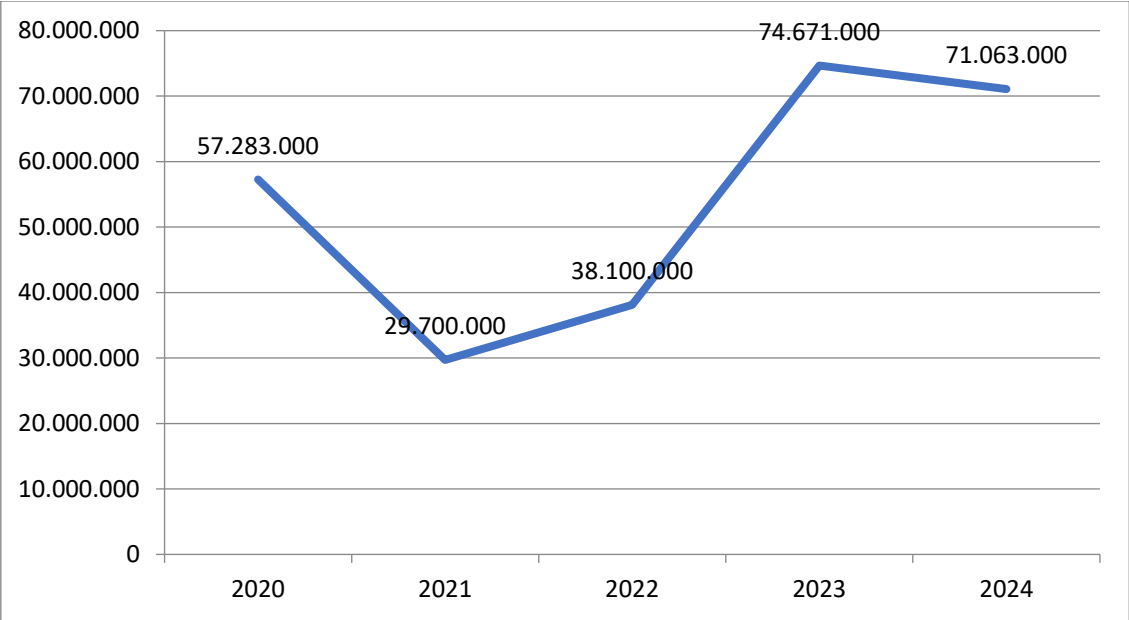
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.85 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata meningkat signifikan ini dikarenakan pada beberapa tahun sebelumnya Festival Pacu Jalur tidak dilaksanakan karena terjadi Pandemi COVID-19, mengingat Pacu Jalur merupakan even budaya yang mampu menyedot jumlah kunjungan wisata yang luar biasa setiap tahunnya.

2. PAD Sektor Pariwisata

PAD sektor pariwisata seharusnya menjadi sektor unggulan Kabupaten Kuantan Singingi, mengingat masih minimnya pendapatan daerah dari sisi PAD. Sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pariwisata diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah, dengan demikian secara umum kapasitas fiskal daerah dapat meningkat. Berikut jumlah PAD sektor pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.86 Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

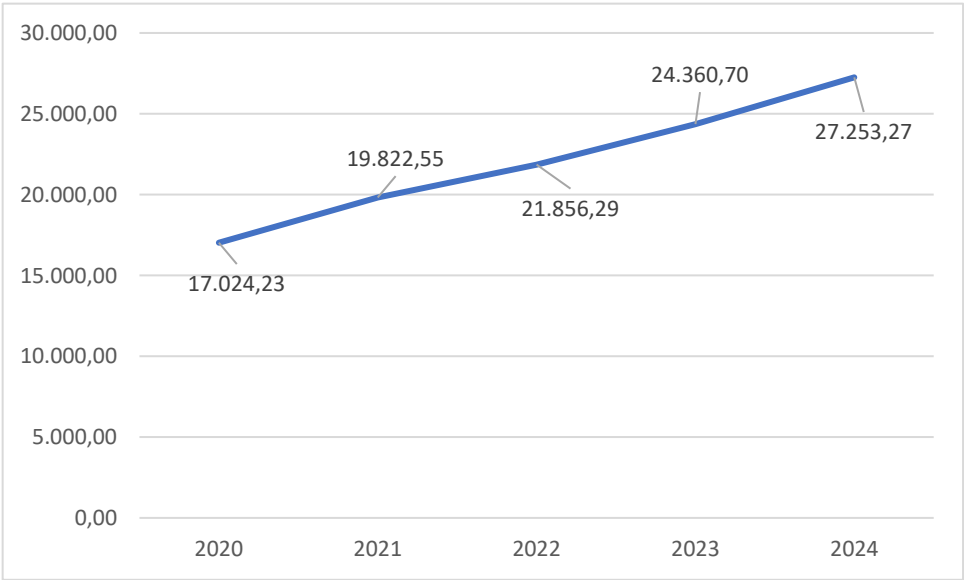
Pada tabel di atas tampak jelas bahwa dari tahun ke tahun kontribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 38.100.000 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian PAD sebesar 29.700.000. Sektor ini masih memiliki potensi lebih dalam menyumbang terhadap PAD. Namun, penurunan terjadi pada tahun 2024 yaitu 71.063.000 dari nilai 74.671.000 tahun 2023.

Jumlah realisasi PAD sektor pariwisata masih tergolong rendah, termasuk juga target PAD masih bisa ditambah sesuai dengan potensi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah tujuan wisata baru. Pendapatan sektor ini agar ditingkatkan pada tahun 2025.

2. Pertanian

a) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024 sebagaimana pada tabel berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025
Grafik II.87 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024 (Miliar Rupiah)

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah, bahkan di tengah dinamika harga komoditas dan tantangan produksi. Pertumbuhan kontribusi ini tidak hanya memperlihatkan ketahanan sektor pertanian, namun juga menunjukkan adanya upaya intensif dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui pengembangan komoditas unggulan dan diversifikasi usaha tani.

Tabel II.201 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok Tani Tanaman Pangan	718	718	743	528	580
2	Kelompok Tani Perkebunan	944	978	981	978	1.004
3	Kelompok Tani Peternakan	354	345	350	348	366
4	Cakupan Pembinaan (%)	70	70	70	75,67	80,22

Sumber : DTPHKP, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025.

Penguatan kelembagaan melalui pembinaan kelompok tani menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga pertumbuhan sektor pertanian di Kuantan Singingi. Cakupan pembinaan yang meningkat secara bertahap mencerminkan adanya perhatian serius pemerintah daerah dalam memperkuat peran petani, memperluas akses informasi, serta memperbaiki praktik budidaya dan manajemen kelompok. Peningkatan cakupan ini berpotensi mendorong produktivitas pertanian di masa depan, karena petani yang lebih terorganisasi dan teredukasi cenderung lebih adaptif terhadap inovasi dan teknologi pertanian modern.

Sementara itu, distribusi lahan baku sawah di tiap kecamatan masih menunjukkan ketimpangan. Kecamatan-kecamatan seperti Pangean, Kuantan Mudik, dan Gunung Toar memiliki luas lahan sawah yang signifikan, sedangkan beberapa kecamatan lain tidak memiliki lahan sawah sama sekali. Kondisi ini menuntut strategi pembangunan pertanian yang lebih inklusif dan berbasis wilayah, sehingga potensi optimalisasi lahan pertanian dapat didorong merata dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh kecamatan. Selain itu, perlunya perlindungan lahan sawah eksisting dan pengendalian alih fungsi lahan menjadi tantangan yang harus terus diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan daerah.

Tabel II.202 Luas Lahan Baku Sawah Berdasarkan Kementerian ATR di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Data Sawah Update 2023
1	Cerenti	459,85
2	Inuman	449,11
3	Kuantan Hilir	213,7
4	Kuantan Hilir Seberang	523,82
5	Pangean	912,07
6	Benai	721,27
7	Sentajo Raya	235,08
8	Kuantan Tengah	616,83
9	Gunung Toar	627,11
10	Singingi	73,45
11	Hulu Kuantan	156,31
12	Kuantan Mudik	673,01

No	Kecamatan	Data Sawah Update 2023
13	Pucuk Rantau	0
14	Logas Tanah Darat	0
15	Singingi Hilir	0
Jumlah		5.661,61

Sumber : DTPHKP Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

b) Kontribusi Sektor Perkebunan

a. Perkebunan

Komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit tetap menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi, tercermin dari luas areal yang sangat signifikan untuk kedua tanaman ini. Fluktuasi pada data luas areal karet dan kelapa sawit dari tahun ke tahun menggambarkan adanya dinamika dalam pengelolaan lahan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga pasar, kebijakan alih fungsi lahan, dan peremajaan tanaman. Meski begitu, secara umum, perluasan lahan perkebunan rakyat khususnya kelapa sawit terus didorong, karena memberikan kontribusi yang besar baik dari sisi produksi maupun jumlah petani yang terlibat. Areal kakao dan komoditas lain cenderung stagnan atau relatif kecil jika dibandingkan dengan karet dan sawit, menandakan masih terbatasnya diversifikasi dalam subsektor perkebunan.

Tabel II.203 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kuantan Singingi (ha), 2021– 2024

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024
Karet	99.965,60	29.617,32	108.864,02	101.376,76
Kelapa	47,17	44,99	489,72	501,64
Kelapa Sawit	117.775,68	221.519,72	244.824,10	252.317,36
Kopi	13	10,07	10,07	10,07
Kakao	308,09	290,87	373,67	286,97
Total	218.109,54	251.482,97	354.561,58	354.492,80

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Dari sisi produksi, komoditas kelapa sawit mendominasi capaian produksi perkebunan rakyat. Walaupun karet menempati urutan kedua dalam kontribusi produksi, nilai ekonominya masih sangat berfluktuasi akibat sensitif terhadap perubahan harga global dan kualitas hasil panen. Fenomena kenaikan produksi sawit dan karet pada tahun 2024 menunjukkan respons positif terhadap perbaikan teknis budidaya dan pendampingan kelompok tani, meski untuk komoditas minor seperti kakao dan kopi belum menunjukkan penguatan yang berarti. Sementara itu, komoditas lain seperti pinang, kelapa, dan kopi tetap berperan sebagai penopang ekonomi di beberapa kantong masyarakat tertentu, namun secara makro belum memberikan dampak signifikan terhadap struktur ekonomi perkebunan daerah.

Tabel II.204 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Kuantan Singingi (ton), 2021–2024

Jenis Tanaman	2021	2022	2023	2024
Karet	77.863,55	18.641,49	53.286,76	71.232,30
Kelapa	2.080,09	877,35	460,48	491,17
Kelapa Sawit	282.327,79	330.399,52	572.570,61	550.411,50
Kopi	4,61	3,37	4,37	3,37
Kakao	41,19	40,96	33,21	29,84
Total	362.317,23	349.962,69	626.355,43	622.168,18

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Tabel II.205 Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2020- 2024

No	Komoditi	Produksi Tanaman (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	80.892,34	77.863,55	18.641,49	53.286,76	71.232,30
2	Kelapa sawit	425.748,18	282.327,79	330.399,52	572.570,61	550.411,50
3	Kakao	29,91	41,19	40,96	33,21	29,84
4	Kelapa Hybrida	25,23	30,95	11,69	2,69	1,719
5	Kelapa Dalam	952,27	949,135	865,66	457,79	489,449
6	Kopi	4,63	4,61	3,37	4,37	3,37

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Jumlah petani karet dan sawit yang sangat besar di Kuantan Singingi menggambarkan keterlibatan masyarakat yang luas dalam subsektor perkebunan. Sebaran petani yang relatif merata di hampir semua kecamatan menegaskan betapa pentingnya keberlanjutan usaha perkebunan sebagai basis penghidupan utama masyarakat pedesaan. Namun, keberlimpahan sumber daya manusia ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan nilai tambah dan produktivitas. Tantangan utama masih terkait pada akses terhadap teknologi modern, efisiensi rantai pasok, dan keberlanjutan harga jual hasil panen di tingkat petani.

Tabel II.206 Banyaknya Petani Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan dan Jenis Komoditas di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Banyaknya Petani (KK)				Jumlah Total
		Karet	Kakao	Kelapa Sawit	Aneka Tanaman	
1	Kuantan Mudik	3.629	60	8.601	60	12.350
2	Hulu Kuantan	4.210	87	4.362	145	8.804
3	Gunung Toar	1.890	69	10.720	69	12.748
4	Pucuk Rantau	2.669	244	800	287	4.000
5	Singingi	2.823	100	8.113	262	11.298
6	Singingi Hilir	1.423	33	6.739	198	8.393
7	Kuantan Tengah	965	244	920	247	2.376
8	Sentajo Raya	1.453	-	1.921	32	3.406
9	Benai	1.186	646	2.471	665	4.968
10	Kuantan Hilir	1.418	91	4.809	259	6.577
11	Pangean	4.918	380	10.282	381	15.961
12	Logas Tanah Darat	1.985	616	1.028	851	4.480
13	Kuantan Hilir Seberang	2.566	132	4.165	603,00	7.466
14	Cerenti	4.353	170	10.140	193	14.856
15	Inuman	1.459	212	20.096	289	22.056
Total		36.947	3.083	95.167	4.541,00	139.738

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Peluang pengembangan industri hilir menjadi sangat strategis, mengingat potensi komoditas perkebunan yang cukup besar untuk diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah. Dukungan infrastruktur transportasi dan konsistensi kebijakan pusat-daerah juga menjadi modal penting untuk menarik investasi di sektor bioindustri dan bioenergi. Dengan

komitmen pemerintah daerah yang tinggi, serta semakin membaiknya sarana pendukung, sektor perkebunan di Kuantan Singingi berpotensi untuk tumbuh lebih inklusif dan menjadi motor utama penggerak perekonomian daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

b). Tanaman Pangan

Perkembangan sektor tanaman pangan di Kabupaten Kuantan Singingi menyoroti besarnya potensi dan tantangan dalam optimalisasi produksi, khususnya pada komoditas palawija seperti jagung, ubi kayu, kacang-kacangan, dan ubi jalar. Data historis lima tahun terakhir menunjukkan pola yang sangat fluktuatif, terutama pada jagung dan ubi kayu sebagai dua komoditas utama palawija daerah. Lonjakan produksi jagung pada tahun 2021 sempat memberikan optimisme, namun tren penurunan yang terjadi hingga tahun 2024 memperlihatkan rentannya sektor ini terhadap dinamika eksternal, khususnya perubahan iklim, serangan hama, serta keterbatasan pola tanam dan luas lahan.

Faktor kunci yang membatasi pertumbuhan produksi palawija adalah masih rendahnya minat petani untuk mengusahakan tanaman selain padi. Palawija umumnya hanya menjadi komoditas sampingan yang diusahakan secara sporadis, sehingga tidak terjadi peningkatan produktivitas dan inovasi secara masif. Selain itu, serangan hama ternak liar seperti babi hutan dan kerusakan akibat iklim yang tidak menentu, menambah ketidakpastian bagi petani. Kondisi ini juga berimplikasi pada belum berkembangnya ekosistem usaha tani palawija, baik dari sisi teknologi, sarana produksi, maupun akses pasar.

Penurunan rata-rata produksi palawija pada 2024 juga menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder pertanian, baik dalam hal perlindungan lahan dari gangguan eksternal maupun penyediaan infrastruktur pertanian. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan telah merencanakan prioritas peningkatan produksi palawija pada tahun 2025. Upaya ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah, serta meningkatkan pendapatan petani secara lebih berkelanjutan. Dukungan intensifikasi, adopsi teknologi tepat guna, serta pemberdayaan kelompok tani menjadi langkah strategis dalam mendorong sektor tanaman pangan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat Kuantan Singingi.

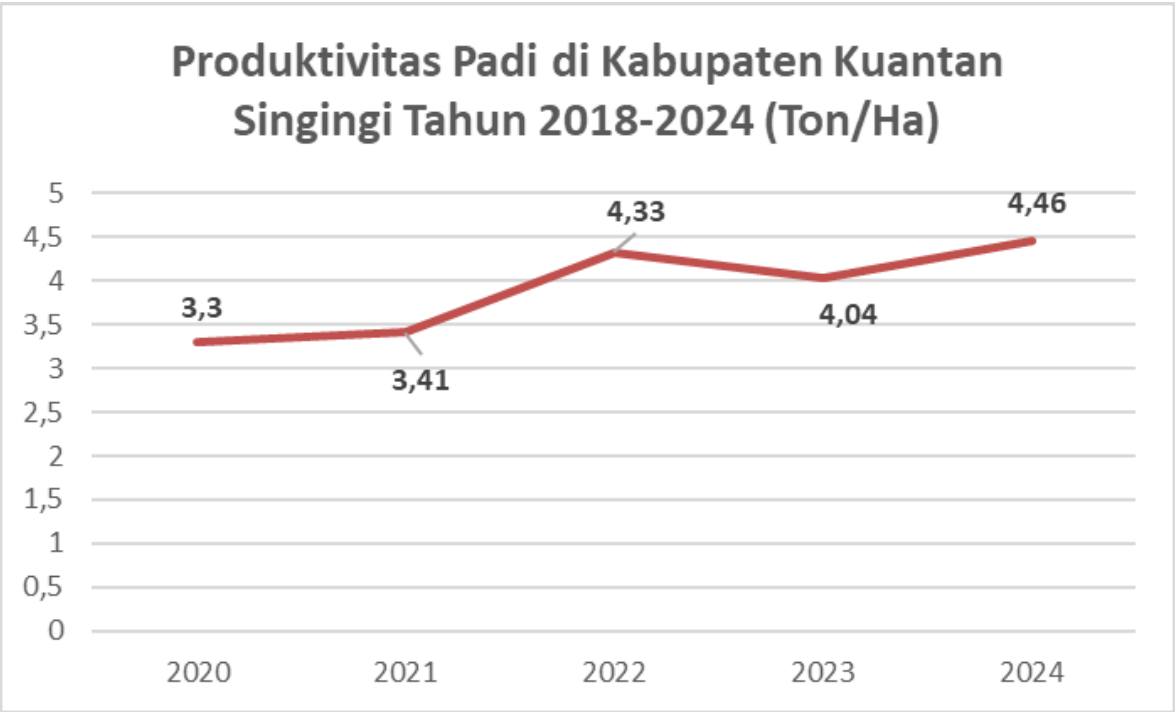
Tabel II.207 Rata-rata jumlah produksi pangan

No	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Jagung	254,2	218	756,46	450,7	395,5	1.374,12	109,4	112,9	391,76	115	125,5	400,74	88	78,7	262,80
2	Ubi Kayu	299,8	223,4	2.256,34	148,2	185,3	1.871,53	105	129,1	1.303,91	133,9	128	1.290,90	120,1	115,10	1.302,01
3	Ubi Jalar	3	3	23,01	1,6	1,2	9,2	0,5	1,9	14,57	5,2	5	38,35	1,8	1,5	11,5
4	Kacang Tanah	32,8	29,5	40,42	59,8	55,7	76,31	50	61,6	84,39	35	6,60	9,04	33,7	32,5	29,45
5	Kedelai	12	14	16,94	106	69	83,49	192	57,2	69,21	5	5	6,05	5	5	6,05
6	Kacang Hijau	5	6	7,62	4,2	4,2	4,79	0,1	1,3	1,48	4	3	3,42	3,6	0,9	0,79

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan ketahanan Pangan Kab. Kuantan Singingi, 2025

c) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Tingkat produktivitas padi sawah di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2020 -2024 memperlihatkan hasil yang fluktuatif. Produktivitas padi paling rendah terjadi pada tahun 2020, sedangkan produktivitas padi tertinggi pada tahun 2024. Produktivitas padi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. hal ini dapat disebabkan oleh ketersediaan sarana produksi, keadaan iklim, serangan hama dan penyakit hingga akses terhadap teknologi pascapanen. Faktor-faktor seperti kondisi lahan, sistem irigasi, pola tanam, dan pendampingan teknis juga sangat mempengaruhi produktivitas di setiap tahunnya.



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.88 Luas Panen Produktivitas dan Produksi Padi Sawah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Produktivitas rata-rata padi sawah yang mencapai 4,46 ton per hektar menunjukkan bahwa sebagian besar petani sudah mampu menerapkan praktik budidaya yang relatif efisien. Hal ini didukung oleh penggunaan benih unggul, pendampingan dari penyuluh, serta akses terhadap sarana produksi yang lebih baik di kecamatan sentra produksi. Namun, tantangan masih dihadapi dalam bentuk gangguan hama, fluktuasi iklim, dan keterbatasan infrastruktur pertanian yang berpengaruh pada stabilitas hasil di beberapa kecamatan. Ke depan, untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan kesejahteraan petani, diperlukan penguatan kelembagaan petani, pengembangan infrastruktur irigasi, serta adopsi teknologi pertanian yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian, produktivitas padi sawah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan pemerataan hasil produksi antar wilayah dapat tercapai.

d) Kontribusi Sektor Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan dan jenis ternak. Itik Manila dan domba merupakan dua jenis ternak yang tercatat dengan jumlah berbeda di berbagai kecamatan. Misalnya, Singingi Hilir mencatat jumlah itik Manila tertinggi, sementara populasi domba lebih tersebar secara merata meskipun dengan jumlah relatif kecil. Fluktuasi populasi ternak di beberapa kecamatan bisa mengindikasikan perubahan pola pemeliharaan, pengaruh cuaca, dan potensi pasar lokal. Penurunan jumlah ternak pada beberapa wilayah juga mengisyaratkan perlunya intervensi teknis maupun manajerial untuk memastikan keberlanjutan usaha peternakan di daerah tersebut.

Tabel II.208 Populasi Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jenis Ternak																										
		Sapi			Kerbau			Kambing			Ayam Buras			Ayam Ras Petelur			Ayam Ras Pedaging			Itik			Kelinci			Puyuh		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Kuantan Mudik	1.450	1.519	1.366	841	984	950	669	813	813	-	-		1.515	1.180		207.000	335.000	345.000	-	-		-	-		-	-	
2	Hulu Kuantan	1.553	1.548	1.542	654	662	660	1.207	1.306	1.316	4.800	4.800	4.800	491	900	1.200	-	-		157	112	96	9	9	9	-	-	
3	Gunung Toar	1.266	1.237	1.237	620	555	551	453	462	454	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
4	Singingi	2.339	2.563	2.629	240	299	299	560	524	524	7.120	7.230	7.256	-	-		185.000	185.000	100.000	250	1.000	1.000	-	-		-	-	74
5	Singingi Hilir	2.729	2.135	1.897	615	415	244	1.164	1.110	974	12.500	1.500	1.984	-	-		315.000	590.000	160.000	1.800	1.500	1.620	91	70	78	4.000	4.000	1.600
6	Kuantan Tengah	2.869	3.243	2.747	2.433	2.182	2.432	18.119	18.069	14.974	64.508	64.508	63.213	-	-		1.700.000	1.560.000	763.000	-	-	1.500	-	-	20	-	-	
7	Benai	1.116	1.116	1.092	734	739	730	846	846	853	2.950	2.950	3.016	1.000	1.000	1.250	-	-		1.500	1.500	1.500	-	-		-	-	
8	Kuantan Hilir	569	600	595	120	126	125	1.796	2.110	2.427	11.964	11.739	11.525	-	-		10.000	20.000	10.000	1.233	1.078	911	98	98	102	-	-	25
9	Pangean	1.352	1.327	1.221	946	906	950	1.200	1.085	1.046	6.000	6.000	7.000	-	-		550.000	640.000	645.000	550	500	500	-	-		-	-	60
10	Logas Tanah Darat	1.812	1.806	1.876	-	22	24	370	621	360	11.500	1.200	-	700	-	11.450	125.000	559.850	11.750	220	-	220	35	-		450	-	25
11	Cerenti	1.189	912	934	865	784	787	2.701	2.638	2.535	2.512	2.745	3.000	-	-		-	-		150	173	257	-	-		-	-	
12	Inuman	1.009	1.014	1.136	514	505	571	1.022	1.101	908	1.556	1.714	1.714	-	-		-	-		138	109	84	-	-		-	-	27
13	Kuantan Hilir Sebrang	1.836	1.562	1.425	462	393	427	2.517	2.117	2.161	6.131	4.112	2.475	-	-		-	-		2.000	1.600	1.826	-	-		-	-	
14	Sentajo Raya	2.626	3.032	2.848	423	394	436	1.023	1.243	1.226	5.000	20.553	21.141	1.000	1.470	2.500	371.150	454.150	831.000	1.075	414	394	-	23	27	-	-	

15	Pucuk Rantau	1.002	1.066	1.078	19	21	23	447	439	438	1.685	1.190	1.190	-	-		-	-		32	32	32	-	-	2	-	-		
	Jumlah	24.717	24.680	23.623	9.486	8.987	9.209	34.094	34.484	31.009	138.226	130.241	128.314	4.706	4.550	16.400	3.463.150	4.344.000	2.865.750	9.105	8.018	9.940	233	200	238	4.450	4.000	-	2.202

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Variasi populasi ternak ini memberikan gambaran kebutuhan pendampingan dan pengelolaan yang berbeda antar kecamatan. Konsistensi pengembangan populasi ternak harus didukung oleh fasilitas layanan kesehatan hewan, ketersediaan pakan, dan pelatihan peternak agar produktivitas dapat meningkat secara berkelanjutan. Perubahan populasi juga harus dipantau untuk menghindari risiko penurunan produksi daging dan produk ternak lain yang berpengaruh pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di Kuantan Singingi.

Pemotongan ternak tercatat di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan aktivitas pemotongan yang cukup tinggi, terutama pada sapi potong, kambing, dan ayam pedaging. Hal ini mencerminkan permintaan pasar yang cukup stabil dan produksi yang berlangsung secara aktif. Kecamatan seperti Kuantan Tengah dan Singingi mencatat jumlah pemotongan sapi potong dan ayam pedaging yang sangat tinggi, menandakan wilayah tersebut sebagai sentra produksi utama. Distribusi pemotongan yang tidak merata ini mengindikasikan fokus produksi yang terkonsentrasi, yang perlu diimbangi dengan pengembangan di kecamatan lain agar pemerataan ekonomi sektor peternakan dapat tercapai.

Tabel II.209 Tabel Jumlah Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi (Ekor), 2024

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Kuantan Mudik	1.366	950	813	20
2	Hulu Kuantan	1.542	660	1.316	6
3	Gunung Toar	1.237	551	454	
4	Pucuk Rantau	2.629	299	524	0
5	Singingi	1.897	244	974	54
6	Singingi Hilir	2.747	2.432	14.974	
7	Kuantan Tengah	1.092	730	853	
8	Sentajo Raya	595	125	2.427	
9	Benai	1.221	950	1.046	
10	Kuantan Hilir	1.876	24	360	
11	Pangean	934	787	2.535	
12	Logas Tanah Darat	1.136	571	908	
13	Kuantan Hilir Seberang	1.425	427	2.161	
14	Cerenti	2.848	436	1.226	
15	Inuman	1.078	23	438	
Kuantan Singingi		23.623	9.209	31.009	80

Sumber: BPS Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah ternak di Kabupaten Kuantan Singingi memperlihatkan keragaman distribusi antar kecamatan. Secara keseluruhan tercatat 23.623 ekor sapi, 9.209 ekor kerbau, 31.009 ekor kambing, dan 80 ekor domba.

Populasi sapi terbesar terdapat di Kecamatan Sentajo Raya sebanyak 2.848 ekor, diikuti oleh Kuantan Tengah sebanyak 2.747 ekor, serta Singingi sebanyak 2.629 ekor. Sementara itu, populasi sapi terendah berada di Kecamatan Kuantan Hilir dengan jumlah 595 ekor. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan sapi masih terpusat di wilayah tertentu, sedangkan di wilayah lain kontribusinya relatif lebih kecil.

Untuk kerbau, jumlah tertinggi tercatat di Kecamatan Kuantan Tengah dengan 2.432 ekor. Sebaliknya, di Kecamatan Pucuk Rantau dan Logas Tanah Darat populasinya sangat terbatas, masing-masing hanya berjumlah 23 ekor dan 24 ekor. Sebagian besar kecamatan lainnya memiliki populasi pada kisaran ratusan ekor, seperti Cerenti dan Benai masing-masing sebanyak 787 ekor dan 730 ekor dan Pangean serta Kuantan Mudik masing-

masing sebanyak 950 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan kerbau telah berkembang, meskipun intensitasnya belum merata di seluruh kecamatan.

Jenis ternak kambing merupakan komoditas yang paling menonjol dengan jumlah keseluruhan mencapai 31.009 ekor. Kecamatan Kuantan Tengah menjadi sentra utama dengan 14.947 ekor atau hampir setengah dari total populasi kambing. Jumlah yang relatif besar juga terdapat di Kecamatan Cerenti sebanyak 2.535 ekor, Kuantan Hilir sebanyak 2.427 ekor, serta Kuantan Hilir Seberang sebanyak 2.161 ekor. Sementara itu, kecamatan lainnya berada pada kisaran ratusan hingga ribuan ekor. Gambaran ini menegaskan bahwa kambing merupakan salah satu potensi unggulan subsektor peternakan di daerah.

Adapun populasi domba masih relatif terbatas, dengan total 80 ekor di seluruh kabupaten. Jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Singingi Hilir sebanyak 54 ekor, sedangkan di kecamatan lainnya jumlahnya masih sangat sedikit, bahkan sebagian tidak terdapat populasi domba.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa subsektor peternakan di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi yang cukup besar, terutama pada komoditas kambing. Populasi sapi dan kerbau juga berperan penting meskipun penyebarannya masih belum merata, sedangkan domba masih bersifat komplementer. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan peternakan ke depan dapat difokuskan pada penguatan sentra peternakan, peningkatan produktivitas kambing, sapi dan kerbau guna mendukung ketahanan pangan daerah.

Tabel II.210 Pemotongan Ternak Tercatat di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 (Ekor)

No	Kecamatan	Jenis Ternak								
		Sapi potong	Kerbau	Kambing	Ayam buras	Ayam pedaging	Ayam petelur	Itik	Itik Man ila	Puyuh
1	Kuantan Mudik	212	13	22	6.500	342.000	24.695	0		30
2	Hulu Kuantan	25	3	0	0	5.760	2.400	0		
3	Gunung Toar	118	0	0	4.585	14.790	6.221	0		
4	Singingi	833	52	95	7.800	167.250	13.700	720		4.100
5	Singingi Hilir	134	0	72	3.095	114.250	6.300	0		
6	Kuantan Tengah	896	61	272	15.500	415.000	101.500	0		
7	Benai	60	129	7	280	52.700	13.350	0		
8	Kuantan Hilir	189	41	62	2.900	293.000	166.000	556		
9	Pangean	195	63	146	11.656	367.550	76.690	800		
10	Logas Tanah Darat	20	0	16	9.130	78.600	61.250	0		
11	Cerenti	143	12	62	0	0	0	0		
12	Inuman	124	5	20	2.540	52.400	26.100	0		
13	Kuantan Hilir Seberang	100	9	86	591	98.643	93.965	0		
14	Sentajo Raya	286	13	100	825	60.000	4.970	18	60	
15	Pucuk Rantau	0	7	0	4.280	25.550	4.750	0		
Jumlah		3.235	408	960	69.682	2.087.493	601.891	2.094	60	4.130

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Angka pemotongan juga memberikan indikasi terhadap tingkat konsumsi daging dan produk unggas di daerah tersebut, sekaligus mencerminkan kapasitas peternak dalam memenuhi kebutuhan pasar. Perlu perhatian khusus pada pengelolaan rantai pasok dan

kualitas produk agar produksi dapat berkelanjutan dan memenuhi standar kesehatan. Pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan juga harus diperhatikan dalam skala besar, terutama pada sentra pemotongan dengan volume tinggi.

Produksi daging di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 didominasi oleh sapi potong, ayam pedaging, dan kerbau, dengan produksi signifikan di kecamatan-kecamatan seperti Kuantan Tengah dan Singingi. Produksi yang besar ini menunjukkan potensi ekonomi yang kuat di sektor peternakan serta kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Namun, ketimpangan produksi antar kecamatan masih terlihat, dimana beberapa wilayah mencatat produksi sangat rendah atau nihil, mengindikasikan kurangnya perhatian atau keterbatasan sumber daya di daerah tersebut.

Tabel II.211 Produksi Daging disetiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Ternak								
		Sapi potong	Kerbau	Kambing	Ayam buras	Ayam pedaging	Ayam petelur	Itik	Itik Manila	Puyuh
1	Kuantan Mudik	27.053	1.973	275	5.525	410.400	30.375	0	0	3
2	Hulu Kuantan	3.190	455	0	0	6.912	2.952	0	0	0
3	Gunung Toar	2.297	-	0	3.897	17.748	7.652	0	0	0
4	Singingi	106.299	7.892	1.188	6.630	200.700	16.851	648	0	451
5	Singingi Hilir	17.100	-	900	2.631	137.100	7.749	0	0	0
6	Kuantan Tengah	114.339	9.257	3.400	13.175	498.000	124.845	0	0	0
7	Benai	7.657	19.577	88	238	63.240	16.421	0	0	0
8	Kuantan Hilir	24.118	6.222	775	2.465	351.600	204.180	500	0	0
9	Pangean	24.884	9.561	1.825	9.908	441.060	94.329	720	0	0
10	Logas Tanah Darat	2.552	-	200	7.761	94.320	75.338	0	0	0
11	Cerenti	18.248	1.821	775	0	0	0	0	0	0
12	Inuman	15.824	759	250	2.159	62.880	32.103	0	0	0
13	Kuantan Hilir Sebrang	12.761	1.366	1.075	502	118.372	115.577	0	0	0
14	Sentajo Raya	36.496	1.973	1.250	701	72.000	6.113	16	54	0
15	Pucuk Rantau	-	1.062	0	3.638	30.660	5.843	0	0	0
Jumlah		412.818	61.918	12.000	59.230	2.504.992	740.326	1.885	54	454

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Ketimpangan ini menuntut adanya strategi pembangunan yang lebih merata, misalnya dengan program pendampingan peternak di daerah yang masih rendah produksinya. Peningkatan produksi di wilayah sentra harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk dan manajemen usaha agar daya saing dan nilai tambah hasil ternak dapat meningkat. Selain itu, diversifikasi produk ternak juga perlu didorong untuk menyesuaikan permintaan pasar dan meningkatkan pendapatan peternak secara menyeluruh.

Produksi telur dari berbagai jenis unggas di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tren penurunan pada beberapa tahun terakhir. Ayam buras, ayam ras petelur, dan itik menjadi kontributor utama produksi telur, namun jumlah produksinya cenderung menurun pada periode tersebut. Penurunan ini dapat menjadi sinyal adanya tantangan seperti masalah kesehatan unggas, perubahan pola pemeliharaan, atau keterbatasan input produksi seperti pakan dan manajemen kandang.

Tabel II.212 Total Produksi Daging di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

Tahun	Sapi Potong	Jenis Ternak									Total Produksi (Kg)
		Kerbau	Kambing	Domba	Ayam buras	Ayam pedaging	Ayam petelur	Itik	Itik Manila	Puyuh	
2020	314.716	35.512,00	18.388,00	-	26.784,00	2.862.236,00	831.669,00	994	-	-	4.090.299
2021	328.085	33.842	8.500	-	27.298	4.060.380	1.124.883	914	-	-	5.583.902
2022	367.006	59793	10713	104	40846	6920490	1898784	1336	1125	300	9.300.497
2023	355.011	56151	9538	0	28.563	2.371.271	382.609	1674	135	300	3.205.252
2024	412.818	61.918	12.000	0	59.230	2.504.992	740.326	1.885	54	454	3.793.677

Sumber : BPS Kuantan Singingi, 2025

Penurunan produksi telur perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi ketersediaan protein hewani di masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong program pembinaan dan pendampingan teknis bagi peternak unggas agar dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, inovasi dalam teknologi pemeliharaan dan peningkatan kualitas bibit juga sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keberlanjutan produksi telur sebagai sumber pangan lokal.

Tabel II.213 Produksi Telur di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Tahun	Jenis Unggas			Total Produksi Telur (Kg)
	Ayam Buras	Ayam Ras Petelur	Itik	
2020	301.088	27.554	66.403	395.045
2021	278.770	73.107	65.469	417.346
2022	180.040	68.974	67.508	316.522
2023	169.639	66.687	59.448	295.774
2024	167.129	240.367	73.699	481.195

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Populasi dan pemotongan ternak di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 menunjukkan aktivitas yang signifikan di beberapa jenis ternak utama seperti sapi potong, kambing, ayam buras, dan ayam ras pedaging. Pemotongan yang tercatat memberikan gambaran kegiatan usaha peternakan yang aktif dan permintaan pasar yang cukup besar. Meski demikian, masih terdapat disparitas populasi ternak di beberapa jenis tertentu seperti domba dan itik Manila yang jumlahnya relatif kecil, yang dapat menjadi peluang pengembangan lebih lanjut.

Tabel II.214 Populasi dan Pemotongan Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Pemotongan (ekor)		
			Tercatat	Tidak Tercatat	Total
		2024	2024	2024	2024
1.	Sapi potong	23.623	3.235	0	3.235
2.	Kerbau	9.209	408	0	408
3.	Kambing	31.009	960	0	960
4.	Domba	80	0	0	0
5.	Babi	0	0	0	0
6.	Kuda	0	0	0	0
7.	Ayam Buras	128.314	69.682	0	69.682

8.	Ayam Ras Petelur	16.400	601.891	0	601.891
9.	Ayam Ras Pedaging	2.865.750	2.087.493	0	2.087.493
10.	Itik	9.940	2.094	0	2.094
11.	Kelinci	238	0	0	0
12.	Puyuh	0	4.130	0	4.130
13.	Merpati	1.709	0	0	0
14.	Itik Manila	5.907	60	0	60

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Data ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya peternakan secara terintegrasi, mulai dari pemeliharaan, pemotongan, hingga pemasaran produk. Pengawasan kesehatan ternak dan sertifikasi pemotongan juga harus diperkuat untuk menjaga kualitas produk dan keamanan pangan. Pendampingan bagi peternak dalam mengelola usaha secara efisien akan membantu menjaga keseimbangan populasi dan produksi agar sektor peternakan dapat tumbuh secara berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan daerah.

3. Pertambangan dan Energi

Kewenangan urusan pertambangan dan energi sejak tahun 2016 tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, namun dapat disampaikan data penggunaan listrik menurut jenis pelanggan tahun 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel II.215 Penggunaan Tenaga Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2024 (KWh)

No	Penggunaan Tenaga Listrik	Tahun			
		2021 (KWh)	2022 (KWh)	2023 (KWh)	2024 (KWh)
1	Pabrik/Industri	4.386.481	5.124.309	4.524.914	4.228.300
2	Bisnis	25.547.847	32.149.518	27.965.174	28.704.900
3	Kantor Pemerintah	4.059.050	5.293.606	6.296.498	4.453.000
4	Sekolah, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, dsb	464.919.001	55.664.437	7.709.363	9.814.250
5	Rumah Tangga	143.304.261	155.142.642	121.925.601	121.746.850
6	Penerangan Jalan	4.472.724	4.543.623	2.926.624	4.764.710
7	Dipakai Sendiri	1.587.783	2.288.956	2.658.656	4.891.606
8	Susut/Hilang	1.992.891	20.113.820	19.428.643	27.343.176

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2025

Dari data di atas dapat dijelaskan penggunaan listrik terbesar adalah rumah tangga, diikuti dengan penggunaan untuk bisnis, kemudian fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, tempat ibadah), sedangkan untuk kantor pemerintah penggunaannya hanya sebagian kecil. Rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2021 sebanyak 143.304.261, tahun 2022 sebanyak 155.142.642, tahun 2023 sebesar 121.925.601, serta tahun 2024 121.746.850 artinya pelanggan terbanyak yang tercatat di PLN adalah rumah tangga.

Rasio elektrifikasi yang mencapai hampir 100% di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2024 merefleksikan sebuah lompatan besar dalam pemerataan akses energi, namun capaian ini juga harus dibaca secara kritis dalam konteks tantangan pembangunan berkelanjutan.

Tabel II.216 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024

1	Persentase	95,73	96,44	99,26	96,84	99,62

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, 2025

Pencapaian elektrifikasi yang tinggi sering kali tidak hanya berbicara soal keberadaan jaringan listrik secara fisik, melainkan juga soal keandalan layanan, kualitas pasokan, serta kemudahan akses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau miskin. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa lonjakan rasio elektrifikasi seringkali diikuti oleh persoalan baru, seperti ketimpangan kualitas layanan antara kawasan pusat dan pinggiran, keterbatasan kapasitas jaringan, atau bahkan munculnya rumah tangga yang “berlistrik” secara administratif namun secara riil tidak menikmati manfaat maksimal akibat gangguan atau keterbatasan daya. Oleh sebab itu, capaian rasio elektrifikasi yang tinggi di Kuantan Singingi patut dijadikan momentum untuk memperkuat sistem monitoring, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa inklusivitas akses energi benar-benar terwujud –bukan sekadar angka statistik, tetapi juga tercermin dalam perbaikan nyata pada taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, agenda pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan, melainkan juga pada penguatan kualitas dan keberlanjutan akses listrik bagi seluruh warga.

4. Perdagangan

Perdagangan merupakan faktor pendukung ekonomi lokal yang sangat strategis di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya bahan kebutuhan pokok masyarakat. Produk unggulan daerah berupa hasil UMKM dan IKM diharapkan menjadi komoditi utama perdagangan pada tahun 2025.

Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, sehingga dapat meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional, adanya fasilitasi dan asistensi terhadap pengawasan pasca penertiban izin dan pendaftaran perusahaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

- Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

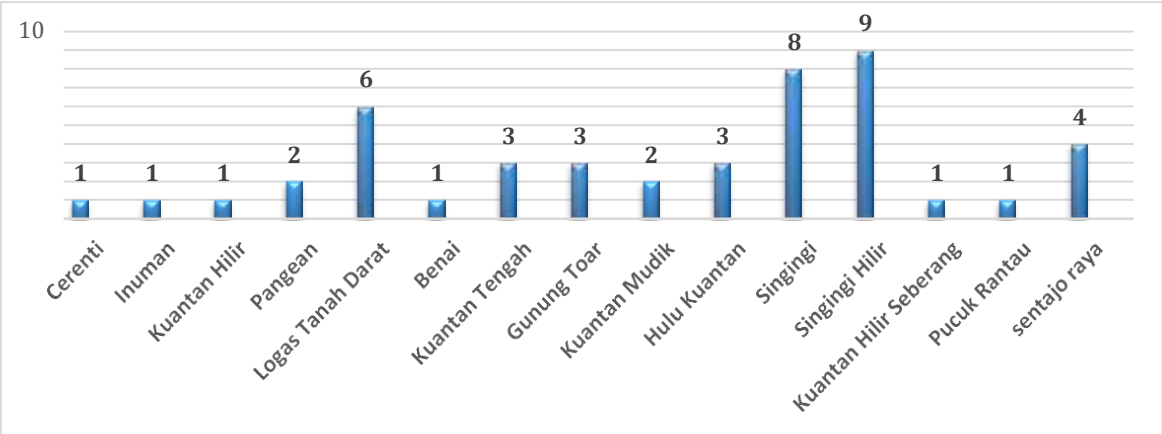
Tabel II.217 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	752,45	835,12	935,03	995,11	1.081,38
2	Jumlah PDRB	23.853,04	24.747,63	25.913,73	26.667,59	27.498,98
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	3,15	3,37	3,6	3,76	3,85

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB secara jumlah terus mengalami kenaikan dari tahun 2020–2024, pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dari 3,76% menjadi 3,85%.

- Jumlah Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.89 Daftar Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi Sampai dengan Tahun 2024

Pasar merupakan sebagai pusat perekonomian, pasar di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan jenis pasar tradisional dengan frekuensi setiap minggunya. Jumlah pasar di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 berjumlah sebanyak 46 pasar, jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu sebanyak 447 pasar. Pemeliharaan pasar menjadi prioritas pada tahun 2025, terutama optimalisasi pemanfaatan Pasar Tradisional Berbasis Modern di Kota Teluk Kuantan.

5. Perindustrian

Program perindustrian merupakan urusan pilihan di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan progam pokok untuk meningkatkan usaha industri masyarakat baik skala kecil dan menengah guna meningkatkan pendapatan masyarakat mengingat usaha industri masyarakat skala kecil dan menengah di kabupaten Kuantan Singingi masih sedikit, usaha yang dilakukan guna dengan meningkatkan jumlah Industri Kecil Masyarakat melalui : pelatihan usaha, pemberian akses modal, pelatihan pengembangan usaha, dan membantu pemasaran produk usaha masyarakat.

- Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin adalah persentase kelompok pengrajin yang dibina pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah seluruh kelompok pengrajin yang ada. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 7 kelompok pengrajin yang dibina. Tahun 2023 terdapat sebanyak 10 kelompok pengrajin, sehingga cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2024 sebesar 87,5% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 83,33%. Kelompok pengrajin merupakan salah lembaga ekonomi kerakyatan yang harus dikembangkan dalam meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah, tahun 2025 bantuan ini agar dapat ditingkatkan.

Tabel II.218 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan pembinaan Pemda	11	18	18	10	7
2	Jumlah Kelompok Pengrajin	12	22	25	12	8
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	91,66	81,81	72	83,33	87,5

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan data cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2020 terdapat 11 kelompok pengrajin yang mendapatkan pembinaan, meningkat menjadi 18 kelompok pada tahun 2021–2022, terdapat 10 kelompok pada tahun 2023 dan 7 kelompok pada tahun 2024. Secara keseluruhan, cakupan bina kelompok pengrajin dengan persentase tertinggi di tahun 2020 sebesar 91,66 % berkisar dan mencapai 87,50 % pada tahun 2024.

6. Kelautan dan Perikanan

a) Konsumsi Ikan

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah kaya sumberdaya perairan. Pada Tahun 2024 Luas perairan umum Kabupaten Kuantan Singingi adalah 22.847,43 ha yang terdiri dari danau 180,95 ha , bendungan 236,10 ha, rawa 20.627,95 ha dan sungai 1.802,43 ha. Produksi penangkapan ikan perairan umum daratan tahun 2023 sebesar 467,49 ton dengan 2.050 RTP dan tahun 2024 sebesar 488,77 ton dengan 2.050 RTP, sedangkan produksi keramba tahun 2023 sebesar 88,15 ton dengan 63 RTP dan pada tahun 2024 sebesar 65,14 ton dengan 63 RTP.

Kegiatan Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi secara umum terdiri dari 3 kegiatan yaitu penangkapan ikan diperairan umum, budidaya ikan air tawar, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Saat ini kegiatan perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi telah berkembang cukup pesat.

Tabel II.219 Konsumsi Ikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)/Kapita/Tahun	39,37	40,5	41,69	43,11	44,02
2	Target Daerah (Kg)	40	50,5	41,69	42,86	44,59
3	Konsumsi Ikan (%)	98,42	80,19	100	100,58	98,7

Sumber : Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Peningkatan Produksi Perikanan dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan (1) Intensifikasi, (2) Ekstensifikasi, (3) Diversifikasi, (4) Rehabilitasi. Intensifikasi dapat dilakukan didaerah-daerah yang sudah maju dan penguasaan teknologi budidayanya sudah mantap. Ekstensifikasi dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang mempunyai potensi perikanan yang cukup besar namun Belum dimanfaatkan (Under Growth). Diversifikasi dapat dilaksanakan pada daerah-daerah yang sudah mengalami kejenuhan produk perikanan untuk dialihkan jenis komoditasnya guna meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Rehabilitasi dilaksanakan pada daerah- daerah yang banyak terdapat lahan perikanan (lahan-lahan perikanan yang ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan).

Untuk membantu pelaku utama sektor perikanan dalam pengembangan usahanya berbagai terobosan dilakukan Dinas Perikanan, pabrik pellet lokal di Kandang Tumiyang sebagai Unit Pelaksana Teknis diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pembudidayaan dan pelatihan perikanan (BBIPP) terhadap pakan pabrik yang cenderung mahal. Balai Benih Ikan (BBI) Teso, pengembangan Budidaya dan promosi Produk perikanan (PBPPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis diharapkan mampu memenuhi ketergantungan pembudidaya terhadap benih yang berkualitas, disamping itu

penumbuhkembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) diharapkan juga mampu memenuhi kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya.

Selanjutnya pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi juga terus diupayakan peningkatan produksi dan keragaman sumberdaya perairan umum melalui upaya memproduksi benih-benih ikan lokal melakukan penebaran benih ikan lokal ke perairan umum (restocking), memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang perlunya upaya pelestarian perairan umum. Jenis ikan lokal ekonomis yang telah berhasil dibenihkan adalah ikan Nilem (pawe), ikan tawes, ikan kapiat, ikan puyu, ikan baung dan ikan Mas.

Untuk menjamin terserapnya hasil produksi pembudidaya di Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan pembinaan terhadap pedagang dan pengolah ikan. Dana Pinjaman Asosiasi pedagang ikan telah digulirkan kepada pedagang agar mampu mengembangkan usahanya. Penyediaan kendaraan angkut pemasaran diharapkan mampu menjamin ketersediaan ikan pelosok Kuantan Singingi.

b) Produksi Perikanan (Jumlah produksi ikan (ton)/Target daerah (ton) x 100%)

Potensi perikanan di kabupaten Kuantan Singingi meliputi potensi Perikanan tangkap, kolam dan keramba. Dalam tabel berikut digambarkan target daerah dan jumlah produksi perikanan tahun 2024 :

Tabel II.220 Jumlah Produksi Perikanan (dalam ton) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Produksi	Target Daerah	Persentase (%)
1	Perikanan Tangkap	488,773	518,2	94,32%
2	Budidaya Kolam	7.078,71	4.150	172,14%
3	Keramba	65,142	4.150	172,14%
Jumlah		7.632,63	8.818	438,60%

Sumber : Dinas Perikanan, 2025

Dari data di atas bahwa capaian jumlah produksi perikanan tangkap tercapai 94,32% dan budidaya kolam tercapai 171,14%, sedangkan budidaya keramba tercapai 172,14%. Dengan geliat usaha perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini, pada tahun 2025 mendatang target daerah terutama perikanan tangkap dan budidaya kolam dapat lebih ditingkatkan. Sebaran jumlah produksi perikanan budidaya keramba dan budidaya kolam di setiap kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel II.221 Produksi Ikan Budidaya di Keramba Pada Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah RTP (KK)	Jumlah Keramba	Produksi (Ton)				Total Prod (Ton)
				Nila	Patin	Lele	Lain-lain	
1	Kuantan Mudik	24	32	23,36	-	-	-	23,36
2	Hulu Kuantan	-	-	-	-	-	-	-
3	Gunung Toar	-	-	-	-	-	-	-
4	Pucuk Rantau	-	-	-	-	-	-	-
5	Singingi	-	-	-	-	-	-	-
6	Singingi Hilir	--	-	-	-	-	-	-
7	Kuantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
8	Sentajo Raya	-	-	-	-	-	-	-
9	Benai	-	-	-	-	-	-	-
10	Kuantan Hilir	-	-	-	-	-	-	-
11	Pangean	23	60	31,35	0,53	-	-	31,88

No	Kecamatan	Jumlah RTP (KK)	Jumlah Keramba	Produksi (Ton)				Total Prod (Ton)
				Nila	Patin	Lele	Lain-lain	
12	Logas Tanah Darat	-	-	-	-	-	-	-
13	Kuantan Hilir Seberang	-	-	-	-	-	-	-
14	Cerenti	16	22	2,25	7,65	-	-	9,90
15	Inuman	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 2024		63	114	56,962	8,18	-	-	65,14

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka 2025

Produksi Ikan budidaya di Keramba pada tahun 2024 dengan jumlah RTP sejumlah 63 RTP dengan menggunakan 114 keramba, produksi ikan nila sebanyak 56,96 ton terbanyak di Kecamatan Pangean dengan jumlah produksi 31,88 ton, produksi ikan patin terbanyak di Kecamatan Cerenti ikan lele dan ikan lainnya tidak diproduksi pada tahun 2024.

Tabel II.222 Produksi Ikan Budidaya di Kolam Pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

N o	Kecamatan	Jumlah RTP (KK)	Jumlah Keramba	Produksi (Ton)				Total Prod (Ton)
				Nila	Patin	Lele	Lain-lain	
1	Kuantan Mudik	175	11,6	138,92	-	0,15	-	139,07
2	Hulu Kuantan	15	2,3	36,6	-	-	-	36,60
3	Gunung Toar	226	33,8	200,92	126,63	144,34	10,08	481,97
4	Pucuk Rantau	36	7,7	52,23	-	1,2	0,5	53,93
5	Singingi	144	3,6	36,14	4,6	9,12	-	49,86
6	Singingi Hilir	251	13,8	45,10	7,5	18,28	1,75	72,63
7	Kuantan Tengah	435	115,2	2.981,46	81,99	41,01	27,32	3.131,78
8	Sentajo Raya	176	56,7	1.069,71	63,04	9,98	11,34	1.154,07
9	Benai	212	25,9	290,34	2,4	0,5	2,31	295,55
10	Kuantan Hilir	84	9,9	17,70	17,77	9,8	0,05	45,32
11	Pangean	231	18,3	203,33	8,33	0,1	1,08	212,84
12	Logas Tanah Darat	54	21,2	725,12	28,27	506,82	-	1.260,21
13	Kuantan Hilir Seberang	79	8,07	77,36	56,71	2,5	2,99	139,56
14	Cerenti	83	5,1	4,30	-	0,6	-	4,90
15	Inuman	29	2,83	0,42	-	-	-	0,42
Jumlah Tahun 2024		2.230	336	5.879,65	397,24	744,40	57,42	7.078,71
Jumlah Tahun 2023		2.230	335,02	4.650,30	377,71	209,4	43,88	5.281,30
Jumlah Tahun 2022		2.230	335,02	4.147,71	356,27	151,24	61,43	4.716,65
Jumlah Tahun 2021		2.220	334,02	3.809,65	358,78	122,42	87,64	4.378,48
Jumlah Tahun 2020		2.084	335,85	3.145,69	636,52	133,65	66	3.981,86

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tahun 2024 secara umum produksi ikan budidaya di Kolam mengalami peningkatan, khususnya produksi jenis ikan nila pada tahun 2024 produksinya sebesar 5.879,65 ton, sedangkan tahun 2023 hanya sebesar 4.650,30 ton. Potensi perikanan ini dapat ditingkatkan dengan cara memberikan stimulan kolam kepada masyarakat yang bersifat bantuan bibit dan pelet.

Salah satu potensi perikanan adalah perikanan tangkap yang dilakukan masyarakat, berikut tabel produksi penangkapan perairan umum di Kecamatan tahun 2024.

Tabel II.223 Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum Setiap Kecamatan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Produksi (ton)	Jumlah RTP
1	Kuantan Mudik	43.464,00	170
2	Hulu Kuantan	17.990,00	86
3	Gunung Toar	35.654,00	237
4	Pucuk Rantau	12.290,00	54
5	Singingi	22.709,00	108
6	Singingi Hilir	36.231,00	150
7	Kuantan Tengah	42.426,00	150
8	Sentajo Raya	33.055,00	91
9	Benai	31.420,00	108
10	Kuantan Hilir	27.944,00	201
11	Pangean	47.469,00	182
12	Logas Tanah Darat	36.494,00	50
13	Kuantan Hilir Seberang	36.072,00	163
14	Cerenti	36.534,00	160
15	Inuman	29.021,00	140
Total		488.773,00	2.050

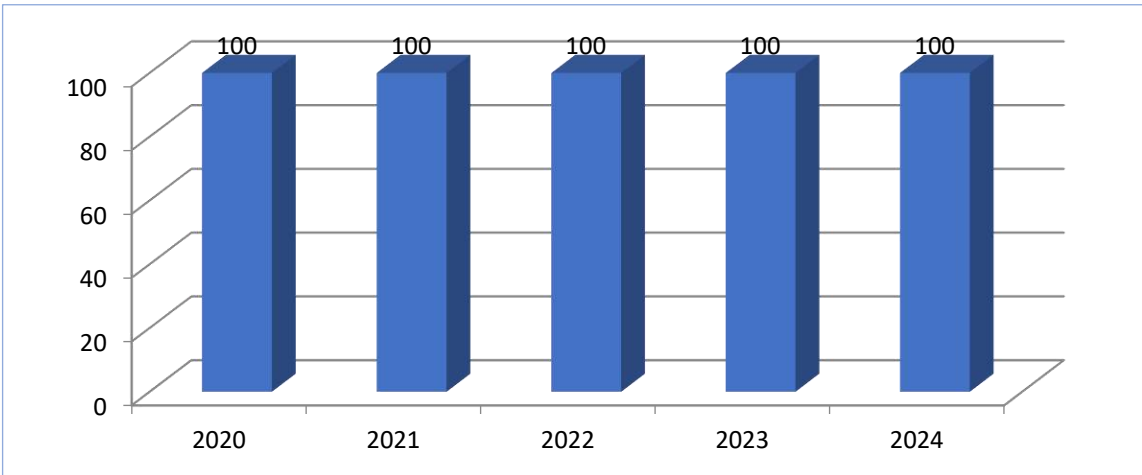
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

II.4.4.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

- Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

RKPD tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RKP Tahun 2023. Berikut gambaran konsistensi Program RPJMD dalam RKPD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Grafik II.90 Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen ini merupakan kesepakatan Kepala Daerah dengan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Ranperda APBD setiap tahunnya, berikut konsistensi Program RKPD dengan Program APBD.

Tabel II.224 Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program Dalam APBD	5	5	5	5	5
2	Jumlah Program Dalam RKPD	5	5	5	5	5
3	RKPD ke dalam APBD	100%	100%	96,74%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tabel di atas setiap tahun secara konsisten seluruh program dalam Rencana Kerja dimasukkan kedalam APBD, total program dalam RPJMD sebanyak 5 program, namun tidak semua program dimasukkan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

2. Keuangan

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam 9 tahun terakhir adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), persentase anggaran pendidikan dan kesehatan yang diamanatkan undang-undang yaitu 20% dan 10%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi capaian. Pada tahun 2020 realisasi PAD mencapai Rp73,85 miliar atau 80,86 persen dari target, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 68,02 persen. Pada tahun 2022 capaian sedikit membaik dengan realisasi sebesar 71,80 persen.

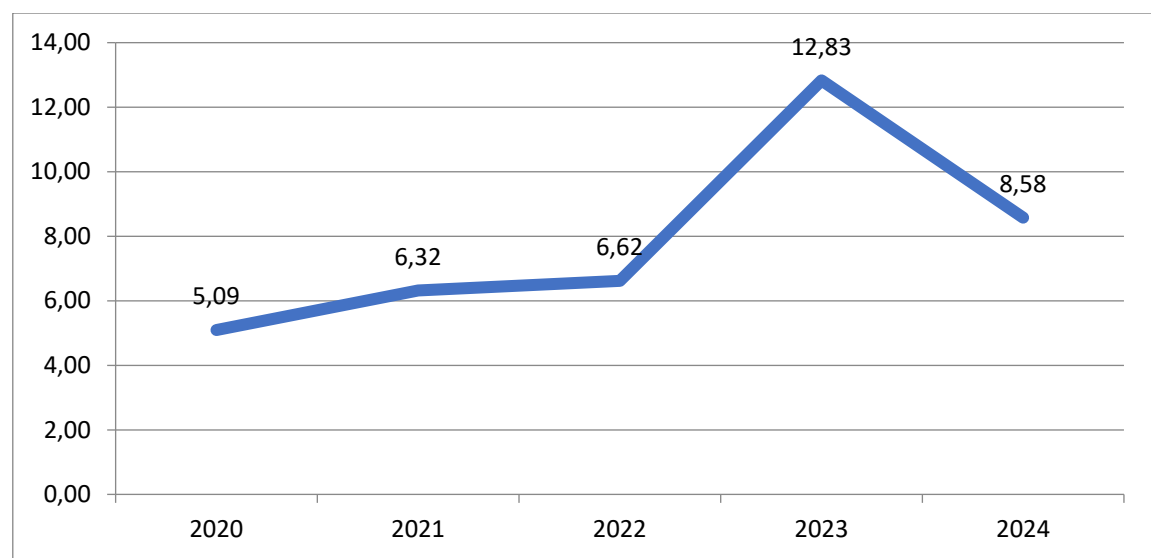
Kinerja PAD menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2023, di mana realisasi mencapai Rp198,16 miliar atau 125,26 persen dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2024 persentase realisasi kembali menurun menjadi 70,26 persen meskipun nilai nominal realisasi mencapai Rp119,88 miliar.

Asumsi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan lebih tinggi dari realisasi PAD Tahun 2021, berikut data realisasi PAD Tahun 2024:

Tabel II.225 Persentase Realisasi PAD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Asumsi PAD	91.346.460.668,55	125.168.152.334,00	121.046.062.547,00	158.207.199.735,90	170.636.769.359,00
2	Realisasi PAD	73.858.316.480,76	85.142.502.048,89	86.922.175.199,87	198.165.927.235,73	122.184.404.669,38
3	Persentase	80,86	68,02	71,8	125,26	71,60

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Kuantan Singingi
 Grafik II.91 Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Persentase PAD jika dibandingkan dengan pendapatan daerah 2020-2024 bersifat fluktuatif, namun tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, kedepan banyak potensi PAD Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat digali dalam pembiayaan pembangunan daerah pada tahun 2025.

- Opini BPK

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu hal yang harus selalu ditingkatkan, hal ini bertujuan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020- 2024, sebagai berikut :

Tabel II.226 Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020- 2024 penilaian BPK RI terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah WTP, dengan arti sangat baik. Hal ini tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan publik yang prima dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Angka ini menunjukkan usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya aparatur tentu bermuara pada peningkatan pelayanan publik di daerah, berikut tabel Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Tabel II.227 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.953	1.957	2.076	2.170	2.965
2	Jumlah Total ASN	5.340	5.161	5.744	5.560	6.093
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	36,57	37,91	36,14	39,03	48,66

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kecuali pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendorong peningkatan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan formal dengan tujuan memperkuat kompetensi aparatur, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Persentase ini menunjukkan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024, sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel II.228 Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	342	339	167	190	194
2	Jumlah Total Jabatan	651	689	358	328	458
3	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	52,53	49,2	50,91	58,92	42,36

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan tercatat 52,53 persen, sempat menurun menjadi 49,20 persen pada tahun 2021, lalu meningkat pada tahun 2023 hingga 58,92 persen. Namun pada tahun 2024, capaian tersebut kembali menurun menjadi 42,36 persen. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan memperkuat kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Penelitian dan Pengembangan

a) Persentase implementasi rencana kelitbangan

Dalam RKPD tahun 2020 sebanyak 2 kajian, tahun 2021 sebanyak 3 kajian, tahun 2023 sebanyak 3 kajian, serta tahun 2024 2 kajian. Berikut tabel implementasi rencana kelitbangan tahun 2020–2024.

Tabel II.229 Implementasi Rencana Kelitbangan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	2	3	3	3	2
2	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	4	3	3	3	2
3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	50%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

b) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tujuan dilaksanakannya kelitbangan di daerah adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pada akhirnya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara umum, berikut data pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2020- 2024.

Tabel II.230 Pemanfaatan Kelitbangan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti	2	2	3	3	2
2	Jumlah Kelitbangan dalam Renja PD	4	2	3	3	2
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	50%	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

c) Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Fokus penelitian dan pengembangan adalah penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka panjang akan menyiapkan regulasi daerah dalam upaya penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai fasilitator penyelenggaraan sistem inovasi daerah pada setiap Perangkat Daerah dalam upaya percepatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, berikut Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah tahun 2020–2024.

Tabel II.231 Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi	41	41	43	44	44

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Jumlah Total Perangkat Daerah	41	41	43	44	44
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

5. Pengawasan

a) Persentase tindak lanjut temuan

Persentase tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat Provinsi Riau dan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun anggaran dibandingkan dengan jumlah temuan, tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel II.232 Persentase Tindaklanjut Temuan Tahun 2024

No	Uraian	Temuan BPK	Temuan Inspektorat Prop	Temuan Inspektorat Kab
1	Temuan	17	10	12
2	Rekomendasi	67	19	23
3	Tindaklanjut	29	0	9
	Persentase	43,28	0	39,13

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Data di atas tindaklanjut temuan BPK berjumlah 43,28%, selebihnya belum ditindaklanjuti, tindaklanjut temuan Inspektorat Provinsi Riau belum ditindaklanjuti sedangkan temuan Inspektorat Kabupaten yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 39,13%.

b) Persentase Pelanggaran Pegawai

Inspektorat daerah mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelanggaran pegawai, yang menjadi masalah pegawai selama ini adalah pelanggaran disiplin tentunya diberikan pembinaan dan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin sesuai dengan peraturan perundang- undangan, berikut data pelanggaran pegawai di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024.

Tabel II.233 Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	7	2	1	8	11
2	Jumlah total ASN	5.340	5.024	5022	4.838	6.053
3	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,13	0,039	0,02	0,17	0,18

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020–2024 sanksi pegawai paling banyak terjadi pada tahun 2024 sebanyak 12 ASN yang dikenai sanksi atau 0,18%, sedangkan tahun 2022 ASN yang dikenai sanksi sebanyak 1 atau 0,02%.

c) Jumlah temuan BPK

Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya masih terdapat sejumlah temuan terhadap pengelolaan keuangan

daerah terhadap beberapa Perangkat Daerah, pada LKPD tahun 2018 terdapat sebanyak 14 temuan, tahun 2019 sebanyak 18 temuan dan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 21 temuan. Catatan ini agar diperhatikan dalam penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan daerah pada masa mendatang.

6. Sekretariat DPRD

- Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD

Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman kerja tahunan setiap Alat Kelengkapan DPRD, untuk Kabupaten Kuantan Singingi Rencana Kerja tahunan ini belum tersedia, namun pihak Sekretariat DPRD akan menyiapkan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk memudahkan dalam perencanaan kegiatan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) sudah terintegrasi begitu juga program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setoran DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap tahunnya.

II.4.5 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

Tabel II.234 Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2020	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target 2026	Kondisi Akhir Periode RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, MAJU, BERWAWASAN, SEJAHTERA DAN HARMONIS (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)											
Misi 1 : MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, HARMONIS, AMAN, MEMILIKI SEMANGAT DAN JIWA BATOBO DALAM LINGKUP MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERMARTABAT											
Tujuan : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya											
		Indeks kerukunan umat beragama	n/a	78		80		82	84	85	85
01.01.01	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis	Indeks ketertiban dan ketentraman umum	n/a	86	100	100	94,5	100	100	100	100
01.01.02	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	100	100	86,49		94,7	96	100	100	100
Misi 2 : MEWUJUDKAN MANAJEMEN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, BERWAWASAN DAN DEMOKRATIS											
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel											
		Indeks Reformasi Birokrasi	51,12	54		58		61	64	65	65

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2020	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target 2026	Kondisi Akhir Periode RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
02.01.01	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai AKIP	64,06	66,2	64,12	65,86	65,86	66,2	73,12	73,85	73,85
		Skor LPPD	2,88	3		3	3	3	3	3	3
02.01.02	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks SPBE	2,92	3,1	2,96	3	3	3	3,4	3,5	3,5
		Indeks Kepuasan masyarakat	n/a	75,14	85,09	87	87	87	82,13	84,58	84,58
Misi 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG MEMILIKI DAYA SAING											
Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia											
		Indeks Pembangunan Manusia	70,31	70,66-		71,81		72,56	73,31	73,88	73,88
03.01.01	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,59	8,73	8,76	8,87	8,87	9,01	8,94	9,01	9,01
		Harapan lama sekolah (tahun)	13,33	13,35	13,36	13,4	13,4	13,42	13,42	13,43	13,43
03.01.02	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,55	68,68	68,87	69	69	69,16	69,16	69,32	69,32
03.01.03	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,16	92,86	90,48	96,88	96,88	96,9	96,9	96,9	96,9
Misi 4 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG MEMILIKI DAYA SAING MELALUI PEMANFAAAN POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH;											
Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing											

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2020	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target 2026	Kondisi Akhir Periode RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,98	1,11-2,93		1,17-2,98		1,23-3,02	1,29-3,05	1,36-3,09	1,36-3,09
04.01.01	Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi	PDRB ADHB (milyar rupoah)	33.479,09	36,376,054.4	44.994,48	49.048.82	49.048.82	50.029,80	40,004,328.0	41,232,460.8	41,232,460.8
		Gini Ratio	0,291	0,285	0,258	0,235-0,251	0,235-0,251	0,215-2,67	0,27	0,268	0,268
04.01.02	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	8,91	8,77	8,24	7,58-8,03	7,58-8,03	7,55-8,00	8,11	8	8
		Tingkat Pengangguran terbuka	5,21	4,09-5,13	2,66	2,19-2,88	2,19-2,88	2,15-2,67	4,45	4,29	4,29
Misi 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TATA RUANG WILAYAH YANG HANDAL DAN TERINTEGRASI MELALUI KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOTA DAN DESA SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN BERKELANJUTAN											
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur											
		Rata-rata capaian layanan infrastruktur	52,64	57,97		61,72		64,34	66,95	69,58	69,58
05.01.01	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase peningkatan pergerakan orang/ barang melalui terminal	n/a	6	3,75	6	5,17	6	6	6	

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2020	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target 2026	Kondisi Akhir Periode RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
05.01.02	Meningkatnya infrastruktur permukiman	Persentase lingkungan sehat yang didukung dengan PSU	70,29	70,9	91,05	82,77	100	100	76,8	76,98	76,98
05.01.03	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	51,63	61,63	14,9	61,63	93,8	95,63	76,63	81,63	81,63
05.01.04	Meningkatnya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	68,45	76,45	85,79	86,45	93	94,45	88,45	92,45	92,45
05.01.05	Meningkatnya infrastruktur dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang dialiri jaringan irigasi dengan baik	72,85	80,85	92,09	93,85	84,85	94,85	92,85	96,85	96,85
Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan berwawasan Lingkungan											
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,32	69,08		69,46		69,84	70,22	70,6	70,6
05.02.01	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	56,05	56,25	58,89	56,35	59,45	59,45	56,55	56,65	56,65

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2020	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target 2026	Kondisi Akhir Periode RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Indeks kualitas udara	90,56	90,77	93,03	90,87	93,98	94,65	91,08	91,18	91,18
		Indeks kualitas lahan	48,28	50,99	49,74	52,36	53,73	55,09	55,09	56,47	56,47

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

II.4.6 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berangkat dari perspektif tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersifat komprehensif. Disamping itu, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019-2023 dan kebijakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2019-2023 serta kerangka pendanaan tahun 2025-2029.

Dalam rangka mencapai upaya target kinerja pembangunan dalam RPJMD, perlu ditetapkan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Kedua hal tersebut perlu ditetapkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semuanya akan mengarah pada kepentingan publik. Arah gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

Ruang lingkup analisis kinerja keuangan Tahun Anggaran 2019- 2023, meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan kinerja pendapatan, proporsi pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah serta pembiayaan daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas dan analisis rasio solvabilitas. Perkembangan kinerja sesuai dengan indikator tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

II.4.6.1 Realisasi APBD Tahun 2020–2024

Komponen pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama Tahun 2020–2024 bisa dikatakan stagnan atau tidak mengalami pertumbuhan yang cukup baik, hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam berkumpul dalam rangka pencegahan penyebaran covid -19.

Tabel II.235 Realisasi APBD Tahun 2020–2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	73.950.440.456,76	95.230.632.831,96	87.909.018.160,41	204.938.152.583,62	122.184.404.669,38
	B. Pendapatan Tranfer	1.329.586.583.534,82	1.207.522.128.758,00	1.225.481.414.608,18	1.338.969.731.589,00	1.301.550.382.207,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah	46.277.090.000,00	44.408.510.000,00	112.946.183,00	565.276.288,00	2.010.600,00
2	BELANJA					
	A. Belanja Oprasi	953.105.707.346,37	906.599.182.521,03	899.783.751.493,72	1.076.470.180.101,31	1.142.264.863.449,42
	B. Belanja Modal	161.270.005.084,00	118.985.719.427,87	104.081.538.901,60	203.699.386.121,85	194.934.007.141,09
	C. Belanja Tak Terduga	30.389.082.205,00	4.401.230.789,00	399.549.144,00	1.759.683.932,00	179.480.684,00
	D. Belanja Tranfer	269.088.500.534,00	253.871.849.582,00	253.674.174.479,00	264.203.873.006,00	249.065.407.992,00
	JUMLAH BELANJA	1.413.853.295.169,37	1.283.857.982.319,90	1.257.939.014.018,32	1.546.133.123.161,16	1.586.443.759.266,51
	SURPLUS / DEFISIT	35.960.818.822,21	63.303.289.270,06	55.564.364.933,27	(1.659.962.700,54)	(164.710.966.058,13)
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	25.214.525.054,91	61.178.997.307,12	124.482.286.577,18	180.390.922.966,44	178.589.796.815,90
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	25.214.525.054,91	61.178.997.307,12	124.482.286.577,18	180.390.922.966,44	178.589.796.815,90
	SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN (SILPA)	61.175.343.877,12	124.482.286.577,18	180.046.651.510,45	178.730.960.265,90	13.878.830.757,77

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kabupaten Kuantan Singingi mengalami stagnasi fiskal kronis dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata negatif sebesar -0,49% per tahun selama periode 2020 hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan pelemahan kapasitas fiskal yang bersifat sistemik dan jauh lebih buruk dibandingkan dengan periode sebelumnya yang juga sudah mengalami penurunan signifikan. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sebenarnya hanya memperparah kerentanan fiskal yang sudah ada, dimana ketergantungan ekstrem pada pendapatan transfer pusat dan provinsi mencapai lebih dari 90% dari total pendapatan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya menjadi penyangga utama tidak mampu berfungsi dengan baik. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan yang sangat rentan dalam struktur keuangan daerah yang dapat menghambat fleksibilitas anggaran dan pengelolaan sumber daya secara optimal.

Lebih lanjut, PAD memperlihatkan volatilitas yang sangat mengkhawatirkan, dengan lonjakan tajam sebesar 177% dari tahun 2022 ke 2023 namun anjlok kembali hingga 41,36% pada tahun 2024. Fluktuasi ekstrim ini mencerminkan ketiadaan basis pendapatan yang berkelanjutan dan menandakan bahwa PAD belum mampu dijadikan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan. Selain itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan hanya rata-rata sekitar 8,1%, jauh di bawah standar kemandirian fiskal yang ditetapkan minimal 30%. Sementara itu, komponen pendapatan lain-lain sah mengalami keruntuhan hampir total, merosot hampir 100% selama lima tahun terakhir, yang menunjukkan lemahnya inovasi dalam penggalian sumber pendapatan baru di luar pendapatan konvensional.

Dominasi pendapatan transfer yang mencapai 90,6% justru disertai tren negatif, dengan penurunan terutama pada dana bagi hasil bukan pajak dan transfer provinsi yang masing-masing turun signifikan. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber eksternal ini menjadi kontraproduktif, karena menciptakan kerentanan fiskal yang bersifat sistematis terhadap perubahan kebijakan pusat. Dengan demikian, daerah sangat bergantung pada keputusan dan alokasi dana pusat yang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga mengancam keberlanjutan fiskal dan stabilitas keuangan daerah.

Di sisi belanja, total belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 3,19% per tahun, tetapi dominasi belanja tidak langsung atau operasional yang mencapai 72% pada tahun 2024 menjadi indikasi inefisiensi struktural. Alokasi yang besar pada belanja pegawai dan belanja barang/jasa tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyata, sehingga ada indikasi pemborosan dan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran. Sebaliknya, belanja modal yang merupakan investasi untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang sangat rendah, hanya menyumbang sekitar 12,3% dari total belanja, jauh di bawah standar minimal 30% yang direkomendasikan.

Volatilitas belanja modal yang tajam, dengan penurunan signifikan di beberapa tahun dan lonjakan mendadak di tahun lain, menunjukkan ketidakstabilan perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini berpotensi menggagalkan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan berkelanjutan, yang merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Penurunan belanja transfer ke desa juga menjadi perhatian karena dapat melemahkan program pembangunan berbasis komunitas yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Kondisi fiskal makin memburuk pada tahun 2024 dengan defisit anggaran yang membengkak hingga Rp164,71 miliar, meningkat hampir seribu persen dibandingkan defisit tahun sebelumnya. Defisit ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang signifikan dan kenaikan belanja operasional yang tidak terkendali. Untuk menutupi defisit ini, pemerintah daerah bergantung hampir sepenuhnya pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang merupakan sumber pembiayaan paling konservatif dan terbatas.

Akibatnya, cadangan fiskal dalam bentuk SILPA menurun drastis sebesar 92,2% hanya dalam satu tahun, meninggalkan daerah dalam posisi sangat rentan menghadapi risiko keuangan di masa mendatang.

Lebih jauh, selama lima tahun terakhir tidak ada diversifikasi pembiayaan yang berarti di luar penggunaan SILPA, dengan penerimaan pinjaman yang sangat kecil dan tidak adanya pemanfaatan instrumen keuangan progresif seperti obligasi daerah atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Ketidakmampuan daerah untuk mengakses sumber pembiayaan alternatif ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan memperparah risiko ketergantungan pada sumber pembiayaan tunggal yang mudah terkuras.

Belanja tidak langsung yang sangat dominan juga menimbulkan persoalan serius terkait prinsip value for money. Pertumbuhan belanja pegawai dan barang/jasa yang tidak diikuti peningkatan kinerja layanan publik mengindikasikan ketidakefisienan yang menghambat capaian hasil pembangunan. Tanpa audit dan evaluasi efisiensi yang ketat, penggunaan anggaran tidak dapat dikendalikan dengan baik sehingga potensi pemborosan membesar, merugikan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kondisi fiskal Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan suatu 'perfect storm' dimana ketergantungan pada transfer eksternal, volatilitas PAD, dominasi belanja tidak produktif, dan ketiadaan strategi pembiayaan jangka panjang menciptakan risiko gagal anggaran yang serius. Tanpa intervensi kebijakan yang radikal dan terintegrasi, daerah berisiko mengalami krisis fiskal yang dapat menghambat pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, revitalisasi PAD melalui sistem pemungutan pajak yang terpadu dan optimalisasi aset daerah perlu menjadi prioritas, disertai alih fungsi aset idle menjadi unit usaha yang produktif. Pengaturan ulang komposisi belanja harus dilakukan dengan menaikkan porsi belanja modal minimal 30% dan mengaitkan belanja tidak langsung dengan pencapaian output layanan secara ketat. Selain itu, diversifikasi pembiayaan harus diupayakan melalui penerbitan obligasi daerah dan skema KPBU, serta alokasi minimal 30% SILPA untuk investasi produktif yang memperkuat basis ekonomi daerah. Penguatan koordinasi dengan DPRD juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan negosiasi terhadap dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Tanpa transformasi kebijakan fiskal yang menyeluruh dan berkelanjutan, stagnasi fiskal Kabupaten Kuantan Singingi hanya akan menjadi fenomena administratif tanpa solusi riil, mengancam keberlangsungan otonomi fiskal dan pembangunan daerah.

Kondisi likuiditas Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2020 hingga 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kas daerah yang semula mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp166,58 miliar, tergerus tajam hingga hanya tersisa Rp1,01 miliar pada tahun 2024, menunjukkan penurunan hampir 99,39% dalam dua tahun terakhir. Tren pertumbuhan kas yang negatif sebesar rata-rata -15,12% per tahun ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan arus kas operasional yang berkelanjutan. Penurunan ini diperparah oleh ketergantungan daerah pada komponen kas lain seperti Bendahara Pengeluaran dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang juga menunjukkan volatilitas tinggi tanpa memberikan kontribusi yang stabil terhadap likuiditas inti daerah.

Tabel II.236 Neraca Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020–2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
	A. Aset Lancar	207.600.907.063,84	188.639.204.215,31	248.867.807.519,62	240.800.421.917,31	116.634.735.940,13
	B. Investasi Jangka Panjang	19.451.180.790,22	20.458.600.000,00	20.458.600.000,00	20.138.600.000,00	20.138.600.000,00
	C. Aset Tetap	2.465.936.863.123,24	2.454.455.107.174,01	2.422.502.677.061,04	2.576.133.866.840,94	2.718.748.515.724,37
	D. Aset Lainnya	81.964.902.777,29	91.008.139.321,11	139.337.341.698,60	109.919.729.219,38	69.982.969.601,62
	E. Properti Investasi	-	-	-	-	88.133.764,83
	JUMLAH ASET	2.774.953.853.754,59	2.754.561.050.710,43	2.831.166.426.279,26	2.946.992.617.977,63	2.925.592.955.030,95
2	KEWAJUBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	24.691.429.055,29	11.854.948.561,32	6.804.207.468,24	19.887.156.760,69	197.073.833.195,77
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	24.691.429.055,29	11.854.948.561,32	6.804.207.468,24	19.887.156.760,69	197.073.833.195,77
3	EKUITAS					
	Ekuitas	2.750.262.424.699,30	2.742.706.102.149,11	2.824.362.218.811,02	2.927.105.461.216,94	2.728.519.121.835,18
	JUMLAH EKUITAS	2.750.262.424.699,30	2.742.706.102.149,11	2.824.362.218.811,02	2.927.105.461.216,94	2.728.519.121.835,18
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.774.953.853.754,59	2.754.561.050.710,43	2.831.166.426.279,26	2.946.992.617.977,63	2.925.592.955.030,95

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Selain itu, kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi daerah mengalami tekanan berat pada tahun 2024. Utang belanja melonjak drastis hingga mencapai Rp198,23 miliar, naik 914,03% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan rata-rata selama lima tahun mencapai 254,14%. Lonjakan kewajiban ini membuat rasio kewajiban terhadap ekuitas membengkak dari 0,7% di tahun 2023 menjadi 7,2% di tahun 2024, melewati batas kewaspadaan fiskal yang aman. Peningkatan utang jangka pendek ini berpotensi membatasi ruang gerak anggaran tahun berikutnya dan menimbulkan risiko besar bagi stabilitas fiskal daerah jika tidak segera dikendalikan melalui kebijakan yang ketat.

Investasi strategis daerah juga menunjukkan stagnasi yang cukup mengkhawatirkan. Penyertaan modal pemerintah daerah tidak mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, tetap pada angka Rp18,46 miliar tanpa adanya ekspansi portofolio investasi jangka panjang. Hal ini menunjukkan kurangnya inisiatif pemerintah daerah dalam mengembangkan aset produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan baru dan memperkuat ketahanan fiskal. Sementara itu, investasi non-permanen justru mengalami penurunan rata-rata sebesar 4% per tahun, mencerminkan lemahnya strategi pengelolaan aset dan potensi pendapatan daerah dari sumber investasi yang ada.

Penurunan aset konstruksi dalam pengerjaan juga menjadi sinyal buruk bagi kelangsungan proyek infrastruktur strategis. Dengan tren penurunan rata-rata 24,12% per tahun, penundaan penyelesaian proyek dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara umum. Proyek-proyek konstruksi yang tertunda ini berisiko menghambat transformasi aset menjadi sumber nilai ekonomi, sehingga perlu perhatian khusus agar penyelesaian infrastruktur berjalan sesuai target. Meskipun aset tetap menunjukkan pertumbuhan positif dengan kenaikan nilai peralatan, mesin, serta jalan, irigasi, dan jaringan, ketidakseimbangan dalam komposisi aset tetap terlihat dari penambahan luas tanah tanpa percepatan pembangunan yang memadai, yang berpotensi menghasilkan aset menganggur dan pemborosan sumber daya.

Sementara itu, ekuitas daerah mengalami stagnasi dengan pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -0,15% per tahun. Penurunan signifikan hingga 6,96% pada tahun 2024 menjadi tanda melemahnya kekayaan bersih daerah, sebuah fenomena yang tampak paradoks mengingat peningkatan nilai aset tetap. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kewajiban tersembunyi atau penurunan kualitas aset yang belum terdeteksi secara menyeluruh. Di sisi manajemen piutang, terdapat dua dinamika yang kontras: piutang pajak daerah terus tumbuh dengan rata-rata 13,29% per tahun hingga mencapai Rp57,97 miliar pada 2024, mencerminkan efektivitas pemungutan yang meningkat, namun di sisi lain penyisihan piutang juga naik 2,42%, menandakan meningkatnya risiko kredit dan kemungkinan piutang bermasalah.

Struktur aset daerah juga mengalami perubahan signifikan dengan aset lancar yang menyusut dari Rp207,60 miliar pada 2020 menjadi Rp116,63 miliar pada 2024, yang secara langsung berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa perlu melakukan restrukturisasi aset. Di sisi positif, ketiadaan kewajiban jangka panjang selama lima tahun berturut-turut menunjukkan solvabilitas jangka panjang yang kuat dan konservatisme fiskal, namun hal ini juga menandakan bahwa daerah enggan melakukan investasi berskala besar yang biasanya membutuhkan pembiayaan utang, sehingga berpotensi menghambat perkembangan ekonomi dan transformasi aset daerah. Volatilitas tinggi pada aset lainnya juga menjadi perhatian, terutama setelah mencapai puncak Rp139,34 miliar pada 2022 dan anjlok drastis menjadi Rp69,98 miliar pada 2024, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan penertiban aset non-inti.

Proporsi ekuitas yang awalnya sangat dominan (99,2% dari total pasiva pada 2023) turun menjadi 93,3% di tahun 2024, mengindikasikan peningkatan ketergantungan daerah pada pendanaan eksternal jangka pendek. Pergeseran struktur permodalan ini meningkatkan risiko fiskal karena daerah menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi sumber dana eksternal. Secara agregat, pertumbuhan aset daerah melambat dengan kenaikan rata-rata hanya

1,33% per tahun, sementara kewajiban justru tumbuh signifikan sebesar 68,16% per tahun, menciptakan ketidakseimbangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan pembentukan cadangan stabilisasi likuiditas dengan alokasi minimal 10% dari PAD guna mengantisipasi volatilitas kas yang tinggi. Selanjutnya, perlu diberlakukan kebijakan batas maksimal pertumbuhan utang belanja tahunan sebesar 20% dengan pengawasan triwulanan agar beban kewajiban dapat terkendali. Transformasi penyertaan modal daerah harus difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur digital dan penguatan UMKM, dengan target pertumbuhan investasi tahunan minimal 10%. Penanganan keterlambatan proyek infrastruktur perlu dilakukan melalui pembentukan satuan tugas percepatan penyelesaian proyek berbasis evaluasi kinerja. Optimalisasi aset menganggur dapat dilakukan melalui program revitalisasi aset produktif dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu mengatasi kerentanan fiskal dan membangun fondasi keuangan daerah yang berkelanjutan dan resilien.

II.4.6.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

II.4.6.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya,sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2029 sebagai berikut :

Tabel II.237 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030

N o	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	122.184.404.669,38	235.405.605.631,00	242.859.548.218,30	255.002.525.629,21	267.752.651.910,67	283.752.651.910,68
	B. Pendapatan Transfer	1.297.581.177.757,00	1.542.127.339.949,25	1.635.276.213.135,97	1.742.065.977.192,77	1.874.841.778.454,23	1.951.841.778.454,23
	C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.010.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.767.593.026,38	1.777.532.945.580,25	1.878.135.761.354,27	1.997.068.502.821,98	2.142.594.430.364,90	2.235.594.430.364,91
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	1.138.302.433.999,38	1.309.902.981.827,43	1.390.993.065.949,36	1.483.219.453.052,19	1.578.338.605.826,75	1.612.235.172.142,22
	B. Belanja Modal	194.934.007.141,09	248.295.801.784,47	256.216.014.146,69	293.476.814.854,03	352.650.655.596,73	414.656.906.812,98
	C. Belanja Tidak Terduga	179.480.684,00	6.544.503.000,00	6.871.728.150,00	7.215.314.557,50	7.576.080.285,38	7.821.180.185,18
	D. Belanja Transfer	249.065.407.992,00	286.112.342.101,09	258.336.568.108,22	261.887.652.111,84	263.111.896.508,19	265.162.786.224,53
	JUMLAH BELANJA	1.582.481.329.816,47	1.850.855.628.712,99	1.912.417.376.354,27	2.045.799.234.575,56	2.201.677.238.217,05	2.299.876.045.364,91

No	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
	DEFISIT/SURPLUS	(162.713.736.790,09)	(73.322.683.132,74)	(34.281.615.000,00)	(48.730.731.753,58)	(59.082.807.852,15)	(64.281.615.000,00)
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	178.730.960.265,90	73.322.683.132,74	49.281.615.000,00	53.730.731.753,58	62.082.807.852,15	79.281.615.000,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	178.730.960.265,90	69.322.683.132,74	34.281.615.000,00	48.730.731.753,58	59.082.807.852,15	64.281.615.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kabupaten Kuantan Singingi 2026-2030 telah disesuaikan untuk memenuhi prinsip balanced budget (PP 12/2019 Pasal 16). Pertumbuhan PAD direvisi dari 14,3% menjadi 8% per tahun berdasarkan realisasi CAGR 2020–2024 (12,9% dengan volatilitas tinggi). Transfer pusat/provinsi diproyeksikan tumbuh 3% per tahun, memperhitungkan kebijakan afirmatif daerah tertinggal (UU Desa).

Pada belanja daerah, alokasi modal difokuskan pada infrastruktur prioritas dengan pertumbuhan 12% per tahun (mempertahankan rasio 13-15% terhadap total pendapatan). Belanja tak terduga dibatasi maksimal Rp1 miliar/tahun sebagai cadangan fiskal. Strategi pembiayaan mengoptimalkan SILPA 2024 (Rp178,73 miliar) sebagai sumber utama penutup defisit 2026-2027. Untuk 2028-2030, diversifikasi melalui obligasi daerah (UU 1/2022) dan KPBU sektor sanitasi-air bersih. Kebijakan ini menjamin keseimbangan anggaran: (Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) = 0 pada seluruh tahun proyeksi. Dengan demikian, Pembiayaan Netto (selisih antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan) bernilai positif setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya aliran pembiayaan masuk yang cukup untuk menutup defisit anggaran. Hal ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

II.4.6.2.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang 2026-2030, diperkirakan semakin meningkat. Peningkatan ini berdasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan sedikit mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian daerah. Sedangkan SILPA diperkirakan semakin menurun dibandingkan dengan tahun 2020–2024.

Perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapny secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel II.238 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030

Uraian	BASELINE TAHUN 2024	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1.419.767.593.026,38	1.777.532.945.580,25	1.878.135.761.354,27	1.997.068.502.821,98	2.142.594.430.364,90	2.235.594.430.364,91
Pencairan dana cadangan (sesuai Perda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	178.730.960.265,90	73.322.683.132,74	49.281.615.000,00	53.730.731.753,58	62.082.807.852,15	79.281.615.000,00
Total Penerimaan	1.598.498.553.292,28	1.854.855.628712,99	1.927.417.376.354,27	2.050.799.234.575,56	2.204.677.238.217,05	2.314.876.045.364,91
Belanja Operasi	1.138.302.433.999,38	1.309.902.981.827,43	1.390.993.065.949,36	1.483.219.453.052,19	1.578.338.605.826,75	1.612.235.172.142,22
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	4.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan	460.196.119.292,90	544.952.646.885,56	536.424.310.404,91	567.579.781.523,37	626.338.632.390,30	702.640.873.222,69

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas, setelah Bupati terpilih resmi dilantik.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I : dialokasikan untuk mendanai Belanja Wajib dan Mengikat serta earmark yang merupakan belanja dasar bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Prioritas II : dialokasikan untuk pendanaan :

- a. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2030, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- b. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Prioritas III : dialokasikan untuk belanja operasi seperti : dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II.

Tabel II.239 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

Uraian	Tahun Dasar 2024	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.598.498.553.292,28	1.854.855.628712,99	1.927.417.376.354,27	2.050.799.234.575,56	2.204.677.238.217,05	2.314.876.045.364,91
Penggunaan :						
Prioritas I	1.075.367.841.991,38	1.167.486.350.335,19	1.199.329.634.057,58	1.265.107.105.164,03	1.361.450.502.334,94	1.387.397.958.366,75
Prioritas II	201.807.349.423,90	279.369.278.377,80	290.087.742.296,69	315.692.129.411,53	343.226.735.882,11	402.478.086.998,16
Prioritas III	321.323.361.877,00	408.000.000.000,00	438.000.000.000,00	470.000.000.000,00	500.000.000.000,00	525.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

II.4.6.2.3 Skema Pembiayaan Lainnya

Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi tantangan fiskal signifikan dengan proyeksi defisit kumulatif sebesar Rp230,4 miliar pada periode 2026-2030, yang tidak dapat sepenuhnya ditutup melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu memanfaatkan skema pembiayaan alternatif yang inovatif dan berkelanjutan sebagai solusi strategis dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Salah satu skema utama adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya untuk proyek infrastruktur penting seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi Waste-to-Energy. Dalam skema KPBU yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, pihak swasta bertanggung jawab atas pendanaan dan konstruksi, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan serta melakukan pembayaran availability payment selama jangka waktu 15 tahun, sehingga dapat mengurangi beban fiskal jangka pendek. Selain KPBU, potensi pendanaan dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sektor perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal. Dana hibah terikat dari TJSP diarahkan untuk kebutuhan sosial seperti pembangunan dan pengembangan fasilitas puskesmas dan sekolah dengan alokasi anggaran sekitar Rp5-10 miliar per tahun, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Skema pembiayaan lain yang menjanjikan adalah Obligasi Daerah Syariah (Sukuk Wakalah) dengan nilai nominal sekitar Rp100 miliar, berlandaskan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011. Instrumen ini dapat digunakan untuk pembangunan Islamic Center dengan menggunakan aset tanah milik pemerintah daerah sebagai jaminan, memberikan pembiayaan jangka panjang sesuai prinsip syariah dan menarik investor berbasis etika.

Skema Pembiayaan Berbasis Pendapatan juga efektif sebagai alternatif, khususnya pada proyek yang menghasilkan pendapatan langsung, seperti proyek jalan tol dengan mekanisme bagi hasil retribusi 70:30 yang bersifat off-budget, sehingga tidak membebani APBD secara langsung. Selanjutnya, Pinjaman Daerah Berbasis Proyek (PINA) melalui lembaga pembiayaan pembangunan dapat dimanfaatkan untuk mendukung studi kelayakan pelabuhan dengan bunga rendah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 70 Tahun 2016. Dengan mengintegrasikan berbagai skema pembiayaan ini dalam proyeksi APBD, pengurangan beban defisit anggaran dapat mencapai hingga 58% atau sekitar Rp134,6 miliar, sekaligus memperluas sumber pendanaan dan mengurangi risiko ketergantungan pada sumber tunggal.

Implementasi skema pembiayaan tersebut memerlukan pembentukan Unit Pengelola KPBU di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pengawasan ketat terhadap rasio availability payment agar tidak melebihi batas maksimal 4% dari pendapatan umum daerah. Strategi ini akan menurunkan ketergantungan transfer pusat dari 90,6% menjadi sekitar 82,3%, sementara kontribusi pembiayaan inovatif dari skema alternatif dapat mencapai 35%. Hal ini memungkinkan pelaksanaan proyek strategis secara berkelanjutan tanpa membebani pemerintah daerah dengan utang langsung. Pendekatan pembiayaan yang terintegrasi dan terdiversifikasi ini sejalan dengan visi RPJMD 2021-2026, serta menjadi fondasi penting bagi kemandirian fiskal jangka panjang dan keberlanjutan pembangunan daerah yang inklusif dan responsif terhadap dinamika ekonomi masa depan.

II.4.7 Permasalahan Dan Isu Strategis

II.4.7.1 Permasalahan

Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan gap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan

Pembangunan jangka Panjang daerah untuk dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Belum Optimalnya Pembangunan Manusia yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera

1. Akses Pendidikan yang belum merata dan terbatas. Hal ini disebabkan karena infrastruktur Pendidikan belum merata pada setiap wilayah kecamatan, terutama kecamatan Pucuk Rantau yang merupakan daerah terjauh di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan kecamatan serta desa-desa eks transmigrasi. Infrastruktur Pendidikan seperti: Ruang Kelas Belajar, Ruang Mejelis Guru, Meubeler, Sanitari/jamban atau akses air bersih, laboratorium dan fasilitas belajar lainnya masih sangat minim atau bahkan masih ditemukan ruang belajar siswa yang berbahan kayu dan dibangun sekian puluh tahun yang lalu. Ketersediaan dan sebaran sumber daya manusia Pendidikan dan tenaga kependidikan menjadi salah satu hambatan akses Pendidikan, masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan di daerah ini juga menjadi masalah Pendidikan, kemampuan ekonomi Masyarakat menjadi factor penghambat dalam memperoleh akses Pendidikan terutama bagi Masyarakat ekonomi miskin; dan regulasi Pendidikan yang belum optimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama terhadap Pendidikan dasar dan menengah.
2. Masih rendahnya mutu Pendidikan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kualifikasi tenaga pendidik dan belum tersebar secara merata tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, kurangnya kualifikasi tenaga pendidik sangat mempengaruhi proses belajar mengajar siswa di sekolah. Keterbatasan sumber daya : baik pendanaan maupun fasilitas Pendidikan juga turut mempengaruhi kualitas Pendidikan di daerah ini dan minimnya akses penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran.
3. Belum meratanya kualitas Pendidikan antar wilayah kecamatan. Hal ini disebabkan belum meratanya sarana prasarana Pendidikan, kualitas tenaga pendidik belum merata pada setiap wilayah, ditambah kondisi geografis antar wilayah sangat mempengaruhi kualitas Pendidikan.
4. Minimnya kurikulum pembelajaran muatan lokal. Kurikulum muatan lokal seperti : budaya daerah sangat diperlukan dalam Upaya melestarikan nilai-nilai budaya daerah kepada generasi penerus bangsa, sehingga kearifan lokal tetap mampu terjaga dengan baik pada masa mendatang.
5. Minimnya ketersediaan rumah sakit yang representatif. Di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi baru terdapat 2 rumah sakit : 1 RSUD Teluk Kuantan dan 1 rumah sakit swasta. Sementara dari 15 kecamatan dengan 356.246 jiwa penduduk terdapat 25 puskesmas dan masih dibutuhkan Pembangunan puskesmas baru untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan Masyarakat.
6. Belum Optimalnya Tata Kesehatan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 - a. Rendahnya perilaku hidup sehat maupun pengendalian penyakit
 - Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - Belum meratanya distribusi sumberdaya dan infrastruktur kesehatan menyebabkan program kesehatan tidak berjalan optimal, terutama di daerah terpencil.
 - Belum tercukupinya kualitas pelayanan dan pemerataan tenaga medis.
 - Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor.
 - b. SDM pelayanan Kesehatan di rumah sakit daerah dan puskesmas belum terpenuhi sesuai standar.

- Jumlah tenaga medis yang memiliki kualifikasi sangat minim, terutama dokter spesialis
 - Minimnya akses Pendidikan Kesehatan berkualitas bagi generasi muda
 - Puskesmas di wilayah yang jauh dari perkotaan kesulitan mempertahankan tenaga Kesehatan berkualitas
 - Belum meratanya insentif medis antara rumah sakit dan puskesmas
 - Belum adanya perencanaan strategis pemenuhan SDM bidang Kesehatan.
- c. Kepesertaan jaminan layanan Kesehatan belum sepenuhnya optimal, padahal program UHC (Universal Health Coverage) sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh :
- Belum semuanya Masyarakat memahami cara mendapatkam akses layanan jaminan Kesehatan atau belum menyadari pentingnya fasilitas jaminan Kesehatan
 - Keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi luasan layanan jaminan Kesehatan
 - Kurangnya akses atau informasi layanan jaminan Kesehatan terutama bagi Masyarakat miskin dan disabilitas
7. Isu, pemenuhan gizi merupakan permasalahan bidang Kesehatan yang perlu menjadi perhatian terutama bagi balita dan anak usia sekolah.
 8. Rendahnya akses dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 9. Belum optimalnya pemenuhan hak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Belum terpenuhinya hak penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik.
 10. Usaha pemenuhan hak-hak dasar Masyarakat miskin belum sepenuhnya optimal dalam Upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
 11. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Riau. Namun, dalam beberapa tahun terakhir angkanya terus mampu ditekan oleh pemerintah
 12. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja, seperti : hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta jaminan sosial
 13. Minimnya kesempatan kerja bagi disabilitas pada sektor formal
 14. Terbatasnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Sektor yang mampu menyerap banyak lapangan kerja adalah sektor industri pengolahan berupa pekerja pabrik kelapa sawit, namun kesempatan bagi tenaga kerja lokal sangat lah minim
 15. Masih adanya ketimpangan Gender dalam penyediaan lapangan pekerjaan.
- B. Belum Optimalnya nilai tambah ekonomi daerah yang inklusif berbasis potensi wilayah melalui pengembangan hilirisasi produk.

Pemenuhan kebutuhan pangan lokal masih mengalami kekurangan, hal ini dapat dilihat pada :

1. Produksi padi tahun 2024 baru mampu memenuhi kebutuhan sebesar 21.639,03 ton. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Produktifitas masih rendah, produktifitas padi Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 dengan provitas 4,46 ton/Ha;
 - b. Belum semua potensi lahan sawah ditanami;
 - c. Terbatasnya sarana prasarana pertanian yang memadai seperti : alsintan, jaringan irigasi, benih, pupuk dan lainnya;
 - d. Terjadinya alih fungsi lahan;

- e. Belum adanya penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2. Belum terpenuhinya kebutuhan daging lokal.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan telur unggas lokal, kekurangan kebutuhan telur dipasok dari kabupaten atau provinsi tetangga.
4. Belum terkelolanya potensi perikanan darat maupun perikanan budidaya, termasuk hilirisasi hasil perikanan.
5. Belum optimalnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta masih rendahnya produktivitas perkebunan rakyat.
6. Masih terdapat Perkebunan dalam Kawasan hutan.
7. Sumber Daya Manusia (SDM) pasca panen dalam peningkatan mutu produk dan penerapan teknologi pengolahan yang baik dan benar (Good Manufacturing Practices/GMP) masih kurang dan kapasitas belum memadai
8. Belum optimalnya pengelolaan hilirisasi berbasis pertanian
9. Sektor pariwisata belum memberi dampak optimal terhadap peningkatan PAD, hal ini disebabkan sarana prasarana yang masih sangat minim.
- C. Pengamalan nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia untuk memantapkan ketahanan sosial masih kurang

Budaya daerah merupakan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Nilai-nilai adat-istiadat Rantau Kuantan merupakan panutan dalam kehidupan bermasyarakat, nilai adat ini tidak bisa dilepaskan dari pengamalan nilai-nilai keagamaan “adat bersendi syara’, syara’ bersendikan kitabullah”. Nilai-nilai adat-istiadat dan nilai keagamaan merupakan motor dalam Pembangunan. Permasalahan bidang adat-istiadat dan keagamaan serta kekeluargaan dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengamalan nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga dan pemangku adat;
3. Masih minimnya kegiatan-kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah;
4. Nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan semakin berkurang;

D. Tingginya potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup

Permasalahan dibidang lingkungan hidup adalah masih tingginya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup disebabkan oleh:

1. Pencemaran tanah dan air disebabkan pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
2. Alih fungsi lahan menjadi Perkebunan kelapa sawit menyebabkan daya tampung air menjadi berkurang;
3. Terbatasnya program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan cara-cara berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam
4. Aktifitas industri pengolahan berupa limbah domestik tanpa pengolahan menyebabkan pencemaran lingkungan
5. Terjadinya abrasi tebing Sungai Kuantan disepanjang wilayah kecamatan ditepi Sungai Kuantan

E. Minimnya ketersediaan infrastuktur wilayah yang berkualitas dan merata

Kabupaten Kuantan Singingi Sebagian besar wilayahnya dilalui Perkebunan kelapa sawit. Akses jalan dan jembatan sangat dibutuhkan sebagai akses untuk mengangkut hasil Perkebunan di daerah ini. Panjang jalan Kabupaten pada tahun 2024 sepanjang 1589 KM dengan kondisi mantap mencapai 56,33 persen. Akses jalan dan jembatan merupakan infrastruktur utama yang sangat dibutuhkan, sebaran atau pemerataan Pembangunan sangat dibutuhkan sebagai urat nadi perekonomian daerah. Konektifitas antar wilayah kecamatan pada masa mendatang sangat dibutuhkan terutama bagi kecamatan-kecamatan dibagian wilayah Selatan atau Seberang Sungai batang Kuantan.

Disamping jalan dan jembatan, kebutuhan sarana dan prasarana dasar juga sangat dibutuhkan : berupa ketersediaan air minum aman. Pemerintah tidak lagi menggunakan akses terhadap sumber air minum layak sebagai target pembangunan air minum, melainkan bergeser menjadi akses terhadap sumber air minum aman, dengan target 100% pada Tahun 2045.

F. Belum optimalnya peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan

1. Kualitas tata Kelola pemerintahan
- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

b. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal

c. Masih rendahnya indeks profesionalisme ASN

d. Penyelenggaraan pelaksanaan urusan pengawasan belum berjalan secara optimal

e. Manajemen kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik

f. Kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, media massa, Masyarakat dan pemerintah daerah lainnya belum optimal

g. Pelayanan administrasi kepegawaian belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi

h. Masih rendahnya kapasitas fiskal keuangan daerah
2. Kinerja pelayanan publik yang prima
- a. Pelayanan publik berbasis digital belum optimal

b. Sarana prasarana pelayanan publik belum memadai4

Tabel dibawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan aspek dan/atau bidang urusan pemerintah daerah.

Tabel II.240 Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Angka IPM Kabupaten Kuantan Singingi masih di bawah rata-rata Provinsi Riau	● Usia harapan hidup Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 sebesar 72,68 tahun berada dibawah rata-rata Provinsi Riau mencapai 74,18 tahun
	Pengeluaran per kapita masih berada dibawah rata-rata Provinsi Riau	● Pendapatan masyarakat masih relatif rendah dan kurang merata; ● Akses ekonomi masyarakat belum optimal
	Rata-rata lama sekolah masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau	● Akses pendidikan belum merata; ● Sarana prasarana pendidikan belum memadai

Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
	Umur harapan hidup saat lahir masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau	Akses pelayanan kesehatan belum optimal dan merata
Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Tahun masih Rendah	- Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B masih kurang - Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 masih kurang
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD terus mengalami penurunan	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Masih Rendah	- Daftar Anak Usia 7-18 Tahun yang belum bersekolah Formal dan Belum Berpartisipasi di Satuan Pendidikan Kesetaraan - Biaya Personal Peserta Didik - Akses Menuju Sekolah
	Kemampuan Numerasi SD Kategori Sedang dan SMP Kategori Kurang	- Proporsi PTK Penggerak Kurang - Indeks Distribusi Guru Kurang - Kualitas Pembelajaran Sedang
Kesehatan	Jumlah Kematian Bayi meningkat	Kurangnya sarana dan prasarana Gawat Darurat Maternal Neonatal (Gadarnatneo)
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil masih rendah	Estimasi sasaran yang masih tinggi Perpindahan tempat pelayanan ibu hamil
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin masih rendah	Domisili ibu bersalin yang belum terjangkau tenaga kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir masih rendah	Domisili ibu bersalin yang belum terjangkau tenaga kesehatan sehingga berdampak terhadap kesehatan bayi baru lahir tersebut
	Pelayanan Kesehatan Balita masih rendah	Adanya asumsi yang berkembang di masyarakat semakin bertambahnya usia anak cukup dengan imunisasi saja, tidak perlu melakukan kunjungan rutin ke posyandu
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar masih rendah	Petugas/ pemegang program usia pendidikan dasar di Puskesmas sering berganti-ganti sehingga kurangnya pemahaman petugas tentang definisi operasional Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar. Pada saat dilakukan penjangkauan kesehatan kepada usia pendidikan dasar banyak sasaran yang tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan

Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
	Kurangnya ketersediaan rumah sakit	Rendahnya kapasitas riil keuangan daerah dalam membangun sarana prasarana kesehatan
	Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter	Tahun 2023 jumlah dokter di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 58 Orang tersebar di 15 Kecamatan, 1 RS milik pemerintah dan 25 UPTD Kesehatan. Rasio ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mencapai 356.246 Jiwa.
	Minimnya ketersediaa sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah	Terbatasnya kemampuan keuangan dalam pembangunan sarana prasarana rumah sakit
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Tingginya jalan kabupaten dalam kondisi rusak	Terbatasnya kemampuan keuangan dalam pembangunan infrastruktur jalan ditambah banyaknya kendaraan berat yang melebihi tonase.
	Akses inftsrstruktur jalan belum merata, terutama dibagian selatan dan Eks Trans Kabupaten Kuantan Singingi	Tidak seimbangnnya kemampuan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan kebutuhan
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) masih rendah	Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pengaspalan jalan
	Rendahnya persentase irigasi dalam kondisi baik	- Minimnya alokasi pendanaan pembangunan ataupun pemeliharaan jaringan irigasi; - Sejak 5 tahun terakhir tidak ada lagi alokasi pendanaan DAK Fisik Bidang Irigasi
	Rendahnya luas lahan budidaya yang dialiri jaringan irigasi	pada tahun 2023 luas lahan budidaya yang dialiri jaringan irigasi sebesar 49,58%.
	Belum adanya Perda Tata Ruang	sinkronisasi kondisi tata ruang wilayah dengan RTRW Provinsi dan RDTR
	Rendahnya Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	pada tahun 2023 dari 96.452 jumlah bangunan yang sudah ber-IMB sebesar 1.045 atau sebesar 1,083%.
	Masih rendahnya Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	pada tahun 2022 Rumah tangga dengan akses sanitasi aman baru mencapai 0,17%
	Rendahnya Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur permukiman
	Rendahnya pelayanan sanitasi lingkungan permukiman	pelayanan sanitasi lingkungan permukiman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 baru mencapai 67,45%.
	Belum meratanya akses air minum layak bagi masyarakat	pada tahun 2023 akses air minum layak tertinggi di Kecamatan Kuantan tengah 15,56% dan terendah di Kecamatan Hulu Kuantan sebesar 2,76%.

Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh	Minimnya pembangunan infrastruktur permukiman
	Rendahnya pelayanan sanitasi lingkungan permukiman	pelayanan sanitasi lingkungan permukiman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 baru mendapai 67,45%.
	Masih rendahnya rasio rumah layak huni	pada tahun 2023 dari 345.850 jiwa penduduk dengan jumlah rumah layak huni sebesar 79.210 atau rasio 22,903
	Rendahnya Cakupan Lingkungan Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	Tidak meratanya cakupan lingkungan kawasan permukiman yang didukung PSU, tertinggi di Kecamatan Singingi Hilir 11,01% dan terendah di Kecamatan Gunung Toar sebesar 1,78%
Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya tingkat penyelesaian pelaksanaan ketertiban, ketentraman dan keindahan	Belum optimal nya Personil ,masih minim sarana dan prasarana
	Masih tingginya angka Penyakit Masyarakat (PEKAT)	kurangnya kesadaran masyarakat
	Personil Satpol-PP yang PNS sangat minim	Jumlah Satpol-PP yang berstatus PNS sangat sedikit
	Ketersediaan sarana dan prasarana Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran belum memadai	Masih Minim Sarana dan prasarana untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten
	Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah	- Komitmen Penegakan aturan sesuai peraturan yang sudah ada - Keterbatasan pendanaan dan kurangnya personil
	Belum optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- belum adanya dokumen kajian risiko bencana - Keterbatasan sarana prasarana dan personil
Sosial	Belum optimalnya penanganan PPKS	Belum Optimal PSKS secara aktif berperan dalam penanganan PPKS
	Masih kurangnya jumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi	Masih Kurangnya Panti Asuhan di Kabupaten Kuantan Singingi karena masih banyaknya yang belum melengkapi secara administrasi sesuai dengan peraturan perundangannya, secara fisik sudah ada dan sudah melakukan pelayanan PSKS
	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih tinggi (terus mengalami peningkatan)	Satu PPKS yang masih tinggi yaitu fakir miskin
	Belum seluruh PPKS dapat mengakses jaminan sosial dan pemberdayaan sosial	Jaminan Sosial/Bantuan sosial dapat diberikan jika memenuhi syarat/komponen yang sudah di tentukan

Bidang Urusan	Permasalahan	Penjelasan
	Tingginya angka kemiskinan ekstrim	• Belum dilakukan validasi data DTKS MusrenbangDes penetapan kemiskinan ekstrim • Masih banyaknya masyarakat yang layak belum menerima bantuan sosial karena belum adanya di DTKS
	Tingginya garis kemiskinan	• Upah buruh dipasar sangat tinggi • Kebutuhan pangan pokok dipasok dari luar daerah
	Belum optimalnya peran PSKS	• Tagana pada tahun 2023 tidak aktif dan PSKS dari karang taruna menjadi berkurang

II.4.7.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang dampaknya signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakatnya pada masa depan. Suatu kondisi penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis Pembangunan Jangka Menengah dirumuskan berdasarkan capaian Pembangunan dan permasalahan Pembangunan daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki daerah. Adapun isu strategis Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

a. Isu Global dan Nasional untuk Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dominasi ekonomi pada komoditas primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) mencapai hampir 50 persen dari PDRB (2023), dengan nilai tambah yang masih relatif rendah dan memiliki karakteristik yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh sektor: pertanian dan industri pengolahan dengan masing-masing distribusi pada tahun 2024 mencapai 52,41% dan 26,00%. Hal ini disebabkan karena ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh sektor Perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kerjasama kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT GT) yang sudah berlangsung merupakan potensi penting bagi Riau termasuk didalamnya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai wilayah yang berbatasan langsung di kawasan segitiga pertumbuhan tersebut.
3. Perang dagang AS VS China mempunyai potensi dampak yang cukup besar, karna 19% ekspor Riau ke China, dengan komoditas utama berupa lemak nabati, khususnya Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, perang dagang tersebut dapat menyebabkan penurunan permintaan komoditi ekspor dari Riau, khususnya Kabupaten Kuansing yang termasuk kedalam daerah penghasil CPO di Provinsi Riau.
4. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi: pertambangan (migas dan minerba), perkebunan (kelapa sawit dan karet) dan tanaman pangan hortikultura, produknya yang dipakai luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber daya alam tersebut menyangkut kebutuhan esensial energi, pangan dan serat yang menjadi semakin penting di masa depan. Ketahanan dan potensi hilirisasi minyak bumi serta komoditas kehutanan dan perkebunan ini mempengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan.

- Sungai Indragiri yang berhulu di Sumatera Barat sangat tergantung kepada kondisi tutupan lahan di sekitar Pegunungan Bukit Barisan. Sungai Indragiri menjadi sumber air baku untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Karena itu, menjaga keberlangsungan recharge area dan kualitas air di sepanjang aliran Sungai Kuantan dan Sungai Indragiri menjadi sangat penting.

b. Isu Riau untuk Kabupaten Kuantan Singingi

- Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang memiliki potensi tanaman pangan khususnya padi. Hal ini ditandai Kabupaten Kuantan Singingi dijadikan fokus Pembangunan pertanian padi pada 2 wilayah Kecamatan : Kecamatan Benai dan Gunung Toar.
- Sektor Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi sangat dominan terhadap struktur perekonomian daerah. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 sebesar 52,41%.
- Kabupaten Kuantan Singingi memiliki khasanah even budaya daerah yang sudah mendunia, yaitu : Festival Pacu Jalur Tingkat Nasional di Tepian Narosa Teluk Kuantan yang sudah dilaksanakan selama lebih seratus tahun yag lalu.

c. Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi

Isu strategis Kabupaten Kuantan Singingi diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan pembangunan, isu strategis global, nasional maupun regional dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kuantan Singingi yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Kabupaten Kuantan Singingi dua puluh tahun ke depan berdasarkan aspek pembangunan berdasarkan dokumen RPJP Kuantan Singingi tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut.

Tabel II.241 Long List Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2045 Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang
1	Pendidikan	Ketersediaan akses Pendidikan dasar yang layak dan inklusif sesuai standar Pendidikan nasional bagi setiap individu
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Kawasan permukiman
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan	
6	Memberikan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	

Tabel II.242 Long List Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025- 2045 Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang
1	Tenaga Kerja	Perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Pembangunan berbasis gender dan anak
3	Pangan	Ketersediaan bahan pangan lokal

No	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang
4	Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan publik yang prima berbasis digital
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kemandirian desa yang berkelanjutan
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keluarga Berkualitas
8	Perhubungan	- Sarana prasarana perhubungan - Peningkatan PAD sektor perhubungan
9	Komunikasi dan Informatika	Daya Saing Digital
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Daya Saing Koperasi dan UKM
11	Penanaman Modal	Peningkatan Investasi Daerah yang dapat menyerap tenaga kerja lokal
12	Kepemudaan dan Olahraga	- Daya Saing Pemuda secara global - Daya saing bidang olahraga
13	Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Persandian	Keamanan Data dan Informasi
15	Kebudayaan	Pengamalan nilai budaya daerah dalam kehidupan
16	Perpustakaan	Budaya literasi berbasis digital
17	Kearsipan	Pelayanan kersipan digital

Tabel II.243 Long List Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025- 2045 Yang Berkaitan Dengan Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Fokus	Isu Strategis Pembangunan
1	Kelautan dan Perikanan	Potensi perikanan tangkap
2	Pariwisata	- Pengembangan potensi wisata daerah - Ekonomi kreatif berbasis wisata dan budaya lokal
3	Pertanian	Hilirisasi pertanian
4	Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan berbasis modern
5	Perindustrian	Pembangunan Kawasan industri
6	Perencanaan	Perencanaan berbasis data dan program
7	Keuangan	Kapasitas fiskal keuangan daerah
8	Kepegawaian	Peningkatan kinerja dan system merit
9	Pendidikan dan Pelatihan	Profesionalisme ASN
10	Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan system inovasi daerah

Berdasarkan Long list Isu strategis jangka panjang di atas, kemudian dilakukan perumusan kembali dan pengelompokan isu-isu strategis yang menjadi prioritas Daerah sebagai dasar dalam perencanaan jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029 , seperti yang termuat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.244 Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

No	Isu	Isu Strategis Jangka Menengah 2025-2029
1	Budaya	Masyarakat yang menjunjung adat istiadat dan keagamaan
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

No	Isu	Isu Strategis Jangka Menengah 2025-2029
3	Perekonomian dan Kesejahteraan	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
4	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Penyediaan infrastruktur kewilayahan yang merata dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
5	Pemerintahan	Pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Selain itu, isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang dan menengah. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan permasalahan pokok pembangunan daerah saat ini dan mencermati dinamika ekonomi global dan nasional serta memperhatikan penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan menyelaraskan dengan isu strategis global/nasional lima tahun kedepan. Sehingga dirumuskan 5 (lima) isu strategis pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 menjadi skala prioritas penanganan agar terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

1. Masyarakat yang menjunjung adat istiadat dan keagamaan

Isu ini menjadi hal penting yang harus tetap diperhatikan karena tidak terbendungnya era globalisasi saat ini. Sehingga secara tidak langsung akan merupakan kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam tatanan kehidupan. Oleh sebab itu, dengan sendirinya terjadi degradasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Untuk itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai budaya daerah (adat istiadat) ke dalam perilaku masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ditengah-tengah era industri 4.0.

2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Isu peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan isu pembangunan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi lima tahun kedepan melalui penguatan transformasi sosial. Seiring Kabupaten Kuantan Singingi sudah memasuki bonus demografi kategori sedang pada Tahun 2024 dan akan berlangsung hingga Tahun 2029. Sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka prevalensi stunting sesuai target nasional. Merujuk kepada permasalahan yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Kuantan Singingi maka perlu penanganan secara efektif dan berkesinambungan terhadap sektor-sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Sektor kesehatan menjadi hal yang penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia, karena menandakan sehat dan berumur panjang. Isu sektor kesehatan yang perlu dijadikan prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 adalah dalam hal fasilitas dan tenaga kesehatan

khususnya pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas, serta penerapan dalam hal sistem jaminan kesehatan nasional.

Isu pendidikan tak kalah penting dibandingkan dengan isu kesehatan karena ketika masyarakat sehat, tanpa diberikan ilmu pengetahuan akan mengurangi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Saat ini tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi masih termasuk rendah. Hal ini ditandai harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih rendah, angka partisipasi sekolah masih rendah, serta kemampuan numerasi SD kategori seang dan SMP kategori kurang. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan mutu serta layanan pendidikan yang merata keseluruh masyarakat sebuah kewajiban bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menyongsong kemajuan teknologi (industri 5.0) serta dapat memanfaatkan peluang bonus demografi.

Perlindungan sosial adalah salah satu elemen penting sebagai upaya strategi pemerintah dalam menetapkan kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multi dimensional. Perlindungan sosial dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, yang dilakukan baik oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat yang berguna untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan risiko, meningkatkan status sosial serta untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. Merujuk perspektif perlindungan sosial tersebut, sangat berkaitan dengan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Kondisi ekonomi paska pandemi Covid-19 serta geo-ekonomi dan geo-politik belum stabil dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per-kapita serta menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio yang diikuti terhapusnya kemiskinan ekstrem 0%. Sehingga perlu adanya penguatan daya saing ekonomi daerah melalui transformasi ekonomi, agar dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dalam upaya pemerataan pendapatan dan penuntasan kemiskinan ekstrem. Oleh sebab itu, terdapat 4 (empat) fokus atau prioritas dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah, antara lain:

- 1) Ilmu Pengetahuan, Inovasi dan produktivitas ekonomi
Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi daerah tidak terlepas dari ilmu pengetahuan, inovasi dan produktivitas ekonomi. Terdapat 4 (empat) pilar penting yang untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi daerah berbasis pada ilmu pengetahuan dan inovasi, sebagai berikut:
 - a. memberikan insentif bagi efisiensi penggunaan pengetahuan yang ada dan baru serta berkembangnya kewirausahaan.
 - b. populasi yang terdidik dan terampil yang dapat membuat, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dengan baik.
 - c. sistem inovasi efisien perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan, dan organisasi lain,
 - d. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang efisien dan fasilitatif.

Keempat pilar dalam upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi daerah berbasis pada ilmu pengetahuan dan Inovasi tersebut, akan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif dan volume koperasi terhadap nilai PDRB serta berkembangnya industri kecil menengah dan usaha kecil mikro serta Inovasi daerah. Selain itu, akan berkurangnya pengangguran terbuka dan bertumbuhnya kewirausahaan masyarakat serta meningkatnya partisipasi angkatan kerja kaum perempuan.

- 2) Penerapan ekonomi hijau

Pentingnya menjaga iklim ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang dengan fokus utama terhadap kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk dan menciptakan lapangan kerja perlu menjadi perhatian perumusan arah kebijakan pembangunan secara jangka panjang menuju ekonomi hijau.

3) Transformasi digital

Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di sektor industri. Salah satu keuntungan utama dari industri 4.0 yaitu dengan adanya konektivitas yang lebih besar, terutama melalui *Internet of Things* (IoT). Perkembangan industri 4.0 juga dapat membawa dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Meskipun teknologi dapat membantu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi energi, penggunaan teknologi ini juga dapat menghasilkan limbah elektronik yang berbahaya dan menghabiskan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, adopsi teknologi juga dapat mempengaruhi lapangan kerja tradisional dan menghasilkan ketidakpastian di kalangan tenaga kerja. Hal yang tidak kalah penting untuk diingat adalah bahwa perkembangan industri 4.0 juga memerlukan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dunia usaha harus memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam mengembangkan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya mengoptimalkan keuntungan semata. Pemerintah juga perlu berperan dalam menciptakan regulasi yang memastikan adopsi teknologi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami dan mengikuti perkembangan teknologi untuk dapat memanfaatkannya secara bijak. Kondisi tersebut, akan tercermin melalui transformasi digital yang diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional

Integrasi ekonomi domestik dan regional merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Aspek ini menjadi salah satu isu strategis dalam upaya mempercepat daya saing ekonomi daerah. Sehingga kontribusi pembentukan modal bruto serta ekspor barang dan jasa terhadap PDRB dapat meningkat secara positif. Oleh sebab itu, didukung infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai serta penguatan transformasi sistem perdagangan berbasis digitalisasi.

4. Penyediaan infrastruktur kewilayahan yang merata dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Isu pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dengan tetap mengoptimalkan pengembangan potensi daerah yang berkeadilan yang ditandai meningkatnya indeks infrastruktur jalan dan indeks layanan infrastruktur dasar. Mengingat pertumbuhan yang terjadi masih belum merata antar kecamatan, dimana masih terjadi daerah-daerah dengan tingkat pendapatan rendah tumbuh namun belum mampu mengejar daerah-daerah berpendapatan tinggi. Ketika pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, biasanya wilayah yang sudah maju tersebut, menjadi semakin tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang lambat bertumbuh. Selain itu, perlu penyediaan fasilitas infrastruktur serta sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik, serta meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan pemantapan dan penguatan penyediaan layanan masyarakat di fasilitas publik untuk

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat di fasilitas publik dan peningkatan kualitas lingkungan dengan kemitraan para pihak

Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan atau SDG's salah satu 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu; penanganan perubahan iklim dan pemeliharaan ekosistem sungai/darat. Kondisi tersebut, ditandai adanya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan menurunnya indeks resiko bencana.

Isu lain yang tidak kalah pentingnya terhadap isu lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah timbulan sampah seiring tingginya laju pertumbuhan penduduk. Saat ini upaya pengurangan dan penanganan timbulan sampah belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memadai dan diikuti keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengurangan timbulan sampah akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk dibutuhkan roadmap pengurangan dan penanganan sampah yang terstruktur dan terukur supaya peningkatan jumlah timbulan sampah dapat ditangani secara optimal. Selain itu, perlu didorong masyarakat untuk menjadikan hasil limbah rumah tangga dan sumber lainnya bernilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima

Isu penguatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pelayanan publik yang prima dan ASN yang profesional ini, merupakan tuntutan dalam era saat ini dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang ditandai meningkatnya nilai reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan reformasi birokrasi yang menjadi harapan masyarakat agar terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan efisien serta menciptakan pelayanan publik yang optimal dan lebih baik. Oleh karena itu, para ASN dituntut untuk menyesuaikan diri dan mengikuti arus perubahan saat ini. Saat ini penggunaan teknologi informasi telah diimplementasikan diberbagai lini pada sistem pemerintahan atau disebut e-government, terutama dalam kaitannya dengan proses birokrasi atau pelayanan publik. Namun saat ini bisa dikatakan belum bisa menjawab tantangan dan belum memenuhi harapan masyarakat.

Tabel II.245 Isu Strategis Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi pertanian dan Perkebunan 2. Letak Geografis yang strategis 3. Potensi Pariwisata 4. Identitas Budaya	1. Tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer (DAU, DBH Pusat, DAK dan DBH Provinsi) 2. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia 3. Minimnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata 4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 5. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 6. Pengamalan nilai adat istiadat dan agama 7. Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah	1. Rendahnya akses terhadap sumber air bersih dan sanitasi permukiman layak; 2. Meningkatnya pencemaran air sungai akibat PETI; 3. Rendahnya distribusi pangan dengan harga terjangkau; 4. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur air limbah, limbah B3 dan pengelolaan sampah; 5. Pengelolaan konservasi sumber daya air tanah, air permukaan dan kawasan konservasi serta rehabilitasi lahan kritis belum optimal.	1. Perdamaian dan Keamanan: Menyelesaikan Konflik yang Bencana 2. Pembiayaan untuk Pembangunan: Berinvestasi dalam Masa Depan yang Berkelanjutan 3. Aksi Iklim: Jalan Menuju COP 30 dan Negosiasi IMO 4. Kesetaraan Gender: Merefleksikan Kemajuan di Tengah Kemunduran	1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen 2. Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif 3. Industri mampu bertahan di zona ekspansi 4. Investasi pemerintah dan swasta meningkat 5. Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 3. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas 4. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya 5. Pusat Kebudayaan Melayu 6. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Masyarakat yang menjunjung adat istiadat dan keagamaan 2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 4. Penyediaan infrastruktur kewilayahan yang merata dan peningkatan kualitas lingkungan hidup 5. Pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara 6. Penyaluran kredit tumbuh positif		

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

III.1 VISI DAN MISI

Visi dan misi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah gambaran arah dan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai. Visi adalah gambaran ideal masa depan daerah, sedangkan misi adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi dan misi daerah menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat 5 tahun. RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.

III.1.1 Visi

Visi merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh daerah. Visi harus jelas, inspiratif, dan dapat memotivasi semua pihak untuk bekerja bersama mewujudkannya. Visi kepala daerah terpilih Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi Visi Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 telah merujuk kepada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 – 2045, selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita berupa misi dari Presiden dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 serta mengikuti kaidah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 – 2029 adalah

Terwujudnya Kuantan Singingi yang BERadat, berdaya Saing, sejAhtera dan MAju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)

BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT :

1. memiliki makna filosofis penting dimana Kuantan Singingi menjadi Negeri bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya;
2. RPJMD sebagai tahap 1 pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045 dengan tahap transformasi : penguatan fondasi transformasi akan secara fokus utk mencapai visi jangka panjang daerah yaitu : KUANSING HEBAT;
3. BERSAMA juga memberi makna peran serta seluruh elemen dalam pembangunan yang dikenal dengan "tigo tungku sajorangan" yaitu : pemerintah, orang adat dan pemangku agama yg secara bersama berkontribusi secara nyata untuk pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi.

BERADAT : Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai adat istiadat sebagai motor penggerak pembangunan dalam suasana kehidupan masyarakat yang agamis sesuai dengan slogan “adat bersendi syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, sehingga mencerminkan masyarakat Kuantan Singingi yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur serta menjunjung tinggi nilai adat-istiadat dan religiusitas.

BERDAYA SAING : Kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Kabupaten Kuantan Singingi memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di kancah regional, nasional dan global.

SEJAHTERA : Pembangunan yang dilakukan berdampak pada kemakmuran masyarakat, secara utuh menyeluruh, mengurangi kemiskinan. Disamping itu, masyarakat juga menikmati pendidikan, merasakan fasilitas layanan kesehatan dan mampu mengimplementasikan kesetaraan gender;

MAJU : Pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat serta nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat disertai dengan ketersediaan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai.



Gambar III.1 Visi Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

PEMERINTAHAN KOLABORATIF :

1. Pemerintahan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama (secara internal);
2. Pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah secara langsung, bertujuan untuk melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik, serta berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif (secara eksternal).
3. Peran Tigo Tungku Sajorangan yaitu Pemimpin Pemerintah, Pemimpin Adat (Datuok/Ninik Mamak), dan Pemimpin Agama (Alim ulama) bersatu padu seiya sekata dalam mewujudkan kepemimpinan yang harmonis dengan slogan *“Basatu Nogori Maju”*.

III.1.2 Misi

Misi adalah penjabaran dari visi, yang berisi upaya-upaya konkret yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu (SMART). Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 5 misi yang tertuang sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang menjunjung nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang religious.

Kehidupan masyarakat Kuantan Singingi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan adat istiadat yang diwariskan turun temurun. Peran pemangku adat sangat strategis dalam pembinaan anak kemenakan, banyak tradisi adat penuh makna dan ajaran yang harus dilestarikan dan menjadi nilai kebiasaan yang membudaya di Nagori Rantau Kuantan. Nilai Adat Istiadat dalam lingkup masyarakat religius dengan meningkatkan kehidupan masyarakat yang "beragama maslahat" dan "berkebudayaan maju" berarti menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan maju dalam aspek keagamaan dan kebudayaan. "Beragama maslahat" menekankan pada penggunaan agama untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan bersama, sementara "berkebudayaan maju" mengacu pada pengembangan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kemudian membangun kehidupan sosial masyarakat yang harmonis memerlukan kerjasama dan toleransi di antara anggota masyarakat, serta pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman dengan adanya kesadaran, toleransi, kerukunan dan kolaborasi.

Misi 2 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Kabupaten Kuantan Singingi menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan visi daerah yang maju dan sejahtera. Melalui misi ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan siap bersaing di tengah dinamika global.

Fokus utama dari pembangunan SDM ini diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, serta membuka peluang kerja dan usaha yang lebih luas. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan akses pendidikan hingga ke daerah terpencil.

Di sisi lain, peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari misi ini. Masyarakat yang sehat adalah fondasi utama bagi SDM yang produktif dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan terus memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata, melalui pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, serta program promotif dan preventif untuk menurunkan angka penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat antar sektor pendidikan dan kesehatan, serta didukung oleh peran aktif masyarakat, pembangunan SDM di Kuantan Singingi diharapkan mampu menciptakan generasi yang unggul, inovatif, dan mampu membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih gemilang.

Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi wilayah yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata budaya dan alam. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Pemerintah Daerah menetapkan misi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk menggali, mengembangkan, dan mengelola potensi wilayah secara optimal melalui pendekatan yang berbasis pada inovasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada

sektor-sektor konvensional, tetapi juga mendorong munculnya pelaku usaha baru, wirausaha muda, serta industri kreatif yang mampu menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Dengan meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inovatif, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Program-program strategis akan difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku ekonomi lokal, penguatan UMKM, fasilitasi akses pasar dan pembiayaan, serta pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi digital dan teknologi tepat guna.

Sinergi antara sektor ekonomi dengan dukungan IPTEK akan menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui misi ini, Kuantan Singingi bergerak menuju masa depan ekonomi yang tangguh, modern, dan mampu memberikan kesejahteraan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan

Misi ini diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus pembangunan mencakup pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur dasar, perwujudan pembangunan wilayah kecamatan yang merata dan berkeadilan, sehingga ketimpangan antarwilayah akan semakin mengecil. Arah pembangunan wilayah kecamatan adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata dan terintegrasi.

Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air menjadi bagian penting dari misi ini, khususnya dalam upaya penyediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Investasi dan inovasi akan diarahkan pada peningkatan layanan air minum, pengelolaan air limbah, serta pelestarian sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur juga mencakup penyediaan jaringan listrik dan energi yang andal serta terjangkau, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, kegiatan industri, dan kenyamanan masyarakat. Di era digital, penguatan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi juga menjadi prioritas untuk mendukung transformasi kota yang maju dan modern.

Dengan pelaksanaan misi ini, Kabupaten Kuantan Singingi diarahkan untuk menuju kota metropolitan yang maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa depan.

Misi 5: Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima

Misi ini diwujudkan melalui peningkatan budaya birokrasi yang berakhlak yang difokuskan untuk mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bekerja lebih efektif, akuntabel dan transparan. Transformasi tata kelola difokuskan pada Kelembagaan tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, pelayanan publik berbasis TI. Birokrasi kolaboratif menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis, tidak hanya kolaborasi antar daerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya pun semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai berdasarkan misi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang lebih terukur dan spesifik, menggambarkan hasil atau kondisi yang ingin dicapai melalui kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat membantu mengarahkan sumber daya dan tindakan yang bersifat operasional serta menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi capaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan capaian strategis yang mencerminkan tingkat keberhasilan kinerja pembangunan dan berfungsi sebagai dasar dalam menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, tujuan dan sasaran dirumuskan melalui analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis jangka menengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi menjadi landasan untuk perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran ini merupakan dasar bagi pemilihan berbagai strategi pembangunan serta sarana untuk mengevaluasi efektivitas pilihan-pilihan tersebut. Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi adalah kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang disusun secara Awal, partisipatif, dan politis, melalui proses perumusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang berfungsi untuk menilai keberhasilan dan sebagai alat pengendalian serta evaluasi pelaksanaan RPJMD. Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memantau progres dan memastikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan target IKU mengacu pada sasaran visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi, serta indikator utama pembangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara pencapaian visi dan misi RPJPD dalam setiap periode lima tahunan.

Pada tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029, kinerja sasaran utama visi dan sasaran pokok pembangunan mengacu pada target-target tahun 2030 yang ditetapkan dalam RPJPD. Target kinerja sasaran utama dan indikator utama pembangunan RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045 akan dijabarkan secara rinci dalam dokumen RPJMD untuk memastikan pencapaian yang terukur dan terarah.

Tabel III.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)												
1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang religius	1.1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		Indeks Harmoni	Indeks	NA	6 – 6,5	6,5 - 7	7	7 - 7,5	7 - 7,5	8	
		1.1.1. Meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang agamis	Indeks Harmoni Religius	%	NA	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
		1.1.2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	Pemajuan budaya daerah (%)	%	73	92,62	93,61	94,7	95,54	96,8	98,2	
2. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2.1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	poin	74	74,28 - 74,36	74,65 - 74,91	75,12 - 75,47	75,60 - 76,03	76,08 - 76,6	76,57 - 77,18	
		2.1.1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,38	13,39	13,24	13,36	13,47	13,58	13,70	
			Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,14	9,34	9,54	9,74	9,94	10	10,14	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	71,14	72,88	74,12	76,45	78,16	80,82	82,34	
		2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	69,44	69,48	69,52	69,82	70,02	70,32	70,42	
			Jumlah Kematian Ibu	orang	4	4	3	3	2	1	1	
			Jumlah Kematian Bayi	orang	70	70	65	60	55	50	40	
			Jumlah Kematian Balita	orang	3	3	3	3	2	1	1	
			Prevalensi stunting	%	23,1	21,82	20,53	19,25	17,97	16,68	15,4	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)												
	2.2. Membangun kehidupan sosial berkualitas melalui ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender, dan peran pemuda		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	poin	65,55	66,8	67,9	69	70,1	71,1	72,0	
			Indeks Pembangunan Gender	poin	90,69	91,29	91,89	92,5	93,1	93,7	94,3	
		2.2.1. Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Perlindungan Anak	poin	64,52 (2023)	67,55	69,07	70,58	72,1	73,61	75,13	
			Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,47	0,526	0,513	0,501	0,488	0,475	0,463	
		2.2.2. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	N/A	35	37	40	42	44	47	
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah	3.1. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inovatif didukung oleh IPTEK		PDRB Perkapita	Juta	145,45	147,32 - 156,52	159,41 - 173,02	176,49 - 203,72	193,58 - 234,41	210,66 - 265,11	230,78 - 282,52	
			Pertumbuhan Ekonomi	%	3,12	3,31 - 3,48	3,63 - 3,86	3,95 - 4,24	4,05 - 4,61	4,10 - 4,99	4,20 - 5,37	
			Indeks Inovasi Daerah	poin	49,09	51,19	53,28	55,38	57,48	59,57	61,67	
			Rasio Gini	rasio	0,262	0,258 - 0,261	0,255 - 0,259	0,252 - 0,257	0,248 - 0,254	0,245 - 0,252	0,242 - 0,250	
		3.1.1. Meningkatnya	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	25,99	26,13	26,27	26,40	26,54	26,68	26,82	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)												
		kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	36,85	36,97	37,08	37,20	37,31	37,43	37,54	
			Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,98	2	3,22	4,44	5,66	6,88	8,1	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,49	66,12	68,45	70,12	71,98	73,22	75,14	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48	2,28-2,35	2,22-2,24	2,15-2,20	2,09-2,16	2,02-2,12	1,96-2,09	
			Inflasi	%	1,24	1,18 - 1,23	1,14 - 1,18	1,10 - 1,14	1,05 - 1,10	1,00 - 1,05	0,95 - 1,00	
		3.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,8	74,23	75,12	76,28	77,49	78,68	80,06	
			Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	52,41	52,98	53,32	54,01	54,86	55,28	55,89	
		3.1.3. Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	7,89	7,08 - 7,25	6,97 - 7,18	6,87 - 7,12	6,77 - 7,06	6,67 - 7,00	6,58 - 6,95	
		3.1.4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	%	20,57	25,24-31,89	30,32-36,97	35,41-42,06	40,49-47,14	45,57-52,18	50,65-57,24	
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,91	4,00-4,20	5,21-5,90	6,1-6,89	7,10-7,90	8,15-8,95	9,20-9,93	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)												
		3.1.5. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa	%	76	57,34	59,18	61,01	62,85	64,68	66,52	
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan	4.1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan		Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	%	73,03	74,58	75,96	77,52	79,32	81,72	86,43	Angka target diperoleh dari rata-rata Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap; Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak; dan Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak
		4.1.1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang merata	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	56,33	58,42	60,11	62,33	64,26	66,17	68,69	
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,05	77,78	78,99	80,2	82,41	86,62	96,84	
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	86,73	87,56	88,8	90,05	91,29	92,54	93,78	
		4.1.2. Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Indeks Konektivitas	poin	1,44	1,46	1,49	1,52	1,54	1,57	1,58	
	4.2. Meningkatkan pembangunan yang berawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	68,82	76,51	76,72	76,93	77,14	77,35	77,57	
		4.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	poin	60,37	74,98	75,18	75,38	75,58	75,78	75,98	
			Indeks Kualitas Lahan	poin	49,68	71,98	72,01	72,08	72,15	72,22	72,29	
			Indeks Kualitas Udara	poin	87,02	80,39	80,69	80,99	81,29	81,59	81,89	
		4.2.2. Meningkatnya kualitas	Indeks Risiko Bencana	poin	131,2	130,89	130,58	130,28	129,97	129,66	129,35	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)												
		pengendalian dan mitigasi bencana										
5. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima	5.1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	67,55	68,12	68,82	69,15	69,92	70,13	70,97	
		5.1.1. Meningkatnya profrsionalisme ASN dan birokrasi ber-AKHLAK	Indeks Profesionalisme ASN	poin	75,8	77,65	79,23	81,43	83,34	85,12	87,78	
		5.1.2. Meningkatnya budaya birokrasi yang melayani dan kolaboratif	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,53	4,58	4,6	4,62	4,64	4,66	4,68	
			Indeks Reformasi Hukum	poin	96,8	97	97,2	97,6	98	98,2	98,4	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	87,08	88,22	90,22	92,44	94,56	96,23	98,12	
			Indeks Integritas Nasional	poin	63,12	70,12-74,52	70,98-75,3	71,83-76,08	72,69-76,86	73,54-77,64	74,40-78,42	
		5.1.3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Transformasi Digital Nasional	poin	N/A	51,50	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75	

Sumber: Hasil Analisis

III.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan rencana tindakan yang bersifat komprehensif dan adaptif dalam merespons dinamika lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal. Strategi ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah, dengan memperhatikan tahapan pembangunan, penetapan lokus prioritas intervensi, serta pemilihan program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD. Dalam pelaksanaannya, strategi pembangunan menggunakan pendekatan *strategy-focused management* yang menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis kinerja.

Lebih lanjut, strategi ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah pembangunan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas program, serta mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan disusun secara inklusif, berbasis data, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Secara konseptual, strategi pembangunan dirumuskan dalam satu kerangka logis yang menghubungkan satu atau lebih sasaran strategis yang memiliki keterkaitan tematik. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antarsektor dan antarwilayah, sehingga setiap intervensi pembangunan memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap pencapaian visi daerah. Dengan demikian, strategi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya berperan sebagai dokumen arah kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen penggerak transformasi daerah menuju tata kelola yang berkelanjutan, inovatif, dan berorientasi hasil.

Berdasarkan pendekatan perumusan strategi pembangunan yang mengedepankan prinsip integrasi dan berorientasi pada hasil (*strategy-focused management*), strategi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi dirumuskan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Strategi ini disusun tidak hanya sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029, tetapi juga secara konsisten diarahkan untuk mendukung tercapainya visi jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045. Dalam implementasinya, strategi ini dijabarkan melalui pentahapan pembangunan tahunan yang memuat prioritas dan fokus pembangunan secara tematik. Penetapan tema tahunan tersebut diselaraskan dengan tahapan implementasi RPJMD, sehingga setiap langkah kebijakan memiliki kesinambungan dan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis kepala daerah. Dengan demikian, pendekatan ini menjadikan pelaksanaan pembangunan lebih terukur, adaptif terhadap dinamika yang berkembang, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat..



Gambar III.2 Pentahapan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030

Tabel III.2 Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026-2030

2026	2027	2028	2029	2030
Tema: Perkuatan Fondasi Transformasi dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah, Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif	Tema: Peningkatan Fondasi Tranformasi melalui Pengembangan SDM Berkualitas yang Beradat, Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Tema: Pemerataan pembangunan perekonomian yang inklusif berbasis masyarakat dan peningkatan daya saing daerah yang Maju	Tema: Memantapkan Kesejahteraan dan pemerataan dan kemandirian ekonomi yang berdaya saing	Tema: Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, Berdaya Saing, Sejahtera dan Maju
1. Transformasi Sosial: • Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dasar • Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat • penguatan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan aktifitas sosial masyarakat	1. Transformasi Sosial: • Peningkatan kualitas dan akses layanan dasar bagi masyarkat • Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan • peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan	1. Transformasi Sosial: • Pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat • Perluasan pemerataan pembangunan dan hasil hasil pembangunan • Pemerataan pembangunan infrastruktur di masyarkat dalam rangka pembangunan ekonomi yang bekelanjutan	1. Transformasi Sosial: • Pemantaapan kualitas layanan dasar bagi masyarakat • Pemantapan hasil hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat • Pemantapan kualitas infrastruktur di masyarkat dalam mewujudkan pembanguna ekonomi berkelanjutan	1. Transformasi Sosial: • Terwujudnya layanan dasar yang berkualitas dan merata bagi masyarakat • Terwujudnya pembangunan yang partisipatif di masyarakat • Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata
2. Transformasi Ekonomi: • Penguatan kebijakan pembangunan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian komoditi unggulan daerah • Penguatan ketahanan pangan daerah	2. Transformasi Ekonomi: • Percepatan Hilirisasi pertanian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan • peningkatan ketahanan pangan daerah • Percepatan Pengembangan pariwisata, ekonomi kerakyatan dan ekonomi	2. Transformasi Ekonomi: • pengembangan perluasan pembangunan infrastruktur dalam mendukung hilirisasi pertanian • peningkatan ketahan pangan berbasis potensi daerah	2. Transformasi Ekonomi: • Pemantapan kualitas hilirisasi pertanian berkelanjutan berbasis potensi daerah dan berkelanjutan • pemantapan kualitas ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal	2. Transformasi Ekonomi: • Hilirisasi pertanian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan • terwujudnya ketahanan pangan di daerah • terwujudnya infrastruktur pariwisata yang mantap di daerah, dalam mendorong pembangunan daerah

2026	2027	2028	2029	2030
Tema: Perkuatan Fondasi Transformasi dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah, Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif	Tema: Peningkatan Fondasi Tranformasi melalui Pengembangan SDM Berkualitas yang Beradat, Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Tema: Pemerataan pembangunan perekonomian yang inklusif berbasis masyarakat dan peningkatan daya saing daerah yang Maju	Tema: Memantapkan Kesejahteraan dan pemerataan dan kemandirian ekonomi yang berdaya saing	Tema: Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, Berdaya Saing, Sejahtera dan Maju
• Penguatan kelembagaan dan kebijakan pariwisata daerah berbasis budaya dan kerifan local • Penguatan kebijakan dan infrastruktur ekonomi kreatif di Masyarakat • Penguatan infrastruktur ekonomi digital di Masyarakat • Penguatan tatakelola dan kebijakan investasi berbasis potensi daerah dan padat karya berorientasi ekonomi hijau	• kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan • peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi kreatif berbasis budaya dan potensi daerah • Percepatan akses ekonomi digital dalam pembangunan ekonomi masyarakat • Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam rangka membangun konektivitas wilayah serta mengembangkan dan mebangun pusat pusat pertumbuhan ekonomi	• pengembangan pembangunan infratraktur pariwisata daerah • Pengembangan kualitas ekonomi kreatif berbasis budaya dan potensi daerah • Peningkatan kualitas dan akses ekonomi digital dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi masyarakat • Pemerataan pembangunan infrastruktur dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar daerah	• pemantapan kualitas infrastruktur pariwisata daerah • pemantapan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan potensi ekonomi lokal • Perluasan akses pembangunan ekonomi digital di masyarakat • Peningkatan kualitas konektivitas wilayah secara berkelanjutan	• meningkatnya peran ekonomi kreatif berbasis potensi dan budaya daerah dalam perekonomian daerah • Akses ekonomi digital yang berkualitas bagi Masyarakat • Terwujudnya konektivitas wilayah yang mantap dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Transformasi Tata Kelola: • Penataan struktur organisasi dan tata kerja yang transparan, akuntabel dan partisipatif	3. Transformasi Tata Kelola: • Penguatan organisasi dan tata kerja pemerintah yang	3. Transformasi Tata Kelola: • Pemantapan tata kerja organisasi pemerintah berbasis Digitalisasi	3. Transformasi Tata Kelola: • Pemantapan tata kerja organisasi pemerintah yang transparan,	3. Transformasi Tata Kelola: • Perwujudan pemerintahan yang profesional,

2026	2027	2028	2029	2030
Tema: Perkuatan Fondasi Transformasi dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah, Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif	Tema: Peningkatan Fondasi Tranformasi melalui Pengembangan SDM Berkualitas yang Beradat, Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Tema: Pemerataan pembangunan perekonomian yang inklusif berbasis masyarakat dan peningkatan daya saing daerah yang Maju	Tema: Memantapkan Kesejahteraan dan pemerataan dan kemandirian ekonomi yang berdaya saing	Tema: Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, Berdaya Saing, Sejahtera dan Maju
• Penguatan Aparatur yang profesional berbasis merit system • Penguatan kebijakan iklim investasi yang kompetitif • Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik yang dekat dan terjangkau • Peningkatan perencanaan partisipatif bagi seluruh lapisan masyarakat • Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah • Penataan pendapatan daerah melalui tata kelola yang efektif dan efisien Peningkatan kebijakan kerjasama antar daerah yang berbatasan	transparan, akuntabel dan partisipatif • Peningkatan kualitas SDM Aparatur segi keterampilan, pengetahuan dan akhlak • Penguatan kebijakan pembangunan infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan • Penguatan layanan publik dengan ramah dan beradat • Peningkatan perencanaan partisipatif berbasis lingkungan hidup berkelanjutan • Peningkatan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang kompeten • Peningkatan pendapatan daerah melalui tata kelola yang efektif dan efisien • Peningkatan kualitas kebijakan kerjasama antar daerah yang berbatasan	• Penguatan Aparatur dengan pilar beradat dan bertaqwa • Peningkatan kebijakan pembangunan infrastruktur bagi Ekonomi Berkelanjutan • Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik berbasis digital • Penguatan perencanaan partisipatif berbasis ekonomi inklusif • Penguatan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang kompeten • Peningkatan pendapatan daerah melalui tata kelola terintegrasi dan digitalisasi • Penguatan kebijakan kerjasama yang berkualitas dan berkelanjutan	akuntabel dan partisipatif berbasis digitalisasi • Penguatan Birokrasi yang adaptif dan proaktif • Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur bagi Ekonomi Berkelanjutan • Penguatan pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat • Penguatan perencanaan partisipatif berbasis kemandirian ekonomi • Penguatan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang berintegritas • Perluasan sumber pendapatan daerah secara kolaboratif dan efisien • Pemantapan kebijakan kerjasama yang berkualitas dan berkelanjutan	berintegritas, inovatif dan adaptif • Perwujudan kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan • Perwujudan kebijakan perencanaan partisipatif, dan kerjasama untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri

2026	2027	2028	2029	2030
Tema: Perkuatan Fondasi Transformasi dengan Meningkatkan Daya Saing Daerah, Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif	Tema: Peningkatan Fondasi Tranformasi melalui Pengembangan SDM Berkualitas yang Beradat, Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Tema: Pemerataan pembangunan perekonomian yang inklusif berbasis masyarakat dan peningkatan daya saing daerah yang Maju	Tema: Memantapkan Kesejahteraan dan pemerataan dan kemandirian ekonomi yang berdaya saing	Tema: Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, Berdaya Saing, Sejahtera dan Maju
4. Landasan Transformasi: • Penguatan nilai sosial adat dan budaya dalam pembangunan karakter manusia dalam lingkungan yang religius • Penguatan peran agama dan adat dalam masyarakat sebagai modal pembangunan	4. Landasan Transformasi: • percepatan penerepan nilai nila agama dan adat dalam pembangunan karakter manusia dalam lingkungan yang religius • Peningkatan peran tokoh agama , tokoh adat dan tokoh masyarkat untuk meningkatkan kerukunan masyarakat	4. Landasan Transformasi: • peningkatan kualitas penerepan nilai nilai agama dan adat dalam pembangunan karakter manusia dalam lingkungan yang religius • perluasan peran dan partisipasi kelembagaan di masyarakat dalam pembangunan	4. Landasan Transformasi: • peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis • peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarkat dalam pembangunan daerah	4. Landasan Transformasi: • Perwujudan kualitas hidup Masyarakat yang berlandaskan nilai adat dan istiadat dalam lingkungan masyarakat yang religius

Sumber: Hasil Analisis

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang dirumuskan sebagai penjabaran langsung dari misi kepala daerah, serta diselaraskan dengan strategi pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD. Arah kebijakan menjadi panduan substantif dalam merancang program dan kegiatan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berorientasi hasil. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas, seluruh perangkat daerah memiliki pedoman operasional dalam melaksanakan pembangunan yang konsisten dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Perumusan dan penetapan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 tidak hanya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, serta selaras dengan strategi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi juga merujuk pada arah kebijakan tahap pertama pada perodesasi RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan RPJMD memiliki kesinambungan strategis terhadap pembangunan jangka panjang daerah, terutama pada tahap pertama perodesasi RPJPD. Dengan demikian, pembangunan lima tahunan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari proses pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah daerah.

Selaras dengan pendekatan tersebut, arah kebijakan juga berperan sebagai instrumen penghubung antara perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, sekaligus menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan. Adapun rincian arah kebijakan Kabupaten Kuantan Singingi selama periode RPJMD 2025–2029 disajikan pada bagian berikutnya sebagai acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah.

Tabel III.3 Perumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	ARAH KEBIJKAN
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)	
1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang religius	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
	Penguatan kelembagaan adat
	Pelestarian nilai budaya dan sejarah
	Integrasi nilai kebudayaan, adat istiadat dalam kurikulum sekolah
2. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 10 tahun pendidikan dasar)
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
	Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Perpustakaan
	Mengembangkan Upaya Pelestarian dan Digitalisasi Koleksi Buku dan Naskah
	Memperkuat Tata Kelola dan Profesionalisme Perpustakaan

VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)	
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
	Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan program KB dengan edukasi, layanan kesehatan reproduksi, dan partisipasi masyarakat.
	Pengembangan keterampilan dan kompetensi pemuda
	Meningkatkan Akses dan Pembinaan dalam Kewirausahaan
	Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Olahraga Pemuda
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah	Pembangunan dan Penguatan Industri Berbasis Komoditi Unggulan
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai strategi untuk memperkuat promosi, meningkatkan daya tarik, dan penguatan keamanan dan regulasi investasi
	Penguatan kapasitas, pendampingan, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif serta peran penguatan peran koperasi dalam perekonomian
	Penguatan ekonomi syariah melalui percepatan sertifikasi halal, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM, pengembangan kebijakan, penguatan kemitraan, serta riset pendukung untuk mendorong pembangunan ekonomi
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
	Peningkatan daya saing perdagangan melalui penguatan sarana dan prasarana perdagangan
	Penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui kemitraan lintas sektor, pelatihan kompetensi bersertifikat, dan perlindungan tenaga kerja yang inklusif.
	Penguatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan modernisasi Pertanian
	Penguatan pengendalian inflasi daerah
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)	
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif, permodalan, keterampilan, dan peluang usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan
	Perkuatan kelembagaan pilar-pilar sosial, KAT dan Restorasi Sosial, dalam pemberdayaan Sosial masyarakat miskin, individu dan lembaga kesejahteraan Sosial
	Perkuatan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas di PEMDA dan BUMD
	Penguatan dana sosial syariah dalam mendukung perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif
	Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan merata
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: • Fasilitasi penyiapan lahan, sinkronisasi tata ruang, dan dukungan perizinan untuk pembangunan pembangkitan tenaga listrik dan jaringan ketenagalistrikan, terutama green/low-carbon electricity.; • Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; • Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; • Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; • Fasilitas kesehatan bagi pekerja; • Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; • Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; • Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
	Mendukung pembangunan ketenagalistrikan di daerah
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman serta penguatan tata kelola pertanahan

VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)	
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Fasilitasi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
2. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima	Penguatan manajemen ASN berbasis merit melalui digitalisasi kinerja, internalisasi nilai BerAKHLAK, serta pembangunan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Riau yang profesional dan bebas korupsi. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Penguatan tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Penguatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah Penguatan sistem perencanaan daerah yang berkualitas serta terintegrasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

VISI/MISI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradab, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)	
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
	Penguatan kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui: intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) • penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb) • peningkatan kualitas belanja daerah • optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) • serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	Penguatan inovasi tata kelola pemerintahan
	Penguatan integrasi dan perluasan akses layanan publik satu pintu berbasis kebutuhan masyarakat
	Digitalisasi sistem pelayanan publik untuk mendorong efisiensi dan keterjangkauan layanan
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: • penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; • peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta • peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital..

Sumber: Hasil Analisis

Secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dirumuskan menjadi fondasi utama untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini juga mengacu pada tahapan transformasi pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 yang dirancang secara bertahap, dengan fokus transformasi tahunan yang telah dirumuskan sebagai acuan. Pendekatan bertahap ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan secara sistematis dan terarah dalam kerangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi tersebut disajikan lebih lanjut dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
1. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang religius	1.1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1.1.1. Meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang agamis	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Penguatan sistem keamanan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Fasilitasi dialog lintas etnis dan agama untuk memperkuat harmoni sosial.
			Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	Internalisasi nilai budaya lokal dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.
		1.1.2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	Penguatan kelembagaan adat	Penguatan peran dan legalitas lembaga adat dalam pembangunan daerah.
			Pelestarian nilai budaya dan sejarah	Revitalisasi dan promosi budaya serta sejarah lokal.
			Integrasi nilai kebudayaan, adat istiadat dalam kurikulum sekolah	Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya daerah.
2. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2.1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	2.1.1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 10 tahun pendidikan dasar)	Memperluas akses pendidikan dasar secara menyeluruh dan merata
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas dan transportasi peserta didik sesuai wilayah
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan secara merata dan inklusif
			Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Mengembangkan pembinaan bakat dan prestasi peserta didik
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Meningkatkan insentif dan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional guru
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Menjamin distribusi guru dan penguatan kompetensi di seluruh wilayah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
			Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Perpustakaan	Menyediakan layanan perpustakaan digital dan fisik yang inklusif dan mudah diakses
			Mengembangkan Upaya Pelestarian dan Digitalisasi Koleksi Buku dan Naskah	Digitalisasi koleksi literatur lokal dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat budaya
			Memperkuat Tata Kelola dan Profesionalisme Perpustakaan	Meningkatkan kapasitas SDM perpustakaan dan sistem manajemen layanan literasi
		2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Memperluas cakupan layanan kesehatan dasar secara merata di seluruh wilayah
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Menguatkan sistem manajemen mutu layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua kelompok
			Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Meningkatkan edukasi dan penyediaan sarana sanitasi dan air bersih yang layak di lingkungan masyarakat
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Melaksanakan imunisasi terpadu dan kampanye kesehatan berbasis masyarakat
			Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Menyediakan insentif, perlindungan kerja, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara adil
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Memperkuat peran keluarga dan kader posyandu dalam edukasi, pendampingan, serta pemantauan status gizi anak melalui integrasi program stunting lintas sektor
	2.2. Membangun kehidupan sosial berkualitas melalui ketahanan keluarga,	2.2.1. Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari	Meningkatkan layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan secara komprehensif dan terintegrasi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
	pengarusutamaan gender, dan peran pemuda		kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta pelibatan aktif dalam forum-forum pembangunan daerah
			Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan program KB dengan edukasi, layanan kesehatan reproduksi, dan partisipasi masyarakat.	Memperluas cakupan layanan KB dan edukasi kesehatan reproduksi melalui pendekatan keluarga dan pemberdayaan kader posyandu
		2.2.2. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan daerah	Pengembangan keterampilan dan kompetensi pemuda	Meningkatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi pemuda melalui pelatihan vokasional, penguatan soft skills, dan perluasan akses terhadap program pembinaan dan kemitraan dunia usaha
			Meningkatkan Akses dan Pembinaan dalam Kewirausahaan	Mendorong pembentukan inkubasi usaha pemuda dan akses pembiayaan wirausaha melalui program kolaboratif lintas sektor.
			Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Olahraga Pemuda	Mengembangkan sarana olahraga dan program pembinaan atlet muda secara berjenjang dari tingkat sekolah hingga kabupaten.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah	3.1. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inovatif didukung oleh IPTEK	3.1.1. Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Pembangunan dan Penguatan Industri Berbasis Komoditi Unggulan	Mendorong pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah melalui penguatan rantai pasok dan kemitraan usaha
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Meningkatkan integrasi sektor unggulan daerah ke dalam rantai pasok regional dan global melalui kerja sama internasional, fasilitasi ekspor, penguatan SDM, dan pengembangan kawasan ekonomi strategis.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
			Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai strategi untuk memperkuat promosi, meningkatkan daya tarik, dan penguatan keamanan dan regulasi investasi	Mengoptimalkan sistem promosi dan layanan investasi digital yang terintegrasi serta menjaga stabilitas keamanan investasi dan efisiensi regulasi investasi
			Penguatan kapasitas, pendampingan, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif serta peran penguatan peran koperasi dalam perekonomian	Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif melalui pendampingan berkelanjutan, akses pembiayaan yang inklusif, serta penguatan peran kelembagaan koperasi dalam rantai nilai ekonomi lokal
			Penguatan ekonomi syariah melalui percepatan sertifikasi halal, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM, pengembangan kebijakan, penguatan kemitraan, serta riset pendukung untuk mendorong pembangunan ekonomi	Mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang berdaya saing melalui sinergi kelembagaan, peningkatan literasi, dan fasilitasi pengembangan produk halal untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Mengembangkan kapasitas koperasi berbasis hilirisasi komoditas unggulan melalui modernisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi digital.
			Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan destinasi, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pembiayaan dan kemitraan pelaku usaha.
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Menata dan mengembangkan daya tarik wisata alam, budaya, dan perkotaan secara partisipatif melalui kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
			Peningkatan daya saing perdagangan melalui penguatan sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta sistem distribusi barang untuk mendukung efisiensi pasar.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
		3.1.2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui kemitraan lintas sektor, pelatihan kompetensi bersertifikat, dan perlindungan tenaga kerja yang inklusif.	Memperkuat kemitraan lintas sektor untuk pengembangan kompetensi kerja bersertifikat dan perlindungan tenaga kerja secara inklusif dan berkelanjutan
			Penguatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan modernisasi Pertanian	Mendorong pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui modernisasi teknologi, kelembagaan petani, dan integrasi hulu-hilir.
			Penguatan pengendalian inflasi daerah	Memperkuat sistem pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi TPID, stabilisasi pasokan, dan pemanfaatan data harga secara digital
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Meningkatkan akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan bergizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
			Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	Optimalisasi modernisasi sistem budidaya pertanian melalui adopsi teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) yang difokuskan utamanya pada wilayah sentra produksi pangan utama di Kabupaten Kuantan Singingi. Implementasi dilakukan melalui penguatan peran pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: • Pemerintah Pusat melalui intervensi Lokasi prioritas Kawasan swasembada pangan di Kabupaten Kuantan Singingi • Pemerintah Provinsi melalui program Prioritas Riau Berdaya Saing (Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
				Pemerintah Kabupaten melalui program unggulan kepala daerah Kuansing Berdaya Saing (bantuan bibit, pupuk dan pakan, pembinaan kelompok tani)
			Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pengembangan bibit dan varietas unggul daerah berorientasi ekspor melalui kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Meningkatkan akses petani terhadap input produksi pertanian ramah lingkungan dan terjangkau melalui insentif, riset, dan distribusi terpadu.
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Membangun dan merehabilitasi infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pascapanen yang menunjang daya saing hasil
			Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Memperkuat pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan skema insentif-disinsentif.
			Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan terjangkau untuk mendukung produktivitas perikanan budidaya
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung perikanan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing produk perikanan.
	3.1.3. Menurunnya tingkat kemiskinan		Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif, permodalan, keterampilan, dan peluang usaha untuk mendorong peningkatan pendapatan	Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan usaha.
				Fasilitasi akses permodalan dan pendampingan usaha melalui skema pembiayaan yang mudah diakses,

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
		3.1.4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Perkuatan kelembagaan pilar-pilar sosial, KAT dan Restorasi Sosial, dalam pemberdayaan Sosial masyarakat miskin, individu dan lembaga kesejahteraan Sosial	termasuk hibah dan pembiayaan tanpa bunga, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
				Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi
				Menguatkan kapasitas kelembagaan sosial dan komunitas adat dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.
				Optimalisasi penguatan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui afirmasi kebijakan di PEMDA dan BUMD
				Fasilitasi koordinasi dan sinergi pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di tingkat kabupaten melalui kerjasama dengan BAZNAS daerah, lembaga amil zakat, dan organisasi masyarakat.
		3.1.5. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa	Penguatan dana sosial syariah dalam mendukung perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Peningkatan kapasitas kelembagaan ZISWAF lokal, termasuk pelatihan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
				Pengembangan literasi dan edukasi masyarakat terkait ZISWAF dan keuangan syariah untuk memperluas partisipasi serta meningkatkan penghimpunan dana sosial.
				Fasilitasi skema inovatif pemanfaatan dana sosial syariah melalui pemberdayaan ekonomi produktif, UMKM, dan program perlindungan sosial masyarakat miskin
				Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dalam tata kelola pembangunan serta pemberdayaan ekonomi dan sosial berbasis partisipasi.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan	4.1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan	4.1.1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang merata	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan merata	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Pemerintah yang berkualitas dan merata
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Integrasi perencanaan tata ruang berbasis ekosistem dan lanskap ekologis melalui pemanfaatan data spasial, zonasi adaptif, dan koordinasi multisektor.
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim.	Mengintegrasikan aspek risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang
			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: • Fasilitasi penyiapan lahan, sinkronisasi tata ruang, dan dukungan perizinan untuk pembangunan pembangkitan tenaga listrik dan jaringan ketenagalistrikan, terutama green/low-carbon electricity.; • Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; • Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; • Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; • Fasilitas kesehatan bagi pekerja; • Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; • Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; • Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja	Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri secara terintegrasi melalui penyediaan air baku, penguatan digitalisasi, pengelolaan limbah non-B3 skala lokal, penyediaan layanan dasar dan sosial bagi tenaga kerja, serta fasilitasi dan dukungan terhadap ketersediaan listrik ramah lingkungan..
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air baku dan air minum melalui pengembangan infrastruktur terpadu, penguatan kelembagaan penyedia layanan, dan integrasi pengelolaan sumber daya air.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
			Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Peningkatan kualitas pengelolaan dan konektivitas jalan daerah dan jalan desa secara terpadu dan berkelanjutan
			Mendukung pembangunan ketenagalistrikan di daerah	Mendukung perluasan akses dan pemanfaatan energi listrik melalui fasilitasi kerja pembangunan kelistrikan ramah lingkungan serta penguatan data wilayah belum berlistrik
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman serta penguatan tata kelola pertanahan	Meningkatkan akses dan kualitas sarana air bersih, sanitasi, serta PSU permukiman melalui penguatan infrastruktur dasar dan tata kelola pertanahan yang terintegrasi dan berbasis spasial
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Optimalisasi penyediaan perumahan layak dan terjangkau merata di seluruh wilayah
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Meningkatkan akses sanitasi layak dan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi, pemberdayaan desa, dan kolaborasi lintas sektor untuk percepatan eliminasi praktik BABS.
			Fasilitasi percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Mengoptimalkan peran pemerintah kabupaten dalam mendukung reforma agraria melalui inventarisasi tanah potensial, penyediaan data spasial dan sosial, fasilitasi redistribusi bersama BPN, pemberdayaan penerima manfaat, serta integrasi dalam dokumen perencanaan daerah
		4.1.2. Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Mengembangkan sistem transportasi publik perkotaan yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan efisien melalui penguatan jaringan, sarana pendukung
		4.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
	4.2. Meningkatkan pembangunan yang berawasan lingkungan		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Penguatan pelestarian dan rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan lindung, serta penguatan kelembagaan pengelola ekosistem alami.
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan model ekonomi sirkular
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Kemudahan dan penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pembiayaan, serta pemberian insentif daerah bagi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, industri kecil, ekonomi hijau dan energi terbarukan
		4.2.2. Meningkatnya kualitas pengendalian dan mitigasi bencana	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Penguatan sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, dan penyusunan rencana kontinjensi pada wilayah rawan.
5. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima	5.1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	5.1.1. Meningkatnya profesionalisme ASN dan birokrasi ber-AKHLAK	Penguatan manajemen ASN berbasis merit melalui digitalisasi kinerja, internalisasi nilai BerAKHLAK, serta pembangunan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif.	Optimalisasi penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan kinerja, internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif di lingkungan pemerintah daerah.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
			Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Riau yang profesional dan bebas korupsi.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi ASN dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan sistem karir ASN berbasis meritokrasi melalui penerapan manajemen talenta, sistem penghargaan dan sanksi yang adil, serta peningkatan kesejahteraan berbasis capaian kinerja.
		5.1.2. Meningkatnya budaya birokrasi yang melayani dan kolaboratif	Penguatan tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan daerah melalui penataan organisasi, penguatan kapasitas manajerial, serta digitalisasi tata kelola berbasis kinerja dan kebutuhan daerah
			Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan daerah melalui penguatan pendidikan politik, penyediaan ruang aspirasi publik, serta keterbukaan informasi untuk mewujudkan demokrasi daerah yang sehat dan inklusif.
			Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Meningkatkan efektivitas peraturan daerah melalui penyederhanaan, harmonisasi, dan penyusunan regulasi berbasis kebutuhan daerah.
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penguatan dan penataan kelembagaan serta meningkatkan kapasitas aparatur daerah secara adaptif untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan responsif.
			Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Meningkatkan kerja sama antardaerah melalui koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan lintas wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
			Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan	Mendorong penerapan otonomi daerah yang berbasis karakteristik dan kapasitas daerah melalui penataan ulang kewenangan dan hubungan keuangan pusat-daerah yang adil dan berkelanjutan
			Penguatan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan partisipatif yang berbasis teknologi dan berorientasi pada peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemda melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terukur dan terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan daerah
			Penguatan sistem perencanaan daerah yang berkualitas serta terintegrasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.	Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, terukur, dan terintegrasi dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
			Penguatan kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.	Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset melalui tata kelola keuangan yang transparan, digital, dan akuntabel untuk mendukung kemandirian fiskal daerah
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui: - intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) - penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan dan belanja, pemanfaatan pembiayaan alternatif, serta sinergi perencanaan-penganggaran dengan prioritas nasional

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
			daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb) • peningkatan kualitas belanja daerah • optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) • serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Mengembangkan skema pembiayaan inovatif melalui kemitraan pemerintah-swasta dan blended finance untuk mendukung pembiayaan program prioritas daerah.
		5.1.3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis digital	Penguatan inovasi tata kelola pemerintahan	Peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
			Penguatan integrasi dan perluasan akses layanan publik satu pintu berbasis kebutuhan masyarakat	Optimalisasi penguatan integrasi dan digitalisasi layanan publik satu pintu yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan daerah.
			Digitalisasi sistem pelayanan publik untuk mendorong efisiensi dan keterjangkauan layanan	Penguatan digitalisasi sistem pelayanan publik yang adaptif, terintegrasi dan efisien serta peningkatan kualitas layanan yang merata
			Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: • penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; • peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor	Mengembangkan ekosistem digital daerah melalui perluasan infrastruktur TIK, peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi di sektor prioritas untuk mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT)				
			strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta • peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	

Sumber: Hasil Analisis

III.4 ARAH KEBIJAKAN SPASIAL

III.4.1 Arah Kebijakan Spasial Kabupaten Kuantan Singingi

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi dasar utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan wilayah dalam RPJMD diarahkan untuk menciptakan keterpaduan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan produktivitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara struktural, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi dua fungsi ruang utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung dirancang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, mencakup badan air seluas 4.451 hektare, kawasan hutan lindung seluas 44.851 hektare, dan kawasan konservasi berupa Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan luas 54.129 hektare. Beberapa di antaranya telah dialokasikan sebagai zona tunda (holding zone) untuk keperluan pembangunan terbatas, seperti kawasan perkebunan dan permukiman, dengan total luasan lebih dari 28.000 hektare. Kawasan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.

Kawasan budi daya dirancang untuk mengakomodasi berbagai kegiatan pembangunan yang produktif, mencakup tujuh kategori peruntukan, yaitu: kawasan hutan produksi seluas lebih dari 228.000 hektare, kawasan pertanian dengan dominasi perkebunan seluas 169.141 hektare, kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 5.409 hektare, kawasan perikanan budidaya seluas 294 hektare, kawasan industri seluas 1.591 hektare, kawasan permukiman yang terdiri dari kawasan perkotaan dan perdesaan dengan total luas 26.545 hektare, serta kawasan pertahanan dan keamanan seluas 7 hektare.

Untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, kawasan pariwisata yang tersebar di berbagai wilayah strategis diarahkan sebagai pusat pertumbuhan destinasi unggulan berbasis sumber daya alam dan budaya. Arah kebijakan wilayah ini difokuskan pada penguatan pemanfaatan ruang yang efisien, peningkatan konektivitas antar kawasan, perlindungan sumber daya alam, serta pengembangan sektor unggulan yang berbasis karakteristik wilayah.

Seluruh arah kebijakan wilayah tersebut akan menjadi landasan dalam penentuan lokasi prioritas pembangunan, penyusunan program sektoral, dan pengalokasian sumber daya dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, guna menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Tabel III.5 Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Konsentrasi Kawasan
1	Hulu Kuantan	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Terbatas • Pariwisata • Perikanan Budidaya • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan

No	Nama Kecamatan	Konsentrasi Kawasan
		• Zona Tunda HPT/Perkebunan • Zona Tunda HPT/Permukiman
2	Kuantan Mudik	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Terbatas • Hutan Produksi Tetap • Koramil • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPT/Perkebunan • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
3	Logas Tanah Darat	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Terbatas • Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPT/Perkebunan • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan

No	Nama Kecamatan	Konsentrasi Kawasan
4	Pangean	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Terbatas • Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPT/Perkebunan • Zona Tunda HPT/Permukiman • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
5	Pucuk Rantau	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Terbatas • Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPT/Perkebunan • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
6	Singingi	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Terbatas • Hutan Produksi Tetap • Koramil • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPT/Perkebunan • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan • Zona Tunda HPTetap/Permukiman

No	Nama Kecamatan	Konsentrasi Kawasan
7	Singingi Hilir	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Terbatas • Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Peruntukan Industri • Polsek • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPT/Perkebunan • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan • Zona Tunda HPTetap/Permukiman
8	Benai	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perikanan Budidaya • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
9	Cerenti	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Tetap • Koramil • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan

No	Nama Kecamatan	Konsentrasi Kawasan
10	Gunungtoar	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perikanan Budidaya • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
11	Inuman	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
12	Kuantan Hilir	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Tetap • Koramil • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
13	Kuantan Hilir Seberang	• Hutan Produksi Tetap • Pariwisata • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan

No	Nama Kecamatan	Konsentrasi Kawasan
14	Kuantan Tengah	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Hutan Produksi Tetap • KODIM & Polres • Koramil • Pariwisata • Perikanan Budidaya • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman • Zona Tunda HPTetap/Perkebunan
15	Sentajo Raya	• Hutan Produksi Dapat Dikonversi • Pariwisata • Perikanan Budidaya • Perkebunan • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan • Pertanian Pangan Berkelanjutan • Peruntukan Industri • Peternakan • Polsek • Tanaman Pangan • Zona Tunda HPK/Perkebunan • Zona Tunda HPK/Permukiman

Sumber: RTRW Kabupaten Kuantan Singingi 2024-2044

Sebagai kelanjutan dari arah kebijakan pembangunan wilayah, ditetapkan pula Kawasan Strategis Kabupaten yang menjadi titik fokus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelestarian nilai sosial budaya. Kawasan strategis ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan untuk untuk mendukung pembangunan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan.

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten diarahkan pada tiga wilayah utama, yaitu Kawasan Segitiga Emas Kuantan Tengah, Benai, dan Sentajo Raya; Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir; serta Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya. Ketiga kawasan ini memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kawasan Segitiga Emas dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pelayanan kesehatan, sehingga menjadi episentrum aktivitas sosial ekonomi yang mendukung dinamika kehidupan masyarakat. Sementara itu, Kawasan Peruntukan Industri Singingi dan Singingi Hilir difokuskan menjadi sentra kegiatan industri, guna menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan menyerap tenaga kerja lokal. Adapun Kawasan Pariwisata Kuantan Mudik dan sekitarnya diarahkan sebagai pusat destinasi wisata unggulan yang turut menggerakkan sektor perdagangan dan jasa melalui potensi budaya dan alam yang dimilikinya.

Untuk mendukung tujuan tersebut, arah pengembangan pada masing-masing kawasan difokuskan secara tematik. Kawasan Segitiga Emas diarahkan untuk pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, serta kawasan permukiman yang terintegrasi. Kawasan industri difokuskan pada pembangunan lingkungan industri yang terencana, dengan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang memadai. Sedangkan kawasan pariwisata difokuskan pada pengembangan destinasi wisata serta peningkatan kualitas layanan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan wisata.

Perwujudan dari kebijakan ini melibatkan serangkaian langkah konkret, seperti pengembangan penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan secara terpadu, pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung, dan penataan kawasan termasuk bangunan serta lingkungan agar selaras dengan peruntukannya. Selain itu, diterapkan pula kebijakan fiskal yang mendorong investasi, penyusunan perangkat insentif dan disinsentif, penguatan konektivitas antar kawasan, serta pengadaan lahan untuk pengembangan kawasan. Kolaborasi aktif dengan perguruan tinggi dan sektor swasta juga menjadi kunci penting dalam mendukung pengelolaan dan inovasi kawasan strategis ini. Tidak kalah penting, riset dan pengembangan terhadap inovasi di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif turut diprioritaskan guna memastikan bahwa pengembangan kawasan berjalan secara inklusif dan adaptif.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kabupaten diarahkan pada pengembangan wilayah Baserah–Inuman–Cerenti yang terletak di Kecamatan Baserah, Kecamatan Inuman, dan Kecamatan Cerenti. Wilayah ini memiliki nilai sejarah, seni, dan budaya khas Kuantan Singingi, sehingga ditetapkan sebagai pusat pengembangan pariwisata sejarah dan kebudayaan Kuantan Singingi. Tujuan utama dari pengembangan kawasan ini adalah untuk memperkuat identitas lokal, melestarikan warisan budaya, serta meningkatkan daya tarik wisata berbasis nilai-nilai tradisional yang hidup di tengah masyarakat

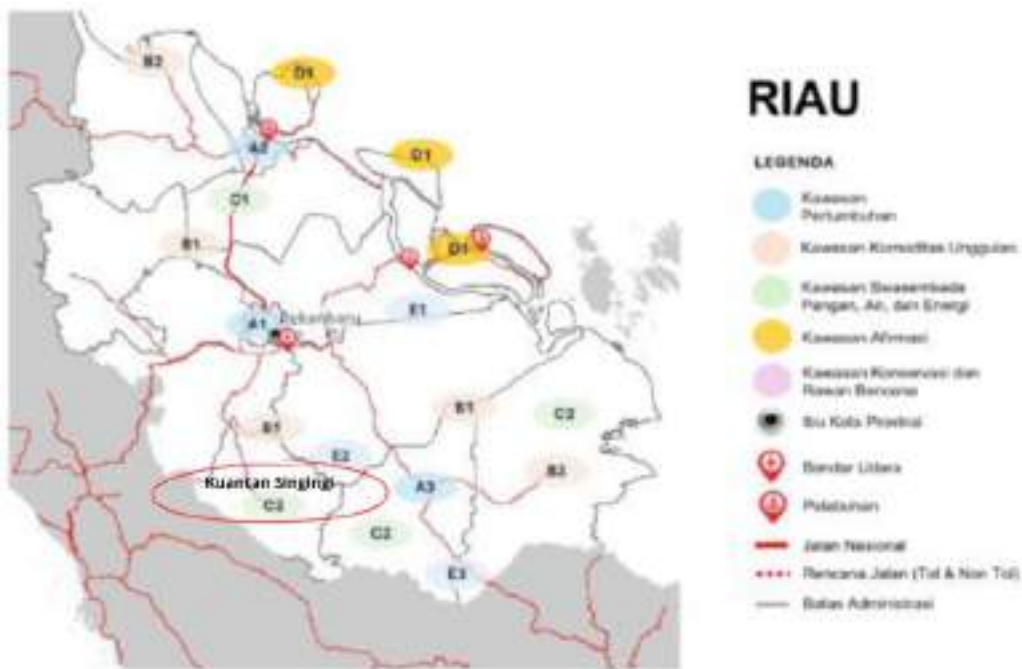
Pengembangan kawasan ini diarahkan pada integrasi fungsi pariwisata dan permukiman, agar mampu menciptakan ruang hidup yang harmonis antara pelestarian budaya dan kebutuhan pembangunan modern. Perwujudan dari kebijakan ini dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana pendukung yang memadai, penguatan penyelenggaraan dan tata kelola kawasan sosial budaya, serta pelaksanaan perlindungan dan penataan kawasan termasuk lingkungan dan bangunan. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan adat menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan juga didorong, terutama dalam pengembangan seni budaya, untuk menciptakan ekosistem sosial yang dinamis dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan kawasan Baserah–Inuman–Cerenti sebagai simbol kekayaan budaya daerah yang tidak hanya lestari, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

III.4.2 Arahan Pengembangan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, arah pengembangan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi diarahkan pada penguatan peran strategis daerah sebagai bagian dari kawasan prioritas nasional. Fokus pembangunan di wilayah ini mencerminkan sinergi antara potensi daerah dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan

energi yang berkelanjutan. Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi.

Arah pembangunan ini menempatkan Kuantan Singingi sebagai lokus penting dalam pencapaian target pembangunan regional dan nasional, yang akan ditopang oleh intervensi kebijakan strategis lintas sektor, termasuk optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penguatan infrastruktur dasar dan energi terbarukan.



Sumber: RPJMN 2025-2029

Gambar III.3 Arah Pengembangan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel III.6 Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pengembangan Daerah Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
C2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat pada D. I. Simandolak- Pangean - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura - Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui:

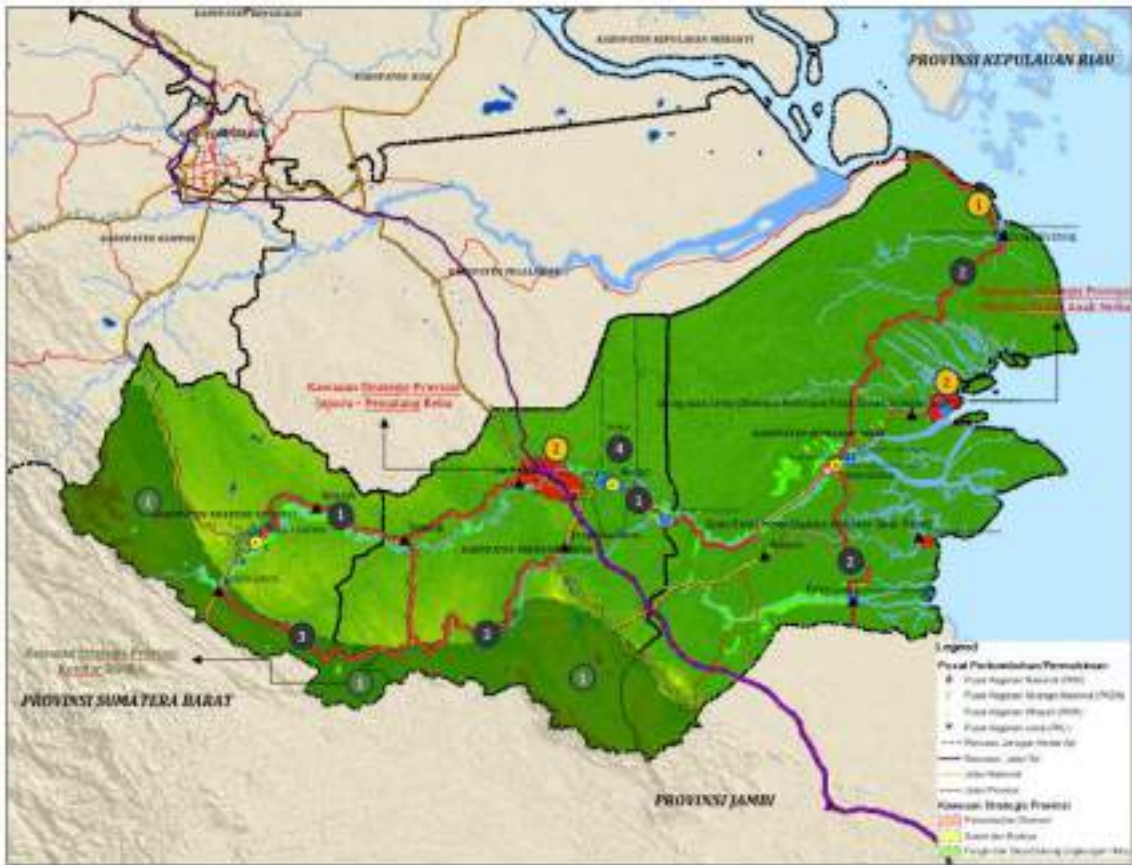
No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi PT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian

Sumber: RPJMN 2025-2029

III.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi dengan Pendekatan Spasial Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi

WP Gasing merupakan kawasan yang berbasis pada pengembangan pertanian dan industri hilir berkelanjutan. WP Gasing meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Indragiri Hilir yang diarahkan sebagai PKW, dan PKL di wilayah Riau bagian selatan. PKW di WP Gasing meliputi Taluk Kuantan, Rengat dan Tembilahan; serta PKL meliputi Lubuk Jambi, Baserah, Peranap, Air Molek, Pangkalan Kasai, Kempas, Pulau Kijang, Kuala Enok, Sungai Guntung, dan Gaung Anak Serka.

Sektor ekonomi unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perkebunan, pertanian hortikultura dan tanaman pangan, perikanan budidaya, industri hilir pertanian, serta pertambangan batubara. Pusat pengembangan klaster berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang nantinya akan dikembangkan sebagai pusat industri dan perdagangan. Di samping itu juga perlu Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkotaan Rengat dan sekitarnya untuk mulai menata kawasan perkotaan di WP Gasing ini. Berikut peta wilayah pengembangan Gasing.



Sumber: RPJMD Provinsi Riau 2025-2029

Gambar III.4 Peta Wilayah Pengembangan Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi (WP GASING)

Kebijakan pembangunan kewilayahan pada WP Gasing adalah:

1. Kebijakan untuk peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi:
 - Peningkatan dan pembangunan jalan lintas provinsi Peranap Simpang Ifa; Pangkalan Kasai-Lubuk Kandis-Simpang Ifa; Lubuk Jambi-Simpang Ibul-Simpang Ifa
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa)
 - Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat
 - Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
2. Kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan air baku melalui:
 - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
3. Kebijakan untuk pengelolaan lingkungan dilakukan melalui:
 - Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Sekitar Koridor Rimba (Riau, Jambi, Sumatera Barat)
4. Kebijakan untuk pengembangan ekonomi di wilayah ini diarahkan melalui:
 - Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub-sektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan budidaya

- Pelaksanaan kegiatan eksploitasi tambang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan
- Pengembangan industri hilir pertanian pada skala kecil-besar
- Pengembangan dan perlindungan kawasan komoditas prioritas industri (sawit, karet, dan kelapa)
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi
- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik.

5. Kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat

- Pengentasan kemiskinan, tahun 2024, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 7,89 persen
- Penurunan prevalensi stunting, tahun 2023, kabupaten Kuantan Singingi sebesar 23,0 persen
- Peningkatan Desa berkembang menjadi maju atau mandiri, tahun 2023 Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 41 desa.

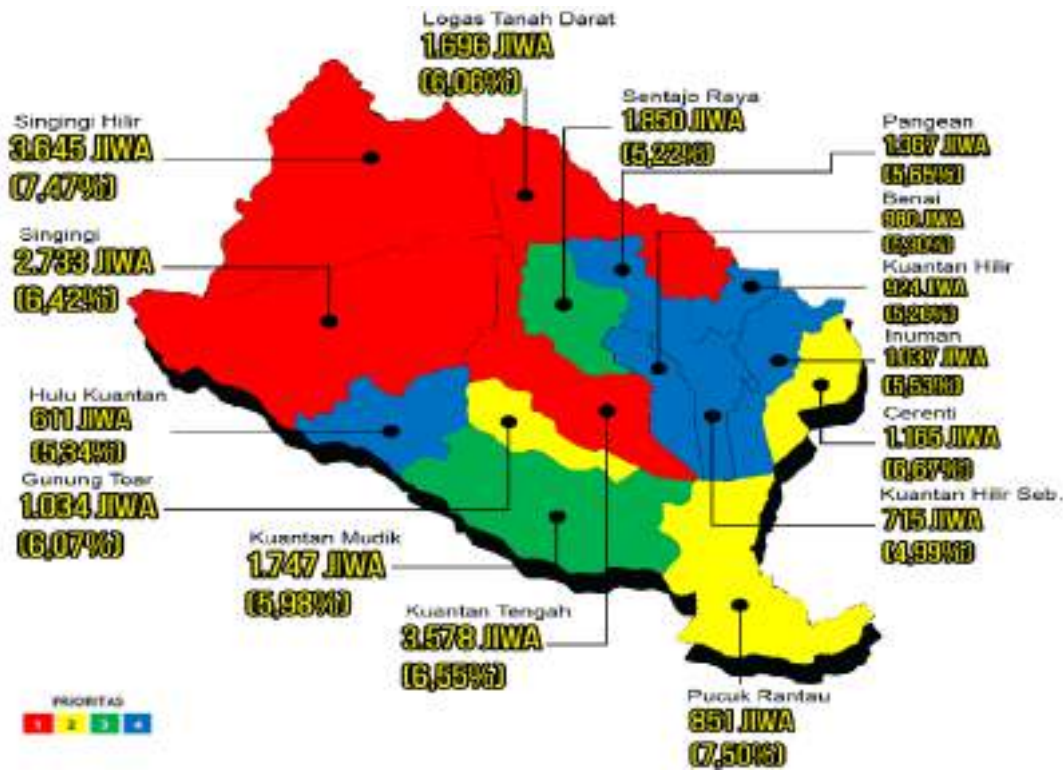
III.5 ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

III.5.1 Analisis Kuadran Wilayah

Untuk mencapai ketepatan sasaran program, penting menentukan lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi prioritas ini diperlukan dikarenakan tiap-tiap wilayah memiliki tingkat karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda. Sehingga intervensi programnya juga berbedabeda. Semuanya sesuai dengan karakteristik kemiskinan wilayah masing-masing. Penentuan lokasi prioritas yang dianalisis di sini merupakan rekomendasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari hasil olah perbandingan data tiap dimensi maka diperoleh Prioritas/Kuadran 1 (Merah), Prioritas/Kuadran 2 (Kuning), Prioritas/Kuadran 3 (Hijau), dan Prioritas/Kuadran 4 (Biru).

III.5.1.1 Kuadran Wilayah Kemiskinan Umum

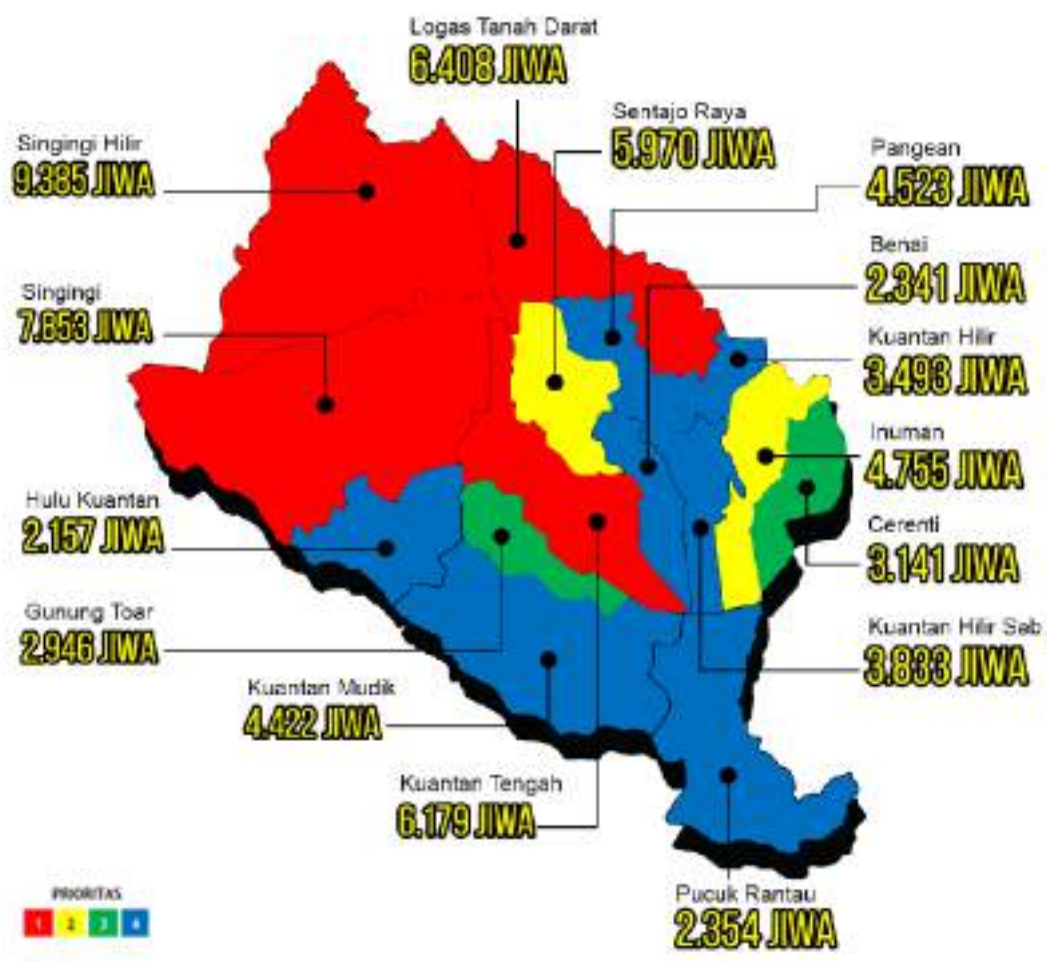
Penentuan lokasi prioritas terkait kemiskinan umum dilakukan dengan membandingkan antara persentase dan jumlah penduduk yang termasuk di kategori termiskin paling banyak yakni pada Desil 1 pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Penduduk yang teridentifikasi ke dalam Desil 1 diasumsikan sebagai lapis masyarakat paling miskin.



Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029
Gambar III.5 Lokasi Prioritas (Persentase dan Jumlah Desil 1) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.2 Kuadran Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

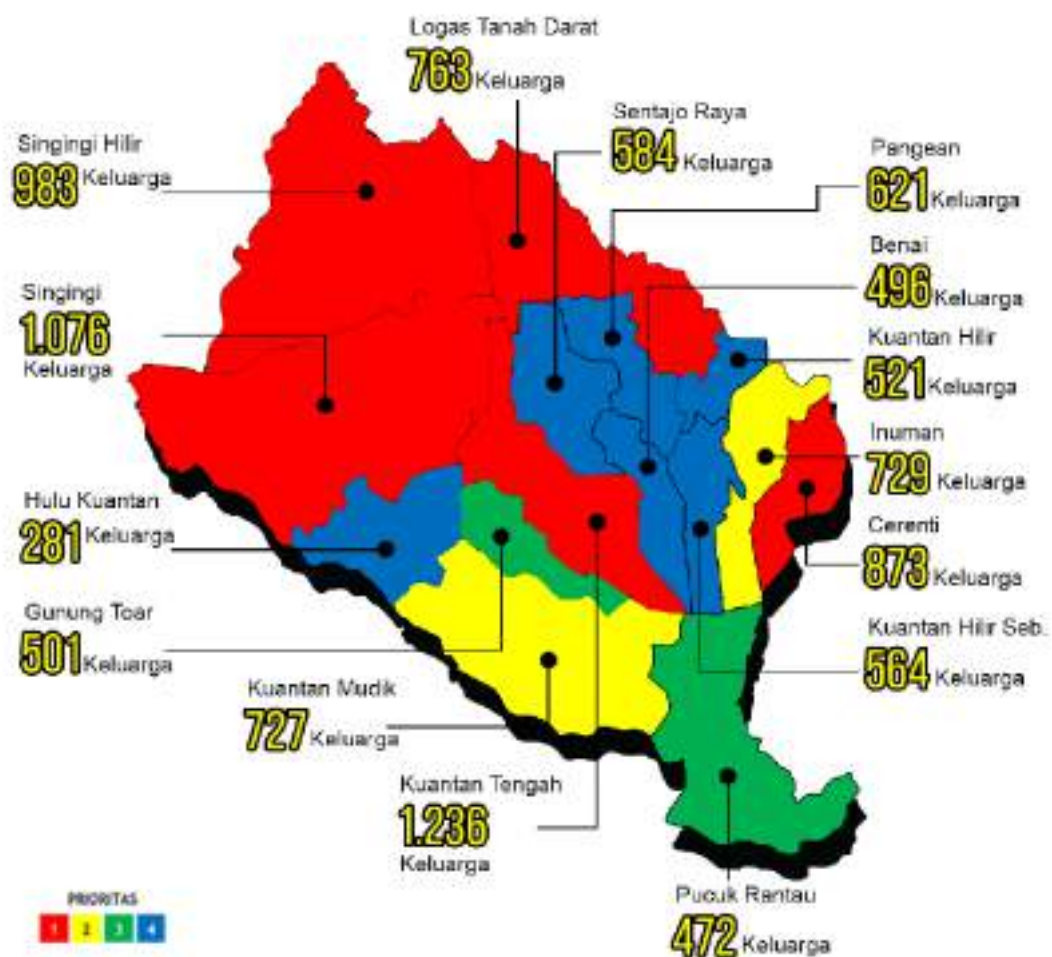
Pada program-program ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengendalian pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan, pelatihan dan penempatan kerja, pengembangan dan pemberdayaan UMKM, maupun lainnya difokuskan pelaksanaannya di kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran 1. Berdasarkan analisa pada bagian terdahulu, bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain tetapi kemiskinan masih cukup tinggi. Ini mengindikasikan angkatan kerja yang bekerja tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan agar keluar dari garis kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih cukup banyak didominasi lulusan SD Sederajat dan bahkan tidak memiliki ijazah SD. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data antara data rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk angkatan kerja yang berpendidikan SD Sederajat dan tidak juga yang tidak memiliki ijazah SD Sederajat di suatu kecamatan. Hal ini penting untuk meningkatkan skill individu dan intervensi lapangan pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik dari penduduk tersebut. Berikut daerah yang menjadi prioritas.



Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029
 Gambar III.6 Lokasi Prioritas Ketenagakerjaan (Persentase dan Jumlah Angkatan
 Kerjadian Ijazah <SD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.3 Kuadran Wilayah Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, persoalan *stunting* menjadi persoalan yang lekat dengan kemiskinan. Oleh karena itu menyandingkan data konsentrasi jumlah penduduk miskin dengan jumlah keluarga beresiko *stunting* penting untuk dilakukan. Hasil analisis data menyandingkan antara rasio jumlah penduduk miskin dengan jumlah keluarga beresiko *stunting* di suatu kecamatan menemukan beberapa kecamatan yang dapat dijadikan sebagai lokasi prioritas. Data yang dijadikan sandingan adalah data Regsosek untuk persentase pendudukmiskin (Desil 1) dan jumlah keluarga beresiko *stunting* yang diperoleh dari dataPensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Lokasi prioritas satu untuk menurunkan prevalensi *stunting* adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Cerenti, dan Kecamatan Logas Tanah Darat.

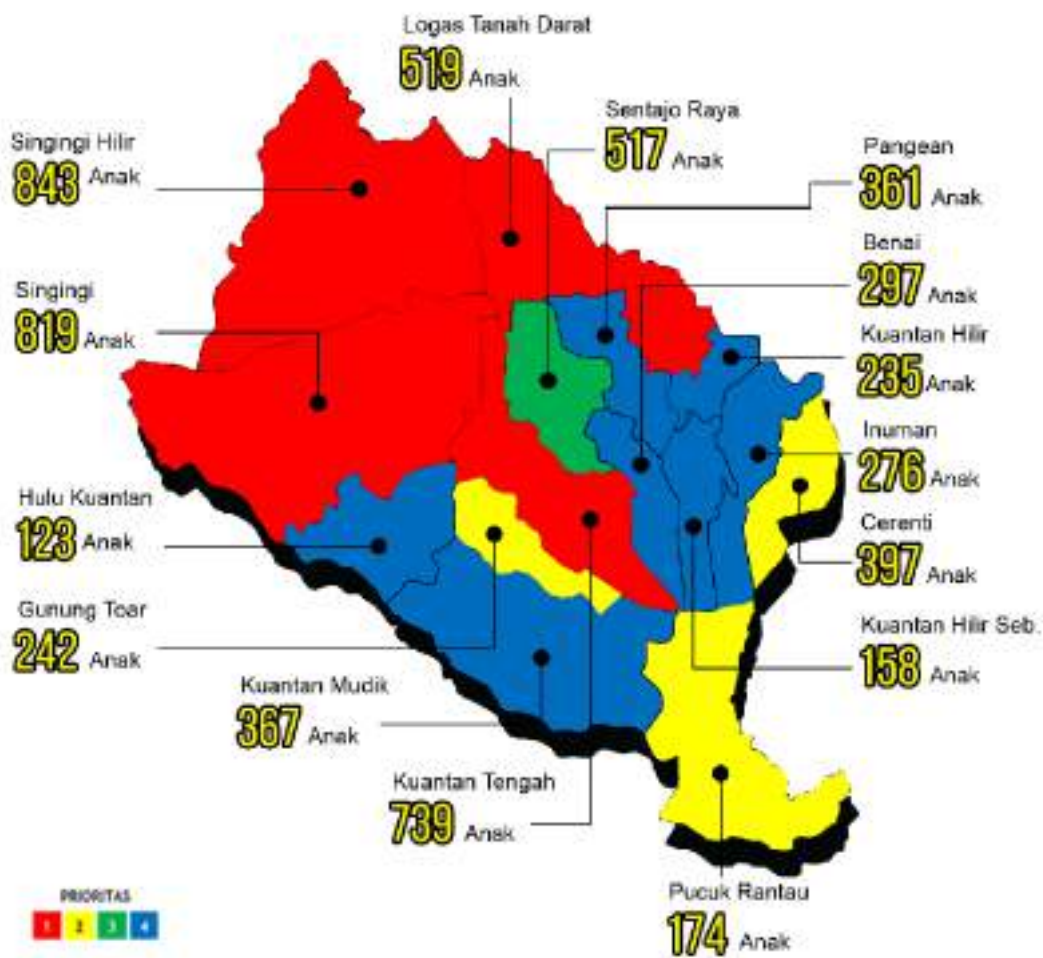


Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029
 Gambar III.7 Lokasi Prioritas (Persentase dan Jumlah Keluarga Beresiko Stunting)
 Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.4 Kuadran Wilayah Bidang Pendidikan

III.5.1.4.1 Lokasi Prioritas untuk Pendidikan Jenjang TK/PAUD

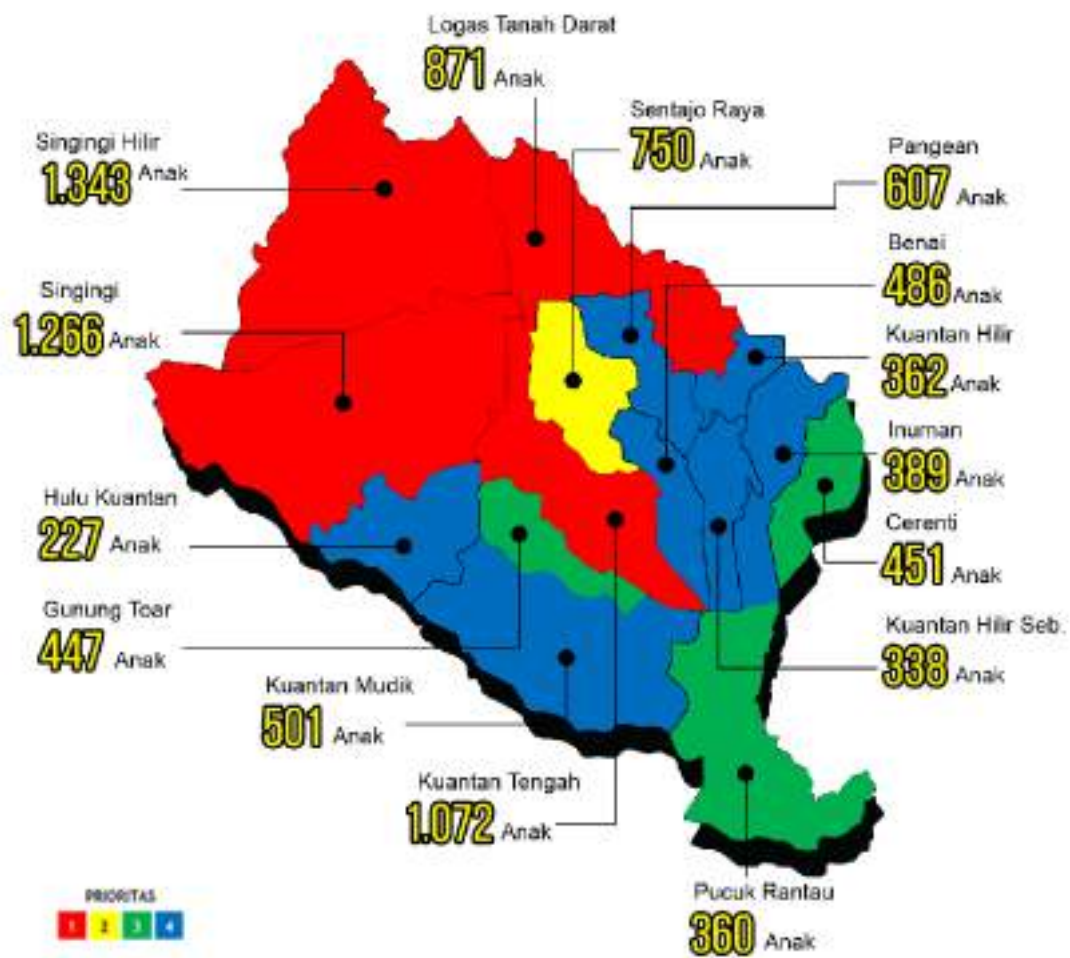
Dalam bidang pendidikan terdapat beberapa indikator yang berhubungan dengan kemiskinan. Pertama, terkait dengan partisipasi dalam pembelajaran terorganisir. Hasil dari pemaduan data antara rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah anak yang berusia tujuh tahun yang tidak atau belum bersekolah dimasing-masing kecamatan. Dari hasil analisis tersebut ditemukan adanya beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas. Kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran 1 sebagai lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan untuk anak di bawah tujuh tahun adalah Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Logas Tanah Darat.



Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029
 Gambar III.8 Lokasi Prioritas Peningkatan APK PAUD (Jumlah Anak <7 Tahun Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1)) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.4.2 Lokasi Prioritas untuk Pendidikan Jenjang SD/Sederajat

Pada program-program pendidikan yang berkaitan dengan jenjang SD/Sederajat dapat difokuskan pelaksanaannya di kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I. Penentuan lokasi prioritas ini didasarkan pada penyandingan data antara data rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah anak berusia SD yang belum/tidak bersekolah di suatu kecamatan. Dari hasil analisis tersebut ditemukan adanya beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas. Kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran 1 sebagai lokasi prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan untuk jenjang SD/Sederajat adalah Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Logas Tanah Darat.

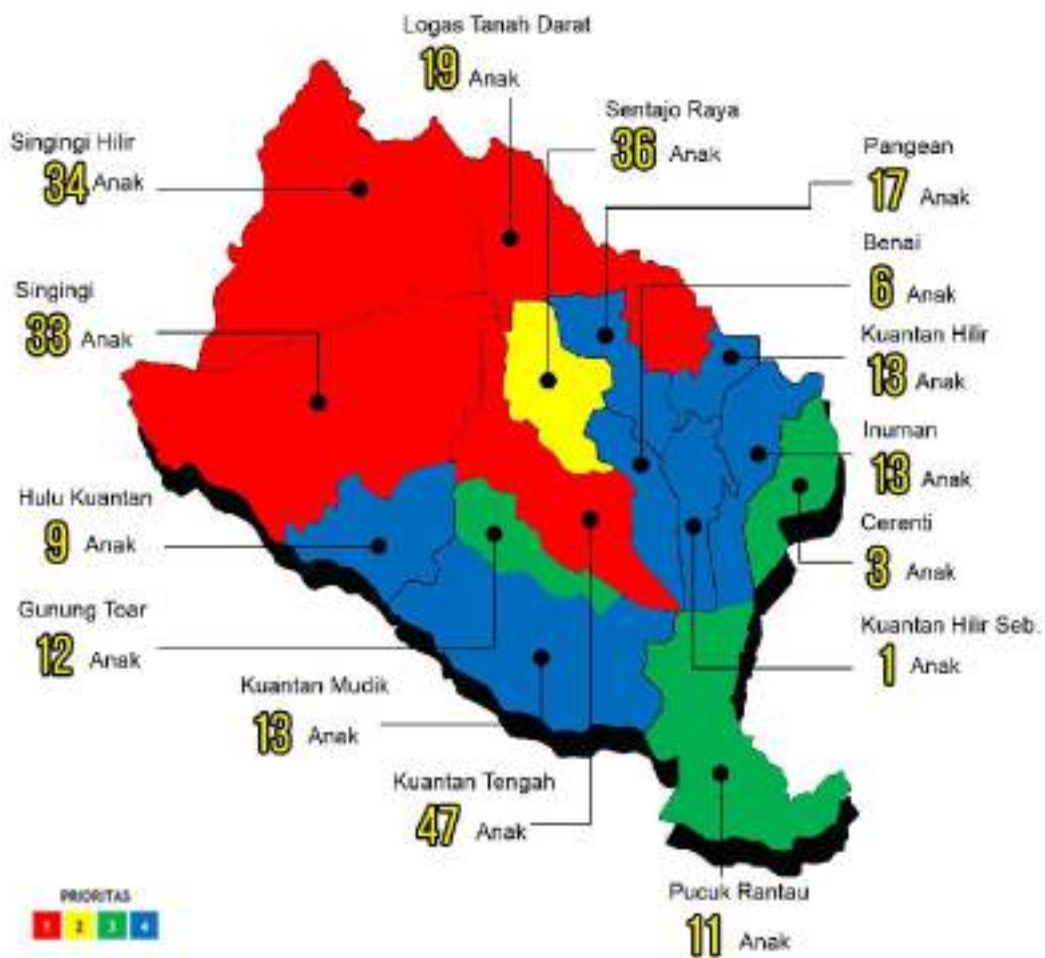


Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

Gambar III.9 Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SD (Jumlah Anak < 7 Tahun Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.4.3 Lokasi Prioritas untuk Pendidikan Jenjang SMP/Sederajat

Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi, dan Kecamatan Logas Tanah Darat. Kecamatan-kecamatan itulah yang menjadi lokasi prioritas untuk program-program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, khususnya jenjang SMP/ sederajat dan ditunjukkan pada Gambar III.9. Data ini diperoleh dengan memadukan antara rasio jumlah penduduk miskin di tiap kecamatan dengan jumlah anak berusia SMP yang belum/tidak bersekolah. Prioritasi golongan rentan pada bidang ini dapat menyasar anak-anak muda usia SMP dari golongan masyarakat miskin.

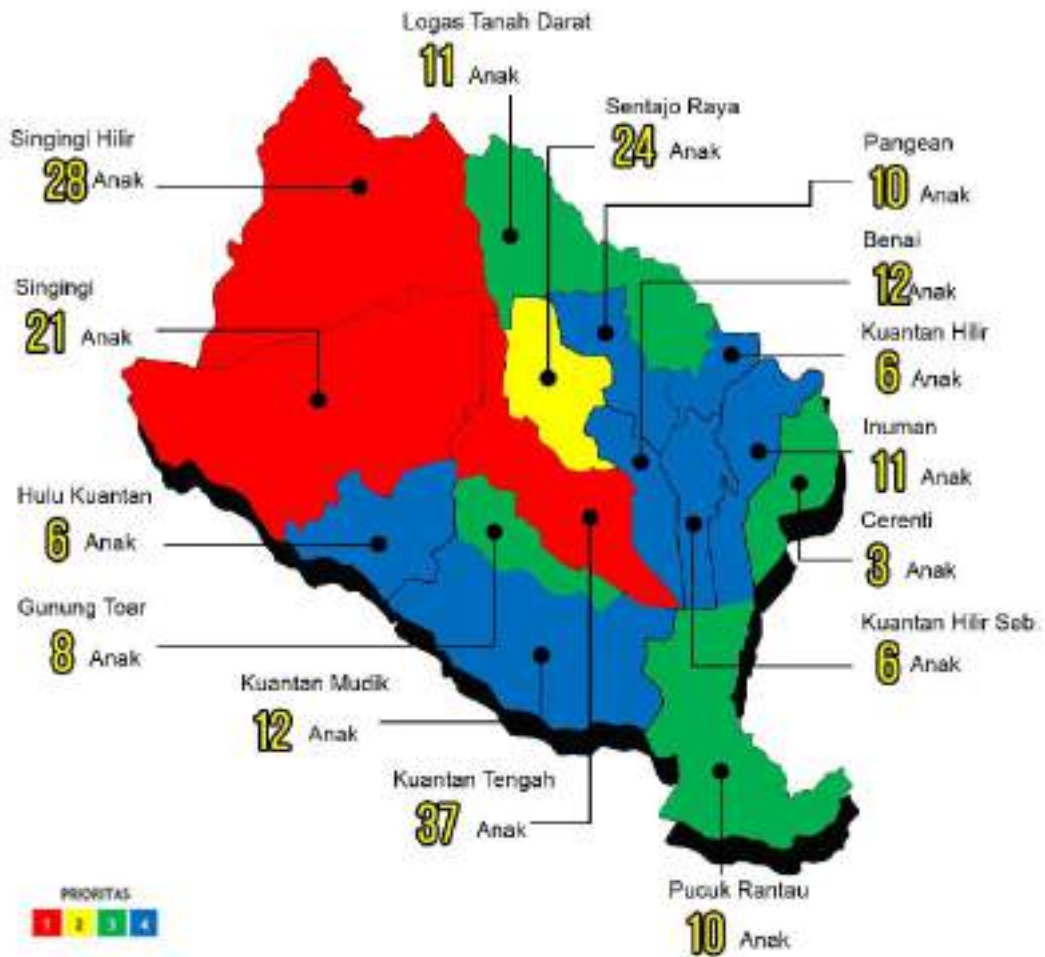


Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

Gambar III.10 Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SMP (Jumlah Usia SMP Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.4.4 Lokasi Prioritas untuk Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat

Hasil dari Sesuai dengan hasil analisis data yang ada, program-program penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan jenjang SMA/Sederajat dapat diprioritaskan di Kuadran I. Hasil analisis data antara rasio jumlah penduduk miskin dan jumlah anak berusia SMA yang belum/tidak bersekolah di suatu kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam Kuadran I adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi Hilir, dan Kecamatan Singingi. Sebagaimana Gambar III.10. Prioritasi pada bidang ini dapat menyasar anak-anak muda usia SMA dari golongan Masyarakat miskin.



Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

Gambar III.11 Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pendidikan Jenjang SMA (Jumlah Usia SMA Tidak/Belum Bersekolah dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.5 Kuadran Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

III.5.1.5.1 Lokasi Prioritas untuk Rumah Layak Huni

Berdasarkan analisis yang memadukan data jumlah penduduk miskin dan jumlah kepala keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, beberapa kecamatan yang telah menjadi lokasi prioritas program Penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar kembali menjadi lokasi prioritas. Kecamatan yang terdapat pada kuadran I lokasi prioritas tersebut antara lain Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi, dan Kecamatan Kuantan Tengah sebagaimana Gambar III.11.

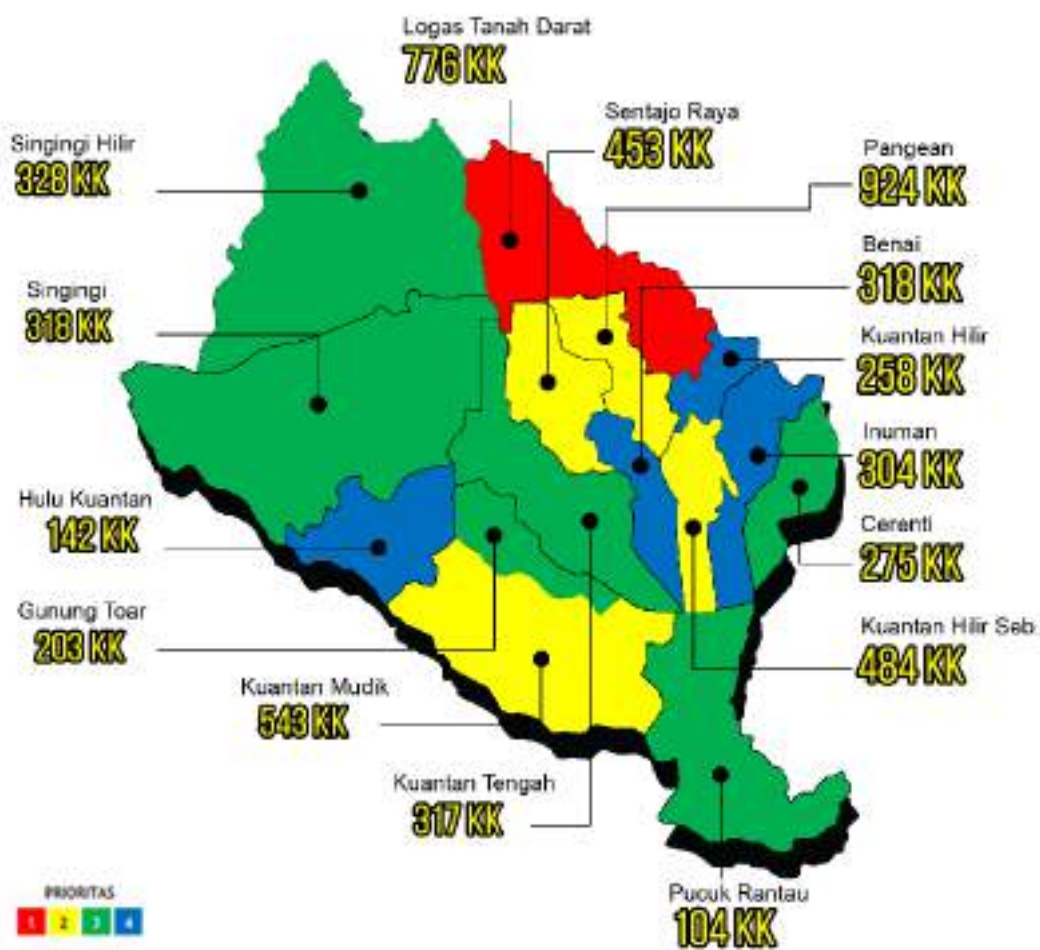


Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

Gambar III.12 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Masyarakat Miskin ke Hunian Layak (Jumlah Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.5.2 Lokasi Prioritas untuk Air Minum layak

Karena masih terdapat penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi yang kesulitan mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar, hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Lokasi prioritas yang terletak pada Kuaran 1, hasil dari pemaduan data antara jumlah keluarga dengan air minum tidak layak dan persentase Desil 1 adalah Kecamatan Logas Tanah Darat.

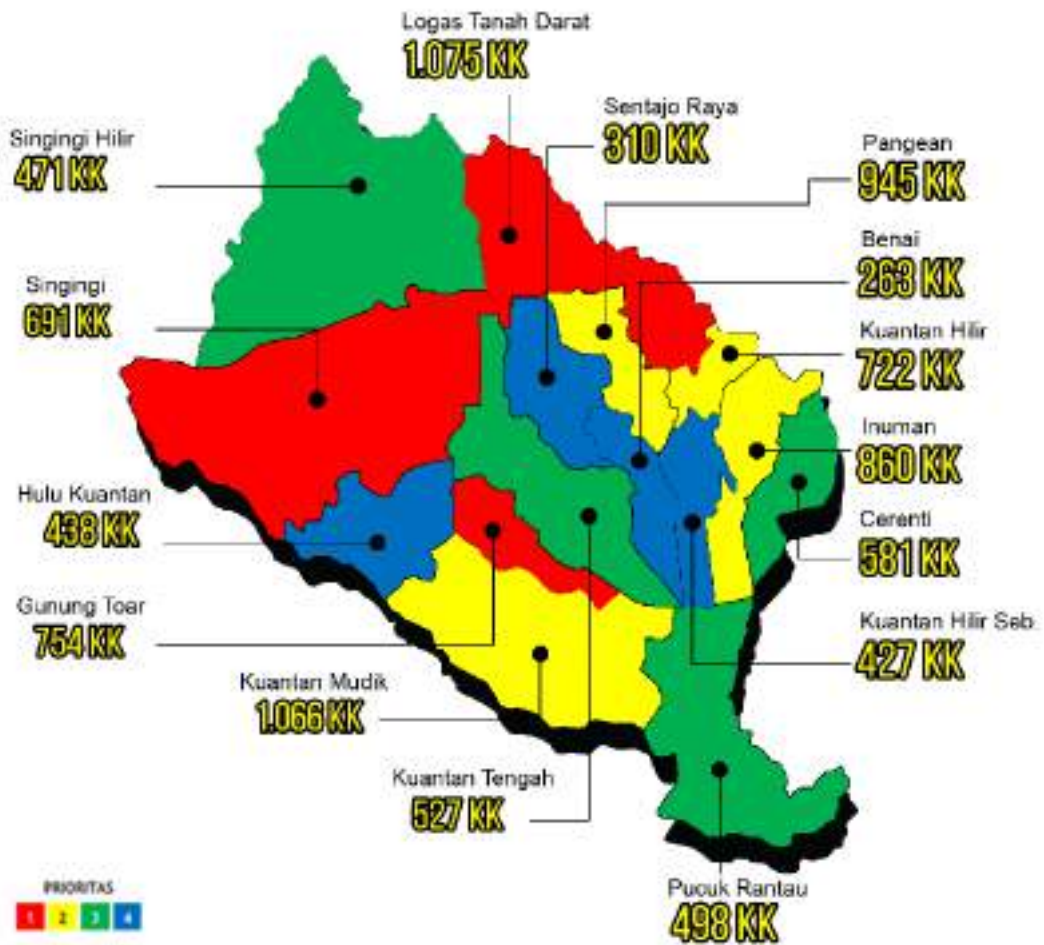


Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

Gambar III.13 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Akses Air Minum Layak (Jumlah Keluarga dengan Air Minum Tidak Layak dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.5.3 Lokasi Prioritas Sanitasi Layak

Hasil dari pemaduan data antara persentase penduduk miskin (desil 1) dengan jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki akses sanitasi layak menunjukkan beberapa kecamatan yang menjadi lokasi prioritas untuk program penanggulangan kemiskinan dalam kaitannya dengan bidang infrastruktur dasar khususnya sanitasi layak. Lokasi prioritas yang terdapat pada Kuadran 1 meliputi Kecamatan

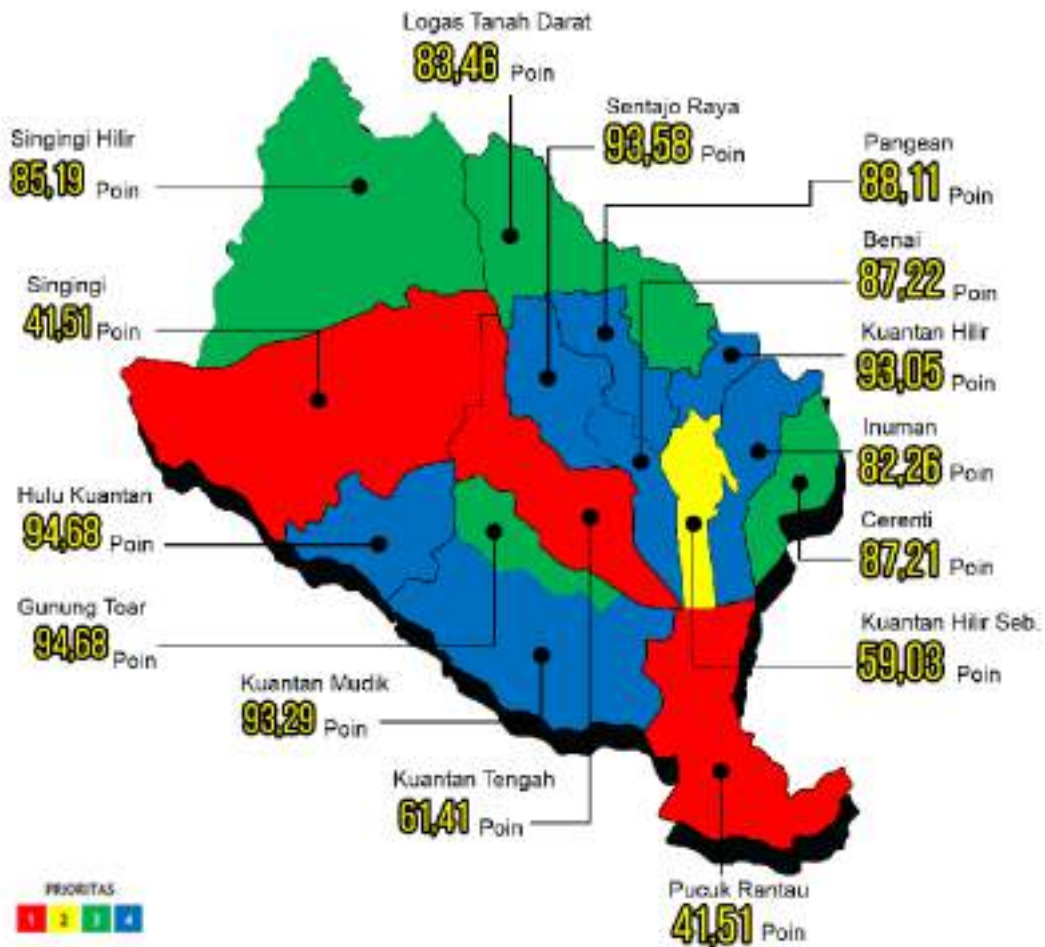


Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

Gambar III.14 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Perbaikan Sanitasi Layak (Jumlah Keluarga dengan Sanitasi Tidak Layak dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.6 Kuadran Wilayah Bidang Ketahanan Pangan

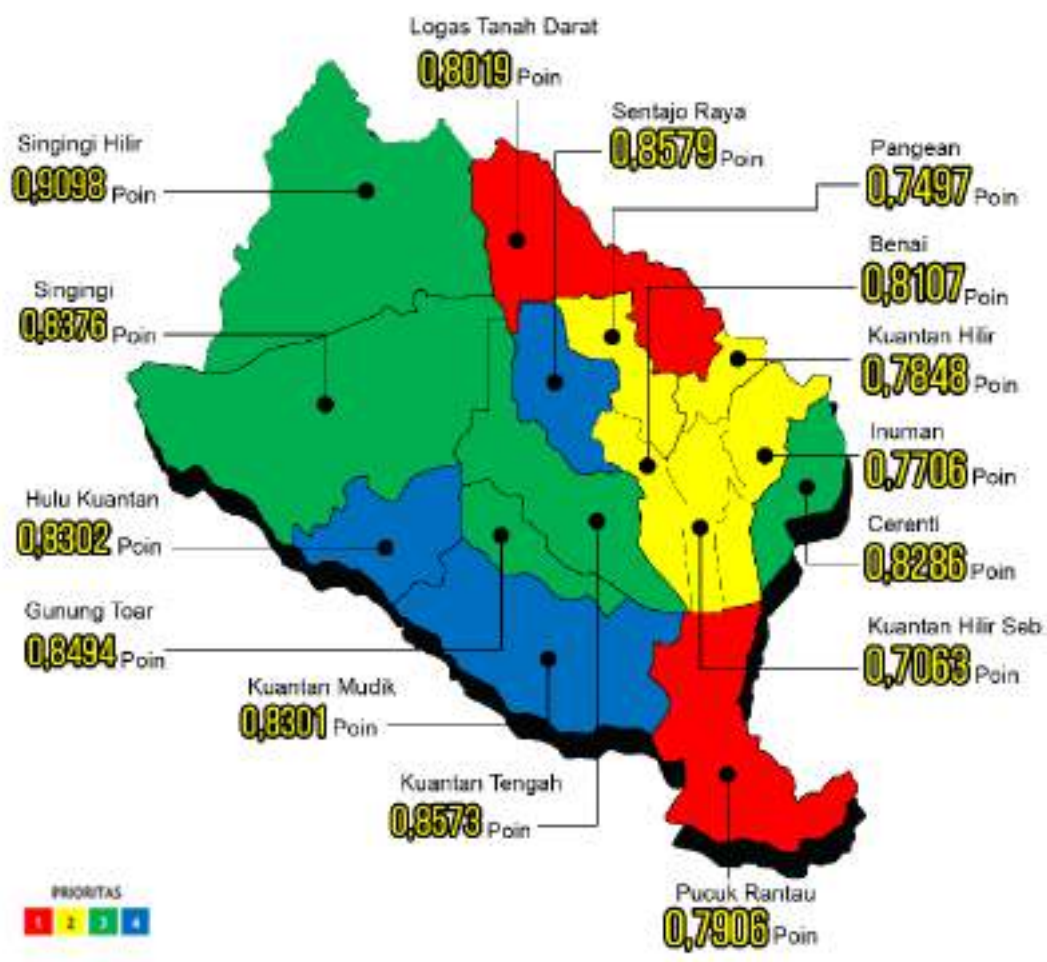
Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Kuantan Singingi yakni hasil penyandingan data capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di setiap kecamatan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin (desil 1). Dari penyandingan tersebut didapat wilayah kecamatan prioritas untuk intervensi penanggulangan kemiskinan khususnya di bidang ketahanan pangan yakni Kecamatan Singingi, Kecamatan Pucuk Rantau, dan Kecamatan Kuantan Tengah. sebagaimana disajikan pada Gambar III.14 sebagai berikut.



Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029
 Gambar III.15 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Indeks Ketahanan Pangan Kecamatan dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.7 Kuadran Wilayah Bidang Pembangunan Desa

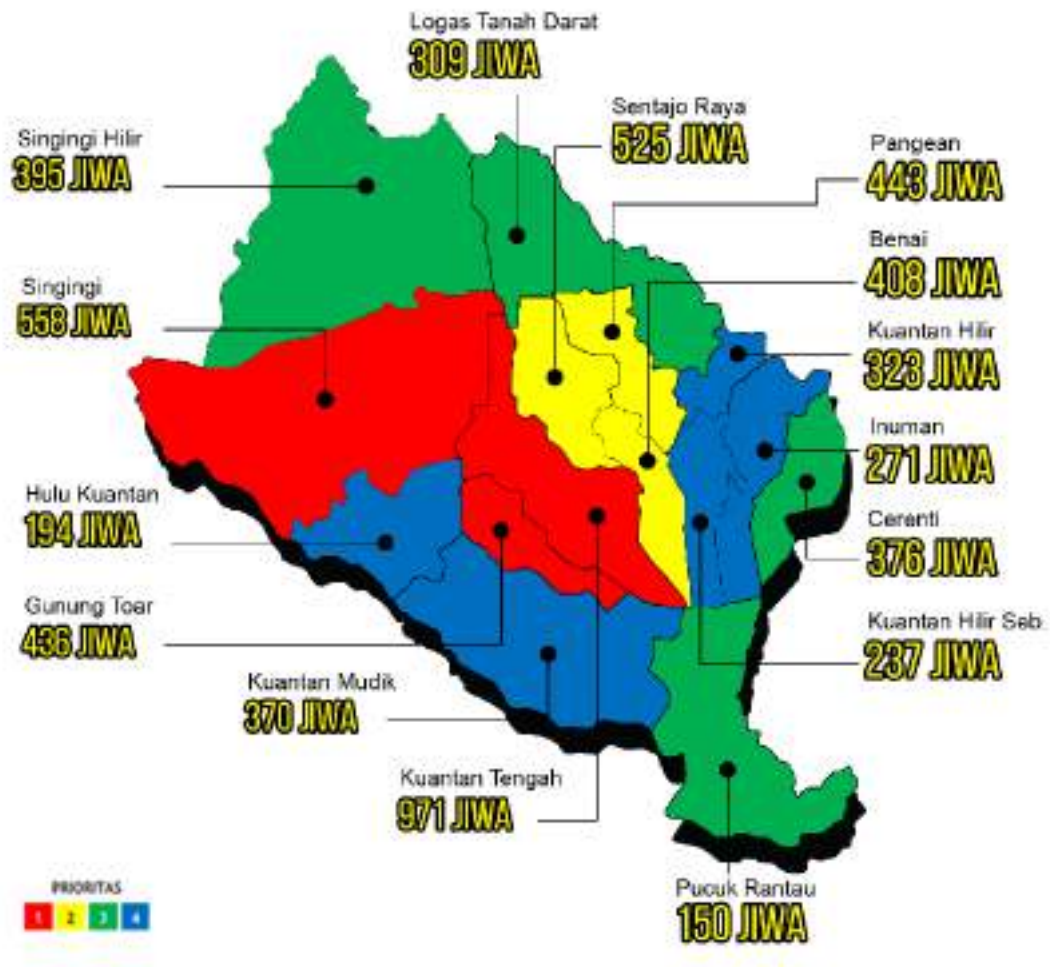
Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang pembangunan desa di Kabupaten Kuantan Singingi yakni hasil penyandingan data capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di setiap kecamatan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin (desil 1). Dari penyandingan tersebut didapat wilayah kecamatan prioritas untuk intervensi penanggulangan kemiskinan khususnya di bidang pembangunan desa yakni Kecamatan Logas Tanah Darat dan Kecamatan Pucuk Rantau. Sebagaimana disajikan pada Gambar III.15 sebagai berikut.



Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029
 Gambar III.16 Lokasi Prioritas Pelaksanaan Program Peningkatan Pembangunan Desa (Indeks Desa Membangun Kecamatan dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.1.8 Kuadran Wilayah Bidang Sosial

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang sosial di Kabupaten Kuantan Singingi yakni hasil penyandingan data jumlah penyandang disabilitas sedang dan berat di setiap kecamatan dibandingkan dengan persentase penduduk miskin (desil 1). Dari penyandingan tersebut didapat wilayah kecamatan prioritas untuk intervensi penanggulangan kemiskinan bidang sosial khususnya untuk penyandang disabilitas yakni Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, dan Kecamatan Gunung Toar. Sebagaimana disajikan pada Gambar III.16 sebagai berikut.



Sumber: Dokumen RPKD Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

Gambar III.17 Lokasi Prioritas Sosial untuk Penyandang Disabilitas (Jumlah Penyandang Disabilitas Sedang - Berat dan Persentase Desil 1) Kabupaten Kuantan Singingi

III.5.2 Penanggulangan Kemiskinan Pendekatan Wilayah

Penanggulangan kemiskinan selain menggunakan analisa yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, penanganan fakir miskin juga dilakukan melalui pendekatan wilayah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan diidentifikasi dan dilakukan melalui strategi pendekatan wilayah sebagai berikut:

A. Perdesaan. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan akses lahan;
- b. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
- c. Pengembangan inkubator petani.

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan akses lahan penggembalaan umum;
- b. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak;
- c. Pengembangan inkubator peternak; dan/atau

- d. Pemberian kemudahan kepada peternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan akses bahan baku;
- b. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
- c. Pengembangan desain produk lokal;
- d. Pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
- e. Pengembangan inkubator pengrajin.

- 2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;

Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan bantuan stimulan modal usaha;
- b. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
- c. Memberikan bantuan sarana produksi.

Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:

- a. Memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. Bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. Memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. Pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. Sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. Gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- f. Memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

- 3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

- a. Membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
- b. Memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antardesa, dan antara desa dengan kota;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
- d. Memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
- e. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.
- f. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- g. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

- 4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
- b. Membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial;
- c. Advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan; dan/atau
- d. Memberi penyuluhan kepada lembaga masyarakat untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.

Penguatan pemerintahan desa dilakukan dengan cara:

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan/atau
- b. Meningkatkan komunikasi antarpemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa.

5. Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya dilakukan dengan cara:

- a. Bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan;
- b. Memotivasi tenaga penanganan fakir miskin dan penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan;
- c. Memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- d. Meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi fakir miskin;
- e. Bimbingan dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga penanganan fakir miskin, penyuluh di bidang pertanian, dan peternakan, serta tenaga di bidang kerajinan; dan/atau
- f. Meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

B. Perkotaan. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal.

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal dilakukan dengan cara:

- a. Memfasilitasi akses terhadap peluang dan/atau tempat usaha;
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha;
- c. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan, pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat, serta potensi dan sumber lokal; dan/atau
- d. Memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan usaha terhadap resiko usaha.

2. Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha.

Bantuan permodalan dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk uang dan/atau barang;
- b. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengelolaan keuangan; dan/atau
- c. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan.

Akses pemasaran hasil usaha dilakukan dengan cara :

- a. Memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. Bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- b. Memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- c. Pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- d. Sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- e. Gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- f. Memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

3. Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat.

Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dilakukan dengan cara:

- a. Memfasilitasi akses terhadap perumahan dan permukiman;
- b. Memfasilitasi peremajaan, dan penataan lingkungan kumuh;
- b. Melakukan relokasi terhadap permukiman kumuh dengan memperhatikan rencana tata ruang;
- c. Pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan dan utilitas umum;
- d. Memberikan bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang dan/atau barang;
- e. Memberikan bantuan pemberantasan endemik;
- f. Memberikan bimbingan sosial dan/atau
- g. pelatihan pengembangan lingkungan perumahan yang sehat; dan/atau

- h. Memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan sanitasi.
4. Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan.
Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan dilakukan dengan cara:
- a. Meningkatkan perlindungan sosial, membuka akses terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dan memberikan bantuan hukum;
 - b. Memberikan bimbingan sosial, pendampingan sosial, dan konseling psikososial;
 - c. Mendinamisasikan sistem keamanan mandiri dan pengamanan terintegrasi;
 - d. Penyuluhan sosial terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman tindak kejahatan, serta kerentanan fisik dan sosial;
 - e. Peningkatan komunikasi antar warga dan antar kelompok masyarakat; dan/atau
 - f. Meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Fakir Miskin.

C. Pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya Penanganan Fakir Miskin di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut.
 - a. Memberikan akses informasi tentang batas wilayah tangkapan ikan dan sumber daya laut;
 - b. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya laut, panen dan pasca panen, pengolahan hasil laut, dan penggunaan teknologi tepat guna;
 - c. Pengembangan budi daya unggulan usaha perikanan dan sumber daya kelautan sesuai dengan potensi setempat;
 - d. Memfasilitasi kemudahan memperoleh akses untuk mencari sumber mata pencaharian di laut; dan/atau
 - e. Memberikan bantuan pangan untuk sementara waktu dalam hal nelayan tidak dapat melaut.
2. Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha.
Bantuan Permodalan dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan bantuan stimulan modal usaha;
 - b. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
 - b. Memberikan bantuan alat tangkap ikan dan penyediaan sarana pembudidayaan hasil laut.
 Bantuan akses pemasaran dilakukan dengan cara:
 - a. Memfasilitasi pameran produk unggulan;
 - b. Bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
 - c. Memfasilitasi akses terhadap informasi pasar; dan/atau
 - d. Memfasilitasi penyediaan tempat penjualan/pemasaran ikan dan pengembangan jaringan pemasaran.
3. Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan.
Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
 - b. Membangun jaringan antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan untuk memperkuat keserasian sosial;
 - c. Advokasi peningkatan peran lembaga dan organisasi Masyarakat pesisir dan nelayan;

- d. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan; dan/atau
 - e. Meningkatkan komunikasi antar lembaga masyarakat, antar organisasi masyarakat, dan antara lembaga masyarakat dengan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan.
4. Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - a. Memfasilitasi peremajaan dan penataan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Pemberian bantuan stimulan sarana prasarana lingkungan;
 - c. Pemberian bantuan rehabilitasi, reklamasi pantai, hutan bakau, dan terumbu karang;
 - d. Pemberian bantuan pemberantasan endemik;
 - e. Memberikan bimbingan sosial, pelatihan pengembangan lingkungan yang sehat; dan/atau
 - f. Memfasilitasi sarana prasarana pendukung pemenuhan air bersih dan pengadaan energi.
 5. Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir.
 - a. Penetapan batas wilayah perairan Indonesia;
 - b. Peningkatan patroli di wilayah perairan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing;
 - c. Memberikan bimbingan sosial dan/atau pelatihan teknis penggunaan alat penangkap ikan yang memenuhi standar teknis dan keamanan;
 - d. Advokasi masyarakat untuk berpartisipasi melarang penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan serta pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. Pencegahan pengerukan pasir pantai;
 - f. Fasilitasi akses informasi mengenai kondisi cuaca dan keadaan berbahaya kepada masyarakat; dan/atau
 - g. Fasilitasi pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu untuk keamanan nelayan.

D. Tertinggal/terpencil. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:

1. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
 Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan dilakukan dengan cara:
 - a. Pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk memanfaatkan bahan baku lokal untuk mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat;
 - b. Pemberian bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap produk lokal;
 - c. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Pembukaan akses transportasi guna membuka daerah tertinggal; dan/atau
 - e. Memperkenalkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Penyediaan Sumber Mata Pencarian di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan.
 Penyediaan sumber mata pencarian di bidang pertanian dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan akses lahan dan memfasilitasi pemanfaatan hak ulayat;

- b. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen; dan/atau
- c. Pengembangan usaha bersama.

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang peternakan dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan akses lahan penggembalaan umum;
- b. Penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik lokal;
- c. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak; dan/atau
- d. Pengembangan usaha bersama.

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budidaya perikanan, panen dan pasca panen, pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi tepat guna;
- b. Pengembangan budi daya unggulan perikanan sesuai dengan potensi setempat; dan/atau
- c. Pemberian bantuan bibit dan alat perikanan.

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan akses bahan baku dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
- b. Melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
- c. Pengembangan desain produk lokal;
- d. Pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
- e. Pengembangan usaha bersama.

3. Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan.

Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan bantuan stimulan modal usaha;
- b. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
- c. Memberikan bantuan sarana produksi.

Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara :

- a. Memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. Bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. Memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. Pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. Sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. Gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. Memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

4. Peningkatan Pembangunan Terhadap Sarana dan Prasarana.

Peningkatan Pembangunan terhadap Sarana dan Prasarana dilakukan dengan cara:

- a. Membuka akses transportasi, informasi, komunikasi, dan energi;
- b. Memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha antardesa, dan antara desa dengan kota;

- c. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
- d. Memfasilitasi pembangunan pasar tradisional; dan/atau
- e. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

5. Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat yang dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan bimbingan dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi;
- b. Membangun jaringan antar kelembagaan masyarakat, dan antara kelembagaan masyarakat dengan pemerintah desa untuk memperkuat keserasian sosial; dan/atau
- c. Advokasi peningkatan peran lembaga ekonomi masyarakat.

Penguatan Pemerintahan dilakukan dengan cara :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa; dan
- b. Meningkatkan komunikasi antar pemerintahan desa dengan kelembagaan masyarakat dan lembaga ekonomi desa;

6. Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal.

Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya local dilakukan dengan cara:

- a. Bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk kelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. Advokasi pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya, sosial, dan ekonomi, serta sumber daya lokal lainnya;
- c. Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas sumber daya lokal; dan/atau
- d. Membudidayakan sumber daya unggulan setempat dengan memperhatikan kearifan lokal.

E. Perbatasan antarnegara. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:

1. Penyediaan Sumber Mata Pencarian di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan.

Penyediaan sumber mata pencarian di bidang pertanian dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan akses lahan dan memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah;
- b. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan di bidang pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil panen;
- c. Mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang pertanian disesuaikan dengan kondisi perbatasan; dan/atau
- d. Pengembangan usaha bersama.

Penyediaan sumber mata pencarian di bidang peternakan dilakukan dengan cara:

- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang peternakan disesuaikan dengan kondisi perbatasan;
- b. Penyediaan bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik lokal;
- c. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya, panen dan pasca panen, kesehatan hewan, penggunaan teknologi tepat guna, dan pengolahan hasil ternak; dan/atau
- d. Pengembangan usaha bersama.

Penyediaan sumber mata pencarian di bidang perikanan dilakukan dengan cara:

- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang perikanan disesuaikan dengan kondisi perbatasan;
- b. Melakukan penyuluhan dan/atau pelatihan pembibitan/pembenihan, pakan, budi daya perikanan, panen dan pasca panen, pengolahan perikanan, dan penggunaan teknologi tepat guna;
- c. Pengembangan budi daya unggulan perikanan sesuai dengan potensi setempat; dan/atau
- b. Pemberian bantuan bibit dan alat perikanan.

Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang kerajinan dilakukan dengan cara:

- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan di bidang kerajinan disesuaikan dengan kondisi perbatasan;
- b. Memfasilitasi usaha di bidang jasa industri kecil dan kerajinan;
- c. Memberikan akses sumber bahan baku, sumber teknologi, dan sumber pembiayaan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
- d. Melakukan bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengembangan produk, penggunaan teknologi tepat guna;
- e. Pengembangan desain produk lokal;
- f. Pendayagunaan potensi lokal; dan/atau
- g. Pengembangan usaha bersama.

2. Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kerajinan.

Bantuan permodalan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan bantuan stimulan modal usaha;
- b. Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan; dan/atau
- c. Memberikan bantuan sarana produksi.

Akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan dilakukan dengan cara:

- a. Memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. Bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. Memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. Pengenalan produk/promosi pengenalan barang dan/atau jasa dalam negeri;
- e. Sosialisasi gagasan dan/atau penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual; dan/atau
- f. Gelar karya dan/atau demonstrasi produk.

3. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara:

- a. Fasilitasi penetapan batas dan pemeliharaan batas-batas wilayah negara;
- b. Membuka akses transportasi, informasi, dan komunikasi;
- c. Memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok usaha;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan umum;
- a. Memfasilitasi pembangunan pasar; dan/atau
- f. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman di kawasan perbatasan.

4. Penguatan Kelembagaan dan Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan dan pemerintahan dilakukan dengan cara:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan dan pemerintahan;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas di wilayah perbatasan;

- c. Pengembangan keorganisasian, koordinasi, dan keterpaduan program dari kementerian/lembaga terkait dalam Penanganan Fakir Miskin di wilayah perbatasan;
 - d. Fasilitasi untuk kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan masyarakat di wilayah perbatasan; dan/atau
 - e. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
5. Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya.
Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya dilakukan dengan cara :
- a. Bimbingan sosial dan/atau pelatihan untuk kelestarian dan pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat;
 - b. Membudidayakan sumber daya unggulan setempat dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - c. Memprioritaskan pemanfaatan budidaya sumber daya laut di pulau-pulau terluar untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Masyarakat setempat;
 - d. Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas sumber daya lokal; dan/atau
 - e. Meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Fakir Miskin.
6. Menjamin Keamanan Wilayah Perbatasan Serta Pengamanan Sumber
Menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal dilakukan dengan cara:
- a. Membangun pos pemeriksaan dan pos lintas batas antarnegara di wilayah perbatasan;
 - b. Meningkatkan patroli keamanan di wilayah perbatasan;
 - c. Sosialisasi nilai kebangsaan dan kesetiakawanan sosial untuk memperkuat integrasi nasional;
 - d. Bimbingan sosial dan/atau pelatihan sistem pengamanan sumber daya lokal;
 - e. Pemeliharaan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal untuk membangun karakter bangsa; dan/atau
 - f. Melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum atas pemanfaatan sumber daya lokal secara ilegal di wilayah perbatasan.
7. Peningkatan Daya Tahan Budaya Lokal dari Pengaruh Negatif Budaya Asing.
Peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing dilakukan dengan cara :
- a. Melakukan inovasi penampilan budaya lokal dengan tetap mempertahankan karakteristiknya;
 - b. Memfasilitasi penguatan lembaga kebudayaan lokal;
 - c. Memfasilitasi promosi budaya lokal;
 - d. Memberikan bantuan untuk pengembangan budaya kreatif lokal; dan/atau
 - e. Penyuluhan nilai-nilai Pancasila untuk membendung pengaruh negatif budaya asing.

III.6 ARAH PEMEKARAN WILAYAH

Pemekaran wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang kini telah berusia 24 tahun merupakan bagian dari upaya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga didasarkan pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang mengamanatkan adanya persetujuan dari pemerintah daerah asal, DPRD, serta pemenuhan indikator administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi masyarakat, arah pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi difokuskan pada pembentukan dua daerah otonomi baru di samping kabupaten induk, yaitu Kabupaten Kuantanhulu Pucukrantau dan Kabupaten Kuantan. Kabupaten Kuantan Hulu Pucuk Rantau ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts. 324/XII/2023 dengan cakupan wilayah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Pucuk Rantau, serta satu kecamatan hasil pemekaran dari empat kecamatan tersebut, dengan calon ibu kota di Lubuk Jambi, dan diarahkan untuk mendorong efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan wilayah hulu, melestarikan adat dan budaya lokal, serta meningkatkan daya saing daerah.

Sementara itu, pembentukan Kabupaten Kuantan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts. 198/XII/2023 dan Persetujuan Bersama Bupati Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 100/TPK/1933 dan Nomor 171/Kpts/DPRD-KS/08, dengan cakupan wilayah Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, dan Kecamatan Cerenti, beribu kota di Baserah. Keputusan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat enam kecamatan tersebut membentuk daerah otonomi baru yang mampu memaksimalkan pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan ekonomi, serta memperkuat pelestarian adat, tradisi, dan budaya lokal.

Secara prinsip, arah kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memperpendek rentang kendali dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat; peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan wilayah; percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur melalui pengelolaan potensi sumber daya alam dan peningkatan investasi; pemerataan pembangunan dan kesejahteraan guna mengurangi kesenjangan antarwilayah baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan dasar lainnya; serta pelestarian adat dan budaya lokal untuk mempertahankan keunikan identitas daerah sebagai kekuatan sosial dan daya saing wilayah.

III.7 PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2029 harus ditransformasikan secara sistematis ke dalam perencanaan operasional melalui program prioritas yang terukur dan terarah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan strategis dan implementasi program. Dengan demikian, program prioritas menjadi alat operasional utama untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis RPJMD ke dalam bentuk kegiatan konkret yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program prioritas pembangunan daerah disusun dengan pendekatan cascading outcome, yaitu penurunan kinerja secara bertahap dari tingkat makro hingga tingkat operasional, dengan mengacu pada baseline data tahun 2025. Penetapan target dilakukan secara terukur hingga tahun 2029. Masa perencanaan ini juga menjadi bagian dari fase transisi pada tahun 2030.

Sebagai instrumen strategis, program prioritas dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap program dirancang untuk berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian target

kinerja utama, baik dalam aspek tata kelola, ekonomi, sosial, infrastruktur dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program prioritas sangat bergantung pada kualitas perencanaan teknis, integrasi antar sektor, efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, serta dukungan sumber daya yang memadai. Program prioritas Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7 Perumusan Program Prioritas Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
20252029 - Terwujudnya Kuantan Singingi yang Beradat, Berdaya Saing, Sejahtera dan Maju (BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT) - Mewujudkan masyarakat yang menjunjung nilai adat-istiadat dalam lingkungan masyarakat yang religius - Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing - Mewujudkan perekonomian daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi wilayah - Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan - Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			Indeks Harmoni(Indeks)		
		Meningkatnya suasana kehidupan masyarakat yang agamis		Indeks Harmoni Religius (Indeks)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Pemajuan budaya daerah (%)		
		Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya daerah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Terlestarikannya cagar budaya (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Telestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Jumlah Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))		
				Jumlah Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
				Jumlah Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Membangun kehidupan sosial berkualitas melalui ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender, dan peran pemuda	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)(Indeks)		
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)(Indeks)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya penanganan dan pencegahan tingkat kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penerapan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan daerah		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inovatif didukung oleh IPTEK			PDRB Perkapita(Juta Rupiah)		
				Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Indeks Inovasi Daerah(Angka)		
				Rasio Gini(Indeks)		
		Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
				Tingkat Inflasi (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas pelayanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
				Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan kamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Tingkat Kemiskinan (%)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Persentase ARG Daerah (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya produktivitas kopersa	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase (%) lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%))		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)				1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Meningkatnya pembangunan masyarakat desa	Indeks Desa (Indeks)					

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Fasilitas Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, serta pengelolaan tata ruang wilayah yang berkelanjutan	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang merata		Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur(%)		
				Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)		
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
				Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak (%)		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi		Indeks Konektivitas (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas pengendalian dan mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (Indeks)		
				Indeks Kualitas Lahan (Indeks)		
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya profesionalisme ASN dan birokrasi ber-AKHLAK		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya budaya birokrasi yang melayani dan kolaboratif		Indeks Integritas Nasional (Persentase)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, SDA, infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Indeks Transformasi Digital Nasional (Poin)		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

Sumber: Hasil Analisis

III.7.1 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Program unggulan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Lebih detail mengenai program unggulan sebagai berikut :

A. Kuansing Beradat

1. Pemberian insentif pemangku adat
2. Pembangunan balai adat
3. Penerapan hukum adat
4. Pembangunan islamic centre dan rumah tahfiz

B. Kuansing Berdaya Saing

1. Pemberian beasiswa
2. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah
3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
4. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi
5. Peningkatan pengelolaan PAUD
6. Satu desa satu Doktor
7. Pembangunan RS type D Dan Pusat Rehabilitasi Narkoba
8. Penyediaan jaminan kesehatan nasional
9. Budaya hidup sehat dan keolahragaan
10. Penanggulangan Stunting
11. Peningkatan kompetensi tenaga medis dan nakes
12. Satu Pustu satu Dokter
13. Peningkatan kerjasama bidang kesehatan
14. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
15. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat
16. Pemuda berprestasi

C. Kuansing Sejahtera

1. Bantuan bibit, pupuk dan pakan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat kawasan pangan terpadu

2. Pembinaan kelompok tani
3. Bantuan bibit dan pupuk perkebunan komoditi unggulan daerah
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pertanian
5. Hilirisasi industri berbasis pertanian
6. One village one product
7. Pembangunan kawasan kuliner dan wisata strategis
8. Pembangunan balai latihan kerja
9. Jaminan sosial tenaga kerja
10. Pemberdayaan penyandang disabilitas
11. Pembangunan rumah singgah
12. Pemberdayaan anak terlantar dan Ex-ODGJ
13. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas

D. Kuansing Maju

1. Peningkatan Jalan, Jembatan dan Sarana Prasarana Perhubungan
2. Peningkatan akses sumber air bersih dan air minum
3. Peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air (Sungai, Turap Sungai, Irigasi, Pintu Air, Embung dan Turap Penahan Tebing)
4. Pembangunan dan peningkatan sarana pelayanan publik dan penataan/pembangunan Ibukota Kabupaten
5. Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
6. Digitalisasi
7. Pembangunan RTH dan Pertamanan
8. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik
9. Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan
10. Kuansing Terang
11. Sistem Kepegawaian Terintegrasi (e-Kinerja)
12. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya
13. Pembiayaan pembangunan daerah melalui Public Private Partnership (PPP)
14. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan desa

Untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan, keterkaitan antara program prioritas pembangunan dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati

terpilih disajikan dalam bentuk matriks penyelarasan. Tabel ini menggambarkan hubungan antara masing-masing program prioritas dengan program unggulan.

Tabel III.8 Dukungan Program Prioritas Pembangunan terhadap Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2025-2029

No	Tag Line	Program Unggulan	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
1	Kuansing Beradat	1 Pemberian insentif Pemangku Adat	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan
		2 Pembangunan balai adat	2.22.02 PROGRAMPENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		3 Penerapan hukum adat	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kebudayaan
		4 Pembangunan islamic centre dan rumah tahfiz	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Kuansing Berdaya Saing	5 Pemberian Beasiswa	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
		6 Pemberian Bantuan Perlengkapan Sekolah	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
		7 Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
		8 Peningkatan kerjasama dengan Perguruan tinggi	1.04.01 PROGRAM TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	Sekretariat Daerah
		9 Peningkatan Pengelolaan PAUD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
		10 Satu Desa Satu Doktor	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
		11 Pembangunan RS Type D Dan Pusat Rehabilitasi Narkoba	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kesehatan

No	Tag Line	Program Unggulan	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan
		12 Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
		13 Budaya Hidup Sehat dan Keolahragaan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kesehatan Pendidikan
		14 Penanggulangan Stunting	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
		15 Peningkatan kompetensi tenaga medis dan nakes	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan
		16 1 Pustu 1 Satu Dokter	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan
		17 Peningkatan Kerjasama Bidang Kesehatan	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan
		18 Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Primer dan rujukan	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan
		19 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan
		20 Pemuda Berprestasi	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kepemudaan dan Olahraga
3	Kuansing Sejahtera	21 Bantuan bibit, pupuk dan pakan bagi masyarakat dan kelompok masyarakat	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Urusan Pertanian

No	Tag Line	Program Unggulan	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
		kawasan pangan terpadu		
		22 Pembinaan kelompok tani	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Urusan Pertanian Urusan Kelautan dan Perikanan
		23 Bantuan bibit dan pupuk perkebunan komoditi unggulan daerah	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Urusan Pertanian Urusan Kelautan dan Perikanan
		24 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pertanian	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Urusan Pertanian
		25 Hilirisasi industri berbasis pertanian	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian
		26 One village one product	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		27 Pembangunan kawasan kuliner dan wisata strategis	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pariwisata
		28 Pembangunan balai latihan kerja	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tenaga Kerja
		29 Jaminan sosial tenaga kerja	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja
		30 Pemberdayaan disabilitas	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial
		31 Pembangunan rumah singgah	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial Sosial
		32 Pemberdayaan anak terlantar dan Ex-ODGJ	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial
		33 Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	11.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum

No	Tag Line	Program Unggulan	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
4	Kuansing Maju	34 Peningkatan Jalan, Jembatan dan Sarana Prasarana Perhubungan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		35 Peningkatan akses sumber air bersih dan air minum	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		36 Peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air (Sungai, Turap Sungai, Irigasi, Pintu Air, Embung dan Turap Penahan Tebing	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		37 Pembangunan dan peningkatan sarana pelayanan publik dan penataan/pembangunan Ibukota Kabupaten	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan Kawasan Permukiman
		38 Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		39 Digitalisasi	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
		40 Pembangunan RTH dan Pertamanan	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup
		41 Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkungan Hidup

No	Tag Line	Program Unggulan	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
		42 Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
		43 Kuansing Terang	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perhubungan
		44 Sistem Kepegawaian Terintegrasi (e-Kinerja)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN	Kepegawaian
		45 Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya	1.04.01 PROGRAM TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	Sekretariat Daerah
		46 Pembiayaan pembangunan daerah melalui Public Private Partnership (PPP)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		47 Pelayanan publik sesuai kebutuhan, kapasitas dan kearifan lokal (inovatif)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah

Sumber: Hasil Analisis

III.7.2 Dukungan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kuantan Singingi

Penyelarasan prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi serta sinergi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Nasional, sehingga intervensi pembangunan yang dilakukan dapat saling mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh. Dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi, pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan prioritas pembangunan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang lebih luas guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.9 Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kuantan Singingi

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	Program Daerah	Program Daerah
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	RIAU MANTAP Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi	KUANSING MAJU - Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin - Pembangunan dan peningkatan sarana pelayanan publik dan penataan/pembangunan Ibukota Kabupaten
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	RIAU SEHAT - Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit - Dukungan Penguatan Universal Health Coverage dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau - Pencegahan dan Antisipasi Dini Penyebaran Wabah & Penyakit Menular - Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata - Penguatan dan Dukungan Dokter Spesialis serta Fasilitas Puskesmas Mandiri - Gerakan Hidup Sehat melalui Pola Makan Bergizi dan Gemar Olahraga - Percepatan penanganan stunting dan pencegahan wasting (gizi buruk)	KUANSING BERDAYA SAING - Pembangunan RS Type D Dan Pusat Rehabilitasi Narkoba 1 Pustu 1 Satu Dokter
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	RIAU SEHAT - Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit - Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata - Penguatan Kerjasama Kesehatan Lingkup Regional dan Global	KUANSING BERDAYA SAING - Pembangunan RS Type D Dan Pusat Rehabilitasi Narkoba 1 Pustu 1 Satu Dokter
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih	KUANSING MAJU Peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air (Sungai, Turap Sungai, Irigasi, Pintu Air, Embung dan Turap Penahan Tebing)
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	RIAU MANTAP Peningkatan Penyediaan Air Bersih	KUANSING MAJU Pembangunan infrastruktur dasar secara merata antara lain : Jalan, Jembatan, Drainase, Sanitasi dan Air minum
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	RIAU BERDAYA SAING - Hilirisasi Produk Pada Sektor - Sektor Unggulan - Penguatan dan Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Riau	KUANSING SEJAHTERA Hilirisasi industri berbasis pertanian

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	Program Daerah	Program Daerah
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	RIAU MANTAP - Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi - Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih	KUANSING MAJU Pembangunan infrastruktur dasar secara merata antara lain : Jalan, Jembatan, Drainase, Sanitasi dan Air minum
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	RIAU BERDAYA SAING Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	KUANSING SEJAHTERA Bantuan bibit, pupuk dan pakan KUANSING MAJU Peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air (Sungai, Turap Sungai, Irigasi, Pintu Air, Embung dan Turap Penahan Tebing)
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	RIAU BERDAYA SAING Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	KUANSING SEJAHTERA Bantuan bibit, pupuk dan pakan
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	RIAU BERDAYA SAING Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	KUANSING SEJAHTERA Bantuan bibit, pupuk dan pakan

Sumber: Hasil Analisis

III.7.3 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2030 secara strategis diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menyebutkan bahwa SPM merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Keenam jenis pelayanan dasar tersebut meliputi: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta (6) sosial.

Sebagai instrumen implementatif dalam dokumen perencanaan, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan bahwa penerapan SPM menjadi komponen utama dalam perumusan program urusan bidang pemerintahan. Program-program tersebut dirancang untuk menjamin akses layanan dasar secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan wilayah-wilayah yang selama ini masih mengalami keteringgalan layanan. Setiap program yang terkait dengan urusan pelayanan dasar diformulasikan secara spesifik, dengan target kinerja yang mengacu pada indikator-indikator SPM sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis terkait.

Untuk memastikan keterpaduan dan keberlanjutan pelaksanaan SPM dalam kerangka pembangunan daerah, seluruh program prioritas yang berkaitan dengan pelayanan dasar dituangkan dalam tabel penyelarasan antara urusan wajib dan SPM. Tabel ini memuat informasi rinci mengenai jenis pelayanan dasar, perangkat daerah penanggung jawab, program dan kegiatan yang mendukung. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara

menyeluruh, melalui penyediaan layanan dasar yang memenuhi standar, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel III.10 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
SPM Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/ MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
SPM Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
			Upaya Kesehatan Masyarakat	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGKJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan orang jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (human immuno-defiency)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	SPM Pekerjaan Umum			
1	Penyedia kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	SPM Bidang Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan reha-bilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Terlaksananya Reha-bilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
A.	SPM Trantibum			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
B	SPM Kebencanaan			
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
C	SPM Pemadaman Kebakaran			
1	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
SPM Bidang Sosial				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintahan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial

Sumber: Hasil Analisis

III.7.4 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan jumlah indikator kinerja kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 220 indikator yang terdiri dari 17 TPB. Terdapat 1 TPB yang tidak termasuk dalam kewenangan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu TPB 14 (Ekosistem Laut). Sehingga jumlah TPB Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 16 TPB.

Tabel III.11 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
1	1	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial
2	1	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
3	1	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
4	1	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Sosial
5	1	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial
6	1	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
7	1	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan
8	1	1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	1	1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
10	1	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan PUPR
11	1	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
12	1	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
13	1	1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	2.12.03 Program Pencatatan Sipil 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Urusan Dukcapil Urusan Dukcapil
14	1	1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	5.01.02 Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2.15.02 Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan	Unsur Perencanaan Urusan Perhubungan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
				angkutan jalan (LLAJ)	
15	1	1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
16	1	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
17	1	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Urusan Trantibum dan Linmas Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	1	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Sosial
19	1	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
20	1	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
21	1	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
22	1	1.5.3	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
23	1	1.a.1	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial
24	1	1.a.2	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Keuangan
25	2	2.1.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2.09.03 Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Urusan Pangan
26	2	2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.09.03 Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 2.14.03 Program Pembinaan	Urusan Pangan Urusan Pengendalian Penduduk dan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
				Keluarga Berencana (KB)	Keluarga Berencana
27	2	2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	2.09.03 Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Urusan Pangan
28	2	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
29	2	2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
30	2	2.1.2 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
31	2	2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
32	2	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
33	2	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
34	2	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2.09.03 Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Urusan Kesehatan Urusan Pangan
35	2	2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja
36	3	3.1.1	Jumlah Kematian Ibu (AKI).	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
37	3	3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
38	3	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
39	3	3.2.1	Jumlah Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
40	3	3.2.2	Jumlah Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
41	3	3.2.2 (a)	Jumlah Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
42	3	3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
43	3	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
44	3	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
45	3	3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
46	3	3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
47	3	3.3.4 (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
48	3	3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
49	3	3.3.5 (a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
50	3	3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	1.02.05 Pemberdayaan	Urusan Kesehatan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
			(berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Masyarakat Bidang Kesehatan	
51	3	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
52	3	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
53	3	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
54	3	3.4.2	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
55	3	3.4.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
56	3	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
57	3	3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
58	3	3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	3	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
60	3	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	3	3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
62	3	3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Urusan Pengendalian Penduduk dan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
					Keluarga Berencana
63	3	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
64	3	3.8.2	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
65	3	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
66	3	3.9.3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
67	3	3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
68	3	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
69	3	3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Urusan Kesehatan
70	4	4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
71	4	4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
72	4	4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
73	4	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
74	4	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
75	4	4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
76	4	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
77	4	4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
78	4	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
79	4	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
80	4	4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
81	4	4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
82	4	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pendidikan
83	5	5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
84	5	5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak Program 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
85	5	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak Program 2.08.02 Program Pengarusutamaan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
				Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
86	5	5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
87	5	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak Program 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
88	5	5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
89	5	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
90	5	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak Program 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
91	5	5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
92	5	5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
93	5	5.6.1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
			penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		Keluarga Berencana
94	5	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
95	5	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
96	5	5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Urusan Komunikasi dan Informatika
97	6	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
98	6	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
99	6	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
100	6	6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
101	6	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan PUPR
102	6	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
103	6	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	1.02.05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Urusan Kesehatan
104	6	6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Urusan PUPR

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
				Dan Utilitas Umum (PSU)	
105	6	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan PUPR
106	6	6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan PUPR
107	6	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Urusan PUPR
108	6	6.3.2 (a)	Kualitas air danau.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
109	6	6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
110	6	6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
111	6	6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
112	6	6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR
113	6	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR Urusan
114	6	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan PUPR

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
				2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
115	7	7.1.1	Rasio elektrifikasi	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Urusan Bapeda
116	7	7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Urusan Bapeda
117	8	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.27.03 Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 3.26.02 Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata 3.31.02 Program Perencanaan dan pembangunan industri 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2.17.08 Program Pengembangan UMKM 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Pertanian Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pariwisata Urusan Urusan Perindustrian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal
118	8	8.1.1 (a)	PDB per kapita.	3.27.03 Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Urusan Pertanian Urusan Kelautan dan Perikanan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
				1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 3.26.02 Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata 3.31.02 Program Perencanaan dan pembangunan industri	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pariwisata Urusan
				2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2.17.08 Program Pengembangan UMKM 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Perindustrian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal
119	8	8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja
120	8	8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan tenaga Kerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
121	8	8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja
122	8	8.3.1 (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
123	8	8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
124	8	8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja
125	8	8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja Urusan tenaga Kerja Urusan tenaga Kerja
126	8	8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja
127	8	8.6.1	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja
128	8	8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan tenaga Kerja Urusan Pariwisata
129	8	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata
130	8	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata
131	8	8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata
132	8	8.9.2	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata
133	8	8.10.1	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
134	8	8.10.1 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal
135	8	8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	2.17.08 Program Pengembangan Umkm	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
136	9	9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata
137	9	9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata
138	9	9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata
139	9	9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata
140	9	9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Urusan Perindustrian
141	9	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian
142	9	9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2.07.03 Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan tenaga Kerja
143	9	9.3.1	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Urusan Perindustrian
144	9	9.3.2	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Urusan Perindustrian
145	9	9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan
146	9	9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
147	9	9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
148	9	9.c.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
149	10	10.1.1	Koefisien Gini.	3.27.03 Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 3.26.02 Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata 3.31.02 Program Perencanaan dan pembangunan industri 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2.17.08 Program Pengembangan UMKM 2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Pertanian Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pariwisata Urusan Perindustrian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal
150	10	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Sosial
151	10	10.1.1 (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan Program Perberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
152	10	10.1.1 (c)	Jumlah desa tertinggal.	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
153	10	10.1.1 (d)	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.05 Program Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unsur Kewilayahan
154	10	10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	1.03.07 Program Pengembangan Permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
155	10	10.1.1 (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	1.03.07 Program Pengembangan Permukiman 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
156	10	10.2.1	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial
157	10	10.3.1 (a)	Indeks Kebebasan Sipil.	2.13.05 Program Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
158	10	10.3.1 (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	2.13.05 Program Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
159	10	10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial
160	11	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
161	11	11.1.1 (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
				1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	
162	11	11.3.1 (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	1.04.03 Program Kawasan Permukiman 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
163	11	11.3.2 (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	5.02.02 Program Pengelolaan keuangan daerah	Unsur Keuangan
164	11	11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	2.22.04 Program Pembinaan Sejarah 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan 2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 2.10.07 Program Penetapan Tanah Ulayat	Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan
165	11	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
166	11	11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
167	11	11.5.1 (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
168	11	11.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
169	11	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
170	11	11.6.1 (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
171	11	11.7.1 (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	i. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup
172	11	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
173	12	12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
174	12	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
175	12	12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
176	12	12.7.1 (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
177	12	12.8.1 (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
178	13	13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas
179	13	13.1.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Urusan Trantibum dan Linmas

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
			bencana per 100.000 orang.		
180	15	15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
181	15	15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup
182	15	15.6.1	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Program Pengelolaan keuangan daerah	Unsur Keuangan
183	15	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Urusan Lingkungan Hidup
184	16	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Trantibum dan Linmas
185	16	16.1.2 (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Trantibum dan Linmas
186	16	16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Trantibum dan Linmas
187	16	16.1.4	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Trantibum dan Linmas
188	16	16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
189	16	16.2.1 (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
190	16	16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	2.08.07 Program Perlindungan khusus anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
191	16	16.5.1 (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
192	16	16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	5.02.02 Program Pengelolaan keuangan daerah	Unsur Keuangan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
193	16	16.6.1 (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	5.02.02 Program Pengelolaan keuangan daerah	Unsur Keuangan
194	16	16.6.1 (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	5.01.02 Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Unsur Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika
195	16	16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Keuangan
196	16	16.6.1 (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	5.01.02 Program Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Unsur Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika
197	16	16.6.2 (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	1. Program Kepegawaian Daerah 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Sekretariat Daerah
198	16	16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
199	16	16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
200	16	16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
201	16	16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
202	16	16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
203	16	16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
204	16	16.b.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Sekretariat Daerah
205	17	17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Keuangan
206	17	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Keuangan
207	17	17.1.2	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5.02.02 Program Pengelolaan keuangan daerah	Unsur Keuangan
208	17	17.6.2 (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
209	17	17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
210	17	17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan internet.	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
211	17	17.8.1 (a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
212	17	17.17.1 (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	5.02.02 Program Pengelolaan keuangan daerah	Unsur Keuangan
213	17	17.7.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	5.02.02 Program Pengelolaan keuangan daerah	Unsur Keuangan

No	No. TPB	No. Indikator	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Urusan Bidang Pemerintah
214	17	17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	2.20.02 program penyelenggaraan statistik sektoral	Urusan Statistik
215	17	17.18.1 (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	2.20.02 program penyelenggaraan statistik sektoral	Urusan Statistik
216	17	17.18.1 (c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	2.20.02 program penyelenggaraan statistik sektoral	Urusan Statistik
217	17	17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	2.20.02 program penyelenggaraan statistik sektoral	Urusan Statistik
218	17	17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
219	17	17.19.2 (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika
220	17	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	2.20.02 program penyelenggaraan statistik sektoral	Urusan Statistik

Sumber: Hasil Analisis

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

IV.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam perencanaan kinerja, program Perangkat Daerah seyogianya berkorelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan. Kerangka kebutuhan pendanaan indikatif dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang tertuang pada Sub Bab II.2 berlandaskan prioritas pembangunan daerah.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif setiap bidang urusan pemerintahan Tahun 2026-2030 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilengkapi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					Rp 381.324.121.418,00		Rp 385.334.721.314,09		Rp 409.971.775.361,80		Rp 435.751.056.730,12		Rp 440.275.910.877,46	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 323.859.364.553,00		Rp 329.520.419.745,09		Rp 336.747.277.818,80		Rp 344.863.545.766,12		Rp 351.767.467.454,46	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 323.859.364.553,00	100	Rp 329.520.419.745,09	100	Rp 336.747.277.818,80	100	Rp 344.863.545.766,12	100	Rp 351.767.467.454,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					Rp 56.189.756.865,00		Rp 53.424.801.569,00		Rp 70.528.047.543,00		Rp 88.156.415.964,00		Rp 85.006.033.923,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	85,95	88,92	91,89	Rp 56.189.756.865,00	94,44	Rp 53.424.801.569,00	96,98	Rp 70.528.047.543,00	99,53	Rp 88.156.415.964,00	100	Rp 85.006.033.923,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	99,12	99,26	99,40		99,54		99,68		99,82		99,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					Rp 200.000.000,00		Rp 875.000.000,00		Rp 952.500.000,00		Rp 1.037.750.000,00		Rp 1.444.730.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	20	21	22	Rp 200.000.000,00	25	Rp 875.000.000,00	35	Rp 952.500.000,00	40	Rp 1.037.750.000,00	45	Rp 1.444.730.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					Rp 300.000.000,00		Rp 380.000.000,00		Rp 413.000.000,00		Rp 449.300.000,00		Rp 489.230.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	20	20	20	Rp 300.000.000,00	20	Rp 380.000.000,00	20	Rp 413.000.000,00	20	Rp 449.300.000,00	20	Rp 489.230.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	41,89	46,07	50,68		55,75		61,32		67,46		74,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					Rp 625.000.000,00		Rp 687.500.000,00		Rp 756.250.000,00		Rp 831.875.000,00		Rp 915.062.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	80	80	80	Rp 625.000.000,00	85	Rp 687.500.000,00	90	Rp 756.250.000,00	95	Rp 831.875.000,00	100	Rp 915.062.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					Rp 150.000.000,00		Rp 447.000.000,00		Rp 574.700.000,00		Rp 412.170.000,00		Rp 653.387.000,00	
Telestarkannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	20	Rp 150.000.000,00	25	Rp 447.000.000,00	30	Rp 574.700.000,00	35	Rp 412.170.000,00	40	Rp 653.387.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					Rp 392.162.593.142,00		Rp 405.282.906.923,49		Rp 433.709.842.474,71		Rp 466.931.256.709,49		Rp 487.859.823.751,71	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 277.084.737.906,52		Rp 282.304.389.854,32		Rp 301.614.611.387,86		Rp 313.089.662.232,90		Rp 327.634.136.742,69	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 277.084.737.906,52	100	Rp 282.304.389.854,32	100	Rp 301.614.611.387,86	100	Rp 313.089.662.232,90	100	Rp 327.634.136.742,69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Rp 112.690.236.988,28		Rp 119.303.423.169,59		Rp 126.274.067.441,99		Rp 147.689.441.503,39		Rp 153.768.470.286,16	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	4	4	3	Rp 112.690.236.988,28	3	Rp 119.303.423.169,59	2	Rp 126.274.067.441,99	1	Rp 147.689.441.503,39	1	Rp 153.768.470.286,16	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	23,1	21,8	20,5		19,2		17,9		16,6		15,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	23,1	21,8	20,5		19,2		17,9		16,6		15,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	4	4	3		3		2		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					Rp 2.095.475.605,60		Rp 3.370.413.367,88		Rp 5.306.481.026,86		Rp 5.616.805.078,20		Rp 5.888.895.332,11	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	14,5	50	60	Rp 2.095.475.605,60	70	Rp 3.370.413.367,88	80	Rp 5.306.481.026,86	90	Rp 5.616.805.078,20	90	Rp 5.888.895.332,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	74	75	88		89		90		91		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					Rp 120.900.000,00		Rp 118.502.500,00		Rp 196.833.000,00		Rp 206.674.650,00		Rp 217.008.382,75	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	85	90	90	Rp 120.900.000,00	95	Rp 118.502.500,00	95	Rp 196.833.000,00	100	Rp 206.674.650,00	100	Rp 217.008.382,75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					Rp 171.242.641,60		Rp 186.178.031,70		Rp 317.849.618,00		Rp 328.673.245,00		Rp 351.313.008,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	65	70	75	Rp 171.242.641,60	75	Rp 186.178.031,70	80	Rp 317.849.618,00	80	Rp 328.673.245,00	85	Rp 351.313.008,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					Rp 147.320.656.606,00		Rp 152.220.723.874,15		Rp 162.837.382.800,78		Rp 175.244.644.334,66		Rp 183.060.874.040,82	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 18.379.210.606,00		Rp 19.238.912.597,15		Rp 23.286.695.116,78		Rp 26.145.034.139,66		Rp 28.981.040.967,82	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 18.379.210.606,00	100	Rp 19.238.912.597,15	100	Rp 23.286.695.116,78	100	Rp 26.145.034.139,66	100	Rp 28.981.040.967,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					Rp 6.360.163.500,00		Rp 14.098.738.756,00		Rp 19.047.304.548,00		Rp 20.216.076.136,00		Rp 20.910.998.037,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	-	-	47,89	Rp 6.360.163.500,00	49,39	Rp 14.098.738.756,00	50,89	Rp 19.047.304.548,00	52,39	Rp 20.216.076.136,00	53,89	Rp 20.910.998.037,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	-	-	42,76		45,26		47,76		50,26		52,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Rp 6.975.710.000,00		Rp 7.025.710.000,00		Rp 7.025.710.000,00		Rp 7.075.710.000,00		Rp 7.075.710.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	11	11,3	13,3	Rp 6.975.710.000,00	15,3	Rp 7.025.710.000,00	17,3	Rp 7.025.710.000,00	19,3	Rp 7.075.710.000,00	21,3	Rp 7.075.710.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					Rp 200.000.000,00		Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00		Rp 500.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Terlaksananya Pengolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	-	-	76	Rp 200.000.000,00	77	Rp 500.000.000,00	78	Rp 500.000.000,00	79	Rp 500.000.000,00	80	Rp 500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Rp 3.500.000.000,00		Rp 3.480.000.000,00		Rp 3.480.000.000,00		Rp 3.480.000.000,00		Rp 3.480.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	88,28	88,40	90,45	Rp 3.500.000.000,00	90,65	Rp 3.480.000.000,00	90,85	Rp 3.480.000.000,00	91,05	Rp 3.480.000.000,00	91,25	Rp 3.480.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					Rp 639.836.500,00		Rp 1.253.750.000,00		Rp 1.353.750.000,00		Rp 1.453.750.000,00		Rp 1.503.750.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	38,8	41,3	42,3	Rp 639.836.500,00	43,3	Rp 1.253.750.000,00	44,3	Rp 1.353.750.000,00	45,3	Rp 1.453.750.000,00	46,3	Rp 1.503.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					Rp -		Rp 800.000.000,00		Rp 1.126.780.000,00		Rp 1.206.908.160,00		Rp 1.259.848.211,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	-	50	Rp -	52	Rp 800.000.000,00	54	Rp 1.126.780.000,00	56	Rp 1.206.908.160,00	58	Rp 1.259.848.211,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					Rp 34.270.000.000,00		Rp 30.086.762.920,00		Rp 31.123.301.293,00		Rp 34.490.421.936,00		Rp 34.576.267.931,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	0,02	0,022	0,80	Rp 34.270.000.000,00	0,82	Rp 30.086.762.920,00	0,84	Rp 31.123.301.293,00	0,86	Rp 34.490.421.936,00	0,88	Rp 34.576.267.931,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	93,72	95	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					Rp -		Rp 130.000.000,00		Rp 140.847.500,00		Rp 150.988.520,00		Rp 170.988.520,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	-	-	20	Rp -	22	Rp 130.000.000,00	24	Rp 140.847.500,00	26	Rp 150.988.520,00	28	Rp 170.988.520,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					Rp 75.795.736.000,00		Rp 74.956.849.601,00		Rp 75.102.994.343,00		Rp 79.875.755.443,00		Rp 83.952.270.374,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	56,34	57,72	52,178	Rp 75.795.736.000,00	53,405	Rp 74.956.849.601,00	54,726	Rp 75.102.994.343,00	56,143	Rp 79.875.755.443,00	57,559	Rp 83.952.270.374,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					Rp 200.000.000,00		Rp 250.000.000,00		Rp 250.000.000,00		Rp 250.000.000,00		Rp 250.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	-	-	90	Rp 200.000.000,00	91	Rp 250.000.000,00	92	Rp 250.000.000,00	93	Rp 250.000.000,00	94	Rp 250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					Rp 1.000.000.000,00		Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)	-	-	50	Rp 1.000.000.000,00	51	Rp 400.000.000,00	52	Rp 400.000.000,00	53	Rp 400.000.000,00	54	Rp 400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Rp 59.391.680.685,00		Rp 58.680.284.962,59		Rp 63.213.919.770,19		Rp 66.787.302.853,61		Rp 69.217.227.464,29	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 5.865.764.878,00		Rp 9.681.709.162,59		Rp 7.536.838.792,19		Rp 8.252.281.198,61		Rp 9.032.417.957,29	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 5.865.764.878,00	100	Rp 9.681.709.162,59	100	Rp 7.536.838.792,19	100	Rp 8.252.281.198,61	100	Rp 9.032.417.957,29	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					Rp 784.236.800,00		Rp 674.217.992,00		Rp 717.347.983,00		Rp 768.957.092,00		Rp 803.797.392,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warna negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0,60	0,65	Rp 784.236.800,00	0,70	Rp 674.217.992,00	0,75	Rp 717.347.983,00	0,80	Rp 768.957.092,00	0,85	Rp 803.797.392,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					Rp 3.627.631.701,00		Rp 7.742.507.336,00		Rp 6.676.531.899,00		Rp 6.661.242.196,00		Rp 8.291.675.610,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0	0	17,68	Rp 3.627.631.701,00	18,75	Rp 7.742.507.336,00	19,93	Rp 6.676.531.899,00	21,36	Rp 6.661.242.196,00	22,28	Rp 8.291.675.610,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					Rp 5.118.750.000,00		Rp 2.771.423.000,00		Rp 2.946.022.640,00		Rp 3.158.136.280,00		Rp 3.293.936.140,00	
Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	-	-	17,68	Rp 5.118.750.000,00	18,75	Rp 2.771.423.000,00	19,93	Rp 2.946.022.640,00	21,36	Rp 3.158.136.280,00	22,28	Rp 3.293.936.140,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					Rp 43.995.297.306,00		Rp 37.810.427.472,00		Rp 45.337.178.456,00		Rp 47.946.686.087,00		Rp 47.795.400.365,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,	0	0	18	Rp 43.995.297.306,00	19	Rp 37.810.427.472,00	20	Rp 45.337.178.456,00	21	Rp 47.946.686.087,00	22	Rp 47.795.400.365,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dan Utilitas Umum) (Persentase)													Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					Rp 29.866.566.171,00		Rp 30.859.965.105,53		Rp 33.012.298.346,86		Rp 35.527.643.486,77		Rp 37.112.240.970,27	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 19.355.470.091,00		Rp 20.735.013.730,53		Rp 21.806.442.438,86		Rp 22.469.263.876,77		Rp 23.010.563.822,27	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 19.355.470.091,00	100	Rp 20.735.013.730,53	100	Rp 21.806.442.438,86	100	Rp 22.469.263.876,77	100	Rp 23.010.563.822,27	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp 5.839.011.000,00		Rp 6.311.660.700,00		Rp 6.616.665.800,00		Rp 6.961.165.800,00		Rp 7.236.165.800,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	Rp 347.670.000,00	100	Rp 660.000.000,00	100	Rp 780.000.000,00	100	Rp 880.000.000,00	100	Rp 910.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	Rp 4.768.061.500,00	100	Rp 4.921.665.800,00	100	Rp 5.021.665.800,00	100	Rp 5.176.165.800,00	100	Rp 5.391.165.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	0	0	100	Rp 648.284.600,00	100	Rp 595.000.000,00	100	Rp 595.000.000,00	100	Rp 605.000.000,00	100	Rp 610.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	Rp 74.994.900,00	100	Rp 134.994.900,00	100	Rp 220.000.000,00	100	Rp 300.000.000,00	100	Rp 325.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					Rp 1.801.841.880,00		Rp 1.962.790.675,00		Rp 2.334.622.380,00		Rp 2.684.917.601,00		Rp 2.912.823.152,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	Rp 507.879.525,00	100	Rp 683.106.657,00	100	Rp 814.133.182,00	100	Rp 930.452.616,00	100	Rp 1.058.861.668,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	Rp 655.862.355,00	100	Rp 880.009.018,00	100	Rp 742.489.198,00	100	Rp 861.664.985,00	100	Rp 961.831.484,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	Rp 638.100.000,00	100	Rp 399.675.000,00	100	Rp 778.000.000,00	100	Rp 892.800.000,00	100	Rp 892.130.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					Rp 2.870.243.200,00		Rp 1.850.500.000,00		Rp 2.254.567.728,00		Rp 3.412.296.209,00		Rp 3.952.688.196,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	Rp -	100	Rp 30.000.000,00	100	Rp 50.000.000,00	100	Rp 60.000.000,00	100	Rp 60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	Rp 2.870.243.200,00	100	Rp 1.820.500.000,00	100	Rp 2.204.567.728,00	100	Rp 3.352.296.209,00	100	Rp 3.892.688.196,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					Rp 10.845.324.417,00		Rp 11.158.071.943,20		Rp 11.829.008.855,55		Rp 12.607.316.064,48		Rp 13.105.213.498,69	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 7.277.942.617,00		Rp 7.390.690.143,20		Rp 7.611.627.055,55		Rp 7.656.934.264,48		Rp 8.024.831.698,69	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	20	20	100	Rp 7.277.942.617,00	100	Rp 7.390.690.143,20	100	Rp 7.611.627.055,55	100	Rp 7.656.934.264,48	100	Rp 8.024.831.698,69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					Rp 827.306.000,00		Rp 886.306.000,00		Rp 1.066.306.000,00		Rp 1.293.306.000,00		Rp 1.391.306.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan sosial (%)	35	40	60	Rp 827.306.000,00	62	Rp 886.306.000,00	63	Rp 1.066.306.000,00	65	Rp 1.293.306.000,00	65	Rp 1.391.306.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kompetansinya dalam Pelayanan Sosial (%)	35	40	63		65		68		71		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					Rp -		Rp -		Rp 20.000.000,00		Rp -		Rp -	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	10	Rp -	10	Rp -	10	Rp 20.000.000,00	10	Rp -	10	Rp -	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					Rp 473.933.667,00		Rp 523.933.667,00		Rp 543.933.667,00		Rp 851.933.667,00		Rp 851.933.667,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	Rp 473.933.667,00	100	Rp 523.933.667,00	100	Rp 543.933.667,00	100	Rp 851.933.667,00	100	Rp 851.933.667,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					Rp 1.877.085.154,00		Rp 1.927.085.154,00		Rp 1.937.085.154,00		Rp 2.097.085.154,00		Rp 2.097.085.154,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	50	85	100	Rp 1.877.085.154,00	100	Rp 1.927.085.154,00	100	Rp 1.937.085.154,00	100	Rp 2.097.085.154,00	100	Rp 2.097.085.154,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	0	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	50	85	55		60		62		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	26	230	230		230		230		230		230		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					Rp 389.056.979,00		Rp 389.056.979,00		Rp 569.056.979,00		Rp 594.056.979,00		Rp 594.056.979,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	Rp 389.056.979,00	100	Rp 389.056.979,00	100	Rp 569.056.979,00	100	Rp 594.056.979,00	100	Rp 594.056.979,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	85	85	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	0	0	70		71		72		73		74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					Rp -		Rp 41.000.000,00		Rp 81.000.000,00		Rp 114.000.000,00		Rp 146.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik (%)	0	0	35	Rp -	40	Rp 41.000.000,00	50	Rp 81.000.000,00	54	Rp 114.000.000,00	55	Rp 146.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					Rp 4.814.123.792,00		Rp 4.974.247.504,19		Rp 5.321.177.198,29		Rp 5.726.619.953,70		Rp 5.982.037.613,78	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 3.828.123.792,00		Rp 4.015.247.504,19		Rp 4.302.177.198,29		Rp 4.697.619.953,70		Rp 4.913.037.613,78	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 3.828.123.792,00	100	Rp 4.015.247.504,19	100	Rp 4.302.177.198,29	100	Rp 4.697.619.953,70	100	Rp 4.913.037.613,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					Rp 150.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 70.000.000,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	20	21,30	22,11	Rp 150.000.000,00	23,45	Rp 50.000.000,00	24,17	Rp 50.000.000,00	25,36	Rp 50.000.000,00	25,70	Rp 70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					Rp 56.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,83	2,14	2,83	Rp 56.000.000,00	3,47	Rp 200.000.000,00	3,98	Rp 200.000.000,00	4,41	Rp 200.000.000,00	4,99	Rp 200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					Rp 65.000.000,00		Rp 384.000.000,00		Rp 404.000.000,00		Rp 404.000.000,00		Rp 424.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	87,22	87,83	88,11	Rp 65.000.000,00	88,73	Rp 384.000.000,00	88,98	Rp 404.000.000,00	89,05	Rp 404.000.000,00	89,21	Rp 424.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					Rp 715.000.000,00		Rp 325.000.000,00		Rp 365.000.000,00		Rp 375.000.000,00		Rp 375.000.000,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	10	13	15	Rp 715.000.000,00	17	Rp 325.000.000,00	19	Rp 365.000.000,00	21	Rp 375.000.000,00	22	Rp 375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					Rp 6.247.389.580,00		Rp 6.380.709.059,00		Rp 6.732.497.011,95		Rp 7.093.418.709,92		Rp 7.376.296.342,57	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 4.947.389.580,00		Rp 5.194.759.059,00		Rp 5.454.497.011,95		Rp 5.730.418.709,92		Rp 6.003.296.342,57	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 4.947.389.580,00	100	Rp 5.194.759.059,00	100	Rp 5.454.497.011,95	100	Rp 5.730.418.709,92	100	Rp 6.003.296.342,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					Rp 370.000.000,00		Rp 383.000.000,00		Rp 411.000.000,00		Rp 440.000.000,00		Rp 440.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase ARG Daerah (%)	0	0	0,024	Rp 370.000.000,00	0,026	Rp 383.000.000,00	0,28	Rp 411.000.000,00	0,03	Rp 440.000.000,00	0,32	Rp 440.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	0	0	69,77		70,77		71,77		72,77		73,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					Rp 117.980.681,00		Rp 121.000.000,00		Rp 126.000.000,00		Rp 136.000.000,00		Rp 142.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0	0	100	Rp 117.980.681,00	100	Rp 121.000.000,00	100	Rp 126.000.000,00	100	Rp 136.000.000,00	100	Rp 142.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					Rp 255.000.000,00		Rp 261.000.000,00		Rp 272.000.000,00		Rp 305.000.000,00		Rp 306.000.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	60	Rp 255.000.000,00	65	Rp 261.000.000,00	70	Rp 272.000.000,00	75	Rp 305.000.000,00	80	Rp 306.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					Rp 39.000.000,00		Rp 40.950.000,00		Rp 45.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	0	15	Rp 39.000.000,00	16	Rp 40.950.000,00	20	Rp 45.000.000,00	24	Rp 50.000.000,00	29	Rp 50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					Rp 300.000.000,00		Rp 308.000.000,00		Rp 321.000.000,00		Rp 325.000.000,00		Rp 325.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	0	50	60	Rp 300.000.000,00	70	Rp 308.000.000,00	72	Rp 321.000.000,00	73	Rp 325.000.000,00	75	Rp 325.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					Rp 218.019.319,00		Rp 72.000.000,00		Rp 103.000.000,00		Rp 107.000.000,00		Rp 110.000.000,00	
Meningkatnya penanganan dan pencegahan tingkat kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	100	100	Rp 218.019.319,00	100	Rp 72.000.000,00	100	Rp 103.000.000,00	100	Rp 107.000.000,00	100	Rp 110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	0	0	100			100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					Rp 873.500.000,00		Rp 1.745.000.000,00		Rp 1.775.000.000,00		Rp 1.745.000.000,00		Rp 1.745.000.000,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					Rp 100.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0	0	26,98	Rp 100.000.000,00	40,48	Rp 200.000.000,00	60,72	Rp 200.000.000,00	91,07	Rp 200.000.000,00	100	Rp 200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					Rp 596.000.000,00		Rp 1.160.000.000,00		Rp 1.190.000.000,00		Rp 1.160.000.000,00		Rp 1.160.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	89,38	89,86	89,86	Rp 596.000.000,00	90,34	Rp 1.160.000.000,00	90,82	Rp 1.190.000.000,00	91,30	Rp 1.160.000.000,00	91,78	Rp 1.160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					Rp 107.500.000,00		Rp 225.000.000,00		Rp 225.000.000,00		Rp 225.000.000,00		Rp 225.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	11,47	11,46	11,45	Rp 107.500.000,00	11,44	Rp 225.000.000,00	10,92	Rp 225.000.000,00	10,39	Rp 225.000.000,00	9,87	Rp 225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					Rp 70.000.000,00		Rp 160.000.000,00		Rp 160.000.000,00		Rp 160.000.000,00		Rp 160.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan kamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	88,89	92,31	93,69	Rp 70.000.000,00	95,10	Rp 160.000.000,00	96,52	Rp 160.000.000,00	97,97	Rp 160.000.000,00	99,44	Rp 160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					Rp 816.932.757,00		Rp 3.530.941.438,00		Rp 3.336.238.645,00		Rp 4.833.590.588,00		Rp 5.598.088.021,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					Rp -		Rp 159.000.000,00		Rp 169.017.000,00		Rp 181.186.224,00		Rp 188.977.232,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	0	18	Rp -	19	Rp 159.000.000,00	20	Rp 169.017.000,00	21	Rp 181.186.224,00	22	Rp 188.977.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					Rp -		Rp 1.964.536.094,00		Rp 1.785.259.548,00		Rp 3.080.451.926,00		Rp 3.779.544.617,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	0	0,18	Rp -	0,19	Rp 1.964.536.094,00	0,20	Rp 1.785.259.548,00	0,21	Rp 3.080.451.926,00	0,22	Rp 3.779.544.617,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					Rp 612.096.256,00		Rp 770.128.256,00		Rp 704.536.553,00		Rp 845.752.254,00		Rp 872.139.462,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0	0,18	Rp 612.096.256,00	0,19	Rp 770.128.256,00	0,20	Rp 704.536.553,00	0,21	Rp 845.752.254,00	0,22	Rp 872.139.462,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					Rp -		Rp 424.000.000,00		Rp 450.712.000,00		Rp 483.163.264,00		Rp 503.939.284,00	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	0,18	Rp -	0,19	Rp 424.000.000,00	0,20	Rp 450.712.000,00	0,21	Rp 483.163.264,00	0,22	Rp 503.939.284,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					Rp 51.209.625,00		Rp 132.500.000,00		Rp 140.847.500,00		Rp 150.988.520,00		Rp 157.481.026,00	
Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah (%)	0	60	65	Rp 51.209.625,00	70	Rp 132.500.000,00	75	Rp 140.847.500,00	80	Rp 150.988.520,00	85	Rp 157.481.026,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					Rp 153.626.876,00		Rp 80.777.088,00		Rp 85.866.044,00		Rp 92.048.400,00		Rp 96.006.400,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	0	0,13	Rp 153.626.876,00	0,20	Rp 80.777.088,00	0,21	Rp 85.866.044,00	0,23	Rp 92.048.400,00	0,24	Rp 96.006.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					Rp 24.405.353.511,00		Rp 25.217.105.757,17		Rp 26.975.876.863,54		Rp 29.031.281.793,26		Rp 30.326.129.735,81	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 11.478.759.176,00		Rp 12.191.090.121,17		Rp 13.049.376.833,00		Rp 14.180.008.110,26		Rp 15.028.634.214,00	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 11.478.759.176,00	100	Rp 12.191.090.121,17	100	Rp 13.049.376.833,00	100	Rp 14.180.008.110,26	100	Rp 15.028.634.214,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					Rp -		Rp -		Rp -		Rp 302.368.048,00		Rp -	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	15	15	100	Rp -	100	Rp -	100	Rp -	100	Rp 302.368.048,00	100	Rp -	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					Rp 769.678.000,00		Rp 866.150.000,00		Rp 1.019.811.000,00		Rp 1.098.901.500,00		Rp 1.159.790.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	60,37	74,98	75,18	Rp 769.678.000,00	75,38	Rp 866.150.000,00	75,58	Rp 1.019.811.000,00	75,78	Rp 1.098.901.500,00	75,98	Rp 1.159.790.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	87,02	80,39	80,69		80,99		81,29		81,59		81,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					Rp 2.758.260.000,00		Rp 2.758.260.000,00		Rp 2.975.139.340,54		Rp 3.300.139.340,00		Rp 3.827.994.936,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	20	20	20	Rp 2.758.260.000,00	20	Rp 2.758.260.000,00	20	Rp 2.975.139.340,54	20	Rp 3.300.139.340,00	20	Rp 3.827.994.936,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					Rp -		Rp -		Rp 33.356.617,00		Rp 38.942.345,00		Rp 40.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	20	Rp -	20	Rp -	20	Rp 33.356.617,00	20	Rp 38.942.345,00	20	Rp 40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					Rp 263.380.600,00		Rp 300.000.000,00		Rp 320.000.000,00		Rp 400.000.000,00		Rp 450.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	60	20	90	Rp 263.380.600,00	91	Rp 300.000.000,00	92	Rp 320.000.000,00	93	Rp 400.000.000,00	93	Rp 450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					Rp -		Rp 15.000.000,00		Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	25	20	Rp -	20	Rp 15.000.000,00	20	Rp 25.000.000,00	20	Rp 25.000.000,00	20	Rp 25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					Rp -		Rp 15.000.000,00		Rp 15.000.000,00		Rp 15.000.000,00		Rp 39.724.404,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	50	20	50	Rp -	50	Rp 15.000.000,00	50	Rp 15.000.000,00	50	Rp 15.000.000,00	50	Rp 39.724.404,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					Rp 137.250.000,00		Rp 140.000.000,00		Rp 155.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	30	20	30	Rp 137.250.000,00	30	Rp 140.000.000,00	30	Rp 155.000.000,00	30	Rp 200.000.000,00	30	Rp 200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					Rp 132.450.000,00		Rp 140.000.000,00		Rp 155.000.000,00		Rp 170.000.000,00		Rp 170.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	70	20	70	Rp 132.450.000,00	70	Rp 140.000.000,00	70	Rp 155.000.000,00	70	Rp 170.000.000,00	70	Rp 170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					Rp 8.865.575.735,00		Rp 8.791.605.636,00		Rp 9.228.193.073,00		Rp 9.300.922.450,00		Rp 9.384.986.181,81	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (point)	71,06	72,86	74,01	Rp 8.865.575.735,00	76,11	Rp 8.791.605.636,00	78,82	Rp 9.228.193.073,00	80,16	Rp 9.300.922.450,00	82,18	Rp 9.384.986.181,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					Rp 10.832.696.453,00		Rp 11.193.005.336,62		Rp 11.973.663.298,28		Rp 12.885.986.804,75		Rp 13.460.725.241,05	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 10.040.446.453,00		Rp 10.377.582.884,62		Rp 11.111.205.232,28		Rp 11.978.551.757,75		Rp 12.506.262.487,05	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 10.040.446.453,00	100	Rp 10.377.582.884,62	100	Rp 11.111.205.232,28	100	Rp 11.978.551.757,75	100	Rp 12.506.262.487,05	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					Rp 130.000.000,00		Rp 111.622.452,00		Rp 118.654.666,00		Rp 127.197.802,00		Rp 132.667.308,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5	5	5	Rp 130.000.000,00	10	Rp 111.622.452,00	20	Rp 118.654.666,00	25	Rp 127.197.802,00	30	Rp 132.667.308,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	0	60	60		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					Rp 249.029.500,00		Rp 187.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 207.000.000,00		Rp 214.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	Rp 249.029.500,00	100	Rp 187.000.000,00	100	Rp 200.000.000,00	100	Rp 207.000.000,00	100	Rp 214.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	27	29	96,5		97		97,5		98		98,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2,5	3	5		6		7		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2,5	2,6	1,5		2		3		4		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Rp 363.220.500,00		Rp 485.000.000,00		Rp 510.000.000,00		Rp 540.000.000,00		Rp 570.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	Rp 363.220.500,00	100	Rp 485.000.000,00	100	Rp 510.000.000,00	100	Rp 540.000.000,00	100	Rp 570.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					Rp 50.000.000,00		Rp 31.800.000,00		Rp 33.803.400,00		Rp 33.237.245,00		Rp 37.795.446,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	Rp 50.000.000,00	100	Rp 31.800.000,00	100	Rp 33.803.400,00	100	Rp 33.237.245,00	100	Rp 37.795.446,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					Rp 4.570.444.000,00		Rp 4.770.444.000,00		Rp 5.210.444.000,00		Rp 5.730.444.000,00		Rp 6.050.444.000,00	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					Rp -		Rp -		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	0	0	30	Rp -	35	Rp -	45	Rp 50.000.000,00	55	Rp 50.000.000,00	65	Rp 50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					Rp -		Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	0	0	50	Rp -	60	Rp 20.000.000,00	70	Rp 20.000.000,00	80	Rp 20.000.000,00	100	Rp 20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					Rp 3.325.000.000,00		Rp 3.405.000.000,00		Rp 3.575.000.000,00		Rp 3.835.000.000,00		Rp 3.995.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	0	20	Rp 3.325.000.000,00	45	Rp 3.405.000.000,00	65	Rp 3.575.000.000,00	100	Rp 3.835.000.000,00	45	Rp 3.995.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	0	0	20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Rp 1.245.444.000,00		Rp 1.345.444.000,00		Rp 1.565.444.000,00		Rp 1.825.444.000,00		Rp 1.985.444.000,00	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0	0	55	Rp 1.245.444.000,00	60	Rp 1.345.444.000,00	65	Rp 1.565.444.000,00	70	Rp 1.825.444.000,00	75	Rp 1.985.444.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	0	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					Rp 300.000.000,00		Rp 384.454.797,28		Rp 504.504.288,12		Rp 695.000.000,00		Rp 759.500.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					Rp 25.000.000,00		Rp 31.500.000,00		Rp 66.004.288,12		Rp 70.000.000,00		Rp 78.000.000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	17,6	16.8-0	16.1-0	Rp 25.000.000,00	15.4-0	Rp 31.500.000,00	14.8-0	Rp 66.004.288,12	14.2-0	Rp 70.000.000,00	13.7-0	Rp 78.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,18	2,16	2,15		2,14		2,12		2,11		2,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	66,6	75,4	80,9		84,3		86,5		87,8		88,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					Rp 25.000.000,00		Rp 59.750.000,00		Rp 124.500.000,00		Rp 211.000.000,00		Rp 246.500.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	0	0	71,82	Rp 25.000.000,00	73,14	Rp 59.750.000,00	75,28	Rp 124.500.000,00	77,18	Rp 211.000.000,00	79,64	Rp 246.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	0	0	3,8		3,22		2,84		2,31		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10,2	8,1	6,7		5,8		5,2		4,8		4,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	60,2	60,7	61,2		61,7		62,2		62,7		63,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	85,0	86,1	87,1		88,1		89,0		89,8		90,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	35,3	39,3	43,3		47,3		51,3		55,3		59,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					Rp 250.000.000,00		Rp 293.204.797,28		Rp 314.000.000,00		Rp 414.000.000,00		Rp 435.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	1	1	1	Rp 250.000.000,00	1	Rp 293.204.797,28	1	Rp 314.000.000,00	1	Rp 414.000.000,00	1	Rp 435.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					Rp 27.667.972.202,00		Rp 28.588.243.181,55		Rp 30.582.134.811,06		Rp 32.912.315.622,98		Rp 34.380.264.729,48	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 8.745.000.000,00		Rp 9.025.000.000,00		Rp 9.640.000.000,00		Rp 9.640.000.000,00		Rp 10.055.000.000,00	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 8.745.000.000,00	100	Rp 9.025.000.000,00	100	Rp 9.640.000.000,00	100	Rp 9.640.000.000,00	100	Rp 10.055.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					Rp 18.922.972.202,00		Rp 19.563.243.181,55		Rp 20.942.134.811,06		Rp 23.272.315.622,98		Rp 24.325.264.729,48	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	33	33	33	Rp 18.922.972.202,00	55	Rp 19.563.243.181,55	65	Rp 20.942.134.811,06	85	Rp 23.272.315.622,98	100	Rp 24.325.264.729,48	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Rp 12.093.337.358,00		Rp 12.462.565.903,02		Rp 13.287.881.661,37		Rp 14.264.008.538,94		Rp 14.913.589.794,99	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 10.077.147.758,00		Rp 7.087.565.903,02		Rp 7.067.881.661,37		Rp 7.524.008.538,94		Rp 7.488.952.476,99	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 10.077.147.758,00	100	Rp 7.087.565.903,02	100	Rp 7.067.881.661,37	100	Rp 7.524.008.538,94	100	Rp 7.488.952.476,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					Rp 1.399.999.600,00		Rp 1.420.000.000,00		Rp 1.720.000.000,00		Rp 2.060.000.000,00		Rp 2.224.637.318,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	0	80	Rp 1.399.999.600,00	85	Rp 1.420.000.000,00	90	Rp 1.720.000.000,00	95	Rp 2.060.000.000,00	100	Rp 2.224.637.318,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					Rp 616.190.000,00		Rp 3.955.000.000,00		Rp 4.500.000.000,00		Rp 4.680.000.000,00		Rp 5.200.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,23	3,3	3,44	Rp 616.190.000,00	3,58	Rp 3.955.000.000,00	3,62	Rp 4.500.000.000,00	3,8	Rp 4.680.000.000,00	4	Rp 5.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					Rp 7.473.806.048,39		Rp 7.642.878.062,39		Rp 7.919.532.599,05		Rp 8.329.810.273,98		Rp 8.833.201.764,98	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 5.978.440.715,39		Rp 6.059.165.016,39		Rp 6.225.591.046,55		Rp 6.531.342.015,98		Rp 6.896.595.165,98	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 5.978.440.715,39	100	Rp 6.059.165.016,39	100	Rp 6.225.591.046,55	100	Rp 6.531.342.015,98	100	Rp 6.896.595.165,98	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN					Rp 125.000.000,00		Rp 132.500.000,00		Rp 140.847.500,00		Rp 150.988.252,00		Rp 157.481.027,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
USAHA SIMPAN PINJAM														
Meningkatnya kualitas pelayanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	0	20	Rp 125.000.000,00	23	Rp 132.500.000,00	26	Rp 140.847.500,00	30	Rp 150.988.252,00	33	Rp 157.481.027,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					Rp 129.098.000,00		Rp 129.098.000,00		Rp 133.252.826,00		Rp 138.249.022,00		Rp 200.447.698,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	20	20	30	Rp 129.098.000,00	31	Rp 129.098.000,00	36	Rp 133.252.826,00	41	Rp 138.249.022,00	46	Rp 200.447.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					Rp 62.317.000,00		Rp 66.056.000,00		Rp 70.217.549,50		Rp 75.273.213,00		Rp 78.509.961,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	30	30	30	Rp 62.317.000,00	31	Rp 66.056.000,00	32	Rp 70.217.549,50	33	Rp 75.273.213,00	34	Rp 78.509.961,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					Rp 158.556.000,00		Rp 171.769.000,00		Rp 184.982.000,00		Rp 198.195.000,00		Rp 211.408.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	30	30	Rp 158.556.000,00	35	Rp 171.769.000,00	40	Rp 184.982.000,00	45	Rp 198.195.000,00	50	Rp 211.408.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					Rp 136.407.000,00		Rp 144.591.420,00		Rp 153.700.679,00		Rp 164.767.128,00		Rp 171.852.115,00	
Meningkatnya produktivitas kopersa	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	30	30	30	Rp 136.407.000,00	32	Rp 144.591.420,00	34	Rp 153.700.679,00	37	Rp 164.767.128,00	40	Rp 171.852.115,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					Rp 557.333.333,00		Rp 589.366.666,00		Rp 635.020.000,00		Rp 665.733.333,00		Rp 690.387.333,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	25	25	30	Rp 557.333.333,00	33	Rp 589.366.666,00	38	Rp 635.020.000,00	43	Rp 665.733.333,00	45	Rp 690.387.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	0	30				33				38		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					Rp 326.654.000,00		Rp 350.331.960,00		Rp 375.920.998,00		Rp 405.262.310,00		Rp 426.520.465,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0	0	20	Rp 326.654.000,00	25	Rp 350.331.960,00	30	Rp 375.920.998,00	35	Rp 405.262.310,00	40	Rp 426.520.465,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					Rp 6.648.368.757,00		Rp 6.766.175.601,91		Rp 7.238.083.610,07		Rp 7.789.583.485,65		Rp 8.137.013.069,42	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 5.638.368.757,00		Rp 5.756.175.601,91		Rp 5.911.083.610,07		Rp 6.089.583.485,65		Rp 6.371.013.069,42	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 5.638.368.757,00	100	Rp 5.756.175.601,91	100	Rp 5.911.083.610,07	100	Rp 6.089.583.485,65	100	Rp 6.371.013.069,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					Rp -		Rp -		Rp 275.000.000,00		Rp 350.000.000,00		Rp -	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	85	85	Rp -	85	Rp -	85	Rp 275.000.000,00	85	Rp 350.000.000,00	85	Rp -	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					Rp 275.000.000,00		Rp 275.000.000,00		Rp 275.000.000,00		Rp 350.000.000,00		Rp 600.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	80	80	80	Rp 275.000.000,00	80	Rp 275.000.000,00	80	Rp 275.000.000,00	80	Rp 350.000.000,00	80	Rp 600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					Rp 625.000.000,00		Rp 625.000.000,00		Rp 625.000.000,00		Rp 825.000.000,00		Rp 781.000.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	80	80	80	Rp 625.000.000,00	80	Rp 625.000.000,00	80	Rp 625.000.000,00	80	Rp 825.000.000,00	80	Rp 781.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 235.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	40	40	40	Rp 50.000.000,00	45	Rp 50.000.000,00	50	Rp 50.000.000,00	55	Rp 50.000.000,00	60	Rp 235.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					Rp 60.000.000,00		Rp 60.000.000,00		Rp 102.000.000,00		Rp 125.000.000,00		Rp 150.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	80	80	80	Rp 60.000.000,00	80	Rp 60.000.000,00	80	Rp 102.000.000,00	80	Rp 125.000.000,00	80	Rp 150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Rp 14.500.000.000,00		Rp 23.655.000.000,00		Rp 27.543.000.000,00		Rp 35.099.800.000,00		Rp 51.575.750.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					Rp 430.000.000,00		Rp 3.755.000.000,00		Rp 4.813.000.000,00		Rp 5.374.300.000,00		Rp 3.896.700.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	35	35	35	Rp 430.000.000,00	40	Rp 3.755.000.000,00	45	Rp 4.813.000.000,00	50	Rp 5.374.300.000,00	55	Rp 3.896.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					Rp 13.490.000.000,00		Rp 17.150.000.000,00		Rp 21.255.000.000,00		Rp 28.063.000.000,00		Rp 45.826.300.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	20	30	30	Rp 13.490.000.000,00	35	Rp 17.150.000.000,00	40	Rp 21.255.000.000,00	45	Rp 28.063.000.000,00	50	Rp 45.826.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					Rp 580.000.000,00		Rp 2.750.000.000,00		Rp 1.475.000.000,00		Rp 1.662.500.000,00		Rp 1.852.750.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	30	30	30	Rp 580.000.000,00	35	Rp 2.750.000.000,00	40	Rp 1.475.000.000,00	50	Rp 1.662.500.000,00	55	Rp 1.852.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					Rp 75.000.000,00		Rp 83.000.000,00		Rp 85.000.000,00		Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					Rp 75.000.000,00		Rp 83.000.000,00		Rp 85.000.000,00		Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	85	90	95	Rp 75.000.000,00	95	Rp 83.000.000,00	95	Rp 85.000.000,00	100	Rp 100.000.000,00	100	Rp 100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					Rp 75.000.000,00		Rp 105.000.000,00		Rp 160.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					Rp 75.000.000,00		Rp 105.000.000,00		Rp 160.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	0	0	70	Rp 75.000.000,00	75	Rp 105.000.000,00	80	Rp 160.000.000,00	85	Rp 200.000.000,00	85	Rp 200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					Rp 8.046.477.322,00		Rp 8.346.715.734,81		Rp 8.974.935.930,84		Rp 9.632.613.923,24		Rp 10.120.549.339,73	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 5.177.288.722,00		Rp 5.451.595.656,81		Rp 5.864.564.092,84		Rp 6.294.179.181,24		Rp 6.582.145.347,73	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah					Rp 5.177.288.722,00		Rp 5.451.595.656,81		Rp 5.864.564.092,84		Rp 6.294.179.181,24		Rp 6.582.145.347,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					Rp 2.110.275.200,00		Rp 2.122.617.544,00		Rp 2.291.848.424,00		Rp 2.452.627.810,00		Rp 2.564.016.365,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	15	20	25	Rp 2.110.275.200,00	30	Rp 2.122.617.544,00	40	Rp 2.291.848.424,00	60	Rp 2.452.627.810,00	85	Rp 2.564.016.365,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					Rp 400.000.000,00		Rp 410.000.000,00		Rp 422.300.000,00		Rp 451.861.000,00		Rp 497.047.100,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan	20	30	40	Rp 400.000.000,00	50	Rp 410.000.000,00	60	Rp 422.300.000,00	70	Rp 451.861.000,00	80	Rp 497.047.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dikembangkan (Persentase)													
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					Rp 120.000.000,00		Rp 121.200.000,00		Rp 124.836.000,00		Rp 143.561.400,00		Rp 157.917.541,00	
Meningkatnya askes masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0	5	Rp 120.000.000,00	6	Rp 121.200.000,00	7	Rp 124.836.000,00	8	Rp 143.561.400,00	9	Rp 157.917.541,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					Rp 238.913.400,00		Rp 241.302.534,00		Rp 271.387.414,00		Rp 290.384.532,00		Rp 319.422.986,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	15	25	30	Rp 238.913.400,00	35	Rp 241.302.534,00	45	Rp 271.387.414,00	50	Rp 290.384.532,00	60	Rp 319.422.986,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Terlestarikannya cagar budaya (%)	25	30	35		40		45		50		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					Rp 5.186.038.810,00		Rp 5.339.704.228,36		Rp 5.719.048.656,50		Rp 6.164.674.012,24		Rp 6.435.627.735,60	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 5.014.128.010,00		Rp 5.105.850.161,36		Rp 5.470.767.556,50		Rp 5.899.700.302,24		Rp 6.114.494.104,60	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 5.014.128.010,00	100	Rp 5.105.850.161,36	100	Rp 5.470.767.556,50	100	Rp 5.899.700.302,24	100	Rp 6.114.494.104,60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					Rp 171.910.800,00		Rp 233.854.067,00		Rp 248.281.100,00		Rp 264.973.710,00		Rp 284.033.631,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	77,83	79,28	81,98	Rp 171.910.800,00	84,00	Rp 233.854.067,00	87,14	Rp 248.281.100,00	90,12	Rp 264.973.710,00	94,38	Rp 284.033.631,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 37.100.000,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	20	22	Rp -	25	Rp -	27	Rp -	30	Rp -	32	Rp 37.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					Rp 328.089.200,00		Rp 357.830.500,00		Rp 375.861.550,00		Rp 394.632.905,00		Rp 416.236.194,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					Rp 253.089.200,00		Rp 278.830.500,00		Rp 292.911.550,00		Rp 307.347.905,00		Rp 324.192.694,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0,17	0,19	0,21	Rp 253.089.200,00	0,23	Rp 278.830.500,00	0,25	Rp 292.911.550,00	0,27	Rp 307.347.905,00	0,30	Rp 324.192.694,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					Rp 35.000.000,00		Rp 38.500.000,00		Rp 42.350.000,00		Rp 46.585.000,00		Rp 51.243.500,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0,1	13,51	Rp 35.000.000,00	16,22	Rp 38.500.000,00	20,27	Rp 42.350.000,00	22,97	Rp 46.585.000,00	27,03	Rp 51.243.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					Rp 40.000.000,00		Rp 40.500.000,00		Rp 40.600.000,00		Rp 40.700.000,00		Rp 40.800.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	15	17,50	Rp 40.000.000,00	16,22	Rp 40.500.000,00	20,27	Rp 40.600.000,00	22,97	Rp 40.700.000,00	27,03	Rp 40.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					Rp 7.283.479.913,00		Rp 7.525.737.464,26		Rp 8.050.621.236,96		Rp 8.664.031.754,12		Rp 9.050.463.320,28	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 4.875.246.313,00		Rp 5.120.737.464,26		Rp 5.413.407.325,96		Rp 5.519.031.754,12		Rp 5.722.046.313,28	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 4.875.246.313,00	100	Rp 5.120.737.464,26	100	Rp 5.413.407.325,96	100	Rp 5.519.031.754,12	100	Rp 5.722.046.313,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					Rp 213.200.000,00		Rp 290.000.000,00		Rp 270.000.000,00		Rp 370.000.000,00		Rp 420.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	488	500	500	Rp 213.200.000,00	510	Rp 290.000.000,00	515	Rp 270.000.000,00	520	Rp 370.000.000,00	550	Rp 420.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					Rp 1.895.033.600,00		Rp 1.580.000.000,00		Rp 1.807.213.911,00		Rp 2.080.000.000,00		Rp 2.233.417.007,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.100	4.150	7.600	Rp 1.895.033.600,00	8.500	Rp 1.580.000.000,00	9.500	Rp 1.807.213.911,00	11.000	Rp 2.080.000.000,00	13.000	Rp 2.233.417.007,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					Rp 30.000.000,00		Rp 45.000.000,00		Rp 60.000.000,00		Rp 70.000.000,00		Rp 80.000.000,00	
Meningkatnya kelestarian sungai dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	0,04	0,04	0,04	Rp 30.000.000,00	0,05	Rp 45.000.000,00	0,05	Rp 60.000.000,00	0,06	Rp 70.000.000,00	0,06	Rp 80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					Rp 270.000.000,00		Rp 490.000.000,00		Rp 500.000.000,00		Rp 625.000.000,00		Rp 595.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,48	46,46	46,46	Rp 270.000.000,00	47,20	Rp 490.000.000,00	47,96	Rp 500.000.000,00	48,70	Rp 625.000.000,00	49,45	Rp 595.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					Rp 8.900.000.000,00		Rp 9.163.422.385,00		Rp 9.756.449.595,00		Rp 10.525.994.241,00		Rp 10.937.169.394,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					Rp 1.865.000.000,00		Rp 1.882.350.000,00		Rp 2.098.273.591,00		Rp 2.245.152.742,00		Rp 2.346.710.448,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	25	30	35	Rp 1.865.000.000,00	40	Rp 1.882.350.000,00	45	Rp 2.098.273.591,00	50	Rp 2.245.152.742,00	55	Rp 2.346.710.448,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					Rp 6.280.000.000,00		Rp 6.508.572.385,00		Rp 6.862.501.004,00		Rp 7.429.469.249,00		Rp 7.653.949.471,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	25	30	35	Rp 6.280.000.000,00	40	Rp 6.508.572.385,00	45	Rp 6.862.501.004,00	50	Rp 7.429.469.249,00	55	Rp 7.653.949.471,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					Rp 150.000.000,00		Rp 157.500.000,00		Rp 162.225.000,00		Rp 173.580.750,00		Rp 190.938.825,00	
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	20	25	30	Rp 150.000.000,00	35	Rp 157.500.000,00	40	Rp 162.225.000,00	45	Rp 173.580.750,00	50	Rp 190.938.825,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					Rp 605.000.000,00		Rp 615.000.000,00		Rp 633.450.000,00		Rp 677.791.500,00		Rp 745.570.650,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	15	20	25	Rp 605.000.000,00	30	Rp 615.000.000,00	35	Rp 633.450.000,00	40	Rp 677.791.500,00	45	Rp 745.570.650,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					Rp 49.149.413.889,99		Rp 49.941.737.882,21		Rp 53.516.637.748,39		Rp 57.759.538.977,72		Rp 60.413.549.586,57	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 32.765.363.321,00		Rp 32.823.040.816,00		Rp 33.922.635.111,92		Rp 35.557.396.524,74		Rp 36.699.116.740,49	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 32.765.363.321,00	100	Rp 32.823.040.816,00	100	Rp 33.922.635.111,92	100	Rp 35.557.396.524,74	100	Rp 36.699.116.740,49	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					Rp 4.241.912.710,95		Rp 4.424.704.457,14		Rp 4.866.100.218,21		Rp 5.510.504.010,40		Rp 6.060.346.649,25	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan (%)	20	20	28,4	Rp 4.241.912.710,95	36,8	Rp 4.424.704.457,14	45,2	Rp 4.866.100.218,21	53,6	Rp 5.510.504.010,40	62,00	Rp 6.060.346.649,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	20	20	27,50		35,00		42,50		50,00		57,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	5	14	15,05		15,42		15,8		16,19		16,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	16,01	20,00	64,20		65,79		67,40		69,04		70,73		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					Rp 9.624.576.016,54		Rp 10.351.446.289,86		Rp 11.617.933.117,13		Rp 12.769.894.211,34		Rp 13.992.596.196,83	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan Produktivitas Perkebunan (%)	20	20	22	Rp 9.624.576.016,54	24	Rp 10.351.446.289,86	26	Rp 11.617.933.117,13	28	Rp 12.769.894.211,34	30	Rp 13.992.596.196,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	5.409	5.409		5.409		5.409		5.409		5.409		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					Rp 580.694.870,50		Rp 632.744.819,21		Rp 922.949.301,13		Rp 1.024.970.000,00		Rp 1.004.970.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	90	100	100	Rp 580.694.870,50	100	Rp 632.744.819,21	100	Rp 922.949.301,13	100	Rp 1.024.970.000,00	100	Rp 1.004.970.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	20	25	25		31,82		41,67		52		61,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					Rp 539.660.900,00		Rp 652.300.000,00		Rp 798.200.000,00		Rp 961.200.000,00		Rp 1.023.200.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	Rp 539.660.900,00	100	Rp 652.300.000,00	100	Rp 798.200.000,00	100	Rp 961.200.000,00	100	Rp 1.023.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	0	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					Rp 245.754.821,00		Rp 268.600.000,00		Rp 370.100.000,00		Rp 478.600.000,00		Rp 548.600.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	20	25	26,6	Rp 245.754.821,00	33,2	Rp 268.600.000,00	39,8	Rp 370.100.000,00	46,4	Rp 478.600.000,00	53,0	Rp 548.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					Rp 1.151.451.250,00		Rp 788.901.500,00		Rp 1.018.720.000,00		Rp 1.456.974.231,24		Rp 1.084.720.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	20	20	25	Rp 1.151.451.250,00	30	Rp 788.901.500,00	35	Rp 1.018.720.000,00	40	Rp 1.456.974.231,24	45	Rp 1.084.720.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	20	36,60	36,60		40		60		73,3		83,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	25,3	27	30		35		40		45		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	2,5	5		7,5		10		12,5		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					Rp 3.298.928.117,61		Rp 3.503.675.469,81		Rp 4.106.598.323,20		Rp 4.637.188.928,27		Rp 4.712.747.698,35	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	20	Rp 30.000.000,00	21	Rp 30.000.000,00	22	Rp 30.000.000,00	23	Rp 30.000.000,00	25	Rp 30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					Rp 2.645.988.175,61		Rp 2.821.607.973,81		Rp 3.392.388.699,20		Rp 3.895.403.812,27		Rp 3.932.518.111,35	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	75	50	50	Rp 2.645.988.175,61	50,5	Rp 2.821.607.973,81	51	Rp 3.392.388.699,20	51,5	Rp 3.895.403.812,27	52,5	Rp 3.932.518.111,35	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					Rp 243.265.000,00		Rp 261.875.000,00		Rp 290.245.000,00		Rp 313.007.040,00		Rp 337.962.053,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	25	25	25	Rp 243.265.000,00	25	Rp 261.875.000,00	25	Rp 290.245.000,00	25	Rp 313.007.040,00	25	Rp 337.962.053,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					Rp 304.674.942,00		Rp 314.512.496,00		Rp 318.736.784,00		Rp 323.165.832,00		Rp 327.006.963,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	30	30	30	Rp 304.674.942,00	36	Rp 314.512.496,00	38	Rp 318.736.784,00	39	Rp 323.165.832,00	40	Rp 327.006.963,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					Rp 75.000.000,00		Rp 75.680.000,00		Rp 75.227.840,00		Rp 75.612.244,00		Rp 85.260.571,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	0	20	Rp 75.000.000,00	20	Rp 75.680.000,00	20	Rp 75.227.840,00	20	Rp 75.612.244,00	20	Rp 85.260.571,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					Rp 1.814.250.850,00		Rp 1.859.090.175,00		Rp 1.886.593.502,00		Rp 2.005.793.909,00		Rp 2.094.657.439,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					Rp 1.717.833.250,00		Rp 1.760.187.455,00		Rp 1.776.577.911,00		Rp 1.877.137.195,00		Rp 1.960.468.486,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	25	25	25	Rp 1.717.833.250,00	26	Rp 1.760.187.455,00	27	Rp 1.776.577.911,00	30	Rp 1.877.137.195,00	32	Rp 1.960.468.486,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					Rp 31.512.000,00		Rp 33.402.720,00		Rp 35.507.091,00		Rp 38.063.602,00		Rp 39.700.337,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	25	25	25	Rp 31.512.000,00	27	Rp 33.402.720,00	29	Rp 35.507.091,00	32	Rp 38.063.602,00	33	Rp 39.700.337,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					Rp 64.905.600,00		Rp 65.500.000,00		Rp 74.508.500,00		Rp 90.593.112,00		Rp 94.488.616,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	25	25	25	Rp 64.905.600,00	26	Rp 65.500.000,00	30	Rp 74.508.500,00	35	Rp 90.593.112,00	37	Rp 94.488.616,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					Rp 91.916.360.732,00		Rp 94.973.612.586,60		Rp 101.597.562.507,48		Rp 109.338.705.895,78		Rp 114.215.410.940,31	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 60.650.865.035,00		Rp 62.668.188.586,60		Rp 67.624.292.907,48		Rp 74.871.534.895,78		Rp 78.042.650.840,31	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 60.650.865.035,00	100	Rp 62.668.188.586,60	100	Rp 67.624.292.907,48	100	Rp 74.871.534.895,78	100	Rp 78.042.650.840,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN					Rp 29.713.868.397,00		Rp 30.702.188.000,00		Rp 31.841.149.100,00		Rp 32.310.481.300,00		Rp 33.839.317.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase perumusan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat (%)	100	100	100	Rp 29.713.868.397,00	100	Rp 30.702.188.000,00	100	Rp 31.841.149.100,00	100	Rp 32.310.481.300,00	100	Rp 33.839.317.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					Rp 1.551.627.300,00		Rp 1.603.236.000,00		Rp 2.132.120.500,00		Rp 2.156.689.700,00		Rp 2.333.442.600,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	Rp 1.551.627.300,00	100	Rp 1.603.236.000,00	100	Rp 2.132.120.500,00	100	Rp 2.156.689.700,00	100	Rp 2.333.442.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					Rp 63.780.136.482,00		Rp 65.901.542.714,73		Rp 70.497.856.435,58		Rp 75.869.383.091,99		Rp 79.253.295.497,21	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 39.836.769.782,00		Rp 40.223.310.499,73		Rp 40.887.866.207,98		Rp 42.730.017.068,12		Rp 46.709.323.817,79	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	87	87	88	Rp 39.836.769.782,00	89	Rp 40.223.310.499,73	90	Rp 40.887.866.207,98	91	Rp 42.730.017.068,12	92	Rp 46.709.323.817,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					Rp 23.943.366.700,00		Rp 25.678.232.215,00		Rp 29.609.990.227,60		Rp 33.139.366.023,87		Rp 32.543.971.679,42	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	87	88	89	Rp 23.943.366.700,00	89	Rp 25.678.232.215,00	90	Rp 29.609.990.227,60	90	Rp 33.139.366.023,87	91	Rp 32.543.971.679,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					Rp 20.037.384.401,00		Rp 20.403.808.325,42		Rp 21.837.697.547,82		Rp 23.508.166.221,66		Rp 24.582.398.527,23	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 17.259.483.301,00		Rp 16.111.917.607,72		Rp 17.308.624.732,17		Rp 18.671.447.978,25		Rp 19.677.962.275,63	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 17.259.483.301,00	100	Rp 16.111.917.607,72	100	Rp 17.308.624.732,17	100	Rp 18.671.447.978,25	100	Rp 19.677.962.275,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN					Rp 1.653.479.100,00		Rp 2.634.225.586,08		Rp 2.779.800.877,92		Rp 2.968.623.269,91		Rp 3.010.186.297,78	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	Rp 1.653.479.100,00	100	Rp 2.634.225.586,08	100	Rp 2.779.800.877,92	100	Rp 2.968.623.269,91	100	Rp 3.010.186.297,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					Rp 1.124.422.000,00		Rp 1.657.665.131,62		Rp 1.749.271.937,73		Rp 1.868.094.973,50		Rp 1.894.249.953,82	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	Rp 521.422.000,00	100	Rp 678.571.465,69	100	Rp 706.696.034,92	100	Rp 730.481.337,11	100	Rp 733.388.885,94	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, SDA, infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	Rp 603.000.000,00	100	Rp 979.093.665,93	100	Rp 1.042.575.902,81	100	Rp 1.137.613.636,39	100	Rp 1.160.861.067,88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
5.02 - KEUANGAN					Rp 350.924.008.484,00		Rp 362.699.501.208,06		Rp 386.996.036.391,86		Rp 416.559.077.843,54		Rp 435.182.971.775,97	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 28.134.677.804,00		Rp 31.407.480.554,08		Rp 33.637.839.431,30		Rp 34.893.858.792,89		Rp 34.886.547.246,91	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 28.134.677.804,00	100	Rp 31.407.480.554,08	100	Rp 33.637.839.431,30	100	Rp 34.893.858.792,89	100	Rp 34.886.547.246,91	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					Rp 318.634.540.010,00		Rp 327.199.454.608,98		Rp 348.876.621.234,56		Rp 376.397.279.280,65		Rp 394.918.936.459,06	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	40	40	40	Rp 2.615.170.700,00	40	Rp 9.436.339.140,00	40	Rp 16.972.418.047,00	40	Rp 26.127.677.335,00	40	Rp 31.989.077.782,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan Publik (Persentase)													
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	65,51	70	70		70		70		70		70		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0,1	2	2	Rp 1.478.815.800,00	2	Rp 1.594.253.500,00	2	Rp 1.710.253.500,00	2	Rp 1.827.253.500,00	2	Rp 1.944.253.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	42	45	45		45		45		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.606.642.087,00	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.606.642.087,00	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.606.642.087,00	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.606.642.087,00	Wajar Tanpa Pengecualian	Rp 1.606.642.087,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	Rp 312.451.859.123,00	100	Rp 314.070.569.881,98	100	Rp 328.085.657.600,56	100	Rp 346.324.056.358,65	100	Rp 358.857.313.090,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	100	100	Rp 482.052.300,00	100	Rp 491.650.000,00	100	Rp 501.650.000,00	100	Rp 511.650.000,00	100	Rp 521.650.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					Rp 1.998.290.370,00		Rp 1.998.290.370,00		Rp 1.998.290.370,00		Rp 1.998.290.370,00		Rp 1.998.290.370,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	85	5	5	Rp 1.998.290.370,00	5	Rp 1.998.290.370,00	5	Rp 1.998.290.370,00	5	Rp 1.998.290.370,00	5	Rp 1.998.290.370,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					Rp 2.156.500.300,00		Rp 2.094.275.675,00		Rp 2.483.285.356,00		Rp 3.269.649.400,00		Rp 3.379.197.700,00	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	69,46	70,00	73,00	Rp 1.100.697.800,00	76,00	Rp 1.133.697.800,00	79,00	Rp 1.312.935.256,00	82,00	Rp 1.735.478.500,00	85,00	Rp 1.676.090.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	Rp 452.570.000,00	100	Rp 475.345.375,00	100	Rp 550.497.400,00	100	Rp 788.776.500,00	100	Rp 893.172.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	50	55	60	Rp 603.232.500,00	70	Rp 485.232.500,00	80	Rp 619.852.700,00	90	Rp 745.394.400,00	100	Rp 809.934.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					Rp 8.028.935.721,00		Rp 10.027.803.074,40		Rp 10.697.175.604,71		Rp 11.161.138.308,07		Rp 11.958.991.957,79	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 6.020.485.279,00		Rp 7.713.803.074,40		Rp 8.240.175.604,71		Rp 8.507.138.308,07		Rp 9.254.991.957,79	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 6.020.485.279,00	100	Rp 7.713.803.074,40	100	Rp 8.240.175.604,71	100	Rp 8.507.138.308,07	100	Rp 9.254.991.957,79	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					Rp 2.008.450.442,00		Rp 2.314.000.000,00		Rp 2.457.000.000,00		Rp 2.654.000.000,00		Rp 2.704.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	0	20	20	Rp 938.086.400,00	20	Rp 1.220.000.000,00	20	Rp 1.300.000.000,00	20	Rp 1.350.000.000,00	20	Rp 1.365.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	41,62	60	65	Rp -	70	Rp 75.000.000,00	75	Rp 63.000.000,00	80	Rp 65.000.000,00	80	Rp 70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	60,06	60	60	Rp 553.637.000,00	65	Rp 700.000.000,00	65	Rp 770.000.000,00	70	Rp 920.000.000,00	70	Rp 950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	86	95	96	Rp 516.727.042,00	97	Rp 319.000.000,00	98	Rp 324.000.000,00	99	Rp 319.000.000,00	100	Rp 319.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					Rp 3.039.458.815,00		Rp 1.408.739.955,00		Rp 1.537.010.962,00		Rp 2.005.222.123,00		Rp 1.794.612.083,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					Rp 3.039.458.815,00		Rp 1.408.739.955,00		Rp 1.537.010.962,00		Rp 2.005.222.123,00		Rp 1.794.612.083,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	41,62	60	60	Rp 1.842.229.015,00	65	Rp 666.600.000,00	65	Rp 900.000.000,00	70	Rp 1.200.000.000,00	70	Rp 1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	41,62	60	60	Rp -	65	Rp 84.639.955,00	65	Rp 92.840.552,00	70	Rp 92.671.444,00	70	Rp 100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	20	20	20	Rp 294.779.800,00	20	Rp 300.000.000,00	20	Rp 220.000.000,00	20	Rp 270.000.000,00	20	Rp 280.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	0	20	20	Rp 902.450.000,00	20	Rp 357.500.000,00	20	Rp 324.170.410,00	20	Rp 442.550.679,00	20	Rp 414.612.083,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					Rp 432.846.700,00		Rp 747.287.982,81		Rp 788.585.382,30		Rp 842.107.876,94		Rp 853.942.061,40	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					Rp 432.846.700,00		Rp 574.175.825,54		Rp 605.383.491,59		Rp 651.203.644,41		Rp 612.090.396,26	
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	90	95	95	Rp 432.846.700,00	95	Rp 574.175.825,54	95	Rp 605.383.491,59	95	Rp 651.203.644,41	100	Rp 612.090.396,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					Rp -		Rp 173.112.157,27		Rp 183.201.890,71		Rp 190.904.232,53		Rp 241.851.665,14	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	15	17	18	Rp -	20	Rp 173.112.157,27	22	Rp 183.201.890,71	24	Rp 190.904.232,53	26	Rp 241.851.665,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					Rp 14.264.944.310,00		Rp 14.739.414.002,88		Rp 15.767.416.808,71		Rp 16.968.802.268,82		Rp 17.725.641.696,78	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 12.264.944.310,00		Rp 12.936.790.002,00		Rp 13.878.473.775,00		Rp 14.491.802.323,00		Rp 15.682.357.918,00	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 12.264.944.310,00	100	Rp 12.936.790.002,00	100	Rp 13.878.473.775,00	100	Rp 14.491.802.323,00	100	Rp 15.682.357.918,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					Rp 1.420.000.000,00		Rp 1.263.315.000,00		Rp 1.274.441.656,00		Rp 1.737.009.305,00		Rp 1.415.297.322,00	
Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran	Persentase laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang diselesaikan (%)	70	80	80	Rp 1.420.000.000,00	85	Rp 1.263.315.000,00	85	Rp 1.274.441.656,00	90	Rp 1.737.009.305,00	90	Rp 1.415.297.322,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
maupun proses dan kewenangan														
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					Rp 580.000.000,00		Rp 539.309.000,88		Rp 614.501.377,71		Rp 739.990.640,82		Rp 627.986.456,78	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (%)	71	71	71	Rp 580.000.000,00	73	Rp 539.309.000,88	75	Rp 614.501.377,71	77	Rp 739.990.640,82	79	Rp 627.986.456,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					Rp 62.579.229.267,00		Rp 64.584.190.995,28		Rp 68.928.211.937,30		Rp 74.004.894.188,16		Rp 77.203.062.817,83	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 51.491.170.267,00		Rp 52.320.267.953,38		Rp 57.186.863.568,85		Rp 59.773.069.627,07		Rp 62.237.045.324,15	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 51.491.170.267,00	100	Rp 52.320.267.953,38	100	Rp 57.186.863.568,85	100	Rp 59.773.069.627,07	100	Rp 62.237.045.324,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	92	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	93,77	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	80	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	58,31	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	77,97	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	91,56	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	86.63%	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	92	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	80	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	80	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Rp 769.150.000,00		Rp 909.773.150,00		Rp 824.509.000,00		Rp 1.162.705.900,00		Rp 1.271.028.180,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	85,00	86,00	87,54	Rp 769.150.000,00	88,00	Rp 909.773.150,00	89,50	Rp 824.509.000,00	90,00	Rp 1.162.705.900,00	92,00	Rp 1.271.028.180,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	83,75	84,25	85		86,50		87,25		88		88,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	93,19	80	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	44,03	60	73		75		80		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	6,2	60	80		85		90		92		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	90	91	92		93		94		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	85,00	86,00	87,54		88,00		89,50		90,00		92,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	79,68	80,23	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	87,4	88	88,1		88,2		88,3		88,4		88,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	9,38	100	93		94		95		96		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	99.17%	60	60		70		70		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	89	90	92		94		96		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kewilayahan (%)	75	76,5	78,3		79,9		81,5		83,13		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Rp 7.130.559.000,00		Rp 7.461.141.000,00		Rp 7.564.995.368,45		Rp 7.891.369.545,00		Rp 8.034.686.368,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	85,00	86,00	87,54	Rp 7.130.559.000,00	88,00	Rp 7.461.141.000,00	89,50	Rp 7.564.995.368,45	90,00	Rp 7.891.369.545,00	92,00	Rp 8.034.686.368,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	75	78	80		82		84		86		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	45,98	80	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	13,10	60	70		70		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	82	85	88		90		92		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	70	71	72		73		74		75		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	85,00	86,00	87,54		88,00		89,50		90,00		92,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	85	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	0	65	66		67		68		69		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	0	100	93		94		95		96		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	9.77%	85	87		90		93		95		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	0	0	70		75		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Fasilitasi Kegiatan Desa dan Kelurahan (%)	0	0	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp 511.000.000,00		Rp 697.157.000,00		Rp 589.000.000,00		Rp 960.707.000,00		Rp 1.125.023.930,00	
Meningkatnya penerapan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	85,00	86,00	87,54	Rp 511.000.000,00	88,00	Rp 697.157.000,00	89,50	Rp 589.000.000,00	91,00	Rp 960.707.000,00	92,50	Rp 1.125.023.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	78	80	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	64,63	80	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	0	80	83		85		85		88		88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	0	80	85		88		90		95		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	65	66	67		68		69		70		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	85,00	86,00	87,52		88,25		89,50		90,00		92,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	79,68	80,23	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	70	71	71,5		72		72,5		73		73,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	0	100	93		94		95		96		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	85	86	87		88		89		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	88	89	90		91		92		93		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan keterlibatan Umum (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp 1.295.450.000,00		Rp 1.547.933.850,00		Rp 1.275.702.000,00		Rp 2.036.722.200,00		Rp 2.246.492.920,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	85,00	86,00	87,54	Rp 1.295.450.000,00	88,00	Rp 1.547.933.850,00	89,50	Rp 1.275.702.000,00	90,50	Rp 2.036.722.200,00	91,50	Rp 2.246.492.920,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	n/a	n/a	75		76		78		80		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	81,19	80	85		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	65,27	70	70		75		77		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	79,145	80	82		85		88		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	81	82	83		84		85		86		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	85,00	86,00	87,52		88,25		89,50		90,00		92,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	79,68	80,23	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	72	72,5	73		73,4		74		74,5		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90,91	100	93		94		95		96		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	98.01%	70	75		80		85		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	37	70	80		90		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					Rp 1.381.900.000,00		Rp 1.647.918.041,90		Rp 1.487.142.000,00		Rp 2.180.319.916,09		Rp 2.288.786.095,68	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	85,00	86,00	87,54	Rp 1.381.900.000,00	88,00	Rp 1.647.918.041,90	89,50	Rp 1.487.142.000,00	90,50	Rp 2.180.319.916,09	92,50	Rp 2.288.786.095,68	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	95,59	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	74,48	70	80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	80	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	32,17	60	70		70		70		80		82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	80	85		88		90		92		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75	76	77		78		79		80		81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	85,00	86,50	87,52		88,25		89,50		90,00		92,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	79,68	80,23	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75	75,4	75,5		75,6		75,8		76		76,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	71,43	100	93		94		95		96		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	66.66%	70	70		80		80		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	60,8	83,4	85		88		90		92		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	80	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	85	86,7	88,4		90,2		92		93,8		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					Rp 9.540.778.801,00		Rp 9.858.116.905,46		Rp 11.545.672.858,29		Rp 12.349.191.798,19		Rp 12.855.386.383,54	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 4.915.149.901,00		Rp 4.933.581.606,46		Rp 5.324.992.858,29		Rp 5.126.299.177,85		Rp 5.149.547.195,13	
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	100	100	Rp 4.915.149.901,00	100	Rp 4.933.581.606,46	100	Rp 5.324.992.858,29	100	Rp 5.126.299.177,85	100	Rp 5.149.547.195,13	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					Rp 1.113.774.000,00		Rp 1.287.731.399,00		Rp 1.870.000.000,00		Rp 2.071.342.639,46		Rp 2.066.758.778,03	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	20	20	20	Rp 1.113.774.000,00	20	Rp 1.287.731.399,00	20	Rp 1.870.000.000,00	20	Rp 2.071.342.639,46	20	Rp 2.066.758.778,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					Rp 3.155.628.900,00		Rp 3.030.680.000,00		Rp 3.405.680.000,00		Rp 4.217.356.344,34		Rp 4.700.103.844,14	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	25	10	10	Rp 3.155.628.900,00	10	Rp 3.030.680.000,00	25	Rp 3.405.680.000,00	30	Rp 4.217.356.344,34	35	Rp 4.700.103.844,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					Rp 65.000.000,00		Rp 121.224.780,00		Rp 150.000.000,00		Rp 206.572.613,70		Rp 208.366.212,34	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	17	20	20	Rp 65.000.000,00	20	Rp 121.224.780,00	20	Rp 150.000.000,00	20	Rp 206.572.613,70	20	Rp 208.366.212,34	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					Rp 136.226.000,00		Rp 202.041.300,00		Rp 340.000.000,00		Rp 307.621.022,84		Rp 310.610.353,90	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	35	40	45	Rp 136.226.000,00	50	Rp 202.041.300,00	55	Rp 340.000.000,00	60	Rp 307.621.022,84	75	Rp 310.610.353,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					Rp 155.000.000,00		Rp 282.857.820,00		Rp 455.000.000,00		Rp 420.000.000,00		Rp 420.000.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	87	87	89	Rp 155.000.000,00	92	Rp 282.857.820,00	95	Rp 455.000.000,00	97	Rp 420.000.000,00	100	Rp 420.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					Rp 1.850.855.628.712,99		Rp 1.912.417.376.354,27		Rp 2.045.799.234.575,56		Rp 2.201.677.238.217,05		Rp 2.299.876.045.364,91	

IV.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

IV.2.1 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Oleh sebab itu, IKU merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi SAKIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2030 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi ukuran keberhasilan pada akhir masa jabatan.

Pencapaian IKU Daerah merupakan kontribusi dari indikator tujuan dan indikator sasaran Perangkat Daerah, sedangkan capaian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator kinerja program outcome setiap tahunnya. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Harmoni	Indeks	N/A	6-6,5	6,5-7	7	7-7,5	7-7,5	8	
2	Indeks Harmoni Religius	Indeks	N/A	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7	
3	Pemajuan budaya daerah (%)	%	73	92,62	93,61	94,7	95,54	96,8	98,2	
4	Indeks Pembangunan Manusia	poin	74	74,28 - 74,36	74,65 - 74,91	75,12 - 75,47	75,60 - 76,03	76,08 - 76,6	76,57 - 77,18	
5	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,38	13,39	13,24	13,36	13,47	13,58	13,70	
6	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,14	8,93	9,07	9,20	9,34	9,47	9,61	
7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	71,14	72,88	74,12	76,45	78,16	80,82	82,34	
8	Umur Harapan Hidup	tahun	69,14	69,42	69,52	69,82	70,02	70,32	70,42	
9	Jumlah Kematian Ibu	orang	4	4	3	3	2	1	1	
10	Jumlah Kematian Bayi	orang	70	70	65	60	55	50	40	
11	Jumlah Kematian Balita	orang	3	3	3	3	2	1	1	
12	Prevalensi stunting	%	23,1	21,82	20,53	19,25	17,97	16,68	15,4	
13	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	poin	65,55	66,8	67,9	69	70,1	71,1	72,0	
14	Indeks Pembangunan Gender	poin	90,69	91,29	91,89	92,5	93,1	93,7	94,3	
15	Indeks Perlindungan Anak	poin	64,52 (2023)	67,55	69,07	70,58	72,1	73,61	75,13	
16	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,47	0,526	0,513	0,501	0,488	0,475	0,463	
17	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	N/A	35	37	40	42	44	47	
18	PDRB Perkapita	Juta	145,45	147,32 - 156,52	159,41 - 173,02	176,49 - 203,72	193,58 - 234,41	210,66 - 265,11	230,78 - 282,52	
19	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,12	3,31 - 3,48	3,63 - 3,86	3,95 - 4,24	4,05 - 4,61	4,10 - 4,99	4,20 - 5,37	

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Indeks Inovasi Daerah	poin	49,09	51,19	53,28	55,38	57,48	59,57	61,67	
21	Rasio Gini	rasio	0,262	0,258 - 0,261	0,255 - 0,259	0,252 - 0,257	0,248 - 0,254	0,245 - 0,252	0,242 - 0,250	
22	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	25,99	26,13	26,27	26,40	26,54	26,68	26,82	
23	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	36,85	36,97	37,08	37,20	37,31	37,43	37,54	
24	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,98	2	3,22	4,44	5,66	6,88	8,1	
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,49	66,12	68,45	70,12	71,98	73,22	75,14	
26	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48	2,28-2,35	2,22-2,24	2,15-2,20	2,09-2,16	2,02-2,12	1,96-2,09	
27	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	73,8	74,23	75,12	76,28	77,49	78,68	80,06	
28	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	52,41	52,98	53,32	54,01	54,86	55,28	55,89	
29	Tingkat Inflasi	%	1,24	1,18 - 1,23	1,14 - 1,18	1,10 - 1,14	1,05 - 1,10	1,00 - 1,05	0,95 - 1,00	
30	Tingkat Kemiskinan	%	7,89	7,08 - 7,25	6,97 - 7,18	6,87 - 7,12	6,77 - 7,06	6,67 - 7,00	6,58 - 6,95	
31	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	%	20,57	25,24-31,89	30,32-36,97	35,41-42,06	40,49-47,14	45,57-52,18	50,65-57,24	
32	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,91	4,00-4,20	5,21-5,90	6,1-6,89	7,10-7,90	8,15-8,95	9,20-9,93	
33	Indeks Desa	Angka	55,5	57,34	59,18	61,01	62,85	64,68	66,52	
34	Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)	%	73,03	74,58	75,96	77,52	79,32	81,72	86,43	
35	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	56,33	58,42	60,11	62,33	64,26	66,17	68,69	
36	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,05	77,78	78,99	80,2	82,41	86,62	96,84	

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
37	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak	%	86,73	87,56	88,8	90,05	91,29	92,54	93,78	
38	Indeks Konektivitas	poin	1,44	1,46	1,49	1,52	1,54	1,57	1,58	
39	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	68,82	76,51	76,72	76,93	77,14	77,35	77,57	
40	Indeks Kualitas Air	poin	60,37	74,98	75,18	75,38	75,58	75,78	75,98	
41	Indeks Kualitas Lahan	poin	49,68	71,98	72,01	72,08	72,15	72,22	72,29	
42	Indeks Kualitas Udara	poin	87,02	80,39	80,69	80,99	81,29	81,59	81,89	
43	Indeks Risiko Bencana	poin	131,2	130,89	130,58	130,28	129,97	129,66	129,35	
44	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	67,55	68,12	68,82	69,15	69,92	70,13	70,97	
45	Indeks Profesionalisme ASN	poin	75,8	77,65	79,23	81,43	83,34	85,12	87,78	
46	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,53	4,58	4,6	4,62	4,64	4,66	4,68	
47	Indeks Reformasi Hukum	poin	96,8	97	97,2	97,6	98	98,2	98,4	
48	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	87,08	88,22	90,22	92,44	94,56	96,23	98,12	
49	Indeks Integritas Nasional	poin	63,12	70,12-74,52	70,98-75,3	71,83-76,08	72,69-76,86	73,54-77,64	74,40-78,42	
50	Indeks Transformasi Digital Nasional	poin	50,61	51,50	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75	

Sumber : Dari Berbagai Sumber dan Olahan Bappedalitbang

IV.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Pada bab ini dijabarkan Indikator Kinerja Daerah yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi selama periode RPJMD Tahun 2025–2029. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang jelas dan terukur terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi ini merujuk pada sasaran jangka panjang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025–2045 untuk periode pertama. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam pembangunan manusia, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, maupun penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2025–2029 dirumuskan sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator-indikator ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan, serta memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	73,8	74,23	75,12	76,28	77,49	78,68	80,06
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	11,47	11,46	11,45	11,44	10,92	10,39	9,87
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	93,3	93,78	94,39	95	96,61	97,22	98,84
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	68,82	68,99	69,16	69,33	69,50	69,67	69,84
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	45	46,45	47,9	49,35	50,8	52,25	53,7
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	28247,53	45,75	46,86	47,97	49,08	50,2	51,31
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	76,26	87,5	88,07	88,64	89,21	89,78	90,35
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%		51,92	53,63	56,73	57,43	54,22	54,06
9	Indeks Risiko Bencana	poin	131,2	130,89	130,58	130,28	129,97	129,66	129,35
10	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,42
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,28	1,03	1,01	0,98	0,96	0,93	0,91
12	Rasio Penduduk	%	103,4	102,9	102,74	102,58	102,42	102,26	102,1
13	Kepadatan Penduduk	Orang/m ²	67,05	64,64	65,24	65,83	66,43	67,02	67,62
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,12	3,31 - 3,48	3,63 - 3,86	3,95 - 4,24	4,05 - 4,61	4,10 - 4,99	4,20 - 5,37
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,89	7,08 - 7,25	6,97 - 7,18	6,87 - 7,12	6,77 - 7,06	6,67 - 7,00	6,58 - 6,95
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	145,45	147,32 - 156,52	159,41 - 173,02	176,49 - 203,72	193,58 - 234,41	210,66 - 265,11	230,78 - 282,52

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,48	2,28-2,35	2,22-2,24	2,15-2,20	2,09-2,16	2,02-2,12	1,96-2,09
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	poin	4,01	4,05	4,08	4,1	4,12	4,14	4,15
6	Indeks Gini	rasio	0,235	0,258 - 0,261	0,255 - 0,259	0,252 - 0,257	0,248 - 0,254	0,245 - 0,252	0,242 - 0,250
7	Indeks Pembangunan Manusia	poin	74	74,28 - 74,36	74,65 - 74,91	75,12 - 75,47	75,60 - 76,03	76,08 - 76,6	76,57 - 77,18
8	Umur Harapan Hidup	tahun	69,14	69,42	69,52	69,82	70,02	70,32	70,42
9	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,105 (2023)	0,107	0,108	0,109	0,11	0,111	0,112
10	Prevalensi Stunting	%	23,1	21,82	20,53	19,25	17,97	16,68	15,4
11	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,9	8,93	9,06 - 9,07	9,20 - 9,20	9,33 - 9,34	9,46 - 9,47	9,60 - 9,61
12	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,38	13,13-13,39	13,23-13,24	13,33-13,36	13,43-13,47	13,53-13,58	13,63-13,70
13	Angka Literasi/Numerasi	%							
a	Angka Literasi SD	%	65,39	71	72,45	73,9	75,35	76,8	78,25
b	Angka Literasi SMP	%	69,17	75	76,25	77,5	78,75	80	81,25
c	Angka Numerasi SD	%	54,68	70	71,5	73	74,5	76	77,5
d	Angka Numerasi SMP	%	63,67	75	76,25	77,5	78,75	80	81,25
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	71,14	72,88	74,12	76,45	78,16	80,82	82,34
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,24	10,25	10,26	10,27	10,28	10,29	10,30
16	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	65,98	66,12	66,58	67,24	67,86	68,31	68,63
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	20,57	25,24-31,89	30,32-36,97	35,41-42,06	40,49-47,14	45,57-52,18	50,65-57,24
18	Indeks Harmoni Religius	skor		6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7
19	Persentase penyelesaian konflik SARA	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Pemajuan budaya daerah (%)	%	73	92,62	93,61	94,7	95,54	96,8	98,2
21	Indeks Perlindungan Anak	poin	64,52 (2023)	67,55	69,07	70,58	72,1	73,61	75,13
22	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	poin	65,55	66,8	67,9	69	70,1	71,1	72,4
23	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,46	0,526	0,513 - 0,513	0,501 - 0,500	0,488 - 0,487	0,475 - 0,473	0,463 - 0,460
24	Indeks Zakat	poin	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	0,466	46,24	46,31	46,38	46,45	46,52	46,59
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	25,99	26,13-26,25	26,27-26,51	26,40-26,77	26,54-27,03	26,68-27,29	26,82-27,55
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,24	0,24 - 0,30	0,25 - 0,32	0,27 - 0,34	0,29 - 0,35	0,31 - 0,37	0,33 - 0,39
4	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,0314	0,0315	0,0317	0,0322	0,0329	0,0341	0,0351
5	Rasio Kewirausahaan	%	1,98	2	3,22	4,44	5,66	6,88	8,1
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,49	66,12	68,45	70,12	71,98	73,22	75,14
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	N/A	33,29	34,26	35,25	36,28	37,38	38,15
8	Indeks Inovasi Daerah	poin	49,09	51,19	53,28	55,38	57,48	59,57	61,67
9	Indeks Kapabilitas Inovasi	poin	N/A	1,49	1,64	1,80	2,12	2,38	2,56
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	36,85	36,93 - 36,97	37,01 - 37,08	37,01 - 37,20	37,16 - 37,31	37,24 - 37,43	37,32 - 37,54
11	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	21,36	21,55	21,74	21,93	22,12	22,31	22,5
12	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	poin	73,03	74,58	75,96	77,52	79,32	81,72	86,43
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,05	77,78	78,99	80,2	82,41	86,62	96,84
14	Persentase Desa Mandiri	%	55,5	57,34	59,18	61,01	62,85	64,68	66,52
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,07	0,08	0,1	0,11	0,12	0,14	0,15

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Tingkat Inflasi	%	1,24	1,18 - 1,23	1,14 - 1,18	1,10 - 1,14	1,05 - 1,10	1,00 - 1,05	0,95 - 1,00
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	poin	96,8	97	97,2	97,6	98	98,2	98,4
2	Indeks Pemerintah digital	poin	N/A	1,50	1,58	1,60	1,70	1,80	2
3	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,53	4,58	4,6	4,62	4,64	4,66	4,68
4	Indeks Integritas Nasional	poin	63,12	70,12-74,52	70,98-75,3	71,83-76,08	72,69-76,86	73,54-77,64	74,40-78,42
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	89,03	85	85,25 - 80,75	85,5 - 76,5	85,75 - 72,25	86 - 68	86,25 - 63,75
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	angka	94,66	95,48	96,22	97,84	98,22	99,48	100
8	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,26	3,35	3,39	3,43	3,47	3,51	3,55
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	87,08	88,22	90,22	92,44	94,56	96,23	98,12
10	Kapasitas Air baku	(m3/detik)	NA	0,0025	0,0027	0,0029	0,0031	0,0033	0,0035
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A	1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	85,95	88,92	91,89	94,44	96,98	99,53	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	99,12	99,26	99,40	99,54	99,68	99,82	99,96
3	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	58,73	61.23	63.73	66.23	68.73	71.23	73.73
4	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	52,29	55,19	58,09	60,99	63,89	66,79	69,69

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,3	67,4	68,5	69,6	70,7	71,8	72,9
6	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,13	61,63	63,13	64,63	66,13	67,63	69,13
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	20	21	22	25	35	40	45
8	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	41,89	46,07	50,68	55,75	61,32	67,46	74,20
9	Persentase Gudep Aktif	%	40	45	45	55	60	65	70
10	Rasio Wirausaha Pemuda	%	35	40	45	47	50	55	60
11	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	30	30	35	40	42	45	50
12	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	40	40	45	50	55	55	60
B	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan								
1	Jumlah Kematian Balita	Orang	3	3	3	3	2	1	1
2	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Angka	69,14	69,42	69,52	69,82	70,02	70,32	70,42
3	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	98,23	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Kematian Ibu	Orang	4	4	3	3	2	1	1
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	90	90	90	90	90	90	90
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	23,1	21,8	20,5	19,2	17,9	16,6	15,4
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	12,9	90	93	94	95	95	95
8	Jumlah Kematian Bayi (	Orang	70	70	65	60	55	50	40

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
C	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Teluk Kuantan								
1	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Rumah Sakit	%	84	85	86	87	88	89	90
2	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	59,07	62,56	66,05	69,54	73,03	76,52	80
3	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	85	85	90	90	90	95	95
4	Persentase Area Layanan Kritis yang Terisi Tenaga sesuai Kualifikasi	%	84	85	86	88	89	90	92
5	Persentase Unit Layanan yang Memenuhi SPM RS	%	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97
6	Persentase SDM Kesehatan Bersertifikat Kompetensi	%	74	75	76	78	79	80	81
7	Angka Net Death Rate	Per 1000	25	25	25	25	25	25	25
D	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase Sarana dan Prasarana Bidang Kebinamargaan dalam kondisi baik	%	89,19	90	91,2	92,2	93,2	94,2	95,2
2	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	56,34	57,72	52,18	53,41	54,73	56,14	57,56
3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	38,8	41,3	42,3	43,3	44,3	45,3	46,3
4	Persentase Rumah Tangga bersanitasi	%	88,28	88,4	90,45	90,65	90,85	91,05	91,25
5	Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak	%	11	11,3	13,3	15,3	17,3	19,3	21,3
6	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	-	-	50	52	54	56	58

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	-	-	20	22	24	26	28
8	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Berkualifikasi	%	-	-	90	91	92	93	94
9	Persentase Lahan Pertanian yang dialiri Jaringan Irigasi dengan Baik	%	88,85	92,85	89,05	89,25	89,45	89,65	89,85
10	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam Kondisi Baik	%	-	-	90	91	92	93	94
11	Persentase Peningkatan bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	-	-	80	82	84	86	88
12	Persentase Sarana Pendukung Persampahan dalam kondisi baik	%	-	-	76	77	78	79	80
13	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	-	50	51	52	53	54
E	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	0	60	65	70	75	80	85
2	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24
F	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
G	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah								
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	*	131,2	130,89	130,58	130,28	129,97	129,66	129,35
H	1.06.2.13.0.00.01.0000 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	0	0	24	35	40	66	35
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pembinaan BUMDes dan Kerjasama Desa	%	0	0	20	20	20	20	20
4	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah PSKS Perseorangan Yang Diperdayakan	Orang	105	62	245	263	293	306	331
6	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan desa dan Masyarakat Hukum Adat	%	0	20	20	40	60	80	100
7	Jumlah PSKS Lembaga Yang Diperdayakan	Lembaga	4	5	5	5	5	5	5
I	2.07.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja								

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,24	2,28	2,22	2,15	2,09	2,02	1,96
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,49	66,12	68,45	70,12	71,98	73,22	75,14
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	20,59	25,24	30,32	35,41	40,49	45,57	50,65
J	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	68,82	68,99	69,16	69,33	69,50	69,67	69,84
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	60,37	60,57	60,77	60,97	61,17	61,37	61,57
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,02	87,09	87,16	87,23	87,3	87,37	87,44
4	Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R	%	18,2	30	20,15	22,5	25,5	27,2	30,15
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	49,68	49,98	50,28	50,58	50,88	51,18	51,48
6	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	52,86	70	53,86	53,61	53,32	52,96	52,03
K	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	27	29	96,5	97	97,5	98	98,5
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	5	5	5	10	20	25	30
3	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	2,5	3	5	6	7	8	9
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	0	60	60	62	63	64	65
5	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	2,5	2,6	1,5	2	3	4	5
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100
L	2.14.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,47	0.526	0.513-0.513	0.501-0.500	0.488-0.487	0.475-0.473	0.463-0.460
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	90,69	91,33	93,25	94,8	95,12	96,5	98,45
3	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	65,55	67,12	69,42	71,22	73,84	75,12	77,88
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,52 (2023)	67,55	69,07	70,58	72,1	73,61	75,13
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	67,55	69,12	71,82	73,14	75,28	77,18	79,64
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,84	4,13	3,8	3,22	2,84	2,31	2
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,18	2,16	2,15	2,14	2,12	2,11	2,11
8	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	17,6	16,8	16,1	15,4	14,8	14,2	14,2
M	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	33	33	33	55	65	85	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
N	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	90	90	92	94	95	98	100
2	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	0	0	70	75	80	85	90
3	Indeks Pemerintah Digital	Poin	0	0	1,46	1,66	1,96	2,16	2,26
4	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	65	65	65	65	65	65	65
5	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	%	0	0	60	65	70	75	80
6	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	90	90	90	90	90	90	90
O	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian								
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	20	25	20	20	23	25	27
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	25	30	30	30	30	30	30

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	25	25	25	25	25	25	25
P	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	78	40	40	45	50	55	60
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	92	93	94	95	96
3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	40	40	40	45	50	55	60
Q	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	77,83	79,28	81,98	84	87,14	90,12	94,38
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	0,75	0,77	0,8	0,82	0,84	0,86	0,88
R	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan								
1	Persentase Pengawasan Perairan	%	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	8	8	8	9	9	11,5	13,5
3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	46,46	46,46	46,46	47,42	47,96	48,7	49,45
S	3.26.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	40	43	46	49	51	52	53
2	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	15	25	30	35	50	75	100
3	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	75	85	95	105	120	135	150
4	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	Produk	30	35	40	45	50	55	60
5	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	20	25	30	45	50	55	60
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	30	56	60	70	75	80	95
T	3.27.0.00.0.00.02.0000 - Dinas Perkebunan dan Peternakan								
1	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	Ton	458.643,6 1	467.816,48	477.172,81	486.716,26	496.450,58	506.379,59	516.507,18
2	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	87.560,47	89.311,68	91.097,91	92.919,87	94.778,27	96.673,83	98.606,78
3	Produktivitas Kelapa Sawit	Ton/Ha	2,893	2,950	3,009	3,069	3,13	3,192	3,255
4	Produktivitas Karet	Ton/Ha	1,210	1,364	1,391	1,418	1,446	1,474	1,503
5	Persentase Angka Kematian Ternak	%	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38
6	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4.625.630	4.718.142,6	4.812.505,45	4.908.755,55	5.006.930,66	5.107.069,27	5.209.210,65
7	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	3.353.517	3.420.587	3.488.998	3.558.777	3.629.952	3.702.551	3.776.602
8	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15
9	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	100	20	20	20	20	20	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	20	20	20	20	20	20	20
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	20	20	20	20	20	20	20
U	3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	73,8	74,23	75,12	76,28	77,49	78,68	80,06
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6,14	6,16	6,18	6,20	6,22	6,26	6,28
3	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	5	14,93	15,05	15,42	15,80	16,19	16,58
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0	80	85	90	95	100	100
5	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	16,01	63,80	64,20	65,79	67,40	69,04	70,73
6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	11,47	11,46	11,45	11,44	10,92	10,39	9,87
7	Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	%	18,95	19,90	20,89	21,94	23,03	24,19	25,39
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	%	89,38	89,86	89,86	90,34	90,82	91,30	91,78
9	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	25,30	20	20	20	20	20	20
V	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	96,8	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	jumlah lembaga Sosial dan keagamaan yang dibantu	%	20	20	20	25	30	35	40
3	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,53	4,58	4,6	4,62	4,64	4,66	4,68
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	100	3	66	67	68	69	71
5	Jumlah bantuan sarana dan prasarana keagamaan	%	100	100	65	70	75	80	85
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	87,1	87,1	87,1	87,41	88	88,5	88,9
7	Indek Kematangan Perangkat Daerah	%	43	43,2	43,4	43,6	43,8	43,1	43,12
8	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,8	97	97,2	97,6	98	98,2	98,4
9	Predikat Kepatuhan Ombudsman RI	%	92	92	92	93	94	95	96
10	Indeks Berahlak	%	72	72	74	76	78	80	82
11	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	100	50	52	55	58	58	60
12	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	%	3	3	3	3	3	3	3
13	Skor EKK	%	3.020	3.020	2.095	3.000	3.015	3.020	3.020
W	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD								
1	Indeks Kepuasan Layanan (poin)	%	74	75	76	77	78	79	80
2	Persentase capaian layanan tugas dan fungsi lembaga DPRD kabupaten kuantan singingi	%	94	94	94	95	95	96	96
X	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	-	75	80	82	84	85
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,09	58	60,1	62,2	62,3	66,4	68,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Y	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah								
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8,61	16,04	13,24	12,93	12,77	12,50	12,69
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,08	88,22	90,22	92,44	94,56	96,23	98,12
Z	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	5	5	5	5	5	5	5
AA	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	130,5	200	250	275	300	325	350
AB	6.01.0.00.0.00.01.0000 – Inspektorat								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,082	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	70	80	85	85	85	90	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)
AC	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Camat Cerenti								
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	85	86,5	87,52	88,25	89,78	90,2	92
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86,5	87,52	88,25	89,78	91,2	92
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	86,5	87,52	88,25	89,78	92,2	93
AD	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kantor Camat Benai								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	79	80	84	86	88	90	92
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,75	84,25	85	86,5	87,25	88	88,5
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	78	80	82	84	86	88	90
AE	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Camat Kuantan Hilir								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	86	87	88	89	90	91
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	90	91	92	93	94	95
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	88	90	91	92	93	94	95
AF	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kantor Camat Kuantan Tengah								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	80	100	100	100	100	100	100
AG	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kantor Camat Kuantan Mudik								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88,5	88,5	89	89	89,5	89,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	77,5	77,5	80,5	83,5	85,5	88,5	88,5
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,7	88	88	89	89	90	90
AH	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kantor Camat Singingi								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	80	100	100	100	100	100
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	84	100	100	100	100	100
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	79,145	80	100	100	100	100	100
AI	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kantor Camat Inuman								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	97	90	91	92	93	94	95
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	88	89	90	91	92	93	94
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97	90	91	92	93	94	95
AJ	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kantor Camat Pangean								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85	86,5	87,52	88,25	89,78	92,2	93
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86,5	87,52	88,25	89,78	91,2	92
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	85	86,5	87,52	88,25	89,78	91,2	92
AK	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kantor Camat Logas Tanah Darat								
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	79,68	80,23	80	80	80	80	80
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,08	80,23	85	85	85	85	85
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,55	80,23	80	80	80	80	80
AL	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kantor Camat Gunung Toar								
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	75	76	77	78	79	80	81
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,55	68	69	70	71	72	73

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,08	88	88,5	88,6	88,7	88,8	89
AM	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kantor Camat Hulu Kuantan								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,43	100	93	94	95	96	98
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	9,38	100	93	94	95	96	98
3	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	90,91	100	93	94	95	96	98
AN	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kantor Camat Sentajo Raya								
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	50	85	86	87	88	89	90
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	75	80	85	90	95	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	60	75	80	85	90	95	100
AO	7.01.0.00.0.00.14.0000 - Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang								
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	75,2	78,5	79,5	80	82,5	85,5	90
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,08	88,22	90,22	92,22	94,56	96,23	98,12
AP	7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kantor Camat Pucuk Rantau								
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	76,5	77,2	78	78,5	79	80	80,2
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	88	89	90	91	92	93
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,5	77,2	78	78,5	79	80	80,2
AQ	7.01.0.00.0.00.16.0000 - Kantor Camat Singingi Hilir								
1	indeks pelayanan publik di kecamatan	%	77	80,85	84,7	86,4	88,1	89,8	90,3
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	80	82,4	84,8	87,3	89,9	92,6	95,4
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	77	80,85	84,7	86,4	88,1	89,8	91,7
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	76,5	78,3	79,9	81,5	83,1	84,7

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AR	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	87	87	89	92	95	97	100
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	25	25	10	10	25	30	30
3	Persentase penyelesaian konflik SARA	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi selama 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2030 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam :

1. Kepala Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. DPRD Kabupaten Kuantan Singingi berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RKPD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya.
3. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya.
4. Pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025- 2029, Pemerintah Provinsi Riau wajib menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi **Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi** untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 ini yaitu **Transparansi** : berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*). Transportasi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. **Akuntabilitas** : atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implemementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. **Partisipasi** : pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Provinsi serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
7. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. Evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun.
9. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, dan menjamin pelaksanaan transformasi pada setiap tahapan RPJMD hingga tahun 2030 antar fungsi Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjawab tantangan, permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi maka dilakukan penyusunan Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 adalah ” **BERadat, berdaya saing, SejAhtera dan MAju** ” **BERSAMA MENUJU KUANSING HEBAT.**

Terhadap “Manajemen Resiko” untuk target indikator yang berpotensi tidak tercapai. Misalnya Penurunan intensitas emisi GRK dan indeks blue economy (IBEI). Hal ini disebabkan :

Target penurunan intensitas emisi GRK tidak tercapai.

- Keterbatasan Teknologi Rendah Karbon: Adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor energi, transportasi, dan industri masih terbatas karena biaya investasi yang tinggi.
- Ketergantungan pada Energi Fosil: Porsi energi fosil dalam bauran energi nasional masih dominan sehingga memperlambat transisi ke energi terbarukan.
- Koordinasi Lintas Sektor: Upaya mitigasi GRK memerlukan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kelemahan koordinasi dapat menimbulkan inefisiensi.
- Perubahan Perilaku dan Budaya Konsumsi: Tingkat kesadaran publik terhadap gaya hidup rendah karbon masih rendah.
- Dampak Eksternal: Fluktuasi harga energi dunia dan kondisi geopolitik dapat menghambat percepatan investasi hijau.

Pencapaian peningkatan IBEI tidak optimal.

- Over-eksploitasi Sumber Daya Laut: Praktik penangkapan ikan berlebihan, penggunaan alat tangkap destruktif, serta pencemaran laut berpotensi menurunkan keberlanjutan sumber daya.
- Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Maritim: Rendahnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam sektor perikanan, pariwisata bahari, dan transportasi laut.
- Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum: Lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran di laut (illegal fishing, pencemaran) menurunkan efektivitas tata kelola biru.
- Kesadaran dan Kapasitas Pelaku Usaha: Pelaku usaha kelautan dan perikanan belum sepenuhnya menerapkan prinsip keberlanjutan karena keterbatasan pengetahuan dan akses pembiayaan.
- Kerentanan terhadap Perubahan Iklim: Peningkatan suhu laut, abrasi, dan kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang) menekan indeks keberlanjutan.